

Charting New Horizons: Energizing the Marine Industry

Memetakan Cakrawala Baru:
Memberi Energi pada Industri Kelautan



**20
23**

**Laporan
Tahunan**
Annual
Report

Sanggahan dan Batasan Tanggung Jawab

Disclaimer and Limit of Liability

Referensi dan standar yang digunakan dalam penyusunan Laporan Tahunan PT Pertamina Trans Kontinental tahun 2023 menggunakan parameter dan kriteria standar yang berlaku di Indonesia, tempat dimana Perusahaan melaksanakan kegiatan usahanya. Meskipun bukan emiten atau perusahaan terbuka, Laporan Tahunan ini menggunakan standar yang tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

Laporan Tahunan ini memuat berbagai pernyataan terkait kondisi keuangan, operasi, kebijakan, proyeksi, rencana, strategi, serta tujuan Perusahaan, yang digolongkan sebagai pernyataan ke depan dalam pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku. Pernyataan-pernyataan tersebut memiliki prospek risiko serta ketidakpastian, hingga kemungkinan perbedaan dengan perkembangan yang aktual. Berbagai pernyataan prospektif dalam Laporan Tahunan ini disusun berdasarkan asumsi-asumsi mengenai kondisi terkini, serta proyeksi atas situasi mendatang terkait lingkungan bisnis Perusahaan. PT Pertamina Trans Kontinental tidak dapat menjamin bahwa dokumen-dokumen yang telah dipastikan keabsahannya akan membawa hasil yang pasti.

The references and standards used in the preparation of the 2023 Annual Report of PT Pertamina Trans Kontinental use parameters and standard criteria that apply in Indonesia, where the Company carries out its business activities. Even though it is not an issuer or a public company, this Annual Report uses the standards set out in the Financial Services Authority Regulation No. 29/POJK.04/2016 concerning Annual Reports of Issuers or Public Companies, Circular of the Financial Services Authority No. 16/SEOJK.04/2021 concerning the Form and Content of Annual Reports of Issuers or Public Companies.

This Annual Report contains various statements related to the Company's financial condition, operations, policies, projections, plans, strategies, and objectives, which are classified as forward-looking statements in the implementation of applicable laws and regulations. These statements have prospects of risk and uncertainty, as well as the possibility of differences from actual developments. Various prospective statements in this Annual Report have been prepared based on assumptions regarding current conditions, as well as projections of future situations related to the Company's business environment. PT Pertamina Trans Kontinental cannot guarantee that the documents of which the validity has been confirmed will bring definite results.

Tema dan Kesiambungan Tema

Themes and Its Continuity

2023

Charting New Horizons: Energizing the Marine Industry

**Memetakan Cakrawala Baru:
Memberi Energi pada Industri Kelautan**



PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) merupakan Anak Usaha dari PT Pertamina International Shipping dalam *Subholding Integrated Marine Logistic* memiliki pengalaman dalam bisnis jasa perkapalan, marine, dan logistik dengan area operasional yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, terus bertransformasi dan tumbuh menjadi perusahaan jasa maritim yang terintegrasi dengan skala global. Sebagai salah satu pemain dalam industri pelayaran yang menunjang distribusi migas nasional, PTK berkomitmen memajukan sektor kelautan menuju masa depan yang berkelanjutan dengan memperkuat kontribusi Perusahaan dalam mewujudkan masa depan yang berkelanjutan.

Berbagai inisiatif dilakukan untuk memanfaatkan potensi laut serta beralih ke sumber energi terbarukan, dengan tujuan mendukung pertumbuhan ekonomi maritim yang berkelanjutan dan berkontribusi terhadap pengurangan emisi karbon. Inisiatif mencakup berbagai aspek, termasuk penelitian, pengembangan teknologi, penerapan kebijakan yang berfokus pada industri maritim dan upaya mendukung penerapan program ramah lingkungan dan pengembangan energi baru terbarukan diantaranya dengan uji coba penggunaan solar *cell* pada kegiatan operasional kapal untuk percepatan emisi nol bersih.

Upaya kolaborasi dan kerjasama dengan berbagai elemen, baik antara pemerintah, industri, masyarakat, dan organisasi lainnya telah dilakukan dalam membangun masa depan sektor maritim yang lebih baik untuk. Selain itu PTK juga telah melakukan transformasi serta mengoptimalkan seluruh kekuatan dan sumber daya yang dimiliki. Dengan semangat tersebut, PTK terus berupaya untuk mengimplementasikan tata kelola perusahaan yang baik berikut penerapan nilai-nilai Perusahaan, fokus pada strategi pertumbuhan berkelanjutan, memperhitungkan risiko dalam setiap pengambilan keputusan, didukung oleh SDM profesional guna tercapainya Visi menjadi Perusahaan Jasa *Marine* yang Terintegrasi dengan Skala Global pada Tahun 2026.

PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) is a subsidiary of PT Pertamina International Shipping in the Subholding Integrated Marine Logistic. It has experience in the shipping, marine and logistics services business with operational areas spread all over Indonesia, keeps transforming and growing into an integrated maritime services company on a global scale. As one of the shipping industry performer that supports national oil and gas distribution, PTK is committed to advancing the maritime sector towards a sustainable future by strengthening the Company's contribution in realizing a sustainable future.

PTK undertakes various initiatives to exploit the potential of the sea and switch to renewable energy sources, with the purpose of supporting sustainable maritime economic growth and contributing to reducing carbon emissions. The initiative covers various aspects, including research, technology development, implementation of policies that focus on the maritime industry and efforts to support the implementation of environmentally friendly programs and the development of new renewable energy, including trials of the use of solar cells in ship operational activities to accelerate net zero emissions.

Collaborative and cooperative efforts with various elements, including government, industry, society and other organizations have been carried out in building a better future for the maritime sector. Moreover, PTK also already transformed and optimized all of its strengths and resources. With this spirit, PTK keeps striving to apply good corporate governance along with the implementation of Company values, focus on sustainable growth strategies, take risk into account in every decision made, supported by professional human resources in order to achieve the Vision of becoming an Integrated Marine Services Company on a Global Scale in 2026.



Kesinambungan Tema Theme Continuity

2022

Melaju Menembus Batas, Mewujudkan Keunggulan Berkelanjutan *Sailing Beyond Border for Sustainable Competitive Advantages*



Restrukturisasi *Holding* BUMN Migas yang terjadi sejak tahun 2021 menciptakan sebuah transformasi bernilai tambah bagi penyalaraan peran Perusahaan dalam mewujudkan ketahanan energi nasional. Di bawah *Subholding Integrated Marine Logistics* ("IML"), PTK berupaya menghadirkan layanan jasa terbaiknya dan berupaya melebihi aspirasi pemegang saham dan pemangku kepentingan untuk dapat menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan.

Tema "Berlayar Melebihi Batas untuk Keunggulan Kompetitif yang Berkelanjutan" berupaya menggambarkan perjalanan PTK di sepanjang tahun 2022. Dengan upaya menghadirkan layanan jasa terbaiknya, PTK berharap dapat meningkatkan level kompetensinya dan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan.

The restructuring of SOE Oil and Gas Holdings taking place since 2021 has created a value-added transformation for the alignment of the Company's role in realizing national energy security. Under Integrated Marine Logistics ("IML") Subholding, PTK strives to provide its best services and strives to exceed the aspirations of shareholders and stakeholders to be able to create sustainable added value.

The theme "Sailing Beyond Border for Sustainable Competitive Advantages" seeks to describe the journey of PTK throughout 2022. By providing its best services, PTK hopes to increase its competency level and sustainable competitive advantage.

2021

Mengaktifkan Transformasi Energi: *Repositioning* untuk Masa Depan *Enabling Energy Transformation: Repositioning For The Future*



Pertamina Trans Kontinental ("PTK") terus berusaha menjalankan operasi bisnis dengan senantiasa menerapkan prinsip tata kelola yang baik, kerja sama yang harmonis dengan pemangku kepentingan serta menjaga kelestarian alam. Hal ini seiring dengan komitmen dalam merealisasikan program pengembangan usaha yang dilaksanakan secara konsisten sehingga makin mengokohkan posisi PTK dengan membaiknya kinerja operasional maupun keuangan di tengah kondisi perekonomian yang menantang.

Pertamina Trans Kontinental ("PTK") is committed to run business operations by always adapting the good governance principles, harmonious cooperation with stakeholders and preserve the environment conservation. This commitment is in line with the commitment to drive business development programs, which has been carried out consistently thereby strengthening PTK's position with improved operational and financial performance as well as amidst the challenging economic conditions.



Daftar Isi

Table of Contents

Pendahuluan Introduction



Sanggahan dan Batasan Tanggung Jawab Disclaimer and Limit of Liability	2
Tema dan Kesenambungan Tema Themes and Its Continuity	3
Daftar Isi Table of Contents	5
Langkah Nyata Menuju <i>Green Company</i> Concrete Steps Toward Green Company	8
Kinerja Penting 2023 2023 Performance Highlights	11
Ikhtisar Data Keuangan Penting Key Financial Data Highlights	12
Ikhtisar Operasi, Pemenuhan K3 dan Lingkungan Operational, OHS and Environmental Fulfillment Highlights	15
Ikhtisar Saham Share Highlights	16
Informasi tentang Efek yang Diterbitkan Information on Issued Securities	16
Penghargaan dan Sertifikasi Awards and Certifications	17
Peristiwa Penting Tahun 2023 Events Highlights in 2023	21
PTK di Mata Mereka PTK From Their Point of View	27

Laporan Manajemen Management Report



Laporan Dewan Komisaris Report From the Board of Commissioners	30
Laporan Direksi Report From the Board of Directors	42
Pernyataan Tanggung Jawab Dewan Komisaris untuk Laporan Tahunan 2023 Statement of Responsibility from Board of Commissioners for 2023 Annual Report	54
Pernyataan Tanggung Jawab Direksi untuk Laporan Tahunan 2023 Statement of Responsibility from Board of Directors for 2023 Annual Report	55

Profil Perusahaan Company Profile



Identitas Perusahaan Company Identity	58
Sekilas Perusahaan Company at a Glance	59
Logo Perusahaan Company Logo	60
Visi, Misi, Nilai dan Budaya Perusahaan Vision, Mission, Corporate Value and Culture	61
Kegiatan Usaha dan Bisnis Utama Perusahaan Company Business Activities and Core Business	62
Struktur Organisasi Organizational Structure	67
Profil Dewan Komisaris Profile of the Board of Commissioners	68
Profil Direksi Profile of the Board of Directors	73
Statistik Sumber Daya Manusia Human Resources Statistics	79
Struktur Grup dan Entitas Anak, Entitas Asosiasi Serta Kantor Cabang/Perwakilan Structure of the Group and Subsidiaries, Associates and Branch/Representative Offices	80
Informasi Komposisi Pemegang Saham Information on Shareholders Composition	85
Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal Capital Market Supporting Institution and Profession	86
Keanggotaan Asosiasi Membership in Associations	87
Jaringan Wilayah Operasi Operational Area Network	88
Kronologis Pencatatan Saham Chronology of Share Listing	93
Kronologis Pencatatan Efek Lainnya Chronology of Other Securities Listing	93
Informasi <i>Website</i> Perusahaan Information on Company Website	93



Tinjauan Pendukung Bisnis

Business Support Overview



Sumber Daya Manusia Human Resources	96
Teknologi Informasi Information Technology	107

Analisis dan Pembahasan Manajemen

Management Discussion and Analysis



Tinjauan Umum dan Industri General and Industry Review	116
Tinjauan Operasional per Segmen Operational Review by Segment	119
Sinergi dengan Pertamina Group Synergy with Pertamina Group	125
Rencana Strategis Strategic Plan	126
Aspek Pemasaran Marketing Aspect	128
Analisis Kinerja Keuangan Analysis of Financial Performance	130
Analisis Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Analysis of the Consolidated Statement of Financial Position	130
Analisis Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Analysis of Consolidated Statements of Profit and Loss and Other Comprehensive Income	134
Analisis Laporan Arus Kas Konsolidasian Analysis of the Consolidated Statements of Cash Flows	137
Analisis Rasio Keuangan Analysis of Financial Ratios	138
Pencapaian Key Performance Indicator (KPI) Key Performance Indicator (KPI) Achievement	139
Tingkat Kesehatan Perusahaan Company's Soundness Level	140
Realisasi dan Pencapaian Target Tahun 2023 Target Realization and Achievement in 2023	141
Struktur Modal dan Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal Capital Structure and Management Policy on Capital Structure	145
Kebijakan dan Pembagian Dividen Dividend Policy and Distribution	146
Prospek Usaha dan Rencana Strategis Tahun 2024 Business Prospects and Strategic Plans for 2024	147
Target atau Proyeksi Tahun 2024 Target or Projection for 2024	151
Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal Material Commitment for Capital Goods Investment	154
Realisasi Investasi Barang Modal Realization of Capital Goods Investment	154
Kontribusi kepada Negara Contribution to the State	155
Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Realization of the Use of Public Offering Proceeds	156

Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan Usaha, Akuisisi, dan/ atau Restrukturisasi Utang/ Modal Material Information Regarding Investment, Expansion, Divestment, Business Merger, Acquisition, and/or Debt/Capital Restructuring	156
Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau dengan Pihak Afiliasi/Berelasi Material Information Regarding Transactions Containing Conflicts of Interest and/or with Affiliated/Related Parties	157
Informasi Keuangan yang Mengandung Kejadian Bersifat Luar Biasa dan Jarang Terjadi Financial Information Containing Extraordinary and Rare Events	162
Informasi dan Fakta Material yang Terjadi setelah Tanggal Laporan Akuntan Material Information and Facts Occurring After the Reporting Date	162
Perubahan Kebijakan Akuntansi yang Berdampak Signifikan terhadap Perusahaan Changes in Accounting Policies Significantly Affecting the Company	163
Perubahan Peraturan Perundang-undangan yang Berpengaruh Signifikan terhadap Perusahaan Changes in Laws and Regulations that Have Significant Effects on the Company	163
Informasi Kelangsungan Usaha Information on Business Continuity	165

Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance



Komitmen Perusahaan Dalam Penerapan Praktik Terbaik Tata Kelola Commitment to Implementing Best Governance Practices	166
Peningkatan Kualitas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Improving the Quality of Corporate Governance Implementation	168
Struktur dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Structure and Mechanism	172
Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders	174
Dewan Komisaris Board of Commissioners	180
Direksi Board of Directors	189
Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi Performance Assessment of the Board of Commissioners and the Board of Directors	198
Kebijakan Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Nomination and Remuneration Policy for the Board of Commissioners and the Board of Directors	202
Transparansi Informasi Dewan Komisaris dan Direksi Transparency of the Board of Commissioners and Directors	207
Komite di Bawah Dewan Komisaris Committees under the Board of Commissioners	208

Komite Audit Audit Committee	208
Komite Nominasi Remunerasi dan Manajemen Risiko Remuneration Nomination and Risk Management Committee	215
Komite Investasi Investment Committee	223
Sekretaris Dewan Komisaris Secretary to the Board of Commissioners	229
Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary	232
Internal Audit Internal Audit	237
Sistem Pengendalian Internal Internal Control System	245
Manajemen Risiko Risk Management	251
Perkara Hukum dan Sanksi Administratif Legal Cases and Administrative Sanctions	259
Kode Etik Perusahaan Code of Conduct	260
Kebijakan Anti Korupsi, Anti Suap dan Pengendalian Gratifikasi Anti-Corruption, Anti-Bribery and Gratification Control Policies	264
Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Policy on State Officials Wealth Report (LHKPN)	267
Manajemen Rantai Pasok dan Pengadaan Barang/Jasa Supply Chain and Procurement Management	268
Kebijakan Pemenuhan Hak-Hak Kreditor Policy on Creditors' Rights	272
Program Kepemilikan Saham Oleh Karyawan dan/ atau Manajemen (ESOP/MSOP) Employee and/or Management Stock Ownership Program (ESOP/MSOP)	273

Kebijakan untuk Mencegah Insider Trading Policy on Insider Trading Prevention	273
Sistem Pelaporan Pelanggaran Whistleblowing System	273
Pemenuhan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik Fulfillment of Good Corporate Governance Principles	277

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Social and Environmental Responsibility



Tata Kelola (Governansi) Berkelanjutan Sustainable Governance	280
Inisiatif Program Keberlanjutan Sustainability Program Initiatives	282
Kinerja Ekonomi Economic Performance	283
Kinerja Lingkungan Environmental Performance	283
Kinerja Sosial Social Performance	287

Laporan Keuangan Audit Audited Financial Statements



Laporan Keuangan Audit Audited Financial Statements	297



Langkah Nyata Menuju *Green Company*

Concrete Steps Toward Green Company

Inisiasi *Green Port* Diakui Secara Global

Green Port Initiative is Globally Recognized



PTK sebagai bagian dari *Subholding Integrated Marine Logistics* (SH IML) mendukung komitmen dekarbonisasi untuk mewujudkan komitmen Indonesia mencapai *Net Zero Emission* (NZE) di 2060, sekaligus terus menunjukkan peningkatan level tata kelola perusahaan (*governance*) untuk penguatan ESG dalam menjalankan bisnisnya.

PTK mempunyai visi untuk mengembangkan bisnis ramah lingkungan. Inisiasi-inisiasi PTK terkait lingkungan diantaranya seperti program pengurangan emisi, program reboisasi melalui penanaman bakau, program efisiensi energi, dan lain-lain. Inisiasi baru yang ingin diterapkan PTK adalah penerapan pelabuhan berwawasan lingkungan atau *Green Port*. Melalui inisiasi ini, PTK berusaha untuk menyelaraskan aspek bisnis dan lingkungan sehingga dapat tumbuh menjadi perusahaan yang berkelanjutan. Selain dari aspek lingkungan, pengembangan pelabuhan berwawasan lingkungan juga dapat meningkatkan aspek sosial perusahaan melalui citra baik pelabuhan dengan terbukanya area bersama.

Inisiasi ini didasari oleh tumbuhnya kesadaran bahwa aktivitas Pelabuhan menimbulkan dampak negatif terhadap laut dan daerah sekitar pelabuhan. Maka dari itu, sejalan dengan arahan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman & Investasi, pelabuhan-pelabuhan di Indonesia diharapkan secepatnya mengadopsi konsep *Green Port* dan *Smart Port* (aspek digitalisasi) sehingga dapat bersaing dengan pelabuhan internasional. Penerapan *Green Port* di PTK berjalan seiring dengan implementasi *Environmental, Social, and Governance* (ESG) yang mana dengan optimalisasi ini diharapkan dapat mendorong PTK untuk selalu bersinergi dengan kepedulian lingkungan.

Atas inisiasinya dalam menjalankan operasional *port* (pelabuhan) berbasis lingkungan atau *green port* PTK Raih Penghargaan APSN Green Port Award System 2023 yang diberikan oleh APEC Port Services Network (APSN), organisasi internasional di bawah Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC).

PTK, as part of the Subholding Integrated Marine Logistics (SH IML), supports the decarbonization commitment to realize Indonesia's commitment to achieving Net Zero Emission (NZE) in 2060 while continuing to show an improvement in the level of corporate governance (*governance*) to strengthen ESG in running its business.

PTK has a vision to develop an environmentally friendly business. PTK's initiatives related to the environment include emission reduction programs, reforestation programs through mangrove planting, energy efficiency programs, and others. The new initiative that PTK wants to implement is the implementation of an environmentally friendly port or Green Port. Through this initiative, PTK strives to harmonize business and environmental aspects so that it can grow into a sustainable company. Apart from the environmental aspect, the development of a green port can also improve the social aspect of the Company through the good image of the port with the opening of shared areas.

This initiative is based on the growing awareness that Port activities have a negative impact on the sea and the area around the port. Therefore, in line with the direction of the Coordinating Ministry for Maritime Affairs & Investment, ports in Indonesia are expected to immediately carry the Green Port and Smart Port concepts (digitalization aspects) so that they can compete with international ports. The implementation of Green Port at PTK goes hand in hand with the implementation of Environmental, Social, and Governance (ESG), which through this optimization, is expected to encourage PTK to continuously synergize with environmental concerns.

For its initiation in carrying out environmentally-based port operations or green ports, PTK won the APSN Green Port Award System 2023, presented by the APEC Port Services Network (APSN), an international organization under the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC).

Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Kapal Derek Dwipangga Solar Power Plant (SPP) on Dwipangga Crane Ship



Sejak 19 Oktober 2023, PTK telah memasang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di *Floating Crane* (FC) atau Kapal Derek Dwipangga. Kapal dengan ukuran kapal sepanjang 30 meter dan lebar 14 meter, serta memiliki kapasitas 25 ton ini dioperasikan oleh 6 kru kapal PTK dan beroperasi untuk mendukung bisnis *Refinery Unit VI* Balongan di Cirebon untuk keperluan penyambungan pipa minyak terapung, pelayanan perbaikan *jetty* dan perawatan & perbaikan SBM (*Single Buoy Mooring*).

Hasil dari pemasangan PLTS di FC Dwipangga dalam mendukung upaya PTK menjadi *Green Company*, PLTS tersebut mampu menekan emisi gas buang sebesar 7,74 Ton CO₂e per Bulan atau sekitar 92,95 Ton CO₂e Ton per Tahun serta mampu menghasilkan efisiensi penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar 2,93 Kilo liter (KL) per Bulan.

Upaya tersebut dilakukan oleh PTK guna menekan emisi gas buang karbon dioksida (CO₂) dalam kegiatan operasionalnya. Setelah pemasangan PLTS pertama pada armada kapal Transko Pari 01 dan *Energy Substitution Shore Connection* di PTK Port Plaju. PTK berkomitmen untuk terus melakukan berbagai inovasi untuk turut serta dalam menekan gas buang dalam setiap operasional yang ada di PTK. Inovasi ini sejalan dengan program dekarbonisasi yang diharapkan berdampak langsung pada capaian *Sustainable Development Goals* (SDG's) Poin 17. PTK berkomitmen menjadi *green company* dalam menjalankan bisnis jasa maritim yang terintegrasi. Mulai dari penerapan *green shorebase*, upaya perbaikan lingkungan melalui program Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan (TJSL) atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) Transko Care Environment, serta memaksimalkan penggunaan energi baru dan terbarukan di kegiatan operasional Perusahaan.

Since October 19, 2023, PTK has installed a Solar Power Plant (SPP) on the *Floating Crane* (FC) or Dwipangga Crane Ship. This 30-meter-long and 14-meter-wide ship with a capacity of 25 tons is operated by six PTK ship crews and operates to support the business of *Refinery Unit VI* Balongan in Cirebon for the purposes of connecting floating oil pipes, jetty repair services, and SBM (*Single Buoy Mooring*) maintenance & repair.

As a result of the installation of SPP on FC Dwipangga in supporting PTK's efforts to become a *Green Company*, the SPP can reduce exhaust emissions by 7.74 tons of CO₂e per month or around 92.95 tons of CO₂e per year and can produce efficient use of fuel oil (BBM) of 2.93 kilo liters (KL) per month.

The effort was made by PTK to reduce carbon dioxide (CO₂) exhaust emissions in its operational activities. After the installation of the first SPP on the Transko Pari 01 vessel and *Energy Substitution Shore Connection* at PTK Port Plaju, PTK is committed to continuously making various innovations to participate in reducing exhaust gas in every operation at PTK. This innovation is in line with the decarbonization program, which is expected to have a direct impact on the achievement of Sustainable Development Goals (SDGs) Point 17. PTK is committed to being a green company in running an integrated maritime services business. Starting from the green shore base implementation, environmental improvement efforts through the Transko Care Environment Corporate Social Responsibility (CSR) program, and maximizing the use of new and renewable energy in the Company's operational activities.

Pertamina Trans Kontinental Operasikan Kapal Berbahan Bakar Ganda Transko Rajawali

Pertamina Trans Kontinental Operates Dual-Fuel Vessel Transko Rajawali



Transko Rajawali merupakan kapal tunda atau harbour tug dual fuel milik PTK yang menggunakan bahan bakar *High Speed Diesel* (HSD) dan *Liquefied Natural Gas* (LNG). HSD sebagai pemantik dan dilanjutkan dengan penggunaan bahan bakar LNG ketika kapal sudah berjalan. Penggunaan bahan bakar LNG ini dapat mengurangi biaya operasional kapal serta lebih ramah lingkungan karena dapat mengurangi kadar emisi kapal.

Dibangun pada tahun 2019 oleh galangan PT Dok Warisan Pertama (PaxOcean), kapal ini dioperasikan untuk kegiatan Perta Arun Gas (PAG) selaku salah satu customer PTK. Selain itu, Transko Rajawali merupakan salah satu bukti nyata PTK dalam mengimplementasikan komitmen ESG Pertamina aspek lingkungan. Kapal ini merupakan upaya PTK dalam mendukung target capaian Pertamina untuk menurunkan emisi hingga 29% pada tahun 2030.

Transko Rajawali is PTK's dual-fuel harbor tug that uses High Speed Diesel (HSD) and Liquefied Natural Gas (LNG) fuels. HSD as a lighter and continued with the LNG fuel use when the ship was running. The use of LNG fuel can reduce ship operating costs and is more eco-friendly because it can decrease ship emission levels.

Built in 2019 by the shipyard of PT Dok Warisan Pertama (PaxOcean), this ship is operated for Perta Arun Gas (PAG) activities as one of PTK's customers. In addition, Transko Rajawali is one of PTK's concrete proofs in implementing Pertamina's ESG commitment in the environmental aspect. This ship is PTK's effort to support Pertamina's target to reduce emissions by 29% by 2030.

Dukungan Pertamina Trans Kontinental dalam Refinery Development Master Plan (RDMP)

Pertamina Trans Kontinental Supports Refinery Development Master Plan (RDMP)



Dalam upaya mendukung Kemandirian Energi Nasional khususnya di wilayah Timur Indonesia, PTK kegiatan proyek *Refinery Development Master Plan* (RDMP) Balikpapan.

Salah satu andil PTK adalah *handling Single Point Mooring* (SPM) system transportation and storage service yang bekerja sama dengan perusahaan Global One International Logistics Co., Ltd. dari China dalam rangka pembangunan *New SPM* yang diperuntukkan mendukung aktivitas bongkar.

In an effort to support National Energy Independence, particularly in Eastern Indonesia, PTK is involved in the Balikpapan Refinery Development Master Plan (RDMP) project.

One of PTK's contributions is the handling of the Single Point Mooring (SPM) transportation and storage service system in collaboration with the Global One International Logistics Co., Ltd. from China in the context of building a New SPM intended to support unloading activities.

Pertamina Trans Kontinental Reduksi 74,03 Ton CO₂ per Tahun guna Dukong Karbonisasi

Pertamina Trans Kontinental Reduces 74.03 Ton CO₂ per Year to Support Carbonization



PTK mereduksi 74.03 ton CO₂ melalui penerapan program dekarbonisasi di operasional perusahaan adalah bentuk bukti nyata komitmen PTK untuk turut serta mendorong pengembangan bisnis *green energy* di lini jasa maritim.

Tidak hanya itu, implementasi program dekarbonisasi ini juga menjadi salah satu inovasi teknologi PTK berupa *monitoring systems* PLTS berbasis *digital realtime*, yang memungkinkan pekerja dapat melakukan monitoring melalui *dashboard* berbasis android dengan aplikasi FusionSolar.

PTK berkomitmen untuk turut serta mendorong pengembangan bisnis *green energy* di lini jasa maritim yang terintegrasi terutama di tiga segmen bisnis PTK. Program ini diharapkan dapat berdampak langsung pada capaian *Sustainability Development Goals* (SDGs) poin 17 yaitu mengambil tindakan sesegera mungkin untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.

PTK's reduction of 74.03 tons of CO₂ through the decarbonization program implementation in the Company's operations is concrete proof of PTK's commitment to participating in encouraging the development of a green energy business in maritime services.

Moreover, the decarbonization program implementation is also one of PTK's technological innovations in the form of real-time digital-based SPP monitoring systems, which allow workers to monitor through an Android-based dashboard with the FusionSolar application.

PTK is committed to participating in encouraging the development of green energy business in the integrated maritime service line, specifically in PTK's three business segments. This program is expected to have a direct impact on the achievement of Sustainability Development Goals (SDGs) point 17, namely taking immediate action to face climate change and its impact.

Kinerja Penting 2023

2023 Performance Highlights

Laba Tahun Berjalan
Profit for The Year

Rp1,05

triliun trillion



Pendapatan Usaha
Revenue

Rp6,75

triliun trillion



Total Aset
Total Assets

Rp9,02

triliun trillion



Total Ekuitas
Total Equity

Rp4,64

triliun trillion



Jumlah SDM
Number of HR

3.703

Pegawai Employee



Penyaluran Dana CSR
CSR Funds Disbursement

Rp2,4

miliar billion



Dekarbonisasi mereduksi
Decarbonization reduces

74,03

ton CO₂ ton CO₂



Skor Assessment GCG
GCG Assessment Score

88,835%



Ikhtisar Data Keuangan Penting

Key Financial Data Highlights

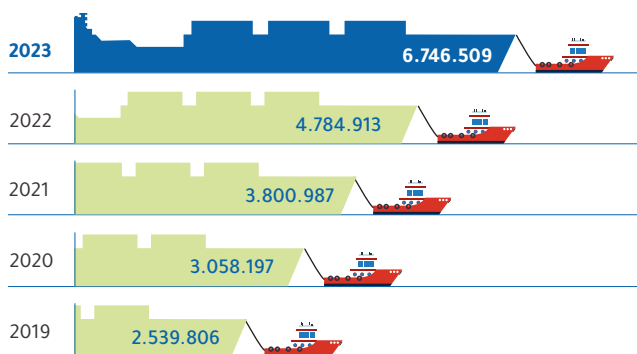
Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian (Rp juta)

Consolidated Profit or Loss and Other Comprehensive Income (Rp million)

Uraian Description	2023	2022	2021	2020	2019
Pendapatan usaha Revenue	6.746.509	4.784.913	3.800.987	3.058.197	2.539.806
Beban pokok pendapatan Cost of revenue	(4.153.993)	(3.136.987)	(2.688.852)	(2.181.550)	(1.859.832)
Laba bruto Gross profit	2.592.516	1.647.926	1.112.135	876.647	679.974
Beban umum dan administrasi General and administrative expenses	(1.161.113)	(649.316)	(458.185)	(318.096)	(288.144)
(Beban)/pendapatan lain-lain, neto Other (expenses)/income, net	(53.526)	25.531	25.543	(26.955)	35.303
Pendapatan keuangan Finance income	46.690	23.565	6.597	15.075	8.406
Beban keuangan Finance costs	(97.270)	(99.799)	(54.172)	(58.860)	(72.965)
Bagian atas laba bersih ventura bersama Share in profit of a joint venture	30.925	25.446	28.045	22.283	30.403
Beban pajak final Final tax expense	(11.894)	(18.499)	(17.723)	(26.164)	(18.816)
Laba sebelum pajak penghasilan Profit before income tax	1.346.328	954.854	642.240	483.930	374.161
Beban pajak penghasilan Income tax expense	(294.834)	(221.826)	(111.701)	(60.553)	(79.163)
Laba tahun berjalan Profit for the year	1.051.494	733.028	530.539	423.377	294.998
Jumlah (rugi)/penghasilan komprehensif lain Total other comprehensive (loss)/income	(18.688)	20.683	15.527	(9.644)	(19.136)
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan Total comprehensive income for the year	1.032.806	753.711	546.066	413.733	275.862
EBITDA	2.228.509	1.691.788	1.111.055	823.547	634.089

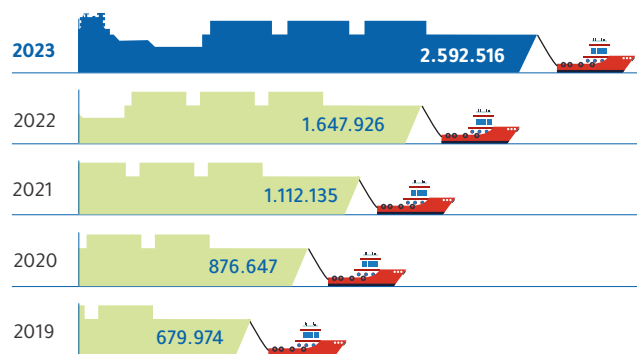
Grafik Pendapatan Usaha (Rp juta)

Chart of Revenue (Rp million)



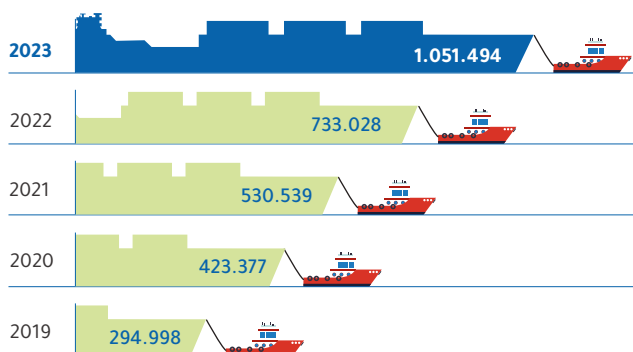
Grafik Laba Bruto (Rp juta)

Chart of Gross Profit (Rp million)



Grafik Laba Tahun Berjalan (Rp juta)

Chart of Profit for the Year (Rp million)



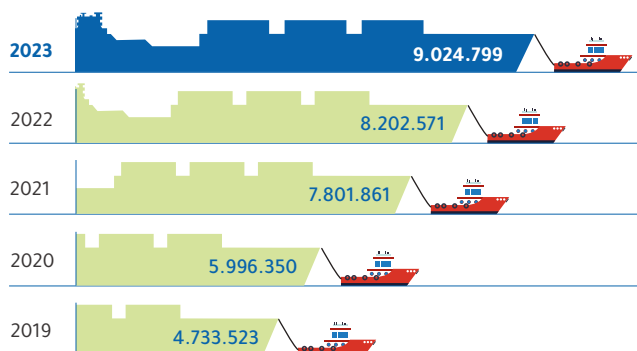
Posisi Keuangan Konsolidasian (Rp juta)

Consolidated Financial Position (Rp million)

Uraian Description	2023	2022	2021	2020	2019
Aset Lancar Current Assets	4.668.038	3.811.707	3.373.379	2.160.035	1.778.646
Aset Tidak Lancar Non-current Assets	4.356.761	4.390.864	4.428.482	3.836.315	2.954.877
Jumlah Aset Total Assets	9.024.799	8.202.571	7.801.861	5.996.350	4.733.523
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	3.548.308	3.613.513	3.133.013	2.320.665	1.351.807
Liabilitas Jangka Panjang Non-current Liabilities	836.106	981.479	1.219.734	1.096.086	1.039.575
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	4.384.414	4.594.992	4.352.747	3.416.751	2.391.382
Jumlah Ekuitas Total Equity	4.640.385	3.607.579	3.449.114	2.579.599	2.342.141
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	9.024.799	8.202.571	7.801.861	5.996.350	4.733.523

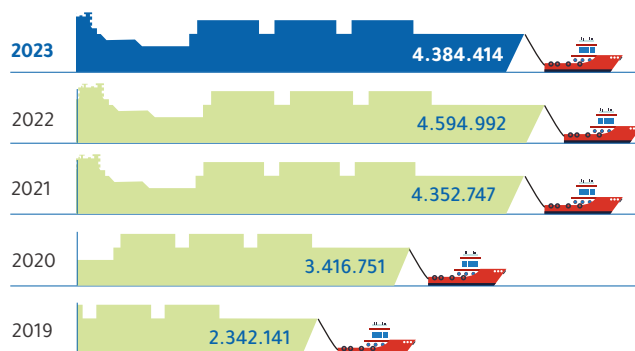
Grafik Jumlah Aset (Rp juta)

Chart of Total Assets (Rp million)



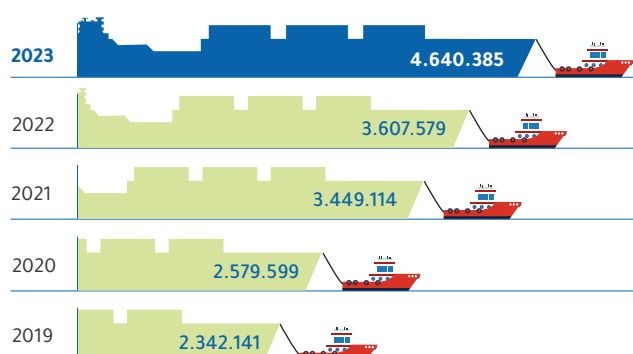
Grafik Jumlah Liabilitas (Rp juta)

Chart of Total Liabilities (Rp million)



Grafik Ekuitas (Rp juta)

Chart of Equity (Rp million)



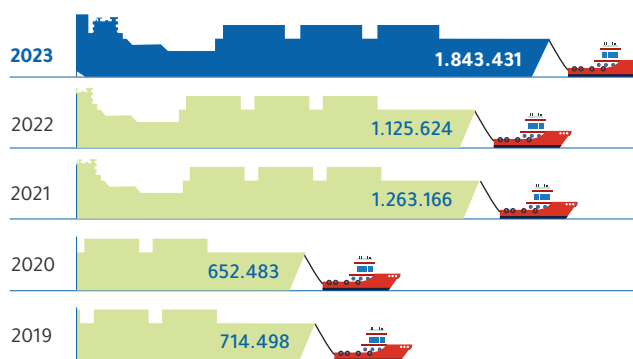
Arus Kas Konsolidasian (Rp juta)

Consolidated Cash Flows (Rp million)

Uraian Description	2023	2022	2021	2020	2019
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi Net cash flows provided by operating activities	1.539.594	1.367.580	1.291.616	604.669	427.195
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi Net cash flows used in investing activities	(101.859)	(219.767)	(660.338)	(733.156)	(130.796)
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan Net cash flows used in financing activities	(727.361)	(1.290.043)	(23.272)	55.534	(130.282)
Efek perubahan nilai kurs pada kas dan setara kas Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents	7.433	4.688	2.677	10.938	(12.427)
Kenaikan/(penurunan) bersih kas dan setara kas Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents	717.807	(137.542)	610.683	(62.015)	153.690
Kas dan setara kas pada awal tahun Cash and cash equivalents at the beginning of the year	1.125.624	1.263.166	652.483	714.498	560.808
Kas dan setara kas pada akhir tahun Cash and cash equivalents at the end of the year	1.843.431	1.125.624	1.263.166	652.483	714.498

Grafik Kas dan Setara Kas (Rp juta)

Chart of Cash and Cash Equivalents (Rp million)



Rasio-rasio Keuangan

Financial Ratios

Uraian Description	2023	2022	2021	2020	2019
Rasio Likuiditas (%) Liquidity Ratio (%)					
Rasio kas Cash ratio	52,01	31,20	40,32	28,12	52,90
Rasio Lancar Current ratio	131,56	105,48	107,67	95,92	131,58
Rasio Solvabilitas (%) Solvency Ratio (%)					
Jumlah modal sendiri terhadap total aset Total own capital to total assets	51,42	43,98	44,21	43,02	49,48
Rasio liabilitas terhadap ekuitas Debt to equity ratio	94,48	127,37	126,20	132,45	102,10
Rasio liabilitas terhadap aset Debt to assets ratio	48,58	56,02	55,79	56,98	50,52
Rasio Profitabilitas (%) Profitability Ratio (%)					
Rasio laba bersih terhadap aset Return on assets	11,65	8,94	6,80	7,06	6,23
Rasio laba bersih terhadap ekuitas Return on equity	29,30	25,50	18,18	19,64	7,32
Imbalan investasi Return on investment	24,83	20,42	14,59	13,73	13,57
Margin laba bruto Gross profit margin	38,43	34,44	29,26	18,26	14,13
Margin laba bersih Net profit margin	15,59	15,32	13,96	13,84	10,64
Rasio Aktivitas Activity Ratio					
Rata-rata periode penagihan piutang (hari) Average accounts receivable collection period (day)	66	100	72	118	85
Perputaran aset (%) Asset turnover (%)	74,93	59,33	50,47	50,98	60,14

Ikhtisar Operasi, Pemenuhan K3 dan Lingkungan

Operational, OHS and Environmental Fulfillment Highlights

Ikhtisar Pendapatan per Segmen (Rp juta)

Revenue by Segment Highlights (Rp million)

Uraian Description	2023	2022	2021	2020	2019
Shipping Activities	2.657.404	2.019.115	1.851.164	1.501.039	1.232.311
Marine Services	3.712.632	2.435.771	1.652.735	1.223.902	956.819
Logistics Services	381.473	330.026	297.088	333.256	350.676
Jumlah Pendapatan Usaha Total Revenue	6.746.509	4.784.913	3.800.987	3.058.197	2.539.806

Ikhtisar Operasi

Operational Highlights

Uraian Description	Satuan Unit	2023	2022	2021
Shipping Activities				
Armada Kapal Milik Owned Ships	unit	369	369	344
Commission Days Kapal Milik Commission Days of Owned Ship	hari day	118.344	112.270	83.281
Commission Days Kapal Back-to-back Commission Days of Back-to-back Ship	hari day	21.395	19.664	8582
Commercial Days Kapal Milik Commercial Days of Owned Ship	hari day	121.916	116.661	82.883
Marine Services				
Keagenan Tanker Pihak Ketiga Third Party Tanker Agency	call	3.385	2.282	2.194
Keagenan Charter Milik Pertamina Pertamina Chartered Agency	call	21.840	22.403	20.425
Keagenan Umum General Agency	call	3.034	5.505	5.833
Logistics Services*				
Cargo Handling	ton	346.887	304.063	
Vessel Berthing	call	10.797	2.258	
Cover Storage	m ²	356.926	346.935	
Open Storage	m ²	849.300	744.428	
Waste Management	ton	5.674	2.984	

* Bisnis dimulai pada tahun 2022. Business commenced in 2022

Ikhtisar K3 dan Lingkungan serta Ketenagakerjaan

OHS, Environment, and Employment Highlights

Uraian Description	Satuan Unit	2023	2022	2021	2020	2019
K3 dan Lingkungan OHS and Environment						
Number of Accident (NOA)	kejadian incident	-	-	1	-	-
Fatalitas Fatality	kejadian incident	-	-	1	-	-
Tumpahan Minyak Oil Spills	kejadian incident	-	-	-	-	-
Jam Kerja Selamat Safe Working Hours	jam hours	8.788.200	1.112.160*	6.326.040	7.178.840	6.271.064
Ketenagakerjaan Employment						
Jumlah Pekerja Total Employees	orang person	3.703	3.978	1.798	898	668

* Dari kasus LTI 7 Desember 2022 From LTI case on December 7, 2022

Ikhtisar Saham

Share Highlights

Jumlah Saham dan Pemegang Saham serta Informasi Aksi Korporasi

Number of Shares and Shareholders and Information on Corporate Actions

Per 31 Desember 2023, jumlah saham Perusahaan terbagi 1.234.737 lembar saham seri A dan 819 lembar saham seri B dimiliki oleh PT Pertamina International Shipping atau 99,999% sedangkan sebanyak 10 lembar saham seri A atau 0,001% dimiliki oleh PT Pertamina Pedeve Indonesia. Hingga akhir tahun 2023, Perusahaan tidak melakukan penawaran saham umum kepada publik/masyarakat.

As of December 31, 2023, the Company's shares are divided into 1,234,737 series A shares and 819 series B shares owned by PT Pertamina International Shipping or 99.999%, while 10 series A shares or 0.001% are owned by PT Pertamina Pedeve Indonesia. Until the end of 2023, the Company did not exercise public offering of shares to the public.

Dividen Saham Tunai

Cash Stock Dividends

Berdasarkan persetujuan yang diberikan oleh pemegang saham pada Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Tahunan Tahun Buku 2022 yang diselenggarakan pada tanggal 12 Juni 2023, pemegang saham menetapkan penggunaan Laba Perseroan Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), dengan perincian sebagai berikut:

1. Menyetujui tidak dilakukan pembagian Dividen kepada Pemegang Saham.
2. Menetapkan Cadangan Wajib senilai 100% dari Laba Bersih Tahun 2022 sebesar AS\$47.479.154 (nilai penuh) atau setara dengan Rp733,03 Miliar yang dialokasikan dari Saldo Laba yang belum ditentukan penggunaannya.

Based on the approval given by the shareholders at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders ("GMS") held on June 12, 2022, the shareholders determined the appropriation of the Company's profit for the fiscal year 2022 (two thousand twenty-two), with the following details:

1. Approved Not to distribute dividends to Shareholders.
2. Set the Mandatory Reserve at 100% of the net profit after tax for 2022, amounting to US\$47,479,154 (the full amount), or its equivalent of Rp733,03 Billion, which was allocated from the Unappropriated Retained Earnings.

Ikhtisar tentang Efek yang Diterbitkan

Information on the Issue of Securities

Hingga akhir tahun 2023, Perusahaan tidak menerbitkan efek obligasi maupun efek lainnya.

Up to the end of 2023, the Company did not issue bonds or other securities.

Penghargaan dan Sertifikasi

Awards and Certifications

Penghargaan Awards

Sepanjang Tahun 2023, berbagai penghargaan diterima oleh PTK yaitu: Throughout 2023, various awards were received by PTK, namely:



Penghargaan kepada Direktur Utama PT Pertamina Trans Kontinental, Nepos MT Pakpahan kategori *Global Youth Leadership Award* pada ajang *Global Youth Leadership Summit & Award 2023* di Dubai, United Arab Emirates pada tanggal 18 Maret 2023.

Award to the President Director of PT Pertamina Trans Kontinental, Nepos MT Pakpahan, in the Global Youth Leadership Award category at the Global Youth Leadership Summit & Award 2023 in Dubai, United Arab Emirates, on March 18, 2023.



Penghargaan sebagai "Top CEO in Service Excellence" dalam forum *Indonesia Most Popular CEO Awards 2023* yang diselenggarakan oleh Iconomics pada tanggal 6 April 2023.

Awarded as "Top CEO in Service Excellence" in the Indonesia Most Popular CEO Awards 2023 forum organized by Iconomics on April 6, 2023.



Penghargaan kategori "Best CSR in Marine Logistics Sector Industry 2023" dalam Ajang *Indonesia Best CSR Awards 2023* yang diadakan oleh Media The Iconomics dan Axia Research pada tanggal 23 Mei 2023.

Award for the "Best CSR in Marine Logistics Sector Industry 2023" category in the Indonesia Best CSR Awards 2023 held by the Iconomics Media and Axia Research on May 23, 2023.



Penghargaan *Gold* untuk Gugus I Prove Transkoverse pada ajang *Annual Pertamina Quality (APQ) Award 2023*. Gold Award for Cluster I Prove Transcoverse at the Annual Pertamina Quality (APQ) Award 2023.



Penghargaan *Gold* untuk Gugus PC Prove Semongko pada ajang *Annual Pertamina Quality (APQ) Award 2023*. Gold Award for Cluster PC Prove Semongko at the Annual Pertamina Quality (APQ) Award 2023.



Penghargaan *Silver* untuk Gugus PC Prove Fame Dispersant pada ajang *Annual Pertamina Quality (APQ) Award 2023*. Silver Award for Cluster PC Prove Fame Dispersant at the Annual Pertamina Quality (APQ) Award 2023.





Penghargaan *The Best HSE Team 2023* untuk kategori *Oil & Gas Industries* dalam ajang *Health, Safety & Environment (HSE) Indonesia Awards 2023* diberikan oleh HSE Magazine bekerjasama dengan DK3N (Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional) pada tanggal 16 Juni 2023.

The Best HSE Team 2023 award for the Oil & Gas Industries category in the Health, Safety & Environment (HSE) Indonesia Awards 2023 was given by HSE Magazine in collaboration with DK3N (National Council for Occupational Safety and Health) on June 16, 2023.



Penghargaan *The Best Innovation For HSE 2023* kategori *Oil & Gas Industries* dalam ajang *Health, Safety & Environment (HSE) Indonesia Awards 2023* diberikan oleh HSE Magazine bekerjasama dengan DK3N (Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional) pada tanggal 16 Juni 2023.

The Best Innovation For HSE 2023 award in the Oil & Gas Industries category in the Health, Safety & Environment (HSE) Indonesia Awards 2023 was given by HSE Magazine in collaboration with DK3N (National Council for Occupational Safety and Health) on June 16, 2023.



Penghargaan *Excellence of The Year 2023* untuk Direktur Utama PTK Nepos MT Pakpahan dalam ajang *Health, Safety & Environment (HSE) Indonesia Awards 2023* diberikan oleh HSE Magazine bekerjasama dengan DK3N (Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional) pada tanggal 16 Juni 2023.

The Excellence of the Year 2023 award for the President Director of PTK, Nepos MT Pakpahan, in the Health, Safety & Environment (HSE) Indonesia Awards 2023 was given by HSE Magazine in collaboration with DK3N (National Council for Occupational Safety and Health) on June 16, 2023.



Penghargaan *Best Overall Digital Innovation and Achievement* dalam ajang *Indonesia Digital Innovation and Achievement (IDIA) Awards 2023* yang diselenggarakan oleh Business Asia Magazine pada Kamis di Jakarta Pusat dan didukung oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tanggal 8 November 2023.

Best Overall Digital Innovation and Achievement Award in the Indonesia Digital Innovation and Achievement (IDIA) Awards 2023, organized by Business Asia Magazine on Thursday in Central Jakarta and supported by the Ministry of Communication and Informatics on November 8, 2023.



Penghargaan *Best Digital GCG and IoT Implementation 2023 In Maritime Logistic* dalam ajang *Indonesia Digital Innovation and Achievement (IDIA) Awards 2023* yang diselenggarakan oleh Business Asia Magazine pada Kamis di Jakarta Pusat dan didukung oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tanggal 8 November 2023.

Best Digital GCG And IoT Implementation 2023 In Maritime Logistics Award in the Indonesia Digital Innovation and Achievement (IDIA) Awards 2023, organized by Business Asia Magazine on Thursday in Central Jakarta and supported by the Ministry of Communication and Informatics on November 8, 2023.



Penghargaan kategori *Best Chief Executive Officer (CEO) Indonesia Digital Innovation and Achievement of The Year 2023* untuk Direktur Utama PTK, I Ketut Laba dalam ajang *Indonesia Digital Innovation and Achievement (IDIA) Awards 2023* yang diselenggarakan oleh Business Asia Magazine pada Kamis di Jakarta Pusat dan didukung oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tanggal 8 November 2023.

The Best Chief Executive Officer (CEO) award of the Indonesia Digital Innovation and Achievement of the Year 2023 for the President Director of PTK, I Ketut Laba, in the Indonesia Digital Innovation and Achievement (IDIA) Awards 2023, organized by Business Asia Magazine on Thursday in Central Jakarta and supported by the Ministry of Communication and Informatics on November 8, 2023.



Penghargaan tingkat Asia Pasifik atas inisiasi PTK dalam menjalankan operasional port (pelabuhan) berbasis lingkungan atau *green port*, diberikan oleh APEC Port Services Network (APSN), organisasi internasional di bawah *Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC) pada tanggal 2 November 2023.

The Asia-Pacific level award for PTK's initiation in running green port operations was given by the APEC Port Services Network (APSN), an international organization under the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), on November 2, 2023.



Direktur Keuangan & Sumber Daya Manusia ("SDM") PT Pertamina Trans Kontinental ("PTK"), Afan Aftory memperoleh penghargaan Indonesia *Best Chief Financial Officer* ("CFO") 2023. Penghargaan ini adalah bentuk apresiasi kepada CFO atau Direktur Keuangan terbaik di Indonesia yang diselenggarakan oleh Majalah SWA ini dilaksanakan pada Rabu, 4 Oktober 2023.

The Director of Finance & Human Resources ("HR") of PT Pertamina Trans Kontinental ("PTK"), Afan Aftory, received the Indonesia *Best Chief Financial Officer* ("CFO") 2023 award. This award is a form of appreciation to the best CFO or Director of Finance in Indonesia, organized by SWA Magazine and held on Wednesday, October 4, 2023.

Sertifikasi Certifications

Sertifikasi standar *International Organization for Standardization* atau "ISO" adalah suatu bukti bahwa perusahaan sudah memenuhi standar yang ditetapkan dalam Manajemen ISO. PTK telah memenuhi beberapa sertifikasi sebagai berikut:

- ISO 9001:2015: *Quality Management System*;
- ISO 45001:2018: *Occupational Health & Safety Management System*;
- ISO 14001:2015: *Environmental Management System*;
- ISO/IEC 27001:2013 : *Information Security Management System*;
- ISO 37001:2016: *Anti Bribery Management System*.

International Organization for Standardization or "ISO" standard certification is proof that the Company has met the standards set in ISO Management. PTK has fulfilled several certifications as follows:

- ISO 9001:2015 : *Quality Management System*;
- ISO 45001:2018 : *Occupational Health & Safety Management System*;
- ISO 14001:2015 : *Environmental Management System*;
- ISO/IEC 27001:2013 : *Information Security Management System*;
- ISO 37001:2016 *Anti Bribery Management System*.





ISO 9001:2015
Quality Management System

Sistem Manajemen PTK telah menerapkan Sistem Manajemen yang berorientasi menjaga mutu dengan memastikan organisasi memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan secara konsisten. PTK's Management System has implemented a Management System oriented towards maintaining quality by ensuring the organization understands and meets customer needs consistently.

Badan Sertifikasi Certification Body
RINA
Penerbitan pertama First Issue
19 Desember 2016 December 19, 2016
Berlaku hingga Effective Until
18 Desember 2025 December 18, 2025



ISO 45001:2018
Occupational Health & Safety Management System

Sistem Manajemen PTK telah menerapkan Sistem Manajemen yang mendukung terciptanya keselamatan dan kesehatan kerja sehingga dapat mengelola aspek kesehatan dan keselamatan kerja (K3); tempat kerja yang sehat dan aman; dan perlindungan pekerja dengan baik dan benar.

PTK's Management System has implemented a Management System that supports the creation of occupational safety and health so that it can manage aspects of occupational health and safety (K3): a healthy and safe workplace; and worker protection properly and correctly.

Badan Sertifikasi Certification Body
RINA
Penerbitan pertama First Issue
13 November 2014 November 13, 2014
Berlaku hingga Effective Until
12 November 2026 November 12, 2026



ISO 9001:2015
Environmental Management System

Sistem Manajemen PTK telah menerapkan Sistem manajemen Lingkungan yang mengelola permasalahan terkait dengan lingkungan (pencemaran, penggunaan sumber daya/energi, pelestarian lingkungan, dan lain-lain) untuk membantu upaya pelestarian lingkungan.

PTK's Management System has implemented an Environmental Management System that manages issues related to the environment (pollution, resource/energy use, environmental conservation, etc.) to assist in environmental conservation efforts.

Badan Sertifikasi Certification Body
RINA
Penerbitan pertama First Issue
07 November 2014 November 7, 2014
Berlaku hingga Effective Until
06 November 2026 November 6, 2026



Sertifikat ISO 37001:2016
ISO 37001:2016 certificate

Sertifikasi verifikasi kesesuaian Sistem Manajemen Anti Penyuapan ("SMAP") sesuai dengan standar internasional. Verification Certification in conformity with the Anti-Bribery Management System ("SMAP") according to international standards.

Badan Sertifikasi Certification Body
TÜV NORD Indonesia
Penerbitan pertama First Issue
28 Desember 2021 December 28, 2021
Berlaku hingga Effective Until
27 Desember 2024 December 27, 2024



Sertifikat ISO/IEC 27001:2013
ISO 27001:2013 certificate

Sertifikasi verifikasi kesesuaian Sistem Manajemen Keamanan Informasi ("SMKI") sesuai dengan standar internasional. Verification Certification in conformity with the Information Security Management Systems ("ISMS") according to international standards.

Badan Sertifikasi Certification Body
PT Intertek Utama Services
Penerbitan pertama First Issue
04 July 2023 July 4, 2023
Berlaku hingga Effective Until
31 Oktober 2025 October 31, 2025



Peristiwa Penting Tahun 2023

Event Highlights in 2023



10

Januari
January

PTK mengadakan *Workshop "Safety Culture and Leadership Shifting from Proactive to Generative HSE Culture"*.

PTK held a Workshop on "Safety Culture and Leadership Shifting from Proactive to Generative HSE Culture".



24

Januari
January

PTK melakukan penandatanganan kerjasama dengan PT Pelindo Jasa Maritim (PJM) dalam rangka meningkatkan pelayanan jasa maritim.

PTK signed a cooperation agreement with PT Pelindo Jasa Maritim (PJM) in order to improve maritime services.



1-4

Februari
February

Dewan Komisaris PTK melaksanakan kunjungan lapangan ke wilayah kerja Operasi dan Region I (Palembang). Kegiatan ini bertujuan utama dari kunjungan lapangan ke wilayah kerja Region I ini untuk memberikan motivasi kepada pekerja agar mengembangkan potensi-potensi dalam memenuhi target yang telah ditargetkan.

PTK's Board of Commissioners conducted field visits to the Operations and Region I (Palembang) working areas. The main purpose of this field visit to the Region I working area is to motivate workers to develop their potential in meeting the set targets.



9

Februari
February

PTK mengadakan *Sharing Synergy* dengan topik "Peningkatan Kapabilitas Pekerja Dengan Implementasi *Effective Teamwork*".

PTK held a Sharing Synergy with the topic "Improving Worker Capability with the Implementation of Effective Teamwork".



16

Februari
February

PTK turut berpartisipasi pada *Event Workshop Sinergi 2023 Pertamina Group* di The Patra Bali Resort & Villas yang dihadiri oleh jajaran Direksi dan manajemen dari seluruh Pertamina Group, baik dari *Subholding*, Anak Perusahaan, serta perusahaan afiliasi Pertamina.

PTK participated in the 2023 Pertamina Group Synergy Workshop Event at the Patra Bali Resort & Villas, which was attended by the Board of Directors and management from all Pertamina Group, either from Pertamina's Subholding, Subsidiaries, and affiliated companies.



16-17

Februari
February

Dewan Komisaris dan Direktur Keuangan & SDM PTK melaksanakan kunjungan lapangan ke wilayah kerja Operasi dan Region II (Surabaya). Selain itu melakukan kunjungan ke beberapa *stakeholder* yaitu PT Petrokimia Gresik, PT Siam Maspion Terminal, SKK Migas Perwakilan Jawa Bali Nusa Tenggara, PT Pertamina Patra Niaga Surabaya.

PTK's Board of Commissioners and Director of Finance & HR conducted field visits to the Operations and Region II (Surabaya) working areas. In addition, they visited several stakeholders, namely PT Petrokimia Gresik, PT Siam Maspion Terminal, SKK Migas Representative of Java Bali Nusa Tenggara, and PT Pertamina Patra Niaga Surabaya.



22

Februari
February

PTK turut berpartisipasi pada kegiatan *fire safety challenge* dengan mengikutsertakan dua tim, yaitu tim *Fire Safety* (FS) PTK Pusat dan tim Peteka Shorebase Tanjung Batu (PSTB).

PTK participated in the fire safety challenge by including two teams, namely the PTK Central Fire Safety (FS) team, and the Peteka Shorebase Tanjung Batu (PSTB) team.



2

Maret
March

Penandatanganan kerja sama dengan PT Industri Kapal Indonesia (Persero), meliputi kerja sama pada jasa perbaikan kapal (*ship repair*) dan jasa pengedokan kapal (*docking repair*).

The signing of a cooperation with PT Industri Kapal Indonesia (Persero), covering cooperation in ship repair and docking repair services.





7 Maret
March

PTK bersama dengan Pertamina Port and Logistics (PPL) menjalin kerjasama dengan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (Pelindo) meliputi pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal pada 11 lokasi yang telah ditetapkan.

PTK, together with Pertamina Port and Logistics (PPL), established cooperation with PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (Pelindo), covering guiding services and ship delays at 11 designated locations.



18 Maret
March

Direktur Utama PTK, Nepos MT Pakpahan yang mendapat penghargaan kategori Global Youth Leadership Award pada ajang *Global Youth Leadership Summit & Award 2023* di Dubai, United Arab Emirates.

PTK's President Director, Nepos MT Pakpahan, was awarded the Global Youth Leadership Award category at the Global Youth Leadership Summit & Award 2023 in Dubai, United Arab Emirates.



6 April
April

Direktur Utama PTK, Bapak Nepos MT Pakpahan meraih penghargaan sebagai "Top CEO in Service Excellence" dalam forum *Indonesia Most Popular CEO Awards 2023* yang diselenggarakan oleh The Iconomics.

PTK's President Director, Mr. Nepos MT Pakpahan, was awarded "Top CEO in Service Excellence" in the Indonesia Most Popular CEO Awards 2023 forum organized by the Iconomics.



28 April
April

PTK menggelar kegiatan Safari Ramadhan pada bulan suci Ramadhan tahun 1444 H di wilayah kerja PTK yaitu Balikpapan, Makassar dan Palembang. PTK held Safari Ramadhan activities in the holy month of Ramadhan 1444 H in the PTK working areas of Balikpapan, Makassar, and Palembang.



23 Mei
May

PTK menggelar *exercise International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code Oil Spill Recovery (OSR) Tier-1* yang meliputi cara penanganan keadaan darurat dari dua aspek yaitu keamanan dan tumpahan minyak. Pelatihan diikuti oleh pihak internal Pertamina serta instansi vertikal terkait seperti Perhubungan Laut, Angkatan Laut, Polres Bintang, Polisi Air dan Udara, Polsek, Koramil, Karantina Kesehatan, Bea Cukai, Imigrasi dan instansi terkait lainnya di lingkungan Pertamina. PTK held an International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code Oil Spill Recovery (OSR) Tier-1 exercise, which includes how to handle emergencies from two aspects, namely security and oil spills. The training was participated by Pertamina internal parties as well as related vertical institutions such as Sea Transportation, Navy, Bintang Police, Water and Air Police, Polsek, Koramil, Health Quarantine, Customs, Immigration, and other related institutions within Pertamina.



26 Mei
May

PTK borong 3 penghargaan pada ajang *Annual Pertamina Quality (APQ) Award 2023* dengan mengikutsertakan 3 gugus yang masing-masing berhasil meraih penghargaan yang diselenggarakan oleh forum *Continuous Improvement Program (CIP)*. PTK won three awards at the Annual Pertamina Quality (APQ) Award 2023 by participating in three clusters, each of which won an award organized by the Continuous Improvement Program (CIP) forum.



25 Mei
May

PTK menggelar kegiatan "SEPAKAT" (Sehuan Tanpa Sekat) yang merupakan kegiatan diskusi terkait isu terkini di Perusahaan dan juga melibatkan seluruh lapisan jabatan di PTK.

PTK was awarded the "Best CSR in Marine Logistics Sector Industry 2023" category in the Indonesia Best CSR Awards 2023 event held by the Iconomics Media and Axia Research.



25 Mei
May

PTK meraih penghargaan kategori "Best CSR in Marine Logistics Sector Industry 2023" dalam Ajang *Indonesia Best CSR Awards 2023* yang diadakan oleh Media The Iconomics dan Axia Research.

PTK held "SEPAKAT" (Sehuan Tanpa Sekat) activity, which is a discussion activity related to current issues in the Company and also involves all layers of positions in PTK.



12 Juni
June

RUPST Tahun Buku 2022 dilaksanakan di Aula lantai 7 Kantor PTK, Jakarta Utara. Dalam RUPST Tahun Buku ini PTK mencatat kinerja positif sepanjang tahun 2022 dengan mengantongi laba bersih Rp. 733,03 miliar atau 131,07% dari target Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang telah ditentukan Perusahaan.

The AGMS for the 2022 Financial Year was held in the 7th floor Hall of PTK Office, North Jakarta. In this Fiscal Year AGMS, PTK recorded a positive performance throughout 2022 by earning a net profit of Rp733.03 billion or 131.07% of the target of the Company's Annual Budget and Operational Plan (ABOP) determined by the Company.



13 Juni
June

PTK menggelar kegiatan *Go Live Computerized Maintenance Management System (CMMS)* yang merupakan program perawatan kapal terkomputerisasi berbasis *website*.
PTK held a *Go Live Computerized Maintenance Management System (CMMS)* activity, a website-based computerized ship maintenance program.



14 Juni
June

PTK melaksanakan Penandatanganan Pokok - pokok Perjanjian Pekerjaan Jasa Penyewaan Kapal dan Pengelolaan *Ship to Ship* untuk proyek *Fatty Acid Methyl Ester (FAME)* di Balikpapan dengan 21 perusahaan dari Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI), bertempat di Aula Lt 7 Gedung Transko, PTK Pusat Jakarta.

PTK carried out the Signing of the Principal Agreement for Ship Charter Services and Ship to Ship Management for the Fatty Acid Methyl Ester (FAME) project in Balikpapan with 21 companies from the Indonesian Biofuel Producers Association (APROBI), located in the 7th Floor Hall of Transko Building, PTK Central Jakarta.



16 Juni
June

PTK memborong tiga penghargaan sekaligus dalam ajang *Health, Safety & Environment (HSE) Indonesia Awards 2023* yang diselenggarakan oleh HSE Magazine.

PTK won three awards at the Health, Safety & Environment (HSE) Indonesia Awards 2023 organized by HSE Magazine.



26 Juni
June

Launching SHEVIA (*Safety Health Education Virtual Immersive Application*) karya Perwira - Perwira PTK pada acara IGNITE : *Unleashing New Ventures* yang diadakan oleh Fungsi New Ventures Direktorat Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Usaha PT Pertamina (Persero) bertempat di *Ballroom Graha Pertamina*.

Launching SHEVIA (*Safety Health Education Virtual Immersive Application*) by PTK Officers at the IGNITE event: *Unleashing New Ventures* held by the New Ventures Function of the Directorate of Strategy, Portfolio, and Business Development of PT Pertamina (Persero) at Graha Pertamina Ballroom.



30 Juni
June

PTK menggelar penyembelihan hewan kurban di Kantor Pusat Yos Sudarso, Jakarta Utara. Hasil dari penyembelihan hewan kurban tersebut akan dibagikan kepada masyarakat sekitar

PTK held a sacrificial animal slaughter at the Yos Sudarso Head Office, North Jakarta. The proceeds from the sacrificial animals will be distributed to the surrounding community.



3 Juli
July

Pengukenan Bapak I Ketut Laba sebagai Direktur Utama PTK menggantikan Bapak Nepos MT Pakpahan.

Inauguration of Mr. I Ketut Laba as President Director of PTK replacing Mr. Nepos MT Pakpahan.



7 Juli
July

PTK meraih sertifikat ISO/IEC 27001:2013 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) atau lebih dikenal dengan nama *Information Security Management Systems (ISMS)* atas komitmen dalam mengimplementasikan proses teknologi.

PTK received an ISO/IEC 27001:2013 certificate on Information Security Management Systems (ISMS) for its commitment to implementing technology processes.



24 Juli
July

Pengukenan Bapak Andy Arvianto sebagai Direktur Pemasaran PTK dilakukan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

The inauguration of Mr. Andy Arvianto as PTK's Director of Marketing was carried out at the General Meeting of Shareholders (GMS).



27 Juli
July

PTK melaksanakan sosialisasi bertajuk "Sosialisasi Implementasi Penguatan Aspek HSSE (*Health, Safety, Security and Environment*), *Contractor Safety Management System CSMS (Contractor Safety Management System) Full Cycle* dan Aspek *Security & Fraud, Marketing Business Operation Region (MBOR) 1* yang dilakukan kepada 20 mitra kerja PTK di Batam.

PTK conducted a socialization entitled "Socialization of the Implementation of Strengthening HSSE (Health, Safety, Security, and Environment) Aspects, Contractor Safety Management System (CSMS) Full Cycle, and Security & Fraud Aspects, Marketing Business Operation Region (MBOR) 1 conducted to 20 PTK partners in Batam.





23-25 Agustus
August

Dewan Komisaris PT Pertamina Trans Kontinental ("PTK") beserta organ Dewan Komisaris didampingi Direktur Keuangan & SDM lakukan kunjungan kerja ke wilayah Marketing Marine Business & Operation Region (MBOR) II PTK Semarang.

The Board of Commissioners of PT Pertamina Trans Kontinental ("PTK") along with the organs of the Board of Commissioners accompanied by the Director of Finance & HR conducted a working visit to the Marketing Marine Business & Operation Region (MBOR) II area of PTK Semarang.



31 Agustus
August

PTK menyelenggarakan Transko HSSE Forum melalui *Sharing Sinergy* ("Shasy") ke-63, dengan tema : Meningkatkan Awareness Risiko Pekerjaan melalui Identifikasi Bahaya dan Pengelolaan Risiko di PTK Group.

PTK organized the 63rd Transko HSSE Forum through *Sharing Sinergy* ("Shasy"), with the theme: Increasing Job Risk Awareness through Hazard Identification and Risk Management at PTK Group



1 September
September

PTK mengadakan PTK "Mengajar" yang merupakan bukti aksi nyata pada Program kepedulian PTK di bidang Pendidikan, dan bekerjasama dengan PIP Semarang.

PTK held PTK "Teaching", which is proof of real action on PTK's concern program in the Education sector and collaborated with PIP Semarang.



14 September
September

Pemberian Transko Award dengan kategori *Employee Award*, *Vessel of the year* dan *recognition*.

The awarding of Transko Award with the categories of Employee Award, Vessel of the year and the recognition



21 September
September

Dukung Kinerja Mitra dan Perusahaan PTK Gelar Vendor Day 2023.

Supporting the Performance of Partners and Companies, PTK Held Vendor Day 2023



26 September
September

Dukung Pelestarian Ekosistem Lingkungan Pesisir, PTK menggelar "*Green Mangrove Action Program*" di Makassar yang bertajuk "*Green Mangrove Action Program*".

Supporting the Preservation of Coastal Environmental Ecosystems, PTK held a "Green Mangrove Action Program" in Makassar entitled "Green Mangrove Action Program".



27 September
September

Dewan Komisaris PTK yang diwakili Khalid Zabidi dan Direktur Keuangan & SDM, Afan Aftory didampingi General Manager Marketing Business Operation Region (MBOR) I, Joko Pramono, menjajaki potensi bisnis PTK di wilayah operasional MBOR I area Aceh dan sekitarnya dengan melaksanakan *Courtesy Meeting* ke Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) yang diwakili Wakil Kepala BPMA, Muhammad Najib dan Deputy Operasi, Edy Kurniawan di Kantor BPMA. PTK's Board of Commissioners, represented by Khalid Zabidi and Director of Finance & HR, Afan Aftory, accompanied by the General Manager of Marketing Business Operation Region (MBOR) I, Joko Pramono, explored PTK's business potential in the MBOR I operational area in Aceh and surrounding areas by conducting a Courtesy Meeting to the Aceh Oil and Gas Management Agency (BPMA) represented by Deputy Head of BPMA, Muhammad Najib, and Deputy Operations, Edy Kurniawan, at the BPMA Office.



4 Oktober
October

Direksi PTK melaksanakan *Management Walkthrough* di Port Tanjung Priok, Jakarta 1. PTK's Board of Directors conducted a Management Walkthrough at Tanjung Priok Port, Jakarta 1.



4 Oktober
October

Direktur Keuangan & Sumber Daya Manusia ("SDM") PT Pertamina Trans Kontinental ("PTK"), Afan Aftory memperoleh penghargaan *Indonesia Best Chief Financial Officer ("CFO") 2023*. Penghargaan ini adalah bentuk apresiasi kepada CFO atau Direktur Keuangan terbaik di Indonesia.

Director of Finance & Human Resources ("HR") of PT Pertamina Trans Kontinental ("PTK"), Afan Aftory, was awarded the Indonesia Best Chief Financial Officer ("CFO") 2023. This award is a form of appreciation to the best CFO or Director of Finance in Indonesia.



9

Oktober
October

Pertamina Trans Kontinental (PTK) untuk menjaga harmonisasi hubungan industrial antara pekerja PTK dengan perusahaan akan semakin jadi lebih baik, telah dilakukan Penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PTK periode 2023-2025. Pertamina Trans Kontinental (PTK) has signed the PTK Collective Labor Agreement (CLA) for the period 2023-2025 to maintain harmonious industrial relations between PTK workers and the Company.



12-13

Oktober
October

PTK menggelar forum *Forum Group Discussion* (FGD) dalam rangka revitalisasi tata kelola bisnis keagenan untuk memastikan operasional dan *service excellence* bagi pelanggan yang mematuhi Sistem Manajemen Anti Penyuaan (SMAP)/ISO 37001. PTK held a Forum Group Discussion (FGD) forum in order to revitalize agency business governance to ensure operational and service excellence for customers that comply with the Anti-Bribery Management System (SMAP)/ISO 37001.



16-21

Oktober
October

PTK mengadakan Latihan Bersama Penanggulangan Tumpahan Minyak di Laut, yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada acara National Marpollex (*Marine Pollution Exercise*). PTK held a Joint Exercise on Oil Spill Response at Sea, organized by the Ministry of Transportation and the Directorate General of Sea Transportation at the National Marpollex (Marine Pollution Exercise) event.



18

Oktober
October

PTK menyelenggarakan Sosialisasi *Good Corporate Governance, Fraud Awareness*, dan Pengelolaan *Whistle Blowing System* (WBS) di wilayah kerja *Marine Business & Operation Region II* di Surabaya. PTK held a Socialization of Good Corporate Governance, Fraud Awareness, and Whistle Blowing System (WBS) Management in the Marine Business & Operation Region II working area in Surabaya.



19

Oktober
October

PTK melakukan penandatanganan *Joint Operation Agreement* (JOA) dengan PT Marcopolo Shipyard sebagai bukti komitmen perkuat segmen bisnis marine. Pelaksanaan penandatanganan JOA tersebut dilaksanakan langsung oleh Direktur Utama PTK, I Ketut Laba dan President Director PT Marcopolo Shipyard, Hendri. Didampingi oleh Direktur Pemasaran PTK, Andy Arvianto; VP Fleet PIS, I Gusti Ngurah Handiyana; Direktur PT Pertamina Port and Logistics, Albertus Anto Budi Santosa serta Tim Management PTK dan PT Marcopolo Shipyard. PTK signed a Joint Operation Agreement (JOA) with PT Marcopolo Shipyard as proof of its commitment to strengthening the marine business segment. The signing of the JOA was carried out directly by PTK's President Director, I Ketut Laba, and PT Marcopolo Shipyard's President Director, Hendri. Accompanied by PTK's Director of Marketing, Andy Arvianto; VP of Fleet PIS, I Gusti Ngurah Handiyana; Director of PT Pertamina Port and Logistics, Albertus Anto Budi Santosa, and the Management Team of PTK and PT Marcopolo Shipyard.



25

Oktober
October

PTK meresmikan Desa Energi Berdikari Pertama di Kelurahan Tanjungsari, Kota Jambi. Peresmian ini juga menjadi DEB ke 64 yang dimiliki Pertamina Group dan tersebar di seluruh Negeri. DEB ini mengelola sampah organik ke dalam beberapa produk turunan dan seluruh aktivitasnya menggunakan PLTS sebagai energi terbarukan dan menambah pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat. PTK inaugurated the first Berdikari Energy Village in Tanjungsari Urban Village, Jambi City. This inauguration is also the 64th DEB owned by Pertamina Group and spread throughout the Nation. This DEB manages organic waste into several derivative products, and all activities use SPP as renewable energy and increase economic growth for the community.



26

Oktober
October

PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT) menandatangani kerjasama dengan konsorsium PTK dan PT Pertamina Port and Logistics (PPL) di Kalimantan Timur. PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT) signed a partnership with a consortium of PTK and PT Pertamina Port and Logistics (PPL) in East Kalimantan.



1

November
November

PTK melakukan *Management Walkthrough* PTK Shorebase Tanjung Batu (PSTB) sebagai bentuk komitmen penguatan bisnis *shorebase* dan segmen bisnis *marine*. PTK conducted a Management Walkthrough of PTK Shorebase Tanjung Batu (PSTB) as a form of commitment to strengthening the shorebase business and marine business segment.



2

November
November

PTK meraih penghargaan tingkat Asia Pasifik atas inisiasinya dalam menjalankan operasional *port* (pelabuhan) berbasis lingkungan atau *green port* yang diberikan oleh APEC Port Services Network (APSN), organisasi internasional di bawah Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC).

PTK received an Asia-Pacific level award for its initiative in running environmentally-based port operations or green ports, presented by the APEC Port Services Network (APSN), an international organization under the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC).



6

November
November

PTK meluncurkan Digitalisasi *Procurement* melalui program SMART-GEP untuk Efisiensi, Efektivitas dan Transparansi dalam Pengadaan Barang dan Jasa bertempat di TransKopi dan dihadiri oleh seluruh Direksi PTK, Dewan Komisaris dan segenap perwira PTK.

PTK launched Procurement Digitalization through the SMART-GEP program for Efficiency, Effectiveness, and Transparency in Procurement of Goods and Services at TransKopi and was attended by all PTK's Board of Directors, Board of Commissioners, and all officers.



8

November
November

PTK meraih tiga penghargaan sekaligus dalam ajang *Indonesia Digital Innovation and Achievement (IDIA) Awards 2023* yang diselenggarakan oleh Business Asia Magazine dan didukung oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.

PTK won three awards at the Indonesia Digital Innovation and Achievement (IDIA) Awards 2023, organized by Business Asia Magazine and supported by the Ministry of Communication and Informatics



9

November
November

Penandatanganan kerjasama *Ship Agency Services* (keagenan kapal) dengan PT Donggi-Senoro LNG (DSLNG) yang dilakukan langsung oleh Direktur Utama PTK, I Ketut Laba dengan President Director DSLNG, Atsushi Hozumi didampingi dengan Operation Director DSLNG, Betantyo Madyantoro dan Direktur Pemasaran PTK, Andy Arvianto beserta manajemen dari kedua perusahaan.

The signing of the Ship Agency Services cooperation with PT Donggi-Senoro LNG (DSLNG) was carried out directly by PTK's President Director, I Ketut Laba, with DSLNG's President Director, Atsushi Hozumi, accompanied by DSLNG's Director of Operations, Betantyo Madyantoro, and PTK's Director of Marketing, Andy Arvianto, along with the management of both companies.



17

November
November

PTK menggelar *workshop* penyelenggaraan dan pengurusan sertifikasi kapal melalui teknologi informasi bersinergi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut ("Ditjen Hubla"), Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

PTK held a workshop on the implementation and management of ship certification through information technology in synergy with the Directorate General of Sea Transportation ("DG Hubla"), Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia.



11

Desember
December

Direktur Utama PTK, I Ketut Laba memberikan kuliah umum dengan tema "Menjadi Generasi Pemimpin Masa Depan: *Creating Successful Future by Developing Business & Leadership Skills*" pada kegiatan "PTK Goes To Campus" di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta.

PTK's President Director, I Ketut Laba, presented a public lecture with the theme "Becoming a Generation of Future Leaders: Creating Successful Future by Developing Business & Leadership Skills" at the "PTK Goes to Campus" event at the Jakarta School of Shipping (STIP).



17-18 & 20

November
November

Dewan Komisaris melakukan kunjungan kerja ke wilayah *Marketing Marine Business & Operation Region (MBOR) III* PTK Makassar dan MBOR II PTK di Balongan, Indramayu, Jawa Barat.

The Board of Commissioners conducted a working visit to the Marketing Marine Business & Operation Region (MBOR) III of PTK Makassar and MBOR II of PTK in Balongan, Indramayu, West Java.



28

Desember
December

PTK lakukan penandatanganan perjanjian fasilitas kredit *term loan* dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp279.27 Miliar yang dilaksanakan di Kantor Pusat PTK, Jakarta Utara dan ditandatangani langsung oleh Direktur Utama PTK I Ketut Laba dan Senior Vice President Corporate Banking 3 Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Helmy Afrisa Nugroho.

PTK signed a term loan credit facility agreement with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk of Rp279.27 billion held at PTK Head Office, North Jakarta, and signed directly by PTK's President Director, I Ketut Laba, and Senior Vice President of Corporate Banking 3 Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Helmy Afrisa Nugroho.

PTK di Mata Mereka

PTK From Their Point of View



Erick Thohir

Menteri BUMN
Minister of SOEs

"Saya mengapresiasi langkah PTK yang melakukan inovasi dengan *rebranding* tiga anak usahanya. Ini langkah strategis dalam memperkuat reputasi kompetensi dalam menjangkau pasar internasional dan siap beradaptasi dalam era revolusi industri 4.0.

Sumber: <https://www.instagram.com/p/Csl0tDoxlxO>

"I appreciate PTK steps to innovate by rebranding its three subsidiaries. This is a strategic step in strengthening the reputation of competence in reaching international markets and being ready make adjustments in the era of industrial revolution 4.0.

Source: <https://www.instagram.com/p/Csl0tDoxlxO>



Mr Tan Thai Yong

Managing Director and Chief Executive Officer, PaxOcean Group
Managing Director and Chief Executive Officer, PaxOcean Group

Saat merancang kapal khusus Transko Rajawali, kami mencoba memahami kebutuhan PTK terkait upaya pengisian LNG agar mudah dan efisien digunakan. Kami juga mendukung upaya PTK dalam penggunaan LNG sebagai bahan bakar yang ramah energi, demi menjaga lingkungan, "*green industry*". Kami bangga karena terpilih mendesain kapal yang dibangun modern dan efisien ini".

Sumber: <https://www.antaranews.com>

When designing the special Transko Rajawali ship, we tried to understand PTK needs regarding LNG filling efforts so as to be easy and efficient usage. We also support PTK efforts to leverage LNG as an energy-friendly fuel, in order to protect the environment, "green industry". We are proud to have been chosen to design this modern and efficient ship."

Source: <https://www.antaranews.com>



Hartanto

Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI
Director of Shipping and Maritime Affairs, Directorate General of Sea Transportation, Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia

"Pelaksanaan PTK Goes to Campus merupakan wujud sumbangsih untuk turut memajukan pengembangan ilmu dan teknologi kemaritiman di Indonesia. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk menambah khasanah keilmuan yang dapat diimplementasikan saat berada di dunia kerja yang sebenarnya, sehingga menjadi nilai tambah bagi Taruna dan Taruni ke depannya."

Sumber : <https://www.cnbcindonesia.com/>

"The Company manifest PTK Goes to Campus is a contribution to assist advance the development of maritime science and technology in Indonesia. Moreover, this activity also purposes to increase the knowledge base that can be implemented while in the real world of work, so that it becomes added value for cadets in the future."

Source: <https://www.cnbcindonesia.com>



Irfan Zainul Fikri

Direktur Armada PIS
Director of Armada PIS

"Kami apresiasi untuk seluruh kru kapal Transko Yudhistira yang telah berkomitmen untuk lolos SIRE, kami harap ini bisa menjadi motivasi bagi kru lainnya."

Sumber : <http://www.ogindonesia.com>

"We appreciate the entire Transko Yudhistira crew who have committed to passing SIRE, we expect it is able to be a motivation for the other crew."

Source : <http://www.ogindonesia.com>



Atsushi Hozumi

President Director DSLNG
President Director DSLNG

"Kami mengapresiasi kinerja PTK selama bekerja sama dengan DSLNG. Ia menilai hingga saat ini, PTK telah memberikan dukungan terhadap kegiatan operasional DSLNG di Luwuk Banggai dengan Zero Accident."

Sumber : <https://finance.detik.com>

We appreciate the entire Transko Yudhistira crew who have committed to passing SIRE, we expect it is able to be a motivation for the other crew.

Source : <https://finance.detik.com>







Laporan Manajemen Management Report

Laporan Dewan Komisaris

Report From The Board of Commissioners



Amir Hamzah

Komisaris Utama
President Commissioner

"Dewan Komisaris berpendapat bahwa strategi dan kebijakan Direksi yang dilakukan sepanjang tahun 2023 telah fokus pada eksekusi terhadap program RKAP, baik di segmen usaha *shipping activities*, *marine services* dan *logistic services* maupun implementasi *strategy recovery plan* dan efisiensi biaya. Hal tersebut tercermin dari peningkatan pendapatan usaha dan laba tahun berjalan tahun 2023 sebesar 41,00% dan 43,45% dibanding tahun sebelumnya."

"The Board of Commissioners is of the opinion that the Board of Directors' strategy and policies implemented throughout 2023 already focused on the execution of the RKAP program, both in the shipping activities, marine services and logistics services business segments as well as the implementation of recovery plan strategies and cost efficiency. This is reflected in the increase in operating income and profit for the current year in 2023 of 41.00% and 43.45% compared to the previous year."

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang terhormat,

Mewakili Dewan Komisaris, pertama-tama kami ingin mengucapkan puji serta syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas izin-Nya sehingga PTK mampu menutup tahun 2023 dengan pencapaian positif yang membanggakan. Perkenalkan kami selaku Dewan Komisaris menyampaikan laporan tugas pengawasan sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik atas pengelolaan Perusahaan yang dilakukan Direksi sepanjang tahun 2023 dalam mencapai target Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) 2023 maupun sasaran utama Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) yang berlaku. Laporan ini merupakan bentuk akuntabilitas Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi dan perannya melakukan pengawasan dan penasehatan guna menjaga keberlanjutan bisnis Perusahaan.

Tinjauan Ekonomi Global Global Economic Review

Sepanjang tahun 2023, dinamika perekonomian global mengalami perubahan yang signifikan, diantaranya dipengaruhi oleh kondisi geopolitik ekonomi yang meningkat dengan masih berlangsungnya perang Rusia-Ukraina yang menyebabkan keterbatasan pasokan serta tetap tingginya harga energi dan pangan global. Berlanjutnya ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok juga memberikan pengaruh pada penurunan tidak hanya ekspor-impor kedua negara tersebut, tetapi juga volume perdagangan dunia. Kemudian, konflik Israel dan Palestina sejak awal Oktober 2023 menambah ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah dan juga dunia. Selain itu, perubahan kebijakan fiskal dan moneter di berbagai negara juga mempengaruhi kondisi ekonomi global secara keseluruhan, sehingga proses pemulihan ekonomi global melambat. Berdasarkan data *International Monetary Fund* (IMF) dalam *World Economic Outlook* (WEO) Update Januari 2024 mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi global tahun 2023 diperkirakan mencapai 3,1%, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022.

Dear Shareholders and Stakeholders,

On behalf of the Board of Commissioners, first of all we would like to express praise and gratitude due to approval from the God Almighty so that PTK is able to close 2023 with positive achievements that we are proud of. Kindly allow us as the Board of Commissioners to submit a report on our supervisory duties in line with the principles of good corporate governance regarding the Company management carried out by the Board of Directors during 2023 in achieving the targets of the 2023 Company Budget Work Plan (RKAP) and the applicable main targets of the Company's Long Term Plan (RJPP). This report is an accountability of the Board of Commissioners in running functions and role in supervising and advising to maintain business sustainability of the Company.

In 2023, the dynamics of the global economy faced significant changes, including being influenced by increasing geopolitical economic conditions with the ongoing Russian-Ukrainian war which was causing limited supply and persistently high global energy and food prices. Continuing trade tensions between the United States and China have also brought impacts on decreasing not only the exports and imports of the two countries, but also the volume of world trade. Then, the Israeli and Palestinian conflict since early October 2023 has added to geopolitical tensions in the Middle East region and also the world. Moreover, changes in fiscal and monetary policies in various countries also affect overall global economic conditions, so that the global economic recovery process slows down. Based on International Monetary Fund (IMF) data in the World Economic Outlook (WEO) Update January 2024, it is recorded that global economic growth in 2023 is estimated to reach 3.1%, a decrease compared to 2022.



Pertumbuhan Ekonomi Nasional yang Tangguh Resilient National Economic Growth

Memasuki akhir tahun 2023, berbagai indikator terkini seperti indeks keyakinan konsumen dan *Purchasing Manager's Index* (PMI) yang berada pada zona ekspansi mengonfirmasi berlanjutnya pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tetap baiknya pertumbuhan ekonomi juga tercermin pada kinerja lapangan usaha utama di antaranya industri pengolahan, konstruksi, dan pertambangan. Di sisi permintaan domestik, konsumsi swasta tetap tumbuh kuat. Hal ini sejalan dengan meningkatnya konsumsi di sektor jasa, masih tingginya keyakinan konsumen, terjaganya daya beli seiring dengan inflasi yang rendah, dan stimulus kebijakan fiskal termasuk pemberian subsidi dan berbagai program bantuan sosial. Pertumbuhan investasi juga tetap baik didorong berlanjutnya penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN). Sementara di sisi eksternal, pertumbuhan riil ekspor barang menurun seiring pelemahan permintaan dari negara mitra dagang utama, terutama Tiongkok, sedangkan ekspor jasa tumbuh tinggi.

Entering the end of 2023, various current indicators such as the consumer confidence index and Purchasing Manager's Index (PMI) which are in the expansion zone, confirm that Indonesia's continued economic growth. The continued good economic growth is also reflected in the performance of the main business fields, including the processing, construction and mining industries. In terms of domestic demand, private consumption continues to grow strongly. This is in line with increasing consumption in the services sector, still high consumer confidence, maintained purchasing power in line with low inflation, and fiscal policy stimulus including the provision of subsidies and various social assistance programs. Investment growth also remains good, driven by the continued completion of National Strategic Projects (PSN). Meanwhile in terms of the external side, real growth in exports of goods declined in line with the weakening demand from major trading partner countries, especially China, while exports of services grew strongly.

Stabilitas makroekonomi Indonesia tetap terjaga dan pemulihan ekonomi dalam negeri terus berlanjut, meskipun pada saat bersamaan dinamika global mengalami perubahan yang signifikan. Ekonomi domestik mampu bertahan dan mencapai pertumbuhan sebesar 5,05% (YoY) yang ditopang oleh permintaan domestik, di tengah melambatnya kinerja sektor eksternal sejalan dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi dunia. Nilai tukar Rupiah terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada akhir Desember 2023, yaitu sebesar Rp15.782,-/US\$ dan harga minyak dunia (ICP) mencapai USD82/Barrel.

Indonesia's macroeconomic stability is maintained and domestic economic recovery continues, even though at the same time global dynamics are experiencing significant changes. Domestic economy was able to survive and achieve growth of 5.05% (YoY) which was supported by domestic demand, amid the slowing external sector performance in line with declining world economic growth. Rupiah exchange rate continued to weaken against the United States (US) dollar at the end of December 2023, namely Rp15,782/US\$ and the world oil price (ICP) reached USD82/Barrel.

Penilaian Terhadap Kinerja Direksi dan Dasar Penilaiannya Performance Assessment for the Board of Directors and the Basis for the Assessment

Dewan Komisaris merupakan representasi dari pemegang saham, yang melakukan pemantauan terhadap pengelolaan Perusahaan dan melakukan penilaian terhadap kinerja Direksi. Secara umum, Dewan Komisaris berpendapat bahwa Direksi PTK beserta segenap jajarannya telah menunjukkan upaya positif dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2023 maupun Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) yang berlaku. Penilaian kinerja Direksi tahun 2023 ditetapkan oleh pemegang saham melalui Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler ("KPSSS") tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan ("RKAP") Tahun 2023 yang menjadi *Key Performance Indicator* ("KPI") Kesepakatan Kinerja Perusahaan tahun 2023. KPI Perusahaan menjadi dasar penilaian keberhasilan Direksi dalam menjalankan Perusahaan sepanjang tahun 2023.

The Board of Commissioners is a representative of the shareholders, who monitors the Company management and assesses the Board of Directors performance. In general, the Board of Commissioners is of the opinion that PTK Board of Directors and all their staff have represented positive efforts in achieving the established performance targets in the 2023 Company Budget Work Plan (RKAP) and the applicable Company Long Term Plan (RJPP). Performance assessment of the Board of Directors in 2023 is determined by the shareholders through a Circular Shareholder Decision ("KPSSS") regarding Ratification of the Company's Work Plan and Budget ("RKAP") for 2023 which is the Key Performance Indicator ("KPI") of the Company's Performance Agreement for 2023. The Company's KPI is the basis for assessing the success of the Board of Directors in running the Company throughout 2023.

Sejak menjadi bagian dari "*Subholding Integrated Marine Logistic*" di bawah PT Pertamina International Shipping, PTK memiliki wilayah kerja yang meliputi: 3 (tiga) Region, 3 (tiga) Anak Perusahaan dan 1 (satu) Perusahaan Patungan serta 1 (satu) Proyek Khusus *Shorebase*. Adapun kegiatan usaha yang dijalankan terbagi menjadi 3 segmen utama, yakni *Shipping Activities*, *Marine Services* dan *Logistic Services*. Penilaian terhadap kinerja Direksi dilakukan melalui evaluasi atas laporan kinerja bulanan, laporan manajemen triwulanan, pencapaian target dalam RKAP dan RJPP, tingkat Kesehatan Perusahaan, dan tindak lanjut atas keputusan Dewan Komisaris maupun keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun perjanjian dengan pihak ketiga.

Since becoming part of the "*Subholding Integrated Marine Logistic*" under PT Pertamina International Shipping, PTK has a working area which includes: 3 (three) Regions, 3 (three) Subsidiaries and 1 (one) Joint Venture Company as well as 1 (one) Shorebase Special Project. The business activities carried out are divided into 3 main segments, namely Shipping Activities, Marine Services and Logistic Services. Assessment of the performance of the Board of Directors is carried out through evaluation of monthly performance reports, quarterly management reports, achievement of targets in the RKAP and RJPP, Company Soundness Level, and follow-up to decisions of the Board of Commissioners and decisions of the General Meeting of Shareholders ("GMS") as well as compliance with applicable laws and regulations and agreements with the third parties.

Realisasi KPI Perusahaan tahun 2023 yang menjadi target kinerja Direksi (kollegial) secara keseluruhan mencapai 103,80% atau melebihi target yang ditetapkan oleh pemegang saham, yang mencakup aspek *Financial*, *Customer Focus*, *Internal Process*, *Learning & Growth* serta *Boundary* KPI. Sebagian besar item dalam aspek KPI Perusahaan 2023 dapat mencapai yang ditargetkan. Hanya aspek *Financial* yang mencatat pencapaian sedikit di bawah target, yaitu realisasi investasi ("ABI") dan aspek *Internal Process*, terkait dengan progress fisik realisasi investasi menjadi aspek yang masih memerlukan perhatian khusus. *Number of Accident* (NoA) merupakan *boundary* KPI Perusahaan yg menjadi aspek penting pengelolaan risiko operasional di lingkungan Pertamina group. Untuk tahun 2023, tidak terdapat (nihil) NoA. Dilihat dari Tingkat Kesehatan Perusahaan untuk mengukur aspek keuangan, pertumbuhan, operasi, dan administrasi maka untuk tahun 2023 PTK berada dalam kondisi "SEHAT" kategori "AAA" dengan skor "99,50", meningkat dibandingkan tahun 2022 yang mencatat pencapaian sebesar "92,58".

Dewan Komisaris berpendapat bahwa Direksi telah melakukan strategi dan kebijakan yang fokus pada eksekusi terhadap program RKAP 2023 baik di segmen *shipping activities*, *marine services* dan *logistic services* maupun implementasi *strategy recovery plan* dan efisiensi biaya. Sejalan dengan tema strategis tahun 2023 "*Sailing Beyond Border*", Dewan Komisaris mendukung sepenuhnya langkah dan komitmen Direksi bersama seluruh jajaran manajemen PTK untuk secara berkelanjutan melakukan perbaikan kinerja dan semangat memberikan layanan terbaik kelas dunia kepada *stakeholder*-nya. Untuk itu, Direksi perlu terus memastikan kepatuhan terhadap perkembangan regulasi yang berlaku di bidang *International Maritime Organization* (IMO) 2020 terkait dengan penggunaan bahan bakar kapal yang lebih ramah lingkungan, melakukan Analisa keuangan terhadap fluktuasi harga bahan bakar yang sangat mempengaruhi biaya operasional kapal, maupun mengikuti perkembangan teknologi dan inovasi dengan menggunakan *Internet of Things* (IoT) dan *Artificial Intelligence* (AI) untuk menjadi langkah mitigasi agar pencapaian target kinerja Perusahaan dapat dikelola dengan baik. Hal ini kelak dapat menjadi energi positif bagi Perusahaan dalam menghadapi tantangan dan pencapaian target tidak hanya di tahun ini namun juga di masa mendatang.

Upaya-upaya tersebut di atas telah membuahkan hasil sangat baik. Hal tersebut tercermin dalam peningkatan pendapatan usaha mencapai 41% menjadi sebesar Rp6,746 triliun dibanding tahun lalu sebesar Rp4,78 triliun, beban pokok pendapatan meskipun mengalami peningkatan 32,42% dibanding tahun lalu, namun masih di bawah kenaikan pendapatan yang diperoleh selama tahun 2023 sehingga mendorong perolehan laba tahun berjalan 43,45% menjadi sebesar Rp1,05 triliun dibanding tahun 2022 yang mencapai sebesar Rp733,02 miliar.

Atas pencapaian tersebut, Dewan Komisaris menyampaikan apresiasinya kepada Direksi dan jajaran manajemen serta seluruh karyawan PTK. Walaupun secara keseluruhan pencapaian KPI Perusahaan tahun 2023 dan kinerja seluruh Direksi baik, terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan, yaitu: terkait dengan rendahnya realisasi investasi sebesar 36% dari target RKAP 2023 yang disebabkan oleh perencanaan yang terlalu optimis namun belum diimbangi eksekusi yang cepat; yang berakibat menjadi tidak tercapainya realisasi investasi (*progress* fisik) dengan hanya sebesar 83%; serta adanya pengurangan dari *Boundary* KPI dikarenakan terjadi *Number of Accident* (NoA). Ke depannya, Dewan Komisaris terus berupaya mendorong perbaikan atas hal-hal yang belum tercapai tersebut.

The realization of the Company's KPI in 2023, which is the overall performance target of the Board of Directors (collegial), reached 103.80% or exceeded the target set by the shareholders, which includes aspects of Financial, Customer Focus, Internal Process, Learning & Growth and Boundary KPI. Most of the items in the 2023 Company KPI aspect can achieve what is targeted. Only the Financial aspect recorded achievements slightly below the target, namely investment realization ("ABI") and the Internal Process aspect, related to the physical progress of investment realization, is an aspect that still requires special attention. Number of Accident (NoA) is the Company's KPI boundary which is an important aspect of operational risk management within Pertamina group. For 2023, there is no (nil) NoA. Judging from the Company's Health Level to measure financial, growth, operations and administration aspects, for 2023 PTK is in a "HEALTHY" condition in the "AAA" category with a score of "99.50", an increase compared to 2022 which recorded an achievement of "92.58".

The Board of Commissioners is of the opinion that the Board of Directors has applied strategies and policies that focus on the execution of the 2023 RKAP program both in the shipping activities, marine services and logistics services segments as well as implementation of recovery plan strategies and cost efficiency. In line with the 2023 strategic theme "*Sailing Beyond Border*", the Board of Commissioners fully supports the steps and commitment by the Board of Directors together with all PTK management levels to continuously improving performance and being enthusiastic on providing the best world-class service to the stakeholders. For this reason, the Board of Directors needs to continue to ensure compliance with developments in regulations applicable in the 2020 International Maritime Organization (IMO) sector related to the use of more environmentally friendly vessel fuel, analyze financial of fuel price fluctuations which greatly affect ship operational costs, and follow technological developments and innovations using the Internet of Things (IoT) and Artificial Intelligence (AI) as mitigation steps so that the performance targets achievement of the Company can be managed well. This can later become positive energy for the Company in facing challenges and achieving targets not only this year but also in the future.

The efforts mentioned above have generated great results. This is reflected in the increase in operating income reaching 41% to Rp6.746 trillion compared to the previous year of Rp4.78 trillion. Despite the cost of revenue has increased by 32.42% compared to previous year, it is still below the increase in income obtained during 2023, thus pushing profit for the current year 43.45% to Rp1.05 trillion compared to 2022 which reached Rp733.02 billion.

For this achievement, the Board of Commissioners would like to appreciate the Board of Directors, management as well as the entire PTK employees. Although the overall achievement of the Company's KPIs in 2023 and the performance of all Directors is good, there are several things that need to be improved, including: related to the low investment realization of 36% of the 2023 RKAP target which is caused by planning that is too optimistic but has not been matched by fast execution; which resulted in the realization of investment (physical progress) not being achieved by only 83%; as well as a reduction in the Boundary KPI due to the Number of Accidents (NoA). In the future, the Board of Commissioners will continue to strive to encourage the unachieved improvements.



Sepanjang tahun 2023, Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan pemberian nasihat lebih intens dibandingkan tahun sebelumnya. Fokus utama pengawasan dan penasihatannya adalah terhadap tata kelola bisnis, terutama yang terkait dengan upaya peningkatan pendapatan minimum throughput serta kenaikan atas selisih tarif baru untuk *bundling contract* C&T dan target KPI Perusahaan. Begitu pula perhatian ditujukan terhadap beban pokok usaha, beban penjualan dan beban keuangan. Kegiatan penting lainnya adalah bidang pemasaran terutama untuk *non captive market*, *fleet management* untuk memastikan jumlah *commission days* serta upaya *recovery plan* dan efisiensi Perusahaan.

During 2023, the Board of Commissioners performed more intense supervision and provide advice compared to the previous year. The main focus of supervision and advisory is on business governance, especially those related to efforts to increase minimum throughput income as well as increases in the difference between new rates for bundling C&T contracts and the Company's KPI targets. Likewise, attention is paid to the cost of business, sales costs and financial costs. Other important activities are marketing, especially for non-captive markets, fleet management to ensure the number of commission days as well as recovery plan efforts and Company efficiency.

Pengawasan Dalam Perumusan Strategi dan Kebijakan Perusahaan Supervision in Formulating Company Strategy and Policy

Dalam proses perumusan serta penerapan strategi dan kebijakan strategis Perusahaan, Dewan Komisaris telah memberikan arahan dan rekomendasi kepada Direksi terhadap segala sesuatu yang menjadi kewenangan masing-masing sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sepanjang tahun 2023 Dewan Komisaris telah menjalankan fungsi dan tanggung jawab dalam hal mengawasi pengelolaan Perusahaan yang dijalankan Direksi, termasuk mengawasi penerapan prinsip tata kelola perusahaan ("*corporate governance*"), pengelolaan risiko, mengelola isu keberlanjutan, serta menjaga kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan.

In formulating and implementing process the Company's strategy and strategic policies, the Board of Commissioners provides direction and recommendations to the Board of Directors regarding everything within their respective authority as regulated in the Company's Articles of Association as well as applicable laws and regulations. The Board of Commissioners managed to carried out their functions and responsibilities in terms of supervising the management of the Company carried out by the Board of Directors in 2023, including supervising the implementation of corporate governance principles ("*corporate governance*"), risk management, managing sustainability issues, and maintaining the Company's compliance with statutory regulations.

Upaya Dewan Komisaris untuk mengawasi implementasi strategi dan kebijakan serta mengoptimalkan pertumbuhan usaha Perusahaan serta pendampingan pelaksanaan tata kelola bisnis PTK, telah dilakukan melalui:

- Rapat Internal Dewan Komisaris - Direksi yang dilaksanakan minimal sebulan sekali dengan agenda pembahasan program-program RKAP 2023 dan pencapaian target pendapatan dan laba bersih.
- Rapat Internal Dewan Komisaris yang difokuskan terhadap pembahasan hasil pengawasan masing-masing komite serta rencana arahan dan saran upaya perbaikan kinerja dan tata kelola di masing-masing direktorat.
- Kunjungan secara aktif *Management Walk Through* (MWT) ke lokasi kerja/terminal/pelabuhan/kapal/*shorebase/dockyard* serta *stakeholder* (*end user*) terkait guna memastikan kesesuaian tata kelola pekerjaan lapangan, masalah yang dihadapi serta perkembangan lapangan terkini.
- Dewan Komisaris secara aktif merespon dengan memberikan tanggapan/saran tertulis maupun lisan tentang RKAP/RJPP, yang kemudian dibahas dalam Rapat Dewan Komisaris - Direksi bulanan.
- Pemberian persetujuan atau rekomendasi yang dibutuhkan oleh Direksi, sesuai aspek *compliance* dan aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun aspek persetujuan, nasihat dan saran Dewan Komisaris kepada Direksi dalam pengelolaan Perusahaan selama tahun 2023, diantaranya mencakup hal-hal sebagai berikut:

- Penguatan dan perbaikan implementasi program RKAP 2023 berdasarkan situasi bisnis terkini dan kapabilitas Perusahaan.
- Pemantapan dan peningkatan upaya pemasaran, baik pasar *captive* maupun *non captive* di tingkat nasional, terutama terhadap kegiatan usaha hulu migas.
- Pengawasan eksekusi rencana investasi demi pertumbuhan bisnis PTK serta penyelesaian terhadap kendala pembangunan kapal di galangan DBN, DBU dan Batamec.

The Board of Commissioners efforts to supervise the implementation of strategies and policies as well as optimize the Company's business growth as well as assist in the implementation of PTK business governance, including:

- Internal meetings of the Board of Commissioners - Directors were held at least once a month with the agenda of discussing the 2023 RKAP programs and achieving revenue and net profit targets
- Internal meetings of the Board of Commissioners are focused on discussing the results of supervision of each committee as well as plans for direction and suggestions for efforts to improve performance and governance in each directorate.
- Active Management Walk Through (MWT) visits to the work site/ terminal/port/ship/ shorebase/dockyard and related stakeholders (end users) to ensure the suitability of field work governance, problems encountered and the latest field developments.
- The Board of Commissioners actively responds by providing written and verbal responses/suggestions on the RKAP/RJPP, which are then discussed in the monthly Board of Commissioners - Board of Directors Meeting.
- Approval or recommendations required by the Board of Directors, according to the compliance aspects as well as applicable rules and regulations.

Aspects of approval, advice and suggestions from the Board of Commissioners to the Board of Directors in managing the Company during 2023 include the following:

- Strengthened and improved the implementation of the 2023 RKAP program based on the current business situation and Company capabilities.
- Strengthened and increased marketing efforts, both captive and non-captive markets at the national level, especially for upstream oil and gas business activities.
- Supervised the execution of investment plans for PTK business growth as well as resolving shipbuilding obstacles at the DBN, DBU and Batamec shipyards.

- d. Konsistensi menjalankan upaya strategi *recovery plan* dan efisiensi biaya, dengan mencari dan menangkap peluang bisnis baru di luar program RKAP 2023.
- e. Pengendalian upaya operasi bisnis yang berwawasan lingkungan, berorientasi terhadap aspek keselamatan kerja dan sekuriti serta peka terhadap aspek sosial (HSSE dan ESG).
- f. Pelaksanaan GCG dan pengembangan digitalisasi serta penyusunan pedoman berupa Sistem Tata Kerja (STK), Tata Kelola Organisasi (TKO) & Tata Kerja Individu (TKI) sebagai pendukung proses bisnis.
- g. Penetapan status kolektivitas piutang secara menyeluruh.
- h. Pengembangan kerja sama bisnis dengan pihak ketiga dalam bidang pengadaan atau pengoperasian kapal, kegiatan keagenan, dan lain sebagainya.
- i. Pemantapan hasil-hasil temuan (*fact finding*) dan tindak lanjutnya, terutama terkait dengan kinerja keuangan.
- j. Pemantapan reorganisasi PTK 2.0 yang menjadi amanat Pemegang Saham.
- k. Penilaian terhadap upaya meminimalisasi risiko bisnis serta memanfaatkan peluang-peluang sebagai peningkatan kinerja bisnis PTK.

Selain itu, fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris juga dilakukan melalui pelaksanaan rapat, baik secara internal maupun gabungan dengan mengundang Direksi. Selama tahun 2023, Dewan Komisaris menggelar 39 (tiga puluh sembilan) kali rapat, di mana 24 kali (dua puluh empat) rapat merupakan Rapat Internal Dewan Komisaris, dan 15 kali merupakan Rapat Gabungan dengan mengundang Direksi. Dalam rapat-rapat tersebut, khususnya Rapat Gabungan dengan mengundang Direksi, dibahas beberapa hal yang membutuhkan perhatian Dewan Komisaris, baik laporan kinerja bulanan terkait dengan operasi, keuangan dan investasi, *progress projects*, perkembangan implementasi *Corporate Governance* Perusahaan terutama pada aspek manajemen risiko dan pengendalian internal, maupun hal-hal khusus seperti pengalihan aset PTK kepada entitas anak. Melalui upaya pengembangan hubungan sinergis berlandaskan tatanan organisasi yang dapat dipertanggungjawabkan, Dewan Komisaris berharap fungsi pengawasan dapat berjalan secara efektif, yang pada akhirnya dapat memberikan dampak positif terhadap kinerja Perusahaan secara menyeluruh.

Di samping rapat, dalam rangka pemantauan proses bisnis Dewan Komisaris juga melakukan kunjungan lapangan untuk mendapatkan perspektif langsung dari lokasi kerja melalui kegiatan *Management Walk Through* (MWT). Selama tahun 2023, Dewan Komisaris melakukan 14 (empat belas) kali kunjungan kerja yang didampingi oleh Komite Audit, Komite Investasi serta Komite Nominasi, Remunerasi dan Manajemen Risiko, di mana hasil kunjungan kerja ini menjadi bahan bagi pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi. Untuk selanjutnya, Dewan Komisaris akan melakukan *monitoring* dan evaluasi atas penerapan strategi dan *progress* kinerja serta memberikan rekomendasi perbaikan.

Dalam rangka perbaikan kinerja Perusahaan berkelanjutan, Dewan Komisaris menitikberatkan pengawasan dan arahan terutama terhadap fungsi pemasaran, yaitu perbaikan *bundling contract*, *monitoring* terhadap fungsi Investasi, yakni aspek kinerja ABI, pengadaan kapal, merger/akuisisi Proyek Nautilus serta mendorong upaya efisiensi konsumsi BBM dan peningkatan kinerja HSSE, antara lain untuk tercapainya *zero accident*, jumlah jam kerja orang (*manhours*), serta menekan angka *Loss Time Injury Rate* (LTIR) dan *Total Recordable Injury Rate* (TRIR).

- d. Consistently applied the recovery plan strategy efforts and cost efficiency, by searching for and capturing new business opportunities outside the 2023 RKAP program.
- e. Control of business operations that are environmentally friendly, oriented towards work safety and security aspects and sensitive to social aspects (HSSE and ESG).
- f. Implementation of GCG and development of digitalization as well as preparation of guidelines in the form of a Work Procedure System (STK), Organizational Governance (TKO) & TKI) to support business processes.
- g. Determination of the overall collectivity status of receivables.
- h. Developed business cooperation with the third parties in the field of ship procurement or operation, agency activities, and so on.
- i. Consolidation of the findings (*fact finding*) and follow-up, especially related to financial performance.
- j. Strengthened the reorganization of PTK 2.0 which is the mandate of the Shareholders.
- k. Assessment of efforts to minimize business risks and take advantage of opportunities to improve PTK business performance.

Furthermore, supervisory function of the Board of Commissioners is also carried out through holding meetings, both internally and jointly by inviting the Directors. During 2023, the Board of Commissioners held 39 (thirty nine) meetings, of which 24 (twenty four) meetings were Internal Board of Commissioners Meetings, and 15 times were Joint Meetings with the Directors invited. In these meetings, especially Joint Meetings inviting the Board of Directors, several matters that require the attention from the Board of Commissioners were discussed, including monthly performance reports related to operations, finance and investment, project progress, developments in the implementation of Corporate Governance, especially in the aspects of risk management and internal control, as well as special matters such as the transfer of PTK assets to the subsidiaries. Through efforts to develop synergistic relationships based on an accountable organizational structure, the Board of Commissioners hopes that the supervisory function can run effectively, which in turn will be able to result in positive impacts on the Company's overall performance.

Apart from meetings, in order to monitor business processes, the Board of Commissioners also has agenda for field visits to gain direct perspectives from work locations through Management Walk Through (MWT) activities. During 2023, the Board of Commissioners held 14 (fourteen) working visits accompanied by the Audit Committee, Investment Committee and Nomination, Remuneration and Risk Management Committee, where the results of these working visits became material for monitoring the implementation of Company management carried out by the Board of Directors. Moving forward, the Board of Commissioners will monitor and evaluate strategy implementation and performance progress and provide recommendations for improvement.

In order to continuously improve the Company performance, the Board of Commissioners emphasizes supervision and direction, especially on the marketing function, namely improving bundling contracts, monitoring the Investment function, namely aspects of ABI performance, vessels procurement, merger/acquisition of the Nautilus Project as well as encouraging efforts to increase fuel consumption efficiency and improve performance. HSSE, among other things, purposes to achieve zero accidents, the number of people's working hours (*manhours*), as well as reducing the Loss Time Injury Rate (LTIR) and Total Recordable Injury Rate (TRIR).



Pandangan Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Views on the Implementation of Corporate Governance

Guna menerapkan tata kelola perusahaan secara konsisten dan berkelanjutan, PTK telah mengadopsi 5 (lima) prinsip tata kelola perusahaan yang baik mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan (*fairness*). Prinsip ini dilandasi pada kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta etika bisnis. Kelengkapan organ utama tata kelola perusahaan telah didukung perangkat sistem dan kebijakan yang memadai agar dapat berjalan dengan baik, yang mencakup organ RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi. Dewan Komisaris menjalankan tugas dan fungsinya dalam hal pengawasan atas pengelolaan operasional dan usaha yang dilakukan Direksi. Konsep hubungan antara Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan dalam perspektif sinergi dan kemitraan yang strategis.

Dewan Komisaris memandang, penerapan GCG di lingkungan PTK telah berjalan sesuai dengan perkembangan regulasi yang berlaku, aspirasi pemegang saham dan harapan segenap pemangku kepentingan. Sebagai bagian dari group BUMN di bidang energi, penerapan GCG di PTK mengacu diantaranya pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara. Sehubungan dengan dicabutnya parameter penilaian GCG yang menjadi standar implementasi GCG di Perusahaan dengan terbitnya Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-12/S.MBU/08/2023 tanggal 16 Agustus 2023 dan belum terbit parameter penggantinya maka Perusahaan tidak lagi melakukan penilaian GCG berdasarkan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN. Namun demikian implementasi GCG tetap dilakukan sebagaimana diamanatkan oleh GCG PT Pertamina (Persero) dengan melakukan pelaporan melalui Aplikasi Compols (*Compliance Online System*), yang mencakup implementasi pengendalian gratifikasi, *Code Of Conduct*, pengelolaan konflik kepentingan, LHKPN dan aspek sosialisasi terhadap seluruh ketentuan tersebut. Adapun hasil GCG *Compliance* PTK untuk tahun 2023 menunjukkan hasil yang konsisten dari tahun sebelumnya yakni 100%, mencakup Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh Pekerja. Wujud komitmen Perusahaan dalam peningkatan kualitas penerapan GCG ditunjukkan dalam berbagai program dan aktivitas Perusahaan yang terus dilakukan secara konsisten. Dewan Komisaris berpendapat bahwa GCG akan dapat menciptakan keseimbangan dalam pengelolaan PTK secara keseluruhan, sesuai prinsip korporasi yang dijalankan di Indonesia.

Dewan Komisaris memandang bahwa pengelolaan risiko telah difokuskan untuk mengawal target RKAP 2023, KPI Perusahaan dan RJPP dapat tercapai secara optimal sekaligus meningkatkan *shareholders value*. Dewan Komisaris secara berkala melakukan *monitoring* terhadap 7 (tujuh) risiko utama Perusahaan dibantu oleh Komite Nominasi, Remunerasi dan Manajemen Risiko (NRM) termasuk *monitoring* terhadap rencana mitigasi risiko tersebut guna menghindari kerugian dan mengoptimalkan hasil yang ditargetkan. Adapun sistem pengendalian internal dan internal audit, telah dijalankan dengan tujuan menciptakan proses bisnis yang bertanggung jawab. Perusahaan juga telah menerapkan proses audit independen oleh akuntan publik atas laporan keuangan agar independensi akuntan publik terjaga dan terhindar dari benturan kepentingan. Mekanisme penunjukan akuntan publik dilakukan hingga mendapatkan persetujuan pemegang saham dalam RUPS, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas. Laporan keuangan yang telah diaudit dan mendapatkan opini dari akuntan publik akan menjadi laporan dasar yang dapat mencerminkan kinerja PTK telah sesuai dengan standar pelaporan keuangan yang berlaku di Indonesia.

In order to implement corporate governance consistently and sustainably, PTK adopts 5 (five) principles of good corporate governance, including the principles of transparency, accountability, responsibility, independence and fairness. This principle is based on compliance with applicable laws and regulations, as well as business ethics. The completeness of the main corporate governance organs has been supported by adequate systems and policies so that they can run well, which include the GMS organs, the Board of Commissioners and the Board of Directors. The Board of Commissioners carries out its duties and functions in terms of supervision over operational and business management carried out by the Board of Directors. The concept of the relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors is carried out from the perspective of synergy and strategic partnership.

The Board of Commissioners views that GCG implementation within PTK has been carried out in line with developments in applicable regulations, the shareholders aspirations and the expectations of all stakeholders. As part of the SOE group in the energy sector, GCG implementation in PTK refers to SOE Ministerial Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises. In connection with the removal of the GCG assessment parameters which became the standard for implementing GCG in the Company with the issuance of Minister of State-Owned Enterprise Secretary Decree No. SK-12/S.MBU/08/2023 dated August 16, 2023 and the replacement parameters have not been issued, the Company will no longer carry out GCG assessments based on the Decree of the Secretary of the SOE Ministry No. SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012 concerning Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in SOE. However, GCG is still implemented as mandated by PT Pertamina (Persero) GCG by reporting via the Compols Application (Compliance Online System), which includes implementation gratification control, Code of Conducts, conflict of interest management, LHKPN and socialization aspects of all these provisions. GCG Compliance results of PTK for 2023 show consistent results from the previous year, namely 100%, including the Board of Commissioners, the Board of Directors and all Employees. The Company's commitment to improving the quality of GCG implementation is demonstrated in the Company's various programs and activities which continue to be carried out consistently. The Board of Commissioners is of the opinion that GCG will be able to create balance in the overall management of PTK, following the corporate principles implemented in Indonesia.

The Board of Commissioners views that risk management has been focused on ensuring that the 2023 RKAP target, Company KPI and RJPP can be achieved optimally while increasing the shareholders value. The Board of Commissioners regularly monitors the Company's 7 (seven) main risks assisted by the Nomination, Remuneration and Risk Management (NRM) Committee, including monitoring the risk mitigation plans in order to avoid losses and optimize targeted results. Internal control and internal audit systems have been implemented with the aim of creating responsible business processes. The Company has also implemented an independent audit process by public accountants on financial reports so that the independence of public accountants is maintained and avoids conflicts of interest. The mechanism for appointing a public accountant is carried out until the shareholders approval is obtained at the GMS, as regulated in Law no. 40 of 2007 concerning Limited Companies. The audit financial statements that received opinions from public accountants will become basic reports that can reflect PTK performance according to the applicable financial reporting standards in Indonesia.

Penguatan integritas bisnis juga terus dilakukan, terutama terkait pencegahan korupsi, gratifikasi dan benturan kepentingan melalui berbagai pelatihan maupun kampanye. Pedoman dalam mencegah dan mendeteksi berbagai potensi tindakan penyuapan yaitu Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) mengacu standar internasional ISO 37001:2016.

PTK is also continuously strengthening business integrity, especially regarding the prevention of corruption, gratification and conflicts of interest through various training and campaigns. Guidelines for preventing and detecting various potential acts of bribery, namely the Anti-Bribery Management System (SMAP) referring to the international standard ISO 37001:2016.

Penilaian atas Kinerja Organ Pendukung Dewan Komisaris

Performance Assessment of the Board of Commissioners Supporting Organs

Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, Dewan Komisaris dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris dan 3 (tiga) Komite Dewan Komisaris, seperti bagan di bawah ini.

In performing supervisory function, the Board of Commissioners is assisted by the Secretary of the Board of Commissioners and 3 (three) Committees of the Board of Commissioners, as in the chart below.

Organ Pendukung Dewan Komisaris Supporting Organs of the Board of Commissioners



Sekretaris Dewan Komisaris dan 3 (tiga) Komite Dewan Komisaris telah menjalankan fungsi dan tanggung jawab masing-masing guna mendukung fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Dewan Komisaris. Seluruh Komite telah menyusun program kerja tahunan dan laporan pelaksanaan tugas komite setiap tahunnya, untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Komisaris setiap Triwulan. Laporan setiap komite menjadi acuan penilaian kinerja dan KPI masing-masing Komite. Penilaian kinerja terhadap organ pendukung dilakukan 1 (satu) tahun sekali.

The Secretary of the Board of Commissioners and 3 (three) Committees of the Board of Commissioners carried out their respective functions and responsibilities to support the supervisory function carried out by the Board of Commissioners. All Committees prepared annual work programs and reports on the implementation of committee duties every year, to be submitted to the Board of Commissioners quarterly. Each committee's report is reference for evaluating the performance and KPIs of each Committee. Performance assessment of supporting organs is once a year.

Kinerja Komite Audit dilakukan sesuai dengan indikator penilaian kinerja yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, meliputi tingkat kehadiran dalam rapat Komite Audit, tingkat kehadiran dalam rapat internal Dewan Komisaris, tingkat kontribusi tertulis anggota Komite Audit, akurasi rekomendasi tertulis, akurasi rekomendasi lisan, peran aktif (inisiatif) dan inovasi. Selain itu, penilaian kinerja Komite Audit dilakukan berdasarkan realisasi dan penyelesaian program kerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Komite Audit dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris dalam laporan Komite Audit yang meliputi pelaksanaan tugas komite di bidang audit, kecukupan proses pengendalian internal, *review* terhadap kinerja dan hasil audit dari auditor eksternal untuk meminimalisasi risiko signifikan yang berdampak bagi Perusahaan dan penyusunan laporan keuangan. Komite Audit juga menghadiri rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi yang diselenggarakan setiap bulan dengan agenda pembahasan terkait laporan kinerja bulanan Perusahaan serta mengadakan rapat dengan Internal Audit maupun Fungsi lain sebanyak 9 (sembilan) kali.

Audit Committee performance is assessed following performance assessment indicators determined by the Board of Commissioners, including the level of attendance at Audit Committee meetings, the level of attendance at internal meetings of the Board of Commissioners, the level of written contributions of Audit Committee members, accuracy of written recommendations, accuracy of oral recommendations, active role (initiative) and innovation. In addition, Audit Committee performance is assessed based on the realization and completion of the work program stated in the Audit Committee Work Plan and reported to the Board of Commissioners in the Audit Committee report which includes the implementation of the committee's duties in the field of audit, adequacy of the internal control process, review of performance and audit results, from external auditors to minimize significant risks that impact the Company and the preparation of financial reports. The Audit Committee also attends joint meetings of the Board of Commissioners and Directors which are held every month with a discussion agenda regarding the Company's monthly performance reports and holds meetings with Internal Audit and other functions 9 (nine) times.

Kinerja Komite Investasi dilakukan sesuai dengan indikator penilaian kinerja yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, meliputi tingkat kehadiran dalam rapat Komite Investasi, tingkat kehadiran dalam rapat internal Dewan Komisaris, tingkat kontribusi tertulis bagi Komite Investasi, akurasi rekomendasi tertulis, akurasi rekomendasi lisan, peran aktif (inisiatif) dan inovasi. Selain itu, penilaian kinerja Komite Investasi dilakukan berdasarkan realisasi dan penyelesaian program kerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Komite Investasi dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris dalam laporan Komite Investasi yang meliputi Fungsi SPBD dan pelaksana proyek terkait pembaharuan

Investment Committee performance is assessed according to the performance assessment indicators determined by the Board of Commissioners, including the level of attendance at Investment Committee meetings, the level of attendance at internal meetings of the Board of Commissioners, the level of written contributions to the Investment Committee, accuracy of written recommendations, accuracy of oral recommendations, active role (initiative) and innovation. In addition, the Investment Committee's performance assessment is carried out based on the realization and completion of the work program listed in the Investment Committee's Work Plan and reported

realisasi kinerja investasi serta status kendala setiap project, terutama mengenai penyerapan anggaran biaya investasi (ABI), rencana dan progress digitalisasi serta kinerja Fungsi *Marketing* dan Fungsi *Marine Business Unit*. Komite Investasi mendampingi Dewan Komisaris dalam rapat gabungan dengan Direksi yang diselenggarakan setiap bulan terkait laporan kinerja bulanan Perusahaan serta mengadakan rapat dengan Fungsi lain sebanyak 3 (tiga) kali.

Kinerja Komite Nominasi, Remunerasi & Manajemen Risiko ("KNRM") dilakukan sesuai dengan indikator penilaian kinerja yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, meliputi tingkat kehadiran dalam rapat KNRM, tingkat kehadiran dalam rapat internal Dewan Komisaris, tingkat kontribusi tertulis bagi KNRM, akurasi rekomendasi tertulis, akurasi rekomendasi lisan, peran aktif (inisiatif) dan inovasi. Selain itu, penilaian kinerja KNRM dilakukan berdasarkan realisasi dan penyelesaian program kerja yang tercantum dalam Rencana Kerja KNRM dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris dalam laporan KNRM yang meliputi pelaksanaan tugas komite di bidang nominasi, remunerasi, dan pengawasan atas manajemen risiko, antara lain melakukan supervisi terkait reorganisasi PTK guna meningkatkan efektivitasnya dalam mendukung kinerja Perusahaan, melakukan evaluasi berkala dan memitigasi risiko/kendala yang mungkin timbul dengan implementasi organisasi baru tersebut serta mengevaluasi penyebab tidak tercapainya pendapatan operasi, khususnya dari segmen usaha *Marine Services* serta memberikan masukan dan upaya untuk mendukung pencapaian target pendapatan operasi di tahun depan. KNRM juga mendampingi Dewan Komisaris dalam rapat gabungan dengan Direksi yang diselenggarakan setiap bulan terkait laporan kinerja bulanan Perusahaan serta mengadakan rapat dengan fungsi terkait lain sebanyak 6 (enam) kali.

Berdasarkan implementasi program kerja di sepanjang tahun 2023, Dewan Komisaris menilai bahwa komite-komite di bawah Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan efektif. Hasil penilaian tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi Dewan Komisaris untuk mengangkat kembali dan/atau memberhentikan anggota Komite Audit, Komite Investasi dan KNRM untuk periode jabatan berikutnya. Atas kinerja yang telah ditunjukkan seluruh organ pendukung, Dewan Komisaris menyampaikan terima kasih dan apresiasi.

to the Board of Commissioners in the Investment Committee's report which includes the functions of the SPBD and project implementers related to updating the realization of investment performance and the status of obstacles for each project, especially regarding absorption of the investment cost budget (ABI), digitalization plans and progress as well as the performance of the Marketing Function and Marine Business Unit Function. The Investment Committee accompanies the Board of Commissioners in joint meetings with the Board of Directors which are held every month regarding the Company's monthly performance reports and holds meetings with other functions 3 (three) times.

Nomination, Remuneration & Risk Management Committee ("KNRM") performance is assessed based on performance assessment indicators determined by the Board of Commissioners, including the level of attendance at KNRM meetings, the level of attendance at internal meetings of the Board of Commissioners, the level of written contributions to KNRM, the accuracy of written recommendations, accuracy of verbal recommendations, active role (initiative) and innovation. Also, the KNRM performance assessment is carried out based on the realization and completion of the work program stated in the KNRM Work Plan and reported to the Board of Commissioners in the KNRM report which includes the implementation of the committee duties in the areas of nomination, remuneration and supervision of risk management, including supervising the reorganization. In order to increase its effectiveness in supporting the Company's performance, PTK periodically evaluates and mitigates risks/constraints that may arise with the implementation of the new organization as well as evaluate the causes of not achieving operating income, especially from the Marine Services Segment and provide input and efforts to support the achievement of operating income targets in next year. KNRM also accompanies the Board of Commissioners in joint meetings with the Board of Directors which are held every month regarding the Company's monthly performance reports and holds meetings with other related functions 6 (six) times.

Based on the implementation of the work program throughout 2023, the Board of Commissioners assesses that the Committees under the Board of Commissioners have carried out their duties and responsibilities well and effectively. These assessment results are used as consideration for the Board of Commissioners to reappoint and/or dismiss members of the Audit Committee, Investment Committee and KNRM for the next term of office. For the performance shown by all supporting organs, the Board of Commissioners expresses its thanks and appreciation.

Pandangan dan Peran Dewan Komisaris atas Penerapan *Whistleblowing System* ("WBS")

Views and Role of the Board of Commissioners on the Implementation of the *Whistleblowing System* ("WBS")

Sistem Pelaporan Pelanggaran ("WBS") merupakan sistem sekaligus saluran yang memungkinkan pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal dapat menyampaikan pengaduan terkait adanya suatu pelanggaran, baik yang dilakukan anggota Dewan Komisaris, Direksi atau karyawan Perusahaan. WBS merupakan bagian dari implementasi membangun *Fraud Control System* (FCS), yaitu upaya Perusahaan dalam memitigasi potensi risiko dan menciptakan lingkungan Perusahaan yang bersih dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), dan berperilaku etis dalam mengelola Perusahaan. Sistem WBS ini dikelola terintegrasi pada saluran WBS Pertamina *Clean* yang diterapkan oleh PT Pertamina (Persero) di seluruh grup.

The Violation Reporting System ("WBS") is a system and channel that allows both internal and external stakeholders to submit complaints regarding violations, whether committed by members of the Board of Commissioners, Board of Directors or employees of the Company. WBS is part of the implementation of building a *Fraud Control System* (FCS), which is the Company's efforts to mitigate potential risks and create a Company environment that is free from Corruption, Collusion and Nepotism (KKN) practices, and behave ethically in managing the Company. This WBS system is managed integrated into Pertamina *Clean WBS* channel which is implemented by PT Pertamina (Persero) throughout the group.

Saluran WBS telah berjalan dengan baik di tahun 2023, didukung oleh berbagai kampanye yang mendorong fungsi pengaduan tersebut. Kami melihat WBS masih menjadi alat yang paling efektif untuk mencegah, mendeteksi dan menindaklanjuti terjadinya pelanggaran etika dan hukum yang dilakukan oleh internal PT, selain yang berasal dari proses audit internal dan eksternal. Dewan Komisaris memandang bahwa peningkatan efektivitas penerapan WBS dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dalam rangka mencegah terjadinya korupsi dan *fraud* perlu terus dilakukan secara berkelanjutan.

Dewan Komisaris berperan sebagai pengawas atas laporan WBS yang masuk, sekaligus sebagai pihak yang berwenang mengeskalasi laporan WBS masuk hingga ke Dewan Komisaris. Apabila laporan yang masuk terdapat bukti yang kuat dan meyakinkan, diperlukan investigasi dari pihak eksternal yang independen sebagai dasar bagi pemberian sanksi. Apabila pengaduan pelanggaran melibatkan anggota Dewan Komisaris, laporan yang diterima oleh Fungsi Internal Audit PT Pertamina (Persero) akan ditelaah untuk ditindaklanjuti jika memang diperlukan tindakan yang lebih jauh.

Di sepanjang tahun 2023, Perusahaan telah menerima informasi dari PT Pertamina (Persero) bahwa terdapat 7 (tujuh) pengaduan yang masuk melalui mekanisme dan saluran WBS yang dimiliki oleh PT Pertamina (Persero). Seluruh laporan WBS tersebut telah ditindaklanjuti oleh Fungsi terkait.

The WBS channel has been running well in 2023, supported by various campaigns encouraging the complaint function. We consider that WBS is still the most effective tool for preventing, detecting and following up on ethical and legal violations committed by internal PT, apart from those originating from internal and external audit processes. The Board of Commissioners views that increasing the effectiveness of implementing the WBS and Anti-Bribery Management System (SMAP) in order to prevent corruption and fraud needs to be carried out on an ongoing basis.

The Board of Commissioners takes the role of supervisor of incoming WBS reports, as well as the party with the authority to escalate incoming WBS reports to the Board of Commissioners. If the report received contains strong and convincing evidence, an investigation from an independent external party is required as a basis for imposing sanctions. If a violation complaint involves a member of the Board of Commissioners, the report received by the Internal Audit Function of PT Pertamina (Persero) will be reviewed for follow-up in case further action is required.

Throughout 2023, the Company received information from PT Pertamina (Persero) that there were 7 (seven) complaints received through the WBS mechanism and channels owned by PT Pertamina (Persero). All WBS reports have been followed up by the relevant functions.

Pandangan Atas Prospek Usaha Tahun 2024

Views on Business Prospects for 2024

Tahun 2024 diprediksi oleh *International Monetary Fund* (IMF) akan meneruskan tahun penuh tantangan dari tahun lalu, dan lebih dikenal dengan istilah "*resilient but slow*", atau "tangguh meskipun lambat". Proyeksi pertumbuhan ekonomi global mencapai sebesar 3,1%, akibat dari tekanan inflasi, perlambatan ekonomi, dan keberlanjutan konflik geopolitis. Isu resesi ekonomi global menjadi gambaran atas kondisi perekonomian global yang terjadi saat ini, terutama disebabkan oleh masih ketatnya kebijakan moneter di sejumlah negara, konflik geopolitik yang masih berlanjut, tingkat suku bunga yang cukup tinggi, inflasi yang juga masih tinggi akibat kenaikan harga energi, bahan baku industri, dan bahan pangan, hingga melambatnya perdagangan global.

Namun demikian, perekonomian Indonesia diperkirakan tetap tumbuh dibanding sebagian besar negara lain. Apabila Kondisi global tersebut tidak direspon dengan baik oleh Pemerintah, regulator, pelaku industri dan pemangku kepentingan lainnya sebagai langkah antisipatif maka tentu akan memberikan dampak yang signifikan pada perekonomian Indonesia. Masih tingginya kontribusi permintaan domestik dan rendahnya eksposur terhadap ekspor/impor telah membantu menopang perekonomian Indonesia saat terjadi kejutan ekonomi global tersebut.

Dalam Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara ("RAPBN") tahun 2024, Pemerintah Indonesia memproyeksikan perekonomian Indonesia dapat tumbuh mencapai 5,2%, dengan inflasi yang terkendali pada level 2,8%, lebih baik dibanding tahun 2023. Nilai tukar Rupiah berada pada nilai Rp15.000 per Dolar AS, sedangkan harga minyak mentah Indonesia diharapkan akan berada pada angka USD82 per barel, dengan *lifting* minyak sebesar 635 ribu.

International Monetary Fund (IMF) predicted 2024 to continue the year full of challenges from previous year, and is better known as "*resilient but slow*", or "*resilient even though it is slow*". Global economic growth projections reach 3.1%, as a result of inflationary pressures, economic slowdown and ongoing geopolitical conflicts. The issue of a global economic recession is an illustration of the current global economic conditions, mainly caused by the still tight monetary policy in a number of countries, ongoing geopolitical conflicts, quite high interest rates, inflation which is also still high due to rising prices of energy and industrial raw materials, foodstuffs, to the slowdown in global trade.

However, Indonesia's economy is estimated to continue to grow compared to most other countries. If this global condition is not responded to well by the Government, regulators, industry players and other stakeholders as an anticipatory step, it will certainly have a significant impact on the Indonesian economy. The still high contribution of domestic demand and low exposure to exports/imports assisted to support the Indonesian economy during the global economic shock.

In the 2024 State Budget and Revenue and Expenditure Plan ("RAPBN"), the Indonesian Government projects that the Indonesian economy can grow at 5.2%, with the controlled inflation at 2.8%, better than in 2023. Rupiah exchange rate is at value of Rp15,000 per US Dollar, while the price of Indonesian crude oil is expected to be at USD82 per barrel, with oil lifting of 635 thousand.



Dewan Komisaris menyambut baik atas proyeksi kinerja Perusahaan sebagaimana tertuang dalam RKAP tahunan dan rencana bisnis Perusahaan 5 (lima) tahunan. Dengan optimisme perekonomian Indonesia serta target *lifting* migas yang terus meningkat, faktor eksternal Perusahaan tentu akan menjadi hal positif yang dapat memberikan dorongan bagi pertumbuhan PTK di tahun 2024 dan tahun-tahun mendatang. Dewan Komisaris sepenuhnya mendukung Direksi untuk dapat mencapai proyeksi kinerja tahun 2024 yang telah ditetapkan. Proyeksi peningkatan operasi dan pemasaran yang terdiri dari *Commission Days*, pengelolaan pelabuhan, *cargo handling*, *Commercial Days*, dan *Call Keagenan/Agency Call* diharapkan mampu mendorong pertumbuhan kinerja keuangan, dimana pendapatan PTK diharapkan tumbuh 12% dari realisasi tahun sebelumnya.

The Board of Commissioners welcomes the Company's performance projections as stated in the annual RKAP and the Company's 5 (five) year business plan. With optimism regarding the Indonesian economy and the oil and gas lifting target continuing to increase, the Company's external factors will certainly be positive things that can provide encouragement for PTK growth in 2024 and the upcoming years. The Board of Commissioners fully supports the Board of Directors to achieve the established 2024 performance projections. The projected increase in operations and marketing consisting of Commission Days, port management, cargo handling, Commercial Days, and Agency Calls is expected to be able to encourage growth in financial performance, where PTK revenue is expected to grow 12% from the previous year's realization.

Perubahan Susunan Dewan Komisaris

Changes in the Composition of the Board of Commissioners

Di sepanjang tahun 2023 terjadi perubahan susunan Dewan Komisaris pada tanggal 30 Oktober 2023 berdasarkan Keputusan Pemegang Saham secara Sirkuler (KPSSS). Dengan demikian, komposisi dan susunan Dewan Komisaris selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Throughout 2023, there were changes to the composition of the Board of Commissioners on October 30, 2023 based on the Circular Shareholder Decision (KPSSS). Thus, the composition and structure of the Board of Commissioners during 2023 is as follows:

Susunan Dewan Komisaris PTK Periode 01 Januari 2023 - 30 Oktober 2023

Composition of PTK Board of Commissioners for the period January 01, 2023 - October 30, 2023

Jabatan Position	Nama Name	Dasar Pengangkatan & Periode Jabatan Basis of Appointment & Period of Office
Komisaris Utama President Commissioner	Amir Hamzah	KPSSS tanggal 28 Mei 2021 dan Akta No. 22 Tanggal 31 Mei 2021 (28 Mei 2021 - 27 Mei 2024 Periode-1) KPSSS dated May 28, 2021 based on Deed No. 22 dated May 31, 2021 (May 28, 2021 - May 27, 2024 1 st Period)
Komisaris Commissioner	Andi Saiful Haq	- KPSSS tanggal 11 September 2020 dan Akta No. 15 Tanggal 23 September 2020 (11 September 2020 - 10 September 2023 Periode-1) - KPSSS tanggal 11 Oktober 2023 dan Akta No. 29 Tanggal 17 Oktober 2023 (11 Oktober 2023 - 10 Oktober 2026 (Periode-2)) - KPSSS dated September 11, 2020 based on Deed No. 15 dated September 23, 2020 (September 11, 2020 - September 10, 2023 1st Period) - KPSSS dated October 11, 2023 based on Deed No. 29 dated October 17, 2023 (October 11, 2023 - October 10, 2026 2nd Period)
Komisaris Commissioner	Khalid Zabidi	KPSSS tanggal 12 November 2021 dan Akta No. 16 tanggal 23 November 2021 (12 November 2021 - 11 November 2024 Periode-1) KPSSS dated November 12, 2021 based on Deed No. 16 dated November 23, 2021 (November 12, 2021 - November 11, 2024 1 st Period)
Komisaris Commissioner	Agustinus Bensik Lomboan*	KPSSS tanggal 9 Desember 2021 dan Akta No. 40 Tanggal 29 Desember 2021 (9 Desember 2021 - 1 November 2023 Periode-1) KPSSS dated December 9, 2021 based on Deed No. 40 dated November 29, 2021 (December 9, 2021 - November 1, 2023 1 st Period)

* Pemberhentian berdasarkan KPSSS tanggal 1 November 2023 & Akta No. 09 tanggal 7 November 2023

*) His term of office ended based on KPSSS dated November 1, 2023 & Deed No. 9 dated November 7, 2023

Perusahaan menyampaikan ucapan terima kasih atas peran dan kontribusi Sdr. Agustinus Bensik Lomboan selama menjabat sebagai anggota Komisaris PTK.

The Company would like to express its gratitude for the role and contribution of Mr. Agustinus Bensik Lomboan while serving as a member of the PTK Commissioner.

Susunan Dewan Komisaris PTK Periode 1 November 2023 – 31 Desember 2023

Composition of PTK Board of Commissioners for the Period November 1, 2023 – December 31, 2023

Jabatan Position	Nama Name	Dasar Pengangkatan & Periode Jabatan Basis of Appointment & Period of Office
Komisaris Utama President Commissioner	Amir Hamzah	KPSSS tanggal 28 Mei 2021 dan Akta No. 22 Tanggal 31 Mei 2021 (28 Mei 2021 - 27 Mei 2024 Periode-1) KPSSS dated May 28, 2021 based on Deed No. 22 dated May 31, 2021 (May 28, 2021 - May 27, 2024 1 st Period)
Komisaris Commissioner	Andi Saiful Haq	- KPSSS tanggal 11 September 2020 dan Akta No. 15 Tanggal 23 September 2020 (11 September 2020 - 10 September 2023 Periode-1) - KPSSS tanggal 11 Oktober 2023 dan Akta No. 29 Tanggal 17 Oktober 2023 (11 Oktober 2023 - 10 Oktober 2026 Periode-2) - KPSSS dated September 11, 2020 based on Deed No. 15 dated September 23, 2020 (September 11, 2020 - September 10, 2023 1st Period) - KPSSS dated October 11, 2023 based on Deed No. 29 dated October 17, 2023 (October 11, 2023 - October 10, 2026 2nd Period)
Komisaris Commissioner	Khalid Zabidi	KPSSS tanggal 12 November 2021 dan Akta No. 16 tanggal 23 November 2021 (12 November 2021 - 11 November 2024 Periode-1) KPSSS dated November 12, 2021 based on Deed No. 16 dated November 23, 2021 (November 12, 2021 - November 11, 2024 1 st Period)

Terjadi perubahan susunan Dewan Komisaris setelah berakhirnya periode laporan hingga terbitnya Laporan Tahunan ini, yaitu pada tanggal 12 Januari 2024 berdasarkan Akta No. 38 tanggal 17 Januari 2024 dengan diangkatnya Sdr. Hartanto sebagai Komisaris dan pada tanggal 12 Februari 2024 dengan diangkatnya Sdr. Agustinus I.T. Prasetyantoko sebagai Komisaris Independen dan Sdr. Hartanto sebagai anggota Komisaris. Dewan Komisaris menyampaikan ucapan selamat bergabung kepada kedua anggota Dewan Komisaris di atas dan semoga dengan komposisi baru ini dapat lebih meningkatkan soliditas dan fungsi pengawasan.

Penutup Letter of Appreciation

Dewan Komisaris menyambut baik segenap dedikasi yang telah ditunjukkan oleh semua pihak yang terlibat dalam proses operasi dan bisnis PTK. Atas nama Dewan Komisaris, kami menyampaikan terima kasih kepada Pemegang Saham atas dukungan dan kepercayaan yang telah diberikan. Dewan Komisaris juga menyampaikan apresiasinya kepada Direksi dan seluruh insan PTK yang telah menunjukkan semangat kerja yang tinggi dalam mengembangkan Perusahaan. Semoga, seluruh pencapaian ini dapat menjadi landasan bagi pertumbuhan kinerja Perusahaan terbaik di masa depan serta mendukung tercapainya aspirasi visi untuk menjadi Perusahaan jasa *marine* terintegrasi berkelas global pada tahun 2026.

There was a change in the composition of the Board of Commissioners after the end of the reporting period until the publication of this Annual Report, namely on February 12, 2024 based on KPSSS and Deed No. 40 dated February 22, 2024 with the appointment of Mr. Agustinus Ico Tri Prasetyantoko as Independent Commissioner and Br. Hartanto as member of the Commissioners. The Board of Commissioners would like to congratulate the two members of the Board of Commissioners above and expect that this new composition can further improve solidity and supervisory functions.

The Board of Commissioners welcomes the dedication shown by the entire parties involved in PTK's operations and business processes. On behalf of the Board of Commissioners, we would like to express our gratitude to the Shareholders for the support and trust given. The Board of Commissioners also expressed its appreciation to the Board of Directors and all PTK employees who have demonstrated high work enthusiasm in developing the Company. We hope that all of these achievements can become the foundation for the Company's best performance growth in the future and support the achievement of its vision aspirations to become a global class integrated marine services company by 2026.

Jakarta, Mei 2024
Jakarta, May 2024

Atas nama Dewan Komisaris PT Pertamina Trans Kontinental,
On behalf of the Board of Commissioners of PT Pertamina Trans Kontinental,



Amir Hamzah
Komisaris Utama
President Commissioner



Laporan Direksi

Report From the Board of Director



I Ketut Laba

Direktur Utama
President Director

"Untuk mengatasi tantangan di tahun 2023, Perusahaan telah mengembangkan strategi dan kebijakan guna mendukung tercapainya tujuan dan target RKAP antara lain melalui implementasi strategic initiatives terkait *revenue enhancement* dan *cost optimization*. Hasilnya PTK mencatat kinerja yang baik dan membanggakan dibanding tahun sebelumnya, yaitu peningkatan pendapatan usaha 41,00% dengan laba tahun berjalan sebesar 43,45% dan EBITDA Rp2.228,51 miliar sebagai tingkat profitabilitas dan peluang pertumbuhan Perusahaan yang positif."

"In the context to overcome the challenges in 2023, the Company developed strategies and policies to support the achievement of RKAP goals and targets, including through the application of strategic initiatives related to revenue enhancement and cost optimization. "As a result, PTK recorded good and encouraging performance compared to the previous year, which was an increase in operating income of 41.00% with profit for the year of 43.45% and EBITDA of Rp2,228.51 billion as a level of profitability and positive growth opportunities for the Company."

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang terhormat,

Perkenankanlah saya mewakili seluruh anggota Direksi PTK, untuk menyampaikan Laporan Tahunan 2023 PTK dengan pencapaian yang positif di tengah tantangan, baik di sektor industri dan keuangan global. Kinerja yang baik ini merupakan hasil dari komitmen dan dedikasi seluruh Insan PTK dalam pengelolaan Perusahaan secara berkelanjutan. Pencapaian kinerja, baik operasional maupun keuangan PTK di tahun 2023 patut menjadi apresiasi bagi kita semua. Melalui Laporan Tahunan ini, perkenankan kami menyampaikan hasil kinerja PTK tahun 2023 sebagai wujud pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan segenap pemangku kepentingan lainnya. Sebagai perusahaan yang bergerak di sektor jasa *marine*, PTK terus meningkatkan kapabilitasnya guna menghadirkan jasa logistik energi yang mendukung ketahanan energi nasional.

Tinjauan Ekonomi Global Global Economic Review

Pertumbuhan ekonomi global melambat dibandingkan tahun lalu, yakni hanya mencapai 3,1% berdasarkan data *International Monetary Fund* (IMF) dalam *World Economic Outlook* (WEO) Update Januari 2024. Hal tersebut dipengaruhi oleh peningkatan tensi geopolitik yang mempengaruhi *supply* dan *demand* dunia serta mengakibatkan tingginya harga energi dan pangan global. Dinamika negara-negara maju seperti di Amerika Serikat dan India yang lebih baik karena ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan ekspansi pemerintah, sedangkan ekonomi Tiongkok melemah seiring melemahnya konsumsi rumah tangga dan investasi. Belum berakhirnya konflik Israel dan Palestina menambah ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah dan juga dunia. Selain itu, perubahan kebijakan fiskal dan moneter di berbagai negara juga mempengaruhi kondisi ekonomi global secara keseluruhan, sehingga proses pemulihan ekonomi global melambat.

Dear Shareholders and Stakeholders,

Kindly let me to represent the entire members of PTK Board of Directors, to submit PTK's 2023 Annual Report with positive achievements amid the challenges, both in the industrial and global financial sectors. This good performance is the result of the commitment and dedication of all PTK People in managing the Company in a sustainable manner. All of us should appreciate PTK performance achievements, both operational and financial in 2023. Through this Annual Report, kindly allow us to deliver the results of PTK performance in 2023 as the accountability to the shareholders and all other stakeholders. As a company operating in the marine service sector, PTK continues to improve capabilities to provide energy logistics services that support national energy security.



Kondisi Ekonomi Nasional dan Industri Tahun 2023

National Economic and Industrial Conditions in 2023

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap tangguh di tengah perlambatan ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi tersebut tercermin dari kinerja lapangan usaha utama diantaranya industri pengolahan, konstruksi, dan pertambangan serta terjaganya daya beli seiring dengan inflasi yang rendah, dan stimulus kebijakan fiskal termasuk pemberian subsidi dan berbagai program bantuan sosial. Adapun pertumbuhan investasi juga tetap baik didorong oleh berlanjutnya penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN). Ekonomi nasional mampu bertahan dan mencapai pertumbuhan sebesar 5,05% (YoY) yang ditopang oleh permintaan domestik, investasi dan ekspor. Sementara inflasi tercatat 2,61% *year-on-year*, lebih rendah dibandingkan inflasi tahun lalu sebesar 5,51% dengan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (AS) sebesar Rp15.782,- per Dolar AS.

In the middle of global economic slowdown, Indonesia's economic growth remains resilient. This economic growth is reflected in the performance of the main business fields including the processing, construction and mining industries as well as maintained purchasing power in line with low inflation, and fiscal policy stimulus including the provision of subsidies and various social assistance programs. Meanwhile, investment growth also remains good, driven by the completion of National Strategic Projects (PSN). National economy was able to survive and achieved growth of 5.05% (YoY) which was supported by domestic demand, investment and exports. Meanwhile, inflation was recorded at 2.61% year-on-year, lower than last year's inflation of 5.51% with the Rupiah exchange rate against the United States (US) Dollar amounting to Rp15,782 per US Dollar.

Strategi dan Kebijakan Perusahaan Tahun 2023

Company Strategy and Policy for 2023

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang logistik energi, PTK memiliki peran dalam mendukung terjaganya suplai energi secara nasional. Terjaminnya ketersediaan pasokan migas untuk memenuhi kebutuhan domestik dapat dipertimbangkan dengan mengoptimalkan produksi dalam negeri, mengendalikan impor migas dan ekspor migas untuk mengurangi defisit neraca migas. Keamanan energi menjadi prioritas utama bagi Indonesia. PTK sebagai bagian dari Pertamina group memainkan peranan penting dalam mendukung terbentuknya lanskap energi. Peran tersebut antara lain adalah untuk memastikan ketahanan energi Indonesia dengan meningkatkan kapasitas pasokan yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, memobilisasi sumber daya domestik untuk mengurangi defisit perdagangan minyak dan gas serta melakukan dekarbonisasi, efisiensi energi, dan transisi energi mencapai target emisi nol bersih atau *Net Zero Emission* (NZE) pada tahun 2060.

Dalam menjalankan usahanya, PTK memiliki 3 (tiga) segmen usaha, yaitu *Shipping Activities*, *Marine Services*, dan *Logistics Services*.

As a company operating in the energy logistics sector, PTK takes a role in supporting the maintenance of national energy supply. Guaranteeing the availability of oil and gas supplies to meet domestic needs can be considered by optimizing domestic production, controlling oil and gas imports and oil and gas exports to reduce the oil and gas balance deficit. Energy security is a top priority for Indonesia. PTK as part of the Pertamina group plays an important role in supporting the establishment of the energy landscape. This role includes ensuring energy security in Indonesia by increasing supply capacity that supports national economic growth; mobilizing domestic resources to reduce oil and gas trade deficit as well as applying decarbonization, energy efficiency and energy transition to achieve net zero emissions (NZE) target by 2060.

In performing business, PTK has 3 (three) business segments, namely Shipping Activities, Marine Services, and Logistics Services.



Shipping Services

Shipping Activities merupakan segmen usaha PTK dalam melakukan penyedia kapal dan memberikan jasa operasional kapal, baik kapal milik maupun *brokerage* (*back-to-back*), dengan sistem sewa berjangka (*time charter*) dengan durasi sewa minimal antara 2-10 tahun, sewa jangka pendek (*spot charter*) berdurasi kurang dari 1 tahun, dan *bareboat charter*. Perusahaan melakukan sewa-menyewa kapal ini bekerja sama dengan pihak ketiga untuk berbagai jenis kapal penunjang kegiatan migas dan kapal sarana pelabuhan.

Adapun segmen usaha *Marine Services* adalah layanan PTK dalam jasa *marine* atau keagenan di seluruh pelabuhan di Indonesia termasuk *port management*, baik sebagai pelabuhan umum (keagenan umum), di pelabuhan khusus Pertamina (keagenan kapal-kapal tanker *charter*/milik Pertamina) maupun pihak ketiga. Layanan jasa *marine*



Marine Services

PTK has *Shipping Activities* as a business segment in providing vessels and providing vessel operational services, both owned and brokerage (*back-to-back*) vessels, with a time charter system with a minimum charter duration of between 2-10 years, short-term charter (*spot charter*) with a duration of less than 1 year, and *bareboat charter*. The Company leases these vessels in collaboration with the third parties for various types of vessels supporting oil and gas activities and port facilities vessels.

Marine Services business segment is PTK services in marine or agency services at all ports in Indonesia including port management, both as general ports (general agencies), at special Pertamina ports (agents for chartered/Pertamina-owned tanker vessels) and third parties. Marine services which consist of 12 business sub-segment, including



Logistic Services

meliputi 12 sub segmen usaha: (1) *pilotage & towage*, (2) *dredging*, (3) *hydrographic & oceanographic surveys underwater landscape mapping*, (4) *recognized security organization for ISPS Code*, (5) *underwater work services*, (6) *fresh water supply /industrial*, (7) *waste management*, (8) *port management & operation*, (9) *port management & facility maintenance*, (10) *port permit & licenses*, (11) *provision of mooring master & POAC* dan (12) *oil spill responses*. Dalam menjalankan usaha tersebut di atas, PTK melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, antara lain seperti otoritas pelabuhan, pelayaran dan pengangkutan serta pemeliharaan fasilitas pelabuhan. Untuk itu, aspek lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 menjadi bagian penting dari manajemen pelabuhan yang dijalankan oleh PTK.

Dan segmen usaha *Logistic Services* adalah layanan PTK di bidang operasi kepelabuhanan menjadi 5 sub segmen usaha, meliputi: (1) *customs clearance for ships*; (2) *freight forwarding*; (3) *logistic base* yang terdiri dari *stevedoring*, *cargodoring*, *open yard*, *warehousing*; (4) *general services*; dan (5) *ship logistic supply/ship chandler*.

Pada tahun 2023, strategi dan kebijakan strategis bisnis PTK dikembangkan dengan mengacu pada Rencana Strategis Jangka Panjang Tahun 2022-2027 guna meningkatkan pertumbuhan Perusahaan dalam jangka panjang yaitu: 1) memaksimalkan potensi sumber daya logistik di dalam negeri, 2) melakukan ekspansi di kancah internasional, serta 3) mengembangkan berbagai bisnis dan produk turunan logistik energi, (4) meningkatkan digitalisasi proses bisnis; (5) melakukan efisiensi biaya operasi dan pemeliharaan kapal melalui program perawatan armada kapal secara terintegrasi; (6) mengembangkan organisasi sejalan dengan arah bisnis Perusahaan dengan; (7) sertifikasi dan meningkatkan kompetensi pekerja terkait dengan pekerjaan *marine & port engineering*, perawatan sarfas pelabuhan, pengerukan alur pelayaran.

Pada segmen usaha *Shipping Activities*, strategi dan kebijakan PTK tahun 2023 diarahkan agar secara berkesinambungan Perusahaan melakukan evaluasi atas kapal-kapal Pertamina yang akan dialihkan kepada PTK sehingga utilisasi kapal dapat optimal; mengembangkan segmen pasar penyediaan kapal di *Subholding Upstream*, dengan tetap menjaga aspek HSSE dan operational excellence kapal untuk pelanggan eksisting; serta melanjutkan program *computerized maintenance management system* pada kapal milik guna menjaga kehandalan kapal untuk mencapai target *commission days* dan *commercial days*. Selain itu, Kami juga terus melakukan program peningkatan kompetensi *crew* kapal guna menjaga kepercayaan pelanggan serta menerapkan *e-Procurement* dan strategi kontrak payung terkait pemenuhan maintenance kapal untuk mencapai target *commission* dan *commercial days*.

Pada segmen usaha *Marine Services* di tahun 2023, strategi dan kebijakan PTK fokus untuk terus memperkuat sinergi dengan sesama entitas grup Pertamina maupun dengan entitas BUMN lainnya untuk mengembangkan peluang bisnis marine dan untuk mendorong akselerasi pertumbuhan pasar melalui penawaran paket pekerjaan dengan skema *bundling* dan layanan *one-stop-services*. Disamping itu, PTK juga berupaya melakukan investasi penambahan alat penunjang kegiatan *oil spill response* dan teknik bawah air, melakukan sertifikasi dan peningkatan kompetensi terkait dengan *marine & port engineering*, perawatan sarfas pelabuhan, dan pengerukan alur pelayaran.

(1) *pilotage & towage*, (2) *dredging*, (3) *hydrographic & oceanographic surveys underwater landscape mapping*, (4) *recognized security organization for ISPS Code*, (5) *underwater work services*, (6) *fresh water supply /industrial*, (7) *waste management*, (8) *port management & operation*, (9) *port management & facility maintenance*, (10) *port permit & licenses*, (11) *provision of mooring master & POAC* and (12) *oil spill responses*. In carrying out the business mentioned above, PTK coordinates with various related parties, such as port authorities, shipping, and transportation, as well as inventory management and facility maintenance. Therefore, environmental, safety, and occupational health (K3) aspects are also an important part of port management carried out by PTK.

And the Logistic Services business segment is PTK services in the field of port operations which consists of 5 business subsegments, including (1) *customs clearance for ships*; (2) *freight forwarding*; (3) *logistic base* yang terdiri dari *stevedoring*, *cargodoring*, *open yard*, *warehousing*; (4) *general services*; and (5) *ship logistic supply/ship chandler*.

In 2023, PTK business strategies and strategic policies were developed with reference to the 2022-2027 Long Term Strategic Plan in order to increase the Company growth in the long term, including: 1) maximizing the potential of domestic logistics resources, 2) expanding internationally, and 3) developing various businesses and energy logistics derivative products, (4) increasing the digitalization of business processes; (5) efficiency of vessel operation and maintenance costs through an integrated vessel fleet maintenance program; (6) developing the organization in line with the Company's business direction by; (7) certification and increasing worker competency related to marine & port engineering work, port infrastructure maintenance, dredging of shipping channels.

In the Shipping Activities business segment, PTK strategy and policy for 2023 was directed at ensuring that the Company continuously evaluates Pertamina vessels that will be transferred to PTK so as to make vessel utilization optimal; developing the vessel supply market segment in Upstream Subholding, while maintaining HSSE aspects and vessel operational excellence for the existing customers; and keeping at the computerized maintenance management system program on owned vessels to maintain their reliability to achieve target *commission days* and *commercial days*. Moreover, we also keep running programs to increase the competency of vessel crews to maintain the customers trust and apply the *e-Procurement* as well as contract strategies related to fulfilling vessel maintenance to achieve *commission* and *commercial days* targets.

In the Marine Services business segment in 2023, PTK strategy and policies focus on continuing to strengthen synergies with fellow Pertamina group entities and with other state-owned entities to develop marine business opportunities and to encourage the accelerated market growth by offering work packages with bundling schemes and one-stop services. Moreover, PTK also tries to invest in additional equipment to support oil spill response activities and underwater engineering, certification and increases competency related to marine and port engineering, maintenance of port infrastructure, and dredging of shipping channels.



Pada segmen usaha *Logistic Services* di tahun 2023, strategi dan kebijakan PTK fokus untuk berupaya menambah investasi *heavy equipment* dan *cargo handling* pada Peteka Shorebase Tanjung Batu (PSTB) untuk meningkatkan *operational excellence*; mengembangkan bisnis *logistic shorebase* Kabil melalui kemitraan strategis; memperluas potensial *market logistic shorebase* di area hub atau *centre point* yang berdekatan dengan proyek eksplorasi migas.

In the Logistic Services business segment in 2023, PTK strategy and policies focus on increasing investment in heavy equipment and cargo handling at Peteka Shorebase Tanjung Batu (PSTB) to increase operational excellence; developing the Kabil shorebase logistics business through strategic partnerships; expanding the shorebase logistics market potential in hub or center point areas adjacent to oil and gas exploration projects.

Pada lini pendukung bisnis, yaitu aspek Organisasi dan Manajemen Portofolio, PTK mengembangkan kebijakan dan strategi untuk melanjutkan program transformasi budaya organisasi yang *agile* dan kompetitif; mengembangkan organisasi serta *workforce planning* sejalan dengan arah bisnis entitas induk Perusahaan; optimalisasi portofolio anak perusahaan melalui *rebranding* serta melakukan Inisiasi atas program HSE *excellence* dan peningkatan *rating* ESG guna mendukung tercapainya kelangsungan usaha jangka panjang perusahaan. PTK berkomitmen memastikan seluruh proses bisnis berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dengan tetap memperhatikan dampak terhadap lingkungan dan masyarakat, etika bisnis, serta perlindungan hak asasi manusia.

In the business support line, namely the Organizational and Portfolio Management aspects, PTK develops policies and strategies to continue the agile and competitive organizational culture transformation program; develops organization and workforce planning in line with the business direction of the parent company; optimizes the Company's subsidiary portfolio through rebranding as well as initiates the HSE excellence program and increasing the ESG rating to support the achievement of the Company's long-term business continuity. PTK is committed to ensuring that all business processes run according to the applicable regulations while still considering the impacts on the environment and society, business ethics and the protection of human rights.



Peranan Direksi dalam Perumusan serta Implementasi Strategi dan Kebijakan Strategis

The Role of the Board of Directors in the Formulation and Implementation of Strategies and Strategic Policies

Dalam proses perumusan program kerja Perusahaan, baik dalam RKAP yang disusun setiap tahun maupun RJPP yang disusun setiap lima tahun sekali, Direksi telah memetakan tantangan dan risiko yang dihadapi PTK. Dalam rangka menghadapi tantangan dan risiko tersebut dapat dikelola dengan baik maka Direksi menyusun strategi dan kebijakan, dengan memastikan bahwa strategi dan kebijakan yang disusun tersebut telah sesuai dengan penerapan tata kelola, termasuk memperhatikan aspek keberlanjutan yang menjadi topik hangat dunia usaha saat ini.

In the process of formulating the Company's work program, both in the RKAP which is annually prepared and the RJPP which is prepared every five years, the Board of Directors already mapped the challenges and risks faced by PTK. In order to face these challenges and risks that can be managed well, the Board of Directors formulates strategies and policies, ensuring that the strategies and policies prepared are following the implementation of governance, including paying attention to sustainability aspects which are currently a live topic in the business world.

Untuk menjamin penerapan strategi dan kebijakan berjalan efektif, maka Direksi akan mempresentasikan strategi yang telah disusun kepada segenap unit kerja dan departemen terkait, serta memberikan pengarahan yang diperlukan dalam menentukan langkah teknis penerapan strategi dan kebijakan strategis tersebut. Secara berkala, Direksi akan melakukan rapat bersama unit kerja terkait membahas hasil kinerja Perusahaan, sekaligus untuk memantau perkembangan hasil penerapan strategi dan kebijakan yang telah dijalankan.

To ensure that the implementation of strategies and policies is effective, the Board of Directors will present the strategies prepared to all work units and related departments, as well as provide the necessary direction in determining the technical steps for implementing the strategies and strategic policies. The Board of Directors will hold meetings periodically with the related work units to discuss the Company performance results, as well as to monitor the development of the results of the implementation of strategies and policies applied.

Pencapaian Kinerja 2023 serta Perbandingan Antara Hasil yang Dicapai Dengan Target

2023 Performance Achievements and Comparison Between Results Achieved and Targets

Secara umum, keseluruhan kinerja operasional dan keuangan PTK meningkat dan berada di atas target yang ditetapkan dalam RKAP 2023 maupun KPI Perusahaan 2023 yang tertuang dalam Kontrak Manajemen antara PTK dengan pemegang saham. Realisasi KPI Perusahaan 2023 mencapai sebesar 103,80%, artinya bahwa sebagian

In general, PTK operational and financial performance has increased as a whole and is above the targets set in the 2023 RKAP and 2023 Company KPI as stated in the Management Contract between PTK and its shareholders. The realization of the Company's 2023 KPI reached 103.80%. This means that most of the Company's 2023 KPI items

besar item KPI Perusahaan 2023 terkait kinerja operasi, keuangan dan pemasaran mencatat pencapaian yang baik atau di atas target RKAP 2023. Realisasi *commission days* yang menunjukkan ketersediaan dan kelaiklautan kapal untuk dipasarkan tercatat 108,63% dari target atau meningkat dibandingkan tahun 2022. Hal ini terutama disebabkan adanya penambahan armada di akhir tahun 2022 yaitu inbreng 22 kapal eks-marine pada akhir November 2022, serta tambahan 2 kapal LCT dan 2 set kapal TB-OB di akhir Desember 2022. Sedangkan realisasi *commercial days*, merupakan realisasi kapal yang tersewa oleh *pen-charter*, tercatat 108,09% dari target atau meningkat dibandingkan tahun 2022, terutama disebabkan oleh adanya penambahan 26 unit kapal. Sedangkan realisasi *call* keagenan pada tahun 2023 mencapai sebesar 28.259 *call*, tercatat 95,53% dari target RKAP sebesar 29.581 *call*, terutama dipengaruhi oleh jumlah *call* yang mengikuti dinamika distribusi dan pembelian minyak dan gas oleh Pertamina.

Untuk kinerja keuangan tahun 2023, realisasi pendapatan usaha PTK tercatat mencapai sebesar Rp6,75 triliun, mengalami peningkatan 41,00% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1,96 triliun, yang dikontribusikan dari pendapatan segmen *marine services* sebesar 55,83% atau Rp3,77 triliun, disusul pendapatan segmen *shipping activities* sebesar 38,51% atau Rp2,60 triliun, dan pendapatan segmen *logistic services* sebesar 5,66% atau Rp381,74 miliar. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh pengakuan minimum *thruput* di bulan Oktober 2023 dan pengakuan kenaikan atas selisih tarif baru untuk *bundling* C&T dari 27,97 Rp/L menjadi 35 Rp/L. Adapun beban pokok pendapatan mengalami kenaikan 32,42% menjadi Rp 4,15 triliun pada tahun 2023, namun masih di bawah kenaikan perolehan pendapatan usaha sepanjang tahun 2023. Selain itu, Perusahaan juga telah mampu menekan biaya menjadi sebesar 74,73% terhadap anggaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan efisiensi ini memberikan nilai tambah bagi profitabilitas, dimana laba tahun berjalan meningkat 43,45% menjadi sebesar Rp1,05 triliun dibanding tahun sebelumnya, dan EBITDA mencapai sebesar Rp2.228,51 miliar, jauh di atas target yang telah ditetapkan, yang menunjukkan bahwa tingkat profitabilitas PTK berada pada nilai dan peluang pertumbuhan yang positif.

Pada posisi keuangan Perusahaan, realisasi nilai aset tahun 2023 tercatat meningkat 10,02% menjadi sebesar Rp9,02 triliun dibanding tahun 2022 sebesar Rp8,20 triliun, terutama didorong oleh peningkatan pada aset lancar yaitu pajak dibayar dimuka - pajak lain-lain sebesar 416,88%, disusul uang muka dan biaya dibayar dimuka sebesar 109,03% serta; kas dan setara kas sebesar 63,77%. Liabilitas tercatat turun 4,58% menjadi sebesar Rp4,38 triliun, dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp4,59 triliun dimana jumlah liabilitas jangka pendek turun 1,80% menjadi sebesar Rp3,55 triliun, yaitu dibandingkan tahun 2022, terutama disebabkan adanya penurunan pada biaya masih harus dibayar, liabilitas sewa, dan utang usaha. Sedangkan jumlah liabilitas jangka panjang, yaitu mengalami penurunan 14,81% menjadi sebesar Rp836,11 miliar dibandingkan tahun 2022, terutama disebabkan oleh adanya penurunan pada jumlah pinjaman jangka panjang. Sedangkan ekuitas PTK 2023 tercatat 109,53% terhadap target atau meningkat 28,63% menjadi sebesar Rp4,64 triliun dibandingkan tahun 2022 yang disebabkan adanya peningkatan pada saldo laba.

related to operational, financial and marketing performance recorded good achievements or above the 2023 RKAP target, namely 108,63% of the target or an increase compared to 2022. This is mainly due to the addition of the fleet at the end of 2022, where the Company added 22 ex-marine vessels at the end of November 2022, as well as 2 LCT ships and 2 sets of TB-OB ships at the end of December 2022. Meanwhile, the realization of commercial days, which is the realization of vessels chartered was recorded at 108.09% of the target or an increase compared to 2022, mainly due to the addition of 26 vessels. Meanwhile, the realization of agency cash in 2023 reached 28,259 calls, recorded at 95.53% of the RKAP target of 29,581 calls, mainly influenced by the number of calls which followed the dynamics of distribution and purchasing of oil and gas by Pertamina.

For financial performance in 2023, realized business revenue of PTK was recorded at Rp6.75 trillion, an increase of 41.00% compared to the previous year of Rp1.96 trillion, contributed by marine services segment revenue of 55.83% or Rp3.77 trillion, followed by shipping activities segment revenue of 38.51% or Rp2.60 trillion, and logistics services segment revenue of 5.66% or Rp381.74 billion. This increase was mainly driven by the recognition of minimum throughput in October 2023 and the recognition of an increase in the new tariff difference for C&T bundling from 27.97 Rp/L to 35 Rp/L. The cost of revenue has increased by 32.42% to Rp4.15 trillion in 2023, but is still below the increase in operating income throughout 2023. Furthermore, the Company was also been able to reduce costs to 74.73% of the established budget. This efficiency success provides added value to profitability, where profit for the year increased 43.45% to Rp1.05 trillion compared to the previous year, and EBITDA reached Rp2,228.51 billion, far above the established target, which shows that profitability level of PTK is at a positive value and growth opportunity.

In terms of the Company's financial position, the realized asset value in 2023 was recorded to have increased by 10.02% to Rp. 9.02 trillion compared to 2022 of Rp8.20 trillion, mainly driven by an increase in current assets, namely prepaid taxes - other taxes of 416, 88%, followed by down payment and prepaid expenses amounting to 109.03% as well as; cash and cash equivalents of 63.77%. Liabilities were recorded to have decreased by 4.58% to Rp4.38 trillion, compared to 2022 of Rp4.59 trillion, where the amount of short-term liabilities decreased by 1.80% to Rp3.55 trillion, namely compared to 2022, mainly due to a decrease in costs. accrued expenses, rental liabilities, and business debts. Meanwhile, the amount of long-term liabilities decreased by 14.81% or amounting to Rp836.11 billion compared to 2022, mainly due to a decrease in the amount of long-term loans. Meanwhile, PTK 2023 equity was recorded at 109.53% of the target or an increase of 28.63% to Rp4.64 trillion compared to 2022 due to an increase in the retained earnings.



Tantangan dan Kendala serta Langkah Penyelesaian Challenges and Obstacles, as well as Settlement Steps

Di sepanjang tahun 2023 Perusahaan memiliki sejumlah kendala dan tantangan, yang dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal, antara lain terkait dengan keterbatasan sumber pendanaan untuk investasi, kehandalan armada dan mutu layanan yang belum sepenuhnya memenuhi *best practice*, kurangnya *cost consciousness & market analysis* mengingat bisnis Perusahaan masih didominasi oleh *captive market* serta belum optimalnya utilisasi teknologi informasi untuk integrasi data informasi terkait operasional bisnis Perusahaan.

Untuk mengatasi kendala dan tantangan tersebut, Perusahaan telah mengembangkan strategi dan kebijakan yang menjadi solusi bagi PTK untuk menunjang pencapaian tujuan dan target Perusahaan di tahun 2023 antara lain dengan menerapkan *strategic initiatives* terkait *revenue enhancement* dan *cost optimization*. Adapun Top 5 *Strategic Initiatives* terkait *revenue enhancement* antara lain dilakukan dengan: optimalisasi potensial utilisasi *tugboat* di terminal RU II Sei Pakning; *revenue creation pilot project* pengelolaan mandiri revitalisasi FT Camplong; kerjasama bisnis *ship chandler*; *bunker handling* serta layanan *bunker & ROB* kapal; pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal dengan potensi penambahan 10 lokasi Tersus/TUKS Pertamina serta penyediaan jasa OSR untuk *Subholding* Hulu Pertamina.

Di sisi *cost optimization*, Perusahaan telah menjalankan Top 5 *Cost Optimization* melalui penguatan peran Dok Bagus Kuning sebagai *workshop* internal PTK; penataan *agency cost* untuk operasional keagenan guna efisiensi Perusahaan; pengembangan lanjutan digitalisasi *maintenance* (CMMS); pengembangan kontrak payung lanjutan untuk pengadaan barang dan jasa kapal; serta implementasi program peningkatan *performance* dan efisiensi penggunaan BBM *own use tugboat* melalui media metode kendali suplai *bunker*. Selain itu, penerapan manajemen risiko di PTK menjadi bagian dari sistem peringatan dini Perusahaan dalam menghadapi perubahan yang mungkin terjadi sehingga dapat menyiapkan langkah mitigasi yang tepat dalam menghadapinya.

Throughout 2023, the Company faced several obstacles and challenges, which were influenced by external and internal factors, including those related to limited funding sources for investment, fleet reliability and service quality that do not fully meet best practice, lack of cost consciousness and market analysis considering the Company business is still dominated by the captive market and the utilization of information technology is not yet optimal for integrating information data related to business operations of the Company.

In order to overcome these obstacles and challenges, the Company developed strategies and policies that are solutions for PTK to support the achievement of the Company goals and targets in 2023, including by implementing strategic initiatives related to revenue enhancement and cost optimization. The Top 5 Strategic Initiatives related to revenue enhancement include: optimizing potential tugboat utilization at the RU II Sei Pakning terminal; revenue creation pilot project for independent management of FT Camplong revitalization; ship chandler business cooperation; bunker handling and ship bunker & ROB services; ship piloting and towing services with the potential to add 10 Pertamina Tersus/TUKS locations as well as providing OSR services for Pertamina's Upstream Subholding.

In terms of the cost optimization, the Company applies Top 5 Cost Optimization by strengthening the role of Dok Bagus Kuning as an internal PTK workshop; agency costs structuring for agency operations for Company efficiency; keeps at development of maintenance digitalization (CMMS); development of the advanced contracts for the procurement of vessel goods and services; as well as implementing a program to improve the performance and efficiency of own use tugboat fuel use through the media of bunker supply control methods. Also, the implementation of risk management in PTK is part of the Company's early warning system in dealing with changes that may occur so as the appropriate mitigation steps to deal with them can be prepared.

Perkembangan Implementasi Tata Kelola Perusahaan Development of Corporate Governance Implementation

Tata Kelola Perusahaan atau *Corporate Governance* merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan secara profesional berdasarkan pada 5 (lima) prinsip yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan keadilan serta kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan. Organ Perusahaan yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi telah menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perusahaan. Hubungan kerja antara Direksi dan Dewan Komisaris maupun dengan Pemegang Saham/RUPS dilakukan berdasarkan mekanisme *check and balances*. Penerapan prinsip tata kelola diharapkan mampu mendorong pengelolaan Perusahaan lebih akuntabel, menciptakan nilai tambah bagi Perusahaan dan mengembangkan citra positif Perusahaan dalam jangka panjang. Untuk itu, GCG perlu diimplementasikan sedemikian rupa agar menjadi penunjang dalam proses bisnis di Perusahaan.

Corporate Governance is a system designed to direct the professional management of a company based on 5 (five) principles that cover the principles of transparency, accountability, responsibility, independence and fairness and equality in fulfilling the rights of stakeholders arising from agreements and laws and regulations. The Company's organs consisting of the General Meeting of Shareholders (GMS), Board of Commissioners and Directors have carried out their respective functions, duties and responsibilities following the Limited Liability Company Law and the Company's Articles of Association. The working relationship between the Board of Directors and the Board of Commissioners as well as with the Shareholders/GMS is performed based on a check and balances mechanism. The application of governance principles is expected to be able to encourage more accountable Company management, create added values for the Company and develop positive image of the Company in the long term. For this reason, GCG needs to be implemented in such a way that it supports business processes in the Company.

Dalam mendukung penguatan penerapan GCG, PTK terus meningkatkan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang berpedoman pada standar internasional SNI ISO 37001:2016 melalui pelatihan dan kampanye. Selain itu, PTK juga secara berkelanjutan mengimplementasikan kebijakan terkait lainnya seperti Kebijakan Pengendalian Gratifikasi Perusahaan serta Kebijakan Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) guna mewujudkan operasional Perusahaan dengan lebih transparan, adil dan menghindari terjadinya *fraud* dan tindakan penyuapan. Hal ini sejalan dengan hasil pemenuhan GCG PTK melalui *Compliance Online System* (COMPOLS) untuk tahun 2023 yang menunjukkan hasil yang konsisten dari tahun sebelumnya yakni mencapai 100% pemenuhan atas aspek-aspek yang menjadi penilaiannya, antara lain implementasi gratifikasi, *Code of Conduct*, pengelolaan konflik kepentingan, LHKPN dan aspek sosialisasi terhadap seluruh ketentuan tersebut, baik di tingkat Dewan Komisaris, Direksi maupun seluruh insan PTK. Direksi meyakini bahwa penerapan GCG yang konsisten akan dapat menciptakan keseimbangan dalam pengelolaan PTK serta meningkatkan kepercayaan publik bahwa Perusahaan dikelola secara amanah dan akuntabel.

Sejalan dengan perkembangan regulasi GCG di BUMN, maka PTK mulai mengadopsi ketentuan GCG baru antara lain mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara. Setiap tahun, PTK melakukan penilaian terhadap penerapan GCG di Perusahaan, namun dengan dicabutnya parameter penilaian GCG BUMN yang menjadi standar implementasi GCG di Perusahaan dan belum terbitnya parameter pengganti tersebut penilaian GCG dilakukan secara *self-assessment* untuk memonitor tindak lanjut atas temuan penilaian GCG sebelumnya berdasarkan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN. Disamping penilaian GCG di PTK juga dilakukan pelaporan gratifikasi yang dilakukan setiap bulan melalui *Compliance Online System* (COMPOLS).

Dalam menjalankan tata kelola Direksi, dibantu oleh organ pendukungnya antara lain adalah Sekretaris Perusahaan, Fungsi Manajemen Risiko dan Internal Audit. Dalam penyusunan RKAP 2023, Perusahaan telah menerapkan RKAP berbasis risiko, dimana Fungsi Manajemen Risiko telah melakukan pemetaan risiko korporat yang dapat mempengaruhi pencapaian target dalam RKAP dan KPI Perusahaan ke dalam 7 (tujuh) risiko utama Perusahaan. Pengelolaan risiko menjadi salah satu *item* dalam *Boundary* KPI dengan bobot yang telah ditentukan. Untuk itulah, secara berkala, Fungsi Manajemen Risiko melaporkan hasil pengelolaan risikonya termasuk rencana mitigasi risiko kepada Direksi dan juga berkoordinasi dengan Komite Nominasi, Remunerasi dan Manajemen Risiko (KNRM) di bawah Dewan Komisaris untuk meminimalisasi kerugian yang mungkin terjadi dan mengoptimalkan hasil yang ditargetkan.

Internal Audit menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan organisasi Perusahaan yang menjalankan fungsi pengendalian, pengawasan dan mitigasi atas risiko usaha. Bekerjasama dengan Komite Audit di bawah Dewan Komisaris, Fungsi Internal audit memiliki peran penting dalam memberikan evaluasi yang strategis bagi pengembangan PTK ke depan. Sedangkan sistem pengendalian internal merupakan suatu proses yang melibatkan seluruh komponen di dalam PTK mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, jajaran manajemen Perusahaan, sampai dengan segenap karyawan di seluruh tingkatan dan organisasi. Pengendalian internal dirancang untuk memberikan keyakinan

In supporting the strengthening of GCG implementation, PTK continues to improve the implementation of Anti-Bribery Management System (SMAP) which is guided by the international standard SNI ISO 37001:2016 through training and campaigns. Furthermore, PTK also continuously implements other related policies such as the Company's Gratification Control Policy and the Policy for Submission and Management of State Officials' Wealth Reports (LHKPN) in order to make the Company's operations more transparent, fair and avoid fraud and bribery. This is in line with the results of PTK's GCG fulfillment through the Compliance Online System (COMPOLS) for 2023, namely achieving 100% fulfillment of the aspects that were assessed, including the implementation of gratuities, Code of Conduct, management of conflicts of interest, LHKPN and socialization aspects of all these provisions, both at the level of the Board of Commissioners, Directors and PTK personnel as a whole. The Board of Directors believes that consistent GCG implementation will be able to create balance in PTK management and increase public trust that the Company is managed in a trustworthy and accountable manner.

In line with the development of GCG regulations in SOE, PTK began to adopt new GCG provisions, including referring to SOE Ministerial Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises. Every year, PTK undertakes assessment for GCG implementation in the Company, however, with the removal of the SOE GCG assessment parameters which have become the standard for GCG implementation in the Company and the replacement parameters have not yet been issued, the GCG assessment is carried out by self-assessment to monitor the follow-up to the findings of the previous GCG assessment based on the Decree by Secretary of the SOE Ministry No. SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012 concerning Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in SOE. In addition to the GCG assessment at PTK, gratification reporting is also carried out every month through the Compliance Online System (COMPOLS).

In running governance, the Board of Directors is assisted by supporting organs, including the Corporate Secretary, risk management and Internal Audit functions. In preparing the 2023 RKAP, the Company applied a risk-based RKAP, where the risk management function has carried out corporate risk mapping which can influence the achievement of targets in the Company's RKAP and KPI into the Company's 7 (seven) main risks. Risk management is one of the items in the KPI Boundary with a predetermined weight. For this reason, the risk management function reports the results of risk management periodically, including risk mitigation plans to the Board of Directors and also coordinates with the Nomination, Remuneration and Risk Management Committee (KNRM) under the Board of Commissioners to minimize possible losses and optimize the targeted results.

Internal Audit is an inseparable part of the Company's organization management which runs the functions of controlling, supervising and mitigating business risks. In collaboration with the Audit Committee under the Board of Commissioners, Internal Audit has an important role in providing strategic evaluations for future PTK development. Meanwhile, the internal control system is a process that involves all components in PTK starting from the Board of Commissioners, Board of Directors, Company management, to all employees at all levels and organizations. Internal control is designed to provide adequate confidence that the Company is managed in order to achieve stated



yang memadai bahwa Perusahaan dikelola dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan, meningkatkan efektivitas dan efisiensi bisnis, memastikan keandalan laporan keuangan, menjaga aset Perusahaan serta menjaga kepatuhan terhadap hukum dan peraturan atas kegiatan bisnis Perusahaan. Untuk itulah, Perusahaan menerapkan proses audit independen oleh akuntan publik atas laporan keuangan agar independensinya terjaga dan terhindar dari benturan kepentingan. Laporan keuangan yang telah diaudit untuk tahun buku 2023 memperoleh opini dari akuntan publik menjadi laporan dasar yang dapat mencerminkan kinerja PTK telah sesuai dengan standar pelaporan keuangan yang berlaku di Indonesia.

Adapun implementasi sistem pelaporan pelanggaran (WBS) merupakan salah satu bentuk komitmen PTK dalam membangun *Fraud Control System* (FCS) guna memitigasi potensi risiko terhadap praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), maupun perilaku tidak etis lainnya dalam mengelola Perusahaan. Sistem WBS dikelola secara terintegrasi dengan saluran WBS Pertamina *Clean* yang digunakan di seluruh PT Pertamina (Persero) grup. Di sepanjang tahun 2023, Perusahaan telah menerima informasi dari PT Pertamina (Persero) bahwa terdapat 7 (tujuh) pengaduan yang masuk melalui mekanisme dan saluran WBS yang dimiliki oleh PT Pertamina (Persero). Seluruh laporan WBS tersebut telah ditindaklanjuti oleh Fungsi terkait.

objectives, increase business effectiveness and efficiency, ensure the reliability of financial reports, safeguard Company assets and maintain compliance with laws and regulations regarding the Company's business activities. For this reason, the Company implements an independent audit process by public accountants on financial reports so that independence is maintained and conflicts of interest are avoided. The audited financial report for the 2023 financial year obtained an opinion from a public accountant to become a basic report that can reflect PTK performance based on the financial reporting standards applicable in Indonesia.

PTK provides violation reporting system (WBS) as commitment to building a Fraud Control System (FCS) to mitigate potential risks regarding Corruption, Collusion and Nepotism (KKN) practices, as well as other unethical behavior in managing the Company. WBS system is managed in an integrated manner with the Pertamina Clean WBS channel which is used throughout the PT Pertamina (Persero) group. In 2023, the Company received information from PT Pertamina (Persero) that there were 7 (seven) complaints received through the WBS mechanism and channels owned by PT Pertamina (Persero). All WBS reports have been followed up by the relevant functions.

Dukung Strategi Keberlanjutan dan *Green Port* di Indonesia Supporting Sustainability and Green Port Strategies in Indonesia

PTK memastikan bahwa dalam menjalankan bisnisnya Perusahaan tetap dapat mengelola potensi dampak negatif terhadap lingkungan, masyarakat sekitar, maupun mitra bisnis sejalan dengan pendekatan *triple bottom line*, yang meliputi *profit*, *people* dan *planet*. Untuk itu, Perusahaan mengembangkan strategi keberlanjutan yang mengintegrasikan prinsip lingkungan, sosial dan tata kelola ke dalam operasional bisnis PTK agar dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Salah satunya melalui pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ("TJSL") yang bertujuan untuk membangun keselarasan bersama para pemangku kepentingan dan untuk mewujudkan pertumbuhan yang berkelanjutan. Adapun ruang lingkup program TJSL dalam arti yang luas mencakup aspek pengelolaan lingkungan hidup, aspek Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), aspek pengembangan sosial kemasyarakatan, serta aspek tanggung jawab terhadap pelanggan. Untuk itulah PTK setiap tahun telah menyusun dan menerbitkan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Reporting*) sebagai bentuk pertanggungjawaban Perusahaan kepada segenap pemangku kepentingan terkait dengan hasil kinerja lingkungan, kinerja sosial, maupun kinerja tata kelola dalam buku terpisah dan menjadi satu kesatuan dengan Laporan Tahunan ini.

PTK ensures that in running business, the Company is still able to manage potential negative impacts on the environment, surrounding communities and business partners in line with the triple bottom line approach, which includes profit, people and planet. For this reason, the Company is developing a sustainability strategy that integrates environmental, social and governance principles into PTK business operations so as to be able to contribute to achieving the Sustainable Development Goals (SDGs). One of them is through implementing the Social and Environmental Responsibility ("TJSL") program which aims to build harmony with the stakeholders and to realize the sustainable growth. The scope of CSR program in a broad sense includes aspects of environmental management, aspects of Employment, Occupational Health and Safety (OHS), aspects of social development, as well as aspects of responsibility towards customers. For this reason, PTK annually prepares and publishes a Sustainability Report (*Sustainability Reporting*) as the Company's accountability to all stakeholders regarding the results of environmental performance, social performance and governance performance in a separate book and becomes an integral part of this Annual Report.

Sebagai Perusahaan yang beroperasi di bidang logistik energi, PTK menyadari bahwa Perusahaan memberikan dampak yang signifikan terhadap lingkungan. Perusahaan berupaya memenuhi tanggung jawab untuk berperan aktif mendorong terwujudnya berbagai upaya pelestarian lingkungan serta menghindari dampak ekologis yang mungkin ditimbulkan dari kegiatan operasional Perusahaan. Mengingat aktivitas pelabuhan menimbulkan dampak negatif terhadap laut dan daerah sekitar pelabuhan maka PTK berinisiatif mengelola pelabuhan berbasis *green port* dan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan.

As a company operating in the energy logistics sector, PTK realizes that the Company has a significant impact on the environment. The Company strives to fulfill responsibility in taking active role in encouraging the realization of various environmental conservation efforts and avoiding ecological impacts that may arise from operational activities of the Company. Considering that port activities have negative impacts on the sea and the area around the port, PTK has taken the initiatives to manage ports based on green ports and increase awareness of the environment. This is in line with the direction of the Coordinating

Hal ini sejalan dengan arahan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, dimana pelabuhan-pelabuhan di Indonesia diharapkan secepatnya menerapkan konsep *Green Port* dan *Smart Port* terkait dengan aspek digitalisasi agar dapat bersaing dengan pelabuhan internasional. Atas inisiasi program tersebut, PTK berhasil meraih penghargaan APSN *Green Port Award System 2023* yang diberikan oleh APEC *Port Services Network* (APSN), organisasi internasional di bawah *Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC).

Ministry for Maritime Affairs and Investment, where ports in Indonesia are expected to immediately implement the Green Port and Smart Port concepts related to digitalization aspects in order to compete with international ports. Due to the initiation of this program, PTK succeeded in winning the APSN Green Port Award System 2023 award given by the APEC Port Services Network (APSN), an international organization under the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC).

Perubahan Komposisi Direksi

Changes in Board of Directors Composition

Selama tahun 2023, terjadi 2 (dua) kali perubahan komposisi Direksi Perusahaan berdasarkan KPSSS tanggal 3 Juli 2023 dan KPSSS tanggal 21 Juli 2023. Dalam KPSSS tanggal 3 Juli 2023, Pemegang Saham menyetujui pemberhentian Sdr. Nepos MT Pakpahan selaku Direktur Utama dan mengangkat Sdr. I Ketut Laba sebagai Direktur Utama Perusahaan yang baru. Atas nama Perusahaan, Direksi mengucapkan terima kasih kepada Sdr. Nepos MT Pakpahan atas kontribusi dan dedikasinya selama menjabat sebagai anggota Direksi Perusahaan. Berdasarkan KPSSS tanggal 21 Juli 2023, Pemegang Saham mengangkat Sdr. Andy Arvianto sebagai Direktur Pemasaran, yang sebelumnya berstatus Plt. dan dirangkap oleh Direktur Keuangan dan SDM. Dengan demikian susunan dan komposisi Direksi PTK per 31 Desember 2023 berjumlah empat orang, sebagai berikut:

During 2023, there were 2 (two) changes to the composition of the Company's Board of Directors based on the KPSSS dated July 3, 2023 and KPSSS dated July 21, 2023. In the KPSSS dated July 3, 2023, the Shareholders approved the dismissal of Mr. Nepos MT Pakpahan as the President Director and appointed Mr. I Ketut Laba as the new President Director of the Company. On behalf of the Company, the Board of Directors would like to thank Mr. Nepos MT Pakpahan for his contribution and dedication while serving as a member of the Company's Board of Directors. Based on KPSSS dated July 21, 2023, the Shareholders appointed Mr. Andy Arvianto as Marketing Director, who previously had the status of Acting and concurrently the Director of Finance and HR. Thus, the composition and structure of the PTK Board of Directors as of December 31, 2023 is four persons, as follows:

Susunan Direksi PTK Periode 01 Januari 2023 - 03 Juli 2023

Composition of PTK Board of Directors for the period January 01, 2023 - July 03, 2023

Jabatan Position	Nama Name	Dasar Pengangkatan & Periode Jabatan Basis of Appointment & Period of Office
Direktur Utama President Director	Nepos MT Pakpahan*	- KPSSS tanggal 15 Juli 2019 dan Akta No. 5 tanggal 17 Juli 2019 (15 Juli 2019 - 14 Juli 2022 Periode 1) - KPSSS tanggal 15 Juli 2022 dan Akta No. 06 tanggal 19 Juli 2022 (19 Juli 2022 - 3 Juli 2023 Periode 2) - KPSSS dated July 15, 2019 based on Deed No. 05 dated July 17, 2019 (July 15, 2019 - July 14, 2022 1st Period) - KPSSS dated July 15, 2019 based on Deed No. 06 dated July 19, 2022 (July 19, 2022 - July 3, 2023 2nd Period)
Direktur Keuangan dan SDM merangkap Plt. Direktur Pemasaran Finance and HR Director concurrently Acting. Marketing Director	Afan Aftory	KPSSS tanggal 30 Agustus 2021 dan Akta No. 05 tanggal 17 September 2021 (1 September 2021 - 31 Agustus 2024 Periode 1) KPSSS dated August 30, 2021 based on Deed No. 05 dated September 17, 2021 (September 1, 2021 - August 31, 2024 1 st Period)
Direktur Operasi Operations Director	Slamet Harianto	KPSSS tanggal 5 Agustus 2022 dan Akta No. 04 tanggal 10 Agustus 2022 (5 Agustus 2022 - 4 Agustus 2025 Periode 1) KPSSS dated August 5, 2022 based on Deed No. 04 dated August 10, 2022 (August 5, 2022 - August 4, 2025 1 st Period)

* berakhir masa jabatan sebagai anggota Direksi PTK berdasarkan KPSSS tanggal 3 Juli 2023 dan Akta No. 02 tanggal 03 Juli 2023 dan mengangkat Sdr. I Ketut Laba sebagai Direktur Utama Perusahaan yang baru.

* his term of office as a member of PTK Board of Directors ended based on KPSSS on July 3, 2023 based on Deed No. 02 dated July 03, 2023 appointed Mr. I Ketut Laba as the new President Director of the Company.

Susunan Direksi PTK Periode 04 Juli 2023 - 31 Desember 2023

Composition of PTK Board of Directors for the period July 04, 2023 - December 31, 2023

Jabatan Position	Nama Name	Dasar Pengangkatan & Periode Jabatan Basis of Appointment & Period of Office
Direktur Utama President Director	I Ketut Laba	KPSSS tanggal 3 Juli 2023 dan Akta No. 02 tanggal 3 Juli 2023 (3 Juli 2023 - 2 Juli 2026 Periode 1) KPSSS dated July 3, 2023 based on Deed No. 02 dated July 3, 2023 (July 3, 2023 - July 2, 2026 1 st Period)
Direktur Pemasaran Marketing Director	Andy Arvianto*	KPSSS tanggal 21 Juli 2023 dan Akta No. 17 tanggal 24 Juli 2023 (21 Juli 2023 - 20 Juli 2026 Periode 1) KPSSS dated July 21, 2023 based on Deed No. 17 dated July 24, 2023 (July 21, 2023 - July 20, 2026 1 st Period)

Jabatan Position	Nama Name	Dasar Pengangkatan & Periode Jabatan Basis of Appointment & Period of Office
Direktur Keuangan dan SDM Finance and HR Director	Afan Aftory	KPSSS tanggal 30 Agustus 2021 dan Akta No. 05 tanggal 17 September 2021 (1 September 2021 - 31 Agustus 2024 Periode 1) KPSSS dated August 30, 2021 based on Deed No. 05 dated September 17, 2021 (September 1, 2021 - August 31, 2024 1 st Period)
Direktur Operasi Operations Director	Slamet Harianto	KPSSS tanggal 5 Agustus 2022 dan Akta No. 04 tanggal 10 Agustus 2022 (5 Agustus 2022 - 4 Agustus 2025 Periode 1) KPSSS dated August 5, 2022 based on Deed No. 04 dated August 10, 2022 (August 5, 2022 - August 4, 2025 1 st Period)

* diangkat sebagai Direktur Pemasaran PTK yang baru efektif sejak tanggal 21 Juli 2023.

* was appointed as PTK's new Marketing Director effective from July 21, 2023.

Setelah periode Laporan Tahunan ini berakhir hingga disahkannya laporan ini, tidak terdapat pergantian dan perubahan susunan Direksi Perusahaan.

After the end of this Annual Report period until the ratification of this report, there were no changes to the composition of the Company's Board of Directors.

Prospek Usaha 2024 Business Prospects 2024



Pertumbuhan ekonomi yang tinggi didorong oleh peningkatan permintaan domestik, antara lain konsumsi rumah tangga yang tumbuh sebesar 4,47% (YoY), konsumsi pemerintah meningkat 2,81% (YoY) akibat meningkatnya belanja barang dan belanja pegawai serta pertumbuhan investasi secara keseluruhan mencapai sebesar 5,02% (YoY) seiring berlanjutnya pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah. Hal ini sejalan dengan asumsi makro yang dipergunakan oleh pemerintah dalam Menyusun RAPBN 2024, dimana ekonomi nasional tumbuh 5,2%, dengan inflasi yang terkendali pada level 2,8%, dan lebih baik dibanding inflasi tahun 2023. Nilai tukar Rupiah berada pada nilai Rp15.000 per Dolar AS, dengan harga minyak mentah berada pada angka USD82 per barel, dan *lifting* minyak sebesar 635 ribu. Untuk itulah, PTK optimis bahwa kedepannya kami dapat lebih mengoptimalkan peluang bisnis di bidang usaha logistik energi berdasarkan asumsi-asumsi tersebut di atas.

Perusahaan menetapkan proyeksi dan target kinerja tahun 2024 didasarkan pada asumsi-asumsi dari Pemerintah dan dilengkapi dengan kajian dari berbagai lembaga domestik maupun internasional tentang prospek ekonomi tahun 2024. Proyeksi peningkatan operasi dan pemasaran di 3 (tiga) segmen bisnis PTK Group yang terdiri dari *shipping activities*, *marine services* dan *logistic services* yang meliputi *Commission Days*, pengelolaan pelabuhan, *cargo handling*, *Commercial Days*, dan *Call Keagenan/Agency Call* diharapkan mampu mendorong pertumbuhan kinerja keuangan secara berkelanjutan. Pertumbuhan pendapatan ditargetkan sebesar 12% dari realisasi tahun 2023. Semangat optimisme ini merupakan aktualisasi dalam meraih peluang yang lebih tinggi terkait pengadaan kapal-kapal yang dibutuhkan Pertamina Group, baik untuk *offshore support* maupun *marine support*.

High economic growth was driven by the increased domestic demand, including household consumption which grew by 4.47% (YoY), government consumption increased by 2.81% (YoY) due to increased spending on goods and personnel spending as well as overall investment growth reaching 5.02% (YoY) as infrastructure development continues in various regions. This is in line with the macro assumptions used by the government in preparing the 2024 RAPBN, where the national economy grew 5.2%, with controlled inflation at the level of 2.8%, and better than inflation in 2023. Rupiah exchange rate is at Rp15,000 per US Dollar, with the price of crude oil at USD82 per barrel, and oil lifting of 635 thousand. For this reason, PTK is optimistic that in the future we will further able to optimize business opportunities in the energy logistics business sector based on the assumptions mentioned above.

The Company sets projections and performance targets for 2024 based on assumptions from the Government and complemented by studies from various domestic and international institutions regarding the economic prospects for 2024. Projections for increasing operations and marketing in 3 (three) PTK Group business segments consisting of shipping activities, marine services and logistic services which include Commission Days, port management, cargo handling, Commercial Days, and Agency Calls are expected to be able to encourage sustainable financial performance growth. Revenue growth is targeted at 12% from the realization in 2023. This spirit of optimism is an actualization in achieving higher opportunities related to the procurement of ships needed by Pertamina Group, both for offshore support and marine support.

Digitalisasi proses bisnis untuk kegiatan operasi di lapangan maupun kegiatan bisnis sehari-hari telah menjadi fokus PTK di tahun 2023 sesuai dengan *Roadmap* IT 2022-2026 sehingga proses pengambilan keputusan dapat lebih cepat dan tepat sasaran. Peran *dashboard* memiliki arti penting terhadap semua aktivitas bisnis PTK secara terintegrasi meliputi bidang operasi, pemasaran, keuangan dan SDM, dimana Direksi merupakan penanggung jawab di setiap direktorat yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya sehingga *monitoring* dapat dilakukan secara *real time*, akurat dan efisien. Kondisi tersebut di atas diharapkan dapat menjadi peluang dan prospek positif bagi perkembangan bisnis PTK di masa yang akan datang.

Digitalization of business processes for field operations and daily business activities is PTK focus in 2023 following the 2022-2026 IT Roadmap so that the decision-making process can be faster and more targeted. The role of the dashboard has an important meaning in all PTK business activities in an integrated manner including the fields of operations, marketing, finance and HR, where the Board of Directors is the person in charge of each directorate whose duties and responsibilities are so that monitoring can be carried out in real time, accurately and efficiently. It is expected that the above conditions will become opportunities and positive prospects for PTK business development in the future.

Akhir Kata

Letter of Appreciation

Hasil kinerja baik PTK ini tidak akan terwujud tanpa dukungan dari pemegang saham, Dewan Komisaris, pelanggan, mitra usaha dan segenap pemangku kepentingan. Kami menyampaikan penghargaan yang mendalam kepada segenap jajaran Dewan Komisaris yang telah memberikan kepercayaan penuh kepada Direksi dalam menjalankan tugasnya. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh pelanggan, mitra usaha, para pemegang saham dan karyawan atas kepercayaan, kontribusi, dan kerjasama serta dukungan yang telah diberikan. Besar harapan kami sinergi dan kemitraan ini akan semakin kuat terutama dalam menghadapi tantangan di masa depan.

Ke depannya, kami tetap berkomitmen untuk selalu memberikan yang terbaik guna peningkatan pencapaian kinerja secara berkelanjutan. Direksi berharap bahwa PTK akan terus menjadi bagian penting dan berkontribusi dalam mendukung terwujudnya ketahanan energi nasional saat ini dan masa mendatang.

PTK good performance results would not have been realized without support from the shareholders, the Board of Commissioners, the customers, business partners and all stakeholders. We would like to express our deep appreciation to all levels of the Board of Commissioners who have given full trust to the Board of Directors in running duties. We would also like to express our thanks to all customers, business partners, shareholders and employees for their trust, contribution, cooperation and support. We hope that this synergy and partnership will become stronger, especially in facing future challenges.

Going forward, we remain committed to always providing the best in order to continuously improve performance achievements. The Board of Directors expects that PTK will continue to be an important part and contribute to supporting the realization of national energy security currently and in the future.

Jakarta, Mei 2024
Jakarta, May 2024

Atas nama Direksi PT Pertamina Trans Kontinental,
On behalf of the Directors of PT Pertamina Trans Kontinental,



I Ketut Laba
Direktur Utama
President Director



Pernyataan Tanggung Jawab Dewan Komisaris untuk Laporan Tahunan 2023

Statement of Responsibility from Board of Commissioners for 2023 Annual Report

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Pertamina Trans Kontinental tahun 2023 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.

We, the undersigned, declare that all information in the 2023 Annual Report of PT Pertamina Trans Kontinental has been presented in its entirety and we are fully responsible for the accuracy of the contents of the Annual Report and Financial Statements of the Company.

Jakarta, Mei 2024

Jakarta, May 2024

Dewan Komisaris PT Pertamina Trans Kontinental
PT Pertamina Trans Kontinental Board of Commissioners



Amir Hamzah

Komisaris Utama

President Commissioner

(Periode 01 Januari 2023 - 31 Desember 2023)

(Period January 01, 2023 - December 31, 2023)

Andi Saiful Haq

Komisaris

Commissioner

(Periode 01 Januari 2023 - 31 Desember 2023)

(Period January 01, 2023 - December 31, 2023)

Khalid Zabidi

Komisaris

Commissioner

(Periode 01 Januari 2023 - 31 Desember 2023)

(Period January 01, 2023 - December 31, 2023)

Agustinus Bensik Lomboan

Komisaris

Commissioner

(Periode 01 Januari 2023 - 01 November 2023)

(Period January 01, 2023 - November 01, 2023)

Pernyataan Tanggung Jawab Direksi untuk Laporan Tahunan 2023

Statement of Responsibility from Board of Directors for 2023 Annual Report

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Pertamina Trans Kontinental tahun 2023 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.

We, the undersigned, declare that all information in the 2023 Annual Report of PT Pertamina Trans Kontinental has been presented in its entirety and we are fully responsible for the accuracy of the contents of the Annual Report and Financial Statements of the Company.

Jakarta, Mei 2024

Jakarta, May 2024

Direksi PT Pertamina Trans Kontinental
PT Pertamina Trans Kontinental Board of Directors



Nepos MT Pakpahan

Direktur Utama
President Director

(Periode 01 Januari 2023 - 02 Juli 2023)
(Period January 01, 2023 - July 02 2023)



I Ketut Laba

Direktur Utama
President Director

(Periode 03 Juli 2023 - 31 Desember 2023)
(Period July 03, 2023 - December 31, 2023)



Afan Aftory

Direktur Keuangan & SDM
Director of Finance & HR

(Periode 01 Januari 2023 - 31 Desember 2023)
(Period January 01, 2023 - December 31, 2023)



Slamet Harianto

Direktur Operasi
Director of Operation

(Periode 01 Januari 2023 - 31 Desember 2023)
(Period January 01, 2023 - December 31, 2023)



Andy Arvianto

Direktur Pemasaran
Director of Marketing

(Periode 21 Juli 2023 - 31 Desember 2023)
(Period July 21, 2023 - December 31, 2023)







Profil Perusahaan Company Profile

Identitas Perusahaan

Company Identity

	Nama Perusahaan Company Name	PT Pertamina Trans Kontinental	
	Nama Panggilan Perusahaan Common Name	PTK atau Perusahaan	PTK or the Company
	Bidang Usaha Line of Business	Jasa Pelayaran, Jasa Maritim dan Jasa Logistik	Shipping, Maritime, and Logistics Services
	Tanggal Pendirian Date of Establishment	9 September 1969	September 9, 1969
	Dasar Hukum Pendirian Legal Basis of Establishment	- Akta No 3 Tanggal 9 September 1969 dibuat di hadapan Tan Thong Kie, Notaris di Jakarta. - Akta No. 012 tanggal 26 Oktober 2011 dibuat di hadapan Dewantari Handayani, MPA., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. AHU-58581.AH.01.02 Tahun 2011 tanggal 29 November 2011, nama PT Pertamina Tongkang berubah menjadi PT Pertamina Trans Kontinental.	
	Status Badan Hukum Legal Entity Status	Perseroan Terbatas ("PT"); Penanaman Modal Dalam Negeri ("PMDN")	Limited Liability Company ("PT"), Domestic Investment ("PMDN")
	Kepemilikan Saham Share Ownership	- PT Pertamina International Shipping: 99,999% - PT Pertamina Pedeve Indonesia: 0,001%	- PT Pertamina International Shipping: 99,999% - PT Pertamina Pedeve Indonesia: 0,001%
	Modal Dasar Authorized Capital	Rp4.424.580.819.000,-; terbagi atas 4.424.580 lembar saham seri A dengan masing-masing bernilai Rp1.000.000,- dan 819 lembar saham seri B dengan nominal masing-masing Rp1.000,-	Rp4,424,580,819,000 divided into 4,424,580 series A shares with a nominal value of Rp1,000,000 each and 819 series B shares with a nominal value of Rp1,000 each.
	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Subscribed and Fully Paid-in Capital	Rp1.234.747.819.000,-; terbagi atas 1.234.747 lembar saham seri A dengan nominal masing-masing Rp1.000.000,- dan 819 lembar saham seri B dengan nominal masing-masing Rp1.000,-	Rp1,234,747,819,000 divided into 1,234,747 series A shares with a nominal value of Rp1,000,000 each and 819 series B shares with a nominal value of Rp1,000 each.
	Bidang Usaha Line of Business	Jasa perkapalan, jasa marine dan jasa logistik	Shipping, marine, and logistics services
	Jumlah Pegawai Number of Employees	3.703 pegawai	3,703 employees
	Alamat Kantor Pusat Head Office Address	Jl. Kramat Raya No. 29 Jakarta Pusat 10450, Indonesia *Korespondensi: Jl. Yos Sudarso No. 32 - 34 Jakarta Utara 14320, Indonesia Telephone : (+6221) 80678500 Email : pusat.ptk@pertamina.com	Jl. Kramat Raya No. 29 Jakarta Pusat 10450, Indonesia *Correspondence: Jl. Yos Sudarso No. 32 - 34 North Jakarta 14320, Indonesia Telephone : (+6221) 80678500 Email : pusat.ptk@pertamina.com
	Website	https://pertamina-ptk.com/	https://pertamina-ptk.com/
	Email	pusat.ptk@pertamina-ptk.com	pusat.ptk@pertamina-ptk.com
	Telepon Telephone	+6221 80678500	+6221 80678500
	Media Sosial Social Media	@pertaminatranskontinental	@pertaminatranskontinental
	Serikat Pekerja Trade Union	Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT Pertamina Trans Kontinental ("SPSI PTK")	All Indonesian Trade Union of PT Pertamina Trans Kontinental ("SPSI PTK")

Sekilas Perusahaan Company at a Glance

PT Pertamina Trans Kontinental disebut juga sebagai “Perusahaan” atau “PTK”, pertama kali didirikan pada 9 September 1969 di Jakarta dan menjalankan usaha di bidang industri jasa *marine*. PT Pertamina Trans Kontinental semula bernama PT Pertamina Tongkang. PT Pertamina Tongkang berfungsi memberikan dukungan bagi aktivitas PT Pertamina (Persero) dan *subholding* lainnya dengan 3 (tiga) kegiatan strategis yaitu: Pengadaan distribusi bahan bakar ke semua pelabuhan di seluruh wilayah Indonesia; Pengadaan transportasi maritim bagi Pertamina Logistik untuk pengembangan proyek yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia; Bertindak sebagai *General Agent* dan *Handling Agent* bagi kapal-kapal tanker milik PT Pertamina (Persero) yang disewakan.

Pada awalnya peranan Perusahaan masih sebagai sebatas unit bisnis yang diperbantukan pada aktivitas pengembangan PT Pertamina (Persero). Dalam perkembangannya, pada tahun 1974 Perusahaan menerima tambahan armada kapal jenis *supply vessel*. Hal ini untuk melayani dan mendukung pelaksanaan eksplorasi pengeboran minyak dan gas bumi (migas) lepas pantai dan juga keperluan produksi. 4 (empat) tahun kemudian Perusahaan memperluas layanan jasa, menyusul selesainya program konstruksi depot bahan bakar baru di belahan timur dan tengah Indonesia. Selanjutnya, Perusahaan mengubah model bisnisnya untuk tujuan mencari keuntungan dan fokus kepada aktivitas lepas pantai dengan menyediakan layanan: Membantu eksplorasi minyak dan gas bumi di lepas pantai. Menjadi *Handling Agent* dari penyewa kapal milik PT Pertamina (Persero) dan kapal pihak ketiga.

Perusahaan adalah suatu Perseroan yang bergerak di bidang Pelayaran sebagai pemegang izin SIUPAL No. BXXV-1203/AL 58 pada tanggal 26 Maret 2002 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Kian luasnya pelayanan dan jasa yang diberikan, menjadikan Perusahaan melakukan beberapa perubahan. Salah satunya perubahan nama dari PT Pertamina Tongkang menjadi PT Pertamina Trans Kontinental. Perubahan nama berlaku efektif 29 November 2011 sesuai dengan Akta No. 012 tanggal 26 Oktober 2011 Notaris Dewantari Handayani, MPA, yang telah disetujui dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No: AHU- 58581. AH.01.02 Tahun 2011 tanggal 29 November 2011.

Kerja sama usaha dan sinergi dengan berbagai pihak ditempuh oleh PTK dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan dan mendorong pertumbuhan kinerja Perusahaan. PTK juga memiliki komitmen untuk menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik sebagai upaya yang ditempuh untuk mendukung keberlanjutan bisnis jangka panjang.

PT Pertamina Trans Kontinental, also known as the “Company” or “PTK” was first established on September 9, 1969, in Jakarta and operates a business in the marine services industry. PT Pertamina Trans Kontinental was originally named PT Pertamina Tongkang. PT Pertamina Tongkang functions to provide support for the activities of PT Pertamina (Persero) and other sub-holdings with 3 (three) strategic activities, namely: Procurement of fuel distribution to all ports throughout Indonesia; Procurement of maritime transportation for Pertamina Logistics for project development spread throughout Indonesia; Acting as General Agent and Handling Agent for tanker ships owned by PT Pertamina (Persero) leased by PT Pertamina Trans Kontinental.

Initially, the role of the Company was still limited to a business unit seconded in the development activities of PT Pertamina (Persero). In its development, the Company received an additional fleet of supply vessel-type ships in 1974 to serve and support the implementation of offshore oil and gas drilling exploration and also production requirements. 4 (four) years later, the Company expanded its services following the completion of the new fuel depot construction program in the eastern and central regions of Indonesia. Subsequently, the Company altered its business model to gain profit and focus on offshore activities by providing the following services: Assisting offshore oil and gas exploration and Becoming a Handling Agent for charterers of vessels owned by PT Pertamina (Persero) and third parties.

The Company is a company engaged in the shipping sector as the holder of SIUPAL license no. BXXV-1203/AL 58 on March 26, 2002, issued by the Directorate General of Sea Transportation.

The expanding provided services urged the Company to make several changes, including the name change from PT Pertamina Tongkang to PT Pertamina Trans Kontinental. The name change was effective on November 29, 2011, in accordance with Deed No. 012 dated October 26, 2011, by Notary Dewantari Handayani, MPA., which was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Decree No: AHU-58581.AH.01.02 of 2011 of November 29, 2011.

Business cooperation and synergy with various parties are pursued by PTK to improve the quality of service to customers and encourage the growth of the Company's performance. PTK is also committed to implementing good corporate governance principles as an effort to support long-term business sustainability.

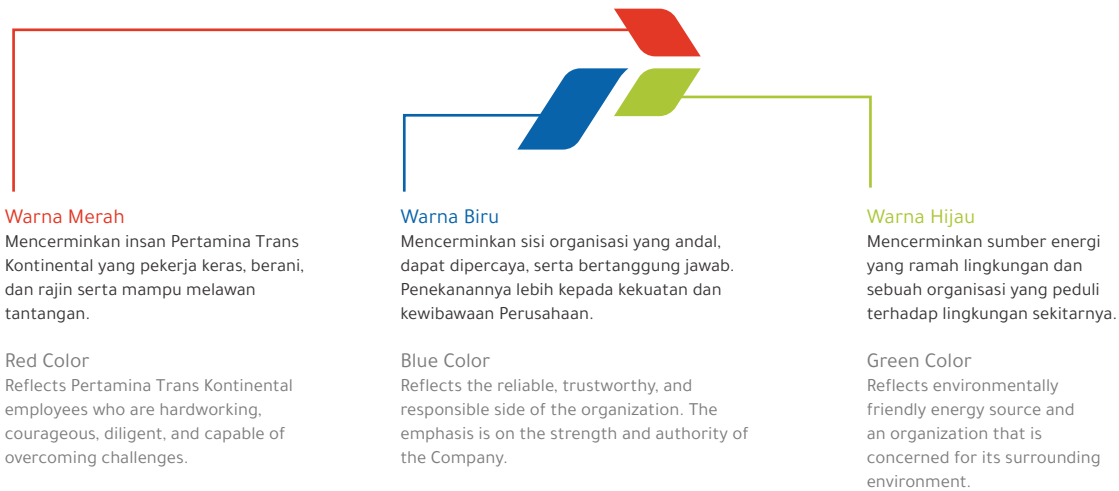


Logo Perusahaan

Company Logo

Logo Perusahaan telah disahkan berdasarkan Pedoman Standarisasi Identitas Perusahaan No. Revisi: PDM-001/G0000/2011-S0 dan berlaku sejak 22 Desember 2011.

The Company logo has been ratified based on the Company Identity Standardization Guidelines Revision No: PDM-001/G0000/2011-S0 valid since December 22, 2011.



Simbol Anak Panah

Melambangkan aspirasi organisasi Perusahaan untuk senantiasa bergerak ke depan, maju dan progresif. Ketiga elemen melambangkan pulau-pulau dengan berbagai skala yang merupakan bentuk Negara Indonesia. Simbol tersebut terlihat seperti monogram huruf "P" yang merupakan huruf pertama "PERTAMINA".

"Arrow" Symbol

Symbolizes the Company's organizational aspirations to continuously move forward, advance, and be progressive. The three elements symbolize the islands of various scales that represent the country of Indonesia. The symbol appears as a monogram of the letter "P" which is the first letter of "PERTAMINA".

PERTAMINA

Kata "PERTAMINA"

Mencerminkan insan Pertamina Trans Kontinental yang pekerja keras, berani, dan rajin serta mampu melawan tantangan

"PERTAMINA" Terms

Reflects Pertamina Trans Kontinental employees who are hardworking, brave, diligent, and able to face challenges.

TRANS KONTINENTAL

Kata "TRANS" dan "KONTINENTAL"

TRANS berdasarkan kamus berarti melalui, melewati. KONTINENTAL berdasarkan kamus berarti benua. Jadi Pertamina Trans Kontinental adalah bagian dari PT Pertamina (Persero) yang core bisnisnya menunjang kegiatan usaha induknya di bidang *oil & gas* dimana siap untuk menjadi Perusahaan Bisnis Pelayaran dan Jasa Marine Kelas Dunia.

"TRANS" and "KONTINENTAL" Terms

According to the dictionary, TRANS means through, passing through. Meanwhile CONTINENTAL means continent. Therefore, Pertamina Trans Kontinental is a part of PT Pertamina (Persero) carrying out the core business that supports the activities of its parent business in the oil & gas sector which is ready to become a World Class Shipping and Marine Services Business Company.

Visi, Misi, Nilai dan Budaya Perusahaan

Vision, Mission, Corporate Value and Culture

Visi dan Misi PTK ditetapkan berdasarkan hasil review dari Direksi. Pada tahun 2023 tidak terdapat perubahan visi dan misi karena masih relevan dengan tujuan dan bidang usaha Perusahaan.

PTK's vision and mission are determined based on the results of a review by the Board of Directors. In 2023, there were no changes in the vision and mission because it is still relevant to the Company's goals and line of business.



Visi
Vision

Menjadi Perusahaan Jasa *Marine* yang Terintegrasi dengan Skala Global pada Tahun 2026

To be an Integrated Marine Service Company on Global Scale in 2026



Misi
Mission

Melaksanakan kegiatan bisnis yang berorientasi pada aspek HSE, Keandalan Operasional dan Mengutamakan Kepuasan Pelanggan dalam bidang:

- 1. Penyediaan jasa perkapalan sektor energi;**
- 2. Penyediaan layanan marine;**
- 3. Penyediaan jasa logistik.**

Carrying out business activities oriented to HSE aspects, operational reliability and prioritizing customer satisfaction in the fields of:

- 1. Providing shipping services in the energy sector;**
- 2. Providing marine services;**
- 3. Providing logistics services.**

Nilai dan Budaya Perusahaan

Corporate Value and Culture

AKHLAK

PTK melakukan penyesuaian nilai dan budaya Perusahaan yakni "AKHLAK" yang diterapkan di lingkungan Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT Pertamina Trans Kontinental No. Kpts-1344/PTK0000/2021-S0 tentang Penerapan Nilai-Nilai Utama (*Core Values*) AKHLAK di Lingkungan PT Pertamina Trans Kontinental Group tanggal 07 Desember 2021.

Nilai dan Pedoman perilaku AKHLAK sebagai *Core Value* BUMN yang harus diterapkan Insan Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Amanah (Integritas, Tulus, Konsisten, Dapat Dipercaya), yaitu memegang teguh kepercayaan yang diberikan, dengan pedoman perilaku sebagai berikut:

PTK aligns the values and culture of the Company, namely "AKHLAK" which is implemented within the Company following the Decree by the President Director of PT Pertamina Trans Kontinental No. Kpts-1344/PTK0000/2021-S0 concerning the Implementation of AKHLAK Core Values within PT Pertamina Trans Kontinental Group dated December 7, 2021

The values and Code of Conduct of AKHLAK as the Core Value of SOEs that must be applied by the Company's employees are as follows:

1. Trustworthy (Integrity, Sincere, Consistent, Reliable), namely upholding the trust given, with the following code of conduct:





- a. Memenuhi janji dan komitmen;
- b. Bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan;
- c. Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika.
2. Kompeten (Kinerja Terbaik, Sukses, Keberhasilan, *Learning Agility*, Ahli di Bidanganya), yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, dengan pedoman perilaku sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
 - b. Membantu orang lain belajar;
 - c. Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik.
3. Harmonis (Peduli, Perbedaan), yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan, dengan pedoman perilaku sebagai berikut:
 - a. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;
 - b. Suka menolong orang lain;
 - c. Membangun lingkungan kerja yang kondusif.
4. Loyal (Komitmen, Dedikasi, Kontribusi), yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara, dengan pedoman perilaku sebagai berikut:
 - a. Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN, dan Negara;
 - b. Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar;
 - c. Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika.
5. Adaptif (Inovasi, Antusias Terhadap Perubahan, Proaktif), yaitu terus berinovasi dan antusias dalam mengerjakan ataupun menghadapi perubahan, dengan pedoman perilaku sebagai berikut:
 - a. Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik;
 - b. Terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi;
 - c. Bertindak proaktif.
6. Kolaboratif (Kesediaan Bekerjasama, Sinergi Untuk Hasil yang Lebih Baik), yaitu membangun kerjasama yang sinergis, dengan pedoman perilaku sebagai berikut:
 - a. Memberi kesempatan kepada pihak untuk berkontribusi;
 - b. Terbuka dalam bekerjasama untuk menghasilkan nilai tambah;
 - c. Menggerakkan pemanfaatan berbagi sumber daya untuk tujuan Bersama.

Core Values AKHLAK selanjutnya disosialisasikan oleh PTK kepada seluruh pemangku kepentingan terutama karyawan sebagai upaya internalisasi agar senantiasa mendukung pencapaian visi misi PTK.

- a. Fulfilling promises and commitments;
- b. Responsible for the tasks, decisions, and actions taken;
- c. Adhering to moral and ethical values.
2. Competent (Best Performance, Success, Accomplishment, Learning Agility, Expert in the Field), namely continuously learning and developing capabilities, with the following code of conduct:
 - a. Increasing self-competence to respond to ever-changing challenges;
 - b. Helping others learn;
 - c. Completing tasks with the best quality.
3. Harmonious (Caring, Differences), namely caring for each other and respecting differences, with the following code of conduct:
 - a. Respecting everyone regardless of background;
 - b. Likes to help others;
 - c. Building a conducive work environment.
4. Loyal (Commitment, Dedication, Contribution), namely dedicated and prioritizing the interests of the Nation and State, with the following code of conduct:
 - a. Maintaining the good name of fellow employees, leaders, SOEs, and the State;
 - b. Willing to make sacrifices to achieve a greater goal;
 - c. Obeying the leaders as long as it does not conflict with law and ethics.
5. Adaptive (Innovation, Enthusiasm for Change, Proactivity), namely continue to innovate and be enthusiastic in driving or facing change, with the following code of conduct:
 - a. Quickly adjust to become better;
 - b. Continuously make improvements following technological developments;
 - c. Acting proactively.
6. Collaborative (Willingness to Work Together, Synergy for Better Results), namely building synergistic cooperation, with the following code of conduct:
 - a. Providing opportunities for various parties to contribute;
 - b. Open in working together to produce added value;
 - c. Mobilizing the use of various resources for common goals.

The AKHLAK Core Values are then socialized by PTK to all stakeholders, particularly employees, as an internalization effort so that they always support the achievement of PTK's vision and mission.

Kegiatan Usaha dan Bisnis Utama Perusahaan

Company Business Activities and Core Business

Kegiatan Usaha

Business Activities

Sesuai pasal 3 Anggaran Dasar yang tercantum pada Akta No. 07 tanggal 3 Juli 2013, yang terakhir diubah melalui Akta No. 30 tanggal 29 November 2022 yang dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta, maksud didirikannya Perusahaan adalah untuk menyelenggarakan usaha di bidang jasa perkapalan, marine dan logistik baik di dalam negeri maupun di luar negeri serta kegiatan usaha lain yang terkait atau menunjang kegiatan usaha di bidang jasa perkapalan, marine dan logistik tersebut. Kegiatan Usaha Perusahaan yaitu:

In accordance with article 3 of the Articles of Association stated in Deed No. 07 dated July 3, 2013, which was last amended by Deed No. 30 dated November 29, 2022, made before Lenny Janis Ishak, S.H., Notary in Jakarta, the purpose of establishing the Company is to carry out business in the field of shipping, marine and logistics services both domestically and abroad as well as other related business activities or support business activities in the shipping, marine and logistics services sector. The Company's Business Activities, namely:



Jasa Perkapalan Shipping Services

- Usaha-usaha dalam bidang pengangkutan hasil industri pertambangan dan umum;
- Usaha dalam bidang pengangkutan laut antar pelabuhan serta jasa penunjangnya, baik dalam maupun luar negeri yang dilakukan secara tetap dan teratur dan/atau perkapalan yang tidak tetap dan tidak teratur dengan menggunakan semua jenis kapal serta jasa penunjangnya;
- Usaha di bidang perkapalan/pengangkutan khusus peralatan dan kebutuhan pengeboran migas, muatan batu bara, muatan cair dan gas serta kargo umum lainnya;
- Menjalankan usaha penunjang bidang perkapalan;
- Usaha di bidang jasa manajemen kapal/*ship management services* (*ship crewing, ship operator, dan ship maintenance*);
- Menjalankan usaha penyewaan kapal (*ship chartering dan brokerage*);
- Menjalankan usaha keagenan kapal (*ship agencies*);
- STS *Provider*
- *Dockyard*
- *Ship Vetting*
- Usaha *salvage* dan penundaan kapal;
- Jasa pemeliharaan peralatan perkapalan (navigasi).

- Business in the transport of mining and general industry products sector;
- Business in the inter-port sea transport as well as supporting services, whether domestic or overseas, performed permanently and regularly and/or impermanent and irregular shipping using all types of vessels and supporting services sector;
- Business in the specific shipping/freight of oil and gas drilling equipment and needs, coal cargo, liquid and gas cargo, as well as other general cargo;
- Conducting the shipping sector supporting business;
- Business in the ship management services sector (ship crewing, ship operator, ship maintenance);
- Conducting the ship charter business (ship chartering & brokerage);
- Conducting the ship agency business (ship agencies);
- STS *Provider*;
- *Dockyard*;
- *Ship Vetting*;
- Ship salvaging and Tug business;
- Navigation equipment maintenance services (navigation).



Jasa Marine Marine Services

- Manajemen dan operasional pelabuhan;
- Izin dan lisensi kepelabuhanan;
- Melakukan pembelian dan penjualan alat-alat transportasi dan/atau logistik termasuk suku cadangnya, tapi tidak terbatas pada kapal *tanker, supply vessel, tongkang, kapal tunda dan RIB*;
- Melakukan usaha pengangkutan dan penimbunan muatan cair, gas, dan *general cargo*;
- Penanganan tumpahan minyak di perairan;
- Melaksanakan *bunker service* berupa pengisian dan/atau pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk kapal baik di laut maupun di darat;
- Melakukan jasa pengolahan dan penyediaan air untuk keperluan kapal dan industri;
- Melaksanakan kegiatan distribusi dan *supply* bahan bakar dan air untuk kebutuhan kapal-kapal, depot-depot dan industri;
- Melakukan usaha pembuatan dan perbaikan kapal serta penyediaan suku cadang kapal dan alat transportasi lainnya;
- Melakukan jasa perencanaan, pembangunan, perbaikan dan pemeliharaan kapal-kapal, alat-alat apung dan konstruksi-konstruksi bangunan di lepas pantai dan di bawah air beserta peralatannya;
- Jasa *tank cleaning* dan pengelolaan limbah (*sludge*);
- Melakukan usaha jasa bongkar muat barang di kapal;
- Melakukan usaha bidang kepelabuhanan dan administrasi pelabuhan khusus;
- Jasa pemeliharaan fasilitas pelabuhan;
- *Mooring Master* dan *POAC*
- Jasa *Recognize Security Organization* ("RSO");
- Survei kelautan mengenai arus dan kedalaman laut (Hydrografi *Oceanography* dan Pemetaan/HOP);
- Konstruksi bawah air berupa pemasangan dan pemeliharaan pipa dan kabel bawah laut dan lain-lain;
- Jasa pengerukan dan reklamasi pantai;
- Jasa perawatan pekerjaan minyak dan gas bawah air;
- Jasa penyelaman dan pekerjaan bawah air.

- Port Management & Operations;
- Port Permits and Licenses;
- Purchasing and selling of transportation and/or logistic equipment, including spare parts but are not limited to tankers, supply vessels, barges, tug boats, and RIB;
- Liquid, gas, and general cargo transport and storing business;
- Handling of Oil Spills in Waters;
- Providing bunker services, including fuel oil refilling and/or distribution for vessels, whether on or offshore;
- Conducting water processing and supply services for vessels and industry needs;
- Conducting fuel and water distribution and supply activities for vessels, depots, and industry needs;
- Conducting the ship manufacturing and repair business as well as provision of spare parts for ships and other means of transportation;
- Conducting the business of planning, construction, repair, and maintenance services for vessels, flotation devices, and construction of offshore and underwater constructs and their equipment;
- Tank cleaning and waste management (sludge) services;
- Ship loading and unloading services;
- Port Activities and Special Port Administration;
- Port facility maintenance services;
- *Mooring Master* and *POAC*;
- Recognized Security Organization ("RSO") services;
- Maritime Survey on Ocean Stream and Depth (Hydrographic and Oceanographic Prediction/HOP);
- Underwater construction service as submarine pipe and cable installation and maintenance and other services;
- Seabed dredging and beach reclamation service;
- Subsea oil and gas project maintenance service;
- Commercial diving and underwater work services.





Jasa Logistik Logistic Services

- Melakukan usaha pengangkutan dan penimbunan muatan cair, gas, dan *general cargo*;
- Jasa ekspor impor barang dan jasa pengurusan dokumen ekspor impor (*customs clearance*);
- Mengadakan usaha di bidang *Freight Forwarding*, tidak terbatas pada jasa pengangkutan, pengiriman, dan pendistribusian barang;
- *Ship Chandler*;
- Penyewaan alat-alat berat dan atau peralatan kerja serta produksi;
- Melakukan kegiatan usaha penyimpanan, pergudangan, pengangkutan dan penyaluran berbagai jenis barang serta usaha lainnya (*logistic base*);
- Jasa penyewaan dan pengelolaan gedung dan perkantoran.

Seluruh kegiatan di atas telah dilaksanakan oleh Perusahaan.

- Conducting the liquid, gas, and general cargo transportation and storing business;
- Export, import, and customs clearance services;
- Freight Forwarding business, not limited to logistics, delivery, and distribution services;
- Ship Chandler;
- Heavy equipment and/or production equipment rental;
- Storage, warehouse, logistics, and distribution services of various commodities and other services (logistics base);
- Building and office rental and management services.

All of the above activities have been implemented by the Company.

Bisnis Utama Perusahaan Company Core Business



Penyediaan Kapal Vessel Provider

PTK memiliki bisnis inti penyedia kapal sebagai armada operasional, yang digunakan dalam memenuhi kebutuhan penyewa guna mendukung kegiatan eksplorasi minyak di lepas pantai dan darat seperti PT Pertamina (Persero), perusahaan migas kontraktor kontrak kerja sama ("KKKS"), dan lainnya.

PTK has the core business as a provider of vessels as an operational fleet, used in fulfilling the needs of charterers to support the offshore and onshore oil exploration activities, such as PT Pertamina (Persero), Contractors of Cooperation Contract ("KKKS") oil and gas companies, and others.

Charter & Brokerage Charter & Brokerage

Aktivitas bisnis melalui *Charter and Brokerage* dilakukan atas permintaan pelanggan, untuk memenuhi kebutuhan jenis kapal yang tidak dimiliki oleh PTK. *Charter and Brokerage* dilakukan dengan cara menyewa kapal sesuai dengan permintaan.

Business activities through Charter and Brokerage are conducted based on customer demand to meet the needs of types of vessels not owned by PTK. Charter and Brokerage are performed by chartering vessels according to demand.

Keagenan Kapal Ship Agency

PTK menyediakan layanan keagenan kapal sebagai Agen Umum (*General Agent*) atau Agen Penanganan (*Handling Agent*) untuk kapal yang berlabuh di semua pelabuhan di Indonesia. Sebagai keagenan kapal, maka tugas utama Perusahaan adalah mewakili pemilik/*principal* dalam memenuhi persyaratan atau kewajiban bagi kapal yang tiba di Indonesia. Selama periode pelaporan PTK telah melaksanakan keagenan kapal yang meliputi Agen Umum atau Agen Penanganan. Perusahaan menjadi Agen Penanganan di semua pelabuhan di Indonesia serta pelabuhan umum atau *port* tertentu. Jasa yang diberikan mencakup penyediaan *crew*, penanganan bunker, penyediaan air dan kegiatan lain yang berhubungan dengan agen.

PTK provides shipping agent services as a General Agent or Handling Agent for vessels docking at all ports in Indonesia. As a shipping agent, the Company's main task is to represent the owner/principal in fulfilling the requirements or obligations for ships arriving in Indonesia. During the reporting period, PTK has carried out a shipping agent, which includes a General Agent or Handling Agent. The Company became a Handling Agent in all ports in Indonesia as well as general or specific ports. The services provided include crew provision, bunker handling, water supply, and other agent-related activities.

Jasa *shipping agent* yang diberikan PTK melayani:

- *In/out clearance* kapal di pelabuhan;
- Mengurus perizinan yang berkaitan dengan keimigrasian atau perhubungan laut;

PTK provides shipping agent services:

- *In/out clearance* of ships at the Port;
- Processing licenses related to immigration or sea transportation;

- Menyiapkan fasilitas darat maupun laut;
- Layanan untuk awak dan kapal;
- Penyelesaian kewajiban keuangan (pencairan).

Tanggung jawab PTK sebagai *shipping agent*:

- Memastikan kelancaran kapal operasional di pelabuhan;
- Menyelesaikan kewajiban finansial;
- Menyampaikan laporan realisasi kunjungan kapal-kapal di pelabuhan Indonesia.

- Setting up land and sea facilities;
- Services for crew and vessels;
- Settlement of financial obligations (disbursements).

PTK responsibilities as a shipping agent:

- Ensuring the ease of operational ships at the port;
- Settling financial liability;
- Submitting the report for the visits of ships at Indonesian ports.

Pemanduan Kapal Pilotage Services

Dalam bidang usaha ini telah melaksanakan Jasa Pelayanan Pemanduan Kapal di Terminal Khusus (Tersus) dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri ("TUKS") Pertamina.

In this line of business, PTK has carried out Ship Pilotage Services at Pertamina's Special Purpose Terminals (Tersus) and Terminals for Own-Interest ("TUKS").

Pengelolaan Pelabuhan Port Management

PTK melalui entitas anak, PT Pertamina Port and Logistics ("PPL", dahulu bernama PT Peteka Karya Samudera), melaksanakan jasa Administrasi Pelabuhan Khusus (Pelsus) di 16 lokasi Terminal Khusus (Tersus) Kontraktor Kontrak Kerja Sama ("KKKS") - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ("SKK") Migas. Ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Perusahaan di bidang ini meliputi:

- Pelaksanaan administrasi pada layanan pelabuhan yang meliputi labuh, tambat, pandu, tunda (di luar wilayah kerja PT Pelindo) sebagai delegasi PT Pertamina (Persero), di mana pekerjaan Perusahaan atas nama PT Pertamina (Persero);
- Membuat laporan secara periodik terkait penyelesaian pekerjaannya, Perusahaan bertanggung jawab kepada PT Pertamina (Persero);
- Mengurus perizinan;
- Mengelola administrasi pelabuhan khusus. Dalam hal ini Perusahaan hanya mengelola pelabuhan khusus KKKS dan JOB;
- Melakukan penagihan jasa pelabuhan kepada Agen;
- Melakukan penyetoran jasa pelabuhan kepada PT Pertamina (Persero) dan Pemerintah;
- Membuat laporan kegiatan kepelabuhanan kepada PT Pertamina (Persero), BP Migas, Kantor Pelabuhan/ Administrasi Pelabuhan;
- Membantu pengurusan yang berkaitan dengan administrasi kepelabuhanan di Pelabuhan Khusus KKKS dan JOB.

PTK through its subsidiary, PT Pertamina Port and Logistics ("PPL", formerly named PT Peteka Karya Samudera), implements Special Port (Pelsus) Administration services in 16 locations of Special Purposes Terminal (Tersus) Special Task Force for Upstream Oil and Gas Business Activities ("SKK") Migas - Contractors of Cooperation Contract ("KKKS"). The scope of the Company's duties and responsibilities in this sector includes:

- Conducting the administration of port services, which include anchoring, mooring, guidance, and tug (outside the PT Pelindo operational areas) as a delegate of PT Pertamina (Persero), where the Company acts on behalf of PT Pertamina (Persero);
- Preparing periodic reports relevant to job completion, the Company is responsible to PT Pertamina (Persero);
- Permits handling;
- Managing special port administration. In this case, the Company only manages KKKS and JOB special ports;
- Conducting the collection for port services to the Agent;
- Conducting the Port Services deposit to PT Pertamina (Persero) and the Government;
- Preparing reports of port activities to PT Pertamina (Persero), BP Migas, Port/Port Administration Office;
- Assisting management relevant to port administration at KKKS and JOB Special Ports.

Bunker Agent Bunker Agent

Bunker agent merupakan fasilitas yang disediakan PTK untuk jasa pengiriman bahan bakar minyak untuk kapal atau *tanker*.

Bunker agent is a service provided by PTK for the delivery of fuel oil for ships or tankers.

Offshore & Onshore Logistic Base Offshore & Onshore Logistic Base

PTK menawarkan jasa pelayanan yang terintegrasi dalam *offshore & onshore logistic base* yang terdapat di Batam dan Tanjung Batu, Balikpapan, yang meliputi:

PTK offers integrated services in the offshore & onshore logistics base, which are located in Batam and Tanjung Batu, Balikpapan which include:



Batam

- Luas Area *Logistics shore base* 45,28 hektar.
- Pengiriman kargo dan jasa kargo administrasi.
- Perbaikan dan pembersihan kargo dengan fasilitas lengkap.
- Menyediakan layanan pasokan air bersih, pasokan bahan bakar gas dan jasa lainnya.
- Persewaan gedung kantor di Batam di Jalan Yos Sudarso Batu Ampar, Pulau Batam, terdiri dari tiga lantai untuk kebutuhan kantor, dengan fasilitas pendingin ruangan/AC, area parkir, keamanan 24 jam, 50 saluran telepon dan dilengkapi dengan sistem PABX. Selain itu, memiliki 350 KVA generator listrik dengan lokasi strategis di kargo jalur utama dan Pelabuhan Batu Ambar.
- Dukungan peralatan dan infrastruktur meliputi:
 - a) Lalu lintas dermaga.
 - b) Peralatan derek (*crane*) dengan kapasitas 50 tons ph, American *Crane* kapasitas 75 ton, crane Todano kapasitas 20 ton, derek *petty bone*, *carrylift* kapasitas 20 ton, forklift kapasitas 3 dan 5 ton, *prime over* setinggi 40 feet, dan *trailer caps* setinggi 40 kaki.

Batam

- 45.28 ha storage warehouse.
- Cargo shipping and cargo administration services.
- Cargo repair and cleaning with full facilities.
- Providing clean water supply, gas fuel supply, and other services.
- Office building rental located at Yos Sudarso Street, Batu Ampar-Batam Island comprising 3 floors for office needs, equipped with facilities of Air Conditioner (AC), parking lot, 24-hour security, 50 phone lines, and PABX system facilities. Additionally, the building also has a 350 KVA electricity generator with a strategic location at the primary cargo route and Batu Ambar port.
- Equipment and infrastructure support includes:
 - a) Harbor traffic
 - b) Crane with 50 tons pH capacity, American Crane with 75 tons capacity, Tadano Crane with 20 tons capacity, petty bone crane, carrylift with 20 tons capacity, forklift with 3 and 5 tons capacity, 40feet prime over, and 40-feet trailer caps.

Tanjung Batu, Balikpapan

Peteka *Shorebase* Tanjung Batu ("PSTB") berlokasi di lahan milik Pertamina seluas 49 Ha di Tanjung Batu, Balikpapan. PTSB menyediakan fasilitas logistik untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan migas yang beroperasi di Kalimantan dan Sulawesi melalui penyediaan *one stop logistic services* berupa:

- Penyediaan fasilitas tempat penyimpanan (*open yard, warehouse*, dan tangki).
- Fasilitas sandar kapal dengan panjang 200 meter.
- Kegiatan *cargo handling* dan transportasi, penyediaan kantor dan akomodasi.
- Penyediaan fasilitas Pusat Logistik Berikat ("PLB").
- Penyediaan jasa *waste management*, dan jasa-jasa pendukung lainnya.
- Dukungan peralatan dan infrastruktur meliputi:
 - a) Fasilitas *Jetty* 200 m, 88 m, 65 m, 107 m dan 2-3 m.
 - b) Fasilitas RORO 2x250 ton LCTs.
 - c) Fasilitas *Speedboat Jetty*.

Tanjung Batu, Balikpapan

Peteka *Shorebase* Tanjung Batu ("PSTB") is located on 49 hectares of land owned by Pertamina in Tanjung Batu, Balikpapan. PTSB provides logistics facilities to support the operational activities of oil and gas companies operating in Kalimantan and Sulawesi through the provision of one-stop logistics services in the form of:

- Provision of storage facilities (*open yard, warehouse*, and tank).
- Ship docking facilities (the largest jetty with a length of 200 meters).
- Cargo handling and transportation activities, office provision, and accommodation.
- Provision of Bonded Logistics Center ("PLB") facilities
- Provision of waste management services and other supporting services.
- Equipment and infrastructure supports, including:
 - a) Jetty facilities 200 m, 88 m, 65 m, 107 m and 2-3 m.
 - b) RORO facility 2x250 ton LCTs.
 - c) Speedboat Jetty facilities.

Recognized Security Organization ("RSO")

PTK ditunjuk sebagai RSO sejak tahun 2004 berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. KI.93/1/15-04 yang telah diperbaharui sampai dengan saat ini. Hal ini merupakan wujud komitmen dari Direksi RSO untuk ikut berpartisipasi dalam implementasi ISPS *Code* di Indonesia.

RSO merupakan konsultan dalam bidang keamanan yang memberikan saran atau menyediakan bantuan dalam bidang operasional kapal dan fasilitas pelabuhan, meliputi:

- Melaksanakan Kegiatan Sertifikasi ISPS *Code* untuk kapal ("ISSC") dan Fasilitas Pelabuhan ("SoCPF").
- Melaksanakan atau menyelesaikan Penilaian Keamanan Fasilitas Pelabuhan ("PFSA").
- Membantu dalam menyiapkan rencana keamanan fasilitas pelabuhan ("PFSP").

Recognized Security Organization ("RSO")

The Company has been appointed as RSO since 2004 based on the Director General of Sea Transportation Decree No. KI.93/1/15-04 which has been updated until now. This is the realization of the commitment of the RSO Board of Directors to participate in ISPS *Code* implementation in Indonesia.

RSO is a security sector consultant that provides suggestions or assistance in vessel operations and port facilities, including:

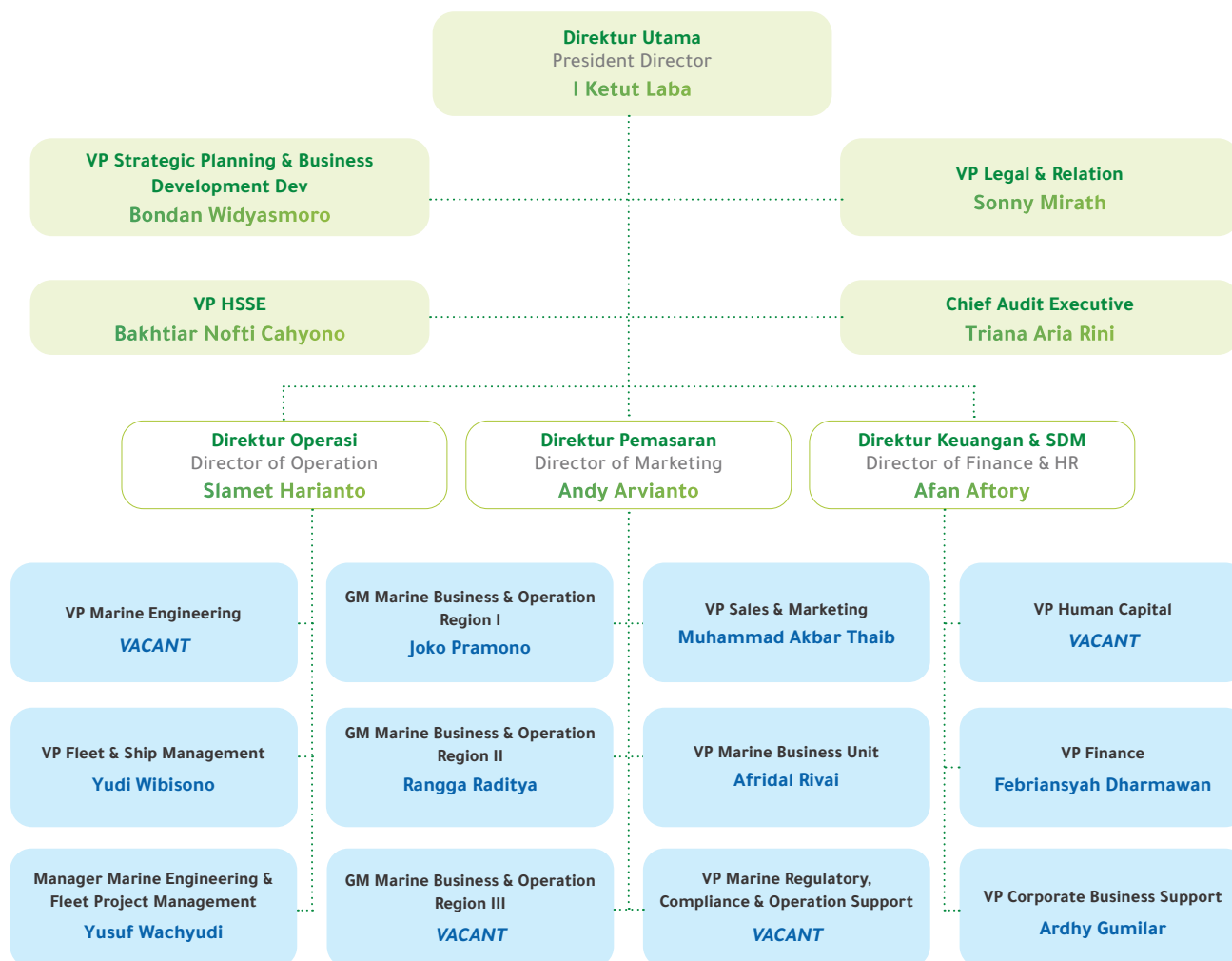
- Organizing activities of ISPS *Code* Certification for vessels ("ISSC") and Ports Facilities ("SoCPF").
- Conducting and completing the Ports Facilities Security Assessment ("PFSA").
- Assisting in the preparation of the Ports Facilities Security Plan ("PFSP").

Struktur Organisasi

Organizational Structure

Struktur organisasi PTK ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Utama No. Kpts-511/C0000/2021-S0 Tanggal 11 Mei 2021 Tentang Struktur Organisasi BOD-1 Kebawah PT Pertamina Trans Kontinental. Berikut struktur organisasi PTK disertai nama pejabat PTK per 31 Desember 2023:

The organizational structure of PTK is stipulated in President Director Decree No. Kpts-511/C0000/2021-S0 dated May 11, 2021, concerning the Organizational Structure of BOD-1 and Below of PT Pertamina Trans Kontinental. The following is the organizational structure of PTK, along with the names of PTK officials as of December 31, 2023:



Profil Dewan Komisaris

Profile of the Board of Commissioners

Pada tahun 2023, terdapat perubahan komposisi Dewan Komisaris PTK yaitu pada tanggal 17 Oktober 2023 Informasi lebih lanjut terkait perubahan komposisi Dewan Komisaris dijelaskan pada Bab Laporan Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

Berikut Profil Dewan Komisaris yang menjabat selama Tahun 2023

In 2023, there was a change in the composition of PTK's Board of Commissioners on October 17, 2023. Further information regarding changes in the composition of the Board of Commissioners is explained in the Board of Commissioners Report Chapter in this Annual Report.

The following is the profile of the Board of Commissioners who served during 2023



Amir Hamzah**
Komisaris Utama
President Commissioner

Khalid Zabidi
Komisaris
Commissioner

Andi Saiful Haq
Komisaris
Commissioner

Agustinus Bensik Lomboan*
Komisaris
Commissioner

* Pemberhentian berdasarkan KPSSS tanggal 1 November 2023 & Akta No. 09 tanggal 7 November 2023

** Diangkat berdasarkan KPSSS tanggal 28 Mei 2021 dan Akta No. 22 Tanggal 31 Mei 2021 (28 Mei 2021 - 27 Mei 2024 Periode-1)

* His term of office ended based on KPSSS dated November 1, 2023 & Deed No. 9 dated November 7, 2023

** Appointed based on KPSSS dated May 28, 2021 and Deed No. 22 dated May 31, 2021 (May 28, 2021 - May 27, 2024 Period-1)



Amir Hamzah

Komisaris Utama
President Commissioner

Domisili Domicile	Bogor
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Usia/Tempat & Tanggal Lahir Age/Place & Date of Birth	65 tahun per 31 Desember 2023/Malang, 24 Agustus 1958 65 years old as of December 31, 2023/ Malang, August 24, 1958

Pendidikan Education	Sarjana Ilmu Tanah Brawijaya Malang (1981)	Bachelor's Degree in Soil Science at Brawijaya University, Malang (1981);
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	Menjabat sebagai Komisaris sejak 28 Mei 2021 berdasarkan Akta No. 22 tanggal 31 Mei 2021, untuk 1 periode masa jabatan (3 tahun). Sebelumnya beliau tidak pernah menjabat dalam jajaran Dewan Komisaris Perusahaan.	Appointed as Commissioner since May 28, 2021, based on Deed No. 22 dated May 31, 2021, for one period of term of office (3 years). Previously, he had never served on the Company's Board of Commissioners.
Pengalaman Kerja Work Experience	Lebih dari 35 Tahun berpengalaman di bidang energi, khususnya Minyak dan Gas Bumi. Jabatan strategis: 1. Direktur Pengembangan Bisnis HCI (2015-2021). 2. Penunjang Operasi SKKMIGAS (2012 - 2014). 3. VP Pertamina Hulu, Total Indonesia, Conocophillips (2010-2012). 4. Kepala Divisi Eksternal BP MIGAS (2008-2009). 5. Kadin Hupmas BPMIGAS (2004 - 2007).	More than 35 years of experience in the energy sector, especially Oil and Gas. Strategic positions: 1. Director of HCI (2015-2021). 2. Division SKKMIGAS (2012-2014). 3. Total Indonesia, ConocoPhillips (2010-2012). 4. BP MIGAS Head of External Division (2008-2009). 5. BPMIGAS Head of Public Relations (2004-2007).
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Tidak ada	None
Sertifikasi Certification	Certified Risk Professional (CRP)	Certified Risk Professional (CRP)
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, Pemegang Saham Utama/ Pengendali, maupun dengan Pemerintah Indonesia sebagai entitas pemilik akhir	Has no affiliation with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, Major/ Controlling Shareholders, nor with the Government of Indonesia as the ultimate owner entity.
Periode Jabatan Term of Office	Pertama	First
Kepemilikan Saham Share Ownership	Tidak Ada	None





Agustinus Bensik Lomboan

Komisaris
Commissioner

Domisili Domicile	Jakarta
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Usia/Tempat & Tanggal Lahir Age/Place & Date of Birth	59 tahun per 31 Desember 2023/ Balikpapan, 07 Agustus 1964 65 years old as of December 31, 2023/ Malang, August 24, 1958

Pendidikan Education	• Sarjana (S1) Teknik Mesin di Universitas Trisakti Jakarta (1988). • Pasca Sarjana (S2) Manajemen Keuangan Universitas Indonusa Esa Unggul Jakarta (1995).	• Bachelor's Degree in Soil Science at Brawijaya University, Malang (1981); • Postgraduate (S2) Financial Management, Indonusa Esa Unggul University Jakarta (1995).
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	Menjabat sebagai Komisaris sejak 09 Desember 2021 berdasarkan Akta No. 41 tanggal 24 Desember 2021.	Served as Commissioner since December 9, 2021, based on Deed No. 41 dated December 24, 2021.
Pengalaman Kerja Work Experience	1. Komisaris CV Oasis Center Arena (2018-sekarang). 2. Komisaris CV Oca Fortable (2019-sekarang). 3. Presiden Komisaris PT Glory Kasih Indonesia (2009-sekarang). 4. Komisaris PT Kendilo Coal Indonesia (2009-2019). 5. Chief Financial Officer & Chief Business Development Officer PT Apexindo Pratama Duta Tbk (2000-2001).	1. Commissioner of CV Oasis Center Arena (2018-present), 2. Commissioner of CV Oca Fortable (2019-present), 3. President Commissioner of PT Glory Kasih Indonesia (2009-present), 4. Commissioner of PT Kendilo Coal Indonesia (2009-2019), 5. Chief Financial Officer & Chief Business Development Officer PT Apexindo Pratama Duta Tbk (2000-2001).
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Tidak ada	None
Sertifikasi Certification	-	-
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, Pemegang Saham Utama/ Pengendali, maupun dengan Pemerintah Indonesia sebagai entitas pemilik akhir.	Has no affiliation with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, Major/ Controlling Shareholders, nor with the Government of Indonesia as the ultimate owner entity.
Periode Jabatan Term of Office	Pertama	First
Kepemilikan Saham Share Ownership	Tidak Ada	None



Andi Saiful Haq

Komisaris
Commissioner

Domisili Domicile	Bogor
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia.
Usia/Tempat & Tanggal Lahir Age/Place & Date of Birth	48 tahun per 31 Desember 2023/ Soppeng, 12 Mei 1975 48 years old as of December 31, 2023/ Soppeng, May 12, 1975

Pendidikan Education	• Sarjana (S1) Teknik Sipil di Universitas Hasanuddin Makassar (1997). • Pasca Sarjana Studi Pertahanan Institut Teknologi Bandung (2007) dan Cranfield University Inggris (2007). • Pasca Sarjana Hubungan Internasional di Departemen Ilmu Politik Justus Liebig University Giessen, Jerman (2008).	• Bachelor's Degree in civil engineering from Hasanuddin University Makassar (1997) • Master's Degree in Defense Studies from Bandung Institute of Technology (2007) and Cranfield University UK (2007) • Doctoral's Degree in International Relations from Department of Political Science of Justus Liebig University Giessen, Germany (2008).
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	Menjabat sebagai Komisaris sejak 11 September 2020 berdasarkan Akta No. 15 tanggal 23 November 2020, untuk 1 periode masa jabatan (3 tahun). Beliau diangkat kembali melalui KPSS tanggal 11 Oktober 2023 dan Akta No. 29 Tanggal 17 Oktober 2023 (11 Oktober 2023 - 10 Oktober 2026 (Periode-2)).	Appointed as Commissioner since September 11, 2020, based on Deed No. 15 dated November 23, 2020, for one period of term of office (3 years). He was reappointed through KPSS on October 11, 2023 and Deed no. 29 October 17, 2023 (October 11, 2023 - October 10, 2026 (2 nd Period)
Pengalaman Kerja Work Experience	1. Staf Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (2022-sekarang). 2. Komisaris di Institute for Transformation Studies (INTRANS) Jakarta (2022-Sekarang). 3. Direktur di Institute for Transformation Studies (INTRANS) Jakarta (2013- 2022). 4. Pengajar di Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Paramadina, Jakarta (2011-2013). 5. Program Officer untuk Perdamaian dan Demokratisasi Aceh di Friedrich Ebert Stiftung (FES) Indonesia (2008-2011).	1. Staff of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency (2022-present). 2. Commissioner at the Jakarta Institute for Transformation Studies (INTRANS) (2022-present). 3. Director at the Jakarta Institute for Transformation Studies (INTRANS) (2013-2022). 4. Lecturer in the Department of International Relations of Paramadina University, Jakarta (2011-2013). 5. Officer for Aceh Peace and Democratization at the Friedrich Ebert Stiftung (FES) Indonesia (2008-2011).
Rangkap Jabatan Concurrent Position	• Di Dalam PTK: Ketua Komite Investasi (2021-sekarang). • Di Luar PTK: (1) Komisaris Institute for Transformation Studies (INTRANS) (2022-sekarang); (2) Staf Khusus Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (2022-sekarang).	• Inside PTK: Chairman of the Investment Committee (2021-present). • Outside PTK: (1) Commissioner of the Institute for Transformation Studies (INTRANS) (2022-present); (2) Special Staff to the Minister of Agrarian and Spatial Planning/Head of the National Land Agency (2022-present).
Sertifikasi Certification	<i>Certified Risk Professional (CRP)</i>	Certified Risk Professional (CRP)
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, Pemegang Saham Utama/ Pengendali, maupun dengan Pemerintah Indonesia sebagai entitas pemilik akhir.	Has no affiliation with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, Major/ Controlling Shareholders, nor with the Government of Indonesia as the ultimate owner entity.
Periode Jabatan Term of Office	Kedua	Second
Kepemilikan Saham Share Ownership	Tidak Ada	None





Khalid Zabidi

Komisaris
Commissioner

Domisili Domicile	Jakarta
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia.
Usia/Tempat & Tanggal Lahir Age/Place & Date of Birth	49 tahun Per 31 Desember 2023/ Bogor 20 September 1974 49 years old as of December 31, 2023/ Bogor, September 20, 1974

Pendidikan Education	• Sarjana (S1) Seni Rupa dan Desain di Institut Teknologi Bandung (1999). • Fellowship Programme Communication Studies di Nanyang Technological University Singapore (2000). • Magister (S2) Manajemen Seni Rupa dan Desain di Institut Teknologi Bandung (2003).	• Bachelor's Degree in Fine Arts and Design at the Institute of Technology Bandung (1999). • Fellowship Program Communication Studies at Nanyang Technological University Singapore (2000). • Master's Degree in Fine Arts and Design at Bandung Institute of Technology (2003).
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	Menjabat sebagai Komisaris sejak 12 November 2021, berdasarkan Akta No. 16 tanggal 23 November 2021, untuk 1 periode masa jabatan (3 tahun). Sebelumnya beliau tidak pernah menjabat dalam jajaran Dewan Komisaris Perusahaan.	Appointed as Commissioner since November 12, 2021, based on Deed No. 16 dated November 23, 2021, for one period of term of office (3 years). Previously, he had never served on the Company's Board of Commissioners.
Pengalaman Kerja Work Experience	1. Founder Epicentrum Consulting (2018-sekarang). 2. Direktur Utama PT Tamaca (2017-2022). 3. Direktur Utama PT Geothermal Teknindo Utama (2016-2021). 4. Dosen di Universitas Paramadina (2006-2021). 5. Senior Analis Content Konsultan Komunikasi Cybermedia HLVII (2017-2018).	1. Founder of Epicentrum Consulting (2018-present). 2. President Director of PT Tamaca (2017-2022). 3. President Director of PT Geothermal Teknindo Utama (2016-2021). 4. Lecturer at Paramadina University (2006-2021). 5. Senior Content Analyst at HLVII Cybermedia Communication Consultant (2017-2018).
Rangkap Jabatan Concurrent Position	• Di Dalam PTK: Ketua Komite Audit (2021-sekarang). • Di Luar PTK: Komisaris PT Sejabat (2021-sekarang).	• Inside PTK: Chairman of the Audit Committee (2021-present). • Outside PTK: Commissioner of PT Sejabat (2021-present).
Sertifikasi Certification	<i>Certified Risk Professional (CRP)</i>	Certified Risk Professional (CRP)
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, Pemegang Saham Utama/ Pengendali, maupun dengan Pemerintah Indonesia sebagai entitas pemilik akhir.	Has no affiliation with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, Major/ Controlling Shareholders, nor with the Government of Indonesia as the ultimate owner entity.
Periode Jabatan Term of Office	Pertama	First
Kepemilikan Saham Share Ownership	Tidak Ada	None

Perubahan Komposisi Anggota Dewan Komisaris dan Alasan Perubahannya Setelah Tahun Buku Berakhir

Members composition changes of the Board of Commissioners and Reasons for Changes After the Fiscal Year Ends

Terjadi perubahan susunan Dewan Komisaris setelah berakhirnya periode laporan hingga terbitnya Laporan Tahunan ini, yaitu pada tanggal 12 Februari 2024 berdasarkan KPSSS dan Akta No. 40 tanggal 22 Februari 2024 dengan diangkatnya Sdr. Agustinus Ico Tri Prasetyantoko sebagai Komisaris Independen dan Sdr. Hartanto sebagai anggota Komisaris.

There was a change in the composition of the Board of Commissioners after the end of the reporting period until the publication of this Annual Report, namely on February 12, 2024 based on KPSSS and Deed No. 40 dated February 22, 2024 with the appointment of Mr. Agustinus Ico Tri Prasetyantoko as Independent Commissioner and Br. Hartanto as member of the Commissioners.

Profil Direksi

Profile of the Board of Directors

Pada tahun 2023, terdapat perubahan komposisi Direksi PTK yaitu pada tanggal 3 Juli dan 24 Juli 2023. Informasi lebih lanjut terkait perubahan komposisi Direksi dijelaskan pada Bab Laporan Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

Berikut Profil Direksi yang menjabat selama Tahun 2023:

In 2023, there was a change in the composition of PTK's Board of Directors on July 3 and July 24, 2023. Further information regarding changes in the composition of the Board of Directors is explained in the Board of Directors' Report chapter of this Annual Report.

The following is the profile of the Board of Directors who served during 2023:



Afan Aftory
Direktur Keuangan
& SDM
Director of Finance & HR

I Ketut Laba **
Direktur Utama
President Director

Slamet Harianto
Direktur Operasi
Director of Operations

Andy Arvianto
Direktur Pemasaran
Director of Marketing

Nepos MT Pakpahan*
Direktur Utama
President Director

* berakhir masa jabatan sebagai anggota Direksi PTK berdasarkan KPSSS tanggal 3 Juli 2023 dan Akta No. 02 tanggal 03 Juli 2023

** Diangkat berdasarkan KPSSS tanggal 3 Juli 2023 dan Akta No. 02 tanggal 3 Juli 2023 (3 Juli 2023 - 2 Juli 2026 Periode 1)

* his term of office as a member of PTK Board of Directors ended based on KPSSS on July 3, 2023 based on Deed No. 02 dated July 03, 2023

** Appointed based on KPSSS dated July 3, 2023 based on Deed No. 02 dated July 3, 2023 (July 3, 2023 - July 2, 2026 1st Period)



Nepos MT Pakpahan

Direktur Utama
President Director

Domisili Domicile	Tangerang Selatan.
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia.
Usia/Tempat & Tanggal Lahir Age/Place & Date of Birth	60 tahun per 31 Desember 2023/ Laguboti, 8 November 1963. 60 years old as of December 31, 2023/ Laguboti, November 8, 1963

Pendidikan Education	Sarjana (S1) Teknik Mesin dari Universitas Brawijaya Malang (1989); dan Magister (S2) Teknik dari Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto (2001).	Bachelor's degree in Mechanical Engineering from Brawijaya University Malang (1989); and Master's Degree in Engineering from Jenderal Soedirman University Purwokerto (2001).
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	Menjabat sebagai Direktur Utama sejak tanggal 15 Juli 2019, berdasarkan Akta No. 5 tanggal 17 Juli 2019, untuk masa jabatan hingga 15 Juli 2022. Beliau kembali diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan Akta No. 06 tanggal 19 Juli 2022 untuk 1 periode masa jabatan (3 tahun).	Appointed as President Director since July 15, 2019 based on Deed No. 5 dated July 17, 2019 for a term of office until July 15, 2022. He was re-appointed as President Director based on Deed No. 06 dated July 19, 2022 for 1 period of term of office (3 years).
Pengalaman Kerja Work Experience	Bergabung dengan PT Pertamina Persero dari tahun 1990. Sejumlah jabatan penting yang telah dicapai: 1. VP HSSE Upstream PT Pertamina (Persero) (2017-2019). 2. Manager HSSE Upstream & Gas PT Pertamina (Persero) (2015-2017).	Joined PT Pertamina (Persero) in 1990. Several important positions that have been achieved are as: 1. VP HSSE Upstream of PT Pertamina (Persero) (2017-2019). 2. Manager HSSE Upstream & Gas PT Pertamina (Persero) (2015-2017).
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Tidak ada	None
Sertifikasi Certification	-	-
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, Pemegang Saham Utama/Pengendali, maupun dengan Pemerintah Indonesia sebagai entitas pemilik akhir.	Has no affiliation with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, Major/Controlling Shareholders, nor with the Government of Indonesia as the ultimate owner entity.
Periode Jabatan Terms of Office	Pertama	First
Kepemilikan Saham Share Ownership	Tidak Ada	None



I Ketut Laba

Direktur Utama
President Director

Domisili Domicile	Jakarta.
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia.
Usia/Tempat & Tanggal Lahir Age/Place & Date of Birth	48 tahun per 31 Desember 2023/ Melaya, 21 Agustus 1975. 48 years old as of December 31, 2023/ Melaya, August 21, 1975.

Pendidikan Education	S1 Sarjana Teknik Mesin di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta pada tahun 1998.	Bachelor's Degree in Mechanical Engineering at the Jakarta School of Shipping (STIP) in 1998.
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	Menjabat sebagai Direktur Utama sejak tanggal 3 Juli 2023, berdasarkan, Akta No 02 tanggal 3 Juli 2023, untuk 1 (satu) periode masa jabatan (3 tahun). Sebelumnya beliau tidak pernah menjabat dalam jajaran Direksi Perusahaan.	He has served as President Director since July 3, 2023, based on Deed No. 02 dated July 3, 2023, for 1 (one) term of office (3 years). Previously, he has never served on the Company's Board of Directors.
Pengalaman Kerja Work Experience	Memulai karir di PT Pertamina Persero sejak tahun 2012. Jabatan penting yang pernah dicapai: 1. Manager HSSE, Vetting & Risk Management PT Pertamina International Shipping (2018-2019). 2. Direktur Utama PT Perta MC (2022-2023).	Started a career at PT Pertamina Persero since 2012. Important positions that have been achieved are: 1. Manager of HSSE, Vetting & Risk Management at PT Pertamina International Shipping (2018-2019). 2. President Director PT Perta MC (2022-2023).
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Tidak ada	None
Sertifikasi Certification	Certified Risk Professional (CRP)	Certified Risk Professional (CRP)
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, Pemegang Saham Utama/ Pengendali, maupun dengan Pemerintah Indonesia sebagai entitas pemilik akhir.	Has no affiliation with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, Major/ Controlling Shareholders, nor with the Government of Indonesia as the ultimate owner entity.
Periode Jabatan Terms of Office	Pertama	First
Kepemilikan Saham Share Ownership	Tidak Ada	None





Afan Aftory, SEAN CPA

Direktur Keuangan & SDM
Director of Finance & HR

Domisili Domicile	Jakarta.
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia.
Usia/Tempat & Tanggal Lahir Age/Place & Date of Birth	47 tahun per 31 Desember 2023/Jakarta, 19 Juni 1976 47 years old as of December 31, 2023/Jakarta, June 19, 1976

Pendidikan Education	• Sarjana (S1) Ekonomi Akuntansi di Universitas Borobudur (1997). • Magister (S2) Manajemen di Universitas Satyagama (1999), dan Pendidikan Profesi Akuntan ("PPAk") di Universitas Indonesia (2004).	• Bachelor's Degree in Accounting Economics from Borobudur University (1997). • Master's Degree in Management at Satyagama University (1999), and Accountant Professional Education ("PPAk") from the University of Indonesia (2004).
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	Menjabat sebagai Direktur Keuangan dan SDM sejak 1 September 2021, berdasarkan Akta No. 5 tanggal 17 September 2021, untuk 1 (satu) periode masa jabatan (3 tahun). Sebelumnya beliau tidak pernah menjabat dalam jajaran Direksi Perusahaan.	Appointed as the Director of Finance & HR since September 1, 2021, based on Deed No. 5 dated September 17, 2021, for one period of term of office (3 years). Previously, he had never served on the Company's Board of Directors.
Pengalaman Kerja Work Experience	Memulai karir di PT Pertamina (Persero) sejak tahun 2009. Sejumlah jabatan penting yang pernah dicapai adalah sebagai: 1. Vice President Finance PT Pertamina Lubricants (2019-2020). 2. Vice President Financial Reporting & Accounting PT Pertamina (Persero) (2020-2021).	Started a career at PT Pertamina (Persero) in 2009. Several important positions that have been achieved are as: 1. Vice President of Finance of PT Pertamina Lubricants (2019-2020) 2. Vice President of Financial Reporting & Accounting of PT Pertamina (Persero) (2020-2021).
Rangkap Jabatan Concurrent Position	• Di Dalam PTK: PLT Direktur Pemasaran. • Di Luar PTK: tidak ada.	• Inside PTK: Acting Marketing Director. • Outside PTK: none.
Sertifikasi Certification	• Certified Risk Professional (CRP) • Sertifikasi Pajak Brevet A & B • Sertifikasi Pajak Brevet C • ASEAN Certified Professional Accountant (CPA)	• Certified Risk Professional (CRP) • Brevet A & B Tax Certification • Brevet C Tax Certification • ASEAN Certified Professional Accountant (CPA)
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, Pemegang Saham Utama/Pengendali, maupun dengan Pemerintah Indonesia sebagai entitas pemilik akhir.	Has no affiliation with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, Major/Controlling Shareholders, nor with the Government of Indonesia as the ultimate owner entity.
Periode Jabatan Terms of Office	Pertama.	First.
Kepemilikan Saham Share Ownership	Tidak Ada	None



Slamet Harianto

Direktur Operasi
Director of Operations

Domisili Domicile	Jakarta.
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia.
Usia/Tempat & Tanggal Lahir Age/Place & Date of Birth	44 tahun per 31 Desember 2023/Malang, 22 Februari 1979 44 years old as of December 31, 2023/ Malang, February 22, 1979

Pendidikan Education	• Sarjana (S1) Teknik Mesin dari Universitas Brawijaya Malang (2002); dan • Magister (S2) Teknik dari Universitas Indonesia (2011).	• Bachelor's Degree in Mechanical Engineering from Brawijaya University, Malang (2002); • Master's Degree in Engineering from the University of Indonesia (2011).
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	Menjabat sebagai Direktur Operasi sejak tanggal 5 Agustus 2022, berdasarkan Akta No. 04 tanggal 10 Agustus 2022, untuk 1 (satu) periode masa jabatan (3 tahun). Sebelumnya beliau tidak pernah menjabat dalam jajaran Direksi Perusahaan.	Appointed as the Director of Finance & HR since August 5, 2022, based on Deed No. 4 dated August 10, 2022, for one period of term of office (3 years). Previously, he had never served on the Company's Board of Directors.
Pengalaman Kerja Work Experience	Memulai karir di PT Pertamina (Persero) sejak tahun 2003. Sejumlah jabatan penting yang pernah dicapai beliau adalah sebagai: 1. Manager LNG Operation PT Pertamina (Persero) (2019-2022). 2. Kepala Divisi Operasi PT Nusantara Regas (2018-2019). 3. General Manager Operasi PT Nusantara Regas (2016-2018).	Started a career at PT Pertamina (Persero) in 2003. Several important positions he has achieved are: 1. Manager of LNG Operations of PT Pertamina (Persero) (2019-2022). 2. Head of the Operations Division of PT Nusantara Regas (2018-2019). 3. General Manager Operation PT Nusantara Regas (2016-2018).
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Tidak ada	None
Sertifikasi Certification	<i>Certified Risk Professional (CRP)</i>	Certified Risk Professional (CRP)
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, Pemegang Saham Utama/ Pengendali, maupun dengan Pemerintah Indonesia sebagai entitas pemilik akhir.	Has no affiliation with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, Major/ Controlling Shareholders, nor with the Government of Indonesia as the ultimate owner entity.
Periode Jabatan Terms of Office	Pertama	First.
Kepemilikan Saham Share Ownership	Tidak Ada	None





Andy Arvianto

Direktur Pemasaran
Director of Marketing

Domisili Domicile	Jakarta.
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia.
Usia/Tempat & Tanggal Lahir Age/Place & Date of Birth	43 tahun per 31 Desember 2023/ Boyolali, 27 Februari 1980. 43 years old as of December 31, 2023/ Boyolali, February 27, 1980.

Pendidikan Education	- S1 Sarjana Ekonomi Manajemen di Universitas Indonusa Esa Unggul Jakarta pada tahun 2002. - S2 Sarjana Energy Management di Universitas Gadjah Mada Jakarta pada tahun 2012.	- Bachelor's Degree in Management Economics at Indonusa Esa Unggul University, Jakarta in 2002. - Master's Degree in Energy Management at Gadjah Mada University, Jakarta in 2012.
Dasar Hukum Penunjukan Legal Basis of Appointment	Menjabat sebagai Direktur Pemasaran sejak 21 Juli 2023 berdasarkan Akta No. 17 tanggal 24 Juli 2023, untuk 1 (satu) periode masa jabatan (3 tahun). Sebelumnya beliau tidak pernah menjabat dalam jajaran Direksi Perusahaan.	He has served as Marketing Director since July 21, 2023, based on Deed No. 17 dated July 24, 2023, for 1 (one) term of office (3 years). Previously, he has never served on the Company's Board of Directors.
Pengalaman Kerja Work Experience	Memulai karir di PT Pertamina Persero sejak tahun 2003. Sejumlah jabatan penting yang dicapai yaitu: 1. Chief Financial Officer (CFO) PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) (2021-2023). 2. Commercial Manager PT Pertamina Internasional EP (2015-2021). 3. Manager Treasury & Tax PT Pertamina International EP (2015). 4. Finance Manager & Commercial PT Pertamina Irak EP (2014-2019). 5. Assistant Manager Upstream Business Evaluation PT Pertamina (Persero) (2014).	Started a career at PT Pertamina Persero since 2003. Several important positions achieved are: 1. Chief Financial Officer (CFO) PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) (2021-2023). 2. Commercial Manager PT Pertamina Internasional EP (2015-2021). 3. Manager Treasury & Tax PT Pertamina International EP (2015). 4. Finance Manager & Commercial PT Pertamina Irak EP (2014-2019). 5. Assistant Manager Upstream Business Evaluation PT Pertamina (Persero) (2014).
Rangkap Jabatan Concurrent Position	Tidak ada	None
Sertifikasi Certification	Certified Risk Professional (CRP)	Certified Risk Professional (CRP)
Hubungan Afiliasi Affiliation	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, Pemegang Saham Utama/Pengendali, maupun dengan Pemerintah Indonesia sebagai entitas pemilik akhir.	Has no affiliation with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, Major/Controlling Shareholders, nor with the Government of Indonesia as the ultimate owner entity.
Periode Jabatan Terms of Office	Pertama	First
Kepemilikan Saham Share Ownership	Tidak Ada	None

Perubahan Komposisi Anggota Direksi dan Alasan Perubahannya Setelah Tahun Buku Berakhir

Members composition changes of the Board of Directors and the reasons for the changes after the financial year ends

Setelah periode Laporan Tahunan ini berakhir hingga disahkannya laporan ini, tidak terdapat pergantian dan perubahan susunan Direksi Perusahaan.

After the end of this Annual Report period until the ratification of this report, there were no changes to the composition of the Company's Board of Directors.

Statistik Sumber Daya Manusia

Human Resources Statistics

Hingga akhir Desember 2023, PTK memiliki jumlah pegawai sebanyak 3.703 orang. Mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya sebanyak 3.978 orang.

Until the end of December 2023, PTK had a number of employees of 3,703 people. It experienced a decrease compared to the previous year of 3,978 people.

Berikut adalah komposisi jumlah pegawai per 31 Desember 2023 berdasarkan status pegawai, jenjang jabatan, tingkat pendidikan, gender dan usia:

The following is the composition of the number of employees as of December 31, 2023, based on employee status, position level, education level, gender, and age:

Komposisi SDM Berdasarkan Status Pegawai

HR Composition by Employee Status

Keterangan Description	2023			2022			2021		
	Pria Male	Wanita Female	Jumlah Total	Pria Male	Wanita Female	Jumlah Total	Pria Male	Wanita Female	Jumlah Total
Pegawai Tetap (PWTT) Permanent Employee (PWTT)	461	85	546	484	83	567	500	100	596
Pegawai Kontrak (PWT) Contract Employee (PWT)	539	9	548	590	12	602	624	10	638
Pegawai Tidak Tetap (TKJP) Non-permanent Employee (TKJP)	2.379	230	2.609	2.590	219	2.809	470	94	564
Jumlah Pegawai Number of Employees	3.379	324	3.703	3.664	314	3.978	1.594	204	1.798

Komposisi SDM Berdasarkan Jenjang Jabatan

HR Composition by Position Level

Keterangan Description	2023			2022			2021		
	Pria Male	Wanita Female	Jumlah Total	Pria Male	Wanita Female	Jumlah Total	Pria Male	Wanita Female	Jumlah Total
Eksekutif Executive	16	1	17	12	1	13	20	2	22
Manager	68	7	75	68	7	75	51	7	58
Asisten Manager Assistant Manager	125	24	149	124	20	144	16	12	28
Staff dan Pekerja Laut Staff and Sea Workers	791	62	853	871	66	937	1016	90	1.126
Tenaga Alih Daya Outsourcing	2.379	230	2.609	2.589	220	2.809	491	93	564
Jumlah Pegawai Number of Employees	3.379	324	3.703	3.664	314	3.978	1.594	204	1.798

Komposisi SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan

HR Composition by Education Level

Keterangan Description	2023			2022			2021		
	Pria Male	Wanita Female	Jumlah Total	Pria Male	Wanita Female	Jumlah Total	Pria Male	Wanita Female	Jumlah Total
Pasca Sarjana Master's Degree	54	11	65	53	10	63	59	10	69
Sarjana Bachelor's Degree	569	181	750	564	145	725	355	134	489
Diploma	342	69	411	647	56	716	144	31	175
SMA dan setara Senior High School and equivalent	2.002	61	2.063	1.855	55	1.868	553	29	582
Lain-lain (ANT I-II/ATT I-II) Others (ANT I-II/ATT I-II)	412	2	414	545	48	606	483	0	483
Jumlah Pegawai Number of Employees	3.379	324	3.703	3.664	314	3.978	1.594	204	1.798

Komposisi SDM Berdasarkan Unit Kerja

HR Composition by Work Unit

Keterangan Description	2023			2022			2021		
	Pria Male	Wanita Female	Jumlah Total	Pria Male	Wanita Female	Jumlah Total	Pria Male	Wanita Female	Jumlah Total
Non Direktorat Non-directorate	85	29	114	65	31	96	66	27	93
Direktorat Operasi Directorate of Operations	671	29	700	717	23	740	734	24	758
Direktorat Pemasaran Directorate of Marketing	2.564	226	2.790	2.798	215	3.013	713	96	809
Direktorat Keuangan & SDM Directorate of Finance & HR	59	40	99	50	38	88	55	52	107
Lain-Lain (Organisasi <i>Project</i>) Others (Project Organization)	-	-	-	34	7	41	26	5	31
Jumlah Pegawai Number of Employees	3.379	324	3.703	3.664	314	3.978	1.594	204	1.798

Komposisi SDM Berdasarkan Gender

HR Composition by Gender

Keterangan Description	2023	2022	2021
Laki-laki Male	3.379	3.662	1.594
Perempuan Female	324	316	204
Jumlah Pegawai Number of Employees	3.703	3.978	1.798

Komposisi SDM Berdasarkan Usia

HR Composition by Age

Keterangan Description	2023			2022			2021		
	Pria Male	Wanita Female	Jumlah Total	Pria Male	Wanita Female	Jumlah Total	Pria Male	Wanita Female	Jumlah Total
<20 tahun years old	11	0	11	13	4	17	2	0	2
21-30 tahun years old	553	86	639	731	74	805	355	37	392
31-40 tahun years old	1.193	143	1.336	1.263	141	1.403	461	121	582
41-50 tahun years old	1.049	65	1.114	1.203	54	1.257	525	17	565
51-55 tahun years old	521	23	544	432	26	459	221	24	245
>55 tahun years old	52	7	59	22	15	37	30	5	35
Jumlah Pegawai Number of Employees	3.379	324	3.703	3.664	314	3.978	1.594	204	1.798

Struktur Grup dan Entitas Anak, Entitas Asosiasi Serta Kantor Cabang/Perwakilan

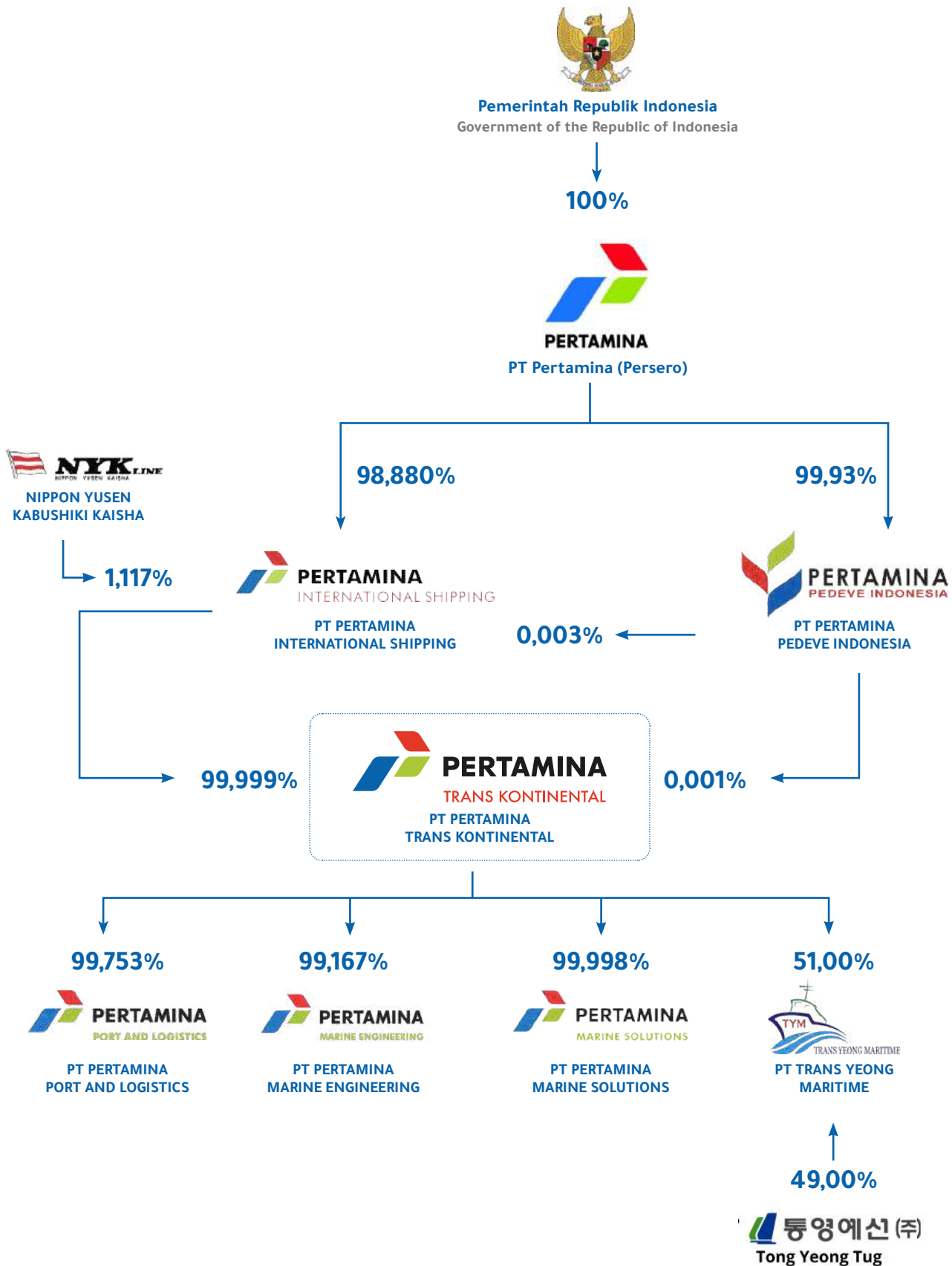
Structure of the Group and Subsidiaries, Associates and Branch/Representative Offices

Struktur Grup

Group Structure

PT Pertamina Trans Kontinental merupakan Anak Perusahaan PT Pertamina International Shipping yang digambarkan sebagai berikut:

PT Pertamina Trans Kontinental is a Subsidiary of PT Pertamina International Shipping which is described as follows:



Entitas Anak Perusahaan

Subsidiaries

Hingga akhir 31 Desember 2023, PTK memiliki Entitas Anak yaitu Pertamina Port and Logistics, Pertamina Marine Engineering, Pertamina Marine Solutions, dan Perusahaan Patungan (*Joint Venture*) yaitu Trans Yeong Maritime.

Until the end of December 31, 2023, PTK has Subsidiaries namely Pertamina Port and Logistics, Pertamina Marine Engineering, Pertamina Marine Solutions, and a Joint Venture Company, Trans Yeong Maritime.

	Nama Perusahaan Company Name	PT Pertamina Ports and Logistics	
	Tanggal Pendirian Date of Establishment	10 Februari 1989	February 10, 1989
	Dasar Hukum Pendirian Legal Basis of Establishment	Akta pendirian No. 48 tanggal 10 Februari 1986 dibuat di hadapan NY Yetty Taher S.H, M, Notaris di Jakarta	Deed of establishment No. 48 dated February 10, 1986, passed before Mrs. Yetty Taher S.H, M, Notary in Jakarta
	Status Badan Hukum Legal Entity Status	Perseroan Terbatas ("PT"); Penanaman Modal Dalam Negeri ("PMDN")	Limited Liability Company ("PT"); Domestic Investment ("PMDN")
	Kepemilikan Saham Share Ownership	- PT Pertamina Trans Kontinental: 99,753% - PT Pertamina Marine Solutions: 0,247%	- PT Pertamina Trans Kontinental: 99.753% - PT Pertamina Marine Solutions: 0.247%
	Kegiatan Usaha Business Activities	- Badan usaha pelabuhan meliputi <i>port operation, stevedoring, cargo doring, bunkering fuel & water</i> <i>Logistic service</i> meliputi fasilitas <i>warehouse & open storage</i> - Pilotage service and port management	- Port business entities include port operation, stevedoring, cargo doring, bunkering fuel & water - Logistic service includes warehouse & open storage - Pilotage service and port management
	Alamat Kantor Pusat Head Office Address	Jl. Raya Pelabuhan, Kabil Batam 29467 Kepulauan Riau, Indonesia	Jl. Raya Pelabuhan, Kabil Batam 29467 Kepulauan Riau, Indonesia
	Website	www.pertamina-ppl.com	www.pertamina-ppl.com
	Email	marketing.ppl@pertamina.com	marketing.ppl@pertamina.com
	Telepon Telephone	+62778 711 543, 711 126	+62778 711 543, 711 126
	Faksimili Facsimile	+62778 711 842	+62778 711 842
	Jumlah Aset Total Assets	Rp712.454.144	Rp712,454,144
	Dewan Komisaris (Per 31 Desember 2023) Board of Commissioners (As of December 31, 2023)	Bayu Dwi Anggono	Bayu Dwi Anggono
	Direksi (Per 31 Desember 2023) Board of Directors (As of December 31, 2023)	Albertus Anto Budi Santosa	Albertus Anto Budi Santosa

	Nama Perusahaan Company Name	PT Pertamina Marine Engineering	
	Tanggal Pendirian Date of Establishment	6 November 1991	November 6, 1991
	Dasar Hukum Pendirian Legal Basis of Establishment	Akta pendirian No. 62 tanggal 6 November 1991, dibuat di hadapan Sinta Susikto, S.H., Notaris di Jakarta	Deed of establishment No. 62 dated November 6, 1991, passed before Sinta Susikto, S.H., Notary in Jakarta
	Status Badan Hukum Legal Entity Status	Perseroan Terbatas ("PT"); Penanaman Modal Dalam Negeri ("PMDN")	Limited Liability Company ("PT"); Domestic Investment ("PMDN")
	Kepemilikan Saham Share Ownership	- PT Pertamina Trans Kontinental: 99,167% - PT Pertamina Energy Terminal: 0,833%	- PT Pertamina Trans Kontinental: 99.167% - PT Pertamina Energy Terminal: 0.833%
	Kegiatan Usaha Business Activities	<i>Engineering Procurement, Construction & Diversifikasi Usaha, Pengerukan & Reklamasi, Pekerjaan Bawah Air.</i>	Engineering Procurement, Construction & Business Diversification, Dredging & Reclamation, Underwater Works.

	Alamat Kantor Pusat Head Office Address	Gedung PT Pertamina Trans Kontinental Area Logistik Pertamina Jl Yos Sudarso, Sunter, Tanjung Priok Jakarta Utara 14350, Indonesia	PT Pertamina Trans Kontinental Building Pertamina Logistics Area Jl Yos Sudarso, Sunter, Tanjung Priok North Jakarta 14350, Indonesia
	Website	www.pertamina-pme.com	www.pertamina-pme.com
	Email	headoffice@pertamina-me.com	headoffice@pertamina-me.com
	Telepon Telephone	+6221 2961 5165	+6221 2961 5165
	Faksimili Facsimile	+6221 2961 5166	+6221 2961 5166
	Jumlah Aset Total Assets	Rp298.082.330	Rp298.082.330
	Dewan Komisaris (Per 31 Desember 2023) Board of Commissioners (As of December 31, 2023)	Tafkir	Tafkir
	Direksi (Per 31 Desember 2023) Board of Directors (As of December 31, 2023)	Yada Prawira Ganta	Yada Prawira Ganta

	Nama Perusahaan Company Name	PT Pertamina Marine Solutions	
	Tanggal Pendirian Date of Establishment	6 November 1991	November 6, 1991
	Dasar Hukum Pendirian Legal Basis of Establishment	Akta pendirian No. 20 tanggal 5 Juni 1987, dibuat di hadapan Notaris Yudo Paripurno, S.H., dengan nama awal "PT Peteka Karya Samudera" dan diubah berdasarkan risalah rapat yang telah diaktakan dengan No. 68 pada 21 Januari 1988 menjadi "PT Peteka Karya Gapura"	Deed of Establishment No. 20 dated June 5, 1987, passed before Notary Yudo Paripurno, S.H., with the initial name "PT Peteka Karya Samudera" and had its name altered based on the minutes of meeting notarized in the Deed No. 68 dated January 21, 1988, to become "PT Peteka Karya Gapura"
	Status Badan Hukum Legal Entity Status	Perseroan Terbatas ("PT"); Penanaman Modal Dalam Negeri ("PMDN")	Limited Liability Company ("PT"); Domestic Investment ("PMDN")
	Kepemilikan Saham Share Ownership	- PT Pertamina Trans Kontinental: 99,998% - PT Pertamina Marine Engineering: 0,002%	- PT Pertamina Trans Kontinental: 99.998% - PT Pertamina Marine Engineering: 0.002%
	Kegiatan Usaha Business Activities	Jasa Angkutan, <i>Ship Management, Crewing</i> , Jasa Penyediaan Tenaga Kerja, Jasa Perdagangan dan Kegiatan Usaha yang terkait dan/atau menunjang kegiatan usaha di bidang Jasa Pelayaran, Jasa Angkutan dan Jasa Logistik.	Transportation Services, Ship Management, Crewing, Manpower Supply Services, Trade Services, and Business Activities relevant to and/or supporting the activities in the Shipping Services, Transportation Services, and Logistics Services sectors.
	Alamat Kantor Pusat Head Office Address	Gedung PT Pertamina Trans Kontinental Jl. Yos Sudarso No. 32 - 34, Tj. Priok, Jakarta Utara 14350	PT Pertamina Trans Kontinental's Building Jl. Yos Sudarso No. 32 - 34, Tj. Priok, North Jakarta 14350
	Website	www.pertamina-pmsol.com	www.pertamina-pmsol.com
	Email	pmsol.pusat@pertamina-ms.com	pmsol.pusat@pertamina-ms.com
	Telepon Telephone	+6221 6530 7030	+6221 6530 7030
	Faksimili Facsimile	+6221 651 0030	+6221 651 0030
	Jumlah Aset Total Assets	Rp315.738.540	Rp315,738,540
	Dewan Komisaris (Per 31 Desember 2023) Board of Commissioners (As of December 31, 2023)	Eka Candra Dinata	Eka Candra Dinata
	Direksi (Per 31 Desember 2023) Board of Directors (As of December 31, 2023)	Subagjo Hari Moeljanto	Subagjo Hari Moeljanto

Perusahaan Patungan (*Joint Venture*)

Joint Venture

	Nama Perusahaan Company Name	Trans Yeong Maritime	
	Tanggal Pendirian Date of Establishment	6 November 1991	November 6, 1991
	Dasar Hukum Pendirian Legal Basis of Establishment	Akta Pendirian No. 41 tanggal 16 September 2014, dibuat di hadapan Dewantari Handayani, S.H., MPA, Notaris di Jakarta	Deed of Establishment No. 41 dated September 16, 2014, passed before Dewantari Handayani, S.H., MPA., Notary in Jakarta
	Status Badan Hukum Legal Entity Status	Perseroan Terbatas ("PT"); Penanaman Modal Asing ("PMA")	Limited Liability Company ("PT"); Foreign Investment ("PMA")
	Kepemilikan Saham Share Ownership	- PT Pertamina Trans Kontinental: 51,00% - Tong Yeong Tug, Co. Ltd: 49,00%%	- PT Pertamina Trans Kontinental: 51.00% - Tong Yeong Tug, Co. Ltd: 49.00%%
	Kegiatan Usaha Business Activities	Jasa pelayanan kepelabuhan laut.	Sea port services.
	Alamat Kantor Pusat Head Office Address	Jl. Yos Sudarso Kav. 205, Sunter, Tj. Priok, Jakarta Utara	Jl. Yos Sudarso Kav. 205, Sunter, Tj. Priok, North Jakarta
	Website	www.tym-shipping.com	www.tym-shipping.com
	Email	tymho@tym-shipping.com	tymho@tym-shipping.com
	Telepon Telephone	+6221 6530 7032	+6221 6530 7032
	Faksimili Facsimile	+6221 651 6375	+6221 651 6375
	Jumlah Aset Total Assets	Rp296.073.610.492	Rp296.073.610.492
	Dewan Komisaris (Per 31 Desember 2023) Board of Commissioners (As of December 31, 2023)	- Djohardi Angga Kusumah - Oky Karyanto	- Djohardi Angga Kusumah - Oky Karyanto
	Direksi (Per 31 Desember 2023) Board of Directors (As of December 31, 2023)	- Irwan Dwi Aprianto - Ahmad Kudus	- Irwan Dwi Aprianto - Ahmad Kudus

Ringkasan Informasi Kinerja Keuangan pada Entitas Anak Perusahaan, Perusahaan Patungan dan Afiliasi

Summary of Financial Performance Information on Subsidiaries, Joint Ventures, and Affiliates

(dalam Rp juta) (In Million Rupiah)

Nama Perusahaan Company Name	Total Aset Total Assets		Liabilitas Liabilities		Ekuitas Equity		Pendapatan Revenue		Laba Bersih Net Profit	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
PT Trans Yeong Maritime	278.418	296.073	85.921	124.294	192.497	171.779	163.193	141.449	60.626	50.001
PT Pertamina Marine Engineering	297.558	298.082	139.349	154.814	158.208	143.268	392.121	380.429	14.956	31.212
PT Pertamina Port and Logistics	740.454	712.453	336.235	555.394	404.217	157.059	945.868	664.874	249.419	101.399
PT Pertamina Marine Solutions	484.761	315.738	188.545	125.569	296.216	190.169	1.374.438	1.122.810	58.444	44.265

Informasi Komposisi Pemegang Saham

Information on Shareholders Composition

Struktur Pemegang Saham Perusahaan per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

The Company's Shareholders Structure as of December 31, 2023, is as follows:

No	Komposisi Pemegang Saham Shareholders Composition	Jumlah Saham (lembar) Total Shares (share)	Komposisi % Composition %
Kepemilikan Saham di atas 5% Share Ownership above 5%			
1.	PT Pertamina International Shipping		
	Saham Seri A Series A Shares	1.234.737	99,933
	Saham Seri B Series B Shares	819	0,066
Kepemilikan Saham di bawah 5% Share Ownership below 5%			
1.	PT Pertamina Pedeve Indonesia (Saham Seri A) (Series A Shares)	10	0,001

Jumlah Pemegang Saham dan Persentase Kepemilikan, Berdasarkan Klasifikasi

Number of Shareholders and Percentage of Ownership, by Classification

Jumlah pemegang saham dan persentase kepemilikan, berdasarkan klasifikasi

Number of shareholders and percentage of ownership, by classification

Kepemilikan Saham Share Ownership	Jumlah Saham Number of Shares
Kepemilikan institusi lokal Local institutional ownership	1.235.566
Kepemilikan individu lokal Local individual ownership	Nihil Nil
Kepemilikan institusi asing Foreign institutional ownership	Nihil Nil
Kepemilikan individu lokal Foreign individual ownership	Nihil Nil

Informasi Pemegang Saham Utama dan Pengendali

Information on Major and Controlling Shareholders

PT Pertamina (Persero) merupakan entitas induk PTK yang memiliki 100,00% saham PTK, baik langsung maupun tidak langsung. Sebagai pemilik saham penuh atau 100,00% dari PT Pertamina (Persero), Pemerintah Republik Indonesia bertindak selaku entitas pemilik akhir PTK.

PT Pertamina (Persero) is the parent entity of PTK which owns 100.00% of PTK shares. As a full shareholder or 100.00% of PT Pertamina (Persero), the Government of the Republic of Indonesia acts as the ultimate owner of PTK.

Informasi Kepemilikan Saham Perusahaan oleh Dewan Komisaris dan Direksi

Information on Company Share Ownership by the Board of Commissioners and Board of Directors

Hingga akhir Desember 2023, tidak terdapat Dewan Komisaris dan Direksi yang memiliki saham PTK maupun di Perusahaan Lain.

Until the end of December 2023, none of the Board of Commissioners and Board of Directors owned shares in PTK or Other Companies.

Kelompok Pemegang Saham Masyarakat dengan Kepemilikan Kurang dari 5%

Public Shareholder Group with Less than 5% Ownership

Hingga akhir Desember 2023, PTK belum mendaftarkan sahamnya pada Bursa Efek Indonesia sehingga tidak memiliki Pemegang Saham masyarakat dengan kepemilikan saham masing-masing kurang dari 5%.

Until the end of December 2023, PTK has not listed its shares on the Indonesia Stock Exchange. Therefore, there are no public Shareholders with a shareholding of less than 5% each.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

Capital Market Supporting Institution and Profession



Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Public Accountant and Accounting Firm

Kantor Akuntan Publik (KAP) Public Accounting Firm (PAF)	Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (PricewaterhouseCoopers) Tanda Terdaftar: KEP-241/KM.1/2015 Registered Number: KEP-241/KM.1/2015
Akuntan Publik (AP) Public Accountant (AP)	Daniel Kohar Registrasi: AP.1130 Registration: AP.1130
Alamat Kantor Akuntan Publik (KAP) Public Accounting Firm (PAF) Address	WTC 3 Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920 Tel: +62 21 50992901/31192901 Faks: +62 21 52905555/52905050 Situs Web: www.pwc.com/id
Jasa yang Diberikan Services Provided	- Jasa Audit: Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2023 - Jasa Non Audit: - - Audit Services: Audit of the Consolidated Financial Statements for the 2023 Financial Year - Non-Audit Services: -

Kustodian Custodian

Nama Name	PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
Alamat Address	Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1, Lt. 5 Jl. Jend. Sudirman kav. 52-53, Jakarta 12190 ☎ +62 21 515 2855 📠 +62 21 5299 1199 ✉ helpdesk@ksei.co.id 🌐 www.ksei.co.id

Notaris Notary

Nama Name	Miryany Usman, S.H.,
Alamat Address	Jl. Wijaya I No.9AB, RT.6/RW.4, Petogogan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12170
Nama Name	Ivan Lazuardi Suwana, S.H., M.Kn
Alamat Address	Grand Slipi Tower Lantai 16 Unit B1, Jl. S. Parman Kav 22-24 Jakarta Barat
Nama Name	Lenny Janis Ishak, S.H.
Alamat Address	Jl. Hang Lekir 9 No.1, RT.5/RW.6, Gunung, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12120

Notaris Notary	
Nama Name	Fernandia Fabiola, S.H., M.Kn
Alamat Address	Jl. Letda Natsir, Bojong Kulur, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
Nama Name	Dewantari Handayani, S.H., MPA
Alamat Address	Jl. Ciputat Raya No.3, RT.8/RW.6, Pd. Pinang, Kec. Kby. Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12310
Nama Name	Fessy Farizqoh Alwi, S.H., M.Kn
Alamat Address	Jl. Wijaya I No.9AB, RT.6/RW.4, Petogogan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12170
Nama Name	Miryany Usman, S.H.,
Alamat Address	DISKURSUS CENTER OFFICE Jl. Pejaten Raya No.Kav. 7, RT.007/RW.5, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Kota Adm. Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12510

Konsultan Hukum Legal Consultant	
Nama Name	Verry Sitorus & Partner
Alamat Address	Gedung KOPI, lantai 1, Jl. R.P Soeroso No.20, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat 10330
Nama Name	Law Firm Indra, Firman & Associates
Alamat Address	Jl. Tebet Barat Dalam VII No.8, 12830.
Nama Name	Law Offices Otto Hasibuan & Associates.
Alamat Address	Komplek Duta Merlin, Jl. Gajah Mada No.3 - 5 Blok B - 30, RT.2/RW.8, Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10130

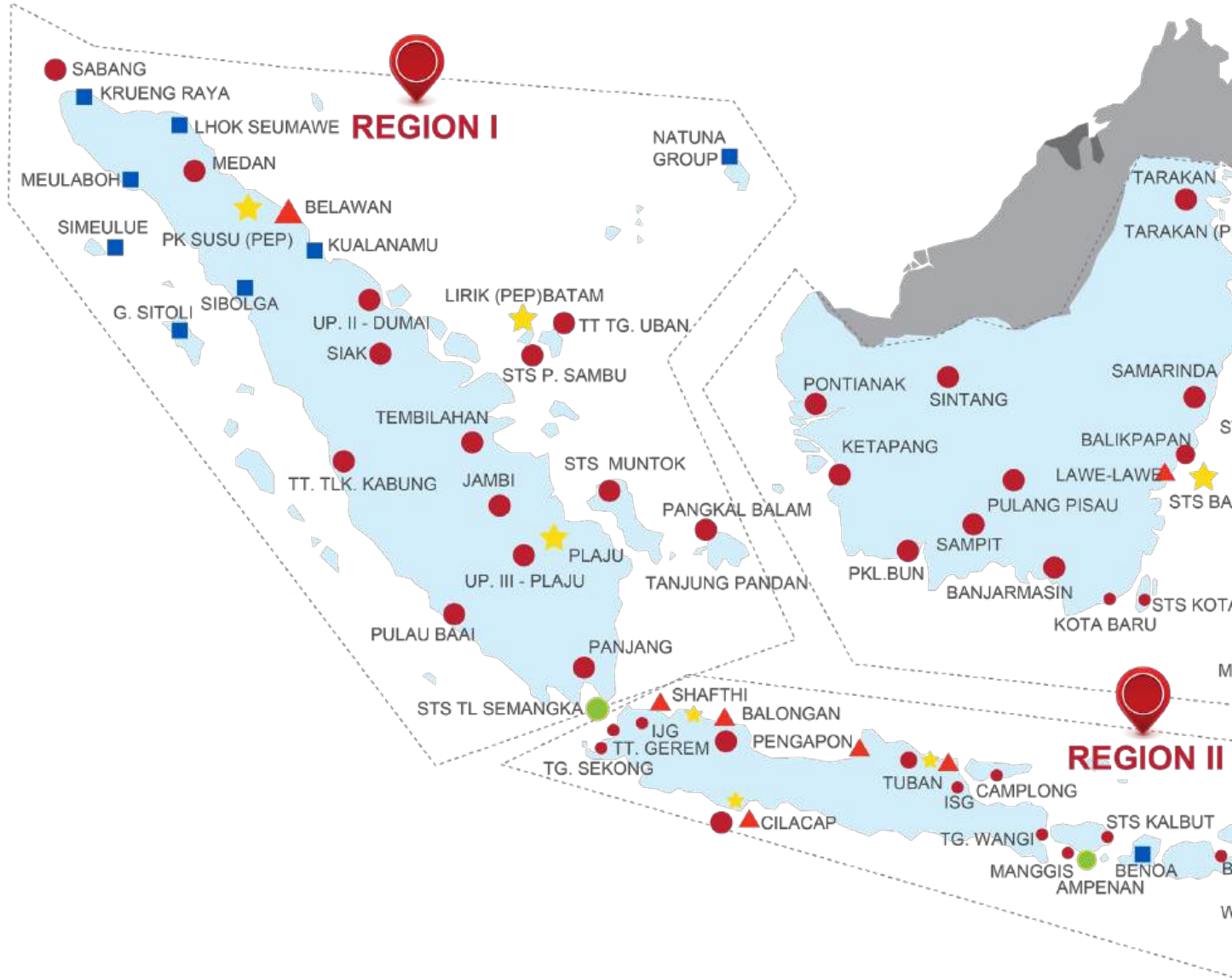
Jasa Penilai Appraiser	
Nama Name	Toto Suharto & Rekan Izin Lisensi: No. 2.09.0055 License Permit: No. 2.09.0055
Alamat Address	Komplek Rukan Ginza Green Village Blok A, No.19 Jl. KH. Hasyim Ashari, Kel. Neroktog, Kec. Pinang Kota Tangerang, Banten 15145 Telp./Faks.: (021) 55712316 Email: tnr.tangerang@tnr.co.id

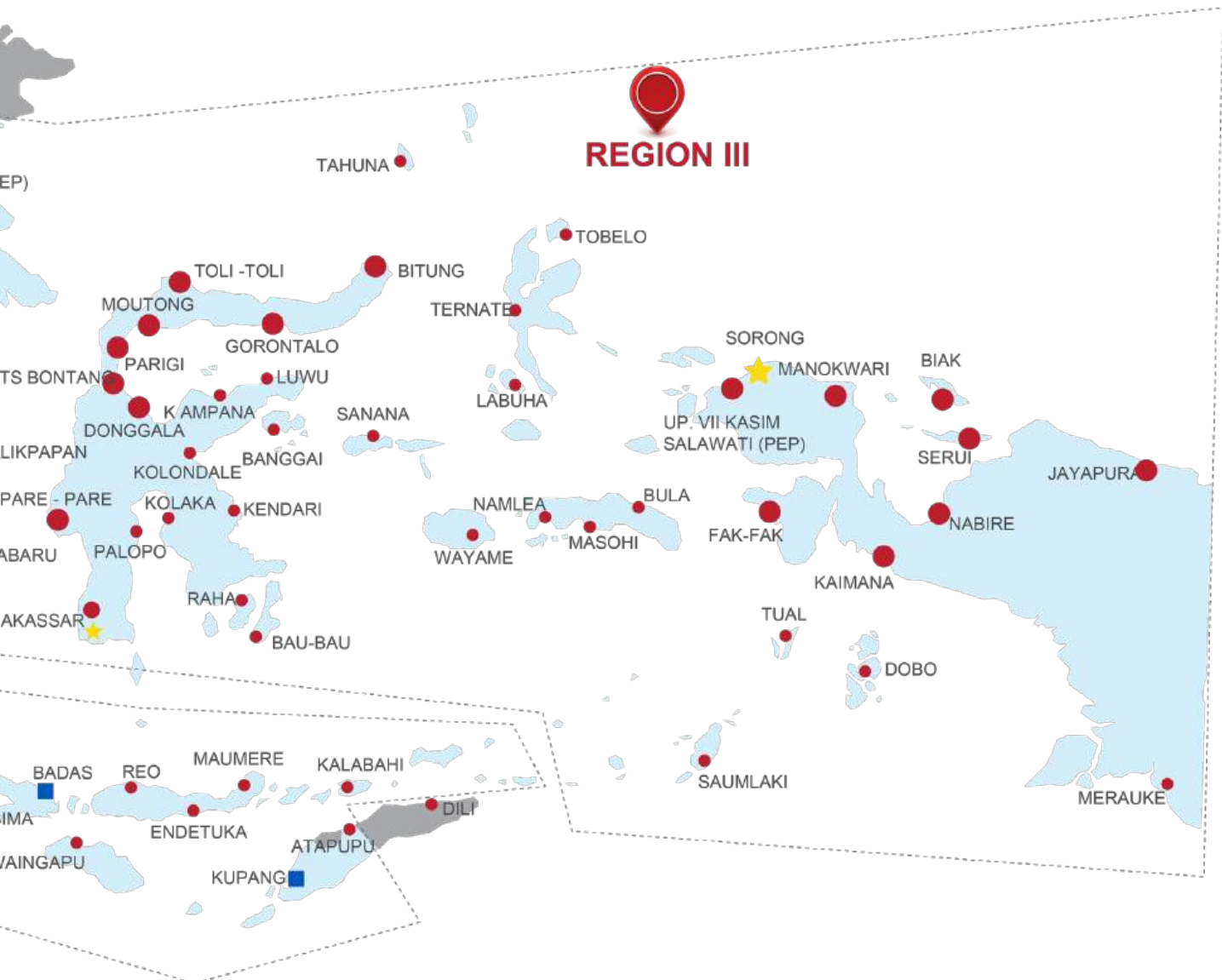
Keanggotaan Asosiasi Membership in Associations

Nama Organisasi Name of Organization	Lingkup Scope	Status
Indonesian National Shipowner Association (INSA)	Nasional National	Anggota Member
Kamar Dagang Indonesia Indonesian Chamber of Commerce	Nasional National	Anggota Member

Jaringan Wilayah Operasi

Operational Area Network





Kantor Marketing Business & Operation Region

Kantor Marketing Business & Operation Region

REGION I

Kantor Pertamina MOR I

Jl. Yos Sudarso No. 8-10, Medan

REGION II

Gedung Pertamina MOR V

Jl. Jagir Wonokromo No. 88, Surabaya

REGION III

PT Pertamina Trans Kontinental (Ex. Kantor Pertamina Patraniaga)

(Ex. Kantor Pertamina Patraniaga)
Jl. Longikis No.119
Kel. Mekar Sari, Kec. Balikpapan Tengah,
Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76123

Kantor Marketing Area

Kantor Marketing Area

Balikpapan

Jl. Yos Sudarso No.1,
Komp. Pertamina PO BOX 432 Balikpapan
☎ (0542) 734693, 515663
☎ (0542) 423766
✉ Cabang.Balikpapan.PTK@pertamina.com

Plaju-Palembang

Jl. Beringin No. 70,
Plaju Palembang, Sumatra Selatan
☎ (0711) 595473, 595376, 595475, 596474
☎ (0711) 542367, 542377
✉ Cabang.Plaju.PTK@pertamina.com

Makassar

Jl. Ahmad Saleh No. 4,
Kel. Losari, Kec. Ujung Pandang, Makasar, Sulawesi Selatan
☎ (0411)873683
☎ (0411) 873683
✉ Cabang.Makassar.PTK@pertamina.com

Belawan

Jl. Minyak No. 1, Lingkungan I,
Kel. Belawan I, Kec. Medan, Belawan, Medan
☎ (061) 6943464
☎ (061) 694241-45
✉ Cabang.Belawan.PTK@pertamina.com

Surabaya

Jl. Perak Timur 260, Perak, Surabaya
☎ (031) 3282057,3299112
☎ (031) 3299113
✉ Cabang.Surabaya.PTK@pertamina.com

Dumai

Jl. Sultan Syarif Kasim No. 262,
Dumai, Riau 28811
☎ (0765) 443981,38370
☎ (0765) 35173
✉ Cabang.Dumai.PTK@pertamina.com

Tanjung Priok

Gedung PT Pertamina Trans Kontinental
Area Logistic Pertamina
Jl. Yos Sudarso, Sunter Tanjung Priok, Jakarta Utara
☎ (021) 65307028, 65307026, 65307029
☎ (021) 65307035
✉ Cabang.Priok.PTK@pertamina.com

Cilacap

Jl. Tongkol No. 20, Cilacap Selatan,
Cilacap, Jawa Tengah 53211
☎ (0282) 521852
☎ (0282) 521852
✉ Cabang.Cilacap.PTK@pertamina.com

Batam

Jl. Raya Pelabuhan Kabil, Batam 29435
☎ (0778) 711741 - 42
☎ (0778) 711263, 711136
✉ Cabang.Batam.PTK@pertamina.com

Sorong-Papua

Jl. Yos Sudarso No. 78,
Komperta Lido Sorong, Papua
☎ (0951) 322294, 329502, 329503
☎ (0951) 322729
✉ Cabang.Sorong.PTK@pertamina.com

Port Area

Port Area

Port Area Balikpapan

Port Area Balikpapan

Kota Baru

Jl. Beringin No. 70,
Gedung PT Pertamina (Persero) UPMS V
Jl. Pertamina RT. 21,
Ds. Semayap, Kec. Pulau Laut Utara,
Kab. Kotabaru, Kalimantan Selatan
☎ (0518) 23256

Kuala Semboja

Kuala Semboja RT. 003
Kel. Senipah, Kec. Samboja,
Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur
☎ (0542) 535137

Samarinda

Jl. Dr. Sutomo 40,
Kel. Sanga-Sanga Dalam, Kec. Sanga-Sanga,
Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur
☎ (0541) 671300
☎ (0541) 671487

Tanjung Santan

Komp. Chevron Santan Terminal RT. XI,
Desa Semangko, Kec. Marang Kayu,
Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur
☎ (0542) 548275
☎ (0542) 548278

Tarakan

Jl. Kesuma Bangsa RT. 04/RW. 03,
Kel. Lungkas Ujung, Kec. Tarakan Timur,
Tarakan, Kalimantan Timur

Port Area Batam

Port Area Batam

Pulau Sambu

Pertamina Pulau Sambu RT. 01/RW. 06,
Kel. Tanjung Sari, Kec. Belakang Padang,
Batam

Tarempa

Ds. Payamaran RT. 07/RW. 01,
Kec. Palmatak, Kab. Kepri Anabas,
Kep. Riau

Tanjung Uban

Jl. Hang Tuah No.24 RT. 001/RW. 007,
Kel. Tanjung Uban, Kec. Bintan Utara,
Kab. Bintan, Kep. Riau

Port Area Belawan

Port Area Belawan

Arun Lhokseumawe

2nd Floor Marine Offline
PT. Arun NGL Blang Lancang,
Lhokseumawe NAD
☎ (0645) 654248
☎ (0645) 654165

Port Area Dumai

Port Area Dumai

Sei Pakning

Gd. Marine Jasra Pertamina (Persero) -
UPMS II
Jl. Jend. Sudirman, Sei Pakning 28761
☎ (0766) 91112
☎ (0766) 91112

Port Area Cilacap

Port Area Cilacap

Semarang

Mangunharjo RT. 002/RW. 003,
Kel. Mangunharjo, Kec. Tugu,
Semarang

Port Area Sorong

Port Area Sorong

Bintuni

Bintuni, Babo, Irian Jaya Barat

Bula - Seram Timur

Kantor Wilayah Kerja Pelabuhan Bula
Jl. Lumba-Lumba RT. 002/RW. 001,
Kel. Bula, Seram Timur

Wayame

Jl. Ir. M Putuhena RT. 006/RW. 003,
Ds. Wayame, Kec. Teluk Ambon,
Ambon, Maluku
☎ (0911) 310087
☎ (0911) 346155



Port Area Tanjung Priok

Port Area Tanjung Priok

Merak

Jl. Pulorida Kav. M 90-92,
Tanjung Sekong, Merak, Banten
☎ (0254) 571617, 571178
📠 (0254) 571617

Balangan

Jl. Kerang A8, Komplek Pertamina EP,
Balangan, Indramayu
☎ (0234) 4288888

Cirebon

Jl. Sawo 1 C No. 46A,
Komperta, Klayan, Cirebon
☎ (0231) 211691
📠 (0231) 211691

Port Area Surabaya

Port Area Surabaya

Tuban

Jl. Tanjung Awar-Awar No. 10, RT. 02/RW.
01, Dusun Boro, Ds. Tasik Harjo, Kec. Jenu,
Tuban

Gresik

Jl. Yos Sudarso No. 01, RT. 002/RW. 004,
Kel. Bedilan, Gresik, Jawa Timur
☎ (031) 3282057

Telaga Biru

Jl. Raya Pelabuhan No. 60,
Bangkalan, Madura
☎ (031) 3071229

Situbondo

Jl. Raya Pelabuhan No. 1,
Kalbut, Situbondo
☎ (0338) 675141

Tanjung Wangi

Jl. Raya Situbondo No. 8A,
Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi
☎ (031) 3282057
☎ (031) 3299113

Port Area Plaju-Palembang

Port Area Plaju-Palembang

Jambi

Jl. Yos Sudarso No. 36, Kasang, Jambi
☎ (0741) 31623
☎ (0741) 7552186



Kronologis Pencatatan Saham

Chronology of Share Listing

Sampai dengan 31 Desember 2023, PTK tidak menerbitkan saham sehingga tidak terdapat informasi terkait tahun penerbitan saham, jumlah saham, nilai nominal saham, dan harga penawaran saham untuk masing-masing tindakan korporasi (*corporate action*), jumlah saham tercatat setelah masing-masing tindakan korporasi (*corporate action*), dan nama bursa dimana saham perusahaan dicatatkan.

Until December 31, 2023, PTK did not issue any shares. Therefore, there is no information regarding the year of share issuance, number of shares, nominal value of shares, and share offering price for each corporate action, number of shares listed after each corporate action, and the name of the exchange where the Company's shares are listed.

Kronologis Pencatatan Efek Lainnya

Chronology of Other Securities Listing

Sampai dengan 31 Desember 2023, PTK tidak menerbitkan efek sehingga tidak terdapat informasi terkait nama efek, tahun penerbitan efek, tingkat bunga/imbalance efek lainnya, dan tanggal jatuh tempo efek, nilai penawaran efek, nama bursa dimana efek lainnya dicatatkan, dan peringkat efek.

As of December 31, 2023, PTK has not issued any securities. Therefore, there is no information regarding the name of the securities, the year of issuance of the securities, the interest rate/other securities yield, the maturity date of the securities, the offering value of the securities, the name of the exchange where the other securities are listed, and the rating of the securities.

Informasi Website Perusahaan

Information on Company Website

PTK menyediakan informasi bagi publik yang senantiasa dimutakhirkan secara berkala melalui sejumlah media diantaranya *website* Perusahaan. Situs *website* PTK dapat diakses di <https://www.pertamina-ptk.com>. Informasi dan data PTK yang dipublikasikan di *website* Perusahaan mengacu pada Surat Keputusan Direksi Tentang Kebijakan Pengelolaan Informasi, Data, dan Dokumen.

Website PTK dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat luas. Informasi pada *website* PTK sebagian besar tersedia dalam Bahasa Indonesia dan beberapa menggunakan Bahasa Inggris antara lain mencakup:

1. **Tentang PTK** terdiri dari informasi mengenai; Gambaran Perusahaan; Visi, Misi & Nilai; Sejarah; Tata Kelola Perusahaan; Manajemen Puncak;
2. **Keberlanjutan** terdiri dari informasi mengenai *Health, Safety, Security and Environment*; Tanggung Jawab Sosial Lingkungan;
3. **Bisnis PTK** terdiri dari informasi mengenai Kompetensi Inti; Aktivitas Bisnis; Wilayah Operasi; Armada;
4. **Stakeholder** terdiri dari informasi mengenai Laporan Tahunan; Laporan Keberlanjutan; Laporan Keuangan; Penghargaan & Sertifikasi;
5. **Berita & Media** terdiri dari informasi Rilis Berita; Galeri;
6. **Kontak** terdiri dari informasi mengenai Kantor Pusat; Region; Anak Perusahaan; Pertamina Clean;

Informasi tambahan terkait *website* PTK dapat dilihat di bagian Akses Informasi dan Data Perusahaan pada Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan Ini.

PTK provides information to the public that is updated regularly through several media, including the Company's website. PTK's website can be accessed at <https://www.pertamina-ptk.com>. PTK information and data published on the Company's website refers to the Decree of the Board of Directors regarding Information, Data, and Document Management Policy.

PTK's website can be easily accessed by the public. Information on the PTK website is mostly available in Bahasa Indonesia and some in English, including:

1. **About PTK** consists of information on Company Overview; Vision, Mission & Values; History; Corporate governance; Top management;
2. **Sustainability** consists of information on Health, Safety, Security and Environment; Social and Environmental Responsibility;
3. **PTK Business** consists of information on Core Competencies; Business Activities; Operational Area; Fleet;
4. **Stakeholders** consists of information on Annual report; Sustainability Report; Financial statements; Awards & Certifications;
5. **News & Media** consists of information on News Releases; Gallery;
6. **Contact** consists of information on Head Office; Regions; Subsidiaries & Joint Venture Companies; Pertamina Clean.

Additional information regarding PTK's website can be seen in the Access to Corporate Information and Data section in the Corporate Governance Chapter in this Annual Report.







Tinjauan Pendukung Bisnis

Business Support Overview

Sumber Daya Manusia

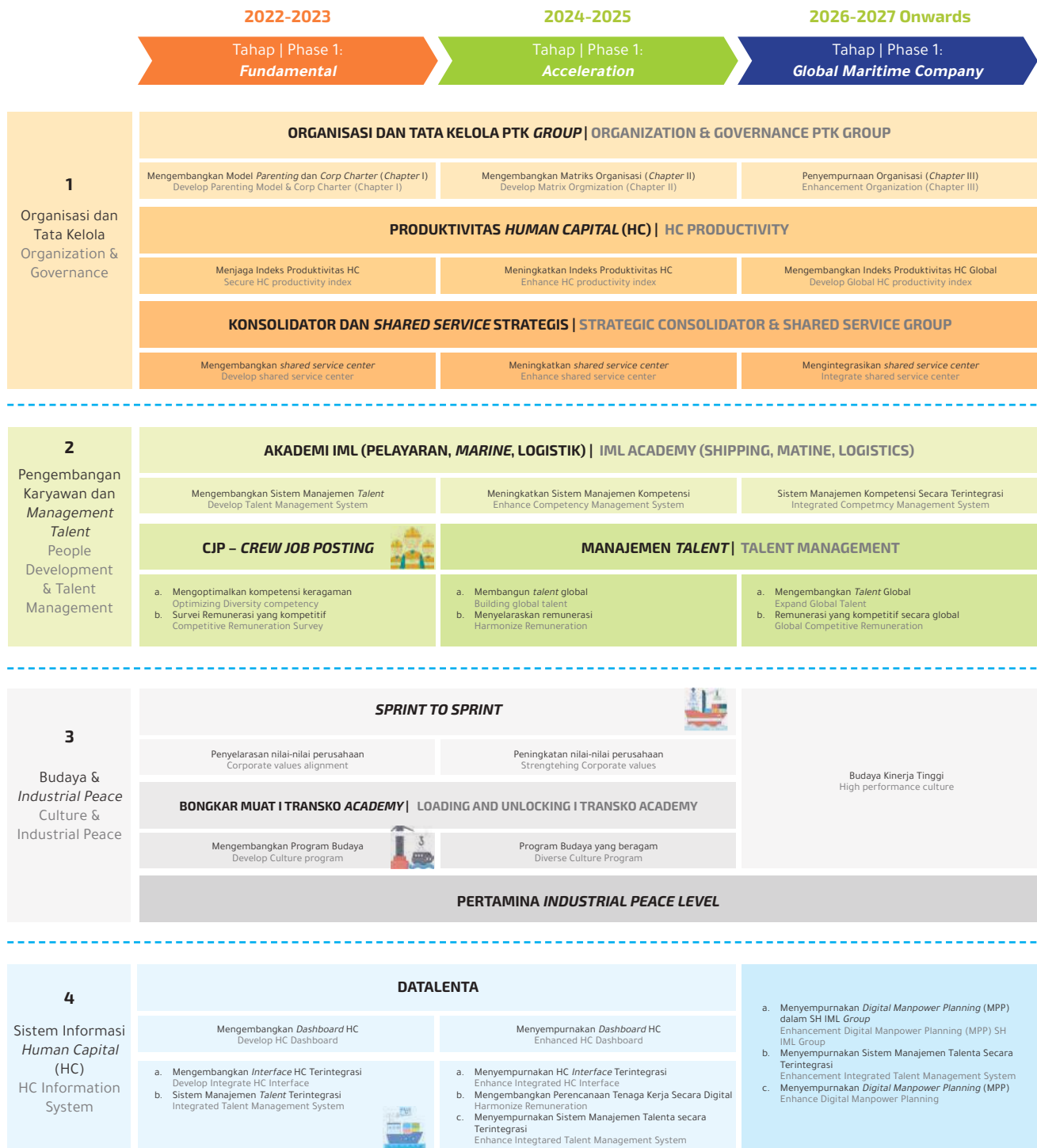
Human Resources

Peta Jalan Pengelolaan SDM

HR Development Road Map

Peta jalan (*road map*) pengembangan SDM mengacu kepada visi PTK 2026 menjadi perusahaan global yang kompetitif pada lini bisnisnya. Secara bertahap, berikut fokus Fungsi Human Capital secara bertahap.

HR development road map refers to PTK 2026 vision of becoming a competitive global company in its business lines. The following is the focus of the Human Capital Function in stages:



2022-2023: Strengthening Fundamentals

2022-2023: Strengthening Fundamentals

Fokus Fungsi Human Capital dalam melakukan penetapan organisasi sesuai dengan klasterisasi bisnis PTK Group beserta konsekuensi variabel kelengkapannya (matriks RASCI dan uraian jabatan) akan menjadi perhatian pada tahun 2022 dan 2023. Penyelarasan kebijakan remunerasi untuk memenuhi sisi *compliance* standar Pertamina dan penguatan matriks kompetensi akan dilanjutkan agar sesuai dengan kebutuhan dan tantangan bisnis.

Peningkatan produktivitas melalui pendekatan kultur yang tepat akan didorong oleh pengembangan penerapan sistem pengelolaan SDM yang lebih baik. *Tool Human Capital Analytics* dan *Career Mapping* akan menjadi sentral perbaikan berkesinambungan yang sehubungan dengan *performance* organisasi dan pengelolaan talenta. Hal ini ditopang juga oleh kampanye intensif terkait kultur kolaboratif antar fungsi untuk mempertinggi resultan pencapaian perusahaan.

PTK had priorities in 2022 and 2023, including Human Capital function focus in determining the organization in line with PTK Group business clustering along with the consequences of its completeness variables (RASCI matrix and job descriptions). Alignment of remuneration policies to meet the compliance side of Pertamina standards and strengthening the competency matrix will continue so as to follow business needs and challenges.

Productivity improvement through the right cultural approach will be driven by the development of a better HR management system. Human Capital Analytics and Career Mapping tools will be central to continuous improvement in relation to organizational performance and talent management. This is also supported by an intensive campaign related to a collaborative culture between functions to increase resultant achievements of the Company.

2024-2025: Acceleration

2024-2025: Acceleration

Untuk mempersiapkan pekerja PTK dalam menghadapi perluasan bisnis perusahaan, akan dilakukan pengukuran kompetensi secara bertahap untuk dapat memantau tingkat kompetensi pekerja. Hasil *assessment* akan menjadi material penyesuaian matriks kompetensi. Melalui usaha penyempurnaan layanan berupa penguatan sistem operasional SDM, pemberdayaan *human capital tools*, serta menjadi *culture champion*, diharapkan manajemen Fungsi Human Capital dapat proaktif dalam memberikan *insight* dan solusi atas tantangan yang dihadapi perusahaan.

Melalui perkembangan inkremental pada tahun-tahun sebelumnya praktek SDM PTK diharapkan menjadi *center of excellence* sebagai pusat keunggulan pengelolaan SDM di SH IML maupun di Pertamina Group. Selaras dengan perkembangan dan rencana bisnis PTK, evaluasi struktur organisasi perusahaan akan kembali dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi.

In preparing PTK manpower to face the Company's business expansion, the Company is going to perform competency measurements in stages to be able to monitor employees competency levels. The assessment results will be used as material for adjusting the competency matrix. Through efforts to improve services in the form of strengthening HR operational systems, empowering human capital tools, and becoming a culture champion, it is hoped that Human Capital Function management can be proactive in providing insight and solutions to the challenges faced by the Company.

Through incremental developments in the previous years, PTK HR practices are expected to become a center of excellence for HR management at SH IML and at Pertamina Group. In line with PTK developments and business plans, the Company is once more going to evaluate the organizational structure to increase the organizational effectiveness and efficiency.

2026-2027 Onwards: Towards Global Maritime Company

2026-2027 Onwards: Towards Global Maritime Company

Kelincahan organisasi harus dapat mengimbangi laju bisnis perusahaan yang sedang dalam masa perluasan jangkauan bisnis. Fungsi Human Capital berencana akan melakukan *improvement* organisasi untuk mengatasi permasalahan yang muncul terkait hal ini. Sebagai perusahaan global, struktur remunerasi & *benefit* akan tetap dijaga kompetitif dan menjadi salah satu strategi penting dalam *employee retention*. Pembaharuan fundamental matriks kompetensi dan *career mapping* untuk ketahanan organisasi dalam tantangan global akan menjadi perhatian utama dalam menyambut tantangan bisnis global.

Organizational agility must be able to keep up with the business pace of a company which is currently in a period of expanding its business reach. Human Capital function plans to make organizational improvements to overcome the arising issues in this regard. As a global company, the remuneration & benefits structure will remain competitive and become an important strategy in employee retention. Fundamental renewal of competency matrices and career mapping for organizational resilience in global challenges will be a major concern in welcoming global business challenges.



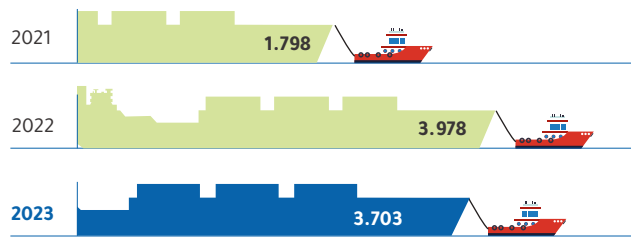
Profil dan Komposisi Pekerja

Employees Profile and Composition

Hingga 31 Desember 2023, jumlah pekerja PTK mencapai 3.703 orang, yaitu mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2022 sebanyak 3.978 orang. Hal tersebut terutama disebabkan oleh Pekerja (PWTT, PWT & TAD) pensiun dan *resign*/mengundurkan diri.

As of December 31, 2023, the number of PTK employees reached 3,703 persons, decreased compared to 3,978 persons in 2022. This is mainly caused by employees (PWTT, PWT & TAD) retiring and resigning.

Grafik Jumlah Pekerja (orang)
Graph of Employees Numbers (persons)



Informasi lebih lanjut mengenai komposisi pekerja telah disampaikan pada bagian Profil Perusahaan

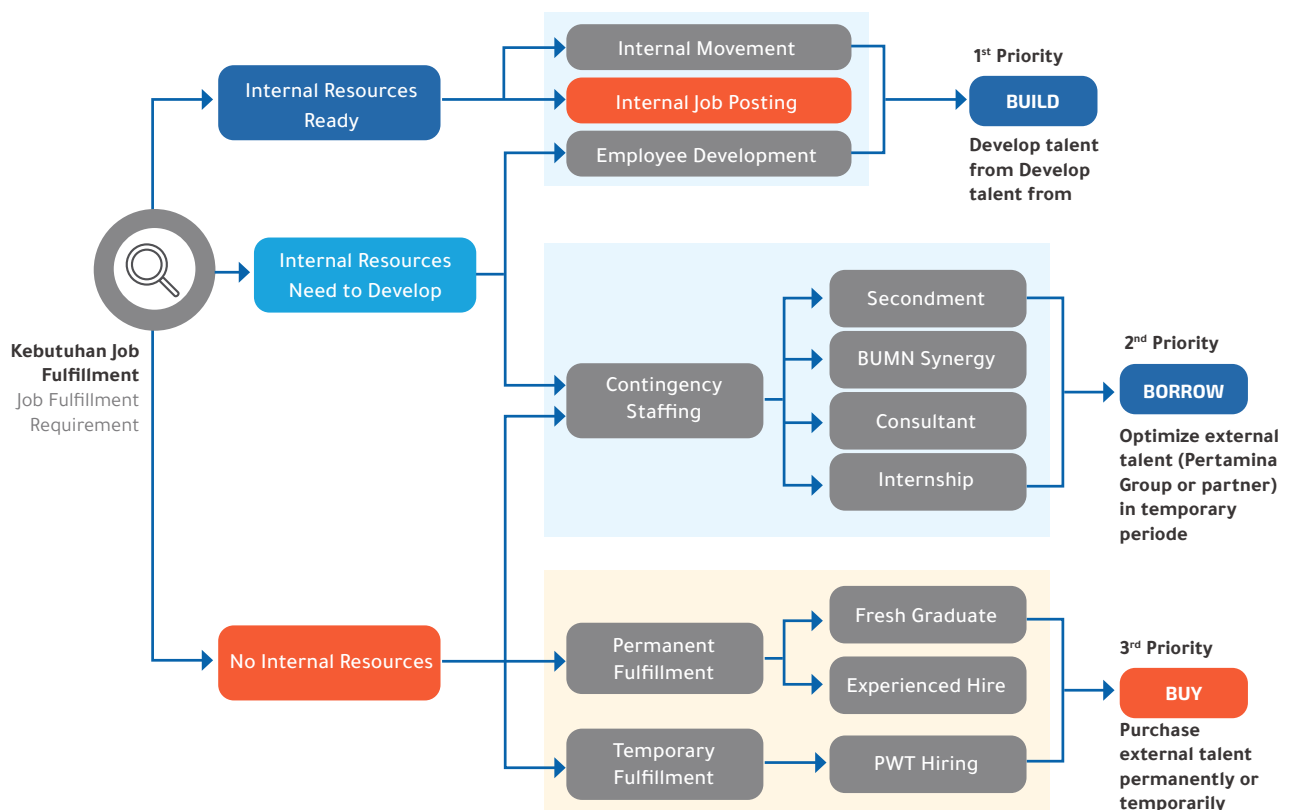
Further information regarding employee composition is available in the Company Profile section

Perencanaan Tenaga Kerja

Manpower Planning Strategy

Perencanaan tenaga kerja setiap tahunnya dievaluasi sesuai kebutuhan organisasi dan perkembangan bisnis perusahaan. Terdapat 3 (tiga) strategi pemenuhan tenaga kerja yang diterapkan. Pertama, melalui pengembangan *talent* dari internal organisasi (*build*); kedua, melalui mekanisme perbantuan baik dari lingkup Pertamina Group maupun BUMN lainnya (*borrow*); ketiga, melalui mekanisme rekrutmen pekerja waktu tidak tertentu (PWTT) baik secara *fresh graduate*, *experienced hire*, maupun rekrutmen pekerja waktu tertentu (PWT).

PTK evaluates manpower planning annually according to the organizational needs and business developments of the Company. There are 3 (three) manpower fulfillment strategies implemented. First, through talent development from within the organization (*build*); second, through assistance mechanisms from both the Pertamina Group and other SOE (*borrow*); third, through the recruitment mechanism for employees for a certain period of time (PWTT), whether fresh graduates, experienced hires, or recruitment of employees for a certain time (PWT).



Tingkat keterisian organisasi PTK Group pada tahun 2023 berada di angka 72%. *Vacancy rate* tahun 2023 berada di angka 28% yaitu masih di atas *optimal vacancy rate range* Pertamina yaitu di angka 11% - 15%. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam rangka penguatan organisasi untuk mendukung perubahan bisnis dan organisasi sesuai reklasterisasi bisnis serta reorganisasi, pada tahun 2023 PTK melakukan rekrutmen pekerja baru berstatus PWTT sebanyak 13 pekerja.

PTK Group organizational occupancy rate in 2023 was 72%. The vacancy rate in 2023 was 28%, those were still above Pertamina's optimal vacancy rate range, namely 11% - 15%. In this regard, in order to strengthen the organization to support business and organizational changes in accordance with business reclustering and reorganization, PTK recruited 13 new employees with PWTT status in 2023.

Tabel Jumlah Pekerja Baru
Table of Total New Employees

(orang, kecuali dinyatakan lain) (person, unless otherwise stated)

Keterangan Description	2023	2022	2021	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) 2022-2023	
				selisih difference	persentase percentage
Laki-laki Male	8	-	-	8	-
Perempuan Female	5	-	-	5	-
Jumlah Pekerja Total Employee	13	-	-	13	-

Tingkat Turnover Pekerja

Employee Turnover Rate

Tingkat *turnover* pekerja (dikarenakan *resignation*) pada tahun 2023 adalah sebesar 0,24% yaitu mengalami peningkatan persentase apabila dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 0,12%. *Turnover* pekerja yang terjadi pada tahun 2023 tidak berpengaruh pada kelancaran pelaksanaan operasional Perusahaan. Tingkat *turnover* ini telah diantisipasi melalui program *recruitment manpower planning* dan *crew talent mobility*.

The worker turnover rate (due to resignation) in 2023 is 0.24%, which is an increase in percentage when compared to 2022 of 0.12%. Employee turnover that occurred in 2023 did not affect the smooth operation of the Company. This turnover rate has been anticipated through the recruitment manpower planning program and crew talent mobility.

Tabel Jumlah Turnover Pekerja
Table of Total Employee Turnover

(orang, kecuali dinyatakan lain) (person, unless otherwise stated)

Keterangan Description	2023	2022	2021	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) 2022-2023	
				selisih difference	persentase percentage
Jumlah Pekerja Total Employee	3.703	3.978	1.798	(277)	(6,96)%
Pekerja Keluar Employee Exit	9	5	-	21	420,00%
Turnover Pekerja Employee Turnover	0,24%	0,12%	-	0,58%	

Program Pengembangan Kompetensi

Competency Development Program

Pemetaan Kebutuhan Pengembangan Kompetensi

Mapping Competency Development Needs

Pengembangan kompetensi untuk SDM Perusahaan ditetapkan dalam rangka memenuhi kebutuhan keterampilan tertentu, sesuai kompetensi yang diperlukan masing-masing pekerja. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, PTK memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh manajemen dan pekerja berdasarkan kebutuhan jenjang jabatannya. Berikut ini disajikan realisasi jumlah pengembangan kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.

The Company determines competency development for the Company's HR in order to meet certain skill needs, according to the competencies required by each employee. In implementing competency development, PTK provides equal opportunities to the entire management and employee based on the needs of their position levels. The following is the realization of the number of competency developments according to position level.

Tabel Realisasi Pelatihan Berdasarkan Jenjang Jabatan Tahun 2023

Table of Training Realization Based on Position Level in 2023

Uraian Description	Realisasi Pelatihan Training Realization
Eksekutif Executive	22
Manajer dan Setara Managers and Equivalents	106
Senior Analyst/Senior Officer dan Setara Senior Analyst/ Senior Officer and Equivalents	97
Analyst/Officer dan Setara Analyst/ Officer and Equivalents	46
Junior Analyst/Junior Officer dan Setara Junior Analyst/ Junior Officer and Equivalents	104

Jenis Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi

Types of Training and Competency Development

Secara berkesinambungan Perusahaan senantiasa meningkatkan kompetensi dan kapabilitas pekerja Perusahaan mewujudkannya dengan menyelenggarakan pelatihan bagi para pekerja. Perusahaan menyelenggarakan 2 (dua) jenis program pengembangan pekerja yang bertujuan untuk memastikan ketersediaan pekerja yang memiliki kompetensi, kemampuan serta *know-how* untuk menampilkan kinerja yang mendukung pencapaian strategi perusahaan.

1. Program Pengembangan General (General Program).

Program ini ditujukan kepada seluruh Pekerja PTK dan berfokus pada pengembangan kompetensi dan keahlian pekerja guna memenuhi gap kompetensi pekerja di jabatannya saat ini.

2. Program Pengembangan Talent (Talent Development).

Program ini ditujukan kepada para *Talent/Successor* dan pekerja baru PTK dengan tujuan:

- Mengembangkan dan meningkatkan kompetensi pada *talent/successor* dalam rangka menyiapkan pada *talent/successor* agar dapat menampilkan kinerja yang optimal pada jabatan yang lebih tinggi (*Talent Readiness*).
- Mengembangkan dan meningkatkan kompetensi pekerja baru agar menjadi *early professional* di bidangnya serta mengidentifikasi pekerja potensial yang akan dimasukkan ke dalam *talent acceleration pool*.

The Company continuously improves the employees competency and capability by providing training for employees. The Company organizes 2 (two) types of worker development programs purposed to ensure the availability of employees who have the competence, ability and know-how to display performance that supports the achievement of the Company's strategy.

1. General Development Program

This program is purposed at all PTK employees and focuses on developing employees competencies and skills in order to fill the competency gaps of employees in their current positions.

2. Talent Development Program

This program is purposed at Talent/Successors and new PTK employees with the aim of the following:

- Developing and improving the competencies of talents/successors in order to prepare talents/successors to be able to display optimal performance in higher positions (*Talent Readiness*).
- Developing and improving the competency of new employees to become early professionals in their fields and identify potential employees who will be included in the talent acceleration pool.

Program Pelatihan Teknis

Technical Training Program

Pengembangan kompetensi teknis dilaksanakan dengan scope kegiatan sebagai berikut:

- Terpenuhinya *crew* secara jumlah dan sertifikasi (COC, COP) sesuai dengan regulasi serta ketepatan waktu pemenuhannya.
 - Pemberdayaan *crew* PWTT.
 - Sourcing* melalui *crew agent* dengan mengutamakan sinergi bersama anak perusahaan yang bergerak dalam bisnis *crew agent*.
 - Merekrut pelaut-pelaut dengan mensyaratkan terpenuhinya sertifikasi sesuai regulasi serta kecakapan yang dibutuhkan dengan dituangkan ke dalam kontrak *crew agent*.
- Penyiapan kader-kader pelaut yang terbaik untuk operasional kapal dan pemenuhan talent management darat dengan *background shipping* sesuai bisnis inti Perusahaan di masa yang akan datang.
- Mempertahankan pelaut dengan memberikan sistem remunerasi menarik yang bersaing dengan industri perkapalan sejenis.

PTK performs technical competency development with the following scope of activities:

- Fulfillment of crew numbers and certification (COC, COP) according to the regulations and timely fulfillment.
 - Empowerment of PWTT crew.
 - Sourcing* through crew agents by prioritizing synergy with subsidiaries engaged in the crew agent business.
 - Recruiting seafarers by requiring certification according to regulations and the required skills as outlined in the crew agent contract.
- Preparing the best cadre of seafarers for vessels operations and fulfilling land management talent with a shipping background in line with the Company's core business in the future.
- Retaining seafarers by providing an attractive remuneration system that is competitive with similar shipping industries.

Realisasi Rata-rata Jam Pelatihan Pekerja

Realization of Average Employee Training Hours

Selama tahun 2023, PTK telah melaksanakan program pendidikan dan pelatihan pegawai dengan jumlah jam pelatihan mencapai 69.226 jam dengan rata-rata jam pelatihan mencapai 127,02 jam per pekerja. Sedangkan jumlah peserta pelatihan pada tahun 2023 adalah sebanyak 524 pekerja.

As of the end of 2023, the cost of developing employees competencies, including the Employee Learning Task program in the PTK Group environment, was Rp10,788,687,710, increased compared to 2022.

Biaya Program Pengembangan Kompetensi Pekerja

Costs for Employee Competency Development Program

Sampai dengan akhir tahun 2023, biaya pengembangan kompetensi Pekerja termasuk program Tugas Belajar Pekerja di Lingkungan PTK Group sebesar Rp10.788.687.710, yaitu mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2022.

During 2023, PTK held employee education and training programs with total training hours reaching 69,226 hours with an average training hour reaching 127.02 hours per employee. Meanwhile, the number of training participants in 2023 was 524 employees.

Tabel Biaya Pengembangan Kompetensi Pekerja
Table of Employee Competency Development Costs

Keterangan Description	Satuan Unit	2023	2022	2021	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) 2022-2023	
					selisih difference	persentase percentage
Jumlah Pelatihan Total Training	pelatihan training	124	46	43	78	169,57%
Jumlah Peserta Total Participant	orang	3.693	1.739	1.012	1.954	112,36%
Biaya Cost	Rp juta	10.789	1.710	1.597	4.395	257,02%

Program Pengembangan Karir Pekerja

Employee Career Development Program

Pengelolaan atau pembinaan SDM PTK menjadi bentuk investasi jangka panjang bagi Perusahaan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa Perusahaan memiliki SDM yang andal. Dalam hal pembinaan SDM, perusahaan telah menyiapkan:

1. Sistem *career path* pekerja, pembuatan *career path* tersebut bertujuan untuk mempercepat proses pencarian dan pemilihan kandidat dalam proses *Succession Planning* serta tersedianya pemimpin dan pekerja berkualitas;
2. Sistem *talent pool* sebagai salah satu alat pembinaan;
3. *Talent Management System*, merupakan inisiatif strategis Fungsi Human Capital. PTK telah mempersiapkan pembuatan penyusunan *Talent Management System*.

Management or development of PTK human resources is manifestation of long-term investment for the Company. It purposes to ensure that the Company has reliable human resources. In terms of HR development, the Company already prepared the following:

1. Employee career path system, the creation of a career path purposes to speed up the process of searching and selecting candidates in the Succession Planning process as well as the availability of quality leaders and employees;
2. Talent pool system as a coaching tool;
3. Talent Management System, is a strategic initiative of the HR function. PTK already prepared the creation of Talent Management System.

Career Path

Career Path

Dalam rangka mendorong tercapainya *high performance organization*, Perusahaan melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa setiap jabatan telah diisi oleh pekerja yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang sesuai. Evaluasi penempatan pekerja (*placement*) pada prinsipnya dilakukan dengan mempertimbangkan hasil asesmen pekerja melalui proses pemetaan kompetensi, PRL Pribadi, eksposur, dan pengalaman pekerja.

In order to encourage the achievement of a high performance organization, the Company evaluates to ensure that each position is occupied by employees who have the appropriate capacity and capability. Evaluation of employee placement is in principle carried out by considering the results of employee assessments through competency mapping process, Personal PRL, exposure, and worker experience.

Perusahaan menyadari bahwa mengingat besarnya organisasi, jumlah jabatan dan populasi pekerja, serta mempertimbangkan bahwa penempatan pekerja dalam implementasi RPSDM merupakan perubahan yang sangat mendasar dibandingkan proses penempatan sebelumnya. Dengan demikian pada pelaksanaannya masih terdapat kondisi yang belum ideal, di mana tidak semua jabatan dapat diisi oleh pekerja yang sesuai/ tidak ada *gap* dalam kapasitas dan kapabilitasnya.

The Company is fully aware that considering the the organization proportions, number of positions and employee population, as well as that employee placement in the RPSDM implementation is a greatly fundamental change compared to the previous placement process. Thus, in its implementation there are still conditions that are not ideal, where not all positions can be occupied by suitable employees/there are no gaps in capacity and capability.

Talent Pool

Talent Pool

Sebagai bentuk komitmen perusahaan terhadap implementasi *talent management*, maka salah satu langkah awal yang dilakukan adalah mengidentifikasi dan memetakan pekerja yang masuk sebagai *Talent Pool*. *Talent Pool* adalah kelompok pekerja yang diidentifikasi sebagai talenta terbaik yang memenuhi kriteria *performance*/nilai kinerja dan potensi/ kompetensi yang dipersyaratkan Perusahaan.

As commitment of the Company to implementing talent management, one of the first steps taken is identifying and mapping employees who are included in the Talent Pool. Talent Pool is a group of employees identified as the best talents who meet the performance criteria/ performance values and potential/competencies required by the Company.

Pada prinsipnya *Talent Pool* digunakan perubahan untuk dasar penetapan successor list jabatan di PTK dan AP serta dasar penetapan program pengembangan pekerja. Sejalan dengan reorganisasi SH IML, saat ini PTK sedang menyusun *Competency-based talent pool system* PTK Group yang bertujuan untuk membantu manajemen dalam memetakan talent sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan bisnis. Sistem ini juga akan membantu dalam program pengembangan pekerja sesuai kebutuhan kompetensi jabatan yang dipersyaratkan.

In principle, Talent Pool is used as a basis for determining successor lists for positions in PTK and AP as well as the basis for determining employee development programs. In line with the reorganization of SH IML, PTK is currently developing PTK Group Competency-based talent pool system purposed to assist the management in mapping talent according to competencies and business needs. This system will also assist in employee development programs according to the required job competency requirements.

Pengelolaan Kinerja Individu

Individual Performance Management

Pengelolaan Kinerja Individu dalam Performance Management System

Individual Performance Management in the Performance Management System

End-to-end Process Siklus Pengelolaan Kinerja Individu related to Performance Management System (PMS Cycle)
End-to-end process of Individual Performance Management Cycle associated with Performance Management System (PMS Cycle)



Pengelolaan kinerja individu merupakan suatu siklus dari *performance management system* (PMS) yang dimulai dari proses identifikasi dan penyusunan *Key Performance Indicator* (KPI) atau *Individual Goal* (IG) *setting* hingga proses *dialog day* dengan tujuan untuk membentuk *high performance culture* yang mendukung pencapaian tujuan strategis Perusahaan. Tahapan penilaian kinerja individu dilakukan 2 (dua) kali dalam periode 1 (satu) tahun melalui *Mid-Year People Review* (MYPR) yang dilakukan pada pertengahan tahun, dan juga *End-Year People Review* (EYPR) yang dilakukan pada akhir tahun.

Proses pengelolaan kinerja individu dilakukan melalui aplikasi *people review online* yang dapat diakses seluruh Perwira melalui intra Pertamina (I-AM). PTK secara resmi *Go Live* menggunakan aplikasi ini terhitung mulai tanggal 15 Desember 2021. Penggunaan aplikasi *people review online* telah memudahkan proses penetapan IG *Setting, monitoring & reporting*, proses diskusi dan kalibrasi saat MYPR maupun EYPR, serta proses *dialog day*.

Penilaian kinerja individu mengacu pada target distribusi dan *meaningful differentiation* untuk aspek: (1) target kinerja (KPI/ IG) dan (2) perilaku nilai budaya AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) dan *Critical 5 Behavior* (termasuk penilaian 360°), juga atas pencapaian kinerja di luar Sasaran Kerja yang dituangkan dalam *rating/nilai* 1 s.d 8, yang sebarannya pada suatu kelompok penilaian *evaluee* melalui komparasi nilai yang dibahas di jenjang/ kelompok diskusi *People Review* atau diskusi Kalibrasi. Proses diskusi kalibrasi ini dilakukan bersama dengan pimpinan fungsi sebagai *evaluator* dan dipimpin oleh seorang *Chairman*.

Ringkasan hasil penilaian kinerja individu pada periode EYPR tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel Hasil Penilaian Kinerja Individu Periode EYPR Tahun 2023

Table of Individual Performance Assessment Results for the 2023 EYPR Period

Uraian Description	Jumlah Pekerja (orang) Total Employee (people)	Komposisi (%) Composition (%)
Nilai kinerja 6-7 (di atas rata-rata target pencapaian) Performance score 6-7 (above average achievement target)	319	54%
Nilai kinerja 5 Performance score 5	241	41%
Nilai kinerja 3-4 Performance score 3-4	26	5%
Jumlah Total	586	100%

Program Kesejahteraan dan Remunerasi Welfare and Remuneration Program

PTK berkomitmen untuk melaksanakan program kesejahteraan dan sistem remunerasi secara adil dan merata. Secara berkala, PTK melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi Perusahaan dengan mempertimbangkan persaingan industri sejenis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan.

Individual performance management is a cycle of the performance management system (PMS) which starts from the process of identifying and compiling Key Performance Indicators (KPI) or Individual Goal (IG) setting to the dialogue day process with the aim of forming a high performance culture that supports the achievement of the Company's strategic goals. The individual performance assessment stages are carried out 2 (two) times in a period of 1 (one) year through the Mid-Year People Review (MYPR) which is carried out in the middle of the year, and also the End-Year People Review (EYPR) which is carried out at the end of the year.

PTK performs individual performance management process through an online people review application which can be accessed by all officers via intra Pertamina (I-AM). PTK officially Go Live uses this application starting from December 15, 2021. The use of the online people review application has facilitated the process of determining IG Settings, monitoring & reporting, the discussion and calibration process during MYPR and EYPR, as well as the dialogue day process.

Individual performance assessment refers to distribution targets and meaningful differentiation for aspects: (1) performance targets (KPI/ IG) and (2) AKHLAK cultural value behavior (Trustworthy, Competent, Harmonious, Loyal, Adaptive and Collaborative) and Critical 5 Behavior (including 360° assessment), also for performance achievements outside the Work Targets as outlined in ratings/values 1 to 8, which are distributed to an *evaluee* assessment group through comparison of values discussed at the People Review level/discussion group or Calibration discussion. This calibration discussion process is carried out together with the function leader as evaluator and is led by a Chairman.

A summary of the results of the individual performance assessment for the 2023 EYPR period is as follows:



Tabel Biaya Remunerasi dan Benefit Pekerja

Table of Employee Remunerations and Benefits

Komponen Remunerasi & Benefit Remuneration & Benefits Component	Status Pekerja Employee status		Periode Kalkulasi Calculation Period			Tipe Type	
	Staf Staff	Non-Staf Non- Staff	Harian Daily	Bulanan Monthly	Tahunan Annual	Tetap Fixed	Variabel Variable
Remunerasi Remuneration							
Gaji Pokok Basic Salary	✓	✓		✓		✓	
Tunjangan Allowance	✓	✓	✓			✓	
Lembur Overtime	✓	✓	✓				✓
Benefit							
Tunjangan Hari Raya Holiday allowance	✓	✓			✓	✓	
Fasilitas Istirahat Tahunan Annual Break Facility	✓				✓	✓	
Bonus	✓	✓			✓		✓
Insentif Incentive	✓	✓			✓		✓
Program Jaminan Guarantee Program							
Ketenagakerjaan Employment	✓	✓		✓		✓	
Kesehatan Health	✓	✓		✓		✓	
Pensiun Pension	✓	✓		✓		✓	

Berdasarkan komposisi remunerasi di atas, berikut disajikan biaya yang dialokasikan Perusahaan untuk program kesejahteraan pekerja:

Based on the remuneration composition above, the following are the costs allocated by the Company for employee welfare programs:

Tabel Biaya Pengembangan Kompetensi Pekerja

Table of Employee Benefit Program Cost

(dalam Rp juta, kecuali dinyatakan lain) (in Rp million, unless otherwise stated)

Keterangan Description	2023	2022	2021	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) 2022-2023	
				selisih difference	persentase percentage
Gaji Pekerja Employee Salary	93.988	92.687	63.085	1.301	1,40%
Tunjangan Pekerja Employee Allowance	107.661	234.615	27.477	(126.954)	(54,11)%
Program Pensiun Pekerja Employee Pension Program	8.155	7.696	5.397	459	5,96%
Bonus dan Penghargaan Bonuses and Awards	125.531	114.612	-	10.919	9,53%
Jumlah Total	335.335	449.610	95.959	(114.275)	(25,42)%

Program Penghargaan Rewards Program

PTK memiliki program penghargaan khusus bagi pekerja yang telah menempuh masa kerja selama 10, 15, 20, 25, 30, dan 35 tahun. Program penghargaan merupakan pengakuan dan ungkapan terima kasih kepada pekerja sesuai dengan kriteria yang ditetapkan atas pengabdian dan prestasi yang telah dicapai. Perusahaan memberikan penghargaan Ulang Tahun Dinas (UTD) dengan beberapa jenjang waktu pengabdian melalui pemberian piagam (masa kerja 5, 10, 15, 25 dan 35 tahun) sebanyak 53 Pekerja dan peniti emas (masa kerja 20 tahun) sebanyak 1 Pekerja pada tahun 2023.

PTK has a special award program for employees who have worked for 10, 15, 20, 25, 30 and 35 years. The award program is an acknowledgment and expression of gratitude for employees based on the established criteria for their dedication and achievements. The Company provides Service Anniversary Awards (UTD) with several levels of service by awarding certificates (5, 10, 15, 25 and 35 years of service) to 53 employees and gold pins (20 years of service) to 1 employee in 2023.

Pada event peringatan Hari Ulang Tahun PTK ke-54 pada bulan September 2023, sebagai bentuk apresiasi atas pencapaian kinerja dan guna memotivasi pekerja, PTK memberikan penghargaan kepada pekerja dalam beberapa kategori yang bertajuk *Transko Club Award* 2023.

Berikut ini adalah kategori award yang diberikan:

1. Employee of the Year

Penghargaan kepada individu dari setiap perwakilan fungsi baik pekerja darat maupun pekerja laut dengan kriteria:

- Pekerja Waktu Tidak Tertentu (PWTT) setingkat Ast. Manager/Sr. Officer/ Sr. Analyst/ setara kebawah (PRL 16 ke bawah);
- Nilai kinerja rata-rata 2 (dua) tahun terakhir minimal 5.5 ke atas;
- Keaktifan pada kegiatan inovasi/ budaya/ olahraga yang diselenggarakan oleh PTK maupun *Subholding* IML atau Pertamina Group lain;
- Keaktifan dalam melaksanakan *Medical Check-up* (MCU);
- Tidak terdapat catatan terkait indisipliner atau internal audit.

Pada tahun 2023, PTK memberikan penghargaan terhadap 8 (delapan) orang pekerja dari beberapa fungsi sebagai berikut:

Tabel Fungsi Penerima *Employee of the Year*
Table of Function Employee of the Year Awardees

No.	Fungsi Function	Direktorat Directorate
1.	Strategic Planning & Business Development	Leher Neck
2.	Information Technology	Keuangan & SDM Finance & HR
3.	Marine Engineering & Fleet Project Management	Operasi Operation
4.	Crewing (Laut) (Sea)	Operasi Operation
5.	Agency Services	Pemasaran Marketing
6.	Marine Business & Operation Region I	Pemasaran Marketing
7.	Marine Business & Operation Region II	Pemasaran Marketing
8.	Marine Business & Operation Region III	Pemasaran Marketing

2. Vessel of the Year

Penghargaan yang diberikan untuk awak kapal milik PTK pada kapal jenis AHTS, *Small Cargo*, *Harbour Tug*, *Small Craft* dengan kriteria:

- Safety (Zero Accident)*;
- Commission Days* (pencapaian terhadap RKAP);
- Tidak terdapat temuan terkait *fraud*.

Pada tahun 2023, PTK memberikan penghargaan terhadap 4 (empat) kapal milik sebagai berikut:

Tabel Penerima *Vessel of The Year*
Table of Vessel of The Year Awardees

No.	Jenis Kapal Vessel Type	Nama Kapal Vessel Name
1	AHTS	Transko Celebes
2	Small Cargo	SPOB Mahakam
3	Harbour Tug	Transko Walet
4	Small Craft	Transko Patin 10

At the PTK 54th anniversary event in September 2023, as the appreciation for performance achievements and to motivate the employees, PTK provided awards to the employees in several categories entitled *Transko Club Award* 2023.

The following are the award categories:

1. Employee of the Year

Award to individuals from each function representative, both land and sea workers, with the following criteria:

- Indefinite Time Employees (PWTT) at the level of Assistant Manager/Sr Officer/Sr Analyst/equivalent and below (PRL 16 and below);
- The average performance score for the latest 2 (two) years is at least 5.5 and above;
- Activeness in innovation/cultural/sports activities organized by PTK or other IML or Pertamina Group Subholdings;
- Activeness in taking *Medical Check-ups* (MCU);
- There are no records related to disciplinary or internal audits.

In 2023, PTK awarded 8 (eight) workers from the following functions:



Perusahaan memberikan penghargaan kepada para finalis *Employee of the Year* dan *Vessel of the Year* dalam bentuk Sertifikat Penghargaan dan nominal tertentu yang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan sesuai ketentuan Perusahaan.

The Company provided awards to the finalists for *Employee of the Year* and *Vessel of the Year* in the form of a Certificate of Appreciation and a certain nominal amount was provided in the form of assistance for education costs following the Company regulations.



Program Pensiun Pension Program

Sebagai bentuk tanggung jawab kepada pekerja yang telah mendedikasikan diri kepada Perusahaan, PTK memberikan program pensiun. Program pensiun tersebut terdiri dari 2 (dua) program, yaitu:

1. Program pensiun diberikan kepada para pekerja yang diangkat pada usia minimum 18 tahun dengan diikutsertakan dalam program Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Kepada para pekerja dengan status Pekerja Waktu Tidak Tertentu (PWTT) yang telah mencapai usia minimum 46 tahun pada tahun anggaran berjalan dengan masa kerja minimal 15 tahun dapat diberikan uang panjar Penghargaan Atas Pengabdian (PAP) sebesar 10% yang akan diperhitungkan pada saat PHK atau mencapai usia MPPK (55 tahun). PAP 10% dapat dibayarkan kepada pekerja jika hasil perhitungan PAP 10% lebih kecil atau sama dengan perhitungan penghargaan Masa Kerja. Tabel kecil terhitung pada saat pengajuan panjar PAP 10% setelah dikurangi hutang-hutangnya (jika ada).
2. Program pelatihan persiapan masa purna karya diberikan sebagai persiapan pengelolaan mental pekerja dalam menghadapi masa-masa pensiun. Selain itu pada program pelatihan tersebut juga diberikan pengarahan mengenai kegiatan wirausaha, sehingga para pekerja pensiun yang ingin melanjutkan berkarya di bidang lain mendapatkan modal dasar yang tepat.

Untuk pekerja yang pensiun, Perusahaan menyiapkan 2 (dua) program, yaitu Dana Pensiun Pertamina (DPP) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Tugu Mandiri (DPLK Tugu Mandiri). Adapun besaran iuran/persentase Dana Pensiun Lembaga Keuangan Tugu Mandiri adalah sebesar 5% kontribusi dari Perusahaan, dan sebesar 5% kontribusi dari pekerja. Besaran manfaat pasti yang dikelola oleh Dana Pensiun Pertamina dengan iuran per bulan 7,5% dari PHDP (Penghasilan Dana Pensiun) terdiri dari Perusahaan 5,5% dan Pekerja 2%.

Survei Kepuasan Pekerja Employee Satisfaction Survey

Secara rutin dan berkala, PTK melaksanakan Survei Kepuasan Pekerja (SKP) atau *Internal Customer Satisfaction (ICS) Survey* dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan pekerja terhadap kebijakan yang secara langsung mengatur hak dan kewajibannya didalam perusahaan.

As the Company's responsibility to employees who have dedicated themselves to the Company, PTK provides a pension program. The pension program consists of 2 (two) programs, namely:

1. The pension program is given to workers who are appointed at a minimum age of 18 years by being included in the Financial Institution Pension Fund ("DPLK") program. Employees with Unspecified Time Worker ("PWTT") status who have reached a minimum age of 46 years in the current fiscal year with a minimum working period of 15 years can be given a down payment for Service Award ("PAP") of 10% which will be calculated at the time of layoffs or reaching MPPK age (55 years). 10% PAP can be paid to workers if the 10% PAP calculation result is less than or equal to the calculation of the Year of Service award. Small table calculated at the time of submitting a PAP down payment of 10% after deducting the debts (if any).
2. Retirement preparation training programs are provided as a preparation for employees' mental management in facing retirement. Apart from that, the training program also provided guidance regarding entrepreneurial activities, so that retired workers who wish to continue working in other fields get the right basic capital.

For retired workers, the Company has prepared 2 (two) programs, namely the Pertamina Pension Fund ("DPP") and the Tugu Mandiri Financial Institution Pension Fund (DPLK Tugu Mandiri). The contribution amount/percentage of the Tugu Mandiri Financial Institution Pension Fund is 5% contribution from the Company, and 5% contribution from employees. The amount of defined benefit is managed by the Pertamina Pension Fund with monthly contributions of 7.5% of the PHDP (Pension Fund Income) consisting of Companies 5.5% and Employees 2%.

PTK routinely and periodically carries out an Employee Satisfaction Survey (SKP) or Internal Customer Satisfaction (ICS) Survey purposed to find out the level of employee satisfaction with policies that directly regulate their rights and obligations within the Company.

SKP dilakukan setahun sekali dengan menggunakan metode penyebaran kuesioner secara *online* melalui *broadcast* PTK. Nilai SKP atau ICS pada tahun 2023 adalah sebesar 4.03 (dari target 4.00). Nilai ini menurun dibandingkan tahun 2022 sebesar 4.38. Beberapa hal yang menjadi catatan hasil survei adalah terkait pengembangan pekerja dan aspek *responsiveness*.

The Company performs SKP once a year using the method of distributing questionnaires online via PTK broadcasts. The SKP or ICS score in 2023 was 4.03 (from the target of 4.00). This score decreased compared to 2022, amounting to 4.38. PTK recorded several things in the survey results related to employee development and aspects of *responsiveness*.

Teknologi Informasi Information Technology

Peta Jalan TI IT Road Map

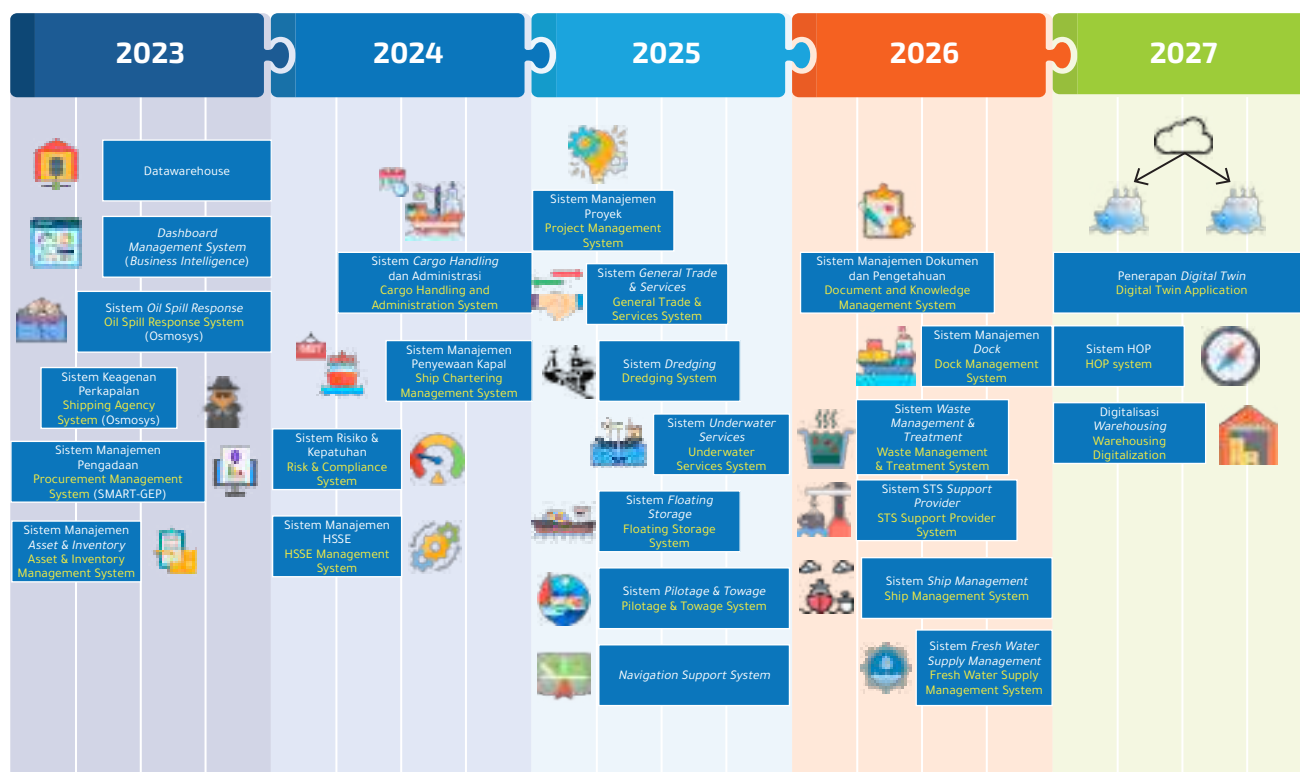
Dalam rangka pengelolaan Teknologi Informasi (TI) yang terintegrasi, PTK menyusun peta jalan (*road map*) pengelolaan TI yang terencana dan dilaksanakan secara bertahap.

In the context of integrated Information Technology (IT) management, PTK prepared IT management road map that is planned and implemented in stages.

Peta Jalan TI Tahun 2023-2027 IT Road Map for 2023-2027

Peta jalan TI dalam jangka panjang ditetapkan dalam dokumen Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2023-2027.

Long-term IT roadmap is set out in the 2023-2027 Company Long Term Plan (RJPP) document.



Sesuai dengan peta jalan TI yang tercantum dalam RJPP, PTK menyusun tata kelola TI khusus tahun 2023 dalam IT *Strategy Maps* Tahun 2023.

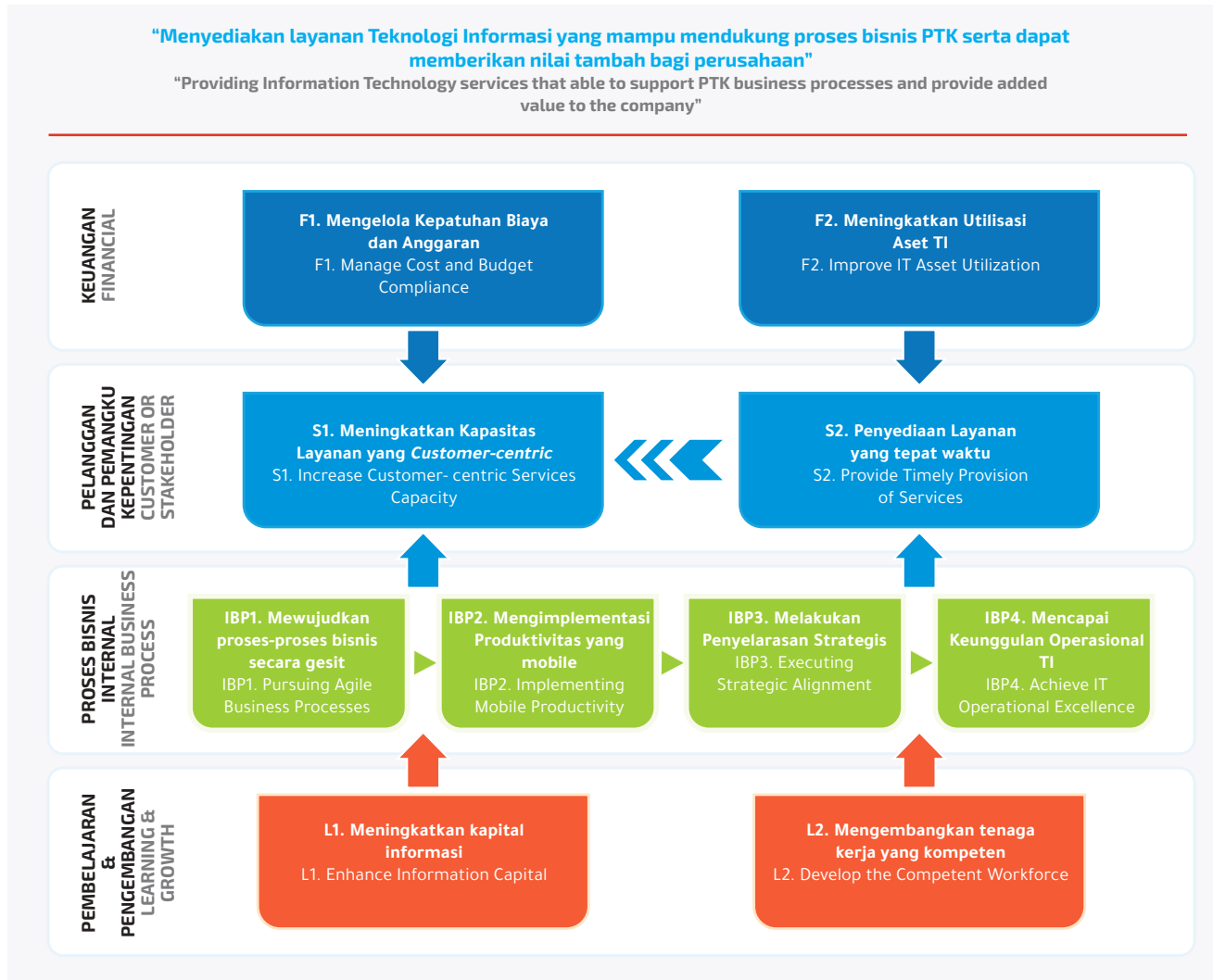
Based on IT road map stated in the RJPP, PTK prepared specific IT governance for 2023 in the 2023 IT *Strategy Maps*.

Tata Kelola TI Tahun 2023

IT Governance in 2023

Peta Strategi IT 2023

IT Strategy Maps 2023



Pada gambar di atas terdapat 4 (empat) Perspektif sebagai berikut:

Perspektif Financial, terdapat 2 (dua) Strategic Objectives, yaitu:

- F1. Manage Cost and Budget Compliance.
- F2. Improve IT Asset Utilization.

Perspektif Customer or Stakeholders, terdapat 2 (dua) Strategic Objectives, yaitu:

- S1. Increase Customer-Centric Services Capacity.
- S2. Provide Timely Provision of Services.

Pada perspektif Internal Business Process, terdapat 4 (empat) Strategic Objectives, yaitu:

- IBP1. Pursuing Agile Business Processes.
- IBP2. Implementing Mobile Productivity.
- IBP3. Executing Strategic Alignment.
- IBP4. Achieve IT Operational Excellence.

In the picture above, there are 4 (four) perspectives as follows:

Financial perspective, there are 2 (two) Strategic Objectives, namely:

- F1. Manage Cost and Budget Compliance.
- F2. Improve IT Asset Utilization.

Customers or Stakeholders perspective, there are 2 (two) Strategic Objectives, namely:

- S1. Increase Customer-Centric Services Capacity.
- S2. Provide Timely Provision of Services.

From Internal Business Process perspective, there are 4 (four) Strategic Objectives, namely:

- IBP1. Pursuing Agile Business Processes.
- IBP2. Implementing Mobile Productivity.
- IBP3. Executing Strategic Alignment.
- IBP4. Achieve IT Operational Excellence.

Pada perspektif *Learning and Growth*, terdapat 2 (dua) *Strategic Objectives*, yaitu:

- L.1. *Enhance Information Capital.*
- L.2. *Develop the Competent Workforce.*

Keempat perspektif organisasi tersebut untuk selanjutnya didefinisikan dalam rangka membentuk suatu linkage antara *Strategic Objectives* pada *IT Strategy Maps* PTK. Sebagai contoh, kondisi pada tahun sebelumnya memberikan porsi kepada Fungsi IT sebagai *strategic workforce unit* untuk mendukung kegiatan bisnis PTK, sehingga *Financial Perspective* diletakkan pada posisi teratas dari susunan 4 *Organizational Perspectives*. Beberapa faktor *Financial* seperti *Cost, Budget and Assets* merupakan objek yang perlu dikelola dengan baik demi keberlangsungan layanan IT bagi organisasi atau perusahaan.

Pengelolaan faktor-faktor *Financial* yang baik, memberikan jaminan bagi Fungsi IT PTK untuk memberikan layanan terbaiknya bagi *Customer or Stakeholders*. Fungsi IT PTK berupaya untuk memberikan layanan kepada para pengguna jasanya, yaitu karyawan pada Kantor Pusat, Kantor Cabang dan Anak Perusahaan, dengan sebaik-baiknya. Fungsi IT PTK memiliki pandangan untuk dapat memberikan kapasitas layanan yang terukur, terkontrol dan terencana dengan orientasi kepada *Customer or Stakeholders*.

Dalam rangka memberikan layanan kepada *Customer or Stakeholders*, Fungsi IT melaksanakan proses bisnis internal (*Internal Business Process*), yang tertuang dalam 6 (enam) area kerja Fungsi IT, yaitu Infrastruktur TI, Penyelarasan Strategi TI, Manajemen Proses Bisnis, Manajemen Pengetahuan, Manajemen Aplikasi dan Manajemen Layanan TI. Untuk memastikan proses bisnis internal dapat berjalan dengan baik, maka Fungsi IT memerlukan kemampuan literasi untuk adaptif terhadap perkembangan zaman dan perubahan bisnis terkait bidang usaha PTK. Fungsi IT memerlukan sumber daya manusia yang kompeten pada bidang kerjanya dan mampu melakukan eksploitasi informasi yang dimiliki sebesar-besarnya untuk kepentingan organisasi atau perusahaan serta dalam rangka mencapai pertumbuhan (*Growth*) dan pembelajaran (*Learning*) yang positif.

Organisasi Pengelola TI IT Management Organization

Organisasi pengelola TI PTK adalah Fungsi Information Technology. Secara umum tugas pengelolaan TI mencakup:

1. *Development*

Digitalisasi perusahaan dan pengembangan VR memiliki potensi besar untuk saling melengkapi dan menciptakan lingkungan perusahaan yang lebih efisien, produktif, dan inovatif. Berikut beberapa cara di mana pengembangan VR dapat berfungsi sebagai bagian dari digitalisasi Perusahaan antara lain sebagai berikut:

- a. *Pelatihan Karyawan*: Pengembangan VR dapat digunakan untuk menciptakan pengalaman pelatihan yang imersif dan interaktif bagi karyawan.
- b. *Kolaborasi Jarak Jauh*: Dengan VR, karyawan yang berada di lokasi yang berbeda dapat berkolaborasi dalam lingkungan virtual yang terintegrasi.
- c. *Peningkatan Pengalaman Pengguna*: Dalam konteks layanan pelanggan, VR dapat digunakan untuk menciptakan pengalaman yang lebih menarik dan memuaskan. Misalnya, hotel atau restoran dapat menawarkan tur virtual dari fasilitas mereka kepada calon pelanggan, atau perusahaan ritel dapat menciptakan pengalaman belanja virtual yang lebih imersif.

Pada perspektif *Learning and Growth*, terdapat 2 (dua) *Strategic Objectives*, yaitu:

- L.1. *Enhance Information Capital.*
- L.2. *Develop the Competent Workforce.*

Furthermore, these four organizational perspectives are defined in the context to establish linkage among Strategic Objectives on PTK IT Strategy Maps. For example, conditions in the previous year gave the IT function a portion as a strategic workforce unit to support PTK business activities, so that Financial Perspective was placed at the top of the 4 Organizational Perspectives arrangement. Several financial factors such as Cost, Budget and Assets are objects that need to be managed well for IT services continuity in the organization or company.

Good management of financial factors provides guarantees for IT function in PTK to provide the best services for the customers or the stakeholders. IT function strives to provide services to its service users, namely employees at the Head Office, Branch Offices and Subsidiaries, as well as possible. PTK's IT function has the view of being able to provide measurable, controlled and planned service capacity with an orientation towards the Customers or the Stakeholders.

In order to provide services to the Customers or the Stakeholders, the IT Function carries out Internal Business Process, which are contained in 6 (six) IT Function work areas, namely IT Infrastructure, IT Strategy Alignment, Business Process Management, Knowledge Management, Application Management and IT Service Management. In order to ensure that internal business processes are able to run well, IT function requires literacy skills to be adaptive for current developments and business changes related to PTK business sector. IT function requires human resources who are competent in their field of work and are able to exploit the information they have as much as possible for the benefit of the organization or Company and in order to achieve positive growth and learning.

PTK's IT management organization is the Information Technology Function. In general, IT management tasks include:

1. *Development*

Enterprise digitalization and VR development have great potential to complement each other and create a more efficient, productive, and innovative enterprise environment. Here are some ways in which VR development can serve as part of Enterprise digitalization including the following:

- a. *Employee Training*: VR development can be used to create immersive and interactive training experiences for employees.
- b. *Remote Collaboration*: With VR, employees who are in different locations can collaborate in an integrated virtual environment.
- c. *Improved User Experience*: In the context of customer service, VR can be used to create a more engaging and satisfying experience. For example, hotels or restaurants can offer virtual tours of their facilities to potential customers, or retail companies can create more immersive virtual shopping experiences.



2. Operation

Fokus utama dalam IT Operation adalah menjaga stabilitas operasional, serta memastikan bahwa Perangkat IT berfungsi dengan efisien, aman, dan stabil. IT *Operation* yang memiliki dasar kokoh dapat membantu perusahaan agar lebih responsif terhadap perubahan kebutuhan pelanggan dan tantangan kompetitif. Dengan menerapkan praktik terbaik dalam pengelolaan teknologi, IT *Operation* membantu perusahaan bersiap menghadapi perubahan teknologi yang akan datang dan mendukung inisiatif bisnis baru.

3. Infrastruktur

Infrastruktur IT di perusahaan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung operasi sehari-hari dan pencapaian tujuan bisnis. Berikut beberapa fungsi utama infrastruktur di Perusahaan antara lain sebagai berikut:

- Penyediaan layanan internet kantor pusat dan cabang PTK seluruh Indonesia,
- Menjamin ketersediaan layanan ICT untuk mendukung operasional PTK,
- Menjaga keamanan dan mengawasi jaringan PTK untuk mencegah *downtime* akibat serangan cyber.

2. Operation

The main focus in IT Operation is to maintain operational stability, as well as ensuring that IT Devices function efficiently, safely, and stably. A well-grounded IT Operation can help companies be more responsive to changing customer needs and competitive challenges. By applying best practices in technology management, IT Operations helps companies prepare for upcoming technology changes and support new business initiatives.

3. Infrastructure

IT infrastructure in the company has a very important role in supporting daily operations and achieving business goals. Here are some of the main functions of infrastructure in the Company, including the following:

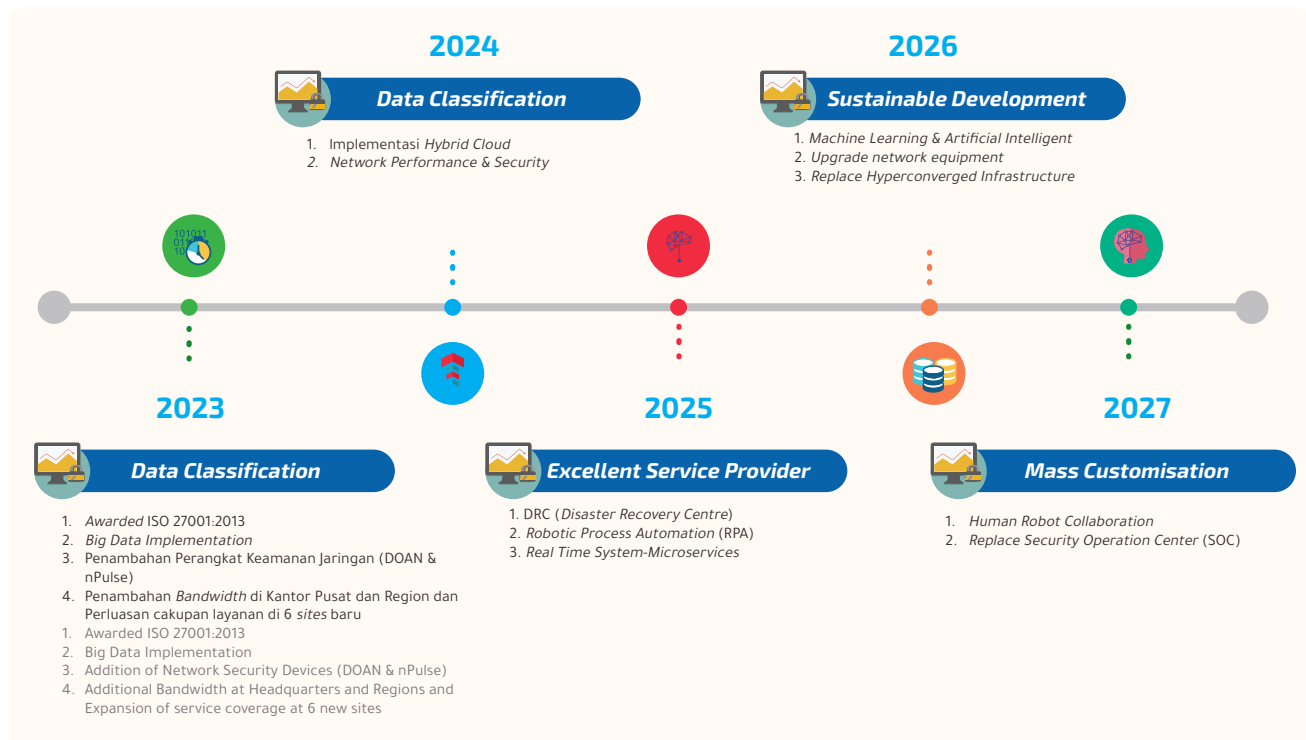
- Provision of internet services for PTK head office and branches throughout Indonesia,
- Ensuring the availability of ICT services to support PTK operations,
- Maintaining security and monitoring the PTK network to prevent downtime due to cyber attacks.

Penguatan Keamanan Dunia Maya (Cyber Security) Cyber Security

Dalam rangka penguatan Keamanan Dunia Maya (*Cyber Security*), PTK telah menyusun peta jalan *Initiative Infrastructure & Cyber Security* PTK 2023-2027.

In the context to strengthen Cyber Security, PTK prepared a road map for PTK Infrastructure & Cyber Security Initiative 2023-2027.

Peta Jalan Initiative Infrastructure & Cyber Security PTK 2023-2027
PTK Infrastructure & Cyber Security Initiative Roadmap 2023-2027



Adapun kinerja TI PTK terkait penguatan *cyber security* di tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- Pemasangan perangkat keamanan jaringan berupa *security appliance* yang berfungsi sebagai *Intrusion Prevention System (IPS)*, *Deep Packet Inspection*, *Sandboxing* dan *Domain Name Service (DNS) Security*.

IT performance in PTK regarding strengthening cyber security in 2023 is as follows:

- Installation of network security devices in the form of security appliances that function as an Intrusion Prevention System (IPS), Deep Packet Inspection, Sandboxing and Domain Name Service (DNS) Security.

2. Instalasi *security appliance* berupa *Deep Discovery Inspector* yang berfungsi menjaga jaringan internal PTK dari serangan DDoS.
3. Instalasi *Data Domain Backup*.

2. Installation of a security appliance in the form of a Deep Discovery Inspector which functions to protect PTK's internal network from DDoS attacks.
3. Installation of Data Domain Backup.

Risiko Utama TI dan *Disruption* serta Mitigasinya Main IT Risks and Disruption as well as the Mitigation

PTK telah mengidentifikasi adanya risiko-risiko dalam bidang TI. Identifikasi tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa segala risiko yang berpotensi dapat mempengaruhi kegiatan dan pencapaian kinerja TI telah diketahui dan disiapkan mitigasinya. Risiko yang diidentifikasi tersebut dikelompokkan menjadi kelompok risiko antara lain:

PTK already identified risks in the IT sector. This identification is necessary to ensure that all risks with potential to affect IT activities and performance achievements are detected and mitigation is prepared. The identified risks are grouped into risk groups, including:

Tabel Risiko Utama Bidang TI dan Rencana Mitigasinya
Table of Main IT Risks and Mitigation Plans

No	Risiko Risk	Rencana Mitigasi Mitigation Plan
1	Risiko keterlambatan proses <i>development</i> atau pembuatan aplikasi a. Perubahan proses bisnis di tengah jadwal <i>development</i> atau setelah penandatanganan <i>project charter</i>; b. Perubahan narasumber aplikasi; c. Adanya permintaan aplikasi diluar <i>grand design/ architecture IT</i>; Risk of delays in the development process or application creation a. Changes to business processes in the middle of the development schedule or after signing the project charter; b. Changes of application resource; c. There is a request for applications outside the IT grand design/ architecture;	<i>Application Change form Request (CFR)/ In Case/ jika terjadi issue ini pada bulan tertentu maka akan dilengkapi dengan evidence</i> Application Change form Request (CFR)/ In Case/ in case the issue occurs in a certain month, it will be accompanied by evidence
2	Risiko gangguan pada jaringan <i>Cyber Security Threats</i> Risk of Cyber Security Threats network disruption	<i>Update Security Appliance</i>
3	a. <i>Lack of resource</i>; b. <i>Server down</i>; c. <i>Full traffic</i>.	a. Melakukan <i>preventive maintenance</i> pada server yang digunakan setiap bulan. b. Melakukan <i>Testing Backup & Restore Server</i>; c. Melakukan <i>backup</i> secara terjadwal/ sinkronisasi. a. Monthly preventive maintenance on the servers used, b. Server Backup & Restore Testing, c. Scheduled backups/synchronization.

Perencanaan *Disaster Recovery Plan* dan *Disaster Recovery Centre* Disaster Recovery Plan and Disaster Recovery Center Plan

Dalam rangka meningkatkan layanan sistem IT, PTK telah memiliki *Disaster Recovery Plan (DRP)* dan lokasi *Disaster Recovery Centre (DRC)*.

In order to improve IT system services, PTK has a Disaster Recovery Plan (DRP) and a Disaster Recovery Center (DRC) location.

Memenuhi *Opportunity of Improvement (OFI)* ISO 27001:2013, PTK mengadakan sistem *Backup* dan *Restore* di *Data Center* berupa *Data Domain Backup*, *Power Protect Cyber Recovery*, *Cloud One Workload* dan *Web Application Scanning* yang telah dipasang pada 25 Oktober 2023.

Fulfilling the Opportunity of Improvement (OFI) ISO 27001:2013, PTK provides a Backup and Restore system in the Data Center in the form of Data Domain Backup, Power Protect Cyber Recovery, Cloud One Workload and Web Application Scanning which was installed on October 25, 2023.

Sistem *backup* yang dibangun ini pada dasarnya digunakan sebagai *backup server-server* yang berada di *Data Center* PTK. Sistem yang dibangun juga memiliki kemampuan untuk *restore data state* apabila diperlukan.

The installed backup system is basically used as a backup for the servers in the PTK Data Center. The system built also has the ability to restore state data if necessary.

Program Pengembangan TI IT Development Program

Sepanjang tahun 2023, Fungsi TI telah memberikan dukungan pada seluruh fungsi di Perusahaan. Adapun program/ aplikasi TI yang sedang dikembangkan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Throughout 2023, IT Function provided support to all functions in the Company. PTK developed the following IT programs/applications in 2023:

Tabel Program Pengembangan TI Tahun 2023
Table of 2023 IT Development Program

No	Program atau Aplikasi Program or Application	Deskripsi Description	Fungsi Pemakai User Functions
1.	SIMS	Aplikasi digitalisasi gudang (<i>monitoring</i> peralatan keluar masuk yang dimiliki oleh Fungsi SES) Warehouse digitization application (monitoring incoming and outgoing equipment owned by the SES Function)	PT PME
2.	Aksi Action	Aplikasi <i>monitoring</i> inspeksi umum yang dilakukan oleh semua <i>port, shorebase, dan dockyard</i> General inspection monitoring application carried out by all ports, shorebases and dockyards	HSSE
3.	HSSE Library	Aplikasi digitalisasi penyimpanan data dokumen HSSE HSSE document data storage digitization application	HSSE
4.	Executive Dashboard	Aplikasi visualisasi data <i>dashboard</i> yang ada di setiap fungsi <i>controller</i> Dashboard data visualization application for each controller function	Finance
5.	TCMS V2.0	Aplikasi <i>maintenance</i> kapal milik PTK Vessels maintenance application within PTK	Fleet
6.	Simontana 2.3 (UW Module)	Aplikasi <i>enhancement</i> modul <i>Approval checklist Underwater</i> , perubahan <i>create Underwater Inspection Report</i> dan Penambahan <i>Form</i> Inspeksi di dalam <i>Underwater Inspection Report</i> Enhancement application for the Approval Checklist Underwater module, changes to create Underwater Inspection Report and addition of inspection form in the Underwater Inspection Report	PT PME
7.	OBIT HSSE	Aplikasi untuk memfasilitasi User/ PIC semua laporan temuan/ ketidaksesuaian yang terjadi untuk ditindaklanjuti Application to facilitate User/PIC to follow-up all reports of findings/non-conformities	HSSE
8.	Osmosys 2.1	Aplikasi <i>monitoring oil spill response</i> dengan penambahan Oil spill response monitoring application with additions	PT PPL
9.	Trace	Aplikasi <i>monitoring</i> temuan HSSE dengan penambahan fitur <i>multiple file proses</i> HSSE findings monitoring application with the addition of multiple process file features	HSSE
10.	ICONS 2.4	Aplikasi <i>monitoring</i> kontrak dengan penambahan fitur <i>Approval Contract Request 2.2</i> Contract monitoring application with the addition of the Approval Contract Request 2.2 feature	Legal
11.	Certo 2.4	Aplikasi <i>monitoring</i> masa berlaku sertifikat kapal dengan penambahan otorisasi kepada <i>marine superintendent</i> dan fitur <i>last update</i> (tanggal dan PIC) Application for monitoring the validity period of vessels certificates with additional authorization to the marine supervisor and last update feature (date and PIC)	Fleet Support
12.	BPOV	Aplikasi <i>monitoring</i> data klaim lembur, <i>benefit</i> , dan perjalanan dinas yang diajukan oleh Mitra Kerja Application for monitoring data on overtime, benefits and official travel claims submitted by Work Partners	HC Strategic

Pelaksanaan Sertifikasi ISO 27001

Implementation of ISO 27001 Certification

Pada tahun 2023, telah dilaksanakan sertifikasi ISO 27001 pada tanggal 25 - 26 Mei tahun 2023 yang memiliki beberapa fungsi penting dalam konteks keamanan informasi dan manajemen risiko. Berikut adalah beberapa fungsi utama dari pelaksanaan sertifikasi ISO 27001:

- Meningkatkan Keamanan Informasi:** Salah satu fungsi utama dari pelaksanaan sertifikasi ISO 27001 adalah meningkatkan keamanan informasi di dalam organisasi. Standar ini memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko keamanan informasi secara efektif, sehingga membantu melindungi aset informasi dari ancaman dan kerentanan potensial.
- Meningkatkan Kepercayaan Pelanggan dan Mitra Bisnis:** Sertifikasi ISO 27001 adalah bukti yang jelas bahwa sebuah organisasi telah mengimplementasikan praktik terbaik dalam manajemen keamanan informasi.
- Meningkatkan Efisiensi Operasional:** ISO 27001 mendorong organisasi untuk mengadopsi pendekatan yang terstruktur dan terorganisir terhadap manajemen keamanan informasi. Dengan mengidentifikasi dan mengelola risiko keamanan informasi secara proaktif, organisasi dapat mengurangi insiden keamanan, *downtime* sistem, dan kerugian lainnya yang dapat mengganggu operasi bisnis.

In 2023, ISO 27001 certification was carried out on May 25-26, 2023, which has several important functions in the context of information security and risk management. Here are some of the main functions of implementing ISO 27001 certification:

- Improving Information Security:** One of the main functions of implementing ISO 27001 certification is to improve information security within the organization. The standard provides a comprehensive framework for identifying, evaluating, and effectively managing information security risks, thereby helping to protect information assets from potential threats and vulnerabilities.
- Increase Customer and Business Partner Trust:** ISO 27001 certification is clear evidence that an organization has implemented best practices in information security management.
- Improves Operational Efficiency:** ISO 27001 encourages organizations to adopt a structured and organized approach to information security management. By proactively identifying and managing information security risks, organizations can reduce security incidents, system downtime, and other losses that can disrupt business operations.



Investasi Bidang TI IT Sector Investment

Sebagai upaya memperkuat dukungan TI pada operasional Perusahaan, PTK menetapkan kebijakan terkait investasi di bidang TI pada tahun 2023 yang mencakup:

1. IT Operation

Pembelanjaan di bidang operasional bisnis TI meliputi CAPEX dan OPEX yaitu sewa peralatan TI melalui *seat management*, pengadaan perangkat pendukung TI, perbaikan perangkat TI dan lisensi *enterprise agreement* dengan total nilai sebesar Rp28.881.624.416.

2. IT Development

Pembelanjaan bidang IT application development meliputi pengadaan layanan SMS *gateway*, lisensi *developer*, UID SAP, *template* aplikasi, *tools development*, dsb, dengan total nilai sebesar Rp21.527.671.321.

3. IT Infrastructure

Pembelanjaan bidang IT *infrastructure* meliputi CAPEX dan OPEX yaitu pengadaan *cloud storage*, UPS *Manageable*, *Cyber Security Network*, *Managed Service Network* dan SAP dengan total nilai sebesar Rp62.579.732.814.

In an effort to strengthen IT support for the Company's operations, PTK established policy regarding investment in the IT sector in 2023, which includes:

1. IT Operations

Expenditures in the field of IT business operations include CAPEX and OPEX, namely renting IT equipment through seat management, procurement of IT supporting equipment, repair of IT equipment repairment and enterprise agreement licenses with a total value of Rp28,881,624,416.

2. IT Development

Expenditures in the IT application development sector include procurement of SMS gateway services, developer licenses, SAP UID, application templates, development tools, etc., with a total value of Rp21,527,671,321.

3. IT Infrastructure

Spending in the IT infrastructure sector includes CAPEX and OPEX, namely the procurement of cloud storage, Manageable UPS, Cyber Security Network, Managed service network and SAP with a total value of Rp62,579,732,814.



PERTAMINA

TRANS KONTINENTAL



Analisis dan Pembahasan Manajemen

Management Discussion and Analysis

Tinjauan Umum dan Industri

General and Industry Review

Kondisi Perekonomian Global

Global Economic Condition

Perkembangan perekonomian global mengalami pertumbuhan yang stabil meskipun dengan beberapa tantangan. Secara umum, pertumbuhan ekonomi global mengalami pertumbuhan moderat, meskipun tidak merata di seluruh negara. Beberapa negara mengalami pemulihan yang kuat setelah dampak pandemi COVID-19, sementara yang lain masih berjuang dengan ketidakpastian ekonomi. Di beberapa negara maju, dimana harga-harga mengalami peningkatan yang menimbulkan inflasi. Kenaikan inflasi ini sebagian besar disebabkan oleh gangguan pasokan, biaya tenaga kerja, dan kebijakan moneter yang longgar. Hal ini menyebabkan kekhawatiran akan potensi resesi di tahun 2023.

Perekonomian global pada tahun 2023 dipengaruhi banyak faktor, salah satunya adalah krisis energi yang melanda beberapa wilayah akibat peningkatan permintaan energi dan gangguan pasokan. Konflik geopolitik dan ketegangan perdagangan juga menjadi faktor yang memengaruhi ketidakpastian ekonomi global. Selain itu, perubahan kebijakan fiskal dan moneter di berbagai negara juga memengaruhi kondisi ekonomi global secara keseluruhan.

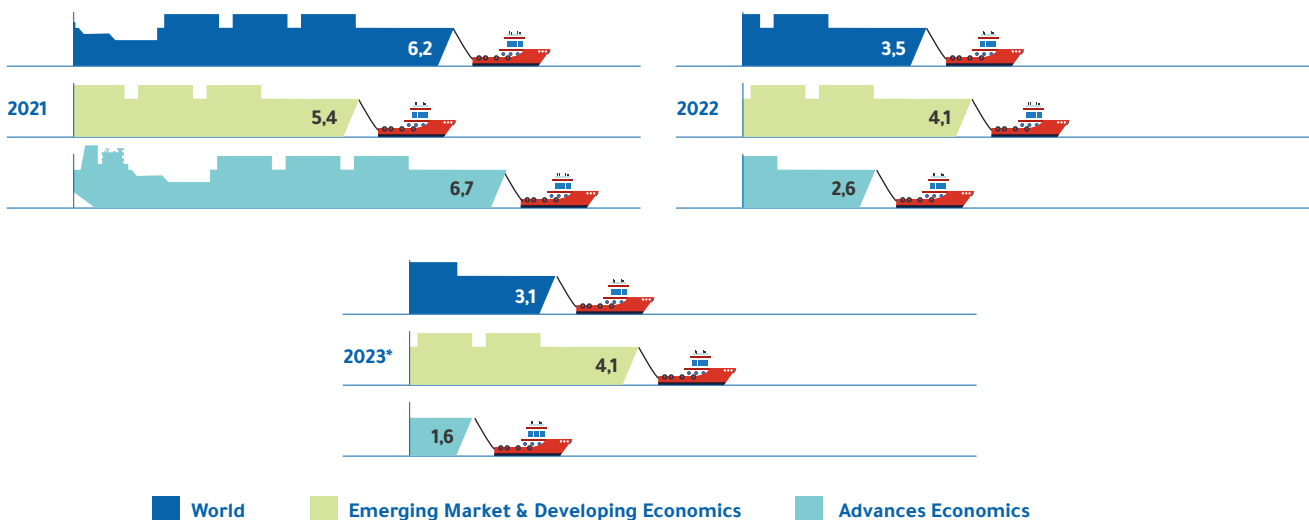
Berdasarkan data *International Monetary Fund* (IMF) dalam *World Economic Outlook (WEO) Update* Januari 2024 mencatatkan pertumbuhan ekonomi global tahun 2023 diestimasikan mencapai 3,1% yang mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022.

The development of the global economy experienced stable growth despite some challenges. In general, global economic growth has been moderate, although uneven across countries. Several countries are experiencing a robust recovery after the impact of the COVID-19 pandemic, while others are still struggling with economic uncertainty. In some developed countries, prices have increased, leading to inflation. This rise in inflation is mostly due to supply disruptions, labor costs, and loose monetary policy. It has led to fears of a potential recession in 2023.

The global economy in 2023 was affected by many factors, one of which was the energy crisis that hit several regions due to increased energy demand and supply disruptions. Geopolitical conflicts and trade tensions were also factors that affected global economic uncertainty. In addition, changes in fiscal and monetary policies in various countries also affected overall global economic conditions.

Based on data from the *International Monetary Fund* (IMF) in the *World Economic Outlook (WEO) Update* January 2024, global economic growth in 2024 is estimated to reach 3.1%, which experienced a decrease compared to 2023.

Tren Pertumbuhan Ekonomi Global (dalam %)
Global Economic Growth Trends (in%)



*estimasi

Sumber: *World Economic Outlook (WEO)*, *International Monetary Fund* (IMF), terbitan Januari 2024

*Estimation

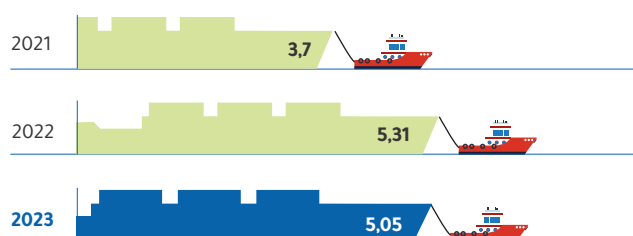
Source: *World Economic Outlook (WEO)*, *International Monetary Fund* (IMF), January 2024 issue

Kondisi Perekonomian Nasional National Economic Condition

Sementara itu, seiring dengan perkembangan ekonomi global, perekonomian Indonesia tahun 2023 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp20.892,4 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp75,0 juta atau US\$4.919,7. Ekonomi Indonesia tahun 2023 tumbuh sebesar 5,05%, lebih rendah dibanding capaian tahun 2022 yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,31%. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 13,96%. Sementara dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 9,83%.

Meanwhile, in line with global economic developments, Indonesia's economy in 2023, as measured by Gross Domestic Product (GDP) at current prices, reached Rp20,892.4 trillion, and GDP per capita reached Rp75.0 million or US\$4,919.7. Indonesia's economy in 2023 increased by 5.05%, lower than the achievement in 2022, which experienced an increase of 5.31%. In terms of production, the highest growth occurred in the Transportation and Warehousing Business Field at 13.96%. Meanwhile, from the expenditure side, the highest growth was achieved by Consumption Expenditure of Non-profit Institutions Serving Households (PK-LNPRT) by 9.83%.

Tren Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (dalam %)
Indonesia's Economic Growth Trends (in %)



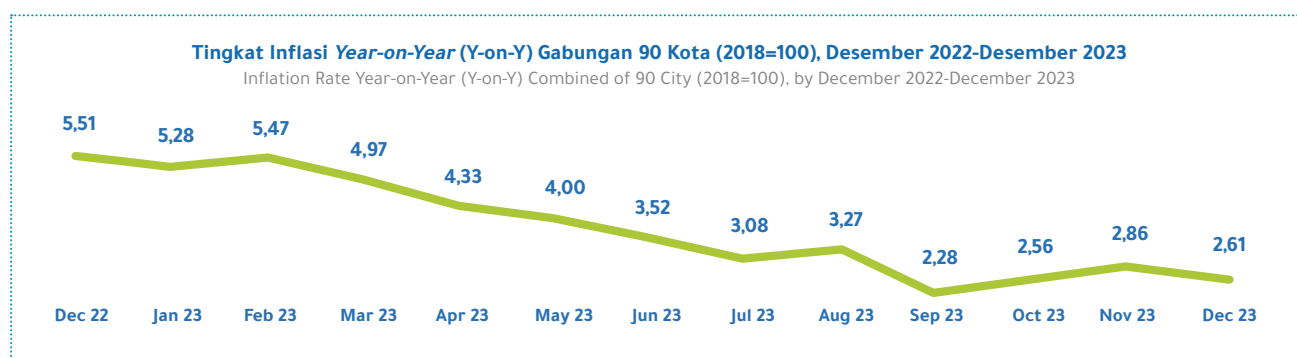
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), Berita Resmi Statistik

Source: Central Bureau of Statistics (BPS), Official Gazette of Statistics

Pada Desember 2023 terjadi inflasi *year on year* (y-on-y) sebesar 2,61% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 116,56. Inflasi tertinggi terjadi di Sumenep sebesar 5,08% dengan IHK sebesar 120,82 dan terendah terjadi di Bandung sebesar 0,63 persen dengan IHK sebesar 116,16.

In December 2023, there was year-on-year (y-on-y) inflation of 2.61%, with a Consumer Price Index (CPI) of 116.56. The highest inflation occurred in Sumenep by 5.08% with a CPI of 120.82, and the lowest occurred in Bandung by 0.63 percent with a CPI of 116.16.

Perkembangan Inflasi Indonesia Tahun 2023 (dalam %)
Indonesia's Inflation Development in 2023 (in %)



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), Berita Resmi Statistik

Source: Central Bureau of Statistics (BPS), Official Statistical News

Kondisi Industri Jasa Perkapalan, Jasa *Marine* dan Jasa Logistik

State of the Shipping, Marine, and Logistics Services Industry

Pada tahun 2023, PTK yang bergerak dalam bisnis jasa perkapalan, jasa marine, dan logistik dihadapkan dengan berbagai faktor yang mempengaruhi operasional dan kinerja. Berikut adalah beberapa faktor kunci yang berdampak pada sektor-sektor tersebut:

1. Perubahan Regulasi

Regulasi lingkungan yang lebih ketat, seperti aturan *International Maritime Organization* (IMO) 2020 yang mengatur batas sulfur dalam bahan bakar kapal, ditambah dengan tekanan untuk berkontribusi dalam penurunan emisi gas rumah kaca mendorong Perusahaan untuk mencari solusi lebih ramah lingkungan.

2. Teknologi dan Inovasi

Adopsi teknologi digital, seperti penggunaan sistem manajemen pelabuhan berbasis *Internet of Things* (IoT), *Artificial Intelligence* (AI) untuk optimasi rute, dan *blockchain* untuk transparansi rantai pasok, semakin marak. Otomatisasi di pelabuhan dan kapal tanpa awak mulai menjadi realitas, mengurangi biaya tenaga kerja namun membutuhkan investasi besar di awal.

3. Biaya Operasional

Biaya bahan bakar yang fluktuatif sangat mempengaruhi biaya operasional kapal. Harga minyak dunia yang tidak stabil menciptakan tantangan dalam perencanaan anggaran. Peningkatan biaya tenaga kerja di beberapa kawasan juga berkontribusi pada meningkatnya biaya operasional.

4. Ketersediaan dan Kondisi Infrastruktur

Kualitas dan kapasitas infrastruktur pelabuhan sangat mempengaruhi efisiensi logistik. Pelabuhan yang modern dengan fasilitas yang memadai mendukung operasi yang lebih lancar. Keterbatasan infrastruktur di beberapa kawasan dapat menyebabkan kemacetan dan memperlambat proses logistik.

5. Rantai Pasok Global

Disrupsi pada rantai pasok global, seperti yang disebabkan oleh pandemi COVID-19, menunjukkan kerentanan sistem logistik internasional dan mendorong perusahaan untuk meningkatkan ketahanan rantai pasok. Diversifikasi sumber dan pemasok menjadi strategi untuk mengurangi risiko.

6. Persaingan dan Konsolidasi

Pasar yang kompetitif mendorong Perusahaan untuk terus meningkatkan efisiensi dan menekan biaya. Konsolidasi perusahaan, seperti *merger* dan akuisisi, sering terjadi untuk mencapai skala ekonomi yang lebih besar dan meningkatkan daya saing.

In 2023, PTK engaged in the shipping, marine, and logistics services business, was faced with a variety of factors affecting its operations and performance. Below are some of the key factors impacting these sectors:

1. Changes in Regulation

Stricter environmental regulations, such as the International Maritime Organization (IMO) 2020 rules governing sulfur limits in ship fuel, along with pressure to contribute to the reduction of greenhouse gas emissions, encourage the Company to seek greener solutions.

2. Technology and Innovation

The adoption of digital technologies, such as the use of Internet of Things (IoT)-based port management systems, Artificial Intelligence (AI) for route optimization, and blockchain for supply chain transparency, is increasingly prevalent. Automation at ports and crewless ships is emerging as a reality, reducing labor costs yet requiring large upfront investments.

3. Operation Costs

Fluctuating fuel costs greatly affect vessel operation costs. Volatile world oil prices create challenges in budget planning. Increased labor costs in some regions also contribute to rising operation costs.

4. Infrastructure Availability and Condition

The quality and capacity of port infrastructure significantly affect logistics efficiency. A modern port with adequate facilities supports smoother operations. Infrastructure limitations in several regions can cause congestion and slow down the logistics process.

5. Global Supply Chain

Disruptions to global supply chains, such as those caused by the COVID-19 pandemic, demonstrate the vulnerability of international logistics systems and encourage companies to improve supply chain resilience. Diversification of sources and suppliers is a strategy to reduce risk.

6. Competition and Consolidation

The competitive market encourages the Company to continuously improve efficiency and reduce costs. Corporate consolidations, such as mergers and acquisitions, often occur to achieve greater economies of scale and improve competitiveness.



Tinjauan Operasional per Segmen

Operational Review by Segment

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir diubah berdasarkan Akta No. 104 tanggal 29 April 2021 dari Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta, Perusahaan menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang jasa *shipping activities*, *marine services*, dan *logistics services*, baik di dalam maupun luar negeri. Jasa Perusahaan juga termasuk kegiatan usaha lain terkait usaha di ketiga bidang tersebut.

Based on the Company's Articles of Association, which was most recently amended by Deed No. 104 dated April 29, 2021, from Aulia Taufani, S.H., notary in Jakarta, the Company runs business activities in the sectors of shipping activities, marine services, and logistics services, both at home and abroad. The Company's services also include other business activities related to the three fields.



Kinerja Operasional per Segmen

Operational Performance by Segment

Berikut ini diuraikan kinerja operasional per segmen usaha Perusahaan.

The following describes the operational performance by the Company's business segments.

Kinerja Operasional Segmen *Shipping Activities*

Operational Performance of the Shipping Activities Segment

Kegiatan Usaha serta Produk dan Layanan *Shipping Activities*

Business Activities, and Products and Services of Shipping Activities

Perusahaan memiliki *core business* sebagai penyedia kapal dan memberikan jasa operasional kapal, baik kapal milik maupun *brokerage* (*back-to-back*), dengan sistem sewa berjangka (*time charter*) dengan durasi sewa minimal antara 2-10 tahun, sewa jangka pendek (*spot charter*) berdurasi kurang dari 1 tahun, dan *bareboat charter*. Perusahaan melakukan sewa-menyewa kapal ini bekerja sama dengan pihak ketiga untuk berbagai jenis kapal penunjang kegiatan migas dan kapal sarana pelabuhan.

The Company's core business is ship provider and ship operations services, whether owned or brokerage, with a time charter system and a minimum charter duration of 2-10 years, spot charter with a duration of less than one year, and Bare Boat Charter. The Company conducts this ship leasing in cooperation with third parties for various supporting vessels for oil and gas activity and port facility vessels.

Produktivitas Segmen *Shipping Activities*

Productivity of the Shipping Activities Segment

Tabel Produktivitas Segmen *Shipping Activities*
Table of Productivity of the Shipping Activities Segment

Keterangan Description	Satuan Unit	2023	2022	2021	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) 2022-2023	
					selisih difference	persentase percentage
- Armada Kapal Milik Owned Ships	unit	369	369	344	-	-
- Armada Kapal <i>Back-to-back</i> Owned Back-to-back Ships	unit	67	62	54	5	8,06%
Jumlah Armada Kapal Total Owned Ships	unit	436	431	398	5	1,16%

Keterangan Description	Satuan Unit	2023	2022	2021	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) 2022-2023	
					selisih difference	persentase percentage
- <i>Commission Days</i> Kapal Milik Commission Days of Owned Ships	hari day	118.344	112.270	83.281	6.074	5,41%
- <i>Commission Days</i> Kapal <i>Back-to-back</i> Commission Days of Back-to-back Ships	hari day	21.395	19.664	8582	1.731	8,80%
Jumlah <i>Commission Days</i> Total Commission Days	hari day	139.739	131.934	91.863	7.805	5,92%
- <i>Commercial Days</i> Kapal Milik Commercial Days of Owned Ships	hari day	121.916	116.661	82.883	5.263	4,51%

Jumlah armada kapal milik pada tahun 2023 masih belum terdapat perubahan dibandingkan tahun 2022 yaitu sebanyak 369 unit.

The number of owned ships in 2023 still has not changed compared to 369 units in 2022.

Commission days adalah ketersediaan serta kelaiklautan kapal untuk dipasarkan. Jumlah *Commission Days* pada tahun 2023 meningkat dibandingkan tahun 2022. Hal ini terutama disebabkan adanya penambahan armada di akhir tahun 2022 yaitu inbreng 22 kapal *ex-marine* pada akhir November 2022, serta tambahan 2 Kapal LCT dan 2 set kapal TB-OB di akhir Desember 2022.

Commission days are the availability and seaworthiness of ships to be marketed. The number of Commission Days in 2023 increased compared to 2022. It was mainly due to the addition of the ships at the end of 2022, namely the inbreng of 22 ex-marine vessels at the end of November 2022, as well as the addition of two LCT vessels and two sets of TB-OB vessels at the end of December 2022.

Commercial Days adalah realisasi kapal yang tersewa oleh pencharter. Jumlah *Commercial Days* pada tahun 2023 meningkat 1% dibandingkan tahun 2022. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya penambahan 26 unit kapal.

Commercial Days is the realization of ships leased by the charterer. The number of Commercial Days in 2023 increased by 1% compared to 2022. It was mainly due to the addition of 26 vessels.

Kinerja Operasional Segmen *Marine Services* Operational Performance of the Marine Services Segment

Kegiatan Usaha serta Produk dan Layanan *Marine Services* Business Activities, and Products and Services of Marine Services

PTK menyediakan layanan jasa marine atau keagenan di seluruh pelabuhan di Indonesia, baik sebagai pelabuhan umum (keagenan umum), di pelabuhan khusus Pertamina (keagenan kapal-kapal *tanker charter*/milik Pertamina) maupun pihak ketiga.

PTK provides marine or agency services at all ports in Indonesia, both as a general port (general agency), at Pertamina's special port (agency for tanker charter/owned by Pertamina), and as a third party.

Layanan yang disediakan mencakup:

1. Pengurusan perizinan: *inout clearance* (formality);
2. Menyiapkan kebutuhan kapal dan *crew* (*crew supply*, *bunker handling*, *water supply*);
3. Menyiapkan kebutuhan kapal dan *crew*, membuat perhitungan dan mempertanggungjawabkan jasa layanan kapal; dan
4. Pengurusan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

Services provided include:

1. Licensing arrangement: in-out clearance (formality);
2. Preparing ship and crew needs (crew supply, bunker handling, water supply);
3. Preparing ship and crew needs, making calculations and accounting for ship services; and
4. Processing of Goods Import Notification (PIB) and Goods Export Notification (PEB) documents.

Produktivitas Segmen *Marine Services* Productivity of the Marine Services Segment

Tabel Produktivitas Segmen *Marine Services*
Table of Productivity of the Marine Services Segment

Keterangan Description	Satuan Unit	2023	2022	2021	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) 2022-2023	
					selisih difference	persentase percentage
Keagenan Tanker Pihak Ketiga Third Party Tanker Agency	<i>call</i>	3.385	2.282	2.194	1.103	48,33%
Keagenan <i>Charter</i> Milik Pertamina Pertamina Chartered Agency	<i>call</i>	21.840	22.403	20.425	(563)	(2,51)%
Keagenan Umum General Agency	<i>call</i>	3.034	5.505	5.833	(2.471)	(44,89)%
Jumlah Total	<i>call</i>	28.259	30.231	28.452	(1.972)	(6,52)%

Segmen bisnis keagenan PTK terdiri dari tiga jenis yaitu keagenan pihak ketiga, keagenan *Charter* Milik Pertamina (CMP) dan keagenan umum. Pada tahun 2023 total *call* keagenan mencapai 28.259 *call*.

Layanan keagenan pihak ketiga adalah sebesar 3.385 *call* yaitu mengalami peningkatan 48,33% atau 1.103 *call*, menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan tahun 2022. Hal ini disebabkan oleh dinamika pembelian minyak dan gas oleh PT Pertamina (Persero) ("Pertamina"), baik PT Kilang Pertamina Internasional ("KPI") atau PT Pertamina Patra Niaga ("Patra Niaga") yang cenderung lebih menggunakan metode *Cost and Freight* (CFR). Selain itu meningkatnya pengiriman Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan menggunakan kapal-kapal konsinyasi dan *spot charter* (termasuk menggantikan kapal-kapal milik yang dilakukan UPP oleh PT Pertamina International Shipping ("PIS")).

Layanan keagenan CMP pada tahun 2023 adalah sebesar 21.840 *call*, yaitu lebih rendah 2,51% atau 563 *call* dibandingkan tahun 2022. Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penggunaan kapal pihak ketiga (Non-CMP) dan untuk jumlah *call* CMP sangat berfluktuasi dengan permintaan pengapalan dari PIS.

Layanan keagenan umum pada tahun 2023 adalah sebesar 3.034 *call*, yaitu lebih rendah 44,89% atau 2.471 *call* dibandingkan tahun 2022. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan kegiatan keagenan untuk aktivitas *barge* dan kapal-kapal *non-tanker*.

PTK's agency business segment consists of three types, namely third-party agency, Pertamina's Chartered Agency (CMP), and general agency. In 2023, the total agency calls reached 28,259 calls.

Third-party agency services were 3,385 calls, an increase of 48.33% or 1,103 calls, showing better performance compared to 2022. It is due to the dynamics of oil and gas purchases by PT Pertamina (Persero) ("Pertamina"), either PT Kilang Pertamina Internasional ("KPI") or PT Pertamina Patra Niaga ("Patra Niaga"), which tend to use the Cost and Freight (CFR) method. In addition, an increase in fuel oil (BBM) shipments using consignment and spot charter vessels (including replacing UPP-owned ships by PT Pertamina International Shipping ("PIS")).

CMP agency services in 2023 were 21,840 calls, 2.51% or 563 calls lower than in 2022. It was mainly due to the increased utilization of third-party vessels (Non-CMP), and the number of CMP calls fluctuated significantly with the shipping demand from PIS.

General agency services in 2023 were 3,034 calls, 44.89% or 2,471 calls lower than in 2022. It was mainly due to a decrease in agency activities for barge activities and non-tanker vessels.

Kinerja Operasional Segmen *Logistics Services* Operational Performance of the Logistics Services Segment

Kegiatan Usaha serta Produk dan Layanan *Logistic Services* Business Activities, and Products and Services of Logistic Services

Kegiatan operasi kepelabuhan meliputi kegiatan Administrasi Pelabuhan Khusus, *Recognized Security Organization* (RSO), dan *Hydrography*, *Oceanography* dan Pemetaan (HOP), meliputi kegiatan usaha sebagai berikut:

Port operation activities include Special Port Administration, Recognized Security Organization (RSO), and Hydrography, Oceanography, and Mapping (HOM) activities, which include business activities as follows:

1. *Jasa Custom Clearance for Ships*
Kegiatan administrasi kepabeanan dimana pengurusan dokumen-dokumen suatu barang/ *cargo* yang akan diterima ataupun dikirimkan dari/ ke Luar Negeri harus dilengkapi sebelum kapal tiba atau berlayar di Instansi Bea dan Cukai.
2. *Logistic Base (Stevedoring, Cargodoring, Open Yard, Warehousing)*
Logistic Shorebase merupakan bisnis PTK yang dijalankan sendiri (di Tanjung Batu) dan dilaksanakan oleh anak perusahaan, PT Pertamina Port and Logistics (PPL) (dahulu PT Peteka Karya Samudera (di Kabil Batam)).
3. *General Service*
General Service merupakan bisnis Pertamina Trans Kontinental yang bersifat umum sebagai penunjang *bisnis shipping, marine* dan Jasa ini diberikan oleh Anak Usaha PTK.
4. *Ship Logistic Supply (Ship Chandler)*
Ship Logistic Supply (Ship Chandler) merupakan bisnis PT Pertamina Trans Kontinental yang dilaksanakan oleh anak perusahaan, PT Pertamina Marine Solutions ("PMSol") d/h Peteka Karya Gapura yang melaksanakan penyediaan bahan makanan bagi 87 Kapal Milik PT Pertamina International Shipping yang beroperasi di seluruh wilayah Indonesia.
5. Melakukan jasa pengolahan dan penyediaan air (*fresh water supply*) untuk keperluan kapal;
6. Melakukan usaha jasa bongkar muat barang dari dan ke kapal;
7. Mengadakan usaha di bidang international *freight forwarding*, termasuk tetapi tidak terbatas pada jasa pengangkutan, pengiriman dan pendistribusian barang;
8. Pengelolaan *logistic base*;
9. Jasa penyewaan dan pengelolaan gedung dan perkantoran;
10. *Trading* yang meliputi kegiatan pengadaan barang kebutuhan APD, *Pneumatic Rubber Render (PRF)*, dan *freight forwarding*.

1. Custom Clearance services for Ships
Customs administration activities where the processing of documents for goods/cargo to be received or sent from/to overseas must be completed before the ship arrives or sails at the Customs and Excise Agency.
2. Logistic Base (Stevedoring, Cargodoring, Open Yard, Warehousing)
Shorebase Logistic is a self-run PTK business (in Tanjung Batu) and executed by a subsidiary, PT Pertamina Port and Logistics (PPL) (formerly Peteka Karya Samudera (in Kabil Batam)).
3. General Service
General Service is Pertamina Trans Kontinental's general business to support the shipping, marine and logistics service businesses. This service is provided by PTK Subsidiary.
4. Ship Logistic Supply (Ship Chandler)
Ship Logistic Supply (Ship Chandler) is a business of PT Pertamina Trans Kontinental carried out by a subsidiary, PT Pertamina Marine Solutions ("PMSol"), formerly Peteka Karya Gapura, which provides food ingredients for 87 Ships Owned by Pertamina International Shipping operating throughout Indonesia.
5. Performing water treatment and supply services (fresh water supply) for ship needs;
6. Conducting business of loading and unloading services of goods from and to the ship;
7. Conducting business in international freight forwarding, including but not limited to freight services, delivery and distribution of goods;
8. Logistic base management;
9. Building and office leasing and management services;
10. Trading which includes procurement of goods for PPE, PRF (Pneumatic Rubber Render), and freight forwarding.

Produktivitas Segmen Logistic Services

Productivity of the Logistic Services Segment

Tabel Produktivitas Segmen Logistic Services

Table of Productivity of the Logistic Services Segment

Keterangan Description	Satuan Unit	2023	2022	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) 2022-2023	
				selisih difference	persentase percentage
<i>Cargo Handling</i>	ton	346.887	304.063	42.824	14,08%
<i>Vessel Berthing</i>	call	10.797	2.258	8.539	378,17%
<i>Cover Storage</i>	m ²	356.926	346.935	9.991	2,88%
<i>Open Storage</i>	m ²	849.300	744.428	104.872	14,09%
<i>Waste Management</i>	ton	5.674	2.984	2.690	90,15%

Pendapatan dan Profitabilitas per Segmen

Revenue and Profitability by Segment

Kontribusi Pendapatan per Segmen pada Pendapatan Perusahaan

Contribution of Revenue by Segment to the Company's Revenue

Jumlah pendapatan usaha PTK mengalami peningkatan 41,00% atau sebesar Rp1,96 triliun dibandingkan tahun 2022, menjadi sebesar Rp6,75 triliun pada tahun 2023. Kontribusi pendapatan segmen *marine services* sebesar 55,03% atau Rp3,71 triliun, disusul pendapatan segmen *shipping activities* sebesar 39,39% atau Rp2,66 triliun, dan pendapatan segmen *logistic services* sebesar 5,58% atau Rp381,47 miliar.

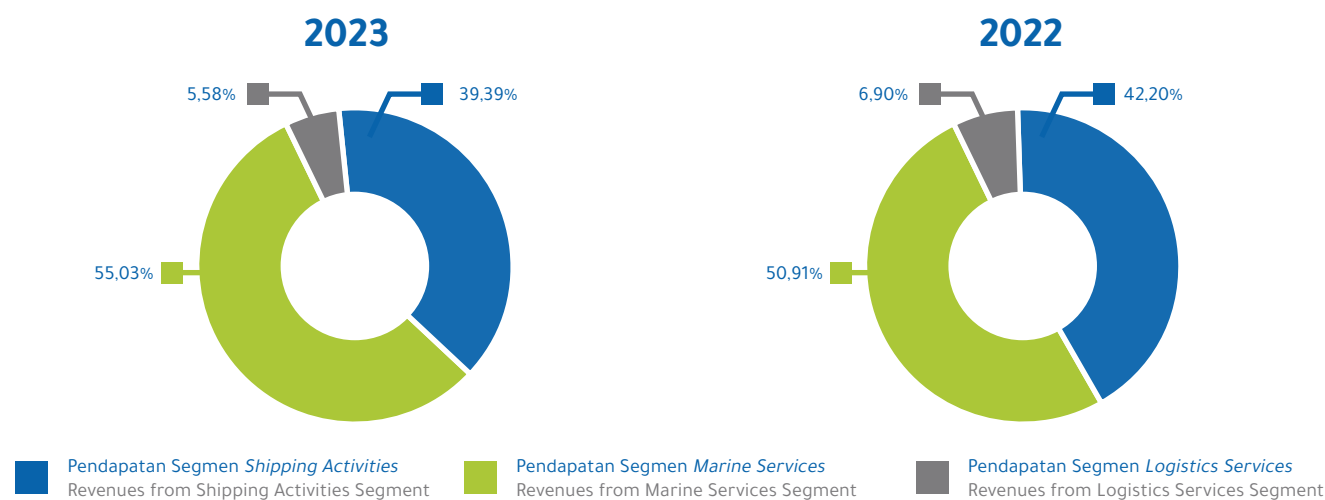
PTK's total operating revenue increased by 41.00% or Rp1.96 trillion compared to 2022, to Rp6.75 trillion in 2023. The contribution of the marine services segment revenue was 55.03% or Rp3.71 trillion, followed by the shipping activities segment revenue of 39.39% or Rp2.66 trillion, and the logistic services segment revenue of 5.58% or Rp381.47 billion.

Tabel Kontribusi Pendapatan per Segmen pada Pendapatan Perusahaan

Table of Contribution of Revenue by Segment to the Company's Revenue

(dalam Rp juta, kecuali dinyatakan lain) (in Rp million, unless otherwise state)

Keterangan Description	2023		2022		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	Nominal	Kontribusi Contribution	Nominal	Kontribusi Contribution	selisih difference	persentase percentage
Pendapatan Segmen <i>Shipping Activities</i> Revenues from Shipping Activities Segment	2.657.404	39,39%	2.019.115	42,20%	579.203	28,69%
Pendapatan Segmen <i>Marine Services</i> Revenues from Marine Services Segment	3.712.632	55,03%	2.435.771	50,91%	1.330.679	54,63%
Pendapatan Segmen <i>Logistics Services</i> Revenues from Logistics Services Segment	381.473	5,58%	330.026	6,90%	51.714	15,67%
Jumlah Pendapatan Total Revenues	6.746.509	100,00%	4.784.913	100,00%	1.961.596	41,00%



Kontribusi Laba Bruto per Segmen pada Laba Bruto Perusahaan

Contribution of Gross Profit by Segment to the Company's Gross Profit

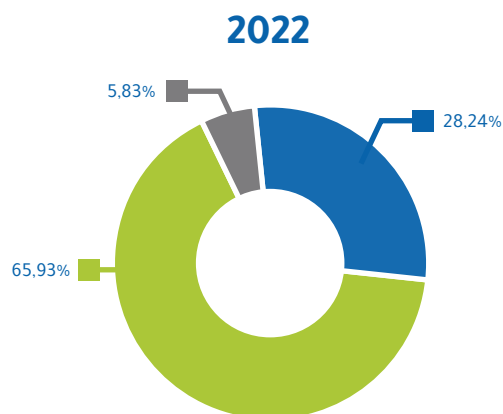
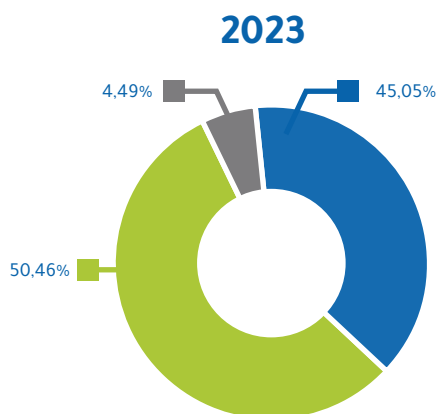
Jumlah laba bruto PTK mengalami peningkatan 57,32% atau sebesar Rp944,59 miliar dibandingkan tahun 2022, menjadi sebesar Rp2,59 triliun pada tahun 2023. Kontribusi laba bruto segmen *marine services* sebesar 50,46% atau Rp1,31 triliun, disusul laba bruto segmen *shipping activities* sebesar 45,05% atau Rp1,17 triliun, dan laba bruto segmen *logistic services* sebesar 4,49% atau Rp116,36 miliar.

The total gross profit of PTK increased by 57.32% or Rp944.59 billion compared to 2022, to Rp2.59 trillion in 2023. The contribution of the marine services segment gross profit was 50.46% or Rp1.31 trillion, followed by the shipping activities segment gross profit of 45.05% or Rp1.17 trillion, and the logistic services segment gross profit of 4.49% or Rp116.36 billion.

Tabel Kontribusi Laba Bruto per Segmen pada Laba Bruto Perusahaan
Table of Contribution of Gross Profit by Segment to the Company's Gross Profit

(dalam Rp juta, kecuali dinyatakan lain) (in Rp million, unless otherwise stated)

Laba Bruto Segmen Segment Gross Profit	2023		2022		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	Nominal	Kontribusi Contribution	Nominal	Kontribusi Contribution	selisih difference	persentase percentage
<i>Shipping Activities</i>	1.168.049	45,05%	465.390	28,24%	638.996	137,30%
<i>Marine Services</i>	1.308.100	50,46%	1.086.487	65,93%	288.465	26,55%
<i>Logistics Services</i>	116.365	4,49%	96.049	5,83%	17.129	17,83%
Jumlah Laba Bruto Total Gross Profit	2.592.516	100,00%	1.647.926	100,00%	944.590	57,32%



■ Laba Bruto *Shipping Activities*
Shipping Activities Segment Gross Profit

■ Laba Bruto *Marine Services*
Marine Services Segment Gross Profit

■ Laba Bruto *Logistics Services*
Logistics Services Segment Gross Profit

Sinergi dengan Pertamina Group

Synergy with Pertamina Group

Sinergi yang terbangun akan mendorong PTK dan seluruh anak usaha Pertamina dapat memanfaatkan fasilitas yang sama sehingga efisiensi dapat ditingkatkan. Efisiensi mendorong kinerja PTK dan Pertamina Group menjadi lebih baik, sehingga akan mengoptimalkan pencapaian pendapatan maupun laba usaha, serta mendukung pengembangan usaha.

The established synergy is going to encourage PTK and all Pertamina subsidiaries to utilize the same facilities so as to be able to increase the efficiency. Efficiency drives PTK and Pertamina Group's performance to be better, thus it will optimize the achievement of revenue and operating profits, as well as support the business development.

(dalam Rp juta, kecuali dinyatakan lain) (in Rp million, unless otherwise stated)

Keterangan Description	2023	2022	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) 2022-2023	
			selisih difference	persentase percentage
PT Pertamina Patra Niaga	2.178.552	1.329.911	848.641	63,81%
PT Pertamina International Shipping	1.356.306	987.960	368.346	37,28%
PT Kilang Pertamina International	982.642	784.205	198.437	25,30%
PT Pertamina Hulu Indonesia	256.768	-	256.768	100,00%
PT Pertamina Retail	245.053	197.581	47.472	24,03%
PT Pertamina Hulu Energi OSES	204.278	88.435	115.843	130,99%
PT Pertamina Arun Gas	153.012	151.294	1.718	1,14%
PT Pertamina Energy Terminal	88.150	87.050	1.100	1,26%
PT Pertamina Hulu Energi ONWJ	39.048	54.287	(15.239)	(28,07)%
PT Pertamina Gas Negara LNG	35.175	19.814	15.361	77,53%
PT Pertamina Hulu Rokan	31.652	1.837	29.815	1.623,03%
PT Nusantara Regas	30.855	7.944	22.911	288,41%
PT Pertamina Hulu Mahakam	19.538	82.521	(62.983)	(76,32)%
PT Kilang Pertamina Balikpapan	11.866	3.115	8.751	280,93%
PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur	10.597	70.801	(60.204)	(85,03)%
PT Trans Yeoung Maritime	10.336	-	10.336	100,00%
PT Pelindo (Persero)	7.373	70.838	(63.465)	(89,59)%
PT Pertamina (Persero)	5.707	7.230	(1.523)	(21,07)%
PT Pertamina Hulu Energi WMO	4.674	5.730	(1.056)	(18,43)%
PT Pertamina EP	4.417	1.367	3.050	223,12%
PT Pertamina Hulu Energi NSO	3.860	1.388	2.472	178,10%
PT Pertamina Hulu Energi JM	3.715	3.762	(47)	(1,25)%
PT Pertamina Drilling Services Indonesia	3.433	-	3.433	100,00%
PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia	2.333	-	2.333	100,00%
PT Pertamina Patra Logistik	-	147.539	(147.539)	-
PT Pertamina Hulu Sanga Sanga	-	7.500	(7.500)	-
PT Pertamina Lubricants	-	4.459	(4.459)	-
PT Pratama Mitra Sejati	-	4.046	(4.046)	-
PT Pelindo Energi Logistik	-	2.974	(2.974)	-
Lain-lain (Masing-masing di bawah Rp1.000) Others (Each under Rp1,000)	1.663	1.287	376	29,22%
Jumlah Total	5.691.003	4.124.875	1.566.128	37,97%



Rencana Strategis

Strategic Plan

Rencana Strategis Jangka Panjang Tahun 2022-2027

Long-term Strategic Plan in 2022-2027

Strategi Korporat jangka panjang dimuat dalam rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) yang disahkan oleh Pemegang Saham. Periode RJPP PTK yang berlaku adalah periode tahun 2022-2027 dengan rencana strategis secara umum sebagai berikut:

1. Jasa Perkapalan

- Meningkatkan *operational excellence* yang mengutamakan aspek Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan (K3LL), kompetensi awak kapal, dan *standard Service Level Agreement* untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.
- Penambahan jenis dan jumlah armada kapal milik untuk melayani segmen industri minyak & gas melalui sinergi grup Pertamina dan kemitraan strategis.
- Diversifikasi basis pelanggan dalam lingkup grup Pertamina, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), dan pasar potensial di sektor migas dan maritim.
- Efisiensi biaya operasi dan pemeliharaan kapal melalui program perawatan armada kapal secara terintegrasi antara pengawas (*superintendent*), awak kapal, galangan kapal, dan vendor dengan optimalisasi sistem informasi *digital Planned Maintenance System*.
- Pemantauan dan pembaruan sertifikat laik laut kapal (*seaworthiness*) untuk menjaga serta mencapai target hari operasi kapal.
- Divestasi kapal milik yang sudah tidak produktif dan fokus pada operasional kapal dengan prospek pasar yang lebih menguntungkan.

2. Jasa Marine

- Meningkatkan kualitas jasa keagenan kapal agar lebih cepat, efektif, dan efisien dengan tarif kompetitif melalui optimalisasi sistem informasi pada aspek pelayanan administrasi, untuk kebutuhan logistik kapal, serta penyelesaian *disbursement*.
- Mengembangkan kompetensi SDM dan menambah aset produksi dalam bisnis jasa marine seperti pengerukan alur pelayaran, pemeliharaan sarfas pelabuhan, teknik bawah air, suplai air baku untuk kapal & industri, penyediaan awak kapal, *ship management*, *waste management*, dan *bunker handling*.
- Menambah jumlah pelabuhan dalam bisnis *port operation services* melalui kegiatan *Recognized Security Organization* dan penerapan *International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code*.

3. Jasa Logistik

- Menambah area kerja bidang kepelabuhanan melalui kemitraan dengan pemilik pelabuhan, khususnya pelabuhan strategis dengan aktivitas perkapalan yang sibuk dan frekuensi bongkar-muat yang tinggi.
- Membangun *logistic shorebase* yang berdekatan dengan wilayah eksplorasi blok migas lepas pantai Pertamina dan KKKS sebagai *one-stop services logistic shorebase* berstandar internasional.
- Menambah infrastruktur, aset produksi, dan peningkatan kompetensi SDM untuk kegiatan badan usaha pelabuhan (*freight forwarding, cargodoring, stevedoring*).

The long-term Corporate Strategy is contained in the Company's Long-term Plan (RJPP), which is authorized by the Shareholders. PTK's RJPP period is 2022-2027 with the following general strategic plan:

1. Shipping Services

- Improving operational excellence by prioritizing Occupational Health, Safety, and Environment (OHSE) aspects, ship crew competencies, and standard Service Level Agreements to meet customer needs.
- Adding the type and number of owned fleets to serve the oil & gas industry segment through Pertamina group synergy and strategic partnerships.
- Diversification of the customer base within the Pertamina group, Contractors of Cooperation Contract (KKKS), and potential markets in the oil and gas and maritime sectors.
- Efficiency of ship operation and maintenance costs through an integrated fleet maintenance program between superintendents, crew members, shipyards, and vendors by optimizing the Planned Maintenance System digital information system.
- Monitoring and renewal of ship seaworthiness certificates to maintain and achieve target ship operating days.
- Divestment of unproductive owned ships and focus on ship operations with more favorable market prospects.

2. Marine Services

- Improving the quality of ship agency services to make them faster, more effective and efficient at competitive rates through optimizing information systems in the aspect of administrative services, supplying ship logistics needs, and disbursement settlement.
- Developing HR competence and adding production assets in the marine services business, such as shipping channel dredging, port infrastructure maintenance, underwater engineering, raw water supply for ships & industry, crew provision, ship management, waste management, and bunker handling.
- Increasing the number of ports in the port operation services business through Recognized Security Organization activities and implementing the International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code.

3. Logistic Services

- Increasing the work area in the port sector through partnerships with port owners, especially strategic ports with busy shipping activities and high frequency of loading and unloading.
- Building a shore base logistics adjacent to the Pertamina and PSC Contractors' offshore oil and gas exploration areas as one-stop shore base logistics services with international standards.
- Adding infrastructure, production assets, and increasing HR competencies for port business entity activities (freight forwarding, cargodoring, stevedoring).

4. Digitalisasi
 - a. Digitalisasi di seluruh mata rantai bisnis (*end to end*) untuk menunjang produktivitas dan kecepatan pengambilan keputusan.
 - b. Meningkatkan *maritime cyber security awareness* pada awak kapal dan operator untuk keamanan pertukaran informasi elektronik.
5. Finansial
 - a. Meningkatkan kelancaran arus kas perusahaan melalui restrukturisasi skema pinjaman dari eksternal.
 - b. Mendapatkan sumber pendanaan melalui mitra strategis untuk investasi kapal dan proyek lainnya melalui skema pembiayaan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang dengan tingkat suku bunga pinjaman yang terjangkau.
 - c. Percepatan perolehan piutang macet untuk menjaga arus kas perusahaan.
6. Organisasi dan Manajemen Portofolio
 - a. Transformasi budaya organisasi yang agile dan kompetitif guna menghadapi dunia persaingan yang *Volatility, Uncertainty, Complexity, and Ambiguity* (VUCA).
 - b. Mengembangkan organisasi serta *workforce planning* yang mendukung perkembangan bisnis yang selaras dengan arah bisnis induk perusahaan.
 - c. Meningkatkan *Strategic People Development & Management*.
 - d. Optimalisasi portofolio Anak Perusahaan.
7. Citra Perusahaan
 - a. Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) seluruh pekerja untuk komitmen integritas, kepatuhan terhadap hukum, hubungan & lingkungan kerja, serta konflik kepentingan sesuai Tata Nilai AKHLAK.
 - b. Memperluas customer *referral & social awareness* melalui penggunaan *brand* "Transko" sebagai identitas perusahaan dalam kegiatan bisnis korporat dan sosial perusahaan pada *platform multimedia*.
 - c. Berperan aktif dalam kegiatan pengembangan masyarakat dan komunitas melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan edukasi.

4. Digitalization
 - a. Digitalization throughout the business chain (*end-to-end*) to support productivity and speed of decision-making.
 - b. Increasing maritime cyber security awareness among ship crews and operators for the security of electronic information exchange.
5. Financial
 - a. Increasing the smoothness of the Company's cash flow through restructuring external loan schemes.
 - b. Obtaining funding sources through strategic partners for ship investment and other projects through short-term, medium-term, and long-term financing schemes with affordable loan interest rates.
 - c. Accelerating the acquisition of bad debts to maintain the Company's cash flow.
6. Portfolio Organization and Management
 - a. Transformation of an agile and competitive organizational culture to face a Volatility, Uncertainty, Complexity, and Ambiguity (VUCA) world of competition.
 - b. Developing an organization and workforce planning that supports business development in line with the parent company's business direction.
 - c. Improving Strategic People Development & Management.
 - d. Optimizing the portfolio of Subsidiaries.
7. Corporate Image
 - a. Implementation of GCG by all employees for commitment to integrity, compliance with laws, relations & work environment, as well as conflicts of interest according to the AKHLAK Values.
 - b. Expanding customer referrals & social awareness by using the "Transko" brand as a corporate identity in the Company's corporate and social business activities on multimedia platforms.
 - c. Taking on an active role in social and community development activities through Corporate Social Responsibility (CSR) and education programs.



Rencana Strategis Tahun 2023 Strategic Plan in 2023

PTK bergerak dalam bisnis pelayaran dan jasa maritim, dengan tiga fokus utama yakni penyewaan kapal (*shipping activities*), jasa *marine* (*marine services*), dan logistik (*logistic services*). Berikut rencana kerja dan program strategis PTK Tahun 2023:

1. Shipping Activities

- a. Pemetaan, penilaian dan evaluasi kembali atas kapal-kapal Pertamina yang dialihkan kepada PTK agar dapat terutilisasi secara optimal sehingga dapat ditentukan langkah tindak lanjut atas kapal yang dinilai tidak produktif.
- b. Membidik pengembangan ke segmen pasar penyediaan kapal di *Subholding Upstream*, dengan tetap menjaga aspek *Health, Safety, Security and Environment* (HSSE) dan *operational excellence* kapal untuk *customer existing* (*Subholding Commercial & Trading, Refining & Petrochemical*)
- c. Melanjutkan penerapan program *Computerized Maintenance Management System* pada seluruh kapal milik guna menjaga kehandalan kapal untuk mencapai target *commission days* dan *commercial days*.

PTK is engaged in the shipping and maritime services business, with three main focuses: shipping activities, marine services, and logistics services. The following is PTK's work plan and strategic program in 2023:

1. Shipping Activities

- a. Mapping, assessing, and re-evaluating Pertamina's ships transferred to PTK so that they can be optimally utilized so that follow-up steps for ships that are considered unproductive can be determined.
- b. Targeting the development of the ship supply market segment in the Upstream Subholding while maintaining the Health, Safety, Security, and Environment (HSSE) aspect and ship operational excellence for existing customers (Subholding Commercial & Trading, Refining & Petrochemical).
- c. Continue implementing the Computerized Maintenance Management System program on owned ships to maintain ship reliability and achieve target commission and commercial days.

- d. Meningkatkan HSSE *excellence* dan *operational excellence* melalui program pelatihan/ peningkatan kompetensi *crew* guna menjaga kepercayaan pelanggan.
- e. Menerapkan *e-Procurement* dan strategi kontrak payung dengan *vendor/supplier spare part* terkait pemenuhan *maintenance* kapal untuk mencapai target *commission and commercial days*.

2. Marine Services

- a. Investasi penambahan alat penunjang kegiatan *oil spill response* dan teknik bawah air.
- b. Sertifikasi dan peningkatan kompetensi pekerja untuk pekerjaan *marine & port engineering*, perawatan sarfas pelabuhan, pengerukan alur pelayaran.

3. Logistic Services

- a. Investasi penambahan *heavy equipment* dan *cargo handling* pada Peteka Shorebase Tanjung Batu (PSTB) untuk meningkatkan *operational excellence*.
- b. Pengembangan bisnis *logistic shorebase* Kabil melalui kemitraan strategis.
- c. Perluasan potensial market *logistic shorebase* di wilayah Indonesia timur yang bisa menjadi hub atau *centre point* yang dekat dengan proyek eksplorasi minyak dan gas (migas).

- d. Improving HSSE and operational excellence through training programs/improvement of crew competence to maintain customer trust.
- e. Implement e-Procurement and umbrella contract strategies with spare part vendors/suppliers related to the fulfillment of ship maintenance to achieve target commissions and commercial days.

2. Marine Services

- a. Investment in additional tools to support oil spill response activities and underwater techniques.
- b. Certification and improvement of worker competency for marine & port engineering work, port infrastructure maintenance, and shipping channel dredging.

3. Logistic Services

- a. Investment in the addition of heavy equipment and cargo handling at the Peteka Shore base Tanjung Batu (PSTB) to enhance operational excellence.
- b. Development of Kabil shore base logistics business through strategic partnerships.
- c. Expansion of potential shore base logistics market in eastern Indonesia that can become a hub or center point adjacent to oil and gas exploration projects.



Aspek Pemasaran

Marketing Aspect

Segmentasi Pasar

Market Segmentation

Sejak bulan Mei 2021, dengan pelaksanaan restrukturisasi Pertamina di mana Fungsi Marine bergabung, PTK bertransformasi bisnis mengusung layanan dengan dibagi menjadi 3 (tiga) kategori utama yaitu jasa *Shipping Activities*, *Marine Services*, dan *Logistics Services*. Pangsa Pasar PTK adalah pelaku usaha yang bergerak di bidang usaha industri migas, dengan target pasar Pertamina Group dan Non Pertamina Group. Kegiatan *Ex-Marine Holding* diramu dengan model *Bundling* dan *Unbundling* kepada *Subholding Commercial & Trading* dan *Subholding Refinery & Petrochemical*.

Since May 2021, with the implementation of Pertamina's restructuring where the Marine Function joined, PTK has transformed its business into services by dividing them into 3 (three) main categories, namely *Shipping Activities*, *Marine Services*, and *Logistics Services*. PTK Market Share are business actors engaged in the oil and gas industry, with the target market being the Pertamina Group and Non-Pertamina Group. *Ex-Marine Holding* activities are combined with the *Bundling* and *Unbundling* models for *Commercial & Trading Subholdings* and *Refinery & Petrochemical Subholdings*.

Bisnis Bundling

Bundling Business

Bisnis *Port Management Bundling* adalah gabungan dari berbagai layanan bisnis *marine* yang ditawarkan menjadi satu paket bisnis. Bisnis *Bundling* terdiri dari beberapa pekerjaan meliputi:

1. *Port Operation*,
2. Kapal-kapal ringan,
3. *Pilotage*,
4. *Oil Spill Response*,
5. *STS Support Provider*,
6. *Periodic Underwater Inspection*.

The *Port Management Bundling* business is a combination of various marine business services offered into one business package. The *Bundling* business consists of several jobs including:

1. *Port Operation*,
2. *Light Vessels*,
3. *Pilotage*,
4. *Oil Spill Response*,
5. *STS Support Provider*,
6. *Periodic Underwater Inspection*.

Bisnis Unbundling Unbundling Business

Bisnis *Port Management Unbundling* adalah suatu layanan *marine* di luar bisnis *bundling*, yang meliputi pekerjaan yaitu:

1. *Periodic Underwater Inspection*,
2. *Port Visual Inspection & Minor Preventive Maintenance*,
3. *Underwater works*,
4. *Port Grading Assessment*.

The Port Management Unbundling business is a marine service outside the bundling business, which includes work namely:

1. Periodic Underwater Inspection,
2. Port Visual Inspection & Minor Preventive Maintenance,
3. Underwater works,
4. Port Grading Assessment.

Pangsa Pasar Market Share

Untuk menjaga segmen pasar yang telah dimiliki, PTK secara konsisten memelihara hubungan baik dengan pelanggan *existing* melalui pemenuhan kebutuhan kapal dengan cara akuisisi kapal baru, pembelian *secondhand ship* serta penyediaan kapal sementara dengan mekanisme kerja sama B2B.

To maintain the market segment that has been owned, PTK consistently maintains good relations with existing customers through the fulfillment of ship needs by acquiring new ships, purchasing secondhand ships, and providing temporary ships with B2B cooperation mechanisms.

Pangsa Pasar Berdasarkan Profil Pelanggan PTK Tahun 2023 Market Share by Customer Profile of PTK in 2023

(dalam Rp juta, kecuali dinyatakan lain) (in Rp million, unless otherwise stated)

Segmen Bisnis Business Segment	Pertamina	Non-Pertamina (3 rd Party)	Jumlah Total	% per Segmen % per Segment
Shipping Activities	2.260.612	337.706	2.598.318	38,51%
Marine Services	3.239.828	526.622	3.766.450	55,83%
Logistics Services	190.563	191.178	381.741	5,66%
Jumlah Total	5.691.003	1.055.506	6.746.509	100,00%
% per Pelanggan % per Customer	84,35%	15,65%	100,00%	

Strategi Pemasaran Tahun 2023 Marketing Strategy in 2023

Strategis pemasaran PTK yang diimplementasikan di sepanjang tahun 2023 secara umum mencakup:

1. Memperkuat Eksisting Bisnis
Strategi ini mencakup dua fokus program strategis yaitu:
 - a. *Revenue Optimization*
 - Memperkuat eksistensi di *captive market* melalui sinergi *Pertamina Group*,
 - Pertumbuhan pendapatan dan laba dengan tingkat kesehatan yang baik,
 - Menyediakan Layanan Jasa *Maritime* Terintegrasi (*one-stop maritime services provider*) dengan standar layanan terbaik kelas global,
 - Meningkatkan *cross selling* pada semua segmen bisnis PTK,
 - *Alignment* dengan fungsi operasional dan *enabler* dalam rangka optimalisasi aset untuk peningkatan *margin*.
 - b. *Customer Focus*
 - *Recofussing* segmen bisnis PTK dan Anak Perusahaan (AP) PTK,
 - Meningkatkan *customer engagement* dengan memberikan layanan yang terbaik,
 - *Customer Focus* dengan peningkatan *service mindset*.
2. Memperluas Pertumbuhan Bisnis
 - a. Bersinergi dengan industri maritim dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ("SKK Migas") untuk meningkatkan *market share* di bisnis *upstream*,

The PTK marketing strategies implemented throughout 2023 generally include:

1. Strengthening Existing Business
This strategy includes two strategic program focuses, namely:
 - a. Revenue Optimization
 - Strengthening its existence in the captive market through *Pertamina Group* synergy,
 - Revenue and profit growth with a good level of soundness,
 - Providing Integrated Maritime Services (*one-stop maritime services provider*) with the best global service standards,
 - Increasing cross-selling in all PTK business segments,
 - Alignment with the operational and enabler functions to optimize assets for margin improvement.
 - b. Customer Focus
 - Refocusing the business segments of PTK and PTK Subsidiaries (AP),
 - Improving customer engagement by providing the best service,
 - Customer Focus with an improved service mindset.
2. Expanding Business Growth
 - a. Synergizing with the maritime industry and the Special Task Force for Upstream Oil and Gas Business Activities ("SKK Migas") to increase market share in the upstream business,

- b. Berkolaborasi dengan Perusahaan Jasa *Marine* sejenis untuk dapat menawarkan harga yang kompetitif kepada pelanggan,
- c. *Strategic Partnership* untuk pengembangan pasar,
- d. Eksplorasi pengembangan *Green Business* untuk menarik pasar domestik dan internasional,
- e. *Market research* untuk optimasi *market share*.

- b. Collaborating with similar Marine Service Companies to be able to offer competitive prices to customers,
- c. Strategic Partnership for market development,
- d. Exploration of Green Business development to attract domestic and international markets,
- e. Market research for market share optimization.

Analisis Kinerja Keuangan

Analysis of Financial Performance

Uraian dan analisis kinerja keuangan disajikan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian PT Pertamina Trans Kontinental untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (PwC Indonesia) tanggal 7 Maret 2024 dengan opini **"wajar dalam semua hal yang material"**. Laporan Keuangan Konsolidasian sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya, Laporan Keuangan Konsolidasian dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan Laporan Tahunan ini pada bagian tersendiri.

The description and analysis of financial performance are presented based on the Consolidated Financial Statements of PT Pertamina Trans Kontinental for the years ended December 31, 2023, and 2022, which have been audited by the Public Accounting Firm (KAP) Rintis, Jumadi, Rianto & Partner (PwC Indonesia) dated March 7, 2024, with the opinion **"fair in all material respects"**. The Consolidated Financial Statements comply with the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) applicable in Indonesia. Furthermore, the Consolidated Financial Statements are attached as an integral part of this Annual Report in a separate section.

Analisis Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Analysis of the Consolidated Statement of Financial Position

Posisi keuangan PTK tahun 2023 terdiri dari jumlah aset sebesar Rp9,02 triliun, jumlah liabilitas sebesar Rp4,38 triliun, dan jumlah ekuitas sebesar Rp4,64 triliun.

PTK's financial position in 2023 consisted of total assets of Rp9.02 trillion, total liabilities of Rp4.38 trillion, and total equity of Rp4.64 trillion.

Tabel Posisi Keuangan
Table of Financial Position

(dalam Rp juta, kecuali dinyatakan lain) (in Rp million, unless otherwise stated)

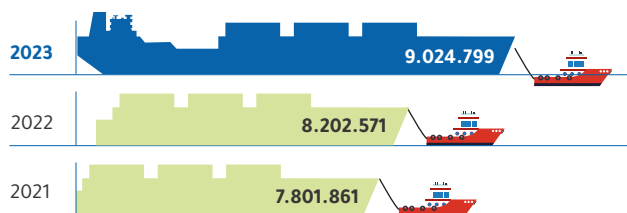
Keterangan Description	2023	2022	2021	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) 2022-2023	
				selisih difference	persentase percentage
Aset Asset					
Aset Lancar Current Assets	4.668.039	3.811.707	3.373.379	856.331	22,47%
Aset Tidak Lancar Non-current Assets	4.356.761	4.390.864	4.428.482	(34.103)	(0,78)%
Jumlah Aset Total Assets	9.024.799	8.202.571	7.801.861	822.228	10,02%
Liabilitas dan Ekuitas Liabilities and Equity					
Liabilitas Liabilities					
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	3.548.308	3.613.513	3.133.013	(65.205)	(1,80)%
Liabilitas Jangka Panjang Non-current Liabilities	836.106	981.479	1.219.734	(145.373)	(14,81)%
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	4.384.414	4.594.992	4.352.747	(210.578)	(4,58)%
Jumlah Ekuitas Total Equity	4.640.385	3.607.579	3.449.114	1.032.806	28,63%
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	9.024.799	8.202.571	7.801.861	822.228	10,02%

Aset Assets

Jumlah aset PTK pada tahun 2023 adalah sebesar Rp9,02 triliun, yaitu mengalami peningkatan 10,02% atau sebesar Rp822,23 miliar dibandingkan tahun 2022. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh adanya peningkatan pada aset lancar.

PTK's total assets in 2023 were Rp9.02 trillion, an increase of 10.02% or Rp822.23 billion compared to 2022. The increase was mainly driven by an increase in current assets.

Grafik Jumlah Aset (dalam Rp juta)
Chart of Total Assets (in Rp million)



Aset Lancar Current Assets

Jumlah aset lancar PTK pada tahun 2023 adalah sebesar Rp4,67 triliun, yaitu mengalami peningkatan 22,47% atau sebesar Rp856,33 miliar dibandingkan tahun 2022. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh adanya peningkatan pada kas dan setara kas, aset kontrak dan pajak dibayar dimuka, namun diimbangi dengan penurunan piutang usaha sebesar Rp321,93 miliar.

PTK's total current assets in 2023 were Rp4.67 trillion, an increase of 22.47% or Rp856.33 billion compared to 2022. The increase was mainly driven by an increase in cash and cash equivalents, contract assets, and prepaid taxes, but offset by a decrease in trade receivables of Rp321.93 billion.

Tabel Posisi Keuangan
Table of Current Assets

(dalam Rp juta, kecuali dinyatakan lain) (in Rp million, unless otherwise stated)

Keterangan Description	2023	2022	2021	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) 2022-2023	
				selisih difference	persentase percentage
Kas dan setara kas Cash and cash equivalents	1.843.431	1.125.624	1.263.166	717.807	63,77%
Kas yang dibatasi penggunaannya Restricted cash	2.072	1.779	592	293	16,47%
Piutang usaha Trade receivables	962.842	1.284.773	1.131.308	(321.931)	(25,06)%
Aset kontrak Contract assets	1.555.024	1.277.205	853.320	277.819	21,75%
Piutang sewa pembiayaan Finance lease receivables	22.574	22.798	20.876	(224)	(0,98)%
Persediaan Inventories	-	-	65	-	-
Piutang lain-lain Other receivables	59	59	6.159	-	0,00%
Pajak dibayar dimuka - pajak lain-lain Prepaid taxes - other taxes	124.444	24.076	17.752	100.368	416,88%
Uang muka dan biaya dibayar dimuka Advances and prepayments	157.592	75.393	80.141	82.199	109,03%
Jumlah Aset Lancar Total Current Assets	4.668.038	3.811.707	3.373.379	856.331	22,47%

Aset Tidak Lancar Non-current Assets

Jumlah aset tidak lancar PTK pada tahun 2023 adalah sebesar Rp4,36 triliun, yaitu mengalami penurunan 0,78% atau sebesar Rp34,10 miliar dibandingkan tahun 2022. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh adanya penurunan pada aset tetap, piutang sewa pembiayaan dan aset lain-lain, diimbangi dengan kenaikan pada aset hak guna, aset pajak tangguhan, investasi pada ventura bersama dan pajak dibayar dimuka.

PTK's total non-current assets in 2023 were Rp4.36 trillion, a decrease of 0.78% or Rp34.10 billion compared to 2022. The decrease was mainly due to a decrease in fixed assets, finance lease receivables, and other assets, offset by increases in right of use assets, deferred tax assets, investment in joint ventures and prepaid taxes.

Tabel Aset Tidak Lancar
Table of Non-current Assets

(dalam Rp juta, kecuali dinyatakan lain) (in Rp million, unless otherwise stated)

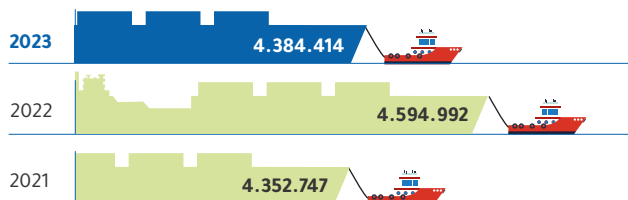
Keterangan Description	2023	2022	2021	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) 2022-2023	
				selisih difference	persentase percentage
Aset tetap Fixed assets	3.652.243	3.861.943	4.035.264	(209.700)	(5,43)%
Aset hak-guna Right-of-use assets	485.284	309.975	182.009	175.309	56,56%
Aset pajak tangguhan Deferred tax assets	100.830	87.616	55.327	13.214	15,08%
Piutang sewa pembiayaan Finance lease receivables	-	22.798	41.753	(22.798)	(100,00)%
Penyertaan saham Investment in shares	6.652	6.661	5.999	(9)	(0,14)%
Investasi pada ventura bersama Investment in a joint venture	98.132	87.607	84.643	10.525	12,01%
Taksiran pengembalian pajak Estimated tax refund	-	-	2.179	-	-
Pajak dibayar dimuka - pajak penghasilan Prepaid taxes - income tax	4.933	-	15.810	4.933	100,00%
Aset lain-lain Other assets	8.687	14.264	5.498	(5.577)	(39,10)%
Jumlah Aset Tidak Lancar Total Non-current Assets	4.356.761	4.390.864	4.428.482	(34.103)	(0,78)%

Liabilitas Liabilities

Jumlah liabilitas PTK pada tahun 2023 adalah sebesar Rp4,38 triliun, yaitu mengalami penurunan 4,58% atau sebesar Rp210,58 miliar dibandingkan tahun 2022. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh adanya penurunan pada liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang.

PTK's total liabilities in 2023 was Rp4.38 trillion, a decrease of 4.58% or Rp210.58 billion compared to 2022. The decrease was mainly due to a decrease in current liabilities and non-current liabilities.

Grafik Jumlah Liabilitas (dalam Rp juta)
Chart of Total Liabilities (in Rp million)



Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities

Jumlah liabilitas jangka pendek PTK pada tahun 2023 adalah sebesar Rp3,55 triliun, yaitu mengalami penurunan 1,80% atau sebesar Rp65,21 miliar dibandingkan tahun 2022. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh adanya penurunan pada biaya masih harus dibayar, liabilitas sewa, dan utang usaha, namun diimbangi dengan kenaikan liabilitas kontrak, utang pajak dan bagian jangka panjang dari pinjaman jangka panjang.

PTK's total current liabilities in 2023 was Rp3.55 trillion, a decrease of 1.80% or Rp65.21 billion compared to 2022. The decrease was mainly due to a decrease in accrued expenses, lease liabilities, and trade payables, but offset by increases in contract liabilities, taxes payable and the long-term portion of long-term borrowings.

Tabel Liabilitas Jangka Pendek
Table of Current Liabilities

(dalam Rp juta, kecuali dinyatakan lain) (in Rp million, unless otherwise stated)

Keterangan Description	2023	2022	2021	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) 2022-2023	
				selisih difference	persentase percentage
Utang usaha Trade payables	1.027.112	1.027.498	870.487	(386)	(0,04)%
Biaya masih harus dibayar Accrued expenses	1.483.717	1.742.194	1.566.119	(258.477)	(14,84)%
Liabilitas kontrak Contract liabilities	233.535	107.220	141.453	126.315	117,81%
Utang pajak Taxes payable	163.478	150.256	83.074	13.222	8,80%

Keterangan Description	2023	2022	2021	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) 2022-2023	
				selisih difference	persentase percentage
Utang dividen Dividend payable	64	64	9.937	-	-
Liabilitas sewa Lease liabilities	335.390	354.455	225.166	(19.065)	(5,38)%
Bagian jangka pendek dari pinjaman jangka panjang Current portion of long-term borrowings	305.012	231.826	236.777	73.186	31,57%
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek Total Current Liabilities	3.548.308	3.613.513	3.133.013	(65.205)	(1,80)%

Liabilitas Jangka Panjang Non-current Liabilities

Jumlah liabilitas jangka panjang PTK pada tahun 2023 adalah sebesar Rp836,11 miliar, yaitu mengalami penurunan 14,81% atau sebesar Rp145,37 miliar dibandingkan tahun 2022. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh adanya penurunan pada pinjaman jangka panjang, namun diimbangi dengan kenaikan pada liabilitas sewa dan liabilitas imbalan pasca kerja.

PTK's total non-current liabilities in 2023 was Rp836.11 billion, a decrease of 14.81% or Rp145.37 billion compared to 2022. The decrease was mainly due to a decrease in long-term borrowings, but offset by increases in lease liabilities and post-employment benefit liabilities.

Tabel Liabilitas Jangka Panjang
Table of Non-current Liabilities

(dalam Rp juta, kecuali dinyatakan lain) (in Rp million, unless otherwise stated)

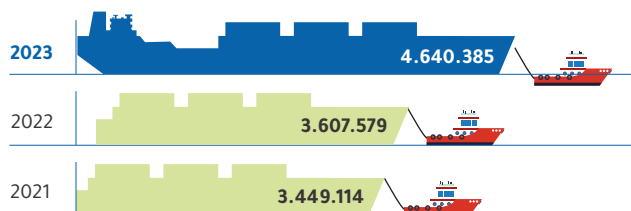
Keterangan Description	2023	2022	2021	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) 2022-2023	
				selisih difference	persentase percentage
Liabilitas sewa Lease liabilities	187.498	81.930	48.815	105.568	128,85%
Pinjaman jangka panjang Long-term borrowings	426.950	722.993	1.000.607	(296.043)	(40,95)%
Liabilitas imbalan pasca kerja Post-employment benefits obligation	221.658	176.556	170.312	45.102	25,55%
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang Total Non-current Liabilities	836.106	981.479	1.219.734	(145.373)	(14,81)%

Ekuitas Equity

Jumlah ekuitas PTK pada tahun 2023 adalah sebesar Rp4,64 triliun, yaitu mengalami peningkatan 28,63% atau sebesar Rp1,03 triliun dibandingkan tahun 2022. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh adanya peningkatan pada saldo laba.

PTK's total equity in 2023 was Rp4.64 trillion, an increase of 28.63% or Rp1.03 trillion compared to 2022. The increase was mainly driven by an increase in retained earnings.

Grafik Jumlah Ekuitas (dalam Rp juta)
Chart of Equity (in Rp million)



Tabel Ekuitas
Table of Equity

(dalam Rp juta, kecuali dinyatakan lain) (dalam Rp juta, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan Description	2023	2022	2021	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) 2022-2023	
				selisih difference	persentase percentage
Modal saham Share capital	1.234.748	1.234.748	1.106.146	-	-
Tambahan modal disetor Additional paid-in capital	(76.051)	(76.051)	(76.051)	-	-

Keterangan Description	2023	2022	2021	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) 2022-2023	
				selisih difference	persentase percentage
Rugi komprehensif lain Other comprehensive loss	(99.560)	(80.872)	(101.555)	(18.688)	23,11%
Saldo laba Retained earnings	3.580.727	2.529.358	2.520.574	1.051.369	41,57%
Keperentingan non-pengendali Non-controlling interest	521	396	-	125	31,57%
Jumlah Ekuitas Total Equity	4.640.385	3.607.579	3.449.114	1.032.806	28,63%

Analisis Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

Analysis of the Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income

Pada tahun 2023, PTK berhasil membukukan laba tahun berjalan sebesar Rp1,05 triliun, yaitu mengalami peningkatan 43,45% atau Rp318,47 miliar dibandingkan tahun 2022. Peningkatan ini terutama didorong oleh adanya peningkatan pendapatan usaha, peningkatan pendapatan keuangan dan peningkatan bagian atas laba bersih ventura bersama namun diimbangi sebagian oleh adanya kenaikan pada beban pokok pendapatan, beban umum dan administrasi dan beban pajak penghasilan.

In 2023, PTK managed to book a profit for the year of Rp1.05 trillion, an increase of 43.45% or Rp318.47 billion compared to 2022. This increase was mainly driven by an increase in revenues, an increase in finance income and an increase in share of net income of joint ventures partially offset by increases in cost of revenues, general and administrative expenses and income tax expense.

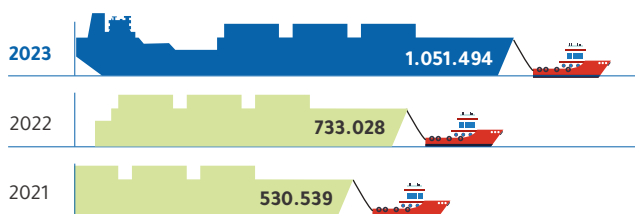
Tabel Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian
Table of the Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income

(dalam Rp juta, kecuali dinyatakan lain) (in Rp million, unless otherwise stated)

Keterangan Description	2023	2022	2021	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) 2022-2023	
				selisih difference	persentase percentage
Pendapatan usaha Revenue	6.746.509	4.784.913	3.800.987	1.961.596	41,00%
Beban pokok pendapatan Cost of revenue	(4.153.993)	(3.136.987)	(2.688.852)	(1.017.006)	32,42%
Laba bruto Gross profit	2.592.516	1.647.926	1.112.135	944.590	57,32%
Beban umum dan administrasi General and administrative expenses	(1.161.113)	(649.316)	(458.185)	(511.797)	78,82%
(Beban)/pendapatan lain-lain, neto Other (expenses) income, net	(53.526)	25.531	25.543	(79.057)	(309,65)%
Pendapatan keuangan Finance income	46.690	23.565	6.597	23.125	98,13%
Beban keuangan Finance costs	(97.270)	(99.799)	(54.172)	2.529	(2,53)%
Bagian atas laba bersih ventura bersama Share in profit of joint venture	30.925	25.446	28.045	5.479	21,53%
Beban pajak final Final tax expenses	(11.894)	(18.499)	(17.723)	6.605	(35,70)%
Laba sebelum pajak penghasilan Profit before income tax	1.346.328	954.854	642.240	391.474	41,00%
Beban pajak penghasilan Income tax expense	(294.834)	(221.826)	(111.701)	(73.008)	32,91%
Laba tahun berjalan Profit for the year	1.051.494	733.028	530.539	318.466	43,45%
Jumlah (rugi)/penghasilan komprehensif lain Total other comprehensive (loss)/income	(18.688)	20.683	15.527	(39.371)	(190,35)%
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan Total comprehensive income for the year	1.032.806	753.711	546.066	279.095	37,03%
Laba per saham (dalam Rp) Earnings per share (in Rp)	0,85	0,59	0,43	0,26	44,07%

Grafik Laba Tahun Berjalan (dalam Rp juta)

Chart of Profit for the Year (in Rp million)



Pendapatan Usaha

Revenue

Jumlah pendapatan usaha PTK mengalami peningkatan 41,00% atau sebesar Rp1,96 triliun dibandingkan tahun 2022, menjadi sebesar Rp6,75 triliun pada tahun 2023. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh adanya pengakuan minimum *throughput* di bulan Oktober 2023 dan adanya pengakuan kenaikan atas selisih tarif baru untuk *bundling*.

PTK's total revenue increased by 41.00% or Rp1.96 trillion compared to 2022, to Rp6.75 trillion in 2023. The increase was mainly driven by the recognition of minimum *throughput* in October 2023 and the recognition of an increase in the new tariff difference for *bundling*.

Beban Pokok Pendapatan

Cost of Revenue

Jumlah beban pokok pendapatan PTK mengalami peningkatan 32,42% atau sebesar Rp1,02 triliun dibandingkan tahun 2022, menjadi sebesar Rp4,15 triliun pada tahun 2023. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh peningkatan beban pokok pada kegiatan *marine services*.

PTK's total cost of revenue increased by 32.42% or Rp1.02 trillion compared to 2022, to Rp4.15 trillion in 2023. The increase was mainly driven by an increase in the cost of marine services activities.

Laba Bruto

Gross Profit

Jumlah laba bruto PTK mengalami peningkatan 57,32% atau sebesar Rp944,59 miliar dibandingkan tahun 2022, menjadi sebesar Rp2,59 triliun pada tahun 2023. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh peningkatan laba bruto atas kegiatan aktivitas *shipping*.

PTK's gross profit increased by 57.32% or Rp944.59 billion compared to 2022, to Rp2.59 trillion in 2023. The increase was mainly driven by an increase in gross profit on shipping activities.

Beban Umum dan Administrasi

General and Administrative Expenses

Jumlah beban umum dan administrasi PTK mengalami peningkatan 78,82% atau sebesar Rp511,80 miliar dibandingkan tahun 2022, menjadi sebesar Rp1,16 triliun pada tahun 2023. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh peningkatan beban umum atas biaya *man power related*.

PTK's total general and administrative expenses increased by 78.82% or Rp511.80 billion compared to 2022, to Rp1.16 trillion in 2023. The increase was mainly driven by an increase in general expenses for manpower-related costs.

(Beban)/Pendapatan Lain-lain, neto

Other (Expenses)/Income, net

Jumlah beban lain-lain PTK pada tahun 2023 adalah sebesar Rp(53,53) miliar, sedangkan untuk tahun 2022 merupakan pendapatan lain-lain sebesar Rp25,53 miliar. Peningkatan jumlah beban lain-lain pada tahun 2023 didorong oleh provisi atas kasus hukum.

PTK's total other expenses in 2023 were (Rp53.53) billion, while for 2022, it was other income of Rp25.53 billion. The increase in the total other expenses in 2023 was driven by provisions for legal cases.



Pendapatan Keuangan

Finance Income

Jumlah pendapatan keuangan PTK mengalami peningkatan 98,13% atau sebesar Rp23,13 miliar dibandingkan tahun 2022, menjadi sebesar Rp46,69 miliar pada tahun 2023. Peningkatan tersebut terutama oleh pendapatan keuangan bunga deposito.

PTK's total financial income increased by 98.13% or Rp23.13 billion compared to 2022, to Rp46.69 billion in 2023. The increase was mainly due to financial income from interest on time deposits.

Beban Keuangan

Finance Costs

Jumlah beban keuangan PTK mengalami penurunan 2,53% atau sebesar Rp2,53 miliar dibandingkan tahun 2022, menjadi sebesar Rp97,27 miliar pada tahun 2023. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh beban keuangan atas pinjaman jangka panjang.

PTK's total finance costs decreased by 2.53% or Rp2.53 billion compared to 2022, to Rp97.27 billion in 2023. The decrease was mainly due to financial costs on long-term borrowings.

Bagian atas Laba Bersih Ventura Bersama

Share in Profit of Joint Venture

Jumlah bagian atas laba bersih ventura bersama PTK mengalami peningkatan 21,53% atau sebesar Rp5,48 miliar dibandingkan tahun 2022, menjadi sebesar Rp30,93 miliar pada tahun 2023. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh peningkatan bagian atas laba bersih ventura bersama yaitu PT Trans Yeong Maritim.

PTK's share in net profit of joint ventures increased by 21.53% or Rp5.48 billion compared to 2022, to Rp30.93 billion in 2023. The increase was mainly driven by an increase in the share in net profit of the joint venture, PT Trans Yeong Maritim.

Beban Pajak

Tax Expenses

Beban pajak PTK terdiri dari beban pajak final dan beban pajak penghasilan. Jumlah beban pajak final PTK mengalami penurunan 35,70% atau sebesar Rp6,61 miliar dibandingkan tahun 2022, menjadi sebesar Rp11,89 miliar pada tahun 2023. Sedangkan untuk jumlah beban pajak penghasilan PTK mengalami peningkatan 32,91% atau sebesar Rp73,01 miliar dibandingkan tahun 2022, menjadi sebesar Rp294,83 miliar pada tahun 2023.

PTK's tax expense consists of final tax expense and income tax expense. PTK's final tax expense decreased by 35.70% or Rp6.61 billion compared to 2022, to Rp11.89 billion in 2023. Meanwhile, PTK's total income tax expense increased by 32.91% or Rp73.01 billion compared to 2022, to Rp294.83 billion in 2023.

Jumlah (Rugi)/Penghasilan Komprehensif Lain

Total Other Comprehensive (Loss)/Income

Pada tahun 2023, PTK mengalami kerugian komprehensif lain sebesar Rp18,69 miliar, sedangkan tahun 2022 jumlah penghasilan komprehensif lain sebesar Rp20,68 miliar. Hal tersebut terutama disebabkan oleh penurunan atas pembayaran liabilitas imbalan kerja.

In 2023, PTK had other comprehensive loss of Rp18.69 billion, while in 2022, the total other comprehensive income was Rp20.68 billion. It was mainly due to a decrease in the payment of employee benefit liabilities.

Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan

Total Comprehensive Income for the Year

Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan PTK mengalami peningkatan 37,03% atau sebesar Rp279,10 miliar dibandingkan tahun 2022, menjadi sebesar Rp1,03 triliun pada tahun 2023. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh peningkatan pendapatan usaha.

PTK's total comprehensive income for the year increased by 37.03% or Rp279.10 billion compared to 2022, to Rp1.03 trillion in 2023. The increase was mainly driven by an increase in revenue.

Analisis Laporan Arus Kas Konsolidasian

Analysis of the Consolidated Statements of Cash Flows

Pada tahun 2023, jumlah kas dan setara kas PTK tercatat sebesar Rp1,84 triliun, yaitu mengalami peningkatan 63,77% atau Rp717,81 miliar dibandingkan tahun 2022. Peningkatan ini terutama didorong oleh adanya peningkatan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi atas penerimaan pembayaran piutang dari pihak berelasi dan pihak ketiga lainnya.

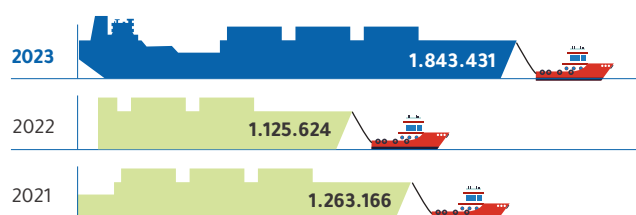
In 2023, PTK's total cash and cash equivalents were recorded at Rp1.84 trillion, an increase of 63.77% or Rp717.81 billion compared to 2022. This increase was mainly driven by an increase in net cash provided by operating activities due to the receipt of payment of receivables from related parties and other third parties.

Tabel Laporan Arus Kas Konsolidasian
Table of the Consolidated Statements of Cash Flows

(dalam Rp juta, kecuali dinyatakan lain) (in Rp million, unless otherwise stated)

Keterangan Description	2023	2022	2021	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) 2022-2023	
				selisih difference	persentase percentage
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi Net cash flows provided by operating activities	1.539.594	1.367.580	1.291.616	172.014	12,58%
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi Net cash flows used in investing activities	(101.859)	(219.767)	(660.338)	117.908	(53,65)%
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan Net cash flows used in financing activities	(727.361)	(1.290.043)	(23.272)	562.682	(43,62)%
Efek perubahan nilai kurs pada kas dan setara kas Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents	7.433	4.688	2.677	2.745	58,55%
Kenaikan/(penurunan) bersih kas dan setara kas Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents	717.807	(137.542)	610.683	855.349	(621,88)%
Kas dan setara kas pada awal tahun Cash and cash equivalents at the beginning of the year	1.125.624	1.263.166	652.483	(137.542)	(10,89)%
Kas dan setara kas pada akhir tahun Cash and cash equivalents at the end of the year	1.843.431	1.125.624	1.263.166	717.807	63,77%

Grafik Jumlah Kas dan Setara Kas (dalam Rp juta)
Chart of Total Cash and Cash Equivalents (in Rp million)



Arus Kas Aktivitas Operasi

Cash Flows from Operating Activities

Jumlah kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi PTK pada tahun 2023 adalah sebesar Rp1,54 triliun, yaitu mengalami peningkatan 12,58% atau sebesar Rp172,01 miliar dibandingkan tahun 2022. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh pertumbuhan bisnis Perusahaan di tahun 2023 dengan laba bersih sebesar Rp1,05 triliun serta komitmen dari pelanggan dalam melakukan pembayaran yang tidak melebihi jatuh tempo atas kegiatan *bundling unbundling*, pihak berelasi dan pihak ke tiga.

The total net cash provided by PTK's operating activities in 2023 was Rp1.54 trillion, an increase of 12.58% or Rp172.01 billion compared to 2022. The increase was mainly driven by the Company's business growth in 2023 with a net profit of Rp1.05 trillion, as well as the commitment of customers to make payments that do not exceed the due date for bundling unbundling activities, related parties, and third parties.

Arus Kas Aktivitas Investasi

Cash Flows for Investing Activities

Jumlah kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi PTK pada tahun 2023 adalah sebesar Rp101,86 miliar, yaitu mengalami penurunan 53,65% atau sebesar Rp117,91 miliar dibandingkan tahun 2022. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh beberapa rencana investasi yang belum terealisasi di tahun 2023.

The total net cash used in PTK's investing activities in 2023 was Rp101.86 billion, which decreased by 53.65% or Rp117.91 billion compared to 2022. The decrease was mainly due to several unrealized investment plans in 2023.

Arus Kas Aktivitas Pendanaan

Cash Flows for Financing Activities

Jumlah kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan PTK pada tahun 2023 adalah sebesar Rp727,36 miliar, yaitu mengalami penurunan 43,62% atau sebesar Rp562,68 miliar dibandingkan tahun 2022. Penurunan tersebut terutama disebabkan tidak adanya pembayaran dividen dan terdapat penurunan pinjaman atas investasi.

The total net cash used in PTK's financing activities in 2023 was Rp727.36 billion, a decrease of 43.62% or Rp562.68 billion compared to 2022. The decrease was mainly due to the absence of dividend payments and a decrease in borrowings on investments.



Analisis Rasio Keuangan

Analysis of Financial Ratios

Kemampuan Membayar Utang

Solvency

Kemampuan Perusahaan dalam membayar utang dilihat dari rasio likuiditas untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya dan rasio solvabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan kewajiban jangka pendek dan panjang.

The Company's ability to pay debts is seen from the liquidity ratio to measure the Company's ability to settle its current liabilities and the solvency ratio to measure the Company's ability to settle its current and non-current liabilities.

Secara umum, rasio likuiditas PTK pada tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022, hal ini menunjukkan bahwa Perusahaan semakin mampu dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Untuk rasio solvabilitas, pada tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022, yang menunjukkan bahwa kondisi keuangan Perusahaan mampu untuk bisa menyelesaikan seluruh kewajibannya baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

In general, PTK's liquidity ratio in 2023 increased compared to 2022. It shows that the Company is increasingly capable of meeting its current liabilities. For the solvency ratio, it decreased in 2023 compared to 2022, which showed that the Company's financial condition is capable of being able to settle all its current and non-current liabilities.

Tabel Rasio Likuiditas dan Solvabilitas
Table of Liquidity and Solvency Ratios

(dalam %) (in %)

Keterangan Description	2023	2022	2021	selisih difference 2022-2023
Rasio Likuiditas Liquidity Ratio				
Rasio kas Cash ratio	52,01	31,20	40,32	20,81
Rasio Lancar Current ratio	131,56	105,48	107,67	26,07
Rasio Solvabilitas Solvency Ratio				
Jumlah modal sendiri terhadap total aset Total own capital to total assets	51,42	43,98	44,21	7,44
Rasio liabilitas terhadap ekuitas Debt to equity ratio	94,48	127,37	126,20	(32,89)
Rasio liabilitas terhadap jumlah aset Debt to asset ratio	48,58	56,02	55,79	(7,44)

Tingkat Kolektibilitas Piutang Receivables Collectibility

Tingkat kolektibilitas piutang merupakan kemampuan Perusahaan dalam menagih piutangnya. Indikator yang digunakan Perusahaan adalah rata-rata periode penagihan piutang.

Rata-rata periode penagihan piutang yang dihitung secara penuh untuk tahun 2023 adalah 66 hari yaitu lebih cepat dibandingkan tahun 2022 selama 100 hari. Hal ini terutama didorong oleh transaksi dengan pihak berelasi periode November dan Desember tahun 2023 yang sudah tertagih dibandingkan tahun sebelumnya.

The receivables collectibility is the Company's ability to collect its receivables. The indicator used by the Company is the average collection period of accounts receivable.

The average collection period of receivables calculated in full for 2023 is 66 days, which is faster than 2022 for 100 days. This is mainly driven by transactions with related parties in November and December of 2023 which have been collected compared to the previous year.

Kemampuan Menghasilkan Laba Ability to Generate Profit

Kemampuan Perusahaan dalam menghasilkan laba pada tahun 2023 secara umum mengalami peningkatan. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan pada seluruh rasio profitabilitas yang digunakan Perusahaan. Peningkatan kemampuan Perusahaan dalam menghasilkan laba ini terutama didorong oleh peningkatan pendapatan usaha.

The Company's ability to generate profits in 2023 has generally increased. This was evidenced by an increase in all profitability ratios used by the Company. The increase in the Company's ability to generate profits is mainly driven by an increase in revenue.

Tabel Rasio Profitabilitas
Table of Profitability Ratio

(dalam %) (in %)

Keterangan Description	2023	2022	2021	selisih difference 2022-2023
Rasio laba bersih terhadap aset Return on assets	11,65	8,94	6,80	2,71
Rasio laba bersih terhadap ekuitas Return on equity	29,30	25,50	18,18	3,80
Imbalan investasi Return on investment	24,83	20,42	14,59	4,41
Margin laba bruto Gross profit margin	38,43	34,44	29,26	3,99
Margin laba bersih Net profit margin	15,59	15,32	13,96	0,27

Pencapaian Key Performance Indicator (KPI) Key Performance Indicator (KPI) Achievement

Key Performance Indikator (KPI) PTK tahun 2023 yang tertuang pada Kontrak Manajemen Tahunan yang memuat KPI Direksi secara Kolegial antara Direktur Utama PT Pertamina International Shipping dan Direksi PT Pertamina Trans Kontinental yang disepakati pada tanggal 20 Juli 2023.

Pencapaian KPI tahun 2023 adalah sebesar **103,80%** sebagaimana disampaikan dalam tabel berikut ini:

PTK's Key Performance Indicators (KPIs) for 2023 as stated in the Annual Management Contract containing the KPIs of the Board of Directors Collegially between the President Director of PT Pertamina International Shipping and the Board of Directors of PT Pertamina Trans Kontinental agreed on July 20, 2023.

The KPI achievement in 2023 was **103.80%**, as presented in the following table:

Tabel Pencapaian KPI Tahun 2023

Table of KPI Achievement in 2023

No	Perspektif Perspective	Persentase Pencapaian Percentage of Achievement
1.	Financial	36,27%
2.	Customer Focus	16,00%
3.	Internal Process	36,66%
4.	Learning & Growth	16,37%
5.	Boundary KPI	-1,50%
Jumlah Total		103,80%

Tingkat Kesehatan Perusahaan

Company's Soundness Level

Total Nilai Kinerja Perusahaan pada tahun 2023 adalah sebesar **99,50** dengan klasifikasi **"AAA" (SEHAT)**. Perhitungan Tingkat Kesehatan Perusahaan dilakukan oleh Fungsi Finance Perusahaan sesuai dengan Pedoman Penilaian Kinerja Anak Perusahaan PT Pertamina (Persero) No. A6-002/H40000/2019-S9 Revisi Ke-0. Berikut adalah rincian pencapaian nilai Tingkat Kesehatan Perusahaan:

The total score of the Company's performance in 2023 was **99.50** with the classification **"AAA" (HEALTHY)**. The calculation of the Company's Soundness Level is carried out by the Corporate Finance Function in accordance with the Guidelines for Performance Assessment of Subsidiaries of PT Pertamina (Persero) No. A6-002/H40000/2019-S9 Revision 0. The following are details of the achievement of the Company's Soundness Level score:

Tabel Tingkat Kesehatan Perusahaan Tahun 2023

Table of the Company's Soundness Level in 2023

Keterangan Description	Pencapaian Achievement	Nilai Score
Kinerja Keuangan Financial Performance	70,00	70,00
Kinerja Operasional Operational Performance	20,00	20,00
Kinerja Administrasi Administrative Performance	9,50	9,50
Jumlah Nilai Kinerja Perusahaan Total Company's Performance Score	99,50	
Klasifikasi Tingkat Kinerja Perusahaan Company Performance Level Classification	99,50 AAA (SEHAT) AAA (HEALTHY)	

Realisasi dan Pencapaian Target Tahun 2023

Target Realization and Achievement in 2023

Asumsi dalam Penetapan Target Tahun 2023

Assumption in Setting the 2023 Target

Target kinerja tahun 2023 ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2023. Dalam proses penyusunannya, RKAP Tahun 2023 menggunakan asumsi utama di antaranya sebagai berikut:

The 2023 performance targets are set out in the Company's 2023 Annual Budget and Operational Plan (ABOP). In the preparation process, the 2023 ABOP uses the following main assumptions:

Parameter	Satuan Unit	RKAP 2023 2023 ABOP
Kurs Exchange Rate	Rp to AS\$	14.800
Suku Bunga Pinjaman Loan Interest Rate	%	- 2.35% - 2.50% + LIBOR (AS\$) s.d. Juni 2023, - 2.50% - 2.65% + SOFR (AS\$) Juli s.d. Desember 2023, - 1.75% - 2.50% + JIBOR (Rp). - 2.35% - 2.50% + LIBOR (US\$) up to June 2023, - 2.50% - 2.65% + SOFR (US\$) July up to December 2023, - 1.75% - 2.50% + JIBOR (Rp).
Tenor Pinjaman Loan Tenor	Tahun Years	5-7 tahun years
Porsi Pinjaman Loan Portion	%	70% - 100%
Collection Period	Hari Days	98 Hari Days
Hurdle Rate	%	Shipping (cargo/vessel): - AS\$: 9.87% - Rp: 11.9% Harbour/ Marine Service/ Port Service: - AS\$: 9.66% - Rp: 11.04%
Jumlah Kapal Milik Total Vessels Owned	Unit	369
Commission Days Kapal Milik Commission Days of Vessels Owned	Hari Days	108.942
Commercial Days Kapal Milik Commercial Days of Vessels Owned	Hari Days	108.057
Jumlah Muatan BBM yang diangkut Number of fuel loads transported	Ribu KL Thousand KL	62.065
Jumlah Call Keagenan Tanker Total Tanker Agency Calls	Call	25.825
Jumlah Call Keagenan Umum Total General Agency Calls	Call	3.756

Sumber: Buku RKAP Tahun 2023

Source: 2023 ABOP Book

Realisasi dan Pencapaian Target Kinerja Operasional Tahun 2023

Realization and Achievement of Operational Performance Targets in 2023

Tabel Pencapaian Target Operasi Segmen Shipping Activities

Table of Achievement of Operating Targets of the Shipping Activities Segment

Uraian Description	Satuan Unit	Realisasi 2023 2023 Realization	Target 2023 2023 Target	Pencapaian Achievement
- Armada Kapal Milik Owned Ships	unit	369	369	-
- Armada Kapal Back-to-back Back-to-back Ships	unit	67	59	113.56%
Jumlah Armada Kapal Total Fleets of Ship	unit	436	436	436
- Commission Days Kapal Milik Commission Days of Owned Ship	hari day	118.344	108.942	108.63%
- Commission Days Kapal Back-to-back Commission Days of Back-to-back Ships	hari day	21.395	20.995	101.91%
Jumlah Commission Days Total Commission Days	unit	139.739	129.937	107.54%
- Commercial Days Kapal Milik Commercial Days of Owned Ship	hari day	121.916	112.802	108.08%

Tabel Pencapaian Target Operasi Segmen *Marine Services*

Table of Achievement of Operating Targets of the Marine Services Segment

Uraian Description	Satuan Unit	Realisasi 2023 2023 Realization	Target 2023 2023 Target	Pencapaian Achievement
Keagenan <i>Tanker Pihak Ketiga</i> Third Party Tanker Agency	<i>call</i>	3.385	2.000	169,25%
Keagenan <i>Charter Milik Pertamina</i> Pertamina Chartered Agency	<i>call</i>	21.840	23.825	91,67%
Keagenan Umum General Agency	<i>call</i>	3.034	3.756	80,78%
Jumlah Total	<i>call</i>	28.259	29.581	95,53%

Tabel Pencapaian Target Operasi Segmen *Logistic Services*

Table of Achievement of Operating Targets of the Logistic Services Segment

Uraian Description	Satuan Unit	Realisasi 2023 2023 Realization	Target 2023 2023 Target	Pencapaian Achievement
<i>Cargo Handling</i>	ton	346.887	337.272	102,85%
<i>Vessel Berthing</i>	<i>call</i>	10.797	5.916	182,51%
<i>Cover Storage</i>	m ²	356.926	265.116	134,63%
<i>Open Storage</i>	m ²	849.300	546.168	155,50%
<i>Waste Management</i>	ton	5.674	5.736	98,92%



Realisasi *commission days* kapal milik pada tahun 2023 adalah selama 118.344 hari, yaitu tercapai 108,63% dari target RKAP 2023 selama 108.942 hari.

The realization of *commission days* of owned ships in 2023 was 118,344 days, which achieved 108.63% of the 2023 ABOP target of 108,942 days.

Realisasi *commercial days* kapal milik pada tahun 2023 adalah selama 121.916 hari, yaitu tercapai 108,09% dari target RKAP 2023 selama 112.802 hari.

The realization of *commercial days* of owned ships in 2023 was 121,916 days, which achieved 108.09% of the 2023 ABOP target of 112,802 days.

Realisasi *call* keagenan pada tahun 2023 adalah sebesar 28.259 *call*, yaitu tercapai 95,53% dari target RKAP 2023 sebesar 29.581 *call*. Hal ini terutama dipengaruhi oleh jumlah *call* yang mengikuti dinamika distribusi dan pembelian minyak dan gas oleh Pertamina.

The realization of agency calls in 2023 was 28,259 calls, which achieved 95.53% of the 2023 ABOP target of 29,581 calls. This was mainly influenced by the number of calls that followed the dynamics of distribution and purchase of oil and gas by Pertamina.

Realisasi dan Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun 2023

Realization and Achievement of Financial Performance Targets in 2023

Realisasi pendapatan usaha PTK pada tahun 2023 adalah sebesar Rp6,75 triliun, yaitu tercapai 86,08% dari target RKAP 2023 sebesar Rp7,84 triliun. Hal ini terutama dipengaruhi oleh pengakuan minimum *throughput* di bulan Oktober 2023 dan adanya pengakuan kenaikan atas selisih tarif baru untuk *bundling*.

The realization of PTK's revenue in 2023 was Rp6.75 trillion, which achieved 86.08% of the 2023 ABOP target of Rp7.84 trillion. This was mainly influenced by the recognition of minimum *throughput* in October 2023 and the recognition of an increase in the new tariff difference for *bundling*.

Realisasi laba tahun berjalan PTK pada tahun 2023 adalah sebesar Rp1,05 triliun, yaitu tercapai 165,83% dari target RKAP 2023 sebesar Rp634,07 miliar. Pencapaian ini terutama didorong oleh beban pokok penjualan, beban usaha dan beban keuangan yang di bawah RKAP.

The realization of PTK's profit for the year 2023 was Rp1.05 trillion, which achieved 165.83% of the 2023 ABOP target of Rp634.07 billion. This achievement was mainly driven by the cost of goods sold, operating expenses, and finance expenses below the ABOP.

Tabel Realisasi dan Pencapaian Target Pendapatan dan Laba
Table of Achievement of Revenue and Profit Targets

(dalam Rp juta, kecuali dinyatakan lain) (in Rp million, unless otherwise stated)

Uraian Description	Realisasi 2023 2023 Realization	Target 2023 2023 Target	Pencapaian Achievement
Pendapatan usaha Revenue	6.746.509	7.837.765	86,08%
Beban pokok pendapatan Cost of revenue	(4.153.993)	(5.558.920)	74,73%
Laba bruto Gross profit	2.592.516	2.278.844	113,76%
Beban umum dan administrasi General and administrative expenses	(1.161.113)	(1.423.088)	81,59%
(Beban)/pendapatan lain-lain, neto Other (expenses)/income, net	(65.420)	839	-
Pendapatan keuangan Finance income	46.690	7.102	657,42%
Beban keuangan Finance costs	(97.270)	(84.880)	114,60%
Bagian atas laba bersih ventura bersama Share in profit of joint venture	30.925	16.726	184,89%
Laba sebelum pajak penghasilan Laba sebelum pajak penghasilan	1.346.328	795.543	169,23%
Beban pajak penghasilan Profit before income tax	(294.834)	(161.030)	183,09%
Laba tahun berjalan Profit for the year	1.051.494	634.070	165,83%
Jumlah (rugi)/penghasilan komprehensif lain Total other comprehensive (loss)/income	(18.688)	-	-
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan Total comprehensive income for the year	1.032.806	634.070	162,89%

Sedangkan untuk realisasi posisi keuangan dijelaskan sebagai berikut.

Meanwhile, the realization of the financial position is explained as follows.

Realisasi jumlah aset PTK pada tahun 2023 adalah sebesar Rp9,02 triliun, yaitu tercapai 109,40% dari target RKAP 2023 sebesar Rp8,25 triliun. Pencapaian ini terutama didorong oleh peningkatan kas dan setara kas.

The realization of PTK's total assets in 2023 was Rp9.02 trillion, which achieved 109.40% of the 2023 ABOP target of Rp8.25 trillion. This achievement was mainly driven by an increase in cash and cash equivalents.

Realisasi jumlah liabilitas PTK pada tahun 2023 adalah sebesar Rp4,38 triliun, yaitu tercapai 109,27% dari target RKAP 2023 sebesar Rp4,01 triliun. Pencapaian ini terutama didorong oleh peningkatan liabilitas jangka pendek.

The realization of PTK's total liabilities in 2023 was Rp4.38 trillion, which achieved 109.27% of the 2023 ABOP target of Rp4.01 trillion. This achievement was mainly driven by an increase in current liabilities.

Realisasi jumlah ekuitas PTK pada tahun 2023 adalah sebesar Rp4,64 triliun, yaitu tercapai 109,53% dari target RKAP 2023 sebesar Rp4,24 triliun. Pencapaian ini terutama didorong oleh peningkatan laba tahun berjalan.

The realization of PTK's total equity in 2023 was Rp4.64 trillion, which achieved 109.53% of the 2023 ABOP target of Rp4.24 trillion. This achievement was mainly driven by an increase in profit for the year.

Tabel Pencapaian Target Posisi Keuangan
Table of Achievement of Financial Position Target

(dalam Rp juta, kecuali dinyatakan lain) (in Rp million, unless otherwise stated)

Uraian Description	Realisasi 2023 2023 Realization	Target 2023 2023 Target	Pencapaian Achievement
Jumlah Aset Total Assets	9.024.799	8.249.310	109,40%
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	4.384.414	4.012.483	109,27%
Jumlah Ekuitas Total Equity	4.640.385	4.236.826	109,53%

Realisasi dan Pencapaian Target Struktur Modal Tahun 2023

Realization and Achievement of Capital Structure Targets in 2023

Realisasi jumlah struktur modal pada tahun 2023 adalah sebesar Rp9,02 triliun, yaitu tercapai 109,40% dari target RKAP 2023 sebesar Rp8,25 triliun. Pencapaian ini terutama didorong oleh peningkatan ekuitas.

The realization of total capital structure in 2023 was Rp9.02 trillion, which achieved 109.40% of the 2023 ABOP target of Rp8.25 trillion. This achievement was mainly driven by an increase in equity.

Realisasi dan Pencapaian Target Investasi Tahun 2023

Realization and Achievement of Investment Targets in 2023

Realisasi Anggaran Belanja Investasi (ABI) pada tahun 2023 adalah sebesar Rp142,46 miliar, yaitu tercapai 31,51% dari target RKAP 2023 sebesar Rp452,13 miliar.

The realization of the Investment Expenditure Budget (ABI) in 2023 was Rp142.46 billion, which achieved 31.51% of the 2023 ABOP target of Rp452.13 billion.

Tabel Pencapaian Target Investasi

Table of Achievement of Investment Target

(dalam Rp juta, kecuali dinyatakan lain) (dalam Rp juta, kecuali dinyatakan lain)

Uraian Description	Realisasi 2023 2023 Realization	Target 2023 2023 Target	Pencapaian Achievement
Kategori <i>Business Development</i> Kategori Business Development	20.524	329.811	6,22%
Kategori <i>Non-Business Development</i> Kategori Non-Business Development	74.706	75.310	99,20%
Kategori Anorganik Kategori Anorganik	47.234	47.005	100,49%
Jumlah Total	142.464	452.126	31,51%

Realisasi dan Pencapaian Target Kinerja K3 Tahun 2023

Realization and Achievement of OHS Performance Targets in 2023

Kinerja K3 pada tahun 2023 PTK mencapai target yaitu dengan tidak adanya insiden berkategori NoA, dengan *recordable incident* realisasi TRIR sebesar 0,23.

OHS performance of PTK in 2023 achieved the target, namely with no incidents categorized as NoA, with a recordable incident of TRIR realization of 0.23.



Struktur Modal dan Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal

Capital Structure and Management Policy on Capital Structure

Struktur modal menggambarkan pembiayaan permanen PTK yang terdiri atas utang berbasis bunga dan modal sendiri. PTK berupaya memiliki alternatif pendanaan yang efisien, salah satunya dengan memiliki struktur modal yang optimal yaitu dengan bauran antara liabilitas dan modal sendiri yang sesuai.

Capital structure describes PTK's permanent financing, which consists of interest-based debt and equity. PTK strives to have efficient funding alternatives, one of which is by having an optimal capital structure, namely with an appropriate mix of liabilities and equity.

Table Struktur Modal
Table of Capital Structure

(dalam Rp juta, kecuali dinyatakan lain) (in Rp million, unless otherwise stated)

Keterangan Description	2023		2022		2021	
	Nominal	Komposisi Composition	Nominal	Komposisi Composition	Nominal	Komposisi Composition
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	4.384.414	48,58%	4.594.992	56,02%	4.352.747	55,79%
Jumlah Ekuitas Total Equity	4.640.385	51,42%	3.607.579	43,98%	3.449.114	44,21%
Jumlah Total	9.024.799	100,00%	8.202.571	100,00%	7.801.861	100,00%

Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal

Management Policy on Capital Structure

Manajemen mengelola struktur permodalan dan mempertahankan rasio modal yang sehat dalam rangka mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi Pemegang Saham. Manajemen memastikan adanya tingkat pengembalian modal dan tingkat dividen yang dibagikan, dengan menjaga kebijakan modal yang terdiri dari modal saham biasa, laba ditahan, kepentingan non-pengendali dan komponen ekuitas lainnya. Pengawasan struktur modal dilakukan dengan menggunakan rasio liabilitas terhadap ekuitas, yang tercatat sebesar 94,48% pada periode pelaporan.

Management manages the capital structure and maintains healthy capital ratios to support the business and maximize shareholder returns. Management ensures the return on equity and the level of dividends distributed by maintaining a capital policy consisting of ordinary share capital, retained earnings, non-controlling interests, and other equity components. Capital structure is monitored using the debt-to-equity ratio, which was recorded at 94.48% during the reporting period.



Kebijakan dan Pembagian Dividen

Dividend Policy and Distribution

Kebijakan Dividen

Dividend Policy

Kebijakan dividen PTK mengacu pada Anggaran Dasar Pasal 21 tentang Penggunaan Laba, dengan uraian sebagai berikut:

1. Penggunaan laba bersih termasuk jumlah penyisihan untuk cadangan kerugian diputuskan oleh RUPS.
2. Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen kecuali ditentukan lain oleh RUPS.
3. Selain penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, RUPS dapat menetapkan penggunaan laba bersih untuk pembagian lain seperti tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris. Penempatan laba bersih tersebut dalam cadangan Perusahaan atau untuk penggunaan lainnya.
4. Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini hanya boleh dibagikan apabila Perusahaan mempunyai saldo laba yang positif.
5. Penggunaan laba bersih untuk tantiem sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, dilakukan sepanjang telah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya dalam tahun berjalan.
6. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dalam pembukuan Perusahaan dan dalam tahun-tahun yang akan datang Perusahaan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat itu belum sama sekali tertutup, dengan tidak mengurangi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
7. Perusahaan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perusahaan berakhir, dengan memperhatikan proyeksi perolehan laba dan kemampuan keuangan Perusahaan.
8. Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini, ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris.
9. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perusahaan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perusahaan.
10. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perusahaan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal ini.

PTK's dividend policy refers to Article 21 of the Articles of Association on the Use of Profit, with the following description:

1. The appropriation of net profit, including the amount of provision for allowance for losses, is decided by the GMS.
2. The entire net profit after deducted by the provision for allowance, as referred to in paragraph 1 of this Article, is distributed to shareholders as dividends unless otherwise determined by the GMS.
3. In addition to the appropriation of net profit as referred to in paragraph 2 of this Article, the GMS can determine the appropriation of net profit for other distributions, such as bonuses for the Board of Directors and the Board of Commissioners. The placement of net profit in the Company's reserves or for other uses.
4. Dividends, as referred to in paragraph 2 of this Article, may only be distributed if the Company has a positive profit balance.
5. The appropriation of net profit for tantiem, as referred to in paragraph 3 of this Article, is executed as long as it has been budgeted and calculated as expenses in the current year.
6. If the calculation of profit or loss in a financial year shows a loss that cannot be covered with reserve funds, then the loss will still be recorded in the Company's books, and the Company will be deemed not to have made a profit in future years as long as the recorded loss has not been covered at all, without prejudice to the provisions of the applicable laws and regulations.
7. The Company may distribute interim dividends before the Company's financial year ends, taking into account the Company's profit projection and financial capacity.
8. Distribution of interim dividends, as referred to in paragraph 7 of this Article, is determined based on the decision of the Board of Directors after obtaining approval from the Board of Commissioners.
9. In the event after the end of the financial year, it turns out that the Company suffers from a loss, the interim dividends that have been distributed must be returned by the shareholders to the Company.
10. The Board of Directors and Board of Commissioners are jointly and severally responsible for the losses of the Company in the event the shareholders are unable to return the interim dividends as referred to in paragraph 9 of this Article.

Kronologis Pembagian Dividen

Chronology of Dividend Distribution

Pembagian Dividen atas Laba Tahun Buku 2022

Dividend Distribution on Profit for the 2022 Financial Year

Pembagian dividen tahun buku 2022 ditetapkan dalam RUPS Tahunan pada tanggal 12 Juni 2023 dengan keputusan:

1. Menyetujui tidak dilakukan pembagian dividen kepada Pemegang Saham.
2. Menetapkan penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2022 sebesar AS\$47.479.154 (nilai penuh) atau setara dengan Rp733.030.665.813 sebagai cadangan, termasuk memperkuat struktur permodalan dan mendukung pertumbuhan Perusahaan yang berkelanjutan.

The distribution of dividends for the 2022 financial year was determined at the Annual GMS on June 12, 2023, by resolution:

1. Approved not to distribute dividends to Shareholders.
2. Determined the use of Net Profit for the 2022 Financial Year of US\$47,479,154 (the full amount) or equivalent to Rp733,030,665,813 as reserves, including strengthening the capital structure and supporting the Company's sustainable growth.

Pembagian Dividen atas Laba Tahun Buku 2021

Dividend Distribution on Profit for the 2021 Financial Year

Pembagian dividen tahun buku 2021 ditetapkan dalam RUPS Tahunan pada tanggal 16 Juni 2022 dengan keputusan:

1. Menyetujui pembagian Dividen kepada Pemegang Saham sebesar AS\$49.100.000, secara proporsional sesuai dengan porsi kepemilikan saham dalam Perusahaan, yang berasal dari Laba Bersih Tahun Buku 2021 sebesar AS\$37.157.795 dan Laba Ditahan per tanggal 31 Desember 2021 sebesar AS\$11.942.205. Pembayaran Dividen tersebut selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal ditutupnya Rapat;
2. Menyetujui Cadangan Wajib sebesar AS\$2.500.000, yang dialokasikan dari Laba Ditahan Tahun 2021 yang belum ditentukan penggunaannya.

The distribution of dividends for the 2021 financial year was determined at the Annual GMS on June 16, 2022, by resolution:

1. Approved the distribution of dividends to Shareholders in the amount of US\$49,100,000 proportionally to the portion of share ownership in the Company, which came from Net Profit for the 2021 Fiscal Year of US\$37,157,795 and Retained Earnings as of December 31, 2021, of US\$11,942,205. Payment of the dividends no later than 30 days from the closing date of the Meeting;
2. Approved the Mandatory Reserve of US\$2,500,000, which was allocated from the unappropriated 2021 Retained Earnings.

Tabel Kronologis Pembagian Dividen
Table of Chronology of Dividend Distribution

Uraian Description	Tahun Buku 2022 2022 Financial Year	Tahun Buku 2021 2021 Financial Year	Tahun Buku 2020 2020 Financial Year
Dividen Kas yang Dibagikan (Rp juta) Cash Dividend Distributed (Rp million)	-	736.009	-
Dividen per saham (Rp) Dividend per share (Rp)	-	664.890	-
Rasio pembagian dividen (%) Dividend payout ratio (%)	-	57,07%	-
Tanggal pengumuman Announcement date	-	16 Juni 2022 June 15, 2022	-
Tanggal pembayaran Payment date	-	6 Juli 2022 July 15, 2022	-

Prospek Usaha dan Rencana Strategis Tahun 2024

Business Prospect and Strategic Plan for 2024

Prospek Perekonomian Global

Global Economic Outlook

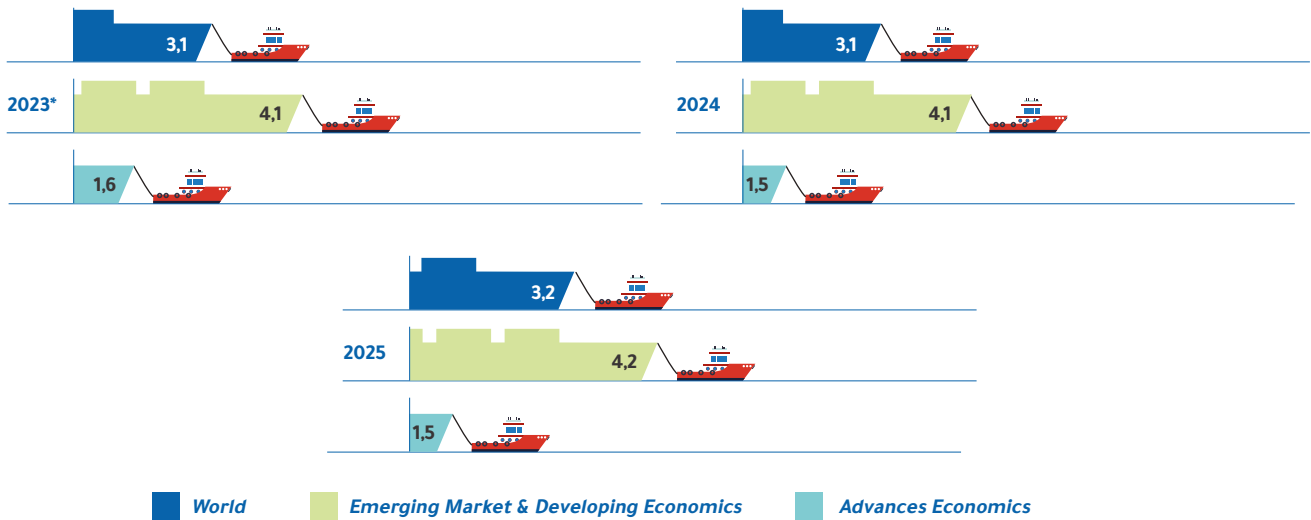
Dalam World Economic Outlook terbitan Januari 2024, International Monetary Fund (IMF) memprediksi pertumbuhan global tahun 2023 dan 2024 sebesar 3,1%. IMF juga menggambarkan proyeksi ekonomi dunia tahun 2024 dengan istilah *"resilient but slow"*, atau "tangguh meskipun lambat". Proyeksi ini juga memperhitungkan asumsi bahwa harga komoditas bahan bakar dan non-bahan bakar akan turun pada 2024-2025, dan tingkat suku bunga di negara-negara maju akan menurun.

IMF memperkirakan rata-rata harga minyak bumi akan turun 2,3% pada 2024, dan harga komoditas non-bahan bakar turun 0,9%. Kemudian suku bunga bank sentral di AS, Eropa, dan Inggris diprediksi turun mulai semester kedua 2024, seiring dengan melandainya inflasi di negara-negara tersebut. Secara kumulatif, IMF memproyeksikan inflasi global akan turun dari 6,8% pada 2023, menjadi 5,8% pada 2024.

In its January 2024 World Economic Outlook, the International Monetary Fund (IMF) predicts global growth in 2023 and 2024 of 3.1%. The IMF also described the 2024 world economic outlook as *"resilient but slow"*. This projection also takes into account the assumption that fuel and non-fuel commodity prices will decrease in 2024-2025, and interest rates in developed countries will decrease.

The IMF estimates that average oil prices will decrease by 2.3% in 2024, and non-fuel commodity prices will decrease by 0.9%. Then central bank interest rates in the US, Europe, and the UK are predicted to decline starting in the second half of 2024, along with inflation in these countries. Cumulatively, the IMF projects that global inflation will decrease from 6.8% in 2023 to 5.8% in 2024.

Tren Prospek Pertumbuhan Ekonomi Dunia (%) World Economic Growth Outlook Trends (%)



*estimasi

Sumber: *World Economic Outlook (WEO)*, *International Monetary Fund (IMF)*, terbitan Januari 2024

*estimation

Source: *World Economic Outlook (WEO)*, *International Monetary Fund (IMF)*, January 2024 issue

Kondisi global tersebut, tentu dapat memberikan dampak yang signifikan pada perekonomian Indonesia apabila Pemerintah, regulator, pelaku industri dan pemangku kepentingan lainnya tidak menyiapkan langkah antisipatif.

These global conditions can certainly have a significant impact on the Indonesian economy if the Government, regulators, industry players, and other stakeholders do not prepare anticipatory steps.

Prospek Perekonomian Nasional National Economic Outlook

Pertumbuhan ekonomi Indonesia di berbagai lembaga memprediksi pertumbuhan Indonesia sampai tahun 2025 seperti IMF masih memprediksi di angka 5%, kemudian World Bank antara 4,9-5%, dan OECD di angka 5,2%, jauh di atas rata-rata proyeksi pertumbuhan ekonomi global dan di atas pertumbuhan ekonomi *emerging market* seperti China. Oleh karena itu, kebijakan berkelanjutan yang diambil menjadi kunci pertumbuhan perekonomian ke depan walaupun kita menyadari ada risiko-risiko ke depan.

Indonesia's economic growth in various institutions predict Indonesia's growth until 2025, such as the IMF still predicts 5%, then the World Bank between 4.9-5%, and the OECD 5.2%, far above the average projection of global economic growth and above the growth of emerging market economies, such as China. Therefore, the sustainable policies taken are the key to future economic growth even though we realize that there are risks ahead.

Tantangan pencapaian pertumbuhan ekonomi yang baik di tahun 2024 antara lain adalah kenaikan suku bunga dalam negeri, ketahanan pangan nasional, pelemahan nilai tukar rupiah, dan kondisi politik dalam negeri menjelang pelaksanaan Pemilu tahun 2024 di awal tahun.

Challenges to achieving good economic growth in 2024 include an increase in domestic interest rates, national food security, a weakening rupiah exchange rate, and domestic political conditions ahead of the 2024 General Election at the beginning of the year.

Sumber: BPS, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian

Source: BPS, Coordinating Minister for Economic Affairs

Prospek Industri Jasa Perkapalan, Jasa *Marine* dan Jasa Logistik Tahun 2024

Prospects for the Shipping, Marine, and Logistics Services Industry in 2024

Pada tahun 2024, Indonesia memasuki fase yang menarik dalam industri *shipping* dan *marine*, khususnya di pasar *support vessel* dengan prediksi peningkatan kebutuhan dari sektor *upstream*, terutama melibatkan penambahan sumur minyak yang akan digarap oleh Pertamina. Penambahan sumur-sumur minyak ini menjadi peluang strategis bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang *shipping* dan *marine* untuk memperluas operasional dan mendapatkan kontrak jangka panjang.

In 2024, Indonesia enters an interesting phase in the shipping and marine industry, particularly in the support vessel market with predictions of increased demand from the upstream sector, specifically involving the addition of oil wells that will be worked on by Pertamina. The addition of these oil wells is a strategic opportunity for companies engaged in shipping and marine to expand operations and secure long-term contracts.

Selain itu, di sektor bisnis *marine*, sangat optimis diproyeksikan akan mengalami pertumbuhan. Program-program kemitraan yang terus berkembang dari tahun ke tahun menjadi pendorong utama dalam pertumbuhan bisnis *marine* di Indonesia. Adanya peluang kerja sama dengan perusahaan-perusahaan global yang berpengalaman dalam industri kelautan membuka pintu bagi perusahaan-perusahaan lokal untuk meningkatkan kapabilitas dan memperluas jangkauan pasar mereka. Dalam konteks ini, perusahaan-perusahaan *shipping* dan *marine* di Indonesia diharapkan dapat memanfaatkan momentum positif ini dengan mengidentifikasi peluang-peluang bisnis baru. Investasi dalam pengembangan dan pemeliharaan armada *support vessel* yang modern dan efisien akan menjadi kunci dalam mengambil bagian dalam peningkatan aktivitas di sektor *upstream*. Selain itu, terlibat dalam program kemitraan yang dirancang dengan baik di bidang *business marine* akan memungkinkan perusahaan-perusahaan tersebut untuk meningkatkan daya saing dan membuka pintu menuju pasar global.

Di samping peluang-peluang positif tersebut, perusahaan-perusahaan juga perlu mempertimbangkan tantangan dan risiko yang mungkin muncul. Hal ini termasuk ketidakpastian ekonomi global, fluktuasi harga minyak, dan perubahan regulasi di tingkat nasional dan internasional. Dengan strategi yang matang dan adaptabilitas terhadap dinamika pasar, perusahaan-perusahaan *shipping* dan *marine* di Indonesia dapat bersiap menghadapi tahun 2024 sebagai periode pertumbuhan yang menjanjikan dalam industri mereka.

In addition, the marine business sector is optimistically projected to experience growth. Partnership programs that continue to evolve year after year are a key driver in the growth of the marine business in Indonesia. Partnership opportunities with global companies experienced in the marine industry open the door for local companies to improve their capabilities and expand their market reach. In this context, Indonesian shipping and marine companies are expected to capitalize on this positive momentum by identifying new business opportunities. Investment in the development and maintenance of a modern and efficient fleet of support vessels will be the key to taking part in increased activity in the upstream sector. In addition, engaging in well-designed partnership programs in the marine business sector will enable these companies to improve their competitiveness and open doors to the global market.

Alongside these positive opportunities, companies also need to consider the challenges and risks that may arise. These include global economic uncertainty, oil price fluctuations, and regulatory changes at national and international levels. With a well-thought-out strategy and adaptability to market dynamics, Indonesian shipping and marine companies can prepare for 2024 as a promising period of growth in their industry.

Faktor yang diprediksi berdampak pada Perusahaan dalam Bisnis Jasa Perkapalan, Jasa *Marine*, dan Jasa Logistik tahun 2024

Factors Predicted to Affect Companies in the Business of Shipping Activities, Maritime Services, and Logistic Services in 2024

Market Disruption yang menuntut Transformasi Bisnis/ Inovasi Marketing Market Disruption that demands Business Transformation/Marketing Innovation

PTK memiliki strategi bisnis yang komprehensif untuk menghadapi perubahan pasar dengan menawarkan jasa dalam skema paket bundling yang melibatkan penyediaan jasa *marine* dan operasi kapal, jasa pandu-tunda kapal, penanganan tumpahan minyak di perairan, serta pengelolaan dan operasional pelabuhan. Selain itu, PTK juga memiliki segmen bisnis jasa pemeliharaan sarana fasilitas pelabuhan, pengerukan alur pelayaran, pengelolaan limbah kapal, dan perbaikan kapal. Segmen ini ditawarkan secara terpisah melalui skema *unbundling* dengan memberikan fleksibilitas kepada pelanggan untuk memilih layanan yang sesuai kebutuhan pelanggan. Dengan pendekatan ini, PTK dapat lebih baik mengakomodasi beragam kebutuhan pelanggan dan tetap responsif terhadap dinamika pasar maritim.

PTK melayani secara *end-to-end* sesuai kebutuhan pelanggan, sekaligus memperkuat branding sebagai *one-stop integrated maritime services provider*. Strategi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional tetapi juga sejalan dengan semangat PT Pertamina International Shipping sebagai SH IML yang memiliki peran penting dalam distribusi produk migas. PTK turut berkontribusi dalam menjaga kelancaran rantai pasok di sektor jasa maritim dan logistik, selain dari layanan perkapalan yang mereka sediakan. Dengan demikian, PTK dapat memberikan solusi terpadu dan menyeluruh, mencerminkan komitmen untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan mendukung stabilitas operasional di sektor jasa maritim dan logistik, di samping jasa perkapalan.

PTK has a comprehensive business strategy to deal with market changes by offering services in a bundling package scheme involving the provision of marine services and ship operations, pilotage services, oil spill handling in waters, and port management and operations. In addition, PTK also has business segments in port facility maintenance, shipping channel dredging, ship waste management, and ship repair. These segments are offered separately through an unbundling scheme by giving customers the flexibility to choose services that suit their needs. With this approach, PTK can better accommodate diverse customer needs and remain responsive to the dynamics of the maritime market.

PTK serves end-to-end according to customer needs while strengthening its branding as a one-stop integrated maritime services provider. This strategy not only improves operational efficiency but is also in line with the spirit of PT Pertamina International Shipping as SH IML, which has a crucial role in the distribution of oil and gas products. PTK contributes to maintaining a smooth supply chain in the maritime and logistics services sector, apart from the shipping services they provide. As such, PTK can provide integrated and comprehensive solutions, reflecting a commitment to meeting customer needs and supporting operational stability in the maritime and logistics services sector, in addition to shipping services.



Digitalisasi Proses Bisnis yang Berkelanjutan Sustainable Digitalization of Business Processes

Perkembangan industri 4.0 tidak dapat dihindari. Beberapa tahun ke belakang sampai saat ini, para pelaku bisnis terus berlomba melakukan digitalisasi dengan menciptakan gagasan model bisnis yang baru. Berbagai ide/inovasi teknologi digital terus diwujudkan untuk memberikan layanan yang efisien, termasuk dalam industri jasa pelayaran, maritim, dan logistik untuk meningkatkan nilai kompetitif. Implementasi digitalisasi yang telah dilakukan oleh PTK yaitu *Dashboard Laporan Keuangan*, *SIMONTANA*, pengembangan *Oil Spill Response System*, dan pengembangan digitalisasi lainnya yang mampu mengevaluasi informasi/data infrastruktur, lalu lintas, pergerakan kapal, serta perpindahan muatan/kargo. Teknologi ini juga sudah mulai diterapkan di Pelindo (Pelabuhan Tg. Priok) yang menerapkan digitalisasi dalam layanan operasional secara *end-to-end* untuk meningkatkan arus bongkar muat dan efisiensi biaya.

Digitalisasi proses bisnis yang diterapkan PTK secara bertahap pada tahun 2021 dan 2022 harus tetap berlanjut hingga tahun mendatang. Sebagai upaya dalam menyederhanakan alur kerja, sumber pencarian informasi faktual tentang operasional PTK baik secara *real time* maupun berkala yang bertujuan memudahkan dalam analisis pendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat sasaran digitalisasi harus mampu menjawab kebutuhan pekerja, perusahaan sebagai pelaku bisnis, serta pihak lain (regulator, pelanggan, Pertamina sebagai holding). PTK telah menyusun *roadmap* digitalisasi menuju *system excellence* tahun 2026, di mana pada tahun 2023 *milestone*-nya adalah sebagai *business process enabler* yang memberikan solusi-solusi digital dan migrasi data dari sistem lama ke teknologi baru.

The development of Industry 4.0 is unavoidable. In the past few years to date, business people have continued to compete in digitalization by creating new business model ideas. Various digital technology ideas/innovations continue to be realized to provide efficient services, including in the shipping, maritime, and logistics services industry, to increase competitive value. The digitalization that has been implemented by PTK is the Financial Statement Dashboard, SIMONTANA, the Oil Spill Response System development, and other digitalization developments that can evaluate information/data on infrastructure, traffic, ship movements, and cargo movement. This technology has also begun to be applied at Pelindo (Tg. Priok Port), which applies digitization in end-to-end operational services to improve loading and unloading flows and cost efficiency.

The digitization of business processes implemented gradually by PTK in 2021 and 2022 must continue until the coming year. As an effort to simplify workflows, sources of factual information about PTK operations both in real-time and periodically, which aims to facilitate analysis to support faster and more targeted decision-making, digitalization must be able to answer the needs of workers, companies as business actors, and other parties (regulators, customers, Pertamina as a holding). PTK has developed a digitalization roadmap towards system excellence in 2026, where the 2023 milestone was as a business process enabler that provides digital solutions and data migration from old systems to new technology.

Kondisi Industri Galangan Kapal Indonesia Tahun 2024 dan Target Pemenuhan Syarat TKDN Condition of Indonesian Shipyard Industry in 2024 and Target for Fulfillment of TKDN Requirements

Galangan kapal dan industri pelayaran saling bergantung satu sama lain menjadi ujung tombak dari pasokan logistik nasional, baik galangan pembangunan kapal baru (*ship building*), pemeliharaan & reparasi kapal (*ship yard*), maupun industri komponen/peralatan kapal (*engineering*). Pada tahun 2020-2021, PTK mengalami keterlambatan serah terima pada beberapa proyek pembangunan kapal, seperti harbor tug 3.200 HP. Efeknya, pengadaan material kapal menjadi lebih lama *delivery time*-nya, yang otomatis menyebabkan *progress* pembangunan kapal ikut melambat dan meleset dari target rencana. Dari sudut pandang industri galangan kapal, harga material khususnya pelat kapal terus mengalami kenaikan hingga 40%. Berkaca pada pengalaman di atas dan sebagai upaya mitigasi risiko, PTK harus lebih selektif dalam mengevaluasi *yard ability & financial ability* suatu galangan sebelum memutuskan untuk bekerja sama dalam pembangunan kapal atau perbaikan kapal, sekaligus memastikan terpenuhinya persyaratan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebesar 30%. Harapannya, industri galangan kapal turut membaik seiring dengan pertumbuhan ekonomi nasional.

Shipyards and the shipping industry depend on each other to be at the forefront of national logistics supply, both shipbuilding, ship maintenance & repair (shipyard), and the ship component/equipment industry (engineering). In 2020-2021, PTK experienced delays in the handover of several shipbuilding projects, such as the 3,200 HP harbor tug. The effect is that the procurement of ship materials has a longer delivery time, which automatically causes the progress of ship construction to slow down and miss the planned target. From the point of view of the shipyard industry, the price of materials, especially ship plates, continues to increase by up to 40%. Reflecting on the above experience and as a risk mitigation effort, PTK must be more selective in evaluating the yard ability & financial ability of a shipyard before deciding to cooperate in shipbuilding or ship repair while ensuring the fulfillment of the 30% Domestic Component Level (TKDN) requirement. Hopefully, the shipyard industry will also improve along with national economic growth.

Rencana Strategis Perusahaan Tahun 2024 Company's Strategic Plan for 2024

PTK bergerak dalam bisnis pelayaran dan jasa maritim, dengan 3 fokus utama yakni penyewaan kapal (*shipping activities*), jasa *marine* (*marine services*), dan logistik (*logistic services*), berikut rencana kerja dan program strategis PTK pada tahun 2024:

PTK is engaged in the shipping and maritime services business, with three main focuses, namely ship chartering (shipping activities), marine services, and logistics (logistic services). The following is PTK's work plan and strategic program for 2024:

1. Shipping Activities

- Membidik pengembangan ke segmen pasar penyediaan kapal di *Subholding Upstream*, dengan tetap menjaga aspek HSSE dan *operational excellence* untuk *customer existing* (SH C&T dan SH R&P),
- Melanjutkan penerapan program *Computerized Maintenance Management System* (CMMS) pada seluruh kapal milik guna menjaga keandalan kapal untuk mencapai target *commission days* dan *commercial days*,
- Meningkatkan HSSE *excellence* dan *operational excellence* melalui program pelatihan/peningkatan kompetensi *crew* guna menjaga kepercayaan pelanggan,
- Menerapkan *e-procurement* dan strategi kontrak payung dengan *vendor/supplier spare part* terkait pemenuhan *maintenance* kapal untuk mencapai target *commission & commercial days*.

2. Marine Services

- Investasi penambahan alat penunjang kegiatan *oil spill response* dan teknik bawah air,
- Sertifikasi dan peningkatan kompetensi pekerja untuk pekerjaan *marine & port engineering*, perawatan sarana dan fasilitas pelabuhan, pengerukan alur pelayaran.

3. Logistic Services

- Investasi penambahan *heavy equipment* dan *cargo handling* pada Peteka Shorebase Tanjung Batu ("PSTB") untuk meningkatkan *operational excellence*,
- Pengembangan bisnis *logistic shorebase* kabil melalui kemitraan strategis,
- Perluasan potensial *market logistic shorebase* di wilayah Indonesia yang bisa menjadi hub atau *centre point* yang dekat dengan proyek eksplorasi minyak dan gas.

1. Shipping Activities

- Targeting the development of the ship supply market segment in the Upstream Subholding while maintaining the HSSE aspect and ship operational excellence for existing customers (SH C&T dan SH R&P),
- Continue implementing the *Computerized Maintenance Management System* (CMMS) program on owned ships to maintain ship reliability and achieve target commission and commercial days,
- Improving HSSE and operational excellence through training programs/improvement of crew competence to maintain customer trust,
- Implementing *e-Procurement* and umbrella contract strategies with spare part vendors/suppliers related to fulfilling ship maintenance to achieve target commissions and commercial days.

2. Marine Services

- Investment in additional tools to support oil spill response activities and underwater techniques,
- Certification and improvement of worker competency for marine & port engineering work, port infrastructure maintenance, and shipping channel dredging.

3. Logistic Services

- Investment in adding heavy equipment and cargo handling at the Peteka Shorebase Tanjung Batu ("PSTB") to improve operational excellence,
- Kabil shore base logistics business development through strategic partnerships,
- Potential shore base logistics market expansion in Indonesia's regions, which can become a hub or center point adjacent to oil and gas exploration projects.

Target atau Proyeksi Tahun 2024

Target or Projection for 2024

Asumsi dalam Penetapan Target Tahun 2024

Assumptions in Setting the 2024 Target

Dalam proses penyusunan RKAP Tahun 2024 menggunakan asumsi utama di antaranya sebagai berikut:

In the process of preparing the 2024 ABOP, the following main assumptions were used:

Uraian Description	Satuan Unit	RKAP 2024 2024 ABOP
Kurs Exchange Rate	Rp to USD	15.000
Commission Days Kapal Milik Commission Days of Owned Ship	Hari Day	112.471
Commercial Days Kapal Milik Commercial Days of Owned Ship	Hari Day	110.938
Jumlah Muatan BBM yang diangkut Total fuel loads transported	Ribu KL Thousand KL	62.065
Jumlah Call Keagenan Tanker Total Tanker Agency Calls	Call	27.064
Jumlah Call Keagenan Umum Total General Agency Calls	Call	3.402

Sumber: Buku RKAP Tahun 2024

Source: 2024 ABOP Book

Target atau Proyeksi Kinerja Operasional Tahun 2024

2024 Operational Performance Target or Projection

Target *commission days* kapal milik pada tahun 2024 mengalami peningkatan, yaitu menjadi selama 112.471 hari dan target *commercial days* kapal milik pada tahun 2024 mengalami peningkatan, yaitu menjadi selama 110.938 hari. Sedangkan target *call* keagenan pada tahun 2024 mengalami peningkatan, yaitu menjadi sebesar 30.466 *call*.

The commission day target for owned ships in 2024 experienced an increase, namely 112,471 days, and the commercial day target for owned ships in 2024 experienced an increase, namely 110,938 days. Meanwhile, the agency call target in 2024 experienced an increase, namely 30,466 calls.

Tabel Target atau Proyeksi Operasi Segmen Shipping Activities
Table of Operating Target or Projection of the Shipping Activities Segment

Uraian Description	Satuan Unit	RKAP 2024 2024 ABOP
- Armada Kapal Milik Owned Ships	unit	386
- Armada Kapal <i>Back-to-back</i> Back-to-back Ships	unit	55
Jumlah Armada Kapal Total Fleet of Ships	unit	441
- <i>Commission Days</i> Kapal Milik Commission Days of Owned Ships	hari days	112.471
- <i>Commission Days</i> Kapal <i>Back-to-back</i> Commission Days of Back-to-back Ships	hari days	18.755
Jumlah <i>Commission Days</i> Total Commission Days	hari days	131.226
- <i>Commercial Days</i> Kapal Milik Commercial Days of Owned Ships	hari days	110.938

Tabel Target atau Proyeksi Operasi Segmen Marine Services
Table of Operating Target or Projection of the Marine Services Segment

Uraian Description	Satuan Unit	RKAP 2024 2024 ABOP
Keagenan <i>Tanker</i> Pihak Ketiga Third Party Tanker Agency	<i>call</i>	3.230
Keagenan <i>Charter</i> Milik Pertamina Pertamina Chartered Agency	<i>call</i>	23.834
Keagenan Umum General Agency	<i>call</i>	3.402
Jumlah Total	<i>call</i>	30.466

Tabel Target atau Proyeksi Operasi Segmen Logistic Services
Table of Operating Target or Projection of the Logistic Services Segment

Uraian Description	Satuan Unit	RKAP 2024 2024 ABOP
<i>Cargo Handling</i>	ton	349.800
<i>Vessel Berthing</i>	<i>call</i>	7.224
<i>Cover Storage</i>	m ²	272.292
<i>Open Storage</i>	m ²	546.268
<i>Waste Management</i>	ton	5.736

Target atau Proyeksi Kinerja Keuangan Tahun 2024

2024 Financial Performance Target or Projection

Target pendapatan usaha PTK pada tahun 2024 adalah mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp7,70 triliun dan untuk laba tahun berjalan ditargetkan sebesar Rp700,33 miliar.

PTK's revenue target in 2024 is to increase to Rp7.70 trillion, and profit for the year is targeted at Rp700.33 billion.

Tabel Target atau Proyeksi Pendapatan dan Laba

Table of Revenue and Profit Target or Projection

(dalam Rp juta) (in Rp million)

Uraian Description	RKAP 2024 2024 ABOP
Pendapatan usaha Revenue	7.704.350
Beban pokok pendapatan Cost of revenue	5.471.270
Labanya bruto Gross profit	2.233.080
Labanya sebelum pajak penghasilan Profit before income tax	986.846
Labanya tahun berjalan Profit for the year	700.333
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan Total comprehensive income for the year	700.333

Target posisi keuangan PTK pada tahun 2024 adalah jumlah aset sebesar Rp9,03 triliun, jumlah liabilitas sebesar Rp3,40 triliun, dan jumlah ekuitas sebesar Rp5,63 triliun.

PTK's financial position target in 2024 is total assets of Rp9.03 trillion, total liabilities of Rp3.40 trillion, and total equity of Rp5.63 trillion.

Tabel Target atau Proyeksi Posisi Keuangan

Table of Financial Position Target or Projection

(dalam Rp juta) (in Rp million)

Uraian Description	RKAP 2024 2024 ABOP
Jumlah Aset Total Assets	9.034.091
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	3.401.442
Jumlah Ekuitas Total Equity	5.632.649

Target atau Proyeksi Struktur Modal Tahun 2024

2024 Capital Structure Target or Projection

Manajemen mengelola struktur modal pada tahun 2024 dengan memantau jumlah liabilitas terhadap jumlah ekuitas. Jumlah liabilitas tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp3,40 triliun dan jumlah ekuitas sebesar Rp5,63 triliun.

Management manages the capital structure for 2024 by monitoring total liabilities against total equity. Total liabilities in 2024 are targeted at Rp3.40 trillion, and total equity at Rp5.63 trillion.

Target atau Proyeksi Kebijakan Dividen Tahun 2024

2024 Dividend Policy Target or Projection

Kebijakan dividen pada tahun 2024 ditetapkan melalui mekanisme Rapat Umum pemegang Saham (RUPS) dengan mempertimbangkan pertumbuhan kinerja Perusahaan.

The dividend policy for 2024 is determined through the mechanism of the General Meeting of Shareholders (GMS) by considering the Company's performance growth.

Target atau Proyeksi Investasi Tahun 2024

2024 Investment Target or Projection

Target Anggaran Belanja Investasi (ABI) pada tahun 2024 adalah sebesar Rp312,46 miliar yang terdiri dari Kategori *Business Development* sebesar Rp285,90 miliar, Kategori *Non-Business Development* sebesar Rp26,55 miliar, dan Kategori Anorganik sebesar Rp15,00 juta.

The Investment Expenditure Budget (ABI) target for 2024 is Rp312.46 billion, consisting of a Business Development Category of Rp285.90 billion, a Non-Business Development Category of Rp26.55 billion, and an Inorganic Category of Rp15.00 million.

Target atau Proyeksi Kinerja K3 Tahun 2024

2024 OHS Performance Target or Projection

Target kinerja K3 pada tahun 2024 adalah tidak adanya insiden berkategori NoA.

The OHS performance target by 2024 is to have no incidents categorized as NoA.

Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal

Material Commitment for Capital Goods Investment

Pada tahun 2023, tidak melakukan ikatan yang material atas investasi barang modal yang dilakukan, sehingga tidak ada pengungkapan yang diperlukan.

In 2023, there were no material commitments for the investment in capital goods made, so no disclosure is required.

Realisasi Investasi Barang Modal

Realization of Capital Goods Investment

Realisasi investasi barang modal PTK tercermin pada realisasi Anggaran Belanja Investasi (ABI) pada tahun berjalan. Nilai realisasi ABI pada tahun 2023 adalah sebesar AS\$9,22 juta yaitu tercapai 30,18% dibandingkan dengan target 2023.

The realization of PTK's capital goods investment is reflected in the realization of the Investment Expenditure Budget (ABI) in the current year. The value of ABI realization in 2023 was US\$9.22 million, which achieved 30.18% compared to the 2023 target.

Plan/ Target Tahun 2023 2023 Plan/Target	Realisasi Tahun 2023 2023 Realization	Pencapaian Achievement
AS\$30,55 juta million	AS\$9,22 juta million	30,18%

Keterangan:
Realisasi ABI adalah total drawdown ABI hasil konversi dari Rp ke AS\$ menggunakan kurs *closing* bulanan dari korporat (*holding*) dimana kurs yang ditetapkan tiap bulannya berbeda-beda.

Information:
The realization of ABI is the total ABI drawdown resulting from the conversion from Rp to USD using the monthly closing rate from the corporate (*holding*), where the rate set each month is different.

Investasi barang modal pada tahun 2023 bertujuan untuk mendukung kelancaran operasional Perusahaan. Realisasi penyerapan Anggaran Investasi Perusahaan pada tahun 2023 antara lain sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

1. Kategori *Business Development*
 - a. Modifikasi/pemenuhan spesifikasi kapal sesuai requirement atas investasi pembelian kapal *Landing Craft Transport* (LCT) untuk kebutuhan PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur ("PHKT"),
 - b. Pengadaan satu *spread diving equipment* PT Pertamina Hulu Energi Offshore Southeast Sumatra ("PHE OSES"),
 - c. Pengadaan peralatan dan perlengkapan inspeksi bawah air,
 - d. Pemasangan *Ballast Water Treatment System* (BWTS).
2. Kategori *Non-Business Development*
 - a. Perbaikan Sarana dan Fasilitas *Shorebase* Kabil - PPL,
 - b. Digitalisasi PTK Tahap II,
 - c. Revitalisasi Sarana dan Fasilitas Layanan Lindungan Perairan (LLP) Semarang,
 - d. Peremajaan peralatan dan perlengkapan pekerjaan bawah air,
 - e. Renovasi Rumah Dinas Perusahaan (RDP),
 - f. Instalasi *Closed-Circuit Television* (CCTV),
 - g. Pengadaan dan Pemasangan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) *Marine Operation* Sumbagut,
 - h. Perbaikan LLP Wayame,
 - i. Revitalisasi *Jetty Shorebase* Kabil - PPL,
 - j. Pembangunan Pangkalan LLP Bitumen Plant Gresik,
 - k. Pembangunan SBNP Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Sei Siak,
 - l. Revitalisasi Sarana dan Fasilitas LLP Maumere,

Investment in capital goods in 2023 aimed to support the smooth operation of the Company. The realization of the absorption of the Company's Investment Budget in 2023, among others, is as described below:

1. Business Development Category
 - a. Modification/fulfillment of vessel specifications in accordance with the requirements for the Landing Craft Transport (LCT) vessel purchase investment for the needs of PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur ("PHKT"),
 - b. Procurement of one spread diving equipment for PT Pertamina Hulu Energi Offshore Southeast Sumatra ("PHE OSES"),
 - c. Procurement of underwater inspection equipment and supplies,
 - d. Installation of the Ballast Water Treatment System (BWTS).
2. Non-Business Development Category
 - a. Improvement of Kabil Shorebase Facilities and Infrastructure - PPL,
 - b. PTK Digitalization Phase II,
 - c. Revitalization of Semarang Water Protection Service (LLP) Facilities and Infrastructure,
 - d. Rejuvenation of underwater work equipment and supplies,
 - e. Renovation of Company Office House (RDP),
 - f. Installation of Closed-Circuit Television (CCTV),
 - g. Procurement and Installation of Shipping Navigation Assistance Facilities (SBNP) for Marine Operation of Northern Sumatra,
 - h. Wayame LLP Repair,
 - i. Revitalization of Kabil Shorebase Jetty - PPL,
 - j. Construction of LLP Bitumen Plant Gresik Base,
 - k. Construction of SBNP Terminal for Own Use (TUKS) of the Sei Siak Fuel Oil Terminal (TBBM),
 - l. Revitalization of Maumere LLP Facilities and Infrastructure,

- m. Pembangunan Pangkalan LLP TBBM Ende,
 - n. Revitalisasi SBNP *Type Bouy* Anak Sambu,
 - o. Pengadaan *forklift Shorebase* Kabil - PPL,
 - p. Pembangunan Sarana Tambat KKR Marine Panjang,
 - q. Revitalisasi Sarana dan Fasilitas LLP Pangkalan Bun
-
- r. Perluasan Pangkalan LLP di TBBM Toli-Toli,
 - s. Perluasan Pangkalan LLP di TBBM Tanjung Wangi,
 - t. Pembangunan *floating jetty* KKR Manokwari,
 - u. Pengadaan Perlengkapan Penunjang *Dockyard* Bagus Kuning,
-
- v. Pembangunan *floating jetty* KKR Tobelo,
 - w. Pembangunan *floating jetty* KKR Fakfak.

- m. Construction of LLP TBBM Ende Base,
 - n. Revitalization of the *Type Bouy* Anak Sambu SBNP,
 - o. Procurement of Kabil Shorebase forklift - PPL,
 - p. Construction of KKR Marine Panjang Mooring Facilities,
 - q. Revitalization of Facilities and Infrastructure of LLP Pangkalan Bun,
-
- r. Expansion of LLP Base at Toli-Toli TBBM,
 - s. Expansion of LLP Base at Tanjung Wangi TBBM,
 - t. Construction of KKR Manokwari floating jetty,
 - u. Procurement of Supporting Equipment for Bagus Kuning Dockyard,
-
- v. Construction of Tobelo KKR floating jetty,
 - w. Construction of Fakfak KKR floating jetty.

Adapun justifikasi atas beberapa mata anggaran investasi yang tidak terealisasi pada tahun 2023 antara lain disebabkan oleh proyek berikut:

- a. Pembelian 1 unit *Accommodation Work Barge* (AWB) Superior
Proyek telah selesai proses pengadaannya (sudah dilakukan penetapan pemenang), *PODA/Delivery* dan transaksi finansial belum dapat dilaksanakan dikarenakan masih menunggu adanya persetujuan Novasi Kontrak dari Penyewa Kapal (PHE OSES).
- b. Pembelian 1 unit *Anchor Handling Tug and Supply* (AHTS)
Proyek dalam proses pengadaan hingga akhir tahun 2023, sehingga belum dapat dilakukan transaksi finansial.

The justification for several investment budget items that were not realized in 2023 was due to the following projects:

- a. Purchase of 1 unit of Accommodation Work Barge (AWB) Superior
The project has completed the procurement process (winner has been determined), *PODA/Delivery* and financial transactions have not yet been carried out due to the pending approval of the Contract Novation from the Vessel Charterer (PHE OSES).
- b. Purchase of 1 unit of Anchor Handling Tug and Supply (AHTS)
The project is in the procurement process until the end of 2023, so the financial transaction cannot be conducted yet.

Kontribusi kepada Negara Contribution to the State

Pengelolaan dan Pengendalian Aspek Perpajakan Management and Control of Tax Aspect

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan, Pajak diakui pada laporan laba rugi, kecuali untuk pajak atas transaksi yang diakui di pendapatan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam pendapatan komprehensif lain atau ekuitas.

Beban pajak kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku atau yang secara substansial telah berlaku pada tanggal pelaporan. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sehubungan dengan situasi dimana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, Manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

Pendapatan usaha PTK dan Entitas Anak (Grup PTK) ada yang terkena pajak penghasilan final. Penghasilan Grup PTK atas pendapatan dari jasa perkapalan yang diberikan kepada perusahaan domestik dikenakan pajak final dengan tarif 1,20% sesuai dengan Undang-undang Perpajakan di Indonesia.

The tax expense comprises current and deferred tax. Tax is recognized in the profit or loss, except to the extent that it relates to items recognized in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is also recognized in other comprehensive income or directly in equity, respectively.

The current income tax charge is calculated using tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted at the reporting date. Management periodically evaluates positions taken in tax returns in relation to situations in which applicable tax regulations are subject to interpretation. It establishes provisions, where appropriate, based on the amounts expected to be paid to the tax authorities.

Certain revenues of PTK and its Subsidiaries (PTK Group) are subject to final income tax. PTK Group's income from revenue of shipping services provided to domestic companies is subject to a final tax at a rate of 1.20% and under the Taxation Laws of Indonesia.



Setoran Pajak

Tax Deposits

Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak merupakan pencerminan kenegaraan di bidang perpajakan dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, PTK berkomitmen dalam memenuhi kewajiban membayar pajak, sebagai Wajib Pajak dan sebagai Pemotong Pajak. Tahun 2023, PTK sebagai Wajib Pajak telah memberikan kontribusi Perusahaan dalam pemenuhan kewajiban PPh Badan.

Responsibility for the obligation to pay taxes reflects the statehood in taxation for national development. Therefore, PTK is committed to fulfilling the obligation to pay taxes as a Taxpayer and Tax Withholder. In 2023, PTK as a Taxpayer made the Company's contribution in fulfilling Corporate Income Tax obligations.

Tabel Setoran Pajak

Table of Tax Deposits

(dalam Rp juta, kecuali dinyatakan lain) (in Rp million, unless otherwise stated)

Keterangan Description	2023	2022	2021	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) 2022-2023	
				selisih difference	persentase percentage
Pajak Penghasilan (PPh) Income Tax (PPh)	294.834	221.826	111.701	110.125	98,59%
Jumlah Setoran Pajak Total tax Deposits	294.834	221.826	111.701	110.125	98,59%



Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Realization of the Use of Public Offering Proceeds

Sampai dengan akhir tahun 2022, PTK tidak melakukan penawaran umum saham dan tidak menerbitkan efek di bursa efek manapun. Sehingga, PTK tidak memiliki kewajiban menyampaikan informasi terkait realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum.

As of the end of 2023, PTK did not conduct a public offering of shares and did not issue securities on any stock exchange. Thus, PTK has no obligation to convey information related to the realization of the use of proceeds from a public offering.

Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan Usaha, Akuisisi, dan/ atau Restrukturisasi Utang/ Modal

Material Information Regarding Investment, Expansion, Divestment, Merger, Acquisition, and/or Debt/Capital Restructuring

Sepanjang tahun 2023, tidak terdapat informasi material terkait investasi, ekspansi, divestasi dan penggabungan usaha/merger oleh Perusahaan, sehingga tidak terdapat informasi yang dapat disajikan terkait hal tersebut.

Throughout 2023, there was no material information related to investment, expansion, divestment, and business combination/merger by the Company, so there is no information that can be presented regarding this matter.

Namun pada tahun 2023 terdapat informasi terkait restrukturisasi modal. Restrukturisasi PT Pertamina Marine Solutions melalui penyertaan modal dari PT Pertamina Trans Kontinental kepada PT Pertamina Marine Solutions. Perusahaan telah melakukan Penambahan Modal dan Penerbitan Saham Baru, dimana seluruh saham baru PT Pertamina Marine Solutions akan diambil bagian oleh Perusahaan dengan cara penyertaan modal berupa penyetoran sejumlah uang yang akan dikonversi menjadi saham dengan nilai sebesar Rp47.234.000.000 untuk 47.234 lembar saham baru, dengan masing-masing lembar saham memiliki nilai nominal Rp1.000.000.

However, there was information related to capital restructuring in 2023. Restructuring of PT Pertamina Marine Solutions is through equity participation from PT Pertamina Trans Kontinental to PT Pertamina Marine Solutions. The Company has conducted Additional Capital and Issuance of New Shares, where all new shares of PT Pertamina Marine Solutions will be taken up by the Company through capital participation in the form of depositing a sum of money, which will be converted into shares with a value of Rp47,234,000,000 for 47,234 new shares, with each share having a nominal value of Rp1,000,000.

Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau dengan Pihak Afiliasi/Berelasi

Material Information Regarding Transactions Containing Conflicts of Interest and/or with Affiliated/Related Parties

Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan Material Transactions Containing Conflicts of Interest

Selama tahun 2023, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan, sehingga tidak terdapat informasi yang diungkapkan.

During 2023, there were no transactions containing conflicts of interest, so there is no information to be disclosed.

Transaksi Material dengan Pihak Afiliasi/Berelasi Material Transactions with Affiliated/Related Parties

Dalam kegiatan usaha normal, PTK dan Anak Perusahaan (Grup) melakukan transaksi usaha dan bukan usaha dengan pihak-pihak berelasi, yang terafiliasi dengan Grup melalui kepemilikan langsung dan tak langsung, dan/atau di bawah kendali pihak yang sama ataupun entitas berelasi dengan Pemerintah. Harga jual atau beli antara pihak-pihak berelasi ditentukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, yang mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak ketiga. Transaksi ini merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan.

In the normal course of business, PTK and its Subsidiaries (Group) enter into trade and non-trade with related parties, which are affiliated with the Group through equity ownership, either direct or indirect, and/or under common control or Government-related entities. Sales or purchase prices among related parties are made based on terms agreed by the parties, which may not be the same as those of the transactions between third parties. This transaction is a business activity carried out to generate revenue and is carried out regularly, repeatedly, and/or continuously.

Kebijakan dan Mekanisme Persetujuan Transaksi Pihak Berelasi Related Party Transactions Approval Policy and Mechanism

Kebijakan Penelaahan dan Persetujuan Transaksi Pihak Berelasi Related Party Transaction Review and Approval Policy

Ketentuan dan kebijakan penelaahan serta persetujuan transaksi pihak berelasi diatur dalam Anggaran Dasar.

The provisions and policies for the review and approval of related party transactions are set out in the Articles of Association.



Keterlibatan Organ Perusahaan dalam Proses Reviu atas Transaksi Pihak Berelasi

Involvement of Company Organs in the Review Process of Related Party Transactions

Mekanisme reviu atas transaksi dengan pihak berelasi dilakukan melalui proses audit, baik oleh Internal Audit maupun auditor eksternal. Dalam proses audit tersebut, Perusahaan melibatkan Organ Perusahaan diantaranya Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit dan beberapa Divisi yang terkait.

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan oleh Komite Audit, selanjutnya peran Dewan Komisaris adalah memberikan arahan dan masukan kepada Direksi agar transaksi dengan pihak berelasi dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip transaksi yang wajar (*arm's-length principle*).

Direksi memastikan seluruh transaksi dengan pihak berelasi di sepanjang tahun 2023 telah melalui prosedur yang memadai dan telah dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum dan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arm's-length principle*). Informasi lebih rinci terkait transaksi pihak berelasi telah diungkapkan dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan pada Catatan 25.

The review mechanism for transactions with related parties is carried out through an audit process, both by Internal Audit and external auditors. In the audit process, the Company involves the Company Organs, including the Board of Commissioners, Board of Directors, Audit Committee, and several related Divisions.

Based on the results of the review conducted by the Audit Committee, subsequently, the role of the Board of Commissioners is to provide direction and input to the Board of Directors so that transactions with related parties can be carried out in accordance with the arm's-length principle.

The Board of Directors ensures that all transactions with related parties throughout 2023 have gone through adequate procedures and have been carried out in accordance with generally accepted business practices and fulfill the arm's-length principle. More detailed information regarding related party transactions has been disclosed in the Company's Consolidated Financial Statements in Note 25.



Tujuan Transaksi Pihak Berelasi

Objective of Related Party Transactions

Tujuan utama dilakukannya transaksi dengan pihak berelasi secara umum adalah salah satu bentuk dukungan kepada kelancaran dan keberlanjutan bisnis Perusahaan.

In general, the main objective of transactions with related parties is to support the smooth running and sustainability of the Company's business.

Kewajaran Transaksi Pihak Berelasi

Fairness of Related Party Transactions

Kewajaran seluruh transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik dilakukan dengan kondisi dan persyaratan dengan pihak ketiga maupun tidak, diungkapkan pada laporan keuangan, telah sesuai dengan standar PSAK 7 (Revisi 2015): Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi. Selain itu, penilaian kewajaran transaksi dengan pihak berelasi didasarkan pada *the arm's length principle*.

The fairness of all transactions carried out with related parties, either carried out under conditions and terms with third parties or not, is disclosed in the financial statements in accordance with the standards of PSAK 7 (Revised 2015): Disclosure of Related Parties. In addition, the assessment of the fairness of transactions with related parties is based on the arm's length principle.

Nama, Sifat Hubungan dan Sifat Transaksi Pihak Berelasi

Name, Nature of Relationship, and Nature of Related Party Transactions

Sifat hubungan dan transaksi dengan pihak yang berelasi adalah sebagai berikut:

The nature of transactions and relationships with related parties are as follows:

Tabel Nama, Sifat Hubungan dan Sifat Transaksi Pihak Berelasi Tahun 2023

Table of Name, Nature of Relationship and Nature of Related Party Transactions in 2023

Pihak berelasi dan entitas berelasi dengan pemerintah Related Parties and Government-related entities	Sifat Hubungan Nature of Relationships	Saldo dan Sifat Transaksi Balance and nature of transactions
PT Pertamina (Persero) ('Pertamina')	Perusahaan induk utama Ultimate parent company	Pendapatan, beban pokok pendapatan, piutang usaha, kontrak aset, utang usaha, liabilitas kontrak, dan modal saham Revenue, cost of revenue, trade receivables, contract assets, trade payables, contract liabilities, and share capital
PT Pertamina International Shipping ('PIS')	Pemegang saham mayoritas Majority shareholder	Pendapatan, beban pokok pendapatan, piutang usaha, kontrak aset, utang usaha, dan liabilitas kontrak Revenue, cost of revenue, trade receivables, contract assets, trade payables, and contract liability

Pihak berelasi dan entitas berelasi dengan pemerintah Related Parties and Government-related entities	Sifat Hubungan Nature of Relationships	Saldo dan Sifat Transaksi Balance and nature of transactions
PT Pertamina Energy Terminal ("PET")	Entitas sepengendali Entity under common control	Pendapatan, beban pokok pendapatan, beban umum dan administrasi, piutang usaha, kontrak aset, dan utang usaha Revenue, cost of revenue, general & administrative expenses, trade receivables, contract assets, and trade payables
PT Kilang Pertamina International ("KPI")	Entitas sepengendali Entity under common control	Pendapatan, beban pokok pendapatan, piutang usaha, kontrak aset, dan utang usaha Revenue, cost of revenue, trade receivables, contract asset, and trade payables
PT Perta Arun Gas ("PAG")	Entitas sepengendali Entity under common control	Pendapatan, beban pokok pendapatan, piutang usaha, kontrak aset, dan utang usaha Revenue, cost of revenue, trade receivables, contract asset, and trade payables
PT Pertamina Patra Niaga ("Patra Niaga")	Entitas sepengendali Entity under common control	Pendapatan, piutang usaha, kontrak aset, dan utang usaha Revenue, trade receivables, contract asset, and trade payables
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI")	Entitas yang berelasi dengan Pemerintah Government-related entity	Penempatan kas dan setara kas Placement of cash and cash equivalents
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI")	Entitas yang berelasi dengan Pemerintah Government-related entity	Penempatan kas dan setara kas Placement of cash and cash equivalents
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri")	Entitas yang berelasi dengan Pemerintah Government-related entity	Penempatan kas dan setara kas Placement of cash and cash equivalents
PT Pertamina Retail ("PTPR")	Entitas sepengendali Entity under common control	Pendapatan, beban pokok pendapatan, piutang usaha, dan kontrak aset Revenue, cost of revenue, trade receivables, and contract assets
PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur ("PHKT")	Entitas sepengendali Entity under common control	Pendapatan, beban pokok pendapatan, piutang usaha, dan kontrak aset Revenue, cost of revenue, trade receivables, and contract assets
PT Pertamina Hulu Mahakam ("PHM")	Entitas sepengendali Entity under common control	Pendapatan, beban pokok pendapatan, piutang usaha, dan kontrak aset Revenue, cost of revenue, trade receivables, and contract assets
PT Pertamina Hulu Energi Offshore North-West Java ("PHE ONWJ")	Entitas sepengendali Entity under common control	Pendapatan, beban pokok pendapatan, piutang usaha, dan kontrak aset Revenue, cost of revenue, trade receivables, and contract assets
PT Pertamina Hulu Sanga Sanga ("PHSS")	Entitas sepengendali Entity under common control	Pendapatan, beban pokok pendapatan, piutang usaha, dan kontrak aset Revenue, cost of revenue, trade receivables, and contract assets
PT Pertamina Lubricants ("PTPL")	Entitas sepengendali Entity under common control	Pendapatan dan piutang usaha Revenue and trade receivables
PT PGN LNG Indonesia ("PGN LNG")	Entitas sepengendali Entity under common control	Pendapatan, beban pokok pendapatan, piutang usaha, dan kontrak aset Revenue, cost of revenue, trade receivables, and contract assets
PT Pertamina EP ("PEP")	Entitas sepengendali Entity under common control	Pendapatan dan piutang usaha Revenue and trade receivables
PT Pertamina Drilling Service ("PDSI")	Entitas sepengendali Entity under common control	Pendapatan dan piutang usaha Revenue and trade receivables
PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore ("PHE WMO")	Entitas sepengendali Entity under common control	Pendapatan, beban pokok pendapatan, piutang usaha, dan kontrak aset Revenue, cost of revenue, trade receivables, and contract assets
PT Pertamina Bina Medika ("Pertamedika")	Entitas sepengendali Entity under common control	Beban pokok pendapatan, beban umum dan administrasi, dan utang usaha Cost of revenue, general and administrative expenses, and trade payables
PT Patra Logistik ("Patra Logistik")	Entitas sepengendali Entity under common control	Pendapatan, beban pokok pendapatan dan liabilitas kontrak Revenue, cost of revenue, and contract liabilities
PT Nusantara Regas ("Nusantara Regas")	Entitas sepengendali Entity under common control	Pendapatan dan piutang usaha Revenue and trade receivables
PT Pertamina Hulu Energi Offshore Southeast Sumatra ("PHE OSES")	Entitas sepengendali Entity under common control	Pendapatan, piutang usaha, dan kontrak aset Revenue, trade receivables, and contract assets
PT Kilang Pertamina Balikpapan ("KP Balikpapan")	Entitas sepengendali Entity under common control	Pendapatan dan kontrak aset Revenue and contract assets
PT Pertamina Hulu Energi North Sumatra Offshore ("PHE NSO")	Entitas sepengendali Entity under common control	Pendapatan dan kontrak aset Revenue and contract assets
PT Prima Armada Raya ("PAR")	Entitas sepengendali Entity under common control	Beban umum dan administrasi dan utang usaha General and administrative expenses and trade payables
PT Pertamina Training & Consulting ("PTC")	Entitas sepengendali Entity under common control	Beban umum dan administrasi dan utang usaha General and administrative expenses and trade payables



Pihak berelasi dan entitas berelasi dengan pemerintah Related Parties and Government-related entities	Sifat Hubungan Nature of Relationships	Saldo dan Sifat Transaksi Balance and nature of transactions
PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("BSI")	Entitas yang berelasi dengan Pemerintah Government-related entity	Penempatan kas dan setara kas dan pinjaman jangka panjang Placement of cash and cash equivalents, and long-term borrowings
PT Mitra Tours & Travel ("MTT")	Entitas sepengendali Entity under common control	Beban umum dan administrasi dan utang usaha General and administrative expenses and trade payables
PT Pertamina International Marketing & Distribution Pte. Ltd. ("PIMD")	Entitas sepengendali Entity under common control	Liabilitas kontrak Contract liabilities
PT Pertamina Hulu Rokan ("PHR")	Entitas sepengendali Entity under common control	Pendapatan Revenue
PT Pertamina Hulu Energi Jambi Merang ("PHE JM")	Entitas sepengendali Entity under common control	Pendapatan Revenue
PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia ("ATPI")	Entitas sepengendali Entity under common control	Beban pokok pendapatan Cost of Revenue
PT Benggala Laju Abadi ("Benggala")	Entitas sepengendali Entity under common control	Penyertaan saham Investment in shares
PT Banggai Bahtera Laju Abadi ("Banggai")	Entitas sepengendali Entity under common control	Penyertaan saham Investment in shares
PT Aru Bahtera Laju Abadi ("Aru")	Entitas sepengendali Entity under common control	Penyertaan saham Investment in shares
PT Alor Bahtera Laju Abadi ("Alor")	Entitas sepengendali Entity under common control	Penyertaan saham Investment in shares
PT Ararkula Bahtera Laju Abadi ("Ararkula")	Entitas sepengendali Entity under common control	Penyertaan saham Investment in shares
PT Bangkit Bahtera Laju Abadi ("Bangkit")	Entitas sepengendali Entity under common control	Penyertaan saham Investment in shares
PT Liran Bahtera Laju Abadi ("Liran")	Entitas sepengendali Entity under common control	Penyertaan saham Investment in shares
PT Barung Bahtera Laju Abadi ("Barung")	Entitas sepengendali Entity under common control	Penyertaan saham Investment in shares
PT Miangas Bahtera Laju Abadi ("Miangas")	Entitas sepengendali Entity under common control	Penyertaan saham Investment in shares
PT Brass Bahtera Laju Abadi ("Brass")	Entitas sepengendali Entity under common control	Penyertaan saham Investment in shares
PT Damar Bahtera Laju Abadi ("Damar")	Entitas sepengendali Entity under common control	Penyertaan saham Investment in shares
PT Damanusa Bahtera Laju Abadi ("Damanusa")	Entitas sepengendali Entity under common control	Penyertaan saham Investment in shares
PT Bepondi Bahtera Laju Abadi ("Bepondi")	Entitas sepengendali Entity under common control	Penyertaan saham Investment in shares
PT Trans Yeong Maritime ("TYM")	Entitas ventura bersama Joint venture entity	Piutang usaha Trade receivables
PT Pelabuhan Indonesia (Persero) ("Pelindo")	Entitas yang berelasi dengan Pemerintah Government-related entity	Piutang usaha, kontrak aset, dan liabilitas kontrak Revenue, contract assets, and contract liabilities
PT Pelindo Marine Service ("Pelindo MS")	Entitas yang berelasi dengan Pemerintah Government-related entity	Piutang usaha Trade receivables
PT Administrasi Medika ("Admedika")	Entitas yang berelasi dengan Pemerintah Government-related entity	Utang usaha Trade payables
PT Pratama Mitra Sejati ("PMS")	Entitas yang berelasi dengan Pemerintah Government-related entity	Utang usaha Trade payables
PT Sigma Cipta Utama ("SCU")	Entitas yang berelasi dengan Pemerintah Government-related entity	Beban pokok pendapatan dan utang usaha Cost of revenue and trade payables
PT Jawa Satu Power ("JSP")	Entitas yang berelasi dengan Pemerintah Government-related entity	Piutang usaha Trade receivables
PT Trans Pacific Petrochemical Indotama ("TPPI")	Entitas yang berelasi dengan Pemerintah Government-related entity	Piutang usaha Trade receivables
PT Peralife Insurance ("Peralife")	Entitas yang berelasi dengan Pemerintah Government-related entity	Utang usaha Trade payables

Pihak berelasi dan entitas berelasi dengan pemerintah Related Parties and Government-related entities	Sifat Hubungan Nature of Relationships	Saldo dan Sifat Transaksi Balance and nature of transactions
PT Surveyor Indonesia (Persero) ("Surveyor Indonesia")	Entitas yang berelasi dengan Pemerintah Government-related entity	Utang usaha Trade payables
PT Telkom Satelit Indonesia ("Telkomsat")	Entitas yang berelasi dengan Pemerintah Government-related entity	Utang usaha Trade payables
PT Biro Klasifikasi Indonesia ("BK")	Entitas yang berelasi dengan Pemerintah Government-related entity	Utang usaha Trade payables
PT PAL Indonesia ("PAL")	Entitas yang berelasi dengan Pemerintah Government-related entity	Utang usaha Trade payables
PT Jasa Armada Indonesia Tbk ("IPCM")	Entitas anak dari BUMN yang dikendalikan pemerintah Entitas anak dari BUMN yang dikendalikan pemerintah	Utang usaha Trade payables
PT Superintending Company of Indonesia ("SUCOFINDO")	Entitas anak dari BUMN yang dikendalikan pemerintah Entitas anak dari BUMN yang dikendalikan pemerintah	Utang usaha Trade payables
PT Jasamarga Related Business ("JRB")	Entitas anak dari BUMN yang dikendalikan pemerintah Entitas anak dari BUMN yang dikendalikan pemerintah	Piutang usaha Trade receivables

Saldo Transaksi Pihak Berelasi Balance of Related Party Transactions

Berikut adalah saldo transaksi dengan pihak berelasi pada tahun 2022 dan 2023:

The following is the balance of transactions with related parties in 2022 and 2023:

Tabel-tabel Saldo Transaksi Pihak Berelasi
Table of Balance of Related Party Transactions

(dalam Rp juta) (in Rp million)

Saldo Pihak Berelasi dalam Aset Balance of Related Parties in Assets	Saldo Pihak Berelasi Balance of Related Parties		Persentase terhadap Jumlah Aset Percentage to Total Assets	
	2023	2022	2023	2022
Kas dan setara kas Cash and cash equivalents	1.764.132	1.053.667	19,32%	12,85%
Piutang usaha Trade receivables	881.215	1.181.134	9,76%	14,40%
Kontrak aset Contract assets	1.226.058	1.034.895	13,59%	12,62%
Penyertaan saham Investment in shares	6.652	6.661	0,07%	0,08%
Jumlah Aset - Pihak Berelasi Total Assets - Related Parties	3.878.057	3.276.357	42,97%	39,94%
Jumlah Aset - Konsolidasian Total Assets - Consolidated	9.024.799	8.202.571	100,00%	100,00%

Saldo Pihak Berelasi dalam Liabilitas Balance of Related Parties in Liabilities	Saldo Pihak Berelasi Balance of Related Parties		Persentase terhadap Jumlah Aset Percentage to Total Liabilities	
	2023	2022	2023	2022
Utang usaha Trade payables	935.385	909.546	21,33%	19,79%
Liabilitas kontrak Contract liabilities	41.153	20.136	0,94%	0,44%
Pinjaman jangka panjang Long-term borrowings	482.037	555.563	10,99%	12,09%
Jumlah Liabilitas - Pihak Berelasi Total Liabilities - Related Parties	1.458.575	1.485.245	33,27%	32,32%
Jumlah Liabilitas - Konsolidasian Total Liabilities - Consolidated	4.384.414	4.594.992	100,00%	100,00%

Saldo Pihak Berelasi dalam Pendapatan Usaha Balance of Related Parties in Revenue	Saldo Pihak Berelasi Balance of Related Parties		Persentase terhadap Jumlah Aset Percentage to Total Revenue	
	2023	2022	2023	2022
Pendapatan usaha - pihak berelasi Revenue - Related Parties	5.691.003	4.124.875	84,35%	86,21%
Pendapatan Usaha - Konsolidasian Revenue - Consolidated	6.746.509	4.784.913	100,00%	100,00%

Saldo Pihak Berelasi dalam Beban Pokok Pendapatan Balance of Related Parties in Cost of Revenue	Saldo Pihak Berelasi Balance of Related Parties		Persentase terhadap Jumlah Aset Percentage to Total Revenue	
	2023	2022	2023	2022
Beban pokok pendapatan - pihak berelasi Cost of Revenue - Related Parties	1.419.256	1.505.866	34,17%	48,00%
Beban Pokok Pendapatan - Konsolidasian Cost of Revenue - Consolidated	4.153.993	3.136.987	100,00%	100,00%

Saldo Pihak Berelasi dalam Beban Umum dan Administrasi Balance of Related Parties in General and Administrative Expenses	Saldo Pihak Berelasi Balance of Related Parties		Persentase terhadap Jumlah Aset Percentage to Total Revenue	
	2023	2022	2023	2022
Beban umum dan administrasi General and administrative expenses	79.536	57.668	6,85%	8,88%
Kompensasi dan imbalan lain Compensation and other remuneration	39.889	20.060	3,44%	3,09%
Beban Umum dan Administrasi - Pihak Berelasi General and Administrative Expenses - Related Parties	119.425	77.728	10,29%	11,97%
Beban Umum dan Administrasi - Konsolidasian General and Administrative Expenses - Consolidated	1.161.113	649.316	100,00%	100,00%

Informasi Keuangan yang Mengandung Kejadian Bersifat Luar Biasa dan Jarang Terjadi

Financial Information Containing Extraordinary and Rare Events

Tidak terdapat peristiwa keuangan yang mengandung kejadian bersifat luar biasa dan jarang yang terjadi di tahun 2023.

There were no financial events containing extraordinary and rare events that occurred in 2023.

Informasi dan Fakta Material yang Terjadi setelah Tanggal Laporan Akuntan

Material Information and Facts Occurring After the Reporting Date

Tidak terdapat informasi dan fakta material yang terjadi antara tanggal laporan akuntan tertanggal 7 Maret 2024 hingga dipublikasikannya Laporan Tahunan ini tertanggal Mei 2024.

There was no material information and facts that occurred between the date of the accountant's report dated March 7, 2024, until the publication of this annual report, dated May 2024.

Perubahan Kebijakan Akuntansi yang Berdampak Signifikan terhadap Perusahaan

Changes in Accounting Policies Significantly Affecting the Company

Perubahan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (ISAK)

Changes to Statements of Financial Accounting Standards (SFAS) and Interpretations of Statements of Financial Accounting Standards (IFAS)

Standar baru, amandemen dan interpretasi yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023 adalah sebagai berikut:

1. Amandemen PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan" tentang pengungkapan kebijakan akuntansi;
2. Amandemen PSAK 16 "Aset Tetap" tentang hasil sebelum penggunaan yang diintensifkan;
3. Amandemen PSAK 25 "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan" tentang definisi estimasi akuntansi;
4. Amandemen PSAK 46 "Pajak Penghasilan" tentang pajak tangguhan terkait aset dan liabilitas yang timbul dari transaksi tunggal;
5. Amandemen PSAK 107 "Akuntansi Ijarah" tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan akad ijarah.

New standards, amendments, and interpretations that have been issued but are not yet effective for financial years beginning on or after January 1, 2023, are as follows:

1. The amendments to SFAS 1 "Presentation of Financial Statements" about disclosure of accounting policies;
2. The amendments to SFAS 16 "Property, Plant and Equipment" about proceeds before intended use;
3. The amendments to SFAS 25 "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors" about the definition of accounting estimates;
4. The amendments to SFAS 46 "Income Tax" about deferred tax related to assets and liabilities arising from a single transaction;
5. The amendments to SFAS 107 "Ijarah Accounting" about recognition, measurement, and disclosure of ijarah contracts.

Dampak terhadap Laporan Keuangan Perusahaan

Impact on the Company's Financial Statements

Pada tanggal laporan keuangan konsolidasian ini, PTK sedang mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru, amandemen dan interpretasi pada laporan keuangan konsolidasian Perusahaan.

At the date of these consolidated financial statements, PTK is currently studying the impact that may arise from the adoption of new standards, amendments, and interpretations on the Company's consolidated financial statements.

Perubahan Peraturan Perundang-undangan yang Berpengaruh Signifikan terhadap Perusahaan

Changes in Laws and Regulations that Have Significant Effects on the Company

PTK berkomitmen untuk selalu patuh terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan terhadap Perusahaan. Sepanjang tahun 2023 terdapat beberapa peraturan yang baru berlaku dan perubahan peraturan perundang-undangan yang berdampak signifikan terhadap Perusahaan sebagaimana dalam tabel berikut:

PTK is committed to always complying with all laws and regulations relevant to the Company. Throughout 2023, several newly enacted regulations and changes in laws and regulations had a significant impact on the Company, as in the following table:



Tabel Perubahan Peraturan dan Peraturan yang Baru Berlaku di Tahun 2023

Table of Changes in Regulations and Newly Enacted Regulations in 2023

No.	Nama Peraturan Regulation Name	Keterangan Perubahan Description of Changes	Dampak terhadap Perusahaan Impact on the Company	
			Kualitatif Qualitative	Kuantitatif Quantitative
1.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 51 of 2023 concerning Amendments to Government Regulation Number 36 of 2021 concerning Wages.	Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 24 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut: Pasal 24 (1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) berlaku bagi Pekerja/ Buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada Perusahaan yang bersangkutan. (1a) Pekerja/ Buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki kualifikasi tertentu yang disyaratkan dalam jabatan dapat diberikan Upah lebih besar dari Upah minimum. (2) Upah bagi Pekerja/ Buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih berpedoman pada struktur dan skala Upah. Between paragraph (1) and paragraph (2) of Article 24, 1 (one) paragraph is inserted, namely paragraph (1a), so that Article 24 reads as follows: Article 24 (1) The minimum wages, as referred to in Article 23 paragraph (1), applies to Workers/Laborers with a working period of less than 1 (one) year in the Company concerned. (1a) Workers/Laborers with a working period of less than 1 (one) year, as referred to in paragraph (1), who have specific qualifications required in the position may be granted Wages greater than the minimum Wage. (2) Wages for Workers/Laborers with a work period of 1 (one) year or more shall be guided by the structure and scale of wages.	Perusahaan telah <i>comply</i> terhadap peraturan perundang-undangan. The Company has complied with the laws and regulations.	Tidak memiliki dampak kuantitatif terhadap Perusahaan. Kebijakan pengupahan yang ditetapkan Perusahaan telah memenuhi standar upah minimum yang ditetapkan peraturan perundang-undangan terkait. Has no quantitative impact on the Company. The wage policy set by the Company has met the minimum wage standards set by the relevant laws and regulations.
2.	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah. Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 136 of 2023 concerning Amendments to Regulation of the Minister of Finance Number 112/PMK.03/2022 concerning Taxpayer Identification Numbers for Individual, Corporate, and Government Agency Taxpayers.	Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah, dan Pasal 6 ayat (2) serta ayat (3) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 6 (1) Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan Penduduk yang tidak melakukan perubahan data atas data identitas dengan status belum valid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, hanya dapat menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 15 (lima belas) digit sampai dengan tanggal 30 Juni 2024. layanan administrasi perpajakan dan administrasi pihak lain yang menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak. (2) Dihapus. (3) Dihapus. The provisions of paragraph (1) of Article 6 are amended, and Article 6 paragraph (2) and paragraph (3) are deleted, thus reading as follows: Article 6 (1) An individual taxpayer who is a Resident who does not change the data on identity data with invalid status as referred to in Article 3 paragraph (3) letter b, can only use a Taxpayer Identification Number with a 15 (fifteen) digit format as of June 30, 2024, for tax administration services and administration of other parties using the Taxpayer Identification Number. (2) Deleted. (3) Deleted.	Perusahaan telah <i>comply</i> terhadap peraturan perundang-undangan. The Company has complied with the laws and regulations.	Tidak memiliki dampak kuantitatif terhadap Perusahaan. No quantitative impact on the Company.



Informasi Kelangsungan Usaha

Information on Business Continuity

Hal-hal yang Berpengaruh terhadap Kelangsungan Usaha Perusahaan di Tahun 2023

Matters Affecting the Continuity of the Company's Business in 2023

Sepanjang tahun 2023, tidak terdapat kendala yang signifikan berpengaruh terhadap kinerja Perusahaan. Hal ini diperkuat dengan pencapaian KPI Perusahaan sebesar **103,80%** dengan Tingkat Kesehatan sebesar **99,50** dengan klasifikasi **"AAA" (SEHAT)**.

Throughout 2023, no significant constraints were affecting the Company's performance. This is confirmed by the Company's KPI achievement of **103.80%** with a Soundness Level of **99.50** and a classification of **"AAA" (HEALTHY)**.

Asesmen Manajemen atas Hal-hal Berpotensi Berpengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Perusahaan

Management's Assessment of Matters with the Potential to Significantly Affect the Company's Business Continuity

Manajemen menilai bahwa kinerja keuangan pada tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, PTK juga senantiasa melakukan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), aktivitas operasional serta fungsi pendukung bisnis lainnya. Dengan berbagai strategi dan upaya yang dilakukan, PTK berkeyakinan dapat terus menjaga kelangsungan usaha serta meningkatkan kontribusi kepada PT Pertamina (Persero).

Management considers that financial performance in 2023 has improved compared to the previous year. In addition, PTK also continues to improve the quality of Human Resources (HR), operational activities, and other business support functions. With various strategies and efforts made, PTK believes that it can continue to maintain business continuity and increase its contribution to PT Pertamina (Persero).

Asumsi yang Digunakan Manajemen dalam Melakukan Asesmen

Assumptions Used by Management in Conducting Assessment

Asumsi yang menjadi dasar manajemen dalam meyakini kelangsungan usaha PTK di antaranya adalah kinerja dan kondisi keuangan PTK yang sehat; kepuasan pelanggan masih dipertahankan; terkait perkara pengadilan, gugatan hukum, atau masalah serupa dikelola dapat diselesaikan dengan baik; serta opini audit dari auditor independen yang memiliki reputasi.

The assumptions that form the basis of management in believing in the continuity of PTK's business include the sound performance and financial condition of PTK; customer satisfaction is still maintained; related to court cases, lawsuits, or similar issues managed to be resolved properly; as well as an audit opinion from a reputable independent auditor.







Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance

"Keberhasilan PTK dalam pencapaian kinerja keuangan tahun ini ditopang juga oleh penerapan tata kelola di lingkungan Perusahaan sebagai pengendalian dan pertanggungjawaban Perusahaan yang diarahkan pada peningkatan nilai jangka panjang."

"The success of PTK in achieving this year's financial performance is also supported by the implementation of governance within the Company, which serves as a means of control and accountability aimed at enhancing long-term value."

Komitmen Perusahaan Dalam Penerapan Praktik Terbaik Tata Kelola

Commitment to Implementing Best Governance Practices



PTK meyakini bahwa tata kelola perusahaan yang baik merupakan dasar penting bagi keberhasilan Perusahaan secara berkelanjutan dan memperkuat kepercayaan yang diberikan kepada Perusahaan oleh pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya. Oleh karenanya, tujuan Perusahaan untuk mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan diiringi oleh komitmen PTK untuk secara konsisten menjunjung tinggi standar Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam menjalankan rencana bisnis maupun strategi Perusahaan.

Sejalan dengan komitmen tersebut, aspek-aspek penting lainnya dalam tata kelola perusahaan yang mencakup pengelolaan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal juga senantiasa terus diperkuat. Hal ini juga termasuk memastikan pengelolaan Perusahaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar etika bisnis yang berlaku. Di sisi lain, sejalan dengan fokus agenda global dalam penerapan aspek *Environmental, Social and Governance* (ESG) dalam pengelolaan perusahaan, PTK juga mulai mengintegrasikan prinsip-prinsip dalam ESG ke dalam rencana dan pengelolaan bisnis Perusahaan. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan aspek transparansi dan pengawasan terhadap kegiatan usaha Perusahaan sekaligus menciptakan nilai tambah bagi keberlanjutan Perusahaan dengan tetap memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholder* terkait.

PTK believes that good corporate governance is a fundamental basis for the Company's sustainable success and strengthens the trust granted by shareholders and other stakeholders. Therefore, the Company's goal to achieve sustainable business growth is accompanied by PTK's commitment to consistently uphold Good Corporate Governance (GCG) standards in executing business plans and strategies.

In line with this commitment, other key aspects of corporate governance, including risk management and internal control systems, are continually reinforced. This also includes ensuring that the Company's management complies with applicable laws and ethical business standards. Furthermore, aligned with the global agenda focusing on Environmental, Social, and Governance (ESG) aspects in corporate management, PTK has started integrating ESG principles into the Company's business plans and management. This effort aims to enhance transparency and oversight of the Company's business activities while creating added value for the Company's sustainability, taking into account the interests of all relevant stakeholders.

Landasan Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Basis of Implementing Corporate Governance

Sistem Tata Kelola yang diterapkan PTK didasarkan pada komitmen terhadap prinsip-prinsip GCG dalam penerapan praktik terbaik dalam tata kelola perusahaan yang baik. Selanjutnya, penerapan tata kelola di Perusahaan senantiasa dipantau dan ditingkatkan kualitas penerapannya dengan mengacu pada standar terbaik penerapan tata kelola yang ada, baik di tingkat lokal maupun global.

Landasan hukum penerapan tata kelola perusahaan di Perusahaan mengacu pada Peraturan Perundang-undangan dan pedoman-pedoman implementasi tata kelola sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

The Governance System implemented by PTK is based on a commitment to the GCG principles in implementing best practices in good corporate governance. Furthermore, the implementation of governance in the Company is always monitored and the quality of its implementation is improved by referring to the best standards for the implementation of existing governance, both at the local and global levels.

The legal basis for implementing corporate governance in the Company refers to the Legislative Regulations and governance implementation guidelines as follows:

1. Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies as amended by Government Regulation in Lieu of Law no. 2 of 2022 concerning Job Creation as stipulated into law based on Law no. 6 of 2023 concerning Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law no. 2 of 2022 concerning Job Creation Becoming Law;

2. Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
3. Prinsip-prinsip *Corporate Governance* yang dikembangkan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD);
4. Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI) yang dikembangkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG);
5. Surat Kementerian BUMN No. S-17/S.MBU/02/2020 Tentang Sertifikasi ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di BUMN;
6. *The ASEAN Corporate Governance Scorecard*;
7. Pedoman *Code of Corporate Governance* PT Pertamina Trans Kontinental No. A-002/PTK0300/2022-S9;
8. *Board Manual*;
9. Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) PT Pertamina Trans Kontinental No. A-003/PTK0300/2022-S9;
10. Pedoman *Conflict of Interest* PT Pertamina Trans Kontinental No. Pdm-004/F0000/2016-S0;
11. Pedoman Pengendalian Gratifikasi PT Pertamina Trans Kontinental No. A-004/PTK0300/2022-S9;
12. Pedoman Fungsi Pengendalian Gratifikasi PT Pertamina Trans Kontinental No. Pdm-006/F0000/2016-S0;
13. Ratifikasi atas Pedoman LHKPN PT Pertamina (Persero) berdasarkan Surat Keputusan No. Kpts-547/C0000/2021-CO tentang Ratifikasi Pedoman PT Pertamina (Persero) Nomor A13-001/N00200/2021-S9 tentang Pengelolaan Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
14. Pedoman Pengelolaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan PT Pertamina Trans Kontinental No. A-001/PTK0320/2021-S0.
2. BUMN Ministerial Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises;
3. Corporate Governance principles developed by the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD);
4. General Guidelines for Indonesian Corporate Governance (PUG-KI) developed by the National Committee for Governance Policy (KNKG);
5. Letter from the Ministry of BUMN No. S-17/S.MBU/02/2020 Concerning ISO 37001 Anti-Bribery Management System (SMAP) Certification in BUMN;
6. The ASEAN Corporate Governance Scorecard;
7. Guidelines for Code of Corporate Governance PT Pertamina Trans Kontinental No. A-002/PTK0300/2022-S9;
8. Board Manual;
9. Guidelines for Code of Conduct PT Pertamina Trans Kontinental No. A-002/F1000/2019-S0;
10. Guidelines for Conflict of Interest PT Pertamina Trans Kontinental No. Pdm-004/F0000/2016-S0;
11. Guidelines for Gratification Control PT Pertamina Trans Kontinental A - 004 /PTK0300/2022-S9;
12. Guidelines for Gratification Control Function PT Pertamina Trans Kontinental No. Pdm-006/F0000/2016-S0;
13. Ratification of PT Pertamina (Persero) LHKPN Guidelines based on Decree No. Kpts-547/C0000/2021-CO concerning Ratification of PT Pertamina (Persero) Guidelines Number A13-001/N00200/2021-S9 concerning Management of Obligations to Submit State Organizers' Wealth Reports.;
14. Guidelines for Anti-Bribery Management System Management PT Pertamina Trans Kontinental No. A-001/PTK0320/2021-S0.

Penerapan Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Implementation of Good Corporate Governance Principles

Untuk menerapkan tata kelola secara konsisten dan berkelanjutan, PTK telah mengadopsi 5 (lima) prinsip tata kelola perusahaan sebagai berikut.

To implement governance consistently and sustainably, PTK has adopted 5 (five) principles of good corporate governance as follows:



Transparansi Transparency

Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan, dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.

Openness in carrying out the decision-making process, and openness in disclosing material and relevant information about the company.

Akuntabilitas Accountability

Kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

Clarity of function, implementation and accountability of organs so that company management is carried out effectively.

Responsibilitas Responsibility

Kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Compliance in company management with laws and regulations and healthy corporate principles.

Independensi Independency

Kedaaan dimana Perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/ tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

A situation where the Company is managed professionally without conflicts of interest and influence/pressure from any party that is not in accordance with statutory regulations and healthy corporate principles.

Kewajaran Fairness

Pelakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Fair and equal treatment in fulfilling the rights of stakeholders that arise based on agreements and statutory regulations.

Peningkatan Kualitas Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Improving the Quality of Implementation of Corporate Governance

PTK secara konsisten melakukan inisiatif untuk meningkatkan tata kelola perusahaan sebagai mekanisme untuk menerapkan pengambilan keputusan yang transparan, adil, cepat, dan tegas. PTK menyadari bahwa dalam menciptakan ekosistem bisnis, penting untuk memperluas peluang bisnis melalui kepercayaan dengan berbagai pemangku kepentingan. Oleh karena itu, selain memastikan pencapaian terhadap target-target keuangan, PTK juga menjadikan peningkatan praktik tata kelola di Perusahaan sebagai isu prioritas.

Sepanjang tahun 2023, perwujudan komitmen PTK dalam peningkatan aspek tata kelola, tercermin dalam berbagai program dan aktivitas Perusahaan, sebagaimana berikut:

PTK consistently carries out initiatives to improve corporate governance as a mechanism for implementing transparent, fair, fast and firm decision making. PTK realizes that in creating a business ecosystem, it is important to expand business opportunities through trust with various stakeholders. Therefore, apart from ensuring the achievement of financial targets, PTK also makes improving governance practices in the Company a priority issue.

Throughout 2023, the realization of PTK's commitment to improving governance aspects is reflected in the Company's various programs and activities, as follows:

Ketersediaan Infrastruktur Tata Kelola Perusahaan

Availability of Corporate Governance Infrastructure



Selain memiliki organ tata kelola yang telah berjalan efektif, PTK juga telah memiliki infrastruktur tata kelola berupa kebijakan-kebijakan internal agar proses penerapan prinsip tata kelola yang baik menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan. PTK telah mengembangkan kebijakan tata kelola untuk mengendalikan, mengawasi, dan bertanggung jawab atas penerapan GCG di lingkungan bisnis Perusahaan. Perangkat kebijakan ini mengatur pelaksanaan hubungan kerja seluruh organ tata kelola di lingkungan Perusahaan, dengan mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar dan/atau peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.

Apart from having governance organs that are running effectively, PTK also has governance infrastructure in the form of internal policies so that the process of implementing good governance principles produces outcomes that are in line with stakeholder expectations. PTK has developed a governance policy to control, supervise and be responsible for the implementation of GCG in the Company's business environment. This set of policies regulates the implementation of work relations for all governance organs within the Company, by referring to the provisions of the Articles of Association and/or applicable regulations and legislation.

Kebijakan dan Pedoman Tata Kelola

Governance Policies and Guidelines



Pedoman Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Guidelines

Code of Corporate Governance ditetapkan berdasarkan No. A-002/PTK0300/2022-S9.

Pedoman mengatur mengenai:

1. Referensi penerapan tata kelola perusahaan.
2. Struktur tata kelola perusahaan yang terdiri dari organ utama (RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi dan organ pendukung (Corporate Secretary, Internal Audit, Komite Audit, Komite Nominasi, Remunerasi & Manajemen Risiko, dan Sekretariat Komisaris).
3. Proses tata kelola perusahaan yang terdiri dari pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi, RJPP dan RKAP, mekanisme rapat, benturan kepentingan, pengelolaan operasional, pengelolaan keuangan dan lain sebagainya.
4. Hubungan antara Pertamina Trans Kontinental dengan Induk dan Anak Perusahaan.
5. Pengelolaan hubungan dengan pemangku kepentingan.

The Code of Corporate Governance is determined based on No. A-002/PTK0300/2022-S9.

The guidelines regulate:

1. Reference for the implementation of corporate governance.
2. Corporate governance structure consisting of main organs (GMS, Board of Commissioners and Directors and supporting organs (Corporate Secretary, Internal Audit, Audit Committee, Nomination, Remuneration & Risk Management Committee, and Commissioner's Secretariat).
3. The corporate governance process consisting of the appointment and dismissal of the Board of Commissioners and Directors, RJPP and RKAP, meeting mechanisms, conflicts of interest, operational management, financial management and so on.
4. Relationship between Pertamina Trans Kontinental and its Parent and Subsidiaries.
5. Managing relationships with stakeholders.

Pedoman Etika Usaha & Tata Perilaku

Business Ethics & Code of Conduct Guidelines

Pedoman Etika Usaha & Tata Perilaku (*Code of Conduct*) ditetapkan berdasarkan No. A-003/PTK0300/2022-S9, dan menjadi acuan perilaku bagi Komisaris, Direksi dan Pekerja Pertamina Trans Kontinental dalam mengelola Perusahaan.

Business Ethics & Code of Conduct Guidelines are established based on No. A-003/PTK0300/2022-S9, and becomes a reference for behavior for Commissioners, Directors and Pertamina Trans Continental Employees in managing the Company.

Board Manual

Mengatur mengenai tata cara hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi.

Regulates procedures for working relations between the Board of Commissioners and the Board of Directors.

Pedoman Komite Committee Guidelines	
Kebijakan mengenai tata cara kerja Komite, meliputi: 1. Piagam Komite Audit. 2. Piagam Komite Nominasi, Remunerasi & Manajemen Risiko. 3. Piagam Komite Investasi.	Policies regarding the working procedures of the Committee, include: 1. Audit Committee Charter. 2. Nomination, Remuneration & Risk Management Committee Charter. 3. Investment Committee Charter.
Pedoman Benturan Kepentingan Conflict of Interest Guidelines	
Pedoman Benturan Kepentingan (<i>Conflict of Interest</i>) ditetapkan berdasarkan Nomor Pdm-004/F0000/2016-S0. Pedoman mengatur hal-hal yang terkait dengan etika dalam benturan kepentingan dan mekanisme pelaporan benturan kepentingan.	Conflict of Interest Guidelines are established based on Number Pdm-004/F0000/2016-S0. The guidelines regulate matters related to ethics in conflicts of interest and mechanisms for reporting conflicts of interest.
Pedoman Pengendalian Gratifikasi Gratification Control Guidelines	
Pedoman Pengendalian Gratifikasi, ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi No. PDM-004/PTK0300/2022-S9. Pedoman mengatur mengenai gratifikasi. Pedoman tersebut mengatur prinsip dasar, ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur, klasifikasi tindakan gratifikasi serta batasan penerimaan, pemberian dan pemberian atas permintaan pihak ketiga.	Gratification Control Guidelines, established based on Directors' Decree No. PDM-004/PTK0300/2022-S9. Guidelines regulate gratuities. These guidelines regulate the basic principles, provisions of governing laws and regulations, classification of acts of gratification as well as limits on acceptance, giving and giving at the request of third parties.
Prosedur Whistleblowing System Whistleblowing System Procedures	
Prosedur Pengelolaan <i>Whistleblowing System</i> (WBS) ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi No. B-008/F1000/2019-S0 yang mengatur mengenai pengelolaan penanganan pengaduan dan penyingkapan <i>whistleblowing system</i> . Pengelolaan <i>Whistleblowing System</i> (WBS) saat ini dikelola oleh Fungsi WBS PT Pertamina (Persero) yang diatur oleh Pedoman Pengelolaan Pengaduan No. A9- 001/J00000/2022-S9 Revisi ke-0 berlaku terhitung mulai tanggal 19 Januari 2022.	Whistleblowing System (WBS) Management Procedures are established based on Directors' Decree No. B-008/F1000/2019-S0 which regulates the management of complaint handling and disclosure of the whistleblowing system. Whistleblowing System (WBS) management is currently managed by the WBS Function of PT Pertamina (Persero) which is regulated by Complaint Management Guidelines No. A9-001/J00000/2022-S9 0th Revision is effective starting January 19 2022.
Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan Anti-Bribery Management System Guidelines	
Pedoman Pengelolaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan No. A-001/PTK0320/2021-S0 yang mengatur pengelolaan Sistem Manajemen Anti Suap di lingkup Perusahaan.	Anti-Bribery Management System Management Guidelines No. A-001/PTK0320/2021-S0 which regulates the management of the Anti-Bribery Management System within the Company.
Pedoman Pelaporan Harta Kekayaan Asset Reporting (LHKPN) Guidelines	
Pedoman pelaporan terkait Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan No. Kpts- 547/C0000/2021-C0.	Reporting guidelines related to State Officials' Wealth Reports (LHKPN) are established based on Decree No. Kpts- 547/C0000/2021-C0.

Penandatanganan Komitmen Implementasi GCG Signing the GCG Implementation Commitment

Seluruh karyawan PTK, termasuk Dewan Komisaris dan Direksi beserta jajarannya mendeklarasikan komitmen untuk senantiasa menerapkan GCG melalui penandatanganan pernyataan Pakta Integritas, kepatuhan terhadap *Code of Conduct* serta pernyataan bebas benturan/konflik kepentingan yang seluruhnya dilakukan dan diperbaharui secara berkala.

All PTK employees, including the Board of Commissioners and Directors and their staff, declare their commitment to always implement GCG through signing the Integrity Pact statement, compliance with the Code of Conduct as well as a statement of no conflicts/conflicts of interest, all of which are carried out and updated regularly.

Pencapaian Peta Jalan Tata Kelola Perusahaan Achievement of the Corporate Governance Roadmap

Perusahaan telah menetapkan Peta Jalan Tata Kelola Perusahaan yang diselaraskan dengan perencanaan strategis dalam implementasi GCG secara berkelanjutan.

The Company has established a Corporate Governance Roadmap which is aligned with strategic planning in implementing GCG continuously.



Persiapan Penerapan GCG Preparation for Implementing GCG

Memersiapkan pelaksanaan GCG yang sistematis dan terstruktur sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan mulus, efisien dan efektif.
Prepare systematic and structured GCG implementation so that implementation can run smoothly, efficiently and effectively.

Good Corporate Governance

Memenuhi ketentuan dan peraturan (*Mandatory* maupun *Voluntary*) dalam tata kelola perusahaan.
Fulfill the rules and regulations (Mandatory and Voluntary) in corporate governance.

Good Governance Company

Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG pada semua proses bisnis dengan di dukung oleh tersedianya pedoman perusahaan dari tingkat manajemen puncak hingga tingkat operasional. Implementation of GCG principles in all business processes is supported by the availability of company guidelines from top management level to operational level.

Good Governed Company

Menjadikan prinsip-prinsip GCG menjadi bagian dari budaya perusahaan dan menjadi warga industri maupun masyarakat sosial yang beretika dan bertanggung jawab
Making GCG principles part of the company culture and becoming an ethical and responsible citizen of industry and social society

Sejalan dengan tahapan dalam peta jalan tata kelola Perusahaan yang telah disusun, sepanjang tahun 2023 Perusahaan telah melakukan berbagai kegiatan untuk menjadikan Perusahaan berada dalam tahapan *Good Governed Company*, diantaranya:

1. Penguatan Budaya Perusahaan.
2. Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG).
3. Peningkatan kepatuhan pelaporan LHKPN, Gratifikasi dan *assessment* GCG.

In line with the stages in the Company's governance roadmap that has been prepared, in 2023, the Company has carried out various activities to put the Company in the *Good Governed Company* stage, including:

1. Strengthening Corporate Culture.
2. Gratification Control Unit (UPG).
3. Enhancing compliance with LHKPN reporting, gratification and GCG assessment.

Sosialisasi Penerapan Tata Kelola Perusahaan Socialization of the Implementation of Corporate Governance

Untuk terus meningkatkan kualitas penerapan GCG, PTK melakukan sosialisasi terhadap prinsip GCG dan perangkatnya kepada seluruh karyawan di setiap jenjang organisasi. Kegiatan yang dilakukan adalah pengenalan GCG bagi pekerja baru, penyegaran GCG bagi seluruh pekerja, pemberian materi GCG dan sosialisasi GCG dalam berbagai media Perusahaan. Selain itu, secara berkala kepada seluruh Insan PTK untuk memberikan pemahaman mengenai kebijakan terkait GCG, nilai dan budaya Perusahaan, dan indikator/ parameter penilaian dan evaluasi atas penerapan GCG di Perusahaan.

To continue to improve the quality of GCG implementation, PTK disseminates GCG principles and tools to all employees at every level of the organization. The activities carried out are GCG introduction for new workers, GCG refresher for all workers, provision of GCG material and socialization of GCG in various Company media. In addition, periodically to all PTK personnel to provide an understanding of policies related to GCG, Company values and culture, and indicators/parameters for assessment and evaluation of the implementation of GCG in the Company.

Penilaian Penerapan GCG Berdasarkan SK-16/S.MBU/2012 Assessment of GCG Implementation Based on SK-16/S.MBU/2012

Untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran kualitas penerapan GCG, setiap tahunnya PTK melakukan evaluasi atau penilaian penerapan GCG, dengan mengacu pada Salinan Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara No. SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara. Pada tahun 2023, pelaksanaan asesmen GCG di Perusahaan dilakukan melalui *self assessment* dengan menindaklanjuti *Area of Improvement* GCG 2022.

To find out and get an overview of the quality of GCG implementation, every year PTK carries out an evaluation or assessment of GCG implementation, referring to the copy of the Decree of the Secretary of the Ministry of State-Owned Enterprises No. SK-16/S.MBU/2012 concerning Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises. In 2023, the implementation of GCG assessments in the Company will be carried out through self-assessments by following up on *Areas of Improvement* for GCG 2022.

Asesmen GCG ini dilakukan dengan merujuk pada kriteria-kriteria yang diuraikan sebagai berikut:

1. Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara berkelanjutan;
2. Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal;
3. Dewan Komisaris;
4. Direksi;
5. Pengungkapan informasi dan transparansi;
6. Aspek lainnya.

Pencapaian skor asesmen GCG tahun 2023 adalah sebesar 88,835% dengan kualifikasi "Sangat Baik".

This GCG assessment is carried out by referring to the criteria described as follows:

1. Commitment to the implementation of Good Corporate Governance on an ongoing basis;
2. Shareholders and GMS/Capital Owners;
3. Board of Commissioners;
4. Directors;
5. Information disclosure and transparency;
6. Other aspects.

The achievement of the GCG assessment score in 2023 is 88.835% with the qualification "Very Good".

No.	Aspek Tata Kelola Governance Aspects	Bobot Weight	Capaian Achievements		Penjelasan Explanation
			Skor Score	(%)	
I	Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Secara Berkelanjutan Commitment to Sustainable Implementation of Governance	7,00	6,926	95,770	Sangat Baik Very Good
II	Pemegang Saham dan RUPS Shareholders and GMS	9,00	7,851	84,916	Baik Good
III	Dewan Komisaris Board of Commissioners	35,00	34,269	97,500	Sangat Baik Very Good
IV	Direksi Directors	35,00	31,563	89,260	Sangat Baik Very Good
V	Pengungkapan Informasi dan Transparansi Information Disclosure and Transparency	9,00	7,460	82,047	Baik Good
VI	Aspek Lainnya Other Aspects	5,00	0,766	12,800	-
Total		100,00	88,835	88,835	Sangat Baik Very Good

Dari hasil asesmen penerapan GCG tersebut, terdapat 37 rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti sebagai upaya peningkatan kualitas penerapan GCG di tahun berikutnya. Berikut beberapa rekomendasi yang dihasilkan dari *self assessment* yang telah dilakukan.

From the results of the GCG implementation assessment, there are 37 recommendations that need to be followed up as an effort to improve the quality of GCG implementation in the following year. The following are several recommendations resulting from the self-assessment that has been carried out.

Rekomendasi Recommendation	Rencana Tindak Lanjut atas Rekomendasi Follow-up Plan for Recommendations
Menetapkan Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi yang memuat ketentuan atau materi terkait mekanisme penjurangan atau nominasi calon anggota Direksi; dan Penilaian/ pengujian atas kepatutan dan kelayakan (<i>fit and proper test</i>) bagi anggota Direksi. Establishing Guidelines for the Appointment and Dismissal of Directors which contain provisions or materials related to the mechanism for selecting or nominating prospective members of the Board of Directors; and Assessment/testing of fit and proper test for members of the Board of Directors.	Untuk dilakukan ratifikasi atas Tata Kerja Organisasi No. B05 - / K20100/2022-S9. To carry out ratification of Organizational Work Procedures No. B05 - / K20100/2022-S9.
Mendokumentasikan Daftar Bakal Calon Direksi yang disetujui oleh Menteri Negara BUMN dan berisikan nama-nama yang diperoleh melalui proses penjurangan. Documenting the List of Prospective Director Candidates approved by the State Minister for State-Owned Enterprises and containing the names obtained through the selection process.	Pemegang Saham perlu untuk mendokumentasikan Daftar Bakal Calon Direksi yang berisikan nama-nama yang diperoleh melalui proses penjurangan dalam rangka memperoleh calon anggota Direksi. Shareholders need to document a List of Prospective Director Candidates containing the names obtained through the screening process in order to obtain prospective members of the Board of Directors.
Mengesahkan <i>draft Board Manual</i> yang memuat kebijakan mengenai pelatihan bagi Anggota Direksi. Ratify the draft Board Manual which contains policies regarding training for Directors.	<i>Draft Board Manual</i> yang memuat kebijakan mengenai pelatihan bagi Anggota Direksi untuk dapat segera ditindaklanjuti Draft Board Manual containing policies regarding training for Directors that can be followed up immediately
Menyampaikan nilai HPS secara terbuka dalam suatu proses pengadaan atau <i>tender</i> . Communicating the value of HPS openly in a procurement or tender process.	Menyampaikan nilai HPS secara terbuka dalam suatu proses pengadaan atau <i>tender</i> . Communicating the value of HPS openly in a procurement or tender process.

Rekomendasi Recommendation	Rencana Tindak Lanjut atas Rekomendasi Follow-up Plan for Recommendations
Mendokumentasikan pelaksanaan program K3 berupa hasil audit SUPREME serta tindak lanjut atas hasil audit. Documenting the implementation of the K3 program in the form of SUPREME audit results and follow-up on audit results.	Melakukan pemenuhan berupa hasil audit SUPREME serta tindak lanjut atas hasil audit. Carry out compliance in the form of SUPREME audit results and follow-up on audit results.
Mendokumentasikan lampiran surat keputusan No.Kpts- 018/C0000/2017-SO tentang Ratifikasi Pedoman Pengelolaan Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan PT Pertamina (Persero) yang ditetapkan oleh Direktur Utama PTK agar dapat dianalisis lebih lanjut terkait muatannya antara lain: pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi, penetapan target kinerja dan penilaian kinerja serta intensif bagi Dewan Komisaris dan Direksi. Documenting the attachment to the decision letter No.Kpts-018/C0000/2017-SO concerning Ratification of the Management Guidelines for Subsidiaries and Joint Venture Companies of PT Pertamina (Persero) stipulated by the President Director of PTK so that it can be further analyzed regarding its contents, including: appointment of the Board of Commissioners and Directors , setting performance targets and performance assessments as well as intensive work for the Board of Commissioners and Directors.	Mendokumentasikan lampiran surat keputusan No.Kpts- 018/C0000/2017-SO tentang Ratifikasi Pedoman Pengelolaan Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan PT Pertamina (Persero) yang ditetapkan oleh Direktur Utama PTK. Documenting the attachment to decision letter No.Kpts-018/C0000/2017-SO concerning Ratification of the Management Guidelines for Subsidiaries and Joint Venture Companies of PT Pertamina (Persero) stipulated by the President Director of PTK.

Penerapan Pedoman Umum Governansi Korporasi Indonesia (PUG-KI) Implementation of General Guidelines for Indonesian Corporate Governance (PUG-KI)



Selain itu, pada tahun 2023 PTK juga menerapkan 4 (empat) pilar Governansi sebagaimana yang diatur dalam Pedoman Umum Governansi Korporasi Indonesia (PUG-KI) yaitu perilaku beretika, akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan sebagai pengembangan prinsip GCG dari nilai dasar TARIF.



Dari 4 (empat) pilar Governansi korporat tersebut, PTK juga telah melakukan pengukuran/penilaian atas 8 (delapan) prinsip governansi korporat yang berisi hak-hak pemegang saham, pemangku kepentingan dan pemenuhannya, aturan pokok tentang pengelolaan, dan pengawasan atas pengelolaan korporasi di Indonesia, termasuk aspek etika, manajemen risiko, dan pengungkapan.

Apart from that, in 2023 PTK will also implement the 4 (four) pillars of governance as regulated in the General Guidelines for Indonesian Corporate Governance (PUG-KI), namely ethical behavior, accountability, transparency and sustainability as a development of GCG principles from the basic values of TARIF.

Of the 4 (four) pillars of corporate governance, PTK has also carried out measurements/assessments of 8 (eight) principles of corporate governance which contain the rights of shareholders, stakeholders and their fulfillment, basic rules regarding management, and supervision of corporate management in Indonesia, including ethical, risk management and disclosure aspects.



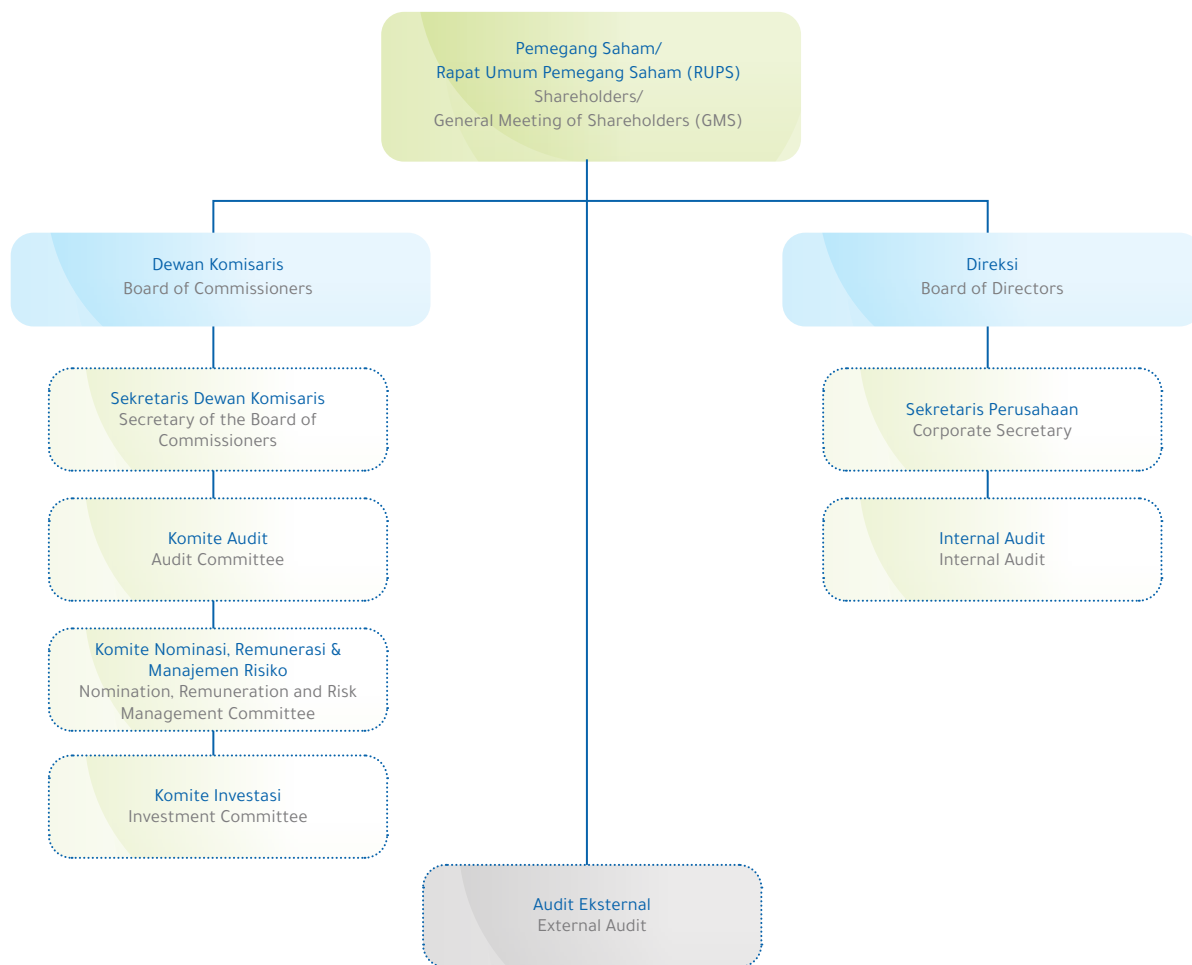
Struktur dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Structure and Mechanism

Struktur tata kelola perusahaan memuat aspek-aspek penting yang akan memperkuat aktivitas pengendalian dan pengelolaan perusahaan. PTK telah memiliki struktur dan mekanisme tata kelola Perusahaan guna memastikan penerapan GCG dapat berjalan efektif melalui pembagian peran, tugas dan tanggung jawab secara jelas. Pelaksanaan tata kelola perusahaan dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan sehingga prinsip-prinsip GCG menjadi acuan dalam setiap aktivitas bisnis Perusahaan.

Sesuai dengan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, struktur tata kelola Perusahaan terdiri dari organ utama, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi, serta perangkat pendukung yang meliputi Sekretaris Dewan Komisaris, Komite-komite di bawah Dewan Komisaris, Sekretaris Perusahaan, dan Internal Audit.

The corporate governance structure contains important aspects that will strengthen the company's control and management activities. PTK has a corporate governance structure and mechanism to ensure the implementation of GCG can run effectively through a clear division of roles, duties and responsibilities. The implementation of corporate governance is carried out systematically and continuously so that GCG principles become a reference in every Company business activity.

Based on no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, the Company's governance structure consists of the main organs, namely the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners and Directors, as well as supporting instruments which include the Secretary of the Board of Commissioners, Committees under the Board of Commissioners, the Corporate Secretary, and Internal Audit.



Adapun mekanisme tata kelola perusahaan merupakan proses penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Perusahaan agar sesuai dengan harapan Pemegang Saham dan para pemangku kepentingan lainnya. Mekanisme tata kelola di PTK diperkuat oleh 3 (tiga) organ utama Perusahaan, yaitu Pemegang Saham/RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi yang memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam mekanisme tersebut, Pemegang Saham/RUPS sebagai organ tata kelola perusahaan yang menjadi wadah bagi para pemegang saham untuk mengambil keputusan dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, Dewan Komisaris bersama dengan Direksi memiliki peran penting untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG di setiap lini bisnis Perseroan, serta memastikan pemenuhan kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku. Dalam hal pelaporan keuangan, Perusahaan menjamin integritas atas laporan keuangan tersebut dengan menunjuk Kantor Akuntan Publik sebagai pihak independen untuk melakukan audit.

PTK meyakini bahwa dengan adanya struktur dan mekanisme tata kelola yang berjalan efektif dapat meningkatkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik sejalan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran.

The corporate governance mechanism is the process of implementing corporate governance principles which is supported by the adequacy of the Company's structure and infrastructure so that it meets the expectations of Shareholders and other stakeholders. The governance mechanism at PTK is strengthened by 3 (three) main organs of the Company, namely Shareholders/GMS, Board of Commissioners and Directors who have their respective duties and authorities in carrying out their duties and responsibilities in accordance with the Company's Articles of Association and statutory regulations. applies.

In this mechanism, Shareholders/GMS are the corporate governance organ which is a forum for shareholders to make decisions by taking into account the provisions of the Articles of Association and statutory regulations. Meanwhile, the Board of Commissioners together with the Board of Directors have an important role in implementing GCG principles in each of the Company's business lines, as well as ensuring the Company's compliance with applicable laws and regulations and procedures. In terms of financial reporting, the Company guarantees the integrity of the financial reports by appointing a Public Accounting Firm as an independent party to conduct audits.

PTK believes that having an effective governance structure and mechanism can improve the principles of good corporate governance in line with the principles of transparency, accountability, responsibility, independence and fairness.

Rapat Umum Pemegang Saham

General Meeting of Shareholders

Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Anggaran Dasar Perusahaan, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memiliki kedudukan tertinggi dalam struktur tata kelola perusahaan dan memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan. Pemegang Saham melakukan pengambilan keputusan yang penting terkait dengan pengelolaan PTK, baik untuk kepentingan jangka pendek dan jangka panjang dalam RUPS, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RUPS merupakan forum bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaporkan dan bertanggung jawab terhadap Pelaksanaan tugas serta kinerjanya kepada Pemegang Saham. RUPS berwenang mengambil seluruh keputusan yang berkaitan dengan kepentingan usaha PTK dan Anak Perusahaan dan memiliki kekuatan hukum yang sah serta mengikat dalam mengambil keputusan.

Based on Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, and the Company's Articles of Association, the General Meeting of Shareholders (GMS) has the highest position in the corporate governance structure and has authority that is not given to the Directors or Board of Commissioners within specified limits. Shareholders make important decisions related to PTK management, both for short-term and long-term interests at the GMS, in accordance with the provisions of applicable laws and regulations.

The GMS is a forum for the Board of Commissioners and Directors to report and be responsible for the implementation of their duties and performance to Shareholders. The GMS has the authority to make all decisions relating to the business interests of PTK and Subsidiaries and has valid and binding legal force in making decisions.



Hak-Hak Pemegang Saham

Shareholder Rights

Hak-hak pemegang saham antara lain:

1. Menghadiri dan memberikan suara dalam pada RUPS;
2. Memperoleh informasi material (termasuk hak bertanya) baik kepada Komisaris maupun Direksi mengenai keuangan dan hal-hal lain yang menyangkut Perusahaan secara lengkap, tepat waktu dan teratur agar memungkinkan bagi Pemegang Saham untuk membuat keputusan penanaman modal berdasarkan informasi yang diterimanya;
3. Menyelenggarakan RUPS dalam hal Direksi dan/ atau Dewan Komisaris lalai menyelenggarakan RUPS Tahunan dan sewaktu-waktunya RUPS Luar Biasa bila dipandang perlu, misalnya bila Perusahaan menghadapi penurunan kinerja yang signifikan;
4. Memperoleh penjelasan tentang penerapan GCG.

Pemegang Saham tidak melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi dengan tidak mengurangi wewenang RUPS untuk menjalankan hak sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan. Pemegang Saham melalui RUPS memiliki kewenangan untuk menjalankan haknya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Shareholder rights include:

1. Attend and vote during the GMS;
2. Obtain material information (including the right to ask questions) from both Commissioners and Directors regarding finances and other matters relating to the Company in a complete, timely and regular manner to enable Shareholders to make investment decisions based on the information they receive;
3. Hold a GMS in the event that the Board of Directors and/or the Board of Commissioners fails to hold an Annual GMS and at any time an Extraordinary GMS if deemed necessary, for example if the Company faces a significant decline in performance;
4. Obtain an explanation regarding the implementation of GCG.

Shareholders do not intervene in the duties, functions and authority of the Board of Commissioners and Directors without reducing the authority of the GMS to exercise rights in accordance with the Articles of Association and statutory regulations. Shareholders through the GMS have the authority to exercise their rights in accordance with the Articles of Association and applicable laws and regulations.



Jenis-Jenis Penyelenggaraan RUPS

Types of GMS Organizing

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan yang mengacu kepada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, RUPS terdiri atas RUPS Tahunan, dan RUPS Lainnya atau RUPS Luar Biasa.

1. RUPS Tahunan
RUPS tentang Laporan Tahunan dan Perhitungan Tahunan, selambat-lambatnya dalam enam bulan setelah tahun buku berakhir.
2. RUPS Luar Biasa
RUPS yang diselenggarakan sewaktu-waktu apabila diperlukan oleh Pemegang Saham atau atas usulan Komisaris dan/ atau Direksi.

In accordance with the Company's Articles of Association which refers to Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, the GMS consists of the Annual GMS, and Other GMS or Extraordinary GMS.

1. Annual GMS
GMS regarding Annual Reports and Annual Calculations, no later than six months after the financial year ends.
2. Extraordinary GMS
A GMS is held at any time if required by the Shareholders or at the suggestion of the Commissioners and/or Directors.

Pemegang Saham juga dapat menyelenggarakan pengambilan Keputusan Sirkuler (RUPS Sirkuler), yakni pengambilan keputusan di luar RUPS (tanpa kehadiran fisik). Ketentuan tentang Keputusan Sirkuler diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, di mana pada Pasal 91 diatur bahwa Pemegang Saham dapat mengambil keputusan yang mengikat diluar RUPS dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Keputusan RUPS yang dilakukan secara fisik, dengan syarat seluruh Pemegang Saham dengan hak suara memberikan persetujuan tertulis atas usul RUPS yang akan diputuskan.

Shareholders can also hold Circular Decision making (Circular GMS), namely making decisions outside the GMS (without physical presence). Provisions regarding Circular Decisions are regulated in Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, where in Article 91 it is regulated that Shareholders can take binding decisions outside the GMS and have the same legal force as GMS Decisions carried out physically, provided that all Shareholders with voting rights give written approval to GMS proposal to be decided.

Ketentuan Kuorum dan Pengambilan Keputusan Quorum Provisions and Decision Making

Dalam penentuan kuorum serta pengambilan keputusan pada RUPS Tahunan, Perusahaan mengacu pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sesuai ketentuan tersebut, RUPS Tahunan dinyatakan kuorum apabila RUPST lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang dan/ atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.

Pengambilan keputusan dalam RUPS dilaksanakan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, sesuai peraturan yang berlaku melalui prosedur yang transparan dan adil. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak yang berlaku mensyaratkan jumlah suara setuju yang lebih besar.

Pemegang Saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan RUPS secara fisik, dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahu secara tertulis dan semua Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan. Hasil RUPS didokumentasikan oleh Sekretaris Perusahaan, dan Notaris membuat Risalah RUPS dalam setiap penyelenggaraan RUPS. Penandatanganan Risalah RUPS tidak diperlukan apabila risalah tersebut dibuat dengan Berita Acara Notaris. Risalah RUPS harus didokumentasikan dan disimpan oleh Sekretaris Perusahaan.

In determining the quorum and making decisions at the Annual GMS, the Company refers to Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. In accordance with these provisions, an Annual GMS is declared a quorum if the AGMS is more than ½ (one half) of the total number of shares with voting rights present or represented, unless the Law and/or articles of association determine a larger quorum.

Decision making at the GMS is carried out based on deliberation to reach consensus, in accordance with applicable regulations through transparent and fair procedures. In the event that a decision based on deliberation to reach consensus is not reached, the decision is taken based on a majority vote which applies requiring a greater number of affirmative votes.

Shareholders can also make valid decisions without holding a physical GMS, provided that all Shareholders have been notified in writing and all Shareholders give their approval regarding the proposed proposal. The results of the GMS are documented by the Corporate Secretary, and the Notary prepares the Minutes of the GMS for each GMS held. Signing of the Minutes of the GMS is not required if the minutes are prepared with Notary Minutes. The minutes of the GMS must be documented and kept by the Corporate Secretary.

Penyelenggaraan RUPS Tahun Buku 2022 2022 Fiscal Year GMS

Pada tahun 2023, Perusahaan telah menyelenggarakan satu kali RUPS Tahunan untuk Tahun Buku 2022 yang diselenggarakan pada tanggal 12 Juni 2023. Tahapan penyelenggaraan RUPST mengacu pada ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, sebagaimana tergambar pada bagan berikut.

In 2023, the Company held 2022 Annual GMS which was held on June 12 2023. The stages of holding the AGM refer to the statutory provisions and the Company's Articles of Association regarding the Planning and Implementation of the General Meeting of Shareholders, as illustrated in the following chart.



Pemanggilan RUPS Invitation to GMS

Pemanggilan RUPST kepada Pemegang Saham dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan. Pemanggilan RUPS Tahunan Perusahaan dilakukan pada tanggal 22 Mei 2023 melalui surat tercatat No. 175/PTK0000/2023-SO. The summons for the AGMS to Shareholders shall be made no later than 14 (fourteen) days before the GMS is held, without taking into account the date of the summons and the date the GMS is held. The invitation for the Company's Annual GMS was made on May 22 2023 via registered letter No. 175/PTK0000/2023-SO.

Penyelenggaraan RUPS Organizing GMS

Penyelenggaraan RUPST dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan selambat-lambatnya dalam enam bulan setelah tahun buku berakhir. RUPST Tahun Buku 2022 diselenggarakan pada tanggal 12 Juni 2023 secara fisik di Ruang Rapat Aula Gedung Transko PT Pertamina Trans Kontinental, Jakarta. The AGMS is held in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association no later than six months after the financial year ends. The 2022 AGMS was held on June 12, 2023 physically in the Meeting Room Hall of the Transko Building of PT Pertamina Trans Kontinental, Jakarta.

Hasil RUPS GMS Results

Hasil Keputusan RUPST telah dituangkan melalui Akta No. 08 tanggal 12 Juni 2023 tentang RUPS Tahunan PTK Tahun Buku 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Ivan Lazuardi Suwana, SH. M.K.N, Notaris di Jakarta. The results of the AGMS Decision have been stated in Deed No. 08 dated June 12 2023 concerning the PTK Annual GMS for Fiscal Year 2022 which was drawn up before Notary Ivan Lazuardi Suwana, SH. M.K.N, Notary in Jakarta.



RUPST dipimpin oleh Amir Hamzah selaku Komisaris Utama Perusahaan. RUPST dihadiri oleh perwakilan pemegang saham, seluruh Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan serta Notaris Ivan Lazuardi Suwana, SH. M.K.N, Notaris di Jakarta, selaku pihak independen yang bertindak dalam validasi/perhitungan suara. Seluruh Keputusan RUPST tahun 2023 telah disetujui oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara musyawarah untuk mufakat. Seluruh Keputusan RUPST Tahun Buku 2022 telah direalisasikan sepenuhnya oleh Perusahaan pada tahun buku 2023.

The AGMS was chaired by Amir Hamzah as President Commissioner of the Company. The AGMS was attended by representatives of shareholders, the entire Board of Commissioners and Directors of the Company as well as Notary Ivan Lazuardi Suwana, SH. M.K.N, Notary in Jakarta, as an independent party acting in the validation/counting of votes. All 2023 AGMS Resolutions have been approved by Shareholders and/or Shareholder Proxies who were present by deliberation to reach consensus. All 2022 AGMS Resolutions have been fully realized by the Company in the 2023 financial year.

Mata Acara, Keputusan dan Realisasi RUPST Tahun Buku 2022: Agenda, Decisions and Realization of the 2022 Fiscal Year AGMS:

No	Mata Acara Rapat Meeting Agenda	Keputusan Rapat Meeting Decisions	Realisasi Realization	
1	Mata Acara I: Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan Perusahaan Tahun Buku 2022 disertai Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab sepenuhnya (<i>Volledig Acquit Et De Charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Agenda I: Approval of the Annual Report including Ratification of the Company's Financial Report for the 2022 Fiscal Year accompanied by the Provision of Full Repayment and Release of Responsibility (<i>Volledig Acquit Et De Charge</i>) to the Directors and Board of Commissioners.	Keputusan Agenda I: Menyetujui Laporan Tahunan Perusahaan Tahun Buku 2022 serta mengesahkan Laporan Keuangan Perusahaan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 beserta penjelasannya yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) TANUDIREDA, WIBISANA, RINTIS & REKAN, sebagaimana termuat dalam Laporan Nomor: 00284/2.1025/AU.1/06/1130-5/1/III/2023 tertanggal 13 Maret 2022 dengan pendapat "Wajar Dalam Semua Hal yang Material" serta memberikan Pelunasan dan Pembebasan sepenuhnya dari Tanggung Jawab (<i>Volledig Acquit Et De Charge</i>) kepada Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang dilakukan dalam Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 sepanjang: - Tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perusahaan (termasuk Laporan Keuangan) Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2022; - Tindakan-tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan/atau perbuatan melawan hukum.	Agenda I Decision: Approved the Company's Annual Report for the 2022 Fiscal Year and ratified the Company's Financial Report for the Fiscal Year ending 31 December 2022 along with its explanation which has been audited by the Public Accounting Firm (KAP) TANUDIREDA, WIBISANA, RINTIS & REKAN, as contained in Report Number: 00284/ 2.1025/AU.1/06/1130-5/1/III/2023 dated 13 March 2022 with the opinion "Fair in All Material Matters" and providing full repayment and release from liability (<i>Volledig Acquit Et De Charge</i>) to the Board of Directors for management actions and to the Board of Commissioners for supervisory actions carried out in the Financial Year ending 31 December 2022 as long as: - These actions are reflected in the Company's Annual Report (including Financial Reports) for the Financial Year ending 31 December 2022; - These actions do not constitute criminal acts and/or unlawful acts.	Telah terealisasi. Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan telah disahkan dalam rapat. It has been realized. The Annual Report and Financial Report have been approved at the meeting.

No	Mata Acara Rapat Meeting Agenda	Keputusan Rapat Meeting Decisions	Realisasi Realization	
2.	Mata Acara II: Pengusulan dan Penetapan Penggunaan Laba Tahun Buku 2022 Agenda Item II: Proposing and Determining the Use of Profits for the 2022 Fiscal Year	Keputusan Agenda II: 1. Menyetujui tidak dilakukan pembagian dividen tahun buku 2022 2. Menetapkan penggunaan laba tahun buku 2022 sebesar Rp733.030.665.813,00 atau 100% dari laba bersih sebagai cadangan, termasuk mendukung kegiatan operasional dan pengembangan Perusahaan.	Agenda II Decisions: 1. Approved that dividend distribution for the 2022 financial year will not be distributed 2. Determine the use of profit for the 2022 financial year of Rp733,030,665,813,00 or 100% of net profit as reserves, including to support the Company's operational and development activities.	Telah terealisasi sesuai dengan keputusan rapat. It has been realized in accordance with the meeting decision.
3.	Mata Acara III: Pengusulan Penunjukan Kantor Akuntan Publik ("KAP") untuk Tahun Buku 2023 Agenda Item III: Proposed Appointment of a Public Accounting Firm ("KAP") for the 2023 Financial Year	Keputusan Agenda III: Menetapkan kembali Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan dalam melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sesuai dengan hasil evaluasi dan usulan Dewan Komisaris.	Agenda III Decision: Re-appoint the Public Accounting Firm (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis and Partners to carry out audits of the Company's Financial Reports for the financial year ending 31 December 2023 in accordance with the evaluation results and recommendations of the Board of Commissioners.	Telah terealisasi. Pemegang Saham telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan melalui KPSSS tanggal 11 Oktober 2022. It has been realized. Shareholders have appointed the Public Accounting Firm (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis and Rekan via KPSSS on October 11 2022.
4.	Mata Acara IV: Pengusulan dan Penetapan Penghargaan atas Kinerja (Tantiem) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2022 IV Agenda: Proposing and Determining Awards for Performance (Tantiem) to the Board of Directors and Board of Commissioners for the 2022 Financial Year	Keputusan Agenda IV: Penghargaan atas kinerja (tantiem) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun buku 2022 akan ditentukan kemudian dan ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham terpisah secara Sirkuler.	Agenda IV Decision: Awards for performance (tantiem) to the Company's Directors and Board of Commissioners for the 2022 financial year will be determined later and determined in a separate Circular General Meeting of Shareholders.	Telah terealisasi. Penetapan tantiem Direksi dan Dewan Komisaris tertuang dalam KPSSS tanggal 4 September 2023 & Akta No. 09 tanggal 07 September 2023 oleh Notaris Ivan Lazuardi Suwana, SH., M.Kn. It has been realized. Determination of bonuses for the Board of Directors and Board of Commissioners is contained in the KPSSS dated September 4 2023 & Deed No. 09 dated 07 September 2023 by Notary Ivan Lazuardi Suwana, SH., M.Kn.
5.	Mata Acara V: Pengusulan dan Penetapan Remunerasi kepada Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2023 Agenda V: Proposing and Determining Remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners for the 2023 Financial Year	Keputusan Agenda V: Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun buku 2022 akan ditentukan kemudian dan ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham terpisah secara Sirkuler.	Agenda V Decisions: The remuneration of the Company's Directors and Board of Commissioners for the 2022 financial year will be determined later and determined in a separate Circular General Meeting of Shareholders.	Telah terealisasi. Penetapan tantiem Direksi dan Dewan Komisaris tertuang dalam KPSSS tanggal 4 September 2023 & Akta No. 09 tanggal 07 September 2023 oleh Notaris Ivan Lazuardi Suwana, SH., M.Kn. It has been realized. Determination of bonuses for the Board of Directors and Board of Commissioners is contained in the KPSSS dated September 4 2023 & Deed No. 09 dated 07 September 2023 by Notary Ivan Lazuardi Suwana, SH., M.Kn.

Selain itu, pada tahun 2023 pemegang saham juga mengeluarkan 7 (tujuh) Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler (KPSSS) sebagai berikut:

Apart from that, in 2023 shareholders will also issue 7 (seven) Circular Shareholder Decisions (KPSSS) as follows:

Tanggal Keputusan Decision Date	Perihal Regarding
12 Juni 2023 June 12, 2023	RUPS Tahunan PTK Tahun Buku 2022 PTK Annual GMS for Fiscal Year 2022
3 Juli 2023 July 3, 2023	Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama PTK Dismissal and Appointment of the Main Director of PTK
21 Juli 2023 July 21, 2023	Pengangkatan Direktur Pemasaran PTK Appointment of PTK Marketing Director
23 Agustus 2023 August 23, 2023	Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PTK Tahun 2023 PTK Company Work Plan and Budget (RKAP) for 2023

Tanggal Keputusan Decision Date	Perihal Regarding
4 September 2023 September 4, 2023	Penetapan Penghargaan Atas Kinerja Tahun Buku 2022 dan Penetapan Remunerasi Tahun 2023 Direksi dan Dewan Komisaris Determination of Awards for Performance for the 2022 Financial Year and Determination of Remuneration for 2023 Directors and Board of Commissioners
11 Oktober 2023 October 11, 2023	Pengangkatan Kembali Anggota Dewan Komisaris Reappointment of Members of the Board of Commissioners
4 Desember 2023 December 4, 2023	Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Investasi pada Rencana Kerja dan Anggaran perusahaan (RKAP) Tahun 2023 Changes to the Work Plan and Investment Budget in the company's Work Plan and Budget (RKAP) for 2023

Realisasi Pelaksanaan Hasil Keputusan RUPST Tahun Buku 2021

Realization of Implementation of 2021 Fiscal Year AGMS Decision Results

Pada tahun 2022, Perusahaan menyelenggarakan RUPST Tahun Buku 2021 pada tanggal 16 Juni 2022, dengan agenda dan realisasi keputusan RUPST sebagai berikut:

In 2022, the Company will hold an 2021 Fiscal Year AGMS on June 16 2022, with the agenda and realization of the AGMS decisions as follows:

Mata Acara, Keputusan dan Realisasi RUPST Tahun Buku 2021: Agenda, Decisions and Realization of the 2021 Fiscal Year AGMS:

Mata Acara Rapat Pertama First Meeting Agenda	Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan Perusahaan Tahun Buku 2021 disertai Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab sepenuhnya (<i>Volledig Acquit Et De Charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris.	Approval of the Annual Report including Ratification of the Company's Financial Report for the 2021 Fiscal Year accompanied by the Provision of Full Repayment and Release of Responsibility (<i>Volledig Acquit Et De Charge</i>) to the Directors and Board of Commissioners.
Keputusan Rapat Meeting Decisions	Menyetujui Laporan Tahunan Perusahaan Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) serta mengesahkan Laporan Keuangan Perusahaan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 beserta penjelasannya yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) TANUDIREDA, WIBISANA, RINTIS & REKAN, sebagaimana termuat dalam Laporan Nomor: 00339/2.1025/AU.1/06/1130-4/1/III/2022 tertanggal 16 Maret 2022 dengan pendapat "Wajar Dalam Semua Hal yang Material" serta memberikan Pelunasan dan Pembebasan sepenuhnya dari Tanggung Jawab (<i>Volledig Acquit Et De Charge</i>) kepada Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang dilakukan dalam Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 sepanjang: - Tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perusahaan (termasuk Laporan Keuangan) Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu); - Tindakan-tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan/atau perbuatan melawan hukum.	Approved the Company's Annual Report for the 2021 Fiscal Year (two thousand twenty one) and ratified the Company's Financial Report for the Fiscal Year ending December 31, 2021 along with its explanation which has been audited by the Public Accounting Firm (KAP) TANUDIREDA, WIBISANA, RINTIS & REKAN, as contained in Report Number: 00339/2.1025/AU.1/06/1130-4/1/III/2022 dated 16 March 2022 with the opinion "Fair in All Material Matters" and providing full repayment and release from liability (<i>Volledig Acquit Et De Charge</i>) to the Board of Directors for management actions and to the Board of Commissioners for supervisory actions carried out in the Financial Year ending 31 December 2021 as long as: - These actions are reflected in the Company's Annual Report (including Financial Reports) for the Financial Year ending 31 December 2021 (thirty-first of December two thousand twenty-one); - These actions do not constitute criminal acts and/or unlawful acts.
Mata Acara Rapat Kedua Second Meeting Agenda	Pengusulan dan Penetapan Penggunaan Laba Tahun Buku 2021	Proposing and Determining the Use of Profits for the 2021 Fiscal Year
Keputusan Rapat Meeting Decisions	Menetapkan penggunaan Laba Perusahaan Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu), dengan rincian sebagai berikut: - Menyetujui pembagian Dividen kepada Pemegang Saham sebesar USD49.100.000, secara proporsional sesuai dengan porsi kepemilikan saham dalam Perusahaan, yang berasal dari Laba Bersih Tahun Buku 2021 sebesar USD37.157.795, dan Laba Ditahan per tanggal 31 Desember 2021 sebesar USD11.942.205; - Pembayaran Dividen tersebut selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal ditutupnya Rapat; - Menyetujui Cadangan Wajib sebesar USD2.500.000, yang dialokasikan dari Laba Ditahan Tahun 2021 yang belum ditentukan penggunaannya.	Determine the use of Company Profits for the 2021 Fiscal Year (two thousand twenty-one), with the following details: - Approved the distribution of Dividends to Shareholders in the amount of USD49,100,000, proportionally according to the portion of share ownership in the Company, originating from Net Profit for the 2021 Fiscal Year amounting to USD37,157,795, and Retained Earnings as of 31 December 2021 amounting to USD11,942,205; - Payment of the Dividend is no later than 30 days from the closing date of the Meeting; - Approved Mandatory Reserves of USD2,500,000, allocated from 2021 Retained Earnings whose use has not yet been determined.

Mata Acara Rapat Ketiga Third Meeting Agenda	Pengusulan Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Tahun Buku 2022	Proposed Appointment of a Public Accounting Firm (KAP) for the 2022 Financial Year
Keputusan Rapat Meeting Decisions	Menyetujui pemberian kuasa dan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perusahaan untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai Auditor Independen untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 berikut kewajaran nilai jasanya sesuai ketentuan yang berlaku, dengan ketentuan bahwa KAP yang ditunjuk Perseroan sebelumnya sudah berkonsultasi/berkoordinasi dengan PT Pertamina International Shipping.	Approved the granting of power and delegation of authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a Public Accounting Firm (KAP) as an Independent Auditor to conduct an audit of the Company's Financial Report for the period 1 January to 31 December 2022 along with the reasonableness of the value of its services in accordance with applicable regulations, provided that the KAP is appointed by the Company had previously consulted/coordinated with PT Pertamina International Shipping.
Mata Acara Rapat Keempat Fourth Meeting Agenda	Pengusulan Penghargaan atas Kinerja (Tantiem) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2021	Proposing Performance Awards (Tantiem) to the Board of Directors and Board of Commissioners for the 2022 Financial Year
Keputusan Rapat Meeting Decisions	Menetapkan bahwa Penghargaan atas Kinerja (Tantiem) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2021 akan ditentukan kemudian dan akan dilaksanakan dalam RUPS terpisah secara sirkuler.	Determining that Performance Awards (Tantiem) for the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the 2021 Financial Year will be determined later and will be implemented in a separate, circular GMS.
Mata Acara Rapat Kelima Fifth Meeting Agenda	Pengusulan Remunerasi kepada Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2022	Proposing Remuneration to the Board of Directors and Board of Commissioners for the 2022 Financial Year
Keputusan Rapat Meeting Decisions	Menyetujui Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun buku 2022 akan ditentukan kemudian dan akan dilaksanakan dalam RUPS terpisah secara sirkuler.	Approving the remuneration of the Company's Directors and Board of Commissioners for the 2022 financial year will be determined later and will be carried out in a separate, circular GMS.

Pada tahun 2022, Pemegang Saham Perusahaan juga telah menerbitkan 13 Keputusan Pemegang Saham secara Sirkuler (KPSSS) dengan agenda sebagai berikut:

1. KPSSS tanggal 7 Januari 2022 tentang Penempatan Wakil Perusahaan Sebagai Direksi di Anak Perusahaan/*Joint Venture* PT Pertamina Trans Kontinental;
2. KPSSS tanggal 8 Maret 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Pemasaran;
3. KPSSS tanggal 23 Mei 2022 tentang Revisi Rencana Kerja Anggaran Perusahaan ("RKAP") Tahun 2021;
4. KPSSS tanggal 15 Juli 2022 tentang Pengangkatan Kembali untuk Periode Kedua Direktur Utama PTK;
5. KPSSS tanggal 27 Juli 2022 tentang Penempatan Wakil Perusahaan Sebagai Direktur Operasi PTK;
6. KPSSS tanggal 5 Agustus 2022 tentang Penempatan Wakil Perusahaan Sebagai Direksi di Anak Perusahaan;
7. KPSSS tanggal 5 Agustus 2022 tentang Pengangkatan Direktur Operasi PTK;
8. KPSSS tanggal 12 Agustus 2022 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan ("RKAP") Tahun 2022;
9. KPSSS tanggal 11 Oktober 2022 tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik ("KAP") Tahun Buku 2022, 2023, dan 2024;
10. KPSSS tanggal 14 November 2022 tentang Penempatan Wakil Perusahaan Sebagai Direksi di Anak Perusahaan atau *Joint Venture* PTK;
11. KPSSS tanggal 14 November 2022 tentang Penetapan Penghargaan atas Kinerja Tahun Buku 2021 dan Remunerasi Tahun Buku 2022 Direksi Dan Dewan Komisaris Perusahaan;
12. KPSSS tanggal 29 November 2022 tentang Penambahan Modal Ditempatkan dan Disetor;
13. KPSSS tanggal 22 Desember 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Investasi pada RKAP Tahun 2022.

In 2022, the Company's Shareholders have also issued 13 Circular Shareholder Decisions (KPSSS) with the following agenda:

1. KPSSS dated January 7 2022 concerning the Placement of Company Representatives as Directors in Subsidiaries/*Joint Ventures* of PT Pertamina Trans Kontinental;
2. KPSSS dated March 8 2022 concerning Dismissal and Appointment of the Marketing Director;
3. KPSSS dated 23 May 2022 concerning Revision of the Company's Budget Work Plan ("RKAP") for 2021;
4. KPSSS dated 15 July 2022 concerning Reappointment for the Second Period of the Main Director of PTK;
5. KPSSS dated 27 July 2022 concerning the Placement of Company Representatives as Director of PTK Operations;
6. KPSSS dated 5 August 2022 concerning the Placement of Company Representatives as Directors in Subsidiaries;
7. KPSSS dated 5 August 2022 concerning the Appointment of PTK Operations Director;
8. KPSSS dated 12 August 2022 concerning the Company's Work Plan and Budget ("RKAP") for 2022;
9. KPSSS dated 11 October 2022 concerning the Determination of a Public Accounting Firm ("KAP") for the 2022, 2023 and 2024 Financial Years;
10. KPSSS dated 14 November 2022 concerning the Placement of Company Representatives as Directors in PTK Subsidiaries or *Joint Ventures*;
11. KPSSS dated November 14 2022 concerning Determination of Awards for the Performance of the 2021 Financial Year and Remuneration for the 2022 Financial Year of the Company's Directors and Board of Commissioners;
12. KPSSS dated 29 November 2022 concerning Additional Issued and Paid-up Capital;
13. KPSSS dated 22 December 2022 concerning Changes to the Investment Work Plan in the 2022 RKAP.

Seluruh Keputusan RUPST dan KPSS tahun 2023 telah direalisasikan sepenuhnya oleh Perusahaan pada tahun 2023 dan tidak ada keputusan yang tidak terealisasi atau tertunda realisasinya. Informasi mengenai seluruh keputusan dan realisasi RUPS yang diselenggarakan Perusahaan dapat dilihat pada Laporan Tahunan PTK Tahun 2022 yang telah tersedia pada situs web Perusahaan di www.pertamina-ptk.com.

All AGMS and KPSS decisions for 2023 have been fully realized by the Company in 2023 and there are no decisions that have not been realized or have had their realization delayed. Information regarding all decisions and realization of the GMS held by the Company can be seen in PTK's 2022 Annual Report which is available on the Company's website at www.pertamina-ptk.com.

Dewan Komisaris Board of Commissioners

Dewan Komisaris sebagai organ Perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif dan kolegial untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris didukung oleh organ Komite dalam memastikan Perseroan telah beroperasi sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, dengan nilai-nilai yang dinyatakan dalam etika bisnis, serta sesuai dengan harapan para pemegang saham.

The Board of Commissioners as a company organ is tasked and responsible collectively and collegally for supervising and providing advice to the Board of Directors. The Board of Commissioners is supported by Committee organs in ensuring that the Company operates in accordance with applicable laws and regulations, with the values expressed in business ethics, and in accordance with the expectations of shareholders.

Susunan dan Komposisi Dewan Komisaris Composition and Composition of the Board of Commissioners

Pada tahun 2023 telah terjadi perubahan komposisi Dewan Komisaris yang ditetapkan melalui Keputusan Pemegang Saham secara Sirkuler yang dinyatakan dalam Akta Notaris No. 09 tanggal 7 November 2023. Melalui keputusan tersebut, Pemegang Saham memberhentikan dengan hormat Sdr. Agustinus Bensik Lomboan sebagai Komisaris Perusahaan.

In 2023 there will be a change in the composition of the Board of Commissioners which is determined through a Circular Shareholder Decree stated in Notarial Deed No. 09 on November 7, 2023. With this decision, Shareholders respectfully dismissed Mr. Agustinus Bensik Lomboan as Commissioner of the Company.

Dengan demikian susunan dan komposisi Dewan Komisaris Perusahaan hingga akhir tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Thus, the composition and composition of the Company's Board of Commissioners until the end of 2023 is as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Deed of Appointment	Periode dan Masa Jabatan Period and Term of Office
Amir Hamzah	Komisaris Utama President Commissioner	Akta No. 22 tanggal 31 Mei 2021 Deed No. 22 on May 31, 2021	Periode ke 1, 28 Mei 2021 s.d 27 Mei 2024 1 st period, May 28, 2021 to May 27, 2024
Andi Saiful Haq	Komisaris Commissioner	Akta No. 29 tanggal 17 Oktober 2023. Deed No. 29 on October 17, 2023.	Periode ke 2, 11 Oktober 2023 s.d. 10 Oktober 2026 2 nd period, October 11, 2023 s.d. October 10, 2026
Khalid Zabidi	Komisaris Commissioner	Akta No. 16 tanggal 23 November 2021 Deed No. 16 on November 23, 2021	Periode ke 1, 12 November 2021 s.d 11 November 2024 1 st period, 12 November 2021 to 11 November 2024

Ketentuan Masa Jabatan Term of Office Terms

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan pada pasal 15 ayat 8, Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun untuk satu periode masa jabatan terhitung sejak ditetapkan oleh RUPS dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris dilaksanakan berdasarkan hasil keputusan RUPS.

In accordance with the Company's Articles of Association in article 15 paragraph 8, Members of the Board of Commissioners are appointed for a maximum term of office of 3 (three) years for one term of office starting as determined by the GMS and can be reappointed for 1 (one) term of office. The appointment and dismissal of the Board of Commissioners is carried out based on the results of the GMS decision.

Komisaris Independen dan Independensi Komisaris

Independent Commissioners and Commissioner Independence

Komisaris Independen merupakan anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau dengan Pemegang Saham atau hubungan lainnya dengan Perusahaan, dimana hal tersebut dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dan tindakan secara independen.

Saat ini Perusahaan belum memiliki Komisaris Independen. Namun, Perusahaan tetap mengedepankan independensi dan profesionalitas sebagai aspek utama yang harus dimiliki oleh anggota Dewan Komisaris guna meminimalisir benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan dan memastikan setiap keputusan diambil seobjektif mungkin tanpa pengaruh dari pihak manapun. Seluruh anggota Dewan Komisaris PTK yang menjabat sampai dengan akhir tahun 2023 telah bertindak independen dan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham.

Independent Commissioners are members of the Board of Commissioners who do not have financial, management, share ownership and/or family relationships with other members of the Board of Commissioners and/or with Shareholders or other relationships with the Company, where this can influence independent decision making and actions.

Currently the Company does not have an Independent Commissioner. However, the Company continues to prioritize independence and professionalism as the main aspects that must be possessed by members of the Board of Commissioners in order to minimize conflicts of interest in decision making and ensure that every decision is taken as objectively as possible without influence from any party. All members of the PTK Board of Commissioners who serve until the end of 2023 have acted independently and have no affiliation with shareholders.

Pembagian Lingkup Tugas dan Tanggung Jawab Antar Dewan Komisaris

Division of Scope of Duties and Responsibilities Between the Board of Commissioners

Dalam rangka efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris, Dewan Komisaris telah mengatur pembagian tugas bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris. Pembagian tugas Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan fokus bidang pengawasan masing-masing anggota Dewan Komisaris mengacu pada pembagian peran sesuai kompetensi dan pengalaman yang dimiliki.

Dewan Komisaris mengatur sendiri pembagian kerja di antara para anggota berdasarkan keputusan Dewan Komisaris No. Kpts-026/DEKOM.PTK/2022 tentang Pembagian Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, sebagai berikut:

In order to effectively implement the supervisory function of the Board of Commissioners, the Board of Commissioners has arranged the division of tasks for each member of the Board of Commissioners. The division of duties of the Board of Commissioners is determined based on the supervisory focus of each member of the Board of Commissioners referring to the division of roles according to their competence and experience.

The Board of Commissioners regulates the division of work among its members based on Board of Commissioners Decree No. Kpts-026/DEKOM.PTK/2022 concerning Distribution of Supervisory Duties of the Board of Commissioners, as follows:



Amir Hamzah

Komisaris Utama President Commissioner

Bertanggung jawab keseluruhan Bidang Pengawasan / Korporasi

Responsible for the entire Supervisory / Corporate Sector



Andi Saiful Haq

Komisaris Merangkap Ketua Komite Investasi
Commissioner
Concurrently Chairman of the Investment Committee,

Bidang Pengawasan :
• Pemasaran
• SPBD

Supervision Field:
• Marketing
• SPBD





Khalid Zabidi

Komisaris Merangkap Ketua Komite Audit
Commissioner
Concurrently Chairman of the Audit Committee

Bidang Pengawasan :
• Operasional
• HSSE

Supervision Field
• Operational
• HSSE

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris mengacu pada Anggaran Dasar dan Board Manual yaitu melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan Perusahaan pada umumnya yang dilaksanakan Direksi, dan juga memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut setiap Anggota Dewan Komisaris harus:

1. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran;
2. Beritikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggung jawab kepada Persero dalam hal ini diwakili oleh RUPS dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan;
3. Dilarang melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dan mengambil kepentingan Perusahaan selain honorarium dan fasilitas yang ditentukan oleh RUPS.

In carrying out its duties and responsibilities, the Board of Commissioners refers to the Articles of Association and the Board Manual, namely supervising management policies, the course of Company management in general carried out by the Board of Directors, and also providing advice to the Board of Directors including supervision of the implementation of the Company's Long Term Plan, Work Plan and The Company's Articles of Association, provisions of the Articles of Association and GMS Resolutions, as well as applicable laws and regulations, are for the interests of the Company and in accordance with the Company's aims and objectives.

In carrying out these duties, each member of the Board of Commissioners must:

1. Comply with the Articles of Association and statutory regulations as well as the principles of professionalism, efficiency, transparency, independence, accountability, responsibility and fairness;
2. Have good faith, be careful and be responsible to the Company, in this case represented by the GMS in carrying out its duties of supervision and providing advice to the Board of Directors in the interests of the Company and in accordance with the aims and objectives of the Company;
3. It is prohibited to carry out transactions that have a conflict of interest and take the interests of the Company other than the honorarium and facilities determined by the GMS.

Wewenang dan Kewajiban Dewan Komisaris

Authorities and Obligations of the Board of Commissioners

Wewenang Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perusahaan;
2. Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perusahaan;
3. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan;
4. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;
5. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris;

The authority of the Board of Commissioners is as follows:

1. View books, letters and other documents, examine cash for verification purposes and other securities and examine the Company's assets;
2. Entering the grounds, buildings and offices used by the Company;
3. Request an explanation from the Board of Directors and/or other officials regarding issues relating to the management of the Company;
4. Know all policies and actions that have been and will be implemented by the Board of Directors;
5. Request the Directors and/or other officials under the Directors with the knowledge of the Directors to attend meetings of the Board of Commissioners;

6. Mengangkat Sekretaris Dewan Komisaris;
7. Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
8. Membentuk Komite-komite lain selain Komite Audit, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan;
9. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perusahaan, jika dianggap perlu;
10. Melakukan tindakan pengurusan Perusahaan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
11. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
12. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.

Selain kewenangan di atas, Dewan Komisaris juga memiliki kewajiban antara lain:

1. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang diusulkan Direksi;
2. Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perusahaan;
3. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perusahaan;
4. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan;
5. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau Keputusan RUPS;
6. Mematuhi ketentuan-ketentuan lainnya yang berlaku di Induk Perusahaan dan dinyatakan berlaku bagi Perusahaan dan/atau ketentuan lain yang ditetapkan dan disetujui oleh RUPS.

6. Appoint Secretary to the Board of Commissioners;
7. Temporarily suspend members of the Board of Directors in accordance with the provisions of Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;
8. Form other committees besides the Audit Committee, if deemed necessary taking into account the Company's capabilities;
9. Using experts for certain matters and within a certain period of time at the Company's expense, if deemed necessary;
10. Carry out actions to manage the Company in certain circumstances for a certain period of time in accordance with the provisions of the Articles of Association;
11. Attend Board of Directors meetings and provide views on matters discussed;
12. Carry out other supervisory authority as long as it does not conflict with statutory regulations, the Articles of Association, and/or GMS decisions.

In addition to the above authority, the Board of Commissioners also has obligations, including:

1. Provide opinions and suggestions to the GMS regarding the Company's Long Term Plan and the Company's Work Plan and Budget proposed by the Board of Directors;
2. Follow developments in the Company's activities, provide opinions and suggestions to the GMS regarding any issues deemed important for the management of the Company;
3. Report immediately to the GMS if there are symptoms of declining Company performance;
4. Examine and review periodic reports and annual reports prepared by the Board of Directors and sign the annual report;
5. Carry out other obligations in the context of supervisory duties and providing advice as long as they do not conflict with legislation, the Articles of Association and/or GMS Decisions;
6. Comply with other provisions that apply in the Parent Company and are declared to apply to the Company and/or other provisions determined and approved by the GMS.



Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

Board of Commissioners Work Guidelines and Regulations

Dewan Komisaris telah dilengkapi dengan pedoman kerja (*Board Manual*) dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. *Board Manual* berisi tentang petunjuk tata laksana kerja Komisaris yang dapat menjadi acuan bagi Komisaris dalam melaksanakan tugas untuk mencapai visi dan misi Perusahaan, sehingga diharapkan akan tercapai standar sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. *Board Manual* telah disahkan melalui Kesepakatan bersama Dewan Komisaris dan Direksi tanggal 25 Juni 2018.

Board Manual PTK mengatur beberapa hal mengenai Dewan Komisaris, diantaranya adalah tugas, wewenang, dan kewajiban Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris, organ pendukung Dewan Komisaris (Komite Audit, Komite Nominasi, Remunerasi & Manajemen Risiko, Komite Investasi dan Risiko Usaha, dan Sekretariat Dewan Komisaris), struktur organisasi dan prinsip dasar hubungan kerja Direksi dan Dewan Komisaris (meliputi benturan kepentingan dan etika jabatan, serta prinsip dasar hubungan Direksi dan Dewan Komisaris), tata laksana hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi mencakup di dalamnya komunikasi formal serta komunikasi dan pertemuan informal, dan penggunaan waktu, sarana, dan fasilitas.

The Board of Commissioners has been equipped with work guidelines (*Board Manual*) in carrying out its duties and responsibilities. The *Board Manual* contains instructions for the work procedures of Commissioners which can serve as a reference for Commissioners in carrying out their duties to achieve the Company's vision and mission, so that standards are expected to be achieved in accordance with GCG principles. The *Board Manual* has been ratified through a joint agreement between the Board of Commissioners and Directors on June 25, 2018.

The PTK *Board Manual* regulates several matters regarding the Board of Commissioners, including the duties, authority and obligations of the Board of Commissioners, meetings of the Board of Commissioners, supporting organs of the Board of Commissioners (Audit Committee, Nomination, Remuneration & Risk Management Committee, Investment and Business Risk Committee, and Board Secretariat Commissioners), organizational structure and basic principles of the working relationship between the Board of Directors and the Board of Commissioners (including conflicts of interest and office ethics, as well as basic principles of the relationship between the Board of Directors and the Board of Commissioners), management of the working relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors including formal communication as well as informal communication and meetings, and use of time, means and facilities.

Kebijakan dan Pelaksanaan Program Orientasi Perusahaan Bagi Anggota Dewan Komisaris Baru

Policy and Implementation of Company Orientation Program for New Members of the Board of Commissioners

PTK telah menetapkan kebijakan pelaksanaan orientasi bagi anggota Dewan Komisaris Perusahaan yang baru diangkat sebagaimana ditetapkan dalam *Board Manual*. Melalui program tersebut, anggota Dewan Komisaris dapat saling mengenal dan menjalin kerja sama sebagai satu tim yang solid, sekaligus efektif untuk memberikan pengenalan mengenai kondisi PTK secara umum.

Sejalan dengan *Board Manual*, Program pengenalan Dewan Komisaris meliputi: Pemaparan atas Perusahaan, penyampaian dokumen-dokumen penunjang, diantaranya Laporan Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Anggaran Dasar Perusahaan, *Board Manual*, Pedoman GCG, Standar Etika Perusahaan, Program Kerja Dewan Komisaris dan Komite Penunjang Dewan Komisaris, *Charter* Komite Penunjang Dewan Komisaris, serta peraturan-peraturan yang terkait dengan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris. Selain itu, guna memahami secara langsung proses bisnis Perusahaan, program pengenalan Perusahaan juga meliputi kunjungan langsung ke Unit/Unit Bisnis Perusahaan.

Pada tahun 2023 tidak terdapat pengangkatan anggota Dewan Komisaris baru sehingga tidak terdapat program orientasi, namun seluruh anggota Dewan Komisaris menjabat saat ini telah mengikuti program orientasi yang dilakukan Perusahaan pada saat anggota Dewan Komisaris diangkat pertama kali.

PTK has established a policy for implementing orientation for newly appointed members of the Company's Board of Commissioners as stipulated in the Board Manual. Through this program, members of the Board of Commissioners can get to know each other and work together as a solid team, while also being effective in providing an introduction to PTK conditions in general.

In line with the Board Manual, the Board of Commissioners introduction program includes: Company presentation, submission of supporting documents, including Annual Report, Company Work Plan and Budget (RKAP), Company Long Term Plan (RJPP), Company Articles of Association, Board Manual, Guidelines GCG, Company Ethical Standards, Work Program of the Board of Commissioners and Supporting Committees of the Board of Commissioners, Charter of the Supporting Committees of the Board of Commissioners, as well as regulations related to the implementation of the duties of the Board of Commissioners. In addition, in order to directly understand the Company's business processes, the Company's introduction program also includes direct visits to the Company's Business Units.

In 2023, there will be no appointment of new members of the Board of Commissioners, so there will be no orientation program, however, all current members of the Board of Commissioners have participated in the orientation program carried out by the Company when members of the Board of Commissioners were first appointed.

Kebijakan dan Pelaksanaan Program Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris

Policy and Implementation of the Board of Commissioners Competency Improvement Program

Untuk meningkatkan efektivitas peran Dewan Komisaris, PTK memfasilitasi anggota Dewan Komisaris untuk mengikuti program pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan, seminar, ataupun *workshop*.

Kebijakan pengembangan kompetensi bagi Dewan Komisaris telah diatur dalam Board Manual Perusahaan yang kemudian dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Pelatihan Dewan Komisaris. Sepanjang tahun 2023, Dewan Komisaris telah mengikuti berbagai program pengembangan kompetensi sebagai berikut.

To increase the effectiveness of the role of the Board of Commissioners, PTK facilitates members of the Board of Commissioners to take part in competency development programs in the form of training, seminars or workshops.

The competency development policy for the Board of Commissioners has been regulated in the Company's Board Manual which is then outlined in the Work Plan and Training Budget for the Board of Commissioners. Throughout 2023, the Board of Commissioners has participated in various competency development programs as follows.

Nama Pelatihan Training Name	Tempat dan Waktu Pelaksanaan Place and Time of Implementation	Penyelenggara Organizer	Peserta Pelatihan Training Participants
<i>Safety Culture and Leadership</i>	Jakarta, 10 Januari 2023 Jakarta, January 10, 2023	PT Rhuekamp Indonesia	1. Amir Hamzah 2. Khalid Zabidi
<i>Seminar International Safety Management (ISM) Code</i> Seminar on International Safety Management (ISM) Code	Semarang, 20-21 Maret 2023 Semarang, March 20-21, 2023	HSSE PTK	Khalid Zabidi
<i>Sharing Session "The Role of Internal Audit in Anti Money Laundering Actions"</i>	Solo, 22-23 Juni 2023 Solo, June 22-23, 2023	FKSP	1. Khalid Zabidi 2. Harry Mulia
Mengawal Keberlanjutan dan Pertumbuhan Perseroan Melalui Pengawasan dan Pengendalian Risiko Overseeing the Company's Sustainability and Growth Through Supervision and Risk Control	Jakarta, 19 Oktober 2023 Jakarta, October 19, 2023	IKAI	1. Khalid Zabidi 2. Harry Mulia 3. Edward Situmorang 4. Ahmad Sofyan
<i>Certified Risk Professional (CRP)</i>	11 Desember 2023 December 11, 2023	PT IRBA Group Indonesia	1. Amir Hamzah 2. Khalid Zabidi 3. Andi Saiful Haq

Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris

Policy and Implementation of Board of Commissioners Meetings

Penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan serta tata tertib rapat sebagaimana yang diatur dalam *Board Manual*. Dewan Komisaris dapat menyelenggarakan rapat internal yang merupakan rapat yang bersifat segera dan strategis, serta rapat gabungan dengan Direksi yang dilaksanakan sekali dalam satu bulan dengan agenda tetap konsultasi. Dewan Komisaris juga dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu di luar rapat berkala untuk membahas hal-hal yang bersifat mendesak ataupun hal-hal yang perlu segera mendapatkan keputusan Dewan Komisaris.

Seluruh keputusan rapat Dewan Komisaris ditetapkan dengan musyawarah untuk mufakat, apabila tidak tercapai kesepakatan maka keputusan ditetapkan dengan suara terbanyak biasa. Apabila melalui jumlah suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan rapat adalah yang sama dengan pimpinan rapat, kecuali mengenai diri orang pengambilan keputusan dilakukan dengan pemilihan secara tertutup. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak untuk mengeluarkan satu suara dan ditambah satu suara untuk anggota Dewan Komisaris yang diwakili dengan disertai surat kuasa. Suara blanko (*abstain*) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat dan bertanggung jawab atas hasil keputusan rapat. Lembar keputusan rapat harus ditandatangani oleh pimpinan rapat dan seluruh peserta rapat yang hadir.

The holding of Board of Commissioners meetings refers to the provisions regulated in the Company's Articles of Association as well as the meeting rules as regulated in the Board Manual. The Board of Commissioners can hold internal meetings which are immediate and strategic meetings, as well as joint meetings with the Board of Directors which are held once a month with a fixed agenda of consultation. The Board of Commissioners can also hold meetings at any time outside of regular meetings to discuss urgent matters or matters that require an immediate decision from the Board of Commissioners.

All decisions at meetings of the Board of Commissioners are determined by deliberation to reach a consensus, if no agreement is reached then the decision is determined by an ordinary majority vote. If the number of votes agreeing and disagreeing is the same, then the decision of the meeting is the same as that of the chairman of the meeting, except that regarding individuals the decision is made by closed voting. Each member of the Board of Commissioners has the right to cast one vote and one vote is added for members of the Board of Commissioners who are represented by a power of attorney. A blank vote (*abstain*) is considered to approve the proposal submitted at the meeting and is responsible for the results of the meeting's decisions. The meeting decision sheet must be signed by the meeting chairman and all meeting participants present.

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat

Frequency of Meetings and Level of Attendance of the Board of Commissioners at Meetings:

Pada tahun 2023, Dewan Komisaris PTK telah menyelenggarakan rapat internal Dewan Komisaris sebanyak 24 kali rapat dan rapat gabungan bersama Direksi sebanyak 15 kali rapat dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris sebagaimana tabel berikut:

In 2023, the PTK Board of Commissioners has held 24 internal meetings of the Board of Commissioners and 15 joint meetings with the Board of Directors with the attendance level of each member of the Board of Commissioners as shown in the following table:

Nama Name	Jabatan Position	Kehadiran dalam Rapat Internal Dewan Komisaris Attendance at Internal Board of Commissioners Meetings			Kehadiran dalam Rapat Gabungan bersama Direksi Attendance at Joint Meetings with the Board of Directors		
		Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Total Total Attendance	Tingkat Kehadiran Attendance Rate	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Total Total Attendance	Tingkat Kehadiran Attendance Rate
Amir Hamzah	Komisaris Utama President Commissioner	24	24	100%	15	15	100%
Andi Saiful Haq	Komisaris Commissioner	22	5	23%	15	9	60%
Khalid Zabidi	Komisaris Commissioner	24	23	96%	15	15	100%
Agustinus Bensik Lomboan*	Komisaris Commissioner	17	14	82%	14	14	100%

Keterangan: *) Berhenti menjabat sebagai Komisaris Independen sejak 1 November 2023.

Note: *) Stopped serving as Independent Commissioner from 1 November 2023.

Kehadiran Dewan Komisaris dalam RUPS Tahunan Tahun Buku 2022

Attendance of the Board of Commissioners at the 2022 Annual GMS

Pada tahun 2023, Dewan Komisaris telah menghadiri penyelenggaraan RUPS Tahunan pada tanggal 12 Juni 2023, sebagaimana tabel berikut:

In 2023, the Board of Commissioners attended the Annual GMS on June 12 2023, as in the following table:

Nama Name	Jabatan Position	Kehadiran Dalam RUPST Attendance at the AGMS
Amir Hamzah	Komisaris Utama President Commissioner	✓
Andi Saiful Haq	Komisaris Commissioner	✓
Khalid Zabidi	Komisaris Commissioner	✓

Keterangan: (✓) Hadir

Note: (✓) Attended

Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris Tahun 2023

Report on the Implementation of Duties of the Board of Commissioners for 2023

Dengan dukungan organ Komite Dewan Komisaris, selama tahun 2023 Dewan Komisaris telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam hal pengawasan maupun pemberian nasihat kepada Direksi, yang mencakup aspek-aspek antara lain:

1. Penguatan dan perbaikan implementasi program RKAP 2023 berdasarkan situasi bisnis terkini dan kapabilitas yang ada;
2. Pemantapan dan peningkatan upaya pemasaran baik pasar *Captive* maupun *Non Captive* ditingkat Nasional, terutama terhadap kegiatan usaha Hulu Migas;
3. Pengawasan eksekusi rencana investasi serta penyelesaian permasalahan atau hambatan yang terjadi di tahun 2023;
4. Strategi *recovery plan* dan efisiensi biaya, dengan mencari dan menangkap peluang bisnis baru di luar program RKAP 2023;
5. Pengendalian upaya operasi bisnis yang berwawasan lingkungan, berorientasi terhadap aspek keselamatan kerja dan sekuriti serta aspek sosial (HSSE dan ESG);
6. Pelaksanaan GCG dan pengembangan digitalisasi dan penyusunan beragam pedoman (STK, TKO & TKI) sebagai pendukung proses bisnis
7. Tindak lanjut hasil-hasil temuan (*fact finding*) dan tindak lanjutnya terutama terkait dengan kinerja keuangan.
8. Penilaian terhadap upaya meminimalisasi risiko-risiko bisnis serta memanfaatkan peluang-peluang sebagai peningkatan kinerja bisnis PTK.
9. Pemberian pendapat/saran terhadap RKAP tahun 2023 dan aspirasi Pemegang Saham; serta
10. Pemberian saran *Strategic Issue* dan *Audit Committee Concern* untuk *Review Annual Audit Plan* Tahun 2024.

Selain itu, pemberian arahan/nasihat serta rekomendasi oleh Dewan Komisaris kepada Direksi juga dilakukan melalui surat tertulis terhadap sejumlah rekomendasi/persetujuan atas permintaan Direksi, antara lain:

1. Persetujuan atas Usulan terkait Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2022;
2. Persetujuan atas Usulan terkait Penghargaan atas Kinerja (Tantiem) Tahun Buku 2022 dan Usulan Remunerasi Tahun Buku 2023;
3. Rekomendasi/Persetujuan atas Usulan terkait Kantor Akuntan Publik (KAP) Tahun Buku 2023;
4. Pemberian telaah dan Persetujuan Dewan Komisaris atas RKAP 2023 dan KPI Direksi;
5. Persetujuan atas Penempatan Wakil PTK pada Anak Perusahaan;
6. Rekomendasi/Persetujuan atas Usulan terkait Rencana Kerja Sama Operasi Pengembangan Bisnis *Dockyard* antara PT Pertamina Trans Kontinental dengan PT Marcopolo Shipyard;
7. Persetujuan Usulan Penambahan Penyertaan Modal PT Pertamina Marine Solutions;

With the support of the Board of Commissioners Committee organ, throughout 2023 the Board of Commissioners has carried out its duties and responsibilities in terms of supervision and providing advice to the Board of Directors, which includes aspects including:

1. Strengthening and improving the implementation of the 2023 RKAP program based on the current business situation and existing capabilities;
2. Strengthening and increasing marketing efforts for both captive and non-captive markets at the national level, especially for upstream oil and gas business activities;
3. Supervise the execution of investment plans and resolve problems or obstacles that occur in 2023;
4. Recovery plan strategy and cost efficiency, by searching for and capturing new business opportunities outside the 2023 RKAP program;
5. Controlling business operation efforts that are environmentally friendly, oriented towards work safety and security aspects as well as social aspects (HSSE and ESG);
6. Implementation of GCG and development of digitalization and preparation of various guidelines (STK, TKO & TKI) to support business processes
7. Follow up on findings (*fact finding*) and follow-up, especially related to financial performance.
8. Assessment of efforts to minimize business risks and exploit opportunities to improve PTK business performance.
9. Providing opinions/suggestions regarding the 2023 RKAP and Shareholder aspirations; as well as
10. Providing advice on Strategic Issues and Audit Committee Concerns for the 2024 Annual Audit Plan Review.

In addition, the provision of direction/advice and recommendations by the Board of Commissioners to the Board of Directors is also carried out through written letters regarding a number of recommendations/approvals at the request of the Board of Directors, including:

1. Approval of the Proposal regarding Determination of the Use of Net Profit for the 2022 Financial Year;
2. Approval of proposals regarding Performance Awards (Tantiem) for the 2022 financial year and proposed remuneration for the 2023 financial year;
3. Recommendation/Approval of Proposals related to the Public Accounting Firm (KAP) for the 2023 Financial Year;
4. Providing review and approval from the Board of Commissioners for the 2023 RKAP and KPI for the Board of Directors;
5. Approval of the Placement of PTK Representatives in Subsidiaries;
6. Recommendation/Approval of Proposals related to the Joint Operation Plan for Dockyard Business Development between PT Pertamina Trans Kontinental and PT Marcopolo Shipyard;
7. Approval of the Proposal for Additional Capital Investment of PT Pertamina Marine Solutions;

8. Persetujuan Usulan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Investasi PTK Tahun 2023;
9. Pemberian telaah Dewan Komisaris atas Usulan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Investasi PTK Tahun 2023;
10. Pemberian telaah Dewan Komisaris atas Laporan Tahunan Dewan Komisaris atas Laporan Tahunan Tahun Buku 2022.

8. Approval of the proposed changes to PTK's 2023 Work Plan and Investment Budget;
9. Providing review by the Board of Commissioners on the proposed changes to PTK's 2023 Work Plan and Investment Budget;
10. Providing the Board of Commissioners' review of the Board of Commissioners' Annual Report for the 2022 Financial Year Annual Report;

Pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Dewan Komisaris juga diwujudkan melalui kunjungan secara aktif (*Management Walk Through*) ke lokasi kerja/ terminal/pelabuhan/kapal/shorebase/dockyard serta *stakeholder* (*end user*) terkait, guna memastikan kesesuaian tata kelola pekerjaan lapangan, masalah yang dihadapi serta perkembangan lapangan terkini.

The implementation of the duties and supervisory functions of the Board of Commissioners is also realized through active visits (*Management Walk Through*) to work locations/terminals/ports/ships/shorebase/dockyards as well as related stakeholders (*end users*), in order to ensure the suitability of field work governance and problems faced, as well as the latest developments in the field.

Tanggal Date	Kunjungan Visit	Peserta Kunjungan Visit Participants
1-4 Februari 2023 February 1-4, 2023	Wilayah MBOR I - Palembang MBOR I Region - Palembang	Amir Hamzah (Komisaris Utama), Hamdi Zainal (Komite Nominasi, Remunerasi & Manajemen Risiko), Harry Mulia (Komite Audit), Aldo Maudy Gantirta (Komite Investasi), dan Sudar (Asisten Sekretaris Dewan Komisaris). Amir Hamzah (President Commissioner), Hamdi Zainal (Nomination, Remuneration & Risk Management Committee), Harry Mulia (Audit Committee), Aldo Maudy Gantirta (Investment Committee), and Sudar (Assistant Secretary to the Board of Commissioners).
15-18 Februari 2023 February 15-18, 2023	Wilayah MBOR II - Surabaya MBOR II Region - Surabaya	Amir Hamzah (Komisaris Utama), Hamdi Zainal (Komite Nominasi, Remunerasi & Manajemen Risiko), dan Sudar (Asisten Sekretaris Dewan Komisaris). Amir Hamzah (President Commissioner), Hamdi Zainal (Nomination, Remuneration & Risk Management Committee), and Sudar (Assistant Secretary to the Board of Commissioners).
28-01 Maret 2023 March 28-01, 2023	Wilayah MBOR I - Batam MBOR I Region - Batam	Andi Saiful Haq (Komisaris/selaku Kepala Komite Investasi), Agustinus Bensik Lomboan (Komisaris/selaku Kepala Komite Nominasi, Remunerasi & Manajemen Risiko). Andi Saiful Haq (Commissioner/as Head of the Investment Committee), Agustinus Bensik Lomboan (Commissioner/as Head of the Nomination, Remuneration & Risk Management Committee).
19-21 Maret 2023 March 19-21, 2023	Seminar ISM Code dan Rapat Koordinasi antara Fungsi HSSE dan Fungsi Fleet serta Kunjungan ke Pelabuhan Tanjung Mas Semarang ISM Code Seminar and Coordination Meeting between HSSE Functions and Fleet Functions as well as a Visit to Tanjung Mas Port, Semarang	Khalid Zabidi (Komisaris/selaku Ketua Komite Audit). Khalid Zabidi (Commissioner/as Chair of the Audit Committee).
5-6 April 2023 April 5-6, 2023	Wilayah MBOR III - Balikpapan MBOR III Region - Balikpapan	Agustinus Bensik Lomboan (Komisaris/selaku Kepala Komite Nominasi, Remunerasi & Manajemen Risiko). Agustinus Bensik Lomboan (Commissioner/as Head of the Nomination, Remuneration and Risk Management Committee).
9-11 April 2023 April 9-11, 2023	Wilayah MBOR I - Batam MBOR I Region - Batam	Amir Hamzah (Komisaris Utama) dan Sudar (Asisten Sekretaris Dewan Komisaris). Amir Hamzah (President Commissioner) and Sudar (Assistant Secretary to the Board of Commissioners).
12-13 April 2023 April 12-13, 2023	Wilayah MBOR I - Palembang MBOR I Region - Palembang	Harry Mulia (Komite Audit) Harry Mulia (Audit Committee)
24-26 Juli 2023 July 24-26, 2023	Wilayah MBOR I - Medan MBOR I Region - Medan	Amir Hamzah (Komisaris Utama), Khalid Zabidi (Komisaris/selaku Kepala Komite Audit), Agustinus Bensik Lomboan (Komisaris/selaku Kepala Komite Nominasi, Remunerasi & Manajemen Risiko), Hamdi Zainal (Komite Nominasi, Remunerasi & Manajemen Risiko), Edi Ariawan (Komite Investasi), dan Sudar (Asisten Sekretaris Dewan Komisaris). Amir Hamzah (President Commissioner), Khalid Zabidi (Commissioner/as Head of the Audit Committee), Agustinus Bensik Lomboan (Commissioner/as Head of the Nomination, Remuneration & Risk Management Committee), Hamdi Zainal (Nomination, Remuneration & Risk Management Committee), Edi Ariawan (Investment Committee), and Sudar (Assistant Secretary to the Board of Commissioners).
23-25 Agustus 2023 August 23-25, 2023	Wilayah MBOR II - Semarang MBOR II Region - Semarang	Amir Hamzah (Komisaris Utama), Khalid Zabidi (Komisaris/selaku Kepala Komite Audit), Agustinus Bensik Lomboan (Komisaris/selaku Kepala Komite Nominasi, Remunerasi & Manajemen Risiko), Hamdi Zainal (Komite Nominasi, Remunerasi & Manajemen Risiko), Edi Ariawan (Komite Investasi), dan Sudar (Asisten Sekretaris Dewan Komisaris). Amir Hamzah (President Commissioner), Khalid Zabidi (Commissioner/as Head of the Audit Committee), Agustinus Bensik Lomboan (Commissioner/as Head of the Nomination, Remuneration & Risk Management Committee), Hamdi Zainal (Nomination, Remuneration & Risk Management Committee), Edi Ariawan (Investment Committee), and Sudar (Assistant Secretary to the Board of Commissioners).



Tanggal Date	Kunjungan Visit	Peserta Kunjungan Visit Participants
25-27 September 2023 September 25-27, 2023	Wilayah MBOR II - Surabaya MBOR II Region - Surabaya	Edward Situmorang (Komite Audit). Edward Situmorang (Audit Committee).
26-28 September 2023 September 26-28, 2023	Kunjungan ke BPMA Aceh Visit to BPMA Aceh	Khalid Zabidi (Komisaris/selaku Kepala Komite Audit). Khalid Zabidi (Commissioner/as Head of the Audit Committee).
17-19 November 2023 November 17-19, 2023	Wilayah MBOR III - Makassar MBOR III Region - Makassar	Amir Hamzah (Komisaris Utama), Khalid Zabidi (Komisaris/selaku Kepala Komite Audit), Agustinus Bensik Lomboan (Komisaris/selaku Kepala Komite Nominasi, Remunerasi & Manajemen Risiko), Hamdi Zainal (Komite Nominasi, Remunerasi & Manajemen Risiko), Edi Ariawan (Komite Investasi), Venny Veranica (Sekretaris Dewan Komisaris), dan Sudar (Asisten Sekretaris Dewan Komisaris). Amir Hamzah (President Commissioner), Khalid Zabidi (Commissioner/as Head of the Audit Committee), Agustinus Bensik Lomboan (Commissioner/as Head of the Nomination, Remuneration & Risk Management Committee), Hamdi Zainal (Nomination, Remuneration & Risk Management Committee), Edi Ariawan (Investment Committee), Venny Veranica (Secretary of the Board of Commissioners), and Sudar (Assistant Secretary of the Board of Commissioners).
21 November 2023 November 21, 2023	Kunjungan ke Balongan Visit to Balongan	Khalid Zabidi (Komisaris/selaku Kepala Komite Audit). Khalid Zabidi (Commissioner/as Head of the Audit Committee).
5-8 Desember 2023 December 5-8, 2023	Kunjungan ke Port Tanjung Wangi (Banyuwangi) Visit to Tanjungwangi Port (Banyuwangi)	Amir Hamzah (Komisaris Utama), Khalid Zabidi (Komisaris/selaku Kepala Komite Audit), Agustinus Bensik Lomboan (Komisaris/selaku Kepala Komite Nominasi, Remunerasi & Manajemen Risiko), Hamdi Zainal (Komite Nominasi, Remunerasi & Manajemen Risiko), Edi Ariawan (Komite Investasi), Ahmad Sofyan (Komite Nominasi, Remunerasi & Manajemen Risiko), Venny Veranica (Sekretaris Dewan Komisaris), dan Sudar (Asisten Sekretaris Dewan Komisaris). Amir Hamzah (President Commissioner), Khalid Zabidi (Commissioner/as Head of the Audit Committee), Agustinus Bensik Lomboan (Commissioner/as Head of the Nomination, Remuneration & Risk Management Committee), Hamdi Zainal (Nomination, Remuneration & Risk Management Committee), Edi Ariawan (Investment Committee), Ahmad Sofyan (Nomination, Remuneration & Risk Management Committee), Venny Veranica (Secretary of the Board of Commissioners), and Sudar (Assistant Secretary of the Board of Commissioners).



Penilaian atas Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris

Assessment of the Performance of Committees Under the Board of Commissioners

Dalam rangka membantu kelancaran tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris memiliki organ pendukung yang terdiri dari Komite Audit, Komite Nominasi, Remunerasi & Manajemen Risiko, Komite Investasi, dan Sekretaris Dewan Komisaris.

Penilaian kinerja masing-masing Komite didasarkan pada indikator penilaian kinerja sebagaimana ditetapkan oleh Dewan Komisaris, meliputi tingkat kehadiran dalam rapat internal Komite, tingkat kehadiran dalam rapat internal Dewan Komisaris, tingkat kontribusi tertulis bagi Komite, akurasi rekomendasi tertulis, akurasi rekomendasi lisan, peran aktif (inisiatif) dan inovasi. Penilaian kinerja dilakukan untuk menilai kinerja Komite Investasi selaku kelompok maupun anggotanya selaku individu.

Dewan Komisaris menilai organ Komite telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sepanjang tahun 2023 sesuai kriteria penilaian dengan baik, sehingga dapat membantu efektivitas fungsi pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris. Penjelasan lebih lanjut mengenai penilaian kinerja Komite di bawah Dewan Komisaris dapat dilihat pada uraian bagian Komite Di Bawah Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

In order to help the smooth running of its duties and responsibilities, the Board of Commissioners has supporting organs consisting of the Audit Committee, Nomination, Remuneration & Risk Management Committee, Investment Committee, and Secretary to the Board of Commissioners.

The performance assessment of each Committee is based on performance assessment indicators as determined by the Board of Commissioners, including the level of attendance at internal Committee meetings, the level of attendance at internal meetings of the Board of Commissioners, the level of written contributions to the Committee, accuracy of written recommendations, accuracy of oral recommendations, active role (initiative) and innovation. Performance assessments are carried out to assess the performance of the Investment Committee as a group and its members as individuals.

The Board of Commissioners assesses that the Committee organs have carried out their duties and responsibilities throughout 2023 according to the assessment criteria well, so that they can help the effectiveness of the supervisory function carried out by the Board of Commissioners. Further explanation regarding the performance assessment of Committees under the Board of Commissioners can be seen in the description of the Committees Under the Board of Commissioners section in this Annual Report.

Direksi

Board of Directors

Sebagai organ utama Perusahaan yang bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan Perusahaan, Direksi juga berperan dalam memastikan bahwa kebijakan tata kelola Perusahaan telah mengintegrasikan strategi Perusahaan, manajemen risiko, akuntabilitas, transparansi, dan praktik bisnis yang etis. Di bawah koordinasi Direktur Utama, Direksi memiliki tanggung jawab secara kolektif atas pengelolaan Perusahaan dengan tetap memperhatikan keseimbangan kepentingan seluruh pihak yang berkepentingan dengan aktivitas Perusahaan.

As the Company's primary organ responsible for its management, ensures that corporate governance policies integrate the Company's strategy, risk management, accountability, transparency, and ethical business practices. Under the coordination of the President Director, the Board collectively oversees the Company's management while balancing the interests of all stakeholders.

Susunan dan Komposisi Direksi

Formation and Composition of the Board of Directors

Pada tahun 2023, terjadi perubahan susunan keanggotaan Direksi berdasarkan KPSSS tanggal 3 Juli 2023. Dalam keputusan tersebut, Pemegang Saham menyetujui pemberhentian Sdr. Nepos MT Pakpahan selaku Direktur Utama dan mengangkat Sdr. I Ketut Laba sebagai Direktur Utama Perusahaan yang baru. Selanjutnya, Pemegang Saham juga mengangkat Sdr. Andy Arvianto sebagai Direktur Pemasaran berdasarkan KPSSS tanggal 21 Juli 2023. Dengan demikian susunan dan komposisi Direksi PTK per 31 Desember 2023 berjumlah empat orang, sebagaimana berikut.

In 2023, there were changes in the composition of the Board of Directors based on the Shareholders' General Meeting held on July 3, 2023. The Shareholders approved the resignation of Mr. Nepos MT Pakpahan as the President Director and appointed Mr. I Ketut Laba as the new President Director of the Company. Additionally, the Shareholders appointed Mr. Andy Arvianto as the Marketing Director based on the Shareholders' General Meeting held on July 21, 2023. Therefore, the composition of the Company's Board of Directors as of December 31, 2023, consisted of four individuals.

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Deed of Appointment	Periode dan Masa Jabatan Period and Term of Office
I Ketut Laba	Direktur Utama President director	Akta No. 02 tanggal 3 Juli 2023 Deed No. 02 on July 3, 2023	Periode ke 1, 3 Juli 2023 s.d 2 Juli 2026 1 st period, July 3, 2023 to July 2, 2026
Andy Arvianto	Direktur Pemasaran Director of Marketing	Akta No. 17 tanggal 24 Juli 2023 Deed No. 17 on July 24, 2023	Periode ke 1, 21 Juli 2023 s.d 20 Juli 2026 1 st period, July 21, 2023 to July 20, 2026
Afan Aftory	Direktur Keuangan dan SDM Director of Finance and HR	Akta No. 05 tanggal 17 September 2021 Deed No. 05 on September 17, 2021	Periode ke 1, 1 September 2021 s.d 31 Agustus 2024 1 st period, 1 September 2021 to 31 August 2024
Slamet Harianto	Direktur Operasi Director of Operations	Akta No. 04 tanggal 10 Agustus 2022 Deed No. 04 on August 10, 2022	Periode ke 1, 5 Agustus 2022 s.d 4 Agustus 2025 1 st period, 5 August 2022 to 4 August 2025

Seluruh anggota Direksi yang menjabat saat ini telah melalui serangkaian prosedur pengangkatan calon anggota Direksi Perusahaan melalui tahap evaluasi, proses penjurian, dan proses penilaian serta telah dinyatakan lulus dalam uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*). Penetapan komposisi Direksi saat ini telah mewakili keberagaman keahlian, kompetensi, pengetahuan, dan pengalaman yang diperlukan untuk menjalankan dan mengelola Perusahaan sesuai kebutuhan dan kompleksitasnya.

All current members of the Board of Directors have undergone a series of procedures for the appointment of candidates, including evaluation, screening, and assessment processes, and have been declared to have passed the fit and proper test. The current composition of the Board of Directors reflects a diversity of skills, competencies, knowledge, and experience necessary to run and manage the Company according to its needs and complexities.

Ketentuan Masa Jabatan

Term of Office

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 11 Ayat 7 masa jabatan anggota Direksi ditetapkan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Based on Article 11 Paragraph 7 of the Company's Articles of Association, the term of office for members of the Board of Directors is set at three years and can be renewed for one additional term.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Duties and Responsibilities of the Board of Directors

Tugas dan tanggung jawab Direksi diatur dalam Anggaran Dasar dan *Board Manual* antara lain sebagai berikut:

1. Memimpin dan mengurus Perusahaan sesuai dengan kepentingan dan tujuan Perusahaan;
2. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perusahaan;
3. Mewujudkan pelaksanaan RJPP dan RKAP, termasuk pencapaian target keuangan dan non keuangan;
4. Memenuhi ukuran kinerja yang jelas lengkap dan berimbang, baik dari aspek keuangan maupun non keuangan untuk menentukan pencapaian misi dan tujuan Perusahaan;
5. Menyelenggarakan sistem pengendalian intern yang efektif dan memberikan asersi mengenai pengendalian intern;
6. Melaksanakan manajemen risiko;
7. Membangun dan memanfaatkan teknologi informasi;
8. Menindaklanjuti temuan-temuan audit dari Internal Audit dan Auditor Eksternal serta melaporkannya kepada Komisaris;
9. Melaporkan informasi-informasi yang relevan kepada Komisaris, antara lain mengenai suksesi/ mutasi/promosi manajer kunci (senior), program pengembangan SDM, pertanggungjawaban manajemen risiko, penanganan HSSE dan kinerja pemanfaatan teknologi informasi;
10. Menyelenggarakan RUPS dan membuat risalah RUPS;
11. Memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan sesuai dengan nilai-nilai etika dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

The duties and responsibilities of the Board of Directors are outlined in the Articles of Association and the Board Manual, including but not limited to the following:

1. Leading and managing the Company in accordance with its interests and objectives.
2. Managing, maintaining, and overseeing the Company's assets.
3. Implementing the Long-Term Corporate Plan (RJPP) and the Corporate Budget and Work Plan (RKAP), including achieving financial and non-financial targets.
4. Meeting clear, comprehensive, and balanced performance measures, both financial and non-financial, to determine the achievement of the Company's mission and objectives.
5. Establishing an effective internal control system and providing assertions regarding internal control.
6. Implementing risk management.
7. Developing and utilizing information technology.
8. Following up on findings from Internal Audit and External Auditors and reporting them to the Board of Commissioners.
9. Reporting relevant information to the Board of Commissioners, including succession/mutation/promotion of key (senior) managers, human resource development programs, risk management accountability, HSSE handling, and information technology utilization performance.
10. Organizing General Meetings of Shareholders (RUPS) and preparing minutes of RUPS.
11. Considering the interests of stakeholders in accordance with ethical values and applicable laws and regulations.

Hak, Kewajiban, dan Wewenang Direksi Rights, Obligations, and Authorities of the Board of Directors

Dalam melakukan tindakan pengurusan Perusahaan, Direksi memiliki kewenangan sebagai berikut:

1. Menetapkan kebijakan-kebijakan berkaitan dengan pengelolaan Perusahaan, termasuk kebijakan di bidang ketenagakerjaan;
2. Mengangkat dan memberhentikan pekerja berdasarkan aturan internal Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Mengatur masalah pendelegasian wewenang/pemberian kuasa Direksi untuk mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan. Menyiapkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);
4. Mengidentifikasi peluang bisnis;
5. Menyusun dan mengimplementasikan sistem akuntansi yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan;
6. Menyelenggarakan program pengenalan bagi Direksi baru yang relevan kepada Komisaris, antara lain mengenai suksesi/mutasi/promosi manajer kunci (senior), program pengembangan SDM, pertanggungjawaban Manajemen Risiko, pelaksanaan L2K3, dan kinerja pemanfaatan teknologi informasi;
7. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan membuat risalah RUPS;
8. Memperhatikan kepentingan *Stakeholders* sesuai dengan nilai-nilai etika dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Menyusun dan menyelenggarakan program pembelajaran (*knowledge skill*) bagi Direksi;

In managing the Company, the Board of Directors has the authority to:

1. Establish policies related to the management of the Company, including labor policies.
2. Hire and terminate employees in accordance with the Company's internal regulations and applicable laws.
3. Regulate the delegation of authority/issuance of powers of attorney for the Directors to represent the Company in and out of court. Prepare the Company's Long-Term Plan (RJPP) and the Company's Work Plan and Budget (RKAP).
4. Identify business opportunities.
5. Develop and implement an accounting system that complies with Financial Accounting Standards.
6. Organize orientation programs for new Directors, relevant to the Board of Commissioners, including succession/mutation/promotion of key (senior) managers, human resource development programs, risk management accountability, HSSE implementation, and information technology utilization performance.
7. Hold General Meetings of Shareholders (RUPS) and prepare minutes of these meetings.
8. Consider the interests of stakeholders in accordance with ethical values and applicable laws and regulations.
9. Develop and implement learning programs (knowledge and skills) for the Board of Directors.

10. Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya Perusahaan;
 11. Menandatangani pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan;
 12. Menetapkan secara jelas tugas, tanggung jawab dan wewenang Manajemen serta ukuran kinerja pada setiap tingkatan/level;
 13. Menandatangani kontrak Manajemen setiap tahun yang memuat janji atau pernyataan Direksi untuk memenuhi segala target-target yang telah ditetapkan;
 14. Menyusun dan mempublikasikan Laporan Tahunan Perusahaan;
 15. Mencantumkan kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perusahaan lain, dalam Laporan Tahunan Perusahaan.
10. Provide accountability and all information about the Company's condition and operations.
 11. Sign statements of no conflict of interest.
 12. Clearly define the duties, responsibilities, and authorities of Management as well as performance metrics at each level.
 13. Annually sign Management contracts that include the Directors' commitment to meet all established targets.
 14. Compile and publish the Company's Annual Report.
 15. Disclose their share ownership and/or that of their family in other companies in the Company's Annual Report.

Pembagian Lingkup Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Division of Duties and Responsibilities of the Board of Directors

Selain pertanggungjawaban secara kolektif, Direksi Perusahaan juga mempunyai tugas dan tanggung jawab secara individu yang melekat pada jabatan dan fungsinya sesuai dengan bidang dan kompetensi masing-masing. Ruang lingkup pembagian tugas dan tanggung jawab Direksi telah diatur dalam Keputusan Direksi No. Kpts-511/C0000/2021-S0 tanggal 11 Mei 2021 tentang Struktur Organisasi Perusahaan, sebagai berikut:

In addition to collective accountability, each member of the Company's Board of Directors also has individual duties and responsibilities specific to their roles and areas of expertise. The scope of these duties and responsibilities is outlined in the Board of Directors Decree No. Kpts-511/C0000/2021-S0 on May 11, 2021, concerning the Company's Organizational Structure, as follows:



I Ketut Laba

Direktur Utama
President Director

Menentukan, memutuskan dan menetapkan penyusunan strategi, perencanaan serta pelaksanaan seluruh kegiatan pengoperasian kapal-kapal milik perusahaan pelayaran dan pihak-pihak pengguna jasa yang membutuhkan/ mempergunakan jasa Perusahaan, baik yang bergerak di bidang pencarian minyak lepas pantai maupun sektor lain yang bersifat khusus dalam bidang angkutan laut maupun jasa kepelabuhan, agar memperoleh profit optimal dan mengembangkan saham pemilik dengan memperhatikan etika bisnis dan berpedoman kepada garis kebijakan yang ditetapkan Dewan Komisaris Perusahaan.

Determining, deciding, and establishing the strategy, planning, and execution of all operational activities of the Company's fleet and services for clients, including those in offshore oil exploration and other specialized maritime and port services sectors, to achieve optimal profits and expand owner share while adhering to business ethics and the policies set by the Company's Board of Commissioners.



Andy Arvianto

Direktur Pemasaran
Director of Marketing

Memutuskan, mengendalikan dan mengarahkan dalam penyusunan strategi, pengembangan usaha kegiatan perusahaan melalui pemasaran jasa sewa kapal dan jasa marine pada customer dari segmen perusahaan oil & gas dan perusahaan non oil & gas, untuk memperoleh profit optimal bagi Perusahaan, dengan memperhatikan etika bisnis dan berpedoman kepada garis kebijakan yang ditetapkan Perusahaan.

Deciding, controlling and directing in the preparation of strategies, business development of company activities through marketing ship rental services and marine services to customers from the segment of oil & gas companies and non-oil & gas companies, to obtain optimal profits for the company, while adhering to business ethics and the policies set by the Company.





Afan Aftory

Direktur Keuangan dan SDM
Director of Finance and HR

Memutuskan, mengendalikan dan mengarahkan atas kelancaran dalam mengelola dana Perusahaan sehingga dapat menjamin likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas dalam menetapkan kebijakan dengan manajemen akuntansi dan perbendaharaan serta penyiapan laporan/data keuangan yang akurat dan tepat waktu.

Deciding, controlling, and directing the smooth management of the Company's funds to ensure liquidity, solvency, and profitability, by setting policies for accounting and treasury management and preparing accurate and timely financial reports/data.



Slamet Harianto

Direktur Operasi
Director of Operations

Memutuskan, mengendalikan dan mengarahkan dalam penyusunan strategi, pengembangan usaha kegiatan perusahaan melalui pelaksanaan operasional perusahaan sehingga dapat mendukung pelaksanaan bisnis di perusahaan agar memperoleh *profit* optimal dan mengembangkan saham milik (Pertamina) dengan memperhatikan etika bisnis dan berpedoman kepada garis kebijakan yang ditetapkan Dewan Komisaris Perusahaan.

Deciding, controlling and directing in the preparation of strategies, business development of company activities through the implementation of company operations so that they can support the implementation of business in the company in order to obtain optimal profit and develop shares owned by (Pertamina) with due regard to business ethics and guided by the policy lines set by the Company's Board of Commissioners.



Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi

Guidelines and Code of Conduct for the Board of Directors

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi telah dilengkapi dengan *Board Manual* sebagai pedoman dan tata tertib kerja Direksi yang telah disahkan melalui Kesepakatan Bersama Direksi tanggal 25 Juni 2018.

Board Manual PTK mengatur beberapa hal mengenai Direksi, diantaranya adalah tugas, wewenang, dan kewajiban Direksi; rapat Direksi, organ pendukung Direksi (Corporate Secretary dan Internal Audit), struktur organisasi dan prinsip dasar hubungan kerja Direksi dan Dewan Komisaris (meliputi benturan kepentingan dan etika jabatan, serta prinsip dasar hubungan Direksi dan Dewan Komisaris), tata laksana hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi mencakup di dalamnya komunikasi formal serta komunikasi dan pertemuan informal, dan penggunaan waktu, sarana, dan fasilitas.

The Board of Directors operates under the Board Manual, which serves as a guideline and code of conduct for their duties and responsibilities. This manual was ratified through a Joint Agreement of the Board of Directors on June 25, 2018.

The PTK Board Manual covers various aspects of the Board, including duties, authorities, and obligations; Board meetings; supporting organs (Corporate Secretary and Internal Audit); organizational structure; fundamental principles of the relationship between the Board of Directors and the Board of Commissioners (including conflict of interest and office ethics); the procedure for interactions between the Board of Directors and the Board of Commissioners, including both formal and informal communication and meetings; and the use of time, resources, and facilities.

Kebijakan dan Pelaksanaan Program Orientasi Perusahaan Bagi Anggota Direksi Baru

Policies and Implementation of Orientation Programs for New Members of the Board of Directors

Perusahaan telah menetapkan kebijakan pelaksanaan orientasi bagi anggota Direksi Perusahaan yang baru diangkat sebagaimana ditetapkan dalam *Board Manual*. Program orientasi ini menjabarkan sebuah proses untuk membuat anggota Direksi yang baru diangkat memahami Perusahaan, strategi, isu-isu, dan proses-proses di dalam keanggotaan Direksi sehingga dapat dengan cepat beradaptasi dengan peran baru.

Pada tahun 2023, Perusahaan melalui koordinasi Sekretaris Perusahaan telah menyelenggarakan proses orientasi bagi dua anggota Direksi yang baru diangkat. Program orientasi bagi Sdr. I Ketut Laba sebagai Direktur Utama dan Sdr. Andy Arvianto sebagai Direktur Pemasaran dilakukan pada tanggal 24 Juli 2023. Program orientasi Direksi dilakukan melalui presentasi, pertemuan, kunjungan ke Perusahaan/Anak Perusahaan, pengkajian dokumen, serta kegiatan lain yang dianggap sesuai.

Adapun materi program orientasi meliputi:

1. Gambaran mengenai Perusahaan berkaitan dengan Visi dan Misi, nilai dan budaya Perusahaan, tujuan dan strategi Perusahaan, unit usaha dan Anak Perusahaan, kinerja keuangan dan operasi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, aplikasi teknologi informasi, manajemen Risiko, kondisi persaingan usaha, dan masalah strategis lainnya;
2. Penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab Direksi serta pendelegasian wewenang;
3. Penjelasan mengenai stakeholders utama Perusahaan dan tanggung jawab sosial perusahaan;
4. Pengenalan operasi Perusahaan;
5. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perusahaan;
6. Aspek *Good Corporate Governance* di lingkungan Perusahaan.

The Company has established an orientation policy for newly appointed Board members as outlined in the Board Manual. This orientation program is designed to help new Board members quickly understand the Company, its strategies, issues, and processes, enabling them to adapt swiftly to their new roles.

In 2023, the Company, through coordination with the Corporate Secretary, conducted orientation for two newly appointed Board members. The orientation program for Mr. I Ketut Laba as President Director and Mr. Andy Arvianto as Marketing Director was held on July 24, 2023. The orientation included presentations, meetings, visits to the Company/Subsidiaries, document reviews, and other appropriate activities.

The orientation program covered:

1. Overview of the Company related to its Vision and Mission, values and culture, goals and strategies, business units and Subsidiaries, financial and operational performance, short-term and long-term business plans, information technology applications, risk management, competitive business conditions, and other strategic issues;
2. Explanation of the duties and responsibilities of the Board of Directors and delegation of authority;
3. Explanation of the Company's key stakeholders and corporate social responsibility;
4. Introduction to the Company's operations;
5. Regulations related to the Company's business activities;
6. Aspects of Good Corporate Governance within the Company.

Kebijakan dan Pelaksanaan Program Peningkatan Kompetensi Direksi

Policies and Implementation of Competency Development Programs for the Board of Directors

Perusahaan memfasilitasi Direksi untuk senantiasa mengembangkan kompetensinya masing-masing melalui program pelatihan dan sertifikasi, maupun program peningkatan kompetensi lainnya seperti seminar dan *workshop*. Kebijakan pengembangan kompetensi bagi Direksi sepenuhnya telah diatur dalam *Board Manual* Perusahaan. Dalam hal ini, Sekretaris Perusahaan memfasilitasi dan memonitor program peningkatan kompetensi Direksi sesuai dengan rencana pelatihan yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Pelatihan Direksi.

Daftar pelatihan yang telah diikuti oleh Direksi Perusahaan sepanjang tahun 2023 adalah sebagai berikut:

The Company facilitates continuous competency development for the Board of Directors through training and certification programs, as well as other competency enhancement initiatives such as seminars and workshops. The competency development policy for the Board of Directors is comprehensively regulated in the Company's Board Manual. The Corporate Secretary facilitates and monitors the competency development programs for the Board of Directors in accordance with the training plans outlined in the Board of Directors' Work Plan and Budget.

The list of training programs attended by the Board of Directors throughout 2023 is as follows:

Nama dan Jabatan Name and Position	Nama Pelatihan Training Name	Waktu Pelaksanaan Execution time	Penyelenggara Organizer
I Ketut Laba (Direktur Utama) (President Director)	AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif) 2023 AKHLAK (Trustworthy, Competent, Harmonious, Loyal, Adaptive, Collaborative) 2023	1 September 2023 September 1, 2023	PCU
	Training & Sertifikasi <i>Certified Risk Professional</i> (CRP) BOD BOC BOD BOC <i>Certified Risk Professional</i> (CRP) Training & Certification	13 Desember 2023 December 13, 2023	IRBA

Nama dan Jabatan Name and Position	Nama Pelatihan Training Name	Waktu Pelaksanaan Execution time	Penyelenggara Organizer
Afan Aftory (Direktur Keuangan & SDM) (Director of Finance & HR)	<i>Training Safety Culture and Leadership</i>	10 Januari 2023 January 10, 2023	PCU
	<i>Leaders Forum/Leaders Insight</i>	24 Maret 2023 March 24, 2023	PCU
	<i>Leadership dalam penerapan HSSE Culture menuju HSSE Excellence</i> Leadership in implementing HSSE Culture towards HSSE Excellence	12 Mei 2023 May 12, 2023	PCU
	AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif) 2023 AKHLAK (Trustworthy, Competent, Harmonious, Loyal, Adaptive, Collaborative) 2023	31 Mei 2023 May 31, 2023	PCU
	<i>Risk Management Forum Pertamina Across The Group 2022 Sesi IV</i> Risk Management Forum Pertamina Across The Group 2022 Session IV	13 Juni 2023 June 13, 2023	PCU
	<i>Training & Sertifikasi Certified Risk Professional (CRP) BOD BOC</i> BOD BOC Certified Risk Professional (CRP) Training & Certification	13 Desember 2023 December 13, 2023	IRBA
Slamet Harianto (Direktur Operasi) (Director of Operations)	<i>Leaders Forum/Leaders Insight</i>	24 Maret 2023 March 24, 2023	PCU
	<i>Safety Culture and Leadership</i>	5 November 2023 November 5, 2023	PCU
	<i>Training & Sertifikasi Certified Risk Professional (CRP) BOD BOC</i> BOD BOC Certified Risk Professional (CRP) Training & Certification	13 Desember 2023 December 13, 2023	IRBA
Andy Arvianto (Direktur Pemasaran) (Director of Marketing)	<i>Training & Sertifikasi Certified Risk Professional (CRP) BOD BOC</i> BOD BOC Certified Risk Professional (CRP) Training & Certification	13 Desember 2023 December 13, 2023	IRBA



Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat Direksi Policies and Implementation of Board of Directors Meetings

Rapat Direksi dilaksanakan untuk membahas permasalahan operasional atau untuk mengambil keputusan atas kebijakan-kebijakan Perusahaan. Berdasarkan *Board Manual* Perusahaan, Rapat Direksi wajib diselenggarakan secara berkala dan wajib dihadiri seluruh anggota Direksi secara fisik. Rapat Direksi diselenggarakan secara berkala minimum 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan dapat setiap waktu apabila dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi, atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau Pemegang saham yang memiliki jumlah saham terbesar dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.

Board of Directors meetings are held to discuss operational issues or to make decisions regarding Company policies. According to the Company's Board Manual, Board of Directors meetings must be held regularly and attended physically by all members. These meetings are conducted at least once a month and can be convened at any time if deemed necessary by one or more Directors, upon the written request of one or more members of the Board of Commissioners, or by the largest shareholder, specifying the matters to be discussed.

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Direksi dalam Rapat Frequency of Meetings and Attendance Rate of Directors:

Pada tahun 2023, Direksi PTK telah menyelenggarakan rapat internal sebanyak 39 kali rapat dan rapat gabungan bersama Dewan Komisaris sebanyak 15 kali rapat dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota Direksi sebagaimana tabel berikut:

In 2023, PTK's Board of Directors held 39 internal meetings and 15 joint meetings with the Board of Commissioners. The attendance of each Director is detailed in the following table:

Nama Name	Jabatan Position	Kehadiran dalam Rapat Internal Attendance at Internal Meetings			Kehadiran dalam Rapat Gabungan bersama Dewan Komisaris Attendance at Joint Meetings with the Board of Commissioners		
		Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Total Total Attendance	Tingkat Kehadiran Attendance Rate	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Total Total Attendance	Tingkat Kehadiran Attendance Rate
I Ketut Laba*	Direktur Utama President director	17	17	100%	7	7	100%
Andy Arvianto**	Direktur Pemasaran Marketing Director	15	15	100%	6	6	100%

Nama Name	Jabatan Position	Kehadiran dalam Rapat Internal Attendance at Internal Meetings			Kehadiran dalam Rapat Gabungan bersama Dewan Komisaris Attendance at Joint Meetings with the Board of Commissioners		
		Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Tingkat Kehadiran Attendance Rate	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Tingkat Kehadiran Attendance Rate
Afan Aftory	Direktur Keuangan dan SDM Director of Finance and HR	39	39	100%	15	15	100%
Slamet Harianto	Direktur Operasi Director of Operations	39	39	100%	15	15	100%

Keterangan: *) Baru menjabat sebagai Direktur Utama pada 3 Juli 2023. **) Baru menjabat sebagai Direktur Pemasaran pada 21 Juli 2023.

Note: (*) Newly appointed as President Director on July 3, 2023. (**) Newly appointed as Marketing Director on July 21, 2023.

Kehadiran Dewan Komisaris dalam RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 Attendance of Directors in the Annual General Meeting of Shareholders for Fiscal Year 2022:

Pada tahun 2023, Direksi telah menghadiri penyelenggaraan RUPS Tahunan pada tanggal 12 Juni 2023, sebagaimana tabel berikut:

In 2023, the Board of Directors attended the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) held on June 12, 2023, as detailed in the table below:

Nama Name	Jabatan Position	Kehadiran Dalam RUPST Attendance at the AGMS
I Ketut Laba*	Direktur Utama President director	-
Andy Arvianto*	Direktur Pemasaran Marketing Director	-
Afan Aftory	Direktur Keuangan dan SDM Director of Finance and HR	✓
Slamet Harianto	Direktur Operasi Director of Operations	✓

Keterangan: *) Sdr. I Ketut Laba dan Sdr. Andy Arvianto tidak hadir dalam RUPS Tahunan dikarenakan baru efektif menjabat setelah RUPST diselenggarakan.

Note: (*) Mr. I Ketut Laba and Mr. Andy Arvianto were not present at the AGMS because they were only effective in their positions after the AGMS was held.

Pelaksanaan Tugas Direksi Tahun 2023 Implementation of Duties by the Board of Directors in 2023

Selama tahun 2023, Direksi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di bidang operasional, keuangan, dan penunjang usaha lainnya dengan optimal. Setiap kebijakan dan keputusan yang dikeluarkan Direksi pada tahun 2023 tertuang dalam Keputusan Direksi, Surat Edaran, dan Instruksi Direksi.

Throughout 2023, the Board of Directors performed their duties and responsibilities in operational, financial, and other business support areas effectively. All policies and decisions made by the Board in 2023 are documented in Board of Directors Decisions, Circular Letters, and Instructions.

Pada tahun 2023, beberapa kebijakan strategis yang telah dilakukan Direksi meliputi hal-hal sebagai berikut:

The strategic policies implemented by the Board in 2023 include:

- Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2023;
- Menyelenggarakan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022;
- Transformasi Organisasi *Subholding Integrated Marine Logistics* Segmen PTK;
- Penyesuaian Struktur Organisasi Perusahaan;
- Pengembangan rencana strategis Perusahaan maupun Anak Perusahaan;
- Penyusunan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2023-2025;
- Penyusunan Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Tahun Buku 2023;
- Pengembangan & Implementasi *Green Port: Pilot Project* Peteka Shorebase Tanjung Batu (PSTB)
- Optimalisasi kinerja HSSE Perusahaan;
- Pembentukan Tim *Task Force* Inisiasi Keagenan Luar Negeri;
- Melakukan pengawasan atas kinerja Anak Perusahaan;
- Melakukan evaluasi atas penerapan GCG di Perusahaan dan mengimplementasikan peningkatan kualitas atas penerapan GCG.
- Preparation of the 2023 Work Plan and Budget (RKAP);
- Conducting the Annual General Meeting of Shareholders for Fiscal Year 2022;
- Organizational Transformation of the Subholding Integrated Marine Logistics Segment of PTK;
- Adjustment of the Company's Organizational Structure;
- Development of strategic plans for the Company and its Subsidiaries;
- Preparation of the Collective Labor Agreement (PKB) for the 2023-2025 period;
- Compilation of the Annual Report and Sustainability Report for Fiscal Year 2023;
- Development and implementation of Green Port: Pilot Project Peteka Shorebase Tanjung Batu (PSTB);
- Optimization of the Company's HSSE performance;
- Establishment of a Task Force for Foreign Agency Initiatives;
- Oversight of Subsidiary performance;
- Evaluation and improvement of GCG implementation in the Company.

Jenis-jenis Keputusan Direksi yang Memerlukan Persetujuan Dewan Komisaris

Types of Board of Directors Decisions Requiring Approval from the Board of Commissioners

Berikut jenis-jenis keputusan Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris sebagaimana tertuang dalam *Board Manual* Perusahaan.

1. Menerima pinjaman jangka pendek, kecuali pinjaman dari pemegang saham mayoritas;
2. Memberikan pinjaman jangka pendek;
3. Mengagunkan aktiva tetap yang diperlukan dalam melaksanakan penarikan kredit jangka pendek;
4. Melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun;
5. Menghapuskan dari pembukuan terhadap piutang macet dan persediaan barang mati;
6. Mengadakan kerja sama lisensi kontrak manajemen menyewakan aset kerja sama operasi dan perjanjian kerja sama lainnya yang dalam bidang usaha perseroan sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perusahaan yang melebihi nilai tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
7. Menetapkan dan menyesuaikan struktur organisasi sampai dengan satu tingkat di bawah Direksi.

The following types of Board of Directors decisions require approval from the Board of Commissioners as outlined in the Company's Board Manual.

1. Accepting short-term loans, except for loans from the majority shareholder;
2. Providing short-term loans;
3. Pledging fixed assets as collateral for short-term credit;
4. Disposing of and writing off movable fixed assets with an economic life generally up to five years in the industry;
5. Writing off bad debts and obsolete inventory from the books;
6. Entering into licensing cooperation, management contract cooperation, leasing operational cooperation assets, and other cooperation agreements within the Company's business scope as specified in the Company's Articles of Association, exceeding a certain value set by the Board of Commissioners;
7. Establishing and adjusting the organizational structure up to one level below the Board of Directors.



Penilaian Kinerja Organ Pendukung Direksi

Performance Evaluation of Supporting Organs of the Board of Directors

Per 31 Desember 2023, Direksi belum membentuk organ komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi. Adapun pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dalam struktur Tata Kelola Perusahaan didukung oleh organ pendukung yakni Sekretaris Perusahaan dan Internal Audit. Kinerja masing-masing organ pendukung dievaluasi secara berkala oleh Direksi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Penilaian tersebut dilakukan dengan berlandaskan pada pencapaian target yang tercantum dalam *Key Performance Indicator* (KPI).

As of December 31, 2023, the Board of Directors has not established a committee to support their duties. The execution of the duties and responsibilities of the Board within the Company's governance structure is supported by the Corporate Secretary and Internal Audit. The performance of each supporting organ is regularly evaluated by the Board of Directors based on their respective duties and responsibilities. This evaluation is conducted based on the achievement of targets outlined in the *Key Performance Indicator* (KPI).

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi

Performance Assessment of the Board of Commissioners and the Board of Directors

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Performance Assessment of the Board of Commissioners

Sebagaimana tercantum dalam *Board Manual* Perusahaan, penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris dilakukan secara berkala setiap tahun oleh pemegang saham. Evaluasi kinerja Dewan Komisaris salah satunya dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan bersamaan dengan penyampaian Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku. Evaluasi dan penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan secara menyeluruh berdasarkan capaian kinerja kolektif maupun individual. Hasil evaluasi kinerja anggota Dewan Komisaris menjadi bahan pertimbangan dalam memberikan arahan untuk meningkatkan efektivitas kinerja Dewan Komisaris.

As stated in the Company's Board Manual, the performance of the Board of Commissioners is assessed periodically every year by the shareholders. The Board of Commissioners' performance is evaluated through the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) along with the submission of the Board of Commissioners' Supervisory Duties Report during the fiscal year. Evaluation and assessment of the Board of Commissioners' performance is carried out thoroughly based on collegial and individual performance achievements. The results of the performance evaluation of the Board of Commissioners members are taken into consideration in providing direction to enhance the effectiveness of the Board of Commissioners' performance.

Kriteria Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Criteria for Performance Assessment of the Board of Commissioners

Berdasarkan *Board Manual* Dewan Komisaris, penilaian kinerja Dewan Komisaris dapat berdasarkan kriteria umum, antara lain:

1. Kehadiran dalam rapat internal Dewan Komisaris;
2. Kehadiran dalam rapat Dewan Komisaris dengan Direksi;
3. Kehadiran dalam rapat Dewan Komisaris dengan pemegang saham;
4. Kehadiran dalam rapat Dewan Komisaris atau Komite dengan unit kerja lainnya.

Selain itu, kinerja Dewan Komisaris dapat dinilai menurut faktor lainnya baik secara individual maupun kolektif sebagai berikut:

1. Integritas (misalnya benturan kepentingan yang muncul);
2. Pengetahuan dan pemahaman Dewan Komisaris atas nilai-nilai misi, rencana jangka panjang Perusahaan, dan merefleksikan pemahaman ini kepada isu-isu penting sepanjang tahun;
3. Partisipasi Dewan Komisaris dalam rapat-rapat, termasuk kemampuan mereka untuk menyampaikan, memberikan argumentasi dan memberikan solusi mengenai isu-isu strategis Perusahaan;
4. Kemampuan Dewan Komisaris dalam mengikuti isu-isu dan tren yang berpengaruh terhadap Perusahaan dan menggunakan informasi tersebut untuk menilai dan mengarahkan kinerja Perusahaan, bukan hanya dari tahun ke tahun, akan tetapi juga dalam jangka panjang;
5. Hubungan anggota Dewan Komisaris dengan sesama anggota Komisaris, dengan Direksi, dan pihak-pihak lain yang diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.

Based on the Board of Commissioners' Board Manual, the performance assessment of the Board of Commissioners can be based on general criteria, among others:

1. Attendance at internal meetings of the Board of Commissioners;
2. Attendance at meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors;
3. Attendance at meetings of the Board of Commissioners with shareholders;
4. Attendance at meetings of the Board of Commissioners or Committees with other work units.

In addition, the performance of the Board of Commissioners can be assessed according to other factors, both individually and collectively, as follows:

1. Integrity (for example, conflicts of interest that arise);
2. Knowledge and understanding of the Board of Commissioners on mission values and the Company's long-term plans, and reflecting this understanding on important issues throughout the year;
3. Participation of the Board of Commissioners in meetings, including their ability to convey, provide arguments, and provide solutions regarding the Company's strategic issues;
4. The ability of the Board of Commissioners to follow issues and trends that affect the Company and use this information to assess and direct the Company's performance, not only from year to year but also in the long term;
5. The relationship between the Board of Commissioners and fellow members of the Board of Commissioners, with the Board of Directors and other parties, is regulated in the Articles of Association and laws and regulations.

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris Berdasarkan Key Performance Indicator (KPI)

Performance Assessment of the Board of Commissioners by Key Performance Indicator (KPI)

Penilaian kinerja Dewan Komisaris oleh Pemegang Saham salah satunya dilihat berdasarkan pada pencapaian target-target dalam KPI Dewan Komisaris. Hasil penilaian kinerja Dewan Komisaris berdasarkan KPI Dewan Komisaris pada tahun 2023, adalah sebagai berikut.

The performance assessment of the Board of Commissioners by the Shareholders is based on the achievement of targets in the KPIs of the Board of Commissioners. The results of the performance assessment of the Board of Commissioners based on the KPIs of the Board of Commissioners in 2023 are as follows.

Tabel Pencapaian KPI Dewan Komisaris PTK Triwulan IV Tahun 2023

Table of KPI Achievement of the Board of Commissioners of PTK for the Fourth Quarter of 2023

No	Indikator Kinerja Utama (KPI) Key Performance Indicator (KPI)	Satuan Unit	Target		Realisasi TW IV Realization of IV QUARTER	
			2023	TW IV IV QUARTER	Real	
I	RUTINITAS KEGIATAN DEWAN KOMISARIS ROUTINE ACTIVITIES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS					
1	Pelaksanaan Rapat (<i>mandatory</i>) Implementation of Meetings (mandatory)					
	1.1. BOD BOC Board of Directors and Board of Commissioners	Frekuensi Frequency	12	12	15	
	1.2. Internal BOC Internal BOC	Frekuensi Frequency	12	12	24	
2	Pelaksanaan Pelatihan/Pembelajaran Dewan Komisaris dan/atau Komite Implementation of Training/Learning of the Board of Commissioners and/or Committee	Frekuensi Frequency	6	1	12	

No	Indikator Kinerja Utama (KPI) Key Performance Indicator (KPI)	Satuan Unit	Target		Realisasi TW IV Realization of IV QUARTER	
			2023	TW IV IV QUARTER	Real	
3	Kunjungan Dewan Komisaris dan/atau Komite ke Lapangan Board of Commissioners and/or Committee visits to the field	Frekuensi Frequency	5	1	14	●
4	Rapat Komite (KA, KI, KNRM) Committee Meeting (KA, KI, KNRM)	Frekuensi Frequency	12	9	18	●
II SERVICE LEVEL AGREEMENT						
5	Pemberian Pendapat/Saran Atas Mengenai RKAP Providing Opinion/Suggestion on the ABOP	Hari Kerja Working Days	20	20.00	2.50	●
6	Pemberian Pendapat/Saran Atas Mengenai RJPP Provision of Opinion/Suggestion on RJPP	Hari Kerja Working Days	40	40.00	N/A	●
7	Pemberian Persetujuan/Rekomendasi Atas Permintaan Direksi Granting Approval/Recommendation on Request of the Board of Directors	Hari Kerja Working Days	15	15.00	3.50	●
III ADMINISTRASI DAN PELAPORAN ADMINISTRATION & REPORTING						
8	Kehadiran Dewan Komisaris dalam RUPS/RUPSLB Attendance of the Board of Commissioners at the GMS/EGMS	%	100	90.00	100	●
9	Pelaporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham Reporting of the Board of Commissioners' Supervisory Duties to Shareholders	# Laporan # Report	4	1.00	4	●
10	Pelaporan Kinerja Direksi kepada Pemegang Saham Reporting of the Board of Directors' Performance to Shareholders	# Laporan # Report	4	1.00	4	●



Selain secara kolegal, evaluasi kinerja Dewan Komisaris juga dilakukan secara individu terhadap masing-masing anggota Komisaris berdasarkan beberapa aspek sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Pada tahun 2023, penilaian kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris mencapai skor 95,00 berada pada kategori *High*.

Besides collegially, the performance evaluation of the Board of Commissioners is also carried out individually on each member of the Board of Commissioners based on several aspects in accordance with their respective duties and responsibilities. In 2023, the performance assessment of each member of the Board of Commissioners reached a score of 95.00 in the *High* category.

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris Berdasarkan Penilaian Penerapan GCG Board of Commissioners's Performance Assessment Based on GCG Implementation Assessment

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris juga dilakukan melalui penilaian penerapan GCG berdasarkan Peraturan Kementerian BUMN SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan GCG pada BUMN tanggal 6 Juni 2012. Capaian skor *assessment* GCG tahun 2023 untuk aspek Dewan Komisaris mencapai skor 97,5% dengan kualitas penerapan GCG "Sangat Baik". Hal ini menunjukkan bahwa secara umum penerapan GCG untuk Aspek Dewan Komisaris telah berjalan dengan Sangat Baik.

The performance of the Board of Commissioners is also assessed through the assessment of GCG implementation based on the Regulation of the Ministry of SOEs SK-16/S.MBU/2012 concerning Parameter Indicators for Assessment and Evaluation of GCG Implementation in SOEs dated June 6, 2012. The achievement of the GCG assessment score in 2023 for the Board of Commissioners aspect reached a score of 97.5% with a GCG implementation quality of "Very Good". It shows that the implementation of GCG for the Board of Commissioners aspect has been running Very Well in general.

Penilaian Kinerja Direksi Performance Assessment of the Board of Directors

Sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perusahaan, penilaian kinerja Direksi dilakukan secara berkala setiap tahun oleh Pemegang Saham dalam RUPS sebagai bahan evaluasi kinerja Direksi sekaligus pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas Direksi. Penilaian kinerja Direksi juga dilakukan oleh Dewan Komisaris atas kinerja Direksi dalam pengelolaan Perusahaan. Penilaian kinerja Direksi melalui KPI dilakukan berdasarkan KPI kolegal yang telah disahkan oleh Pemegang Saham maupun KPI individu masing-masing anggota Direksi.

As stated in the Company's Articles of Association, the performance assessment of the Board of Directors is conducted periodically every year by the Shareholders in the GMS as a material for evaluating the performance of the Board of Directors as well as accountability for the implementation of duties of the Board of Directors. The performance of the Board of Directors is also assessed by the Board of Commissioners on the Board of Directors' performance in managing the Company. The performance assessment of the Board of Directors through KPIs is conducted based on collegial KPIs that have been approved by the Shareholders as well as individual KPIs of each member of the Board of Directors.

Kriteria Penilaian Kinerja Direksi

Criteria for Performance Assessment of the Board of Directors

Dalam melakukan penilaian kinerja Direksi, Pemegang Saham menetapkan KPI Direksi yang terdiri dari:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan.
2. Pelaksanaan hasil keputusan RUPS.
3. Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan yang mencakup 3 (tiga) aspek utama yaitu:
 - Aspek Keuangan
 - Aspek Operasional
 - Aspek Administrasi
4. Indikator Kinerja Pendukung Lainnya.

In assessing the performance of the Board of Directors, the Shareholders set KPIs of the Board of Directors consisting of:

1. Implementation of duties and responsibilities of each member of the Board of Directors in accordance with the Company's Articles of Association.
2. Implementation of the resolutions of the GMS.
3. Assessment of the Soundness of the Company which includes 3 (three) main aspects, namely:
 - Financial aspect
 - Operational Aspect
 - Administrative Aspect
4. Other Supporting Performance Indicators.

Penilaian Kinerja oleh Dewan Komisaris

Performance Assessment by the Board of Commissioners

Dewan Komisaris menilai Direksi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan sangat baik selama tahun 2023. Hal ini terefleksi antara lain dari hasil penilaian kinerja Direksi yang secara keseluruhan telah menunjukkan upaya positif dalam mengejar target RKAP tahun buku 2023, baik dengan cara memperkuat implementasi program RKAP 2023 maupun *strategy recovery plan* dan efisiensi biaya.

The Board of Commissioners considers that the Board of Directors has carried out its duties and responsibilities excellently during 2023. It is reflected, among others, in the results of the Board of Directors' performance assessment, which overall has shown positive efforts in pursuing the 2023 ABOP target, both by strengthening the implementation of the 2023 ABOP program as well as the strategy recovery plan and cost efficiency.

Penilaian Kinerja Direksi Berdasarkan Key Performance Indicator (KPI)

Board of Directors's Performance Assessment Based on Key Performance Indicator (KPI)

Setiap tahun, penilaian kinerja Direksi dilakukan berdasarkan pada pencapaian target-target yang tertuang dalam KPI Direksi, baik secara kolegal maupun individu. Penilaian terhadap kinerja Direksi berdasarkan KPI dilaksanakan oleh pemegang saham Perseroan dengan mempertimbangkan capaian KPI yang disampaikan oleh Direksi untuk kemudian ditetapkan di dalam RUPS.

Annually, the performance assessment of the Board of Directors is conducted based on the achievement of targets set out in the KPIs of the Board of Directors, both collegially and individually. The assessment of the Board of Directors' performance based on KPIs is carried out by the Company's shareholders by considering the KPI achievements submitted by the Board of Directors to be determined in the GMS.

Hasil penilaian kinerja Direksi berdasarkan KPI Direksi secara kolegal di tahun 2023 menunjukkan skor sebesar 103,80%, meningkat dibandingkan dengan capaian tahun 2022 yang sebesar 102,26%. Rincian capaian KPI Direksi secara kolegal dapat dilihat pada Bab Analisis Pembahasan Manajemen bagian KPI Perusahaan.

The results of the performance assessment of the Board of Directors based on the KPIs of the Board of Directors collegially in 2023 showed a score of 103.80%, an increase compared to the achievement in 2022 of 102.26%. Details of the KPI achievements of the Board of Directors on a collegial basis can be seen in the Management Discussion and Analysis Chapter of the Company's KPI section.

Penilaian Kinerja Masing-masing Direksi Berdasarkan KPI Individual

Performance Assessment of Each Board of Directors Based on Individual KPIs

Selain secara kolegal, evaluasi kinerja Direksi juga dilakukan secara individu terhadap masing-masing anggota Direksi berdasarkan beberapa aspek sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing Direksi. Berikut realisasi KPI masing-masing anggota Direksi tahun 2023:

Besides collegially, the performance evaluation of the Board of Directors is also conducted individually for each member of the Board of Directors based on several aspects in accordance with the duties and responsibilities of each member of the Board of Directors. The following is the realization of KPI for each member of the Board of Directors in 2023:

Tabel Realisasi KPI Direksi

Table of KPI Realization the Board of Directors

Direksi Board of Directors	Realisasi KPI (Sebelum dipotong Boundary) KPI Realization (Before Boundary Deduction)	Realisasi KPI (Setelah dipotong Boundary) KPI Realization (After Boundary Deduction)	Keterangan Description
Direktur Utama President Director	105,30%	103,80%	●
Direktur Pemasaran Director of Marketing	106,66%	105,16%	●
Direktur Operasi Director of Operations	104,67%	103,17%	●
Direktur Keuangan dan SDM Director of Finance and HR	106,09%	104,59%	●

Penilaian Kinerja Direksi Berdasarkan Penilaian Penerapan GCG

Board of Directors's Performance Assessment Based on GCG Implementation Assessment

Penilaian Kinerja Direksi juga dilakukan melalui penilaian penerapan GCG berdasarkan Peraturan Kementerian BUMN SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan GCG pada BUMN tanggal 6 Juni 2012. Capaian skor aspek Direksi pada *assessment* penerapan GCG tahun 2023 mencapai skor 89,26% dengan kualitas penerapan GCG "Sangat Baik". Hal ini menunjukkan bahwa secara umum penerapan GCG untuk Aspek Direksi telah berjalan dengan Sangat Baik.

The Board of Directors performance assessment is also carried out through the assessment of GCG implementation based on the Regulation of the Ministry of SOEs SK-16/S.MBU/2012 concerning Parameter Indicators for Assessment and Evaluation of GCG Implementation in SOEs dated June 6, 2012. The score of the Board of Directors aspect in the assessment of GCG implementation in 2023 reached a score of 89.26%, with the quality of GCG implementation of "Very Good". It shows that the implementation of GCG for the Board of Directors aspect has been running Very Well in general.

Kebijakan Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Nomination and Remuneration Policy for the Board of Commissioners and the Board of Directors



Kebijakan Nominasi Dewan Komisaris dan Direksi

Nomination Policy of the Board of Commissioners and Board of Directors

Kebijakan suksesi kepemimpinan PTK mengacu pada kebijakan induk Perusahaan, yaitu PT Pertamina International Shipping. Berdasarkan ketentuan tersebut, suksesi kepemimpinan Perusahaan berasal dari internal PTK dan eksternal PTK, baik dari PT Pertamina International Shipping, PT Pertamina (Persero) maupun Anak Perusahaan Pertamina yang lainnya. Adapun penentuan nominasi Dewan Komisaris dan Direksi menjadi kewenangan Pemegang Saham, yaitu PT Pertamina International Shipping dan PT Pertamina Pedeve Indonesia.

PTK's leadership succession policy refers to the parent company's policy, namely PT Pertamina International Shipping. Based on these provisions, the succession of the Company's leadership comes from PTK internal and external PTK, both from PT Pertamina International Shipping, PT Pertamina (Persero), and other Pertamina subsidiaries. The determination of nominations for the Board of Commissioners and Directors is the authority of the Shareholders, namely PT Pertamina International Shipping and PT Pertamina Pedeve Indonesia.

Prosedur Nominasi Dewan Komisaris

Nomination Procedure of the Board of Commissioners

RUPS memiliki kewenangan dalam pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris telah mempertimbangkan aspek integritas serta kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan bisnis Perusahaan. Calon anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan formal dan persyaratan materiil untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris PTK, sebagai berikut:

1. Memiliki integritas, dedikasi dan itikad baik serta rasa tanggung jawab;
2. Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perusahaan;
3. Memiliki waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
4. Memiliki kemampuan melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah, menyebabkan suatu perusahaan pailit atau pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam kurun waktu lima tahun sebelum pengangkatannya;
5. Memiliki hubungan yang luas dan bermanfaat bagi Perusahaan;
6. Tidak mewakili kepentingan partai politik tertentu.

The GMS has the authority to appoint and dismiss members of the Board of Commissioners. The appointment and dismissal of members of the Board of Commissioners have taken into account aspects of integrity and competence in accordance with the Company's business needs. Prospective members of the Board of Commissioners must fulfill the formal and material requirements to be appointed as a member of the Board of Commissioners of PTK, as follows:

1. Have integrity, dedication, and good faith, as well as a sense of responsibility;
2. Having adequate knowledge of the Company's business sector;
3. Have sufficient time to perform their duties;
4. Can carry out legal actions and has never been declared bankrupt or been a member of the Board of Directors or Commissioners who have been found guilty of causing a company to go bankrupt or has been convicted of a crime that is detrimental to state finances within five years before his appointment;
5. Having extensive and beneficial relationships for the Company;
6. Does not represent the interests of certain political parties.

Sedangkan dalam proses pemberhentian, anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh RUPS. Hal tersebut terjadi jika terbukti bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar atau terdapat indikasi memberikan kerugian bagi Perusahaan atau melalaikan kewajibannya. RUPS juga memiliki wewenang untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris yang terbukti melanggar.

Meanwhile, in the dismissal process, members of the Board of Commissioners may be temporarily dismissed by the GMS. This happens if it is proven to have acted contrary to the Articles of Association or there are indications of causing losses to the Company or neglecting its obligations. The GMS also has the authority to dismiss members of the Board of Commissioners who are proven to have violated it.

Prosedur Nominasi dan Suksesi Direksi

Nomination and Succession Procedures of the Board of Directors

Sebagaimana Dewan Komisaris, Anggota Direksi juga diangkat dan diberhentikan atas persetujuan RUPS dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perusahaan dan ketentuan yang berlaku. Calon Direksi Perusahaan harus melalui beberapa tahapan seleksi sebelum diusulkan oleh Pemegang Saham yang berwenang, sebagaimana berikut.

Similarly to the Board of Commissioners, Members of the Board of Directors are also appointed and dismissed upon the approval of the GMS with due observance of the Company's Articles of Association and applicable provisions. Candidates for the Company's Board of Directors must go through several stages of selection before being proposed by the authorized Shareholders, as follows.



Dalam mekanisme suksesi Direksi, PTK mengadakan pelatihan, baik internal maupun eksternal serta pengembangan kompetensi khususnya kompetensi *leadership* dan kompetensi pejabat perusahaan yang memenuhi persyaratan untuk dipromosikan. Hal tersebut guna mempersiapkan bakal calon anggota Direksi yang selanjutnya akan diajukan kepada pemegang saham dalam RUPS serta mengikuti *fit and proper test*.

In the Board of Directors succession mechanism, PTK conducts internal and external training and competency development, especially leadership competencies and competencies of company officials who meet the requirements for promotion. This is to prepare prospective members of the Board of Directors, which will then be submitted to shareholders at the GMS, and to take a fit and proper test.

Penunjukan anggota Direksi Perusahaan harus memenuhi kriteria antara lain: tidak pernah dinyatakan pailit atau bersalah yang menyebabkan suatu Perusahaan dinyatakan pailit; tidak pernah melakukan tindakan tercela, tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan, tidak memiliki jabatan rangkap sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada perusahaan sejenis, dan atau lembaga lain; dan tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau Pemegang Saham Perusahaan.

Appointment of members of the Company's Board of Directors must meet the following criteria, including never having been declared bankrupt or guilty of causing a company to be declared bankrupt; has never committed a disgraceful act, has never been punished for committing a crime; does not have a dual position as Commissioner, Director or Executive Officer in a similar company, and or other institution; and has no financial and family relationships with members of the Board of Commissioners, other members of the Board of Directors and/or the Company's Shareholders.

Anggota Direksi PTK wajib memenuhi seluruh persyaratan kemampuan dan kepatutan, yang telah diatur dalam Anggaran Dasar, *Board Manual* dan CoCG Perusahaan, yaitu:

1. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur dan perilaku yang baik serta dedikasi tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perusahaan;
2. Mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit serta tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perusahaan dinyatakan pailit;
3. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu lima tahun sebelum pengangkatannya;
4. Tidak diperkenankan memiliki hubungan keluarga antara Anggota Direksi dan antara Anggota Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris;
5. Tidak mewakili kepentingan partai politik tertentu.

Sementara itu, RUPS juga memiliki kewenangan dalam pemberhentian Direksi yang disesuaikan dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan. Pemberhentian tersebut dapat disebabkan antara lain:

1. Masa jabatannya berakhir;
2. Mengundurkan diri;
3. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
4. Meninggal dunia;
5. Diberhentikan berdasarkan Keputusan RUPS.

PTK Board of Directors members must fulfill all fit and proper requirements, which have been regulated in the Company's Articles of Association, Board Manual, and CoCG, namely:

1. Have expertise, integrity, leadership, experience, honesty, good behavior, and high dedication to advancing and developing the Company;
2. Able to carry out legal actions and have never been declared bankrupt and have never been a member of the Board of Directors or Commissioner who was found guilty of causing a company to be declared bankrupt;
3. Has never been punished for committing a crime that is detrimental to state finances within five years before his appointment;
4. Not allowed to have family relationships between members of the Board of Directors and between members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners;
5. Does not represent the interests of certain political parties.

Meanwhile, the GMS also has the authority to dismiss the Board of Directors in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association. The dismissal can be caused by, among others:

1. The term of office ends;
2. Resigned;
3. Losing Indonesian citizenship;
4. Passed away;
5. Dismissed based on GM's decision.

Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Remuneration Policy of the Board of Commissioners and Board of Directors

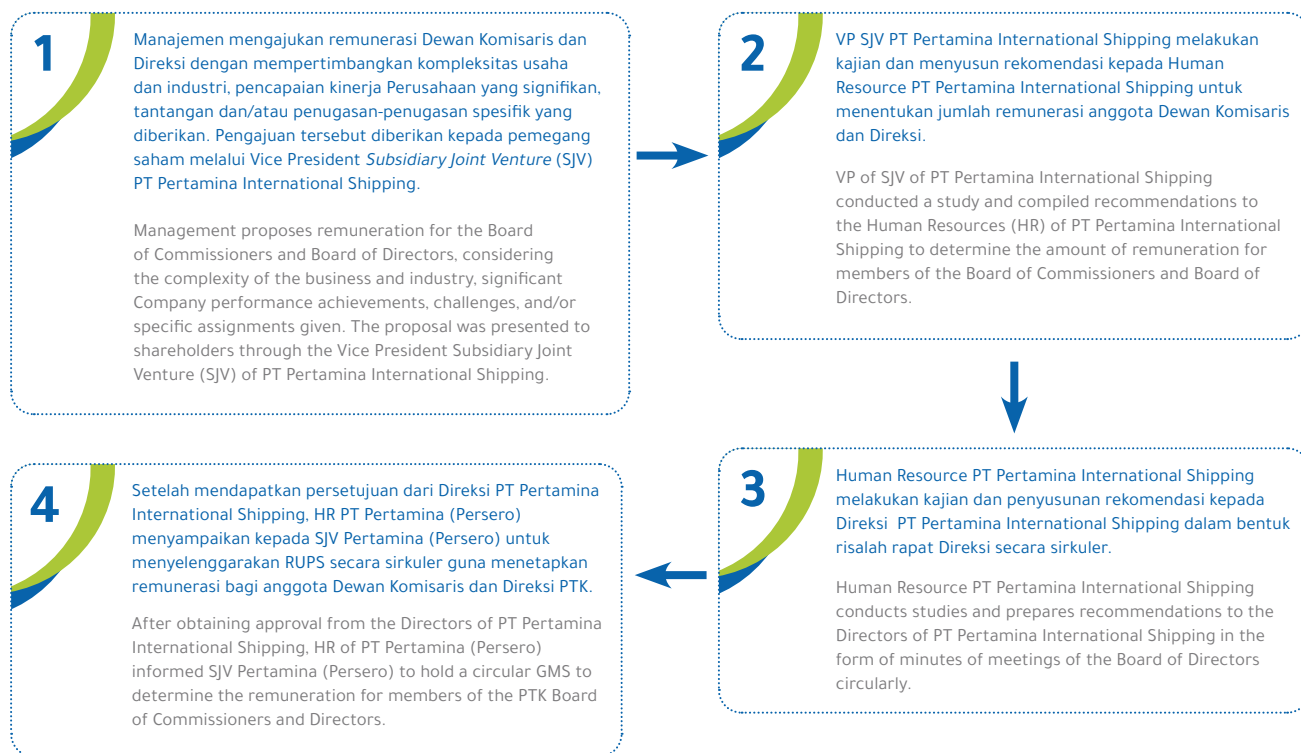
Perseroan telah menetapkan kebijakan dalam menentukan jumlah dan metode perhitungan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi yang dikaitkan dengan kinerja dan nilai pemegang saham. Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi PTK merujuk pada ketentuan yang berlaku, baik di internal PT Pertamina International Shipping maupun ketentuan yang berlaku di lingkup PT Pertamina (Persero) sebagai BUMN yang didasarkan pada Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia No. PER-3/MBU/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN tanggal 23 Maret 2023.

The Company has established a policy in determining the amount and method of calculating remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors, which is associated with performance and shareholder value. The remuneration policy for the Board of Commissioners and Board of Directors of PTK refers to the applicable provisions, both within PT Pertamina International Shipping and PT Pertamina (Persero) as a SOE based on the Regulation of the Minister of SOEs of the Republic of Indonesia No. PER-3/MBU/2023 concerning Organs and Human Capital of SOEs dated March 23, 2023.

Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Procedure for Determining the Remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors

Besaran remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan melalui RUPS dengan memperhatikan hasil kajian yang dilakukan oleh Perusahaan dan pemegang saham. Secara garis besar prosedur penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan melalui tahapan berikut:

The amount of remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors is determined through the GMS by considering the results of studies conducted by the Company and shareholders. Broadly speaking, the procedure for determining the remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors is carried out through the following stages:



Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris PTK tahun 2023 ditetapkan dan disetujui oleh Pemegang Saham pada RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 12 Juni 2023, sebagaimana tertuang dalam Akta No. 08 tanggal 12 Juni 2023. Selanjutnya, besaran remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris PTK Tahun buku 2022 ditetapkan dalam Keputusan Pemegang Saham secara Sirkuler (KPSSS) tanggal 4 September 2023 tentang Penetapan Penghargaan Atas Kinerja Tahun Buku 2022 dan Penetapan Remunerasi Tahun 2023 Direksi dan Dewan Komisaris.

The remuneration of PTK's Board of Directors and Board of Commissioners in 2023 was determined and approved by the Shareholders at the Annual GMS held on June 12, 2023, as stated in Deed No. 08 dated June 12, 2023. Furthermore, the amount of remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners of PTK for the 2022 fiscal year is stipulated in the Circular Shareholders' Resolution (KPSSS) dated September 4, 2023, concerning the Determination of Awards for Performance in the 2022 Fiscal Year and Determination of Remuneration in 2023 for the Board of Directors and Board of Commissioners.

Indikator Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Indicators for Determining Remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors

Dalam menentukan besaran remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi telah berdasarkan tinjauan dari berbagai segi atas rancangan rencana remunerasi, termasuk konsistensi dengan Kebijakan Remunerasi yang telah ditetapkan. Perusahaan menjadikan indikator pencapaian KPI dan tingkat kesehatan Perusahaan sesuai dengan kontrak manajemen sebagai bahan pertimbangan. Selain itu, penetapan remunerasi juga telah dilakukan dengan mempertimbangkan faktor skala dan kompleksitas usaha, pendapatan, kondisi dan kemampuan keuangan Perusahaan, tingkat inflasi dan faktor-faktor lain yang relevan, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

In determining the amount of remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors, a multi-faceted review of the draft remuneration plan has been conducted, including consistency with the predetermined Remuneration Policy. The Company takes the KPI achievement indicators and the Company's soundness level in accordance with the management contract into consideration. In addition, the remuneration has also been determined by considering the scale and complexity of the business, income, the Company's financial condition and capabilities, the inflation rate, and other relevant factors, as well as not conflict with laws and regulations.

Komponen dan Struktur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Remuneration Components and Structure for the Board of Commissioners and Board of Directors

Paket remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi terdiri atas honorarium/gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya yang dibayarkan/diberikan bulanan, serta tantiem sebagai insentif kinerja tahunan. Komponen remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi terdiri dari:

The remuneration package of the Board of Commissioners and Board of Directors consists of honorarium/salary, allowances, and other facilities paid/provided monthly, as well as a tantiem as an annual performance incentive. The components of the remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors consist of:

Remunerasi Dewan Komisaris Remuneration of the Board of Commissioners	Remunerasi Direksi Remuneration of the Board of Directors
Honorarium	Gaji Salary
Tunjangan Hari Raya Keagamaan, Tunjangan Transportasi, Asuransi Purna Jabatan. Religious Holiday Allowance, Transportation Allowance, Retirement Insurance	Tunjangan Hari Raya Keagamaan, Asuransi purna Jabatan. Religious Holiday Allowance, Retirement Insurance
Fasilitas Kesehatan, Fasilitas Bantuan Hukum, serta Fasilitas Komunikasi dan Sarana Teknologi Health Facility, Legal Aid Facility, Communication and Technology Facilities	Fasilitas Kendaraan Ringan, Fasilitas Kesehatan, Fasilitas Komunikasi dan Sarana Teknologi Informasi, Fasilitas Bantuan Hukum. Light Vehicle Facility, Health Facility, Communication and Information Technology Facilities, Legal Aid Facility
Tantiem	Tantiem

Struktur remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi terdiri dari:

The remuneration structure of the Board of Commissioners and Board of Directors consists of:

Jabatan Position	Struktur Remunerasi Remuneration Structure
 Dewan Komisaris Board of Commissioners	- Honorarium Komisaris Utama ditetapkan sebesar 45% dari Direktur Utama sedangkan Honorarium anggota Dewan Komisaris ditetapkan sebesar 90% dari honorarium Komisaris Utama. - Tunjangan yang terdiri dari: - Tunjangan Transportasi sebesar 20% dari Honorarium. - Tunjangan Hari Raya sebesar 1 (satu) kali Honorarium. - Asuransi Purna Jabatan sebesar maksimal 25% dari Honorarium dalam 1 (satu) tahun. - Fasilitas yang terdiri dari: - Fasilitas Kesehatan, yang meliputi fasilitas kesehatan dasar dan fasilitas kesehatan tambahan bagi Dewan Komisaris beserta anggota keluarga, serta kesehatan berkala (<i>medical check up</i>) sebanyak 1 (satu) kali setahun. - Fasilitas Bantuan Hukum (termasuk Asuransi <i>Director's & Officer's Liability</i>) sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan PT Pertamina (Persero) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan Menteri BUMN terkait. - Tantiem yang besarnya ditetapkan oleh Pemegang Saham.
 Direksi Board of Directors	- The honorarium of the President Commissioner is set at 45% of the President Director, while the Honorarium of members of the Board of Commissioners is set at 90% of the honorarium of the President Commissioner. - Allowances consisting of: - Transportation Allowance is 20% of Honorarium. - Holiday Allowance is 1 (one) time of Honorarium. - Retirement Insurance is at a maximum of 25% of the Honorarium in 1 (one) year. - Facilities consisting of: - Health Facilities, including basic and additional health facilities for the Board of Commissioners and family members, as well as periodic medical check-ups 1 (one) time per year. - Legal Aid Facilities (including Director's & Officer's Liability Insurance) in accordance with the prevailing regulations within PT Pertamina (Persero) and the prevailing laws and regulations, including the relevant Regulation of the Minister of SOEs. - Tantiem, the amount of which is determined by the Shareholders.
	- Gaji Direktur Utama ditetapkan sesuai dengan keputusan Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan. Gaji Anggota Direktur Lainnya sebesar 85% dari gaji Direktur Utama. - Tunjangan, terdiri dari: - Tunjangan Perumahan (termasuk utilitas) bagi anggota Direksi sebesar 40% dari gaji - Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THRK) sebesar 1 (satu) kali gaji (terdapat pengalihan THRK menjadi CSR) - Asuransi Purna Jabatan sebesar Maksimal 25% dari gaji dalam satu tahun - Fasilitas, terdiri dari: - Fasilitas Kesehatan, yang meliputi fasilitas kesehatan dasar dan fasilitas kesehatan tambahan bagi Dewan Komisaris beserta anggota keluarga, serta kesehatan berkala (<i>medical check up</i>) sebanyak 1 (satu) kali setahun. - Fasilitas Kendaraan Ringan (KRP) yang mengacu pada Pedoman PT Pertamina (Persero) No. A-001/I20000/2017-S0 tanggal 05 Desember 2017 tentang Pengelolaan Kendaraan Ringan Penumpang dan/atau perubahannya serta memperhatikan level kesetaraan Pertamina <i>Reference Level</i> (PRL) Direksi. - Fasilitas komunikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan PT Pertamina (Persero), termasuk Surat Keputusan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) No. Kpts-45/C00000/2020-S0 tanggal 10 Desember 2020 tentang Standarisasi Sarana Teknologi Informasi dan/atau perubahannya. - Fasilitas Bantuan Hukum (termasuk Asuransi <i>Director's & Officer's Liability</i>) sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan PT Pertamina (Persero) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan Menteri BUMN terkait. - Tantiem yang besarnya ditetapkan oleh Pemegang Saham.
	- The salary of the President Director is determined in accordance with the Shareholders' decision in the Annual GMS. Other Director's salary is 85% of the President Director's salary. - Allowances, consisting of: - Housing Allowance (including utilities) for members of the Board of Directors is 40% of salary - Holiday Allowance is 1 (one) times salary (there is a transfer of THRK to CSR) - Retirement Insurance is a maximum of 25% of salary in one year - Facilities, consisting of: - Health Facilities, including basic and additional health facilities for the Board of Commissioners and family members, as well as periodic health (medical check-ups) once a year. - Light Vehicle Facilities (KRP) referring to the Guidelines of PT Pertamina (Persero) No. A-001/I20000/2017-S0 dated December 05, 2017, concerning Light Passenger Vehicle Management and/or its amendments and paying attention to the level of equality of Pertamina Reference Level (PRL) of the Board of Directors. - Communication facilities in accordance with applicable provisions within PT Pertamina (Persero), including the Decree of the President Director of PT Pertamina (Persero) No. Kpts-45/C00000/2020-S0 dated December 10, 2020, concerning Standardization of Information Technology Facilities and/or its amendments. - Legal Aid Facilities (including Director's & Officer's Liability Insurance) in accordance with applicable provisions within PT Pertamina (Persero) and applicable laws and regulations, including relevant Minister of SOE Regulations. - Tantiem, the amount of which is determined by the Shareholders.

PTK belum menerapkan skema kompensasi kepada Direksi Perusahaan dalam jangka Panjang dan tidak memiliki kebijakan opsi saham bagi Dewan Komisaris dan Direksi.

PTK has not implemented a long-term compensation scheme for the Company's Board of Directors and does not have a stock option policy for the Board of Commissioners and Board of Directors.

Besaran Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Amount of Remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors

Berikut jumlah remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi tahun 2023.

The following are details and amounts of remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors in 2023.

Uraian Description	2023	2022
Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris Total Remuneration for the Board of Commissioners	Rp9.563.849.444	Rp10.373.525.524
Jumlah Remunerasi Direksi Total Remuneration for the Board of Directors	Rp15.610.962.169	Rp12.406.091.936
Total Remunerasi Total Remuneration	Rp25.174.811.613	Rp22.779.617.460

Hingga akhir periode 2023, tidak ada remunerasi Dewan Komisaris maupun Direksi PTK yang ditangguhkan atau ditarik kembali.

Until the end of the 2023 period, no remuneration of PTK's Board of Commissioners or Board of Directors has been deferred or withdrawn.

Transparansi Informasi Dewan Komisaris dan Direksi

Transparency of the Board of Commissioners and Directors

Pengelolaan Benturan Kepentingan

Management of Conflicts of Interest

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi telah menyatakan komitmen untuk senantiasa menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing secara independen atau terbebas dari benturan kepentingan apapun. Dewan Komisaris dan Direksi senantiasa berpedoman pada Anggaran Dasar, *Board Manual* serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga sepanjang tahun 2023 tidak terdapat situasi dengan potensi benturan kepentingan yang dihadapi oleh anggota Dewan Komisaris maupun Direksi.

All members of the Board of Commissioners and Directors have committed to performing their duties and responsibilities independently, free from any conflicts of interest. Throughout 2023, the Board of Commissioners and Directors adhered to the Articles of Association, the Board Manual, and applicable laws and regulations, ensuring that no potential conflicts of interest arose.

Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris dan Direksi

Affiliations of the Board of Commissioners and Directors

Untuk menjaga independensinya, seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menjabat saat ini tidak memiliki hubungan afiliasi, baik hubungan keluarga maupun hubungan keuangan dengan sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan pemegang saham pengendali. Informasi terkait hubungan afiliasi masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi telah diungkapkan dalam Bab Profil Perusahaan bagian Profil Dewan Komisaris dan Direksi.

To maintain their independence, none of the current members of the Board of Commissioners and Directors have familial or financial relationships with each other or with the controlling shareholders. Details regarding the affiliations of each member of the Board of Commissioners and Directors are disclosed in the Company Profile section of this Annual Report.

Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi

Diversity of the Board of Commissioners and Directors

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menjabat pada saat ini adalah Warga Negara Indonesia (WNI), dengan beragam latar belakang usia, pendidikan, keahlian dan kompetensi serta pengalaman kerja. Informasi terkait latar pendidikan, pengalaman serta keahlian anggota Direksi telah diuraikan pada Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

All current members of the Board of Commissioners and Directors are Indonesian citizens (WNI) with diverse backgrounds in terms of age, education, skills, competencies, and work experience. Information on the educational background, experience, and skills of the Directors is provided in the Company Profile section of this Annual Report.



Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi

Share Ownership by the Board of Commissioners and Directors

PTK menerapkan kebijakan terkait kewajiban anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk menyampaikan informasi kepada Perusahaan mengenai kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham di perusahaan lain. Penyampaian informasi tersebut dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan. Pada tahun 2023, tidak terdapat anggota Dewan Komisaris dan Direksi PTK yang memiliki saham di perusahaan lain.

PTK has implemented a policy requiring members of the Board of Directors and the Board of Commissioners to report their share ownership and any changes therein to the Company. This information must be submitted no later than three business days after acquiring or changing ownership of the Company's shares. In 2023, no members of PTK's Board of Commissioners and Directors owned shares in other companies.

Komite di Bawah Dewan Komisaris

Committees under the Board of Commissioners



Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris membentuk 3 (tiga) organ Komite, yaitu Komite Audit, Komite Investasi, serta Komite Nominasi, Remunerasi & Manajemen Risiko.

In order to carry out its supervisory duties and functions, the Board of Commissioners formed 3 (three) Committee organs: Audit Committee, Investment Committee, and Nomination, Remuneration & Risk Management Committee.



Komite Audit

Audit Committee

Komite Audit dibentuk dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris, terutama terkait dengan pelaksanaan tata kelola di Perusahaan, informasi keuangan, sistem pengendalian intern (*internal control system*), efektivitas pemeriksaan oleh internal dan eksternal auditor, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

The Audit Committee was established to assist the Board of Commissioners in performing its supervisory duties, particularly related to the Company's governance, financial information, internal control system, the effectiveness of audits by internal and external auditors, and compliance with applicable laws and regulations.

Pembentukan Komite Audit dilakukan oleh Dewan Komisaris dan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

The formation of the Audit Committee by the Board of Commissioners complies with the provisions outlined in the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-2/MBU/03/2023 on Governance Guidelines and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises and Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 on Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises.

Kriteria Keanggotaan Komite Audit

Membership Criteria for the Audit Committee

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023, Anggota Komite Audit harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan/pemeriksaan;
2. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap perusahaan yang bersangkutan;
3. Mampu berkomunikasi secara efektif;
4. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya; dan
5. Syarat lain yang ditetapkan dalam piagam Komite Audit.

According to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-3/MBU/03/2023, members of the Audit Committee must meet the following criteria:

1. Possess good integrity and sufficient knowledge and work experience in supervision/audit.
2. Have no personal interests or connections that could cause negative impacts and conflicts of interest with the Company.
3. Able to communicate effectively.
4. Able to allocate sufficient time to complete their duties.
5. Meet other requirements set forth in the Audit Committee Charter.

Ketentuan Masa Jabatan Komite Audit

Tenure of the Audit Committee Members

Sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, masa jabatan anggota Komite yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris Perusahaan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. Sementara untuk masa jabatan anggota Komite yang merupakan anggota Dewan Komisaris Perusahaan berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir.

In accordance with the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-3/MBU/03/2023 on Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises, the tenure of Audit Committee members who are not members of the Company's Board of Commissioners is a maximum of 3 (three) years and can be extended once for a period of 2 (two) years, without prejudice to the right of the Board of Commissioners to dismiss them at any time. The tenure of Audit Committee members who are members of the Company's Board of Commissioners ends automatically when their term as a member of the Board of Commissioners ends.

Piagam Komite Audit

Audit Committee Charter

Komite Audit memiliki Piagam Komite Audit sebagai pedoman kerja dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan serta pemberian nasihat kepada Dewan Komisaris. Piagam Komite Audit PTK ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. 119/DEKOM.PTK/2022 tanggal 27 Agustus 2022. Piagam Komite Audit tersebut mengatur berbagai hal terkait pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan kewajiban Ketua dan Anggota Komite Audit.

The Audit Committee has a Charter that serves as a guideline for carrying out its duties and responsibilities in supervising and advising the Board of Commissioners. The Audit Committee Charter of PTK was established by the Board of Commissioners Decree No. 119/DEKOM.PTK/2022 on August 27, 2022. The Charter outlines various aspects related to the duties, responsibilities, and obligations of the Chair and Members of the Audit Committee.

Susunan dan Komposisi Komite Audit

Composition of the Audit Committee

Sepanjang tahun 2023, tidak terdapat perubahan susunan dan komposisi keanggotaan Komite Audit. Saat ini, Komite Audit Perusahaan berjumlah 3 (tiga) orang anggota, termasuk salah satu diantaranya berasal dari unsur Dewan Komisaris yang ditunjuk sebagai Ketua Komite. Seluruh anggota Komite memiliki komitmen dan integritas yang tinggi, memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan, memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan serta memahami industri/bisnis Perusahaan.

Throughout 2023, there were no changes in the composition of the Audit Committee membership. Currently, the Company's Audit Committee consists of 3 (three) members, including one member from the Board of Commissioners appointed as the Chair of the Committee. All members of the Committee have high commitment and integrity, educational backgrounds in accounting or finance, sufficient knowledge to read and understand financial statements, and an understanding of the Company's industry/business.

Berikut susunan dan komposisi Komite Audit per 31 Desember 2023.

The composition of the Audit Committee as of December 31, 2023, is as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Deed of Appointment	Periode dan Masa Jabatan Period and Term of Office
Khalid Zabidi	Ketua/Komisaris Chairman/Commissioner	Surat Dewan Komisaris No.162 /DEKOM.PTK/ 2021 Tanggal 25 November 2021 Board of Commissioners Letter No.162 /DEKOM.PTK/ 2021 on November 25, 2021	Mengikuti masa jabatan Komisaris/keputusan lain Komisaris Following the term of office of the Commissioner/ other decisions of the Commissioner
Edward Situmorang	Anggota Member	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. SK- 159/ DEKOM.PTK/2023 tanggal 24 Oktober 2023 Board of Commissioners Decree No. SK- 159/ DEKOM.PTK/2023 on October 24, 2023	Periode ke 3, 6 November 2023 sd. 31 Januari 2024 3 rd period, November 6, 2023 sd. January 31, 2024
Harry Mulia	Anggota Member	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. SK- 159/ DEKOM.PTK/2023 tanggal 24 Oktober 2023 Board of Commissioners Decree No. SK- 159/ DEKOM.PTK/2023 on 24 October 24, 2023	Periode ke 2, 1 November 2023 s.d 31 Oktober 2025 2 nd period, November 1, 2023 to 31 October 2025



Khalid Zabidi

Ketua Komite Audit/Komisaris
Chairman/Commissioner

Diangkat sebagai Ketua Komite Audit pada tanggal 25 November 2021 untuk periode pertama kalinya.

Profil Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

Appointed as Chair of the Audit Committee on November 25, 2021 for the first period.

His profile can be seen in the Board of Commissioners Profile section in this Annual Report.



Harry Mulia

Anggota Komite Audit
Member of the Audit Committee

Periode menjabat: 1 November 2023 s.d 31 Oktober 2025, Periode ke-2.
Term of office: November 1, 2023 to October 31, 2025, 2nd Period.

Tempat tanggal lahir Place of Birth	Palembang, 20 Mei 1964	20 May 1964
Domisili Domicile	Jakarta	Jakarta
Riwayat Pendidikan Educational History	Beliau meraih gelar Sarjana Teknik Sipil di Universitas Sriwijaya (1988).	He earned a Bachelor's degree in Civil Engineering at Sriwijaya University (1988).
Sertifikasi Profesi yang Dimiliki Professional Certification Owned	Qualified Internal Auditor (QIA)	Qualified Internal Auditor (QIA)
Pengalaman Kerja Work Experience	Beliau pernah menjabat sebagai Manager IA RU V Balikpapan (2013) mencakup Internal Audit RU V Balikpapan, Manager IA Jakarta (2013-2014) mencakup pengawasan Pertamina Pengolahan Pusat, Ka SPI PT PDSI (2014-2017), Manager JBB PT. Pertamina (Persero)(2017-2018) mencakup IA RU VI Balongan & MOR 3 Jakarta, Chief Internal Audit PT Pertamina Gas (2018-2020) s.d Purna Bakti 1 Juni 2020.	He has served as Manager of IA RU V Balikpapan (2013) including Internal Audit of RU V Balikpapan, Manager of IA Jakarta (2013-2014) including supervision of Pertamina Central Processing, Head of SPI PT PDSI (2014-2017), Manager of JBB PT. Pertamina (Persero)(2017-2018) includes IA RU VI Balongan & MOR 3 Jakarta, Chief Internal Audit of PT Pertamina Gas (2018-2020) until Purna Bakti 1 June 2020.
Rangkap Jabatan Concurrent Position(s)	Tidak ada	N/A
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationships:	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Komite, anggota Direksi, Dewan Komisaris maupun Pemegang Saham Utama/Pengendali.	Has no affiliated relationships with fellow Committee members, members of the Board of Directors, Board of Commissioners or Major/Controlling Shareholders.



Edward Situmorang

Anggota Komite Audit
Member of the Audit Committee

Periode menjabat: 06 November 2023 sd. 31 Januari 2024, Periode ke-3
Term of office: November 6, 2023 to January 31, 2024, 3rd Period

Tempat tanggal lahir Place of Birth	Bandung, 12 April 1979	Bandung, April 12, 1979
Domisili Domicile	Jakarta	Jakarta
Riwayat Pendidikan Educational History	Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Indonesia (2001).	He earned a Bachelor's degree in Economics majoring in Accounting from the University of Indonesia (2001).
Sertifikasi Profesi yang Dimiliki Professional Certification Owned	Chartered Accountant (CA)	Chartered Accountant (CA)

Pengalaman Kerja Work Experience	Beliau pernah menjabat sebagai West Area 1 Audit Assistant Manager di PHE ONWJ (2018).	He previously served as West Area 1 Audit Assistant Manager at PHE ONWJ (2018).
Rangkap Jabatan Concurrent Position(s)	Saat ini beliau menjabat sebagai Manager Group Finance & ICoFR Internal Audit PT Pertamina (Persero).	Currently he serves as Group Finance & ICoFR Internal Audit Manager of PT Pertamina (Persero).
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationships:	Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan Anggota Komite lainnya, Dewan Komisaris dan Direksi, maupun Pemegang Saham Utama dan Pengendali.	Has no affiliation with other Committee Members, the Board of Commissioners and Directors, or Major and Controlling Shareholders.

Pernyataan Independensi Anggota Komite Audit

Statement of Independence of Audit Committee Members

Keanggotaan Komite Audit bersifat independen. Seluruh anggota tidak memiliki hubungan afiliasi dengan manajemen Perusahaan termasuk menjabat salah satu jabatan dalam struktur organisasi Perusahaan maupun Anak Perusahaan. Anggota Komite Audit Perusahaan telah menyatakan independensinya untuk senantiasa bekerja secara profesional, independen dan objektif serta terbebas dari intervensi atau hal-hal yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dengan memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

The membership of the Audit Committee is independent. All members have no affiliation with the Company's management, including holding any positions within the Company's or its subsidiaries' organizational structure. The members of the Company's Audit Committee have declared their independence to always work professionally, independently, and objectively, free from interference or potential conflicts of interest by meeting the following criteria:

Kriteria Independensi Independence Criteria	Khalid Zabidi	Harry Mulia	Edward Situmorang
Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik yang memberikan jasa audit non audit pada PTK dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat oleh Komisaris. Not a person in a Public Accounting Firm who provided non-audit audit services to PTK in the last 1 (one) year before being appointed by the Commissioner.	✓	✓	✓
Tidak memiliki kepentingan/keterikatan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan konflik kepentingan terhadap BUMN yang bersangkutan. Has no personal interests/attachments that could have a negative impact and conflict of interest on the BUMN in question.	✓	✓	✓
Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan PTK Direksi dan Komisaris. Has no affiliation with PTK Directors and Commissioners.	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha PTK. Does not have any direct or indirect business relationships related to PTK business activities.	✓	✓	✓

Keterangan: ✓ : Independen x: Tidak Independen

Note: (✓) Independent and (x) Not Independent

Tugas dan Tanggung Jawab serta Wewenang Komite Audit

Duties, Responsibilities, and Authority of the Audit Committee

Tugas Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terkait fungsi pengawasan, meliputi:

- Menjaga kepatuhan terhadap Anggaran Dasar, Undang-Undang, dan ketentuan hukum serta kebijakan Perusahaan yang berlaku;
- Menegakkan disiplin organisasi dan pengendalian internal untuk mencegah kecurangan (*fraud*) dan penyimpangan (*abuse*);
- Meningkatkan kualitas pengungkapan hal-hal yang bersifat pelaporan keuangan, sistem akuntansi dan kebijakan manajemen risiko;
- Mempelajari ruang lingkup, keakuratan, kemandirian dan objektivitas Auditor Eksternal dan Internal Audit serta efektivitas biaya Audit Eksternal;
- Komite Audit menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dan independen, tanpa campur tangan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

The duties of the Audit Committee are to assist the Board of Commissioners in carrying out its supervisory functions, including:

- Ensuring compliance with the Articles of Association, laws, regulations, and the Company's prevailing policies;
- Enforcing organizational discipline and internal controls to prevent fraud and abuse;
- Improving the quality of disclosures related to financial reporting, accounting systems, and risk management policies;
- Reviewing the scope, accuracy, independence, and objectivity of External and Internal Auditors, as well as the cost-effectiveness of External Audits;
- Performing its duties and responsibilities professionally and independently, without interference from any party not in accordance with regulations;

6. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dipublikasikan seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya;
7. Melakukan evaluasi untuk memberikan persetujuan awal (*pre-approval*) terhadap jasa non audit yang ditugaskan kepada Auditor Independen;
8. Melakukan penelaahan atas efektivitas pengendalian internal Perusahaan;
9. Melaporkan kepada Dewan Komisaris perihal risiko yang dihadapi Perusahaan dan pelaksanaan Manajemen Risiko oleh Direksi;
10. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat Direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan hasil keputusan rapat Direksi;
11. Menerima, menelaah dan meneruskan kepada pihak yang berkepentingan dan memantau tindak lanjut pengaduan yang berkaitan dengan Perusahaan;
12. Melakukan *self-evaluation* terhadap efektivitas pelaksanaan tugas dan memutakhirkan secara periodik Pedoman Kerja Komite Audit;
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
14. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit juga berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Selain tugas di atas, Komite Audit juga bertugas untuk:

1. Penelaahan atas informasi keuangan, mencakup *review* atas hasil pemeriksaan Auditor Independen atau Internal Audit, serta *review* dalam atau selama proses penyiapan informasi keuangan yang akan dipublikasikan;
2. Seleksi, penunjukan dan pengawasan pekerjaan Auditor Independen;
3. Pengawasan pekerjaan Auditor Independen dalam pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan oleh Auditor Independen;
4. Memastikan konsep laporan keuangan audit diterima 10 hari sebelum diterbitkan oleh Perusahaan untuk dibicarakan dengan Auditor dan manajemen untuk menilai apakah Auditor sesuai dengan temuan Audit dan pengungkapannya telah memadai;
5. Memastikan bahwa Auditor menyampaikan representasi tertulis yang menyatakan penilaiannya tentang hal-hal yang berkaitan dengan kepatuhan Perusahaan dan Manajemen terhadap peraturan perundangan dan efektivitas pengendalian internal;
6. Mengusulkan pemutusan hubungan kerja dengan Auditor Independen kepada Dewan Komisaris, jika terbukti kuat bahwa independensi Auditor dapat terganggu atau terbukti bahwa Auditor tidak melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar akuntan publik;
7. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh Dewan Komisaris mencakup tetapi tidak terbatas pada pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat Direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan hasil keputusan rapat Direksi.

Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan pertanggungjawaban Komite Audit disampaikan kepada Dewan Komisaris dalam bentuk laporan-laporan sebagai berikut:

1. Laporan Tahunan pelaksanaan tugas kegiatan Komite Audit;
2. Laporan untuk setiap pelaksanaan tugas Komite Audit yang antara lain berisi fakta lapangan, analisa kesimpulan dan saran.

6. Reviewing financial information to be published, such as financial statements, projections, and other financial information;
7. Evaluating and providing pre-approval for non-audit services assigned to the Independent Auditor;
8. Reviewing the effectiveness of the Company's internal controls;
9. Reporting to the Board of Commissioners on the risks faced by the Company and the implementation of Risk Management by the Directors;
10. Investigating suspected errors in Directors' meeting decisions or deviations in the implementation of Directors' meeting decisions;
11. Receiving, reviewing, forwarding to relevant parties, and monitoring follow-ups on complaints related to the Company;
12. Conducting self-evaluation on the effectiveness of its duties and periodically updating the Audit Committee Work Guidelines;
13. Performing other duties assigned by the Board of Commissioners based on applicable regulations;
14. In performing its duties, the Audit Committee also adheres to applicable laws and regulations.

In addition to the above tasks, the Audit Committee is also responsible for:

1. Reviewing financial information, including the results of the Independent Auditor's or Internal Auditor's examinations, and reviews during or throughout the preparation process of financial information to be published;
2. Selecting, appointing, and supervising the work of the Independent Auditor;
3. Supervising the work of the Independent Auditor in conducting the general audit of the financial statements by the Independent Auditor;
4. Ensuring that the audited financial statements' drafts are received 10 days before publication by the Company to discuss with the Auditor and management to assess if the Auditor's findings and disclosures are adequate;
5. Ensuring that the Auditor submits a written representation stating their assessment of the Company's and Management's compliance with regulations and the effectiveness of internal controls;
6. Proposing the termination of the Independent Auditor's services to the Board of Commissioners if there is strong evidence that the Auditor's independence is compromised or the Auditor did not conduct the audit per public accountant standards;
7. Performing special duties assigned by the Board of Commissioners, including but not limited to investigating suspected errors in Directors' meeting decisions or deviations in implementing Directors' meeting decisions.

The Audit Committee is accountable to the Board of Commissioners and reports its responsibilities to the Board of Commissioners in the form of the following reports:

1. Annual Report on the activities of the Audit Committee;
2. Reports on each task performed by the Audit Committee, including field facts, analysis, conclusions, and recommendations.

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Audit

Report on the Activities of the Audit Committee

Sepanjang tahun 2023, Komite Audit telah menjalankan tugas dan berbagai kegiatan, antara lain sebagai berikut.

In 2023, the Audit Committee has carried out various activities, including the following.

Rapat Komite Audit

Audit Committee Meetings

Kebijakan pelaksanaan rapat Komite Audit telah diatur dalam Piagam Komite Audit yang telah disahkan pada tanggal 27 Agustus 2022. Rapat Komite Audit dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan. Rapat Komite Audit dapat mengambil keputusan apabila sekurang-kurangnya dihadiri 2/3 dari jumlah anggota. Rapat Komite Audit dipimpin Ketua Komite Audit atau Anggota Komite Audit paling senior, apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir. Jika dipandang perlu, Komite Audit dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan materi rapat untuk hadir dalam rapat Komite Audit.

The policy for conducting Audit Committee meetings is regulated in the Audit Committee Charter, ratified on August 27, 2022. The Audit Committee meetings are held at least once a month. The Audit Committee can make decisions if attended by at least 2/3 of its members. The meetings are chaired by the Chair of the Audit Committee or the most senior Audit Committee Member if the Chair is absent. If necessary, the Audit Committee may invite other parties related to the meeting's agenda to attend.

Pada tahun 2023, Komite Audit telah melaksanakan rapat sebanyak 8 (delapan) kali dengan frekuensi kehadiran masing-masing anggota Komite sebagai berikut:

In 2023, the Audit Committee held 8 (eight) meetings, with each member's attendance frequency as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Wajib Rapat Mandatory Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Tingkat Kehadiran Attendance Rate
Khalid Zabidi	Ketua Chairman	8	7	87,5%
Harry Mulia	Anggota Member	8	8	100%
Edward Situmorang	Anggota Member	8	6	75%

Penelaahan Informasi Keuangan dan Kinerja Keuangan

Review of Financial Information and Financial Performance

Untuk mendorong agar informasi keuangan yang disajikan dan dipublikasikan oleh Perusahaan secara akurat, andal dan dapat dipercaya, Komite Audit telah melakukan penelaahan terhadap Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan dan Tahunan dan berdiskusi dengan manajemen dan Internal Audit mengenai hal-hal yang memerlukan perhatian antara lain Laporan Rugi/Laba dan Pendanaan untuk investasi kapal.

To ensure the financial information presented and published by the Company is accurate, reliable, and trustworthy, the Audit Committee reviewed Monthly, Quarterly, and Annual Financial Statements and discussed with management and Internal Audit matters requiring attention, including the Profit/Loss Report and funding for ship investments.

Pengawasan atas Pekerjaan Auditor Eksternal

Supervision of External Auditor's Work

Dalam menjalankan fungsi pengawasan atas pekerjaan Auditor Eksternal, Komite Audit melakukan beberapa aktivitas yaitu:

1. Menelaah dan berdiskusi dengan auditor independen Perusahaan mengenai rencana audit dan implementasinya.
2. Melakukan monitoring terhadap proses pelaporan keuangan dengan mendiskusikan hasil audit atas Laporan Keuangan konsolidasi Perusahaan.
3. Menelaah temuan-temuan penting dari auditor eksternal dan memonitor implementasi dari rekomendasi hasil audit.

In supervising the External Auditor's work, the Audit Committee conducted several activities:

1. Reviewing and discussing the Company's independent auditor's audit plan and its implementation;
2. Monitoring the financial reporting process by discussing the audit results of the Company's consolidated financial statements;
3. Reviewing significant findings from the external auditor and monitoring the implementation of audit recommendations.

Evaluasi Efektivitas Pengendalian Internal dan Pelaksanaan Fungsi Internal Audit

Evaluation of Internal Control Effectiveness and Implementation of Internal Audit Functions

Komite Audit melakukan evaluasi terhadap efektivitas pengendalian internal dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi internal auditor melalui aktivitas sebagai berikut:

1. Komite Audit telah menilai efektivitas Pengendalian Manajemen berdasarkan diskusi yang dilakukan dengan manajemen dan juga hasil auditor eksternal/Kantor Akuntan Publik (PwC) yang telah melakukan review terhadap kecukupan internal control perusahaan dalam audit laporan keuangan.
2. Menelaah dan berdiskusi dengan Internal Audit Perusahaan mengenai aktivitas audit selama tahun 2023 dan rencana Internal Audit tahun 2024.
3. Mengevaluasi pelaksanaan Internal Audit dan menelaah temuan-temuan penting dari Internal Audit dan memonitor implementasi dari rekomendasi hasil audit.
4. Komite Audit bersama dengan Internal Auditor telah melakukan diskusi dan rapat terkait dengan hal temuan hasil Pemeriksaan dan tindak lanjutnya.

The Audit Committee evaluated the effectiveness of internal controls and the implementation of the internal auditor's primary functions through the following activities:

1. Assessing the effectiveness of Management Control based on discussions with management and the external auditor/Public Accounting Firm (PwC), which reviewed the adequacy of the Company's internal control in the financial statement audit;
2. Reviewing and discussing with the Company's Internal Auditor the audit activities during 2023 and the Internal Audit plan for 2024;
3. Evaluating the implementation of Internal Audits and reviewing significant findings from the internal auditor and monitoring the implementation of audit recommendations;
4. Conducting discussions and meetings with the Internal Auditor regarding the audit findings and their follow-ups.



Kepatuhan Terhadap Peraturan dan Perundang-Undangan

Compliance with Laws and Regulations

Komite Audit telah melakukan penelaahan dan pengawasan atas kepatuhan Perusahaan pada hukum dan peraturan, termasuk melakukan pemantauan peraturan dan hukum yang terkait dengan bidang usaha Perusahaan serta perkara/sengketa yang terkait dengan Perusahaan dan kegiatan usaha Perusahaan.

The Audit Committee has reviewed and monitored the Company's compliance with laws and regulations, including monitoring regulations and laws related to the Company's business and legal disputes related to the Company and its business activities.



Melakukan Identifikasi Hal-hal yang Memerlukan Perhatian Dewan Komisaris

Identifying Matters Requiring the Attention of the Board of Commissioners

Komite Audit menyampaikan masukan dalam bentuk Rekomendasi terkait dengan hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris berdasarkan hasil analisis dan telaah atas Laporan Manajemen maupun Laporan Keuangan yang diterbitkan setiap bulan.

The Audit Committee provides input in the form of recommendations related to matters requiring the Board of Commissioners' attention based on analysis and review of Management Reports and monthly issued Financial Statements.



Pengembangan Kompetensi Tahun 2023

Competence Development in 2023

Sejalan dengan kebijakan pengembangan kompetensi Komite Audit pada piagam Komite, PTK senantiasa mendorong Komite Audit untuk melakukan pengembangan kompetensi. Sepanjang tahun 2023 anggota Komite Audit Perusahaan telah mengikuti berbagai program pendidikan dan pelatihan dalam rangka mengembangkan kompetensinya sebagai berikut.

In line with the policy for developing the competence of the Audit Committee in its charter, PTK encourages the Audit Committee to develop their competencies. Throughout 2023, members of the Company's Audit Committee participated in various education and training programs to enhance their competencies as follows:

Nama dan Jabatan Name and Position	Nama Pelatihan Training Name	Waktu Pelaksanaan Execution Time	Penyelenggara Organizer
Khalid Zabidi (Ketua Komite Audit) (Chair of the Audit Committee)	<i>Safety Culture and Leadership</i>	10 Januari 2023 January 10, 2023	PT Rhuekamp Indonesia
	<i>Seminar International Safety Management (ISM) Code</i> Seminar on International Safety Management (ISM) Code	20-21 Maret 2023 March 20-21, 2023	HSSE PTK
	<i>The Role of Internal Audit in Anti Money Laundering Actions</i>	22-23 Juni 2023 June 22-23, 2023	FKSP
	Mengawal Keberlanjutan dan Pertumbuhan Perseroan Melalui Pengawasan dan Pengendalian Risiko Overseeing the Company's Sustainability and Growth Through Supervision and Risk Control	19 Oktober 2023 October 19, 2023	IKAI
	Pelatihan & Sertifikasi "Certified Risk Professional (CRP)" Training & Certification "Certified Risk Professional"	11 Desember 2023 December 11, 2023	PT IRBA Group Indonesia

Nama dan Jabatan Name and Position	Nama Pelatihan Training Name	Waktu Pelaksanaan Execution Time	Penyelenggara Organizer
Harry Mulia (Anggota Komite Audit) (Audit committee member)	<i>The Role of Internal Audit in Anti Money Laundering Actions</i>	22-23 Juni 2023 June 22-23, 2023	FKSP
	Mengawal Keberlanjutan dan Pertumbuhan Perseroan Melalui Pengawasan dan Pengendalian Risiko Overseeing the Company's Sustainability and Growth Through Supervision and Risk Control	19 Oktober 2023 October 19, 2023	IKAI

Penilaian Kinerja Komite Audit

Performance Assessment of the Audit Committee

Penilaian kinerja Komite Audit dilakukan berdasarkan realisasi dan penyelesaian program kerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Komite Audit dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris dalam laporan Komite yang meliputi pelaksanaan tugas komite di bidang audit, kecukupan proses pengendalian internal dan penyusunan laporan keuangan. Hasil penilaian tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi Dewan Komisaris untuk mengangkat kembali dan/atau memberhentikan anggota Komite Audit untuk periode jabatan berikutnya.

Pada tahun 2023, penilaian anggota Komite Audit dilakukan dengan menggunakan metode 360 derajat dan AKHLAK *Behavioural Survey* (ABS), dengan capaian nilai sebagai berikut:

The performance assessment of the Audit Committee is based on the realization and completion of the work programs listed in the Audit Committee Work Plan and reported to the Board of Commissioners in the Audit Committee's report, covering the committee's duties in auditing, the adequacy of the internal control process, and financial statement preparation. The assessment results are considered by the Board of Commissioners for reappointing and/or dismissing Audit Committee members for the next term.

In 2023, the performance assessment of Audit Committee members was conducted using the 360-degree method and the AKHLAK Behavioural Survey (ABS), with the following scores achieved:

No	Nama Anggota Komite Name of Committee Member	Skor Nilai Score	Predikat Status
1.	Harry Mulia	96,70	High

Komite Nominasi, Remunerasi dan Manajemen Risiko

Remuneration, Nomination and Risk Management Committee

Pembentukan Komite Nominasi, Remunerasi dan Manajemen Risiko (KNRM) di tahun 2022 merupakan bagian dari penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Komite ini dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu pelaksanaan tugasnya terutama yang berkaitan dengan kebijakan nominasi, remunerasi dan manajemen risiko di Perusahaan. KNRM secara aktif melakukan pengawasan dan pemberian rekomendasi/saran di bidang pengelolaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) termasuk proses remunerasi dan nominasi Dewan Komisaris dan Direksi PTK serta memastikan efektivitas implementasi manajemen risiko Perusahaan.

The establishment of the Nomination, Remuneration, and Risk Management Committee (KNRM) in 2022 is part of implementing Good Corporate Governance principles. The Committee was formed by the Board of Commissioners to assist in carrying out its duties, especially regarding nomination, remuneration, and risk management policies within the Company. KNRM actively supervises and provides recommendations and advice on human resource management and development, including the remuneration and nomination process for the Board of Commissioners and Directors of PTK, and ensures the effective implementation of the Company's risk management.

Kriteria Keanggotaan Komite Nominasi, Remunerasi dan Manajemen Risiko

Membership Criteria for the Nomination, Remuneration, and Risk Management Committee

Persyaratan keanggotaan KNRM mencakup persyaratan umum dan persyaratan khusus, sebagai berikut:

The membership requirements for the committee include general and specific criteria as follows:

1. Persyaratan Umum

- Memiliki integritas, dedikasi, kemampuan, pendidikan, independensi, dan pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu mengkomunikasikan secara lisan maupun tertulis semua hasil pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisaris sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- Tidak mempunyai hubungan sedarah ataupun hubungan yang timbul karena perkawinan dengan anggota Dewan Komisaris lainnya ataupun dengan anggota Direksi
- Memiliki pengetahuan yang memadai tentang Anggaran Dasar Perusahaan, peraturan perundangan yang berlaku dan berkaitan dengan operasi Perusahaan di bidang nominasi, remunerasi dan manajemen risiko.
- Memiliki pengetahuan mengenai Perusahaan atau industri/bisnis Perusahaan sejenis dan/atau memahami kegiatan Perusahaan secara cepat dalam kaitannya dengan pelaksanaan manajemen risiko.

2. Persyaratan Khusus

Selain persyaratan umum, khusus bagi anggota komite yang berasal dari luar Perusahaan juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perusahaan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau pemegang saham Perusahaan.
- Tidak mempunyai hubungan sedarah ataupun hubungan yang timbul karena perkawinan dengan anggota Dewan Komisaris lainnya ataupun dengan anggota Direksi.
- Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan Perusahaan.
- Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi Perusahaan ini dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum diangkat Dewan Komisaris.

1. General Requirements:

- Possess integrity, dedication, capability, education, independence, and experience relevant to their field of work, and the ability to orally and in writing communicate all their duties' results to the Board of Commissioners following applicable procedures.
- Have sufficient knowledge to understand the principles and processes of nomination, remuneration, and risk management, and can communicate their duties and functions to the Board of Commissioners.
- Have adequate knowledge of the Company's Articles of Association, applicable laws and regulations, and their relevance to the Company's operations in nomination, remuneration, and risk management.
- Have knowledge about the Company or similar industries/ businesses and/or can quickly understand the Company's activities concerning risk management implementation.

2. Specific Requirements:

In addition to the general requirements, committee members from outside the Company must meet the following conditions:

- Have no affiliation with the Company, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or shareholders of the Company.
- Have no blood relations or relations arising from marriage with other members of the Board of Commissioners or the Board of Directors.
- Have no direct or indirect business relationship with the Company's activities.
- Not a person who worked or had authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the Company within six months before being appointed by the Board of Commissioners.

Ketentuan Masa Jabatan Komite Nominasi, Remunerasi dan Manajemen Risiko

Tenure Provisions for the Nomination, Remuneration, and Risk Management Committee

Sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, masa jabatan anggota Komite yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris Perusahaan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. Sementara untuk masa jabatan anggota Komite yang merupakan anggota Dewan Komisaris Perusahaan berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir.

According to the Minister of SOEs Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 on Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises, the term of office for committee members who are not members of the Company's Board of Commissioners is up to three years and can be extended once for a two-year term, without reducing the right of the Board of Commissioners to dismiss them at any time. Meanwhile, the term of office for committee members who are members of the Company's Board of Commissioners automatically ends when their term as members of the Board of Commissioners ends.

Piagam Komite Nominasi, Remunerasi dan Manajemen Risiko

Charter of the Nomination, Remuneration, and Risk Management Committee

Pelaksanaan tugas KNRM mengacu pada Piagam Komite Nominasi, Remunerasi dan Manajemen Risiko yang disahkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 042/DEKOM.PTK/2022 tanggal 21 Maret 2022. Piagam tersebut mengatur berbagai hal terkait pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan kewajiban Ketua dan KNRM.

KNRM performs its duties based on the Charter of the Nomination, Remuneration, and Risk Management Committee, ratified by the Board of Commissioners' Decree No. 042/DEKOM.PTK/2022 on March 21, 2022. This charter regulates various matters related to the implementation of duties, responsibilities, and obligations of the Chairman and KNRM.

Susunan dan Komposisi Komite Nominasi, Remunerasi dan Manajemen Risiko

Composition of the Nomination, Remuneration, and Risk Management Committee

Pada tahun 2023 terdapat perubahan komposisi keanggotaan KNRM berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. SK-210/DEKOM.PTK/2023. Dengan demikian, susunan dan komposisi anggota KNRM pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

In 2023, there was a change in KNRM membership composition based on the Board of Commissioners' Decree No. SK-210/DEKOM.PTK/2023. Thus, the composition of KNRM members in 2023 is as follows:

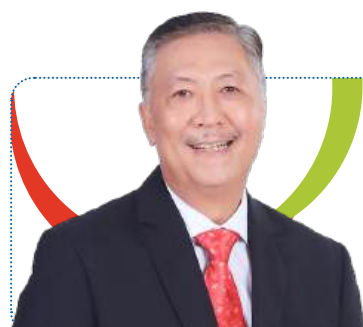
Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Deed of Appointment	Periode dan Masa Jabatan Period and Term of Office
Agustinus Bensik Lomboan*	Ketua KNRM Chairman of KNRM	Kpts-025/DEKOM.PTK/2022	14 Februari 2022 - 31 Oktober 2023 February 14, 2022 - October 31, 2023
Khalid Zabidi**	Ketua KNRM Chairman of KNRM	SK-170/DEKOM.PTK/2023	1 November 2023 - 18 Januari 2024 November 1, 2023 - January 18, 2024
Hamdi Zainal	Anggota Member	SK-033/DEKOM.PTK/2023	1 Maret 2023 - 29 Februari 2024 March 1, 2023 - February 29, 2024
Ahmad Sofyan	Anggota Member	SK-005/DEKOM.PTK/2023	11 Januari 2023 - 10 Januari 2024 January 11, 2023 - January 10, 2024

Keterangan: *) Berakhir masa jabatan sebagai Ketua KNRM efektif sejak tanggal 31 Oktober 2023. **) Mulai menjabat sebagai Ketua KNRM efektif sejak 1 November 2023.

Note: *) End of term of office as Chairman of KNRM effective from October 30, 2023. **) Starts serving as Chairman of KNRM effective from November 1, 2023.

Profil Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan Manajemen Risiko

Profile of the Nomination, Remuneration, and Risk Management Committee Members



Agustinus Bensik Lomboan

Ketua KNRM (14 Februari 2022 - 31 Oktober 2023)
Chairman of KNRM (February 14, 2022 - October 31, 2023)

Tempat tanggal lahir Place of Birth	Balikpapan, 7 Agustus 1964	Balikpapan, August 7, 1964
Domisili Domicile	Jakarta	Jakarta
Riwayat Pendidikan Educational History	- S1 Teknik Mesin Universitas Trisakti Jakarta (1983 - 1988) - S2 Manajemen Keuangan Univ. Indonusa Esa Unggul Jakarta (1993 - 1995)	- Bachelor's Degree in Mechanical Engineering, Trisakti University, Jakarta 1983 - 1988 - Master of Financial Management from Universitas Indonusa Esa Unggul Jakarta 1993 - 1995
Sertifikasi Profesi yang Dimiliki Professional Certification Owned	Tidak ada	N/A
Pengalaman Kerja Work Experience	- Komisaris CV Oasis Centre Arena (2018 - sekarang) - Komisaris OCA Fortable (2019 - sekarang) - Komisaris PT Pertamina Trans Kontinental (2021 - 2023)	- Commissioner of CV Oasis Center Arena 2018 - present - OCA Fortable Commissioner 2019 - present - Commissioner of PT Pertamina Trans Kontinental 2021 - 2023
Rangkap Jabatan Concurrent Position(s)	Tidak ada	N/A
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationships:	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Komite, anggota Direksi, Dewan Komisaris maupun Pemegang Saham Utama/Pengendali.	Has no affiliated relationships with fellow Committee members, members of the Board of Directors, Board of Commissioners or Major/Controlling Shareholders.



Khalid Zabidi

Ketua KNRM/Komisaris
Chairman of KNRM/Commissioner

Diangkat sebagai Ketua KNRM pada tanggal 1 November 2023 untuk periode pertama kalinya.

Profil Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

Appointed as Chairman of KNRM on November 1 2023 for the first period.

His profile can be seen in the Board of Commissioners Profile section in this Annual Report.



Hamdi Zainal

Anggota KNRM
Member of KNRM

Tempat tanggal lahir Place of Birth	Martapura, 02 April 1955	Martapura, April 2, 1955
Domisili Domicile	Bekasi	Bekasi
Riwayat Pendidikan Educational History	- S1 Ilmu Adm. Niaga Univ. Krisnadwipayana Jakarta (1991)	- Bachelor's degree in Commerce Administrative Science from Universitas Krisnadwipayana Jakarta 1991
Sertifikasi Profesi yang Dimiliki Professional Certification Owned	- Bahasa Jepang - Yokohama, Jepang (2001) - Internal Audit - Bandung (2004) - LNG Bisnis - Paris (2008)	- Japanese - Yokohama, Japan 2001 - Internal Audit - Bandung 2004 - LNG Business - Paris 2008
Pengalaman Kerja Work Experience	- Sekretaris Koperasi Bina Petro Mandiri SKK Migas 2015 - 2018 - Wakil Sekretaris Koperasi Bina Petro Mandiri SKK Migas 2014 - 2015 - Staf Khusus Unit Percepatan Proyek Banyu Urip SKK Migas 2014 - 2015	- Secretary of the Bina Petro Mandiri SKK Migas Corporation 2015 - 2018 - Deputy Secretary of the Bina Petro Mandiri SKK Migas Corporation 2014 - 2015 - Special Staff for the Banyu Urip SKK Migas Project Acceleration Unit 2014 - 2015
Rangkap Jabatan Concurrent Position(s)	Tidak ada	N/A
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationships:	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Komite, anggota Direksi, Dewan Komisaris maupun Pemegang Saham Utama/Pengendali.	Has no affiliated relationships with fellow Committee members, members of the Board of Directors, Board of Commissioners or Major/Controlling Shareholders.



Ahmad Sofyan

Anggota KNRM
Member of KNRM

Tempat tanggal lahir Place of Birth	Rantau Prapat, 10 Oktober 1981	Rantau Prapat, October 10, 1981
Domisili Domicile	Tangerang Selatan	Tangerang Selatan
Riwayat Pendidikan Educational History	- S1 Teknik Kelautan - Univ. Sepuluh November (2000 - 2004)	- Bachelor's Degree in Marine Engineering - Universitas Sepuluh Nopember 2000 - 2004
Sertifikasi Profesi yang Dimiliki Professional Certification Owned	Tidak ada	N/A
Pengalaman Kerja Work Experience	- PT Alsom (2016 - 2018) - PT Tripatra EPC (2018 - 2019) - PT Pertamina (Persero) (2019 - 2021) - PT International Shipping (2021 - sekarang)	- PT Alsom 2016 - 2018 - PT Tripatra EPC 2018 - 2019 - PT Pertamina (Persero) 2019 - 2021 - PT International Shipping 2021 - present
Rangkap Jabatan Concurrent Position(s)	Manager Bunker, Agency & Performance - PIS	Manager of Bunker, Agency & Performance - PIS
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationships:	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Komite, anggota Direksi, Dewan Komisaris. Namun memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama/Pengendali atas jabatan rangkapnya.	Has no affiliated relationships with fellow Committee members, members of the Board of Directors, Board of Commissioners. However, he has an affiliate relationship with the Main/Controlling Shareholder for his dual position.

Pernyataan Independensi Komite Nominasi, Remunerasi dan Manajemen Risiko

Independence Statement of the Nomination, Remuneration, and Risk Management Committee

Seluruh anggota KNRM tidak memiliki hubungan afiliasi dengan manajemen Perusahaan, termasuk menjabat salah satu jabatan dalam struktur organisasi Perusahaan maupun Anak Perusahaan.

All KNRM members have no affiliation with the Company's management, including holding any position within the organizational structure of the Company or its Subsidiaries.

Kriteria Independensi Independence Criteria	Khalid Zabidi	Hamdi Zainal	Ahmad Sofyan
Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik yang memberikan jasa audit non audit pada PTK dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat oleh Komisaris. Not a person in a Public Accounting Firm who provided non-audit audit services to PTK in the last 1 (one) year before being appointed by the Commissioner.	✓	✓	✓
Tidak memiliki kepentingan/keterikatan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan konflik kepentingan terhadap BUMN yang bersangkutan. Has no personal interests/attachments that could have a negative impact and conflict of interest on the BUMN in question.	✓	✓	✓
Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan PTK Direksi dan Komisaris. Has no affiliation with PTK Directors and Commissioners.	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha PTK. Does not have any direct or indirect business relationships related to PTK business activities.	✓	✓	✓

Tugas dan Tanggung Jawab serta Wewenang Komite Nominasi, Remunerasi dan Manajemen Risiko

Duties, Responsibilities, and Authorities of the Nomination, Remuneration, and Risk Management Committee

KNRM dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 042/DEKOM.PTK/2022 tanggal 21 Maret 2022, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Pemantauan dan evaluasi terhadap realisasi kinerja Keuangan serta tingkat risiko yang disampaikan Direksi melalui laporan kinerja manajemen setiap bulan.
2. *Review* atas identifikasi risiko jangka pendek dalam usulan RKAP maupun *rolling out* rencana jangka Panjang (RJPP).
3. Review bersama dengan Komite Investasi terkait rencana investasi maupun divestasi yang tersebut dalam rencana kerja PTK, khususnya untuk aspek penerapan tingkat risiko usaha.
4. *Monitoring* dan *review* secara periodik atas pengelolaan risiko yang telah dilaksanakan oleh Perusahaan dan Anak Perusahaan yang meliputi kepatuhan dalam melaksanakan kebijakan manajemen risiko yang telah ditetapkan sesuai rencana dan target kinerja Direksi.
5. Memberikan masukan dan pendapat bagi Dewan Komisaris atas efektivitas kebijakan pengurusan perusahaan dari aspek manajemen risiko.
6. Rapat koordinasi dengan fungsi Manajemen Risiko dan pelaksanaan pengelolaan risiko terkait monitoring pelaksanaan mitigasi risiko bulanan sesuai dengan identifikasi risiko yang telah ditetapkan dan status kendala serta tindak lanjut yang diperlukan.
7. *Review* atas pembaruan status manajemen risiko (*updating risk management plan*) yang disampaikan Direksi PTK secara periodik.
8. Melakukan evaluasi usulan KPI individu anggota Direksi serta melakukan *monitoring* secara periodik atas realisasinya.
9. Melakukan telaah terhadap Kebijakan dan Prosedur Pengembangan Karir yang dilakukan oleh Direksi.
10. Membuat rekomendasi terkait remunerasi dan tantiem/insentif kinerja untuk Direksi PTK berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Direksi. KNRM akan melakukan telaah untuk kemudian menyusun rekomendasi atas usulan yang diajukan tersebut kepada Dewan Komisaris sebelum kemudian disampaikan kepada Pemegang Saham sebagai rekomendasi dari Dewan Komisaris.
11. Melakukan validasi dan kalibrasi atas Talenta yang diusulkan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris untuk diperoleh *selected talent list*.
12. Melakukan evaluasi terhadap Calon Wakil Perusahaan yang akan diusulkan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris di perusahaan anak dan/atau perusahaan patungan, sebelum diajukan kepada RUPS.
13. Melakukan evaluasi atas usulan Direksi mengenai struktur organisasi perusahaan
14. Melakukan evaluasi strategi pengelolaan risiko baik operasional, pengembangan Perusahaan dan investasi.
15. Kunjungan langsung (*site visit*) ke region maupun wilayah kerja PTK sebagai bagian dari tahapan *close monitoring*.

Sementara itu, KNRM memiliki wewenang sebagai berikut:

1. Komite bekerja secara kolektif dan bersifat mandiri dalam melaksanakan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

KNRM was established based on the Board of Commissioners' Decree No. 042/DEKOM.PTK/2022 dated March 21, 2022, with the following duties and responsibilities:

1. Monitor and evaluate the realization of financial performance and risk levels reported by the Board of Directors through monthly management performance reports.
2. Review the identification of short-term risks in the 2023 RKAP proposal and the rolling out of the Long-Term Plan (RJPP).
3. Conduct joint reviews with the Investment Committee on investment and divestment plans in PTK's work plan, especially concerning the application of business risk levels.
4. Periodically monitor and review risk management carried out by the Company and its Subsidiaries, including compliance with risk management policies set according to the Board of Directors' plans and performance targets for 2023.
5. Provide input and opinions to the Board of Commissioners on the effectiveness of the Company's management policies from a risk management perspective.
6. Hold coordination meetings with the Risk Management function and implement risk management related to monitoring monthly risk mitigation implementation according to identified risks and the status of constraints and required follow-up actions.
7. Review updates to the risk management plan submitted periodically by the PTK Board of Directors.
8. Evaluate individual Key Performance Indicators (KPI) proposals from Board of Directors members and periodically monitor their realization.
9. Review the Career Development Policy and Procedures implemented by the Board of Directors.
10. Make recommendations regarding remuneration and performance incentives for PTK's Board of Directors based on proposals submitted by the Board of Directors. KNRM will review and prepare recommendations on the submitted proposals to the Board of Commissioners before forwarding them to shareholders as recommendations from the Board of Commissioners.
11. Validate and calibrate talents proposed by the Board of Directors to the Board of Commissioners to obtain a selected talent list.
12. Evaluate candidates for Company representatives proposed as members of the Board of Directors or members of the Board of Commissioners in subsidiaries and/or joint ventures before being submitted to the General Meeting of Shareholders.
13. Evaluate proposals from the Board of Directors regarding the Company's organizational structure.
14. Evaluate risk management strategies, including operational, Company development, and investment risks.
15. Conduct site visits to PTK regions and work areas as part of the close monitoring stage.

The Authority of the Nomination, Remuneration, and Risk Management Committee:

1. The committee works collectively and independently in carrying out its duties and is accountable to the Board of Commissioners.



- Komite mempunyai wewenang untuk mendapatkan informasi Perusahaan tentang kegiatan operasional, keuangan, aset serta sumber daya Perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas.
 - Meminta dan/atau mendapatkan kerja sama dari rekan kerja antara lain Sekretariat Dewan Komisaris dan Komite lain, Tim Sumber Daya Manusia, Tim Keuangan, Tim Enterprise Risk Management dan atau fungsi-fungsi operasional Perusahaan, termasuk Anak Perusahaan.
 - Menyusun, mengevaluasi, mengubah dan melaksanakan Piagam (*Charter*) termasuk menentukan prosedur dan lingkup pelaksanaan pekerjaan KNRM dengan persetujuan Dewan Komisaris.
 - Apabila diperlukan komite dapat mempekerjakan tenaga ahli dan atau konsultan untuk membantu komite terkait dengan rencana pengembangan usaha Perusahaan dengan persetujuan tertulis Dewan Komisaris dan atas beban Perusahaan yang dialokasikan dari anggaran biaya Dewan Komisaris.
- The committee has the authority to obtain Company information on operational activities, finances, assets, and other Company resources related to its duties.
 - Request and/or obtain cooperation from colleagues, including the Secretariat of the Board of Commissioners and other committees, Human Resources Team, Finance Team, Enterprise Risk Management Team, and/or Company operational functions, including Subsidiaries.
 - Prepare, evaluate, amend, and implement the Charter, including determining procedures and the scope of KNRM's work with the approval of the Board of Commissioners.
 - If necessary, the committee can employ experts and/or consultants to assist with the Company's business development plans with written approval from the Board of Commissioners and at the Company's expense allocated from the Board of Commissioners' budget.

Rapat Komite Nominasi, Remunerasi dan Manajemen Risiko

Meetings of the Nomination, Remuneration, and Risk Management Committee

Kebijakan rapat KNRM telah diatur dalam Piagam KNRM yang mengatur pelaksanaan rapat KNRM dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau triwulanan untuk membahas Program Kerja Komite serta hasil analisis dalam rangka pemberian saran dan rekomendasi guna membantu tugas Dewan Komisaris melaksanakan kegiatan pengawasan dan pemberian nasehat.

Pada tahun 2023, KNRM telah melaksanakan rapat sebanyak 6 (enam) kali dengan agenda 1. Persiapan pelaksanaan penilaian BOD-BOC dan Komite; 2. Usulan KPI BOD PTK tahun 2023; 3. Usulan Remunerasi; 4. Usulan Anggota Komite Investasi; 5. Pembahasan KPI BOD PTK tahun 2023; 6. Pembahasan Kandidat Terpilih IJP jabatan VP Legal & Relation. Berikut frekuensi kehadiran masing-masing anggota KNRM dalam rapat:

KNRM's meeting policies are regulated in the KNRM Charter, which stipulates that meetings are held at least once every three months or quarterly to discuss the Committee's Work Program and analysis results to provide advice and recommendations to assist the Board of Commissioners in carrying out supervision and advisory activities.

In 2023, KNRM held six meetings with the following agenda: 1. Preparation for the BOD-BOC and Committee assessment; 2. Proposal for PTK BOD KPI for 2023; 3. Remuneration proposals; 4. Proposal for Investment Committee Members; 5. Discussion on PTK BOD KPI for 2023; 6. Discussion on Selected Candidates for the VP Legal & Relation position. Here is the attendance frequency of each KNRM member in the meetings:

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Wajib Rapat Mandatory Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Tingkat Kehadiran Attendance Rate
Agustinus Bensik Lomboan*	Ketua Komite NRM Chairman of the KNRM Committee	5	5	100%
Khalid Zabidi**	Ketua Komite NRM Chairman of the KNRM Committee	0	0	-
Hamdi Zainal	Anggota Komite Committee Member	6	6	100%
Ahmad Sofyan	Anggota komite Committee Member	6	6	100%

Keterangan: *) Berhenti menjabat pada 31 Oktober 2023; **) Mulai menjabat sejak 1 November 2023.

Note: *) Term ended on October 31, 2023; **) Started term on November 1, 2023.

Pengembangan Kompetensi Tahun 2023

Competence Development in 2023

PTK senantiasa mendorong KNRM untuk mengikuti pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi sebagaimana diatur dalam Piagam KNRM. Sepanjang tahun 2023 anggota KNRM telah mengikuti berbagai program pendidikan dan pelatihan sebagai berikut.

PTK always encourages KNRM to participate in training for competence development as stipulated in the KNRM Charter. Throughout 2023, KNRM members participated in various education and training programs.



Nama dan Jabatan Name and Position	Nama Pelatihan Training Name	Waktu Pelaksanaan Date	Penyelenggara Organizer
Khalid Zabidi	Mengawal Keberlanjutan dan Pertumbuhan Perseroan melalui Pengawasan dan Pengendalian Risiko Overseeing the Company's Sustainability and Growth through Supervision and Risk Control	19 Oktober 2023 October 19, 2023	IKAI
Khalid Zabidi	Pelatihan dan Sertifikasi "Certified Risk Professional (CRP)" "Certified Risk Professional (CRP)" Training and Certification	11 Desember 2023 December 11, 2023	PT IRBA Group Indonesia
Ahmad Sofyan	Mengawal Keberlanjutan dan Pertumbuhan Perseroan melalui Pengawasan dan Pengendalian Risiko Overseeing the Company's Sustainability and Growth through Supervision and Risk Control	19 Oktober 2023 October 19, 2023	IKAI

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Nominasi, Remunerasi dan Manajemen Risiko

Report on the Duties of the Nomination, Remuneration, and Risk Management Committee

Sepanjang tahun 2023, KNRM telah menjalankan tugas dan berbagai kegiatan, antara lain sebagai berikut:

1. Pemantauan dan evaluasi terhadap realisasi kinerja Keuangan serta tingkat risiko tahun 2023 yang disampaikan Direksi melalui laporan kinerja manajemen setiap bulan.
2. *Review* atas identifikasi risiko jangka pendek dalam usulan RKAP tahun 2023 maupun *rolling out* rencana jangka Panjang (RJPP).
3. *Review* bersama dengan Komite Investasi terkait rencana investasi maupun divestasi yang tersebut dalam rencana kerja PTK tahun 2023, khususnya untuk aspek penerapan tingkat risiko Usaha.
4. *Monitoring* dan *review* secara periodik Pengelolaan risiko yang telah dilaksanakan oleh Perusahaan dan Anak Perusahaan yang meliputi kepatuhan dalam melaksanakan kebijakan manajemen risiko yang telah ditetapkan sesuai rencana dan target kinerja Direksi tahun 2023.
5. Memberikan masukan dan pendapat bagi Dewan komisaris atas efektivitas kebijakan pengurusan perusahaan dari aspek manajemen risiko.
6. Rapat koordinasi dengan Fungsi Manajemen Risiko dan Pelaksanaan Pengelolaan risiko terkait monitoring pelaksanaan mitigasi risiko bulanan sesuai dengan identifikasi risiko yang telah ditetapkan dan status kendala serta tindak lanjut yang diperlukan.
7. *Review* atas pembaruan status manajemen risiko (*updating risk management plan*) yang disampaikan Direksi PTK secara periodik.
8. Melakukan evaluasi usulan *Key Performance Indicator* individu anggota Direksi serta melakukan *monitoring* secara periodik atas realisasinya.
9. Melakukan telaah terhadap Kebijakan dan Prosedur Pengembangan Karir yang dilakukan oleh Direksi.
10. Membuat rekomendasi terkait remunerasi dan tantien/insentif kinerja untuk Direksi PTK berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Direksi. Komite NRM akan melakukan telaah untuk kemudian menyusun rekomendasi atas usulan yang diajukan tersebut kepada Dewan Komisaris sebelum kemudian disampaikan kepada Pemegang Saham sebagai rekomendasi dari Dewan Komisaris.
11. Melakukan validasi dan kalibrasi atas Talenta yang diusulkan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris untuk diperoleh *selected talent list*.
12. Melakukan evaluasi terhadap Calon Wakil Perseroan yang akan diusulkan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris di perusahaan anak dan/atau perusahaan patungan, sebelum diajukan kepada RUPS.

In 2023, KNRM carried out the following duties and activities:

1. Monitor and evaluate the realization of financial performance and risk levels for 2023 reported by the Board of Directors through monthly management performance reports.
2. Review the identification of short-term risks in the 2023 RKAP proposal and rolling out the Long-Term Plan (RJPP).
3. Conduct joint reviews with the Investment Committee on investment and divestment plans in PTK's 2023 work plan, especially regarding the application of business risk levels.
4. Periodically monitor and review risk management carried out by the Company and its Subsidiaries, including compliance with risk management policies set according to the Board of Directors' plans and performance targets for 2023.
5. Provide input and opinions to the Board of Commissioners on the effectiveness of the Company's management policies from a risk management perspective.
6. Hold coordination meetings with the Risk Management function and implement risk management related to monitoring monthly risk mitigation implementation according to identified risks and the status of constraints and required follow-up actions.
7. Review updates to the risk management plan submitted periodically by the PTK Board of Directors.
8. Evaluate individual Key Performance Indicators (KPI) proposals from Board of Directors members and periodically monitor their realization.
9. Review the Career Development Policy and Procedures implemented by the Board of Directors.
10. Make recommendations regarding remuneration and performance incentives for PTK's Board of Directors based on proposals submitted by the Board of Directors. KNRM will review and prepare recommendations on the submitted proposals to the Board of Commissioners before forwarding them to shareholders as recommendations from the Board of Commissioners.
11. Validate and calibrate talents proposed by the Board of Directors to the Board of Commissioners to obtain a selected talent list.
12. Evaluate candidates for Company representatives proposed as members of the Board of Directors or members of the Board of Commissioners in subsidiaries and/or joint ventures before being submitted to the General Meeting of Shareholders.

13. Melakukan evaluasi atas usulan Direksi mengenai struktur organisasi perusahaan.
14. Melakukan evaluasi strategi pengelolaan risiko baik operasional, pengembangan Perusahaan dan investasi.
15. Kunjungan langsung (*site visit*) ke *region* maupun wilayah kerja PTK sebagai bagian dari tahapan *close monitoring*.

13. Evaluate proposals from the Board of Directors regarding the Company's organizational structure.
14. Evaluate risk management strategies, including operational, Company development, and investment risks.
15. Conduct site visits to PTK regions and work areas as part of the close monitoring stage.

Penilaian Kinerja Komite Nominasi, Remunerasi dan Manajemen Risiko

Performance Assessment of the Nomination, Remuneration, and Risk Management Committee

Penilaian kinerja KNRM dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. Penilaian kinerja dilakukan untuk menilai kinerja KNRM selaku kelompok maupun anggotanya selaku individu. Penilaian kinerja KNRM dilakukan berdasarkan realisasi dan penyelesaian program kerja yang tercantum dalam Rencana Kerja KNRM dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris dalam laporan KNRM yang meliputi pelaksanaan tugas komite di bidang nominasi, remunerasi, dan pengawasan atas manajemen risiko. Hasil penilaian tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi Dewan Komisaris untuk mengangkat kembali dan/ atau memberhentikan anggota KNRM untuk periode jabatan berikutnya.

Pada tahun 2023, penilaian anggota KNRM dilakukan dengan menggunakan metode 360 derajat dan AKHLAK *Behavioural Survey* (ABS), dengan capaian nilai sebagai berikut:

KNRM's performance is assessed at least once a year. The performance assessment is carried out to evaluate KNRM's performance as a group and its members as individuals. The performance assessment is based on the realization and completion of the work program listed in the KNRM Work Plan and reported to the Board of Commissioners in the KNRM report, which includes the committee's duties in nomination, remuneration, and risk management oversight. The assessment results are considered by the Board of Commissioners in deciding whether to reappoint and/or dismiss KNRM members for the next term.

In 2023, KNRM members' performance was evaluated using the 360-degree method and the AKHLAK Behavioural Survey (ABS), with the following scores:

No	Nama Anggota Komite Name of Committee Member	Skor Nilai Score	Predikat Status
1.	Hamdi Zainal	96,10	High
2.	Ahmad Sofyan	97,20	High

Komite Investasi

Investment Committee

Komite Investasi dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat terkait dengan aktivitas dan inisiatif investasi Perusahaan yang termasuk dalam lingkup kewenangan Dewan Komisaris.

The Investment Committee is established to assist the Board of Commissioners in performing its supervisory and advisory functions related to the Company's investment activities and initiatives that fall within the Board's authority.

Ketentuan Masa Jabatan Komite Investasi

Term of Office for the Investment Committee

Dalam Piagam Komite Investasi diatur bahwa masa jabatan anggota Komite Investasi paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 2 (dua) tahun. Keanggotaan anggota Komite Investasi dapat berakhir sewaktu-waktu sebelum masa jabatan berakhir sesuai keputusan Dewan Komisaris.

The Investment Committee Charter stipulates that the term of office for Investment Committee members is a maximum of 3 (three) years and may be extended once for 2 (two) years. Membership in the Investment Committee can be terminated at any time before the term expires according to the decision of the Board of Commissioners.



Piagam Komite Investasi

Investment Committee Charter

Komite Investasi memiliki Piagam sebagai pedoman kerja dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan serta pemberian nasihat kepada Dewan Komisaris. Piagam Komite Investasi PTK ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. 008/DEKOM.PTK/2022 tanggal 8 Januari 2022. Piagam Komite Investasi tersebut mengatur berbagai hal terkait pelaksanaan tugas, tanggung jawab, serta kewajiban Ketua dan Anggota Komite Investasi.

The Investment Committee has a Charter that serves as a work guideline for performing its duties and responsibilities in overseeing and advising the Board of Commissioners. The Investment Committee Charter of PTK is established based on the Board of Commissioners' Decision No. 008/DEKOM.PTK/2022 on January 8, 2022. This Charter outlines various matters related to the execution of duties, responsibilities, and obligations of the Chairman and Members of the Investment Committee.

Susunan dan Komposisi Komite Investasi

Composition of the Investment Committee

Pada tahun 2023 terdapat perubahan komposisi keanggotaan Komite Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. SK-160/DEKOM.PTK/2023. Berikut susunan dan komposisi anggota Komite Investasi tahun 2023.

In 2023, there was a change in the composition of the Investment Committee members based on the Board of Commissioners' Decree No. SK-160/DEKOM.PTK/2023. The composition of the Investment Committee in 2023, is as follows:

Dian Vita Alpha Suandi	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Deed of Appointment	Periode dan Masa Jabatan Period and Term of Office
Andi Saiful Haq	Ketua Chairman	SK-151/DEKOM.PTK/2023	2023 - sekarang 2023 - present
Edi Ariawan	Anggota Member	SK-071/DEKOM.PTK/2023	2023 - 2024
Dian Vita Alpha Suandi	Anggota Member	SK-160/DEKOM.PTK/2023	2023 - 2025
Aldo Maudy Gantirta*	Anggota Member	SK-146/DEKOM.PTK/2022	2022 - 2023

Keterangan: *) Berhenti menjabat sejak 31 Oktober 2023.

Notes: *) Resigned as of October 31, 2023.

Profil Anggota Komite Investasi

Profiles of Investment Committee Members



Andi Saiful Haq

Ketua Komite Investasi/Komisaris
Chairman of the Investment Committee/Commissioner

Diangkat sebagai Ketua Komite Investasi pada tahun 2023 untuk periode pertama kalinya.

Appointed as Chairman of the Investment Committee in 2023 for the first period.

Profil Beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.

His profile can be seen in the Board of Commissioners Profile section in this Annual Report.

**Edi Ariawan**

Anggota Komite Investasi
Member of the Investment Committee

Tempat tanggal lahir Place of birth	Surabaya, 15 Februari 1967	Surabaya, February 15 1967
Domisili Domicile	Bekasi	Bekasi
Periode jabatan Term of office	5 Juni 2023	June 5 2023
Riwayat Pendidikan Educational History	- S1 ITS - Surabaya (1985-1991) - S2 UGM - Yogyakarta (2009-2011)	- S1 ITS - Surabaya (1985-1991) - Master's degree at UGM - Yogyakarta (2009-2011)
Sertifikasi Profesi yang Dimiliki Professional Certification Held	Tidak ada	N/A
Pengalaman Kerja Work Experience	- Manager Fleet Inspection & Assurance PT Pertamina (Persero)(2017 - 2019) - VP Logistics Optimization PT Pertamina (Persero)(2020 - 2021) - VP Government Assignment PT Pertamina (Persero)(2021 - 2023)	- Manager Fleet Inspection & Assurance PT Pertamina (Persero)(2017 - 2019) - VP Logistics Optimization PT Pertamina (Persero)(2020 - 2021) - VP Government Assignment PT Pertamina (Persero)(2021 - 2023)
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Tidak ada	N/A
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationships	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Komite, Dewan Komisaris, Direksi maupun Pemegang Saham Utama/Pengendali.	Has no affiliated relationships with fellow members of the Committee, Board of Commissioners, Directors or Major/Controlling Shareholders.

**Dian Vita Alpha Suandi**

Anggota Komite Investasi
Member of the Investment Committee

Tempat tanggal lahir Place of birth	Yogyakarta, 4 September 1982	Yogyakarta, September 4. 1982
Domisili Domicile	Jakarta	Jakarta
Periode jabatan Term of office	1 November 2023	November 1, 2023
Riwayat Pendidikan Educational History	- S1 Teknik Industri - Institut Teknologi Bandung (2004)	- S1 Industrial Engineering - Bandung Institute of Technology (2004)
Sertifikasi Profesi yang Dimiliki Professional Certification Held	- <i>Certified Project Management Professional (PMP)</i> ; - <i>Certified Professional Marketer Asia (CPMA)</i> .	- Certified Project Management Professional (PMP); - Certified Professional Marketer Asia (CPMA).
Pengalaman Kerja Work Experience	- Accenture (2005-2007), - Pertamina (2007-sekarang).	- Accenture (2005-2007), - Pertamina (2007-present).
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Saat ini menjabat sebagai Manager PMO Downstream PT Pertamina (Persero).	Currently serves as Downstream PMO Manager of PT Pertamina (Persero).
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationships	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Komite, Dewan Komisaris dan Direksi.	Has no affiliated relationship with fellow Committee members, the Board of Commissioners and the Board of Directors.



Aldo Maudy Gantirta

Anggota Komite Investasi
Member of the Investment Committee

Tempat tanggal lahir Place of birth	Jakarta, 25 Mei 1985	Jakarta, May 25, 1985
Domisili Domicile	Jakarta	Jakarta
Riwayat Pendidikan Educational History	S1 Jurusan Teknik Elektro Universitas Atma Jaya	S1 Department of Electrical Engineering Atma Jaya University
Sertifikasi Profesi yang Dimiliki Professional Certification Held	Certified Risk Professional (CRP)	Certified Risk Professional (CRP)
Pengalaman Kerja Work Experience	- Manager Investment & Partnership Evaluation - Sr. Expert Upstream, Gas & NRE Government Assignment - Sr. Analyst Business Development.	- Manager Investment & Partnership Evaluation - Sr. Expert Upstream, Gas & NRE Government Assignment - Sr. Analyst Business Development.
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Tidak ada	N/A
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationships	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Komite, Dewan Komisaris, Direksi maupun Pemegang Saham Utama/Pengendali.	Has no affiliated relationships with fellow members of the Committee, Board of Commissioners, Directors or Major/Controlling Shareholders.

Pernyataan Independensi Komite Investasi

Statement of Independence of the Investment Committee

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Investasi bertindak independen sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang tercantum dalam Piagam Komite Investasi. Seluruh anggota Komite Investasi telah memenuhi kriteria independensi, antara lain sebagai berikut:

- Persyaratan Umum**
 - Memiliki integritas, dedikasi, kemampuan, pendidikan, independensi, dan pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu mengkomunikasikan secara lisan maupun tertulis semua hasil pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisaris sesuai dengan prosedur yang berlaku.
 - Memiliki pengetahuan yang cukup untuk dapat memahami prinsip dan proses investasi, serta mampu mengkomunikasikan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Dewan Komisaris.
 - Memiliki pengetahuan yang memadai tentang Anggaran Dasar Perusahaan, peraturan perundangan yang berlaku dan berkaitan dengan operasi Perusahaan di bidang investasi.
 - Memiliki pengetahuan mengenai Perusahaan atau industri/bisnis Perusahaan sejenis dan/atau memahami kegiatan Perusahaan secara cepat dalam kaitannya dengan pelaksanaan Investasi.
 - Memiliki pengetahuan mengenai hal pemasaran dan teknologi informasi yang bersifat umum.
- Persyaratan Khusus**
Selain persyaratan umum, khusus bagi anggota komite yang berasal dari luar Perusahaan juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perusahaan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau pemegang saham Perusahaan.

In performing its duties and responsibilities, the Investment Committee acts independently in accordance with the functions and authorities stated in the Investment Committee Charter. All members of the Investment Committee meet the independence criteria, including the following:

- General Requirements**
 - Possess integrity, dedication, capability, education, independence, and experience relevant to their field of work, and can communicate both orally and in writing all results of their duties to the Board of Commissioners in accordance with applicable procedures.
 - Have sufficient knowledge to understand investment principles and processes, and can communicate the execution of their duties and functions to the Board of Commissioners.
 - Have adequate knowledge of the Company's Articles of Association, applicable laws and regulations related to the Company's investment operations.
 - Have knowledge about the Company or similar industry/business and/or quickly understand the Company's activities related to investment execution.
 - Have general knowledge about marketing and information technology.
- Specific Requirements**
In addition to the general requirements, members of the committee from outside the Company must also meet the following criteria:
 - Have no affiliation with the Company, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or shareholders of the Company.

- Tidak mempunyai hubungan sedarah ataupun hubungan yang timbul karena perkawinan dengan anggota Dewan Komisaris lainnya ataupun dengan anggota Direksi.
- Tidak mempunyai hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan Perusahaan.
- Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi Perusahaan ini dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum diangkat Dewan Komisaris.

- Have no familial relationship, either by blood or marriage, with other members of the Board of Commissioners or members of the Board of Directors.
- Have no business relationship, either directly or indirectly, with the Company's activities.
- Not be a person who has worked or had the authority and responsibility to plan, lead, control, or oversee the Company within 6 (six) months prior to being appointed by the Board of Commissioners.

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Komite Investasi Duties, Responsibilities, and Authority of the Investment Committee

Komite Investasi dalam melakukan tugas pendampingan, pengawasan, serta monitoring pelaksanaan investasi PTK memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Melakukan evaluasi atas perencanaan investasi PTK termasuk anak perusahaannya.
- Melakukan *monitoring* eksekusi pelaksanaan investasi berdasar rencana kerja PTK dan analisis pasca investasi (*post mortem evaluation*).
- Melakukan *review* atas permohonan Direksi kepada Dewan Komisaris atas rencana Perusahaan, antara lain:
 - Investasi, Divestasi, usulan FUPP.
 - Pembentukan Anak Perusahaan.
 - Rencana Jangka Panjang Perusahaan.
 - *Marketing*.
 - *IT Development*.
- Melakukan evaluasi kebijakan investasi baik operasional dan pengembangan Perusahaan.
- Melaporkan dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris termasuk Anak Perusahaan dalam seluruh aktivitas Perusahaan.
- Menyediakan bahan rujukan dan informasi untuk keperluan Dewan Komisaris terkait pengelolaan investasi, pemasaran, dan IT apabila diminta.
- Membuat rencana kerja tahunan yang diselaraskan dengan rencana kerja tahunan atas kebijakan investasi Perusahaan.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris yang terkait dengan investasi.

Komite Investasi memiliki wewenang sebagai berikut:

- Komite bekerja secara kolektif dan bersifat mandiri dalam melaksanakan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
- Komite mempunyai wewenang untuk mendapatkan informasi Perusahaan tentang investasi, penggunaan dana terkait investasi, aset serta sumber daya Perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas.
- Meminta dan/atau mendapatkan kerja sama dari rekan kerja antara lain Sekretariat Dewan Komisaris dan Komite lain, Tim Investasi, Panitia Lelang Investasi dan/atau fungsi-fungsi operasional Perusahaan, termasuk Anak Perusahaan.
- Menyusun, mengevaluasi, mengubah dan melaksanakan Piagam (*Charter*) termasuk menentukan prosedur dan lingkup pelaksanaan pekerjaan Komite Investasi dengan persetujuan Dewan Komisaris.
- Apabila diperlukan komite dapat mempekerjakan tenaga ahli dan/atau konsultan untuk membantu komite terkait dengan rencana pengembangan usaha Perusahaan dengan persetujuan tertulis Dewan Komisaris dan atas beban Perusahaan yang dialokasikan dari anggaran biaya Dewan Komisaris.

In assisting, overseeing, and monitoring the execution of PTK's investments, the Investment Committee has the following duties and responsibilities:

- Evaluate PTK's investment planning, including its subsidiaries.
- Monitor the execution of investments based on PTK's work plan and conduct post-investment analysis (post-mortem evaluation).
- Review the Board of Directors' proposals to the Board of Commissioners regarding Company plans, including:
 - Investments, divestments, and proposed FUPP.
 - Formation of subsidiaries.
 - The Company's Long-Term Plan.
 - Marketing.
 - IT Development.
- Evaluate both operational and developmental investment policies of the Company.
- Report and provide recommendations to the Board of Commissioners, including subsidiaries, on all Company activities.
- Provide reference materials and information to the Board of Commissioners related to investment management, marketing, and IT when requested.
- Prepare an annual work plan aligned with the Company's annual investment policy work plan.
- Carry out other tasks assigned by the Board of Commissioners related to investments.

The Investment Committee has the authority as follows:

- The committee operates collectively and independently in performing its duties and is accountable to the Board of Commissioners.
- The committee has the authority to obtain information about the Company's investments, use of funds related to investments, assets, and other Company resources related to its duties.
- Request and/or obtain cooperation from colleagues, including the Secretariat of the Board of Commissioners and other Committees, the Investment Team, the Investment Tender Committee, and/or operational functions of the Company, including its subsidiaries.
- Draft, evaluate, amend, and implement the Charter, including determining procedures and the scope of the Investment Committee's work with the approval of the Board of Commissioners.
- If necessary, the committee can employ experts and/or consultants to assist the committee with the Company's business development plans with written approval from the Board of Commissioners, with expenses borne by the Company from the budget allocated to the Board of Commissioners.



Rapat Komite Investasi Investment Committee Meetings

Komite Investasi secara rutin menggelar rapat komite untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan rencana investasi di Perusahaan. Berdasarkan piagam Komite Investasi, rapat dapat diadakan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun. Pelaksanaan rapat dapat digabung bersama dengan pelaksanaan rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan setiap bulan.

Pada tahun 2023, Komite Investasi telah melaksanakan rapat sebanyak 4 (empat) kali dengan agenda, diantaranya: (1) Rencana Kerja dan Progres Digitalisasi PTK; (2) Progress Investasi dan Perkembangan Dinamika ABI pada Tahun 2023, (3) Kinerja Fungsi Marketing dan Fungsi Marine Business Unit, serta (4) Pembahasan *Progress* dan Rencana Digitalisasi *Procurement*. Berikut frekuensi kehadiran masing-masing anggota Komite dalam rapat:

The Investment Committee routinely holds committee meetings to discuss matters related to the Company's investment plans. According to the Investment Committee Charter, meetings can be held at least 4 (four) times a year. These meetings can be combined with the Board of Commissioners' monthly meetings.

In 2023, the Investment Committee held 4 (four) meetings with agendas, including: (1) PTK's Work Plan and Digitalization Progress; (2) Investment Progress and ABI Dynamics in 2023, (3) Performance of the Marketing Function and Marine Business Unit Function, and Discussion on Procurement Progress and Digitalization Plan. The attendance frequency of each committee member in the meetings is as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Wajib Rapat Number of Mandatory Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Tingkat Kehadiran Attendance Rate
Andi Saiful Haq	Ketua Chairman	4	2	50%
Aldo Maudy Gantirta*	Anggota Member	3	3	100%
Edi Ariawan**	Anggota Member	1	1	100%
Dian Vita Alpha Suandi***	Anggota Member	1	1	100%

Keterangan: *) Berhenti menjabat sejak 31 Oktober 2023; **) Mulai menjabat sejak 5 Juni 2023; ***) Mulai menjabat sejak 1 November 2023

*Note: *) Resigned as of October 31, 2023; **) Started serving as of June 5, 2023; ***) Started serving as of November 1, 2023

Pengembangan Kompetensi Tahun 2023 Competency Development in 2023

Kebijakan PTK terkait pengembangan kompetensi Komite Investasi mengacu pada ketentuan pengembangan kompetensi sebagaimana tercantum dalam Piagam Komite Investasi. Sepanjang tahun 2023 anggota Komite Investasi telah mengikuti berbagai program pendidikan dan pelatihan sebagai berikut.

PTK's policy on the competency development of the Investment Committee refers to the competency development provisions outlined in the Investment Committee Charter. Throughout 2023, Investment Committee members participated in various education and training programs as follows.

Nama dan Jabatan Name and Position	Nama Pelatihan Name and Position	Waktu Pelaksanaan Execution time	Penyelenggara Organizer
Andi Saiful Haq (Ketua Komite) (Committee Chair)	Pelatihan & Sertifikasi "Certified Risk Professional (CRP)" Training & Certification "Certified Risk Professional (CRP)"	11 Desember 2023 December 11, 2023	PT IRBA Group Indonesia

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Investasi Investment Committee Performance Report

Sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawabnya, Sepanjang tahun 2023 Komite Investasi telah melakukan telaah dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris antara lain terkait:

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap realisasi kinerja investasi tahun berjalan yang disampaikan Direksi melalui laporan kinerja manajemen setiap bulan.
2. Melakukan *review* atas rencana investasi jangka pendek dalam usulan RKAP tahun 2023 berikut revisinya, serta *rolling out* rencana jangka panjang (RJPP).
3. Melakukan *review* atas rencana divestasi atau usulan FUPP yang tersebut dalam rencana kerja PTK tahun berjalan.

As part of its duties and responsibilities, throughout 2023, the Investment Committee conducted reviews and provided recommendations to the Board of Commissioners, including:

1. Monitoring and evaluating the realization of current year investment performance as reported by the Board of Directors through monthly management performance reports.
2. Reviewing short-term investment plans in the proposed 2023 RKAP and its revisions, as well as the rolling out of the long-term plan (RJPP).
3. Reviewing divestment plans or proposed FUPP included in PTK's current year work plan.

4. *Monitoring dan review* secara periodik kegiatan investasi yang telah dilaksanakan oleh Perusahaan dan Anak Perusahaan yang meliputi kepatuhan dalam melaksanakan kebijakan investasi yang telah ditetapkan termasuk bekerja sama dengan Komite Manajemen Risiko terkait penerapan tingkat risiko usaha terhadap rencana dan target kinerja Direksi tahun berjalan.
 5. Memberikan masukan dan pendapat bagi Dewan Komisaris atas efektivitas kebijakan investasi dan pengurusan perusahaan terkait aspek Pemasaran dan IT.
 6. Melakukan rapat koordinasi dengan fungsi *Strategic Planning & Business Development* (SPBD) dan pelaksana eksekusi proyek investasi terkait pencapaian realisasi fisik bulanan dan status kendala serta tindak lanjut yang diperlukan.
 7. Melakukan rapat koordinasi dengan Direktorat Pemasaran dan yang terkait dalam hal penerapan pencapaian target kinerja di bidang Pemasaran dan IT.
 8. Melaksanakan kunjungan langsung (*site visit*) ke beberapa proyek investasi sebagai bagian dari tahapan *close monitoring*.
4. Periodically monitoring and reviewing investment activities carried out by the Company and its subsidiaries, including compliance with established investment policies, in collaboration with the Risk Management Committee regarding the application of business risk levels to the current year's Board of Directors' performance plans and targets.
 5. Providing input and opinions to the Board of Commissioners on the effectiveness of investment policies and company management related to Marketing and IT aspects.
 6. Holding coordination meetings with the Strategic Planning & Business Development (SPBD) function and investment project execution teams to review monthly physical realization achievements, status of obstacles, and necessary follow-up actions.
 7. Holding coordination meetings with the Marketing Directorate and related parties concerning the implementation of performance target achievements in the fields of Marketing and IT.
 8. Conducting site visits to several investment projects as part of close monitoring stages.

Penilaian Kinerja Komite Investasi

Performance Evaluation of the Investment Committee

Penilaian kinerja Komite Investasi dilakukan oleh Dewan Komisaris melalui pemantauan dan evaluasi atas laporan kinerja Komite dalam mencapai target-target dari program kerja Komite. Adapun realisasi atas evaluasi Komite Investasi tahun 2023, adalah sebagai berikut:

The performance evaluation of the Investment Committee is conducted by the Board of Commissioners through monitoring and evaluating the committee's performance reports in achieving the committee's work program targets. The realization of the Investment Committee's evaluation for 2023 is as follows:

No	Nama Anggota Komite Name of Committee Member	Skor Nilai Value Score	Predikat Predicate
1	Andi Saiful Haq	95,00	High
2	Edi Ariawan	98,30	High
3	Dian Vita Alpha Suandi	96,70	High

Sekretaris Dewan Komisaris

Secretary of the Board of Commissioners

Dewan Komisaris telah membentuk Sekretaris Dewan Komisaris sebagai salah satu organ pendukung yang dalam menunjang pelaksanaan fungsi dan efektivitas perannya. Sekretaris Dewan Komisaris memiliki tugas dan fungsi dalam hal penyelenggaraan kegiatan administrasi dan kesekretariatan di lingkup tugas pengawasan Dewan Komisaris dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.

The Board of Commissioners has established a Secretary of the Board of Commissioners to support the execution of its functions and enhance its effectiveness. The Secretary is responsible for administrative and secretarial activities within the scope of the Board's supervisory duties and reports directly to the Board of Commissioners.

Ketentuan Masa Jabatan Sekretaris Dewan Komisaris

Tenure of the Secretary of the Board of Commissioners

Masa jabatan Sekretaris Dewan Komisaris mengacu pada Board Manual, dan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Di mana masa Sekretaris Dewan Komisaris ditetapkan oleh Dewan Komisaris maksimum 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling lama 2 (dua) tahun dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

The tenure of the Secretary of the Board of Commissioners is defined in the Board Manual and the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-3/MBU/03/2023 regarding the Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises. The tenure is set by the Board of Commissioners for a maximum of three years and may be extended for up to two years, without prejudice to the Board's right to terminate the appointment at any time.

Profil Sekretaris Dewan Komisaris

Profile of the Secretary of the Board of Commissioners

Pada tahun 2023, terdapat pergantian Sekretaris Dewan Komisaris yang sebelumnya dijabat oleh Dian Vita Alpha Suandi yang menjabat sampai dengan 31 Oktober 2023. Sekretaris Dewan Komisaris saat ini dijabat oleh Venny Veranica yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. SK- 145/DEKOM.PTK/2023 tanggal 17 Oktober 2023. Pengangkatan Sekretaris Dewan Komisaris telah berdasarkan pada latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja yang dipersyaratkan Perusahaan.

In 2023, there was a change in the Secretary of the Board of Commissioners. Dian Vita Alpha Suandi served until October 31, 2023, and was succeeded by Venny Veranica, appointed by the Board of Commissioners' Decree No. SK-145/DEKOM.PTK/2023 on October 17, 2023. The appointment of the Secretary of the Board of Commissioners was based on the required educational background and work experience.



Dian Vita Alpha Suandi

Sekretaris Dewan Komisaris
(1 Januari - 31 Oktober 2023)

Secretary to the Board of Commissioners
(1 January - 31 October 2023)

Warga Negara Indonesia
Berusia 41 tahun, kelahiran Yogyakarta,
4 September 1982.
Domisili: Jakarta

Indonesian
41 years old, born in Yogyakarta,
September 4, 1982.
Based in Jakarta

Riwayat Pendidikan:

Lulusan Sarjana Teknik Industri - Institut Teknologi Bandung (2004).

Education History and Certifications:

Graduated with Bachelor of Industrial Engineering - Bandung Institute of Technology (2004).

Sertifikasi:

- Certified Project Management Professional (PMP)
- Certified Professional Marketer Asia (CPMA)

Certification:

- Certified Project Management Professional (PMP)
- Certified Professional Marketer Asia (CPMA)

Pengalaman Kerja:

Pernah menjabat di Accenture (2005-2007) dan Pertamina (2007-sekarang).

Work Experience:

Previously served at Accenture (2005-2007) and Pertamina (2007-present).



Venny Veranica

Sekretaris Dewan Komisaris
(1 November - 31 Desember 2023)

Secretary to the Board of Commissioners
(1 November - 31 December 2023)

Warga Negara Indonesia
Berusia 39 tahun, kelahiran Jakarta, 13 Februari 1985.
Domisili: Jakarta

Indonesian
39 years old, born in Jakarta, February 13, 1985.
Based in Jakarta

Riwayat Pendidikan:

Lulusan Sarjana Ekonomi, Universitas Budi Luhur - Jakarta (2009)

Education History and Certifications:

Bachelor of Economics, Budi Luhur University - Jakarta (2009)

Pengalaman Kerja:

Sebelumnya pernah menjabat sebagai Personal Asisten - DPR RI (2009 - 2014), Administrasi Staff PT Pertamina (Persero)(2014 - 2018) dan Sekretaris VP Dev & Prod Evaluation PT Pertamina (Persero)(2021).

Work Experience:

Previously served as Personal Assistant - DPR RI (2009 - 2014), Administrative Staff of PT Pertamina (Persero)(2014 - 2018) and Secretary to VP Dev & Prod Evaluation of PT Pertamina (Persero)(2021).

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Dewan Komisaris

Duties and Responsibilities of the Secretary of the Board of Commissioners

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Sekretaris Dewan Komisaris melakukan kegiatan untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya berupa:
 - Mempersiapkan rapat termasuk bahan rapat (*briefing sheet*) Dewan Komisaris;
 - Membuat risalah rapat Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perusahaan;
 - Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris, baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat maupun dokumen lainnya;
 - Menyusun Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris;
 - Menyusun Rancangan Laporan-Laporan Dewan Komisaris;
 - Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris.
2. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris Dewan Komisaris selaku pimpinan Sekretariat melaksanakan tugas lain berupa:
 - Memastikan bahwa Dewan Komisaris mematuhi peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip-prinsip GCG;
 - Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;
 - Mengkoordinasikan anggota Komite, jika diperlukan dalam rangka memperlancar tugas Dewan Komisaris;
 - Sebagai penghubung (*liaison officer*) Dewan Komisaris dengan pihak lain.

The duties and responsibilities of the Secretary of the Board of Commissioners are as follows:

1. Assisting the Board of Commissioners by:
 - Preparing meetings, including briefing sheets for the Board of Commissioners meetings;
 - Creating minutes of the Board of Commissioners meetings in accordance with the Company's Articles of Association;
 - Administering documents for the Board of Commissioners, including incoming and outgoing letters, minutes of meetings, and other documents;
 - Drafting the Board of Commissioners' Work Plan and Budget;
 - Drafting the Board of Commissioners' Reports;
 - Performing other tasks assigned by the Board of Commissioners.
2. Additionally, as the head of the Secretariat, the Secretary of the Board of Commissioners performs tasks such as:
 - Ensuring compliance of the Board of Commissioners with laws and regulations and the application of GCG principles;
 - Providing the Board of Commissioners with necessary information regularly or upon request;
 - Coordinating with committee members, if required, to facilitate the Board of Commissioners' tasks;
 - Acting as a liaison officer between the Board of Commissioners and other parties.

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Dewan Komisaris Tahun 2023

Execution of Duties by the Secretary of the Board of Commissioners in 2023

Sepanjang tahun 2023 Sekretaris Dewan Komisaris telah melaksanakan fungsi dan tugasnya membantu dan mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi melalui pemberian informasi, review, kajian, dan laporan kepada Dewan Komisaris agar fungsi pengawasan Dewan Komisaris berjalan efektif, yang secara umum meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Membantu menyusun Realisasi Rencana Kerja Dewan Komisaris tahun 2023 dan Rencana Kerja Dewan Komisaris tahun 2024.
2. Memantau, me-review dan menginformasikan perkembangan peraturan perundang-undangan terbaru untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris, termasuk pembuatan, pembaruan/penyesuaian Surat Keputusan Dewan Komisaris serta piagam komite-komite di bawah Dewan Komisaris berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Mengoordinasikan dan menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris termasuk mempersiapkan jadwal rapat, materi rapat, menyusun dan mengadministrasikan risalah rapat Dewan Komisaris, menyampaikan saran dan pendapat Dewan Komisaris berdasarkan hasil rapat Dewan Komisaris kepada Direksi serta melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut saran dan pendapat Dewan Komisaris tersebut.
4. Membantu dan mendukung pelaksanaan tugas Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris sebagai bagian dari tugas Dewan Komisaris berdasarkan peraturan yang berlaku, yaitu melaksanakan tugas administratif terkait kelancaran tugas komisaris, yaitu pengelolaan, penyimpanan dan administrasi dokumen/surat menyurat Komisaris termasuk mempersiapkan surat-surat persetujuan serta masukan/saran Dewan Komisaris yang bersifat strategis yang disampaikan kepada Direksi.

Throughout 2023, the Secretary of the Board of Commissioners fulfilled their role in supporting the Board's supervision of the Directors' duties and responsibilities by providing information, reviews, studies, and reports to the Board of Commissioners, ensuring effective oversight. This included:

1. Assisting in drafting the Realization of the Board of Commissioners' Work Plan for 2023 and the Work Plan for 2024;
2. Monitoring, reviewing, and informing the Board of Commissioners of the latest regulations, including creating, updating, or adjusting the Board of Commissioners' Decrees and committee charters as per applicable laws;
3. Coordinating and organizing Board of Commissioners meetings, including scheduling, preparing materials, drafting and administering meeting minutes, providing recommendations from the Board of Commissioners to the Directors, and monitoring follow-up actions on these recommendations;
4. Supporting the tasks of the committees under the Board of Commissioners, including administrative tasks related to the smooth execution of the commissioners' duties, managing, storing, and administering documents/correspondence, and preparing approval letters and strategic suggestions from the Board of Commissioners to the Directors.



Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary

Sekretaris Perusahaan memiliki peran penting dalam menjembatani kepentingan antara Perusahaan dengan pemegang saham, regulator serta pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya. Saat ini Fungsi Sekretaris Perusahaan dijalankan oleh Vice President (VP) Legal & Relation yang memiliki posisi strategis sebagai wakil Perusahaan dalam berhubungan dengan Pemegang Saham, bertanggung jawab terhadap administrasi dokumen dan notulen rapat, penyusunan kebijakan, perencanaan dan pengendalian komunikasi korporat dengan para *stakeholders*.

Lebih lanjut, fungsi Sekretaris Perusahaan saat ini juga termasuk memastikan penciptaan nilai pemegang saham yang berkelanjutan dengan memastikan pemenuhan kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dari aspek *governance and compliance*.

The Corporate Secretary plays a crucial role in bridging the Company with shareholders, regulators, and other stakeholders. Currently, the Corporate Secretary Function is led by the Vice President (VP) Legal & Relation, who strategically represents the Company in dealing with Shareholders, overseeing document administration and meeting minutes, policy drafting, and corporate communication planning and control with stakeholders.

Furthermore, the current Corporate Secretary function also includes ensuring sustainable shareholder value creation by ensuring the Company's compliance with applicable regulations, including governance and compliance aspects.

Profil Pejabat Sekretaris Perusahaan

Profile of the Corporate Secretary Officer

Per 31 Desember 2023 Sekretaris Perusahaan dijabat oleh Sonny Mirath yang ditunjuk Direksi sebagai VP Legal and Relation berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. Kpts36/C00000/2020-S0. Pengangkatan VP Legal and Relation sebagai Sekretaris Perusahaan ini telah mempertimbangkan kualifikasi pendidikan, pengalaman kerja dan kualifikasi yang dipersyaratkan oleh Perusahaan.

As of December 31, 2023, the Corporate Secretary is held by Sonny Mirath, appointed by the Board of Directors as VP Legal and Relation based on Board of Directors Decision No. Kpts36/C00000/2020-S0. The appointment of the VP Legal and Relation as Corporate Secretary has considered the educational qualifications, work experience, and qualifications required by the Company.



Sonny Mirath
VP Legal & Relation

Warga Negara Indonesia
Berusia 39 tahun, kelahiran Jakarta, 22 April 1985.
Domisili: Jakarta

Indonesian
39 years old, born in Jakarta, April 22, 1985.
Based in Jakarta

Riwayat Pendidikan:

Lulusan Universitas Padjadjaran/Bandung S1-Komunikasi tahun 2007.

Sertifikasi:

Sertifikasi Kompetensi-Sertifikasi ERM ISO 31000 CRP CRA-Bandung.

Pelatihan Tahun 2023:

- Mobile Learning - Fundamental Behavior Based Safety (BBS);
- Training Trailblazer (TDA) Completion - All Stages.

Pengalaman Kerja:

Memulai karir pada PT Agrakom Para Relatika Jakarta pada tahun 2007-2009. Sebelum menjabat sebagai VP Legal & Relation di Perusahaan, Beliau juga telah menjabat di PT Pertamina (Persero) dengan posisi jabatan diantaranya: Bimbingan Profesi Sarjana (BPS) Pertamina (2009), Early Professional Development Kantor Pusat PT Pertamina (Persero)-Corporate Secretary (2010-2011); Assistant Customer Relation Sumatera 1-Medan (2011-2013); Assistant Customer Relation Sumatera 1-Medan (2013); Junior Officer Administration Kantor Pusat PT Pertamina (Persero) (2013); Junior Officer BOD Support Kantor Pusat PT Pertamina (Persero) (2013-2015); Officer Business Support & Facilitation Customer Relation Sumatera 1-Medan (2011-2013); Officer CNG Industry Kantor Pusat PT Pertamina (Persero) (2016-2018); Analyst Business Advancement Kantor Pusat PT Pertamina (Persero) (2018-2019); Assistant Man Commercial Operation & Adm PIEP Indonesia-Jakarta Office (2019-2021); Assistant Manager CommProducts, OpExl & Trading Upstream Regional 5 Head Office-Jakarta (2021-2022); Head of Commercial Opportunity Upstream Reg 5 Head Office-Jakarta (2022-2023).

Educational background:

Graduated from Padjadjaran University/Bandung Bachelor of Communication in 2007.

Certification:

Competency Certification-ERM ISO 31000 CRP CRA-Bandung Certification.

Training in 2023:

- Mobile Learning - Fundamental Behavior Based Safety (BBS);
- Training Trailblazer (TDA) Completion - All Stages.

Work experience:

Started his career at PT Agrakom Para Relatika Jakarta in 2007-2009. Before serving as VP Legal & Relations at the Company, he also served at PT Pertamina (Persero) in positions including: Pertamina Undergraduate Professional Guidance (BPS) (2009), Early Professional Development at PT Pertamina (Persero) Head Office-Corporate Secretary (2010-2011); Assistant Customer Relations Sumatra 1-Medan (2011-2013); Assistant Customer Relations Sumatra 1-Medan (2013); Junior Officer Administration Head Office PT Pertamina (Persero) (2013); Junior Officer BOD Support PT Pertamina (Persero) Head Office (2013-2015); Officer Business Support & Facilitation Head Office PT Pertamina (Persero) (2015-2016); CNG Industry Officer PT Pertamina (Persero) Head Office (2016-2018); Business Advancement Analyst at PT Pertamina (Persero) Head Office (2018-2019); Assistant Man Commercial Operation & Adm PIEP Indonesia-Jakarta Office (2019-2021); Assistant Manager CommProducts, OpExl & Trading Upstream Regional 5 Head Office-Jakarta (2021-2022); Head of Commercial Opportunity Upstream Reg 5 Head Office-Jakarta (2022-2023).

Rangkap Jabatan:
Tidak ada

Concurrent Position(s):
N/A

Hubungan Afiliasi:
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham.

Affiliate Relationship:
Has no affiliation with members of the Board of Commissioners, Directors and/or Shareholders.

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Duties and Responsibilities of the Corporate Secretary

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Mengevaluasi dan merekomendasikan sistem tata kerja Legal & Relation kepada Direksi berdasarkan pedoman yang berlaku.
2. Menyusun rencana kerja dan anggaran jangka pendek dan jangka panjang Corporate Secretary serta memonitor, dan mengevaluasi pelaksanaannya.
3. Memastikan pengesahan dokumen RJPP dan RKAP dalam RUPS sesuai dengan target yang ditentukan.
4. Mengkoordinir agenda rapat Direksi dan rapat manajemen.
5. Membangun, memelihara, dan meningkatkan citra positif perusahaan di mata masyarakat dan *stakeholders*, serta meminimalisir dan menghindarkan Perusahaan dari timbulnya citra negatif, permasalahan hukum litigasi dan non-litigasi serta kehumasan yang berdampak pada Perusahaan.
6. Mengevaluasi dan memonitor pelaksanaan program-program CSR secara efektif, sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan tepat sasaran, sebagai bagian dari kepatuhan korporasi sekaligus meningkatkan citra positif Perusahaan di mata masyarakat.
7. Memastikan laporan kegiatan pengembangan, pembinaan, penerapan dan penegakan prinsip-prinsip GCG.
8. Mengkomunikasikan kebijakan Perusahaan dan pemerintah baik secara internal maupun eksternal perusahaan.
9. Menyelenggarakan kegiatan administrasi kesekretariatan Perusahaan, termasuk agenda Direksi, pemeliharaan database, dokumen asli, dan laporan-laporan Perusahaan.
10. Menyetujui dan memastikan kegiatan protokoler Direksi Perusahaan.
11. Mengendalikan data dan informasi manajemen yang akurat dan valid bagi kepentingan Perusahaan dan pemegang saham secara periodik dan tahunan.
12. Memastikan *update* peraturan perundang-undangan dan regulasi lain yang berkaitan dengan proses bisnis dan produk (*compliance issue*), serta perizinan dan aspek hukum lain bagi Perusahaan dan anak perusahaan secara tepat waktu.
13. Menyetujui laporan bulanan/periodik.

The duties and responsibilities of the Corporate Secretary are as follows:

1. Evaluate and recommend Legal & Relation workflow systems to the board of directors based on applicable guidelines.
2. Develop short-term and long-term work plans and budgets for the Corporate Secretary and monitor and evaluate their implementation.
3. Ensure the approval of RJPP and RKAP documents in the GMS according to the specified targets.
4. Coordinate the agenda of board of directors' meetings and management meetings.
5. Build, maintain, and enhance the Company's positive image in the eyes of the public and stakeholders, as well as minimize and avoid negative image, legal litigation and non-litigation issues, and public relations problems affecting the Company.
6. Evaluate and monitor the effective implementation of CSR programs, in line with established plans and targets, as part of corporate compliance while enhancing the Company's positive image in the eyes of the public.
7. Ensure reports on the development, implementation, and enforcement of GCG principles.
8. Communicate Company policies and government policies both internally and externally.
9. Organize Company secretarial administrative activities, including board agendas, database maintenance, original documents, and Company reports.
10. Approve and ensure the Company's directorial protocol activities.
11. Control accurate and valid management data and information periodically and annually for the Company's and shareholders' interests.
12. Ensure the updating of legal regulations and other regulations related to business processes and products (*compliance issues*), as well as licensing and other legal aspects for the Company and its subsidiaries in a timely manner.
13. Approve monthly/periodic reports.

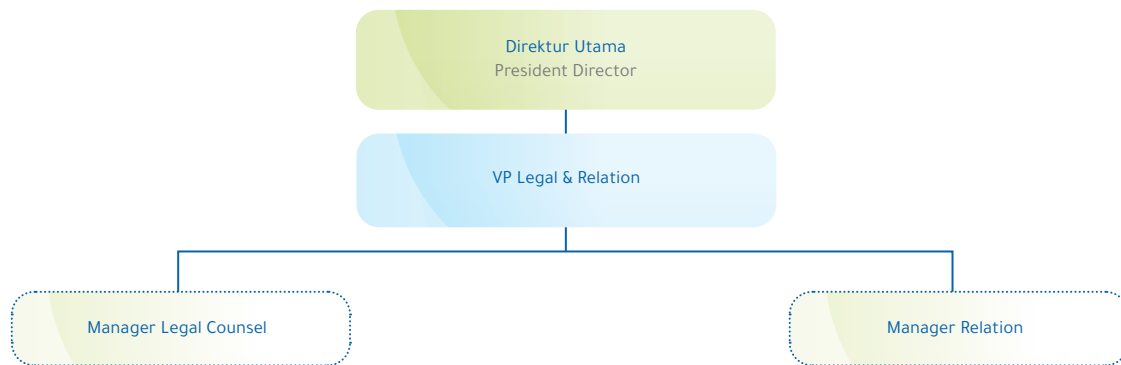


Struktur Organisasi Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary Organizational Structure

Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Sekretaris Perusahaan membawahi beberapa fungsi dan bidang, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Direktur Utama No. Kpts-107/PTK0000/2023-S8 tanggal 21 Desember 2023 tentang Struktur Organisasi BOD-1 Kebawah PT Pertamina Trans Kontinental.

The Corporate Secretary reports directly to the President Director. The Corporate Secretary oversees several functions and areas, as outlined in President Director Decision No. Kpts-107/PTK0000/2023-S8 dated December 21, 2023, regarding the Organizational Structure of the BOD-1 Downward PT Pertamina Trans Kontinental.



Pedoman Kerja Sekretaris Perusahaan

Guidelines for the Corporate Secretary's Work

Pelaksanaan Fungsi Sekretaris Perusahaan mengacu pada *Board Manual* serta uraian tugas dan tanggung jawab yang tercantum dalam Surat Keputusan Direksi terkait pembentukan organ Sekretaris Perusahaan. Pedoman tersebut mencakup tugas pokok Sekretaris Perusahaan, uraian tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan, serta pedoman komunikasi Perusahaan dan hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Fungsi Sekretaris Perusahaan.

The implementation of the Corporate Secretary Function refers to the Board Manual and the descriptions of duties and responsibilities stated in the Board of Directors' Decree regarding the establishment of the Corporate Secretary organ. These guidelines include the main tasks of the Corporate Secretary, descriptions of the Corporate Secretary's duties and responsibilities, as well as guidelines for corporate communication and other matters related to the implementation of the Corporate Secretary Function.

Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

Development of Corporate Secretary Competencies

Per 31 Desember 2023, VP Legal & Relation dan tim Divisi Legal & Relation, telah mengikuti program pengembangan kompetensi berupa pendidikan dan pelatihan, yang diuraikan pada tabel berikut ini.

As of December 31, 2023, the VP Legal & Relation and the Legal & Relation Division team have participated in competency development programs such as education and training, as outlined in the table below.

Nama Pelatihan Training Name	Waktu Pelaksanaan Execution time	Tempat Pelaksanaan Place of execution	Peserta Pelatihan Training Participants
<i>Mobile Learning - Respectful Workplace</i>	31 Maret 2023 March 31, 2023	Jakarta	1. Aafi Kurnia Pratama 2. Prasetyo Kris 3. Raizha Champaino Mohans
<i>Mobile Learning - SOVAC Pertamina Best</i>	30 April 2023 April 30, 2023	Jakarta	1. Aafi Kurnia Pratama 2. Maria Mardiana 3. Prasetyo Kris 4. Dhief Fadhdilla Ramadhani
<i>Mobile Learning - Leadership</i>	31 Mei 2023 May 31, 2023	Jakarta	1. Maria Mardiana 2. Prasetyo Kris
<i>Mobile Learning - Basic HSSE Mand. Training</i>	31 Mei 2023 May 31, 2023	Jakarta	1. Raizha Champaino Mohans
<i>Mobile Learning - TKDN</i>			
<i>Mobile Learning - Fundamental Behavior Based Safety (BBS)</i>	31 Mei 2023 May 31, 2023	Jakarta	1. Yoko Hidayat 2. Syafaat Yudha Perwira
<i>Workshop Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) & Security Risk Assessment (SRA)</i>	27 Juni 2023 June 27, 2023	Jakarta	1. Raizha Champaino Mohans
<i>Mobile Learning - Fundamental Behavior Based Safety (BBS)</i>	30 Juni 2023 June 30, 2023	Jakarta	1. Sonny Mirath 2. Prasetyo Kris
<i>Training Trailblazer (TDA) Completion - All Stages</i>	31 Juli 2023 July 31, 2023	Jakarta	1. Sonny Mirath
<i>Mobile Learning - Fraud Awareness</i>	31 Juli 2023 July 31, 2023	Jakarta	1. Dhief Fadhdilla Ramadhani 2. Raizha Champaino Mohans 3. Sherly Margareth

Nama Pelatihan Training Name	Waktu Pelaksanaan Execution time	Tempat Pelaksanaan Place of execution	Peserta Pelatihan Training Participants
<i>Training Boost Your Professional Image Inside Out Through Communication</i>	26 Agustus 2023 August 26, 2023	Bogor	1. Aafi Kurnia Pratama
<i>Mobile Learning - Fraud Awareness</i>	31 Agustus 2023 August 31, 2023	Jakarta	
<i>Mobile Learning - SOVAC Pertamina Best</i>	31 Agustus 2023 August 31, 2023	Jakarta	1. Raizha Champaino Mohans
<i>Training PKPU dan Kepailitan serta Sertifikasi Kurator</i>	21-22 September 2023 September 21-22, 2023	Jakarta	1. Prasetyo Kris
<i>Mobile Learning - Fundamental Behavior Based Safety (BBS)</i>	30 September 2023 September 30, 2023	Jakarta	1. Sherly Margareth
<i>Mobile Learning - HSE Mandatory CLSR</i>			
<i>Mobile Learning - Respectful Workplace</i>	30 November 2023 September 30, 2023	Jakarta	1. Syafaat Yudha Perwira 2. Sherly Margareth

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan Tahun 2023

Performance of Corporate Secretary Duties in 2023

Sepanjang tahun 2023 Sekretaris Perusahaan telah melakukan program kerja yang terdiri dari berbagai kegiatan dan penyampaian laporan. Realisasi program kerja Sekretaris Perusahaan tersebut antara lain:

1. Mengoordinasikan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham. Pada tahun 2023, PTK telah melaksanakan RUPS Tahunan sebanyak 1 (satu) kali. Selain itu, di sepanjang tahun 2023 Pemegang Saham telah mengeluarkan 7 (tujuh) Keputusan Pemegang Saham secara Sirkuler;
2. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan rapat gabungan bersama Dewan Komisaris: Selama tahun 2023 Sekretaris Perusahaan telah menggordinasikan dan mendokumentasikan rapat internal Direksi sebanyak 39 kali rapat dan 15 kali rapat gabungan bersama Dewan Komisaris;
3. Penyampaian laporan berkala: Sebagai akuntabilitas pelaksanaan tugasnya, Sekretaris Perusahaan telah menyusun dan menyampaikan Laporan Berkala setiap tahunnya kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham. Laporan tersebut diantaranya Laporan Manajemen Triwulan, Laporan Manajemen Tahunan, Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan, serta Laporan Sekretaris Perusahaan.
4. Menyusun dan me-review pedoman Tata Laksana Surat dan Kearsipan PTK, serta mensosialisasikan dan memantau implementasinya.
5. Mengoordinasikan pelaksanaan TJSL Perusahaan sepanjang tahun 2023;
6. Menerbitkan Siaran Pers sebagai upaya Sekretaris Perusahaan untuk membangun komunikasi positif dan persepsi publik;
7. Mengikuti berbagai pelatihan/*training* dalam rangka pengembangan kompetensi pelatihan/*training* Sekretaris Perusahaan tahun 2023;
8. Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, antara lain: Mereview manual, prosedur dan petunjuk kerja di lingkup Sekretaris Perusahaan, melakukan penilaian terhadap penerapan GCG, *monitoring* pencapaian tindak lanjut rekomendasi hasil asesmen GCG tahun sebelumnya serta melakukan sosialisasi kegiatan GCG kepada seluruh karyawan dan mitra kerja.

Throughout 2023, the Corporate Secretary has carried out work programs consisting of various activities and report submissions. The realization of the Corporate Secretary's work program includes:

1. Coordination of General Meeting of Shareholders (GMS) and Circular Resolution of Shareholders. In 2023, the Company held the Annual GMS once. Additionally, during 2023, Shareholders issued 7 (seven) Circular Shareholder Resolutions.
2. Organization and documentation of board meetings and joint meetings with the Board of Commissioners: During 2023, the Corporate Secretary coordinated and documented internal Board meetings 39 times and joint meetings with the Board of Commissioners 15 times.
3. Submission of periodic reports: As part of its accountability for performing its duties, the Corporate Secretary has prepared and submitted Regular Reports annually to the Board of Directors, Board of Commissioners, and Shareholders. These reports include Quarterly Management Reports, Annual Management Reports, Annual Reports, Sustainability Reports, and Corporate Secretary Reports.
4. Preparation and review of Letter and Archive Management Guidelines for the Company, as well as socializing and monitoring their implementation.
5. Coordination of the Company's Legal Entity Registration (TJSL) implementation throughout 2023.
6. Issuance of press releases as part of the Corporate Secretary's efforts to build positive communication and public perception, including through press releases.
7. Participation in various training programs for the development of Corporate Secretary competencies in 2023.
8. Implementation of Good Corporate Governance, including: Reviewing manuals, procedures, and work instructions within the scope of the Corporate Secretary, assessing the implementation of GCG, monitoring the achievement of follow-up recommendations from the previous year's GCG assessment, and conducting GCG activity socialization to all employees and business partners.



Penilaian Kinerja Sekretaris Perusahaan

Performance Evaluation of the Corporate Secretary

Penilaian kinerja Sekretaris Perusahaan dilakukan oleh Direksi berdasarkan pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Kinerja Sekretaris Perusahaan diukur dari capaian *Key Performance Indicators* (KPI) Sekretaris Perusahaan yang memuat target-target yang harus dicapai.

Pada tahun 2023, hasil penilaian kinerja Sekretaris Perusahaan berdasarkan KPI mencapai 103,14% dari target sebesar 100%.

The Corporate Secretary's performance assessment is conducted by the Board of Directors based on the performance of its duties and responsibilities. The Corporate Secretary's performance is measured by the achievement of Key Performance Indicators (KPIs) containing targets that must be achieved.

In 2023, the Corporate Secretary's performance assessment based on KPIs reached 103.14% of the target of 100%.

Internal Audit

Internal Audit



Internal Audit adalah fungsi yang memberikan jasa assurance dan consulting secara independen dan obyektif dengan melakukan pendekatan sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal untuk memberikan nilai tambah kepada Perusahaan (PT Pertamina (Persero) selaku Holding, PT Pertamina International Shipping selaku Subholding Integrated Marine Logistics, PT Pertamina Trans Kontinental dan Anak Perusahaan) dalam mencapai tujuannya. Fungsi Internal Audit mempunyai beberapa tanggung jawab di antaranya adalah melaksanakan kegiatan pengawasan melalui kegiatan *assurance* dan *consulting* di seluruh area kegiatan operasional dan bisnis perusahaan serta memastikan aspek integritas, objektivitas, kerahasiaan dan kompetensi diterapkan secara memadai. Peran pengawasan oleh Fungsi Internal Audit adalah berupa kegiatan audit (*assurance provider*) maupun konsultasi yang dilaksanakan secara independen dan obyektif. Dalam perkembangannya, peran konsultasi semakin proaktif dengan menjadi *problem solver*, *insight generator*, dan *trusted advisor*.

Kegiatan audit tetap dilaksanakan bertujuan untuk menilai kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku atau memberikan penilaian atas kecukupan pengendalian internal perusahaan adalah dalam rangka memberikan opini atas penilaian tersebut. Metodologi *Risk Based Audit* (RBA) digunakan pada kegiatan audit dengan tujuan menilai kecukupan pengendalian internal dengan pendekatan *integrated* atau *non integrated audit*. Pendekatan *integrated* audit bertujuan untuk menghasilkan opini yang lebih komprehensif mencakup aspek bisnis dan teknologi informasi yang melekat pada proses bisnis perusahaan. Sedangkan *non integrated audit* bertujuan menghasilkan opini yang fokus terhadap aspek bisnis perusahaan.

Kegiatan konsultasi bertujuan untuk memberikan alternatif solusi permasalahan yang dihadapi manajemen terkait peran Internal Audit sebagai internal konsultan perusahaan dari aspek pengelolaan risiko, pengendalian dan tata kelola perusahaan tanpa mengambil alih tugas dan tanggung jawab manajemen.

PTK meyakini bahwa efektivitas Internal Audit secara obyektif mampu meningkatkan praktik bisnis Perusahaan serta memberikan kontribusi terhadap pengawasan dan pengelolaan yang dilakukan Dewan Komisaris dan Direksi.

Internal Audit is a function that provides assurance and consulting services independently and objectively by systematically and discipline evaluating and enhancing governance, risk management, and internal control to add value to the Company (PT Pertamina (Persero) as the Holding, PT Pertamina International Shipping as the Integrated Marine Logistics Subholding, PT Pertamina Trans Kontinental, and its Subsidiaries) in achieving its objectives. The Internal Audit function has several responsibilities, including conducting oversight activities through assurance and consulting activities across all areas of the company's operational and business activities and ensuring that aspects of integrity, objectivity, confidentiality, and competence are adequately applied. The oversight role by the Internal Audit Function consists of audit activities (assurance provider) as well as consultations conducted independently and objectively. Over time, the consulting role has become more proactive, serving as a problem solver, insight generator, and trusted advisor.

Audit activities continue to be carried out with the aim of assessing compliance with applicable regulations or providing assessments of the adequacy of the company's internal controls to provide opinions on these assessments. The Risk-Based Audit (RBA) methodology is used in audit activities with the aim of assessing the adequacy of internal controls with an integrated or non-integrated audit approach. The integrated audit approach aims to produce a more comprehensive opinion covering business and information technology aspects inherent in the company's business processes. Whereas the non-integrated audit approach aims to produce opinions focused on the company's business aspects.

Consulting activities aim to provide alternative solutions to management's issues related to the Internal Audit's role as the company's internal consultant in terms of risk management, control, and governance without taking over management tasks and responsibilities.

PTK believes that the effectiveness of Internal Audit objectively can improve the Company's business practices and contribute to the oversight and management conducted by the Board of Commissioners and the Board of Directors.

Sebagai mitra strategis Perusahaan, memiliki kewenangan untuk berkomunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta memiliki akses tidak terbatas atas semua data, dokumen, fungsi, kegiatan, dan sumber daya di Perusahaan. Oleh karenanya, Fungsi Internal Audit sering memainkan peran pemantauan yang signifikan dan berkontribusi pada efektivitas yang berkelanjutan.

As a strategic partner of the Company, it has the authority to communicate directly with the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or Audit Committee, as well as having unrestricted access to all data, documents, functions, activities, and resources in the Company. Therefore, the Internal Audit Function often plays a significant monitoring role and contributes to sustainable effectiveness.

Profil Chief Audit Executive

Chief Audit Executive Profile

Fungsi Internal Audit dipimpin oleh seorang Chief Audit Executive yang diangkat oleh Direktur Utama. Hingga akhir Desember 2023, Chief Audit Executive Perusahaan dijabat oleh Triana Aria Rini yang diangkat berdasarkan Keputusan Direksi No. KptsP-049/C0000/2017-S2 tanggal 27 November 2017.

The Internal Audit Function is led by a Chief Audit Executive appointed by the President Director. As of the end of December 2023, the Company's Chief Audit Executive was Triana Aria Rini, appointed based on Board of Directors Decision No. KptsP-049/C0000/2017-S2 on November 27, 2017.



Triana Aria Rini
Chief Audit Executive

Warga Negara Indonesia
Berusia 55 tahun, kelahiran Jakarta,
23 Januari 1968.
Domisili: Jakarta

Indonesian
55 years old, born in Jakarta,
January 23, 1968.
Based in Jakarta

Riwayat Pendidikan:

Sarjana Ekonomi Manajemen dari Universitas Prof Dr Moestopo (1996).

Sertifikasi:

Qualified Internal Auditor (QIA), Certified Risk Associate (CRA), Certified Risk Professional (CRP).

Pengalaman Kerja:

Memulai karier di PTK pada tahun 1990, dengan jabatan penting yang pernah diemban adalah Manager Region Tanjung Priok (2011-2013). Beliau pernah ditunjuk sebagai Direktur PT Peteka Karya Gapura (2013-2016), dan VP Operation (2016-2017).

Rangkap Jabatan:

Tidak ada

Hubungan Afiliasi:

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham.

Educational background:

Bachelor of Management Economics from Prof Dr Moestopo University (1996).

Certification:

Qualified Internal Auditor (QIA), Certified Risk Associate (CRA), Certified Risk Professional.

Work experience:

Started her career at PTK in 1990, with the important position she held as Tanjung Priok Region Manager (2011-2013). She was once appointed as Director of PT Peteka Karya Gapura (2013-2016), and VP Operations (2016-2017).

Concurrent Position(s):

N/A

Affiliate Relationship:

Has no affiliation with members of the Board of Commissioners, Directors and/or Shareholders.

Piagam Internal Audit

Internal Audit Charter

Fungsi Internal Audit telah memiliki Piagam Internal Audit antara Direksi dan Komisaris yang telah disahkan pada tanggal 31 Desember 2022. Piagam Internal Audit (*Audit Charter*) menginformasikan tentang visi, misi, tujuan, ruang lingkup, prinsip utama, kedudukan, independensi, wewenang, tugas dan tanggung jawab serta standar pelaksanaan.

The Internal Audit Function has an Internal Audit Charter between the Board of Directors and the Board of Commissioners that was ratified on December 31, 2022. The Internal Audit Charter informs about the vision, mission, objectives, scope, key principles, position, independence, authority, duties and responsibilities, and standards of implementation.



Tugas dan Tanggung Jawab Responsibilities and Duties

Tugas dan tanggung jawab Internal Audit adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan pengawasan melalui kegiatan *assurance* dan *consulting* di seluruh area kegiatan operasional dan bisnis Perusahaan.
2. Memastikan aspek integritas, objektivitas, kerahasiaan dan kompetensi diterapkan secara memadai.
3. Menyusun dan mengusulkan *Annual Audit Plan* (AAP) yang mencakup antara lain objek penugasan, jadwal penugasan, dan *resources* yang dibutuhkan untuk mendapatkan persetujuan Direktur Utama, dan Dewan Komisaris atas rekomendasi Komite Audit.
4. Melakukan review AAP yang sedang berjalan, untuk memastikan kesesuaiannya dengan proses bisnis dan risiko Perusahaan, serta lingkup dan tujuan penugasan.
5. Mengkomunikasikan keterbatasan sumber daya pelaksanaan penugasan, perubahan AAP, dan perubahan arah kebijakan kepada Direktur Utama, dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
6. Memastikan setiap penugasan dilakukan dengan supervisi dan didukung dengan kertas kerja yang memadai, serta rekomendasi, *advice*, dan insight yang disampaikan dapat diimplementasikan oleh Auditee.
7. Memastikan Fungsi Internal Audit secara kolektif memiliki/ memperoleh pengetahuan, keterampilan dan kompetensi yang memadai.
8. Melaksanakan koordinasi pengelolaan kegiatan Internal Audit yang tidak terbatas pada kegiatan *assurance* dan *consulting* dengan Internal Audit Subholding, Anggota *Subholding*, dan Anak Perusahaan *Services*.
9. Menguji dan mengevaluasi efektivitas pengendalian dan manajemen risiko.
10. Melaksanakan pemeriksaan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait.
11. Mengidentifikasi alternatif perbaikan dan peningkatan efisiensi operasional Perusahaan.
12. Melaksanakan koordinasi dengan Komite Audit.
13. Melaporkan hasil pengawasan kepada Direktur Utama dan Direktur lainnya yang relevan.
14. Memonitor pelaksanaan tindak lanjut hasil internal audit, eksternal dan institusi pengawasan lainnya dan melaporkan secara periodik kepada Direktur Utama dan Komite Audit.
15. Melaksanakan koordinasi kegiatan audit/ pemeriksaan oleh auditor eksternal.
16. Melaksanakan koordinasi dengan Fungsi Pengawas Perusahaan dalam melakukan tindak lanjut atas pengaduan/penyingkapan melalui *Whistleblowing System* (WBS) dan pengaduan masyarakat atau pihak lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
17. Membantu pelaksanaan audit investigasi terhadap masalah yang dapat menimbulkan kerugian bagi Perusahaan dan Anak Perusahaan.
18. Melaksanakan evaluasi dan peningkatan mutu (*improvement program*) kegiatan Internal Audit.
19. Melaporkan hasil kegiatan Internal Audit kepada Direktur Utama, dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.

The responsibilities and duties of Internal Audit are as follows:

1. Conduct oversight activities through *assurance* and *consulting* across all areas of the Company's operational and business activities.
2. Ensure that aspects of integrity, objectivity, confidentiality, and competence are adequately applied.
3. Develop and propose the *Annual Audit Plan* (AAP), including assignment objects, assignment schedules, and required resources, for approval by the President Director and the Board of Commissioners upon the Audit Committee's recommendation.
4. Review the ongoing AAP to ensure its alignment with the Company's business processes and risks, as well as the assignment's scope and objectives.
5. Communicate resource constraints for assignment implementation, AAP changes, and policy direction changes to the President Director and the Board of Commissioners through the Audit Committee.
6. Ensure that each assignment is supervised and supported by adequate work papers, and recommendations, advice, and insights provided can be implemented by the Auditee.
7. Ensure that the Internal Audit Function collectively possesses/ obtains adequate knowledge, skills, and competencies.
8. Coordinate the management of Internal Audit activities not limited to *assurance* and *consulting* activities with Internal Audit Subholding, Subholding Members, and Subsidiaries Services.
9. Test and evaluate the effectiveness of controls and risk management.
10. Conduct compliance examinations with relevant regulations.
11. Identify alternative improvements and operational efficiency enhancements for the Company.
12. Coordinate with the Audit Committee.
13. Report oversight results to the President Director and other relevant Directors.
14. Monitor the implementation of internal, external audit results, and other oversight institutions and periodically report to the President Director and the Audit Committee.
15. Coordinate audit/examination activities with external auditors.
16. Coordinate with the Company's Supervisory Function in following up on disclosures/complaints through the Whistleblowing System (WBS) and public or other party complaints in accordance with applicable regulations.
17. Assist in conducting investigative audits into issues that may cause losses to the Company and its Subsidiaries.
18. Conduct evaluation and quality improvement (*improvement program*) of Internal Audit activities.
19. Report the results of Internal Audit activities to the President Director and the Board of Commissioners through the Audit Committee.



20. Melaksanakan penugasan lain yang diamanatkan oleh Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit.
21. Berkoordinasi dengan Chief Audit Executive PT Pertamina (Persero) dalam pelaksanaan kegiatan Internal Audit yang dikelola secara tersentralisasi di *Holding* sesuai dengan Tabel RASCI yang telah disetujui oleh Direktur Utama PT Pertamina (Persero).

20. Perform other assignments mandated by the Board of Directors, the Board of Commissioners, and/or the Audit Committee.
21. Coordinate with the Chief Audit Executive of PT Pertamina (Persero) in carrying out Internal Audit activities managed centrally at the Holding as per the approved RASCI Table by the President Director of PT Pertamina (Persero).

Wewenang Authorities

Dalam menjalankan tugasnya, Internal Audit memiliki kewenangan untuk:

1. Memiliki akses tidak terbatas atas semua data, dokumen, fungsi, kegiatan, dan sumber daya perusahaan lainnya termasuk meminta keterangan atau penjelasan pada semua pejabat/pekerja dalam rangka pelaksanaan tugas Internal Audit.
2. Menentukan ruang lingkup, metode, cara, teknik, strategi dan pendekatan audit.
3. Melaksanakan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit.
4. Melaksanakan koordinasi dengan auditor eksternal dan institusi pengawasan lainnya.
5. Meminta atau mendapatkan bantuan dari pekerja internal Perusahaan maupun dari pihak luar Perusahaan, dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
6. Mengadakan rapat secara berkala dan pada saat diperlukan dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/ atau Komite Audit.
7. Menentukan arah kebijakan, struktur organisasi, pengelolaan pembinaan karier pekerja (mutasi dan/ atau promosi), pengelolaan *manpower*, pelaksanaan penugasan, serta melakukan koordinasi dan pengawasan kegiatan terbatas dalam lingkup Internal Audit Perusahaan dan Anak Perusahaan setelah berkonsultasi dengan Chief Audit Executive PT Pertamina International Shipping.
8. Melaksanakan kegiatan *assurance* dan *consulting* dan dapat menjadi bagian dari tim audit investigasi di Perusahaan dan Anak Perusahaan melalui mekanisme yang ditetapkan Chief Audit Executive PT Pertamina (Persero).

In carrying out its duties, Internal Audit has the authority to:

1. Have unrestricted access to all data, documents, functions, activities, and other company resources, including requesting information or explanations from all officers/employees in the performance of Internal Audit duties.
2. Determine the scope, methods, techniques, strategies, and audit approaches.
3. Communicate directly with the Board of Directors, the Board of Commissioners, and/or the Audit Committee.
4. Coordinate with external auditors and other oversight institutions.
5. Request or obtain assistance from internal Company employees or external parties in the performance of their duties.
6. Hold meetings periodically and when necessary with the Board of Directors, the Board of Commissioners, and/or the Audit Committee.
7. Determine policy directions, organizational structures, career development management for employees (transfers and/or promotions), manpower management, assignment implementation, as well as coordinate and supervise limited activities within the scope of the Company's and its Subsidiaries' Internal Audit after consulting with the Chief Audit Executive of PT Pertamina International Shipping.
8. Carry out assurance & consulting activities and may be part of investigation audit teams in the Company and its Subsidiaries through mechanisms established by the Chief Audit Executive of PT Pertamina (Persero).



Kode Etik Auditor Auditor Code of Ethics

1. Integritas (*Integrity*)
Internal Audit Perusahaan menghasilkan kepercayaan dan menyediakan dasar keandalan penilaian yaitu: bersikap jujur, objektif, cermat, loyalitas, serta bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan wajib menghormati, mendukung nama baik Perusahaan dari sisi hukum maupun etika.
2. Objektivitas (*Objectivity*)
Internal Audit Perusahaan harus dapat menjalankan objektivitas yang profesional dalam mengumpulkan, mengevaluasi dan mengkomunikasikan informasi mengenai aktivitas atau proses yang diaudit. Auditor membuat penilaian dengan kondisi yang relevan tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau oleh pihak lain dalam membuat penilaian.

1. Integrity
The Company's Internal Audit builds trust and provides the basis for reliable assessments, namely: being honest, objective, meticulous, loyal, and responsible in carrying out duties and obligations to respect and support the Company's reputation from a legal and ethical perspective.
2. Objectivity
The Company's Internal Audit must maintain professional objectivity in gathering, evaluating, and communicating information about audited activities or processes. Auditors make judgments under relevant conditions without being influenced by personal interests or by others in making judgments.

3. Kerahasiaan (*Confidentiality*)

Internal Audit Perusahaan menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diperoleh dan tidak mengungkapkan informasi tanpa otorisasi pemberi informasi kecuali ada kewajiban hukum atau profesi yang mengharuskan dilakukan hal tersebut dan auditor wajib berhati-hati dalam menggunakan dan menjaga informasi yang dibutuhkan pada saat menjalankan tugas.

4. Kompetensi (*Competency*)

Internal Audit Perusahaan harus menggunakan pengetahuan, keahlian dan pengalaman secara profesional dalam melaksanakan tugas. Untuk itu auditor internal wajib secara berkesinambungan meningkatkan kemampuan, efektivitas dan kualitas layanan sesuai dengan standar profesi auditor internal serta kebijakan dan peraturan Perusahaan.

5. Berwawasan Luas dan Jauh Ke depan (*Visionary*)

Internal Audit Perusahaan harus mampu mengantisipasi potensi berbagai masalah yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan Perusahaan dan membangun komunikasi yang efektif antar auditor Perusahaan.

6. Sanksi

Terhadap pekerja yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik di atas, akan diberikan sanksi sesuai ketentuan perusahaan.

3. Confidentiality

The Company's Internal Audit respects the value and ownership of acquired information and does not disclose information without authorization from the information provider unless there is a legal or professional obligation to do so, and auditors must be careful in using and maintaining the information needed while performing duties.

4. Competency

The Company's Internal Audit must use knowledge, skills, and experience professionally in performing duties. Therefore, internal auditors must continuously improve their abilities, effectiveness, and service quality in accordance with the internal auditor professional standards as well as the Company's policies and regulations.

5. Broad and Forward-Thinking Vision (*Visionary*)

The Company's Internal Audit must be able to anticipate potential issues that may affect the Company's goals and build effective communication among Company auditors.

6. Sanctions

Employees who violate the above code of ethics will be sanctioned in accordance with company regulations.



Struktur dan Kedudukan Internal Audit di Perusahaan Structure and Position of Internal Audit in the Company

Internal Audit dipimpin oleh seorang Chief Audit Executive yang di dalam struktur organisasi Perusahaan kedudukannya berada langsung di bawah Direktur Utama. Chief Audit Executive diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah terlebih dahulu memperoleh rekomendasi dari Chief Audit Executive PT Pertamina (Persero) dan memperoleh persetujuan Dewan Komisaris.

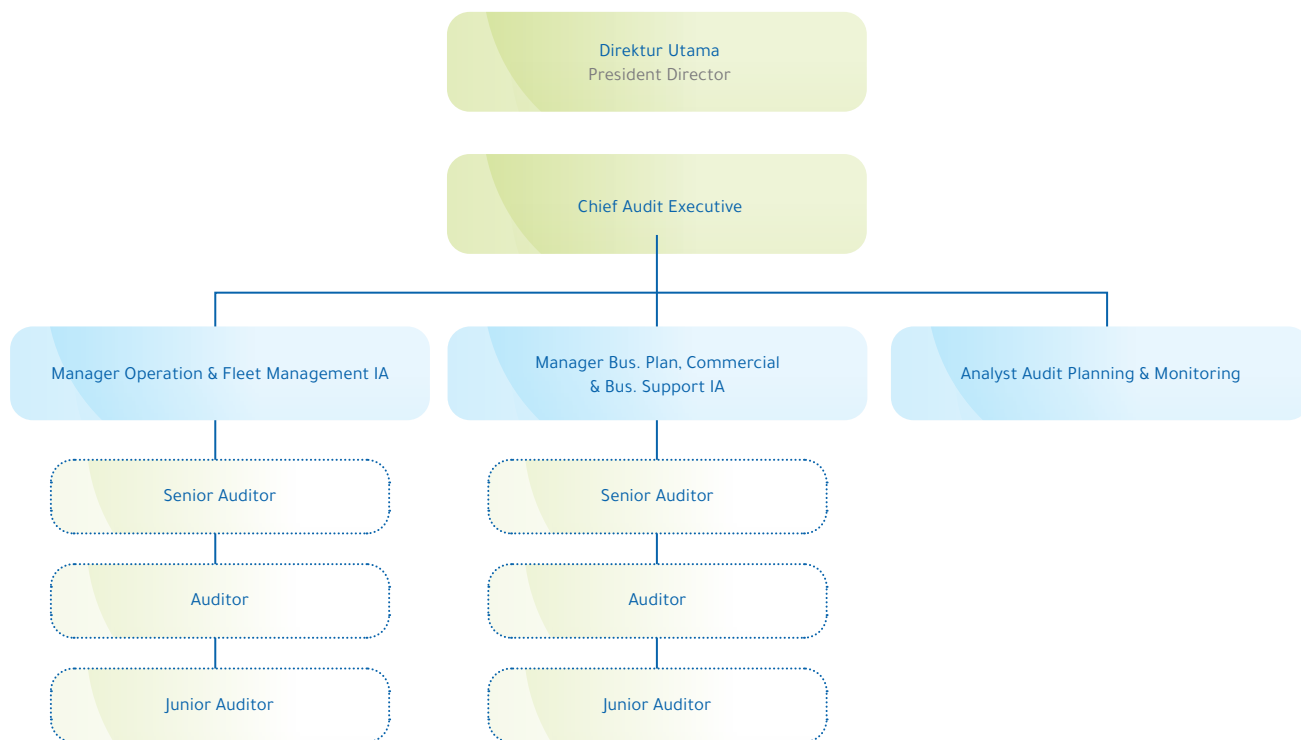
Secara struktural, Chief Audit Executive menjalin komunikasi, koordinasi dan melaporkan kegiatannya kepada Direktur Utama. Secara fungsional, Chief Audit Executive menjalin komunikasi, koordinasi dan melaporkan kegiatannya kepada Komite Audit. Dewan Komisaris atas rekomendasi Komite Audit berperan aktif dalam diskusi terkait remunerasi Chief Audit Executive untuk memutuskan persetujuannya. Dewan Komisaris melalui Komite Audit dapat melakukan komunikasi dengan Chief Audit Executive untuk memastikan ketepatan ruang lingkup penugasan, kecukupan sumber daya, dan tidak ada pembatasan akses data serta informasi yang diperlukan oleh Internal Audit dalam menjalankan kegiatannya.

Struktur organisasi Internal Audit PTK ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama No. Kpts-511/C0000/2021-S0 tanggal 11 Mei 2021 sebagai berikut.

Internal Audit is led by a Chief Audit Executive whose position within the Company's organizational structure is directly under the President Director. The Chief Audit Executive is appointed and dismissed by the President Director after obtaining recommendations from the Chief Audit Executive of PT Pertamina (Persero) and approval from the Board of Commissioners.

Structurally, the Chief Audit Executive communicates, coordinates, and reports its activities to the President Director. Functionally, the Chief Audit Executive communicates, coordinates, and reports its activities to the Audit Committee. The Board of Commissioners, upon the Audit Committee's recommendation, actively participates in discussions related to the Chief Audit Executive's remuneration to decide on its approval. The Board of Commissioners, through the Audit Committee, can communicate with the Chief Audit Executive to ensure the adequacy of the assignment scope, resource sufficiency, and no restrictions on data and information access needed by Internal Audit in carrying out its activities.

The Internal Audit organizational structure of PTK is established based on the President Director's Decree No. Kpts-511/C0000/2021-S0 on May 11, 2021.



Jumlah, Kualifikasi dan Sertifikasi Internal Audit

Quantity, Qualifications, and Certification of Internal Audit

Internal Audit PTK diwajibkan memiliki integritas dan perilaku yang profesional, jujur dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya, independen, memiliki kompetensi dan pengalaman yang cukup. Salah satu parameter yang menjadi tolak ukur kemampuan dan keahlian auditor adalah pengalaman baik dari segi operasional, bisnis, dan pendukung lainnya. Selain pengalaman dan strata pendidikan, sertifikasi juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan keahlian personil Internal Audit.

Hingga akhir tahun 2023, Internal Audit berjumlah 7 (tujuh) orang yang telah memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi sebagaimana *job requirement* yang telah ditetapkan Perusahaan. Berikut kualifikasi pendidikan yang dimiliki personil Internal Audit Perusahaan tahun 2023.

Internal Audit at PTK are required to possess integrity and exhibit professional, honest, and objective behavior in carrying out their duties, be independent, and have sufficient competency and experience. One of the benchmarks for assessing the ability and skills of auditors is their experience in operational, business, and other supporting aspects. In addition to experience and educational background, certification is also an important factor in enhancing the skills of Internal Audit's personnel.

By the end of 2023, Internal Audit consisted of 7 (seven) individuals who met the qualifications and competencies as per the job requirements set by the Company. Below are the education qualifications held by the Company's Internal Audit personnel in 2023.

Nama Name	Jabatan Position	Latar Belakang Pendidikan Education Background
Triana Aria Rini	Chief Audit Executive	S1 Manajemen Bachelor of Management
Gunik Widaryati	Manager Business Plan, Commercial & Business Support IA	S2 Transportasi Laut Master of Marine Transportation
Dandy Damba Satria	Manager Operation & Fleet Management IA	S1 Akuntansi Bachelor of Accounting
Arip Maulana	Senior Auditor	S1 Akuntansi Bachelor of Accounting
Fajar Nugroho	Auditor	S2 Ilmu Ekonomi Master of Economics
Arlidyasari	Auditor	S2 Pelayaran Master of Sailing
Almira Mahsa	Junior Auditor	S1 Akuntansi Bachelor of Accounting
Arini Putri Setoaty	Analyst Audit Planning & Monitoring	S1 Akuntansi Bachelor of Accounting

Selain itu, personil Internal Audit PTK juga telah memiliki sertifikasi profesi, sebagai berikut:

Additionally, Internal Audit personnel at PTK have obtained professional certifications, as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Sertifikasi Certification
Triana Aria Rini	Chief Audit Executive	QIA, CRA, CRP
Dandy Damba Satria	Manager Business Plan, Commercial & Business Support IA	QIA, CFE, CRA, CRA
Arip Maulana	Senior Auditor	QIA
Fajar Nugroho	Auditor	QIA, CRP
Arlidyasari	Auditor	QIA
Almira Mahsa	Junior Auditor	Audit Tingkat Dasar
Arini Putri Setoaty	Analyst Audit Planning & Monitoring	QIA, CRA, CRP

Laporan Pelaksanaan Program Kerja Internal Audit Implementation Report of Internal Audit Work Program

Sepanjang tahun 2023, Fungsi Internal Audit telah melaksanakan program kerja sesuai dengan rencana kerja telah disusun berdasarkan pendekatan *Risk Based Internal Audit*, sebagai berikut.

Throughout 2023, the Internal Audit Function has implemented the work program as planned based on the Risk-Based Internal Audit approach, as follows.

1. Kegiatan *Annual Audit Plan* (AAP) 2023

Pada tahun 2023, Internal Audit PTK telah menyelesaikan kegiatan audit yang berdasarkan AAP, yaitu kegiatan Audit Mandiri yang terdiri dari Audit atas pengelolaan piutang, Audit atas Pencapaian Target *Commission Days* Kapal, Audit atas Kinerja PT Trans Yeong Maritime serta Audit atas Pengelolaan Kegiatan di *Dockyard* Sorong dan Bagus Kuning. Selain itu, Internal Audit juga menyelesaikan Audit Terpadu atas kebijakan dan implementasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di PTK.

1. 2023 Annual Audit Plan (AAP) Activities

In 2023, PTK's Internal Audit completed audit activities based on the AAP, namely Independent Audits consisting of audits on receivables management, achievement of Ship Commission Target Days, performance of PT Trans Yeong Maritime, and management of activities at Dockyard Sorong and Bagus Kuning. Additionally, Internal Audit also completed an Integrated Audit on the Domestic Component Level (TKDN) policy and implementation at PTK.

2. *Monitoring Tindak Lanjut* Hasil Temuan Audit

Tindak lanjut hasil internal audit terdiri dari rekomendasi hasil audit yang dilakukan oleh Internal Audit PTK dan hasil audit investigasi/penelaahan yang dilakukan oleh Fungsi *Investigation*, *Fraud Prevention* & WBS IA. Realisasi tindak lanjut hasil audit per 31 Desember 2023 tercapai 100%.

2. Follow-Up Monitoring of Audit Findings

Follow-up on internal audit findings consists of audit result recommendations conducted by PTK's Internal Audit and investigation/evaluation audit results conducted by the Investigation, Fraud Prevention & WBS IA Function. Realization of follow-up on audit findings as of December 31, 2023, reached 100%.

No	Uraian Description	Total
1.	<i>Outstanding</i> rekomendasi per 1 Desember 2023 Outstanding recommendations as of December 1, 2023	48
2.	Tambahan rekomendasi s.d. 31 Desember 2023 Additional recommendations up to December 31, 2023	31
3.	Total rekomendasi s.d. 31 Desember 2023 Total recommendations up to December 31, 2023	79
4.	Tindak lanjut rekomendasi s.d. 31 Desember 2023 Follow up recommendations up to December 31, 2023	24
5.	<i>Outstanding</i> rekomendasi per 1 Desember 2023 Outstanding recommendations as of December 1, 2023	55
6.	<i>Outstanding</i> rekomendasi per 1 Desember 2023 yang melebihi <i>end date</i> Outstanding recommendations as of December 1, 2023 which exceed the end date	0
7.	<i>Outstanding</i> rekomendasi per 1 Desember 2023 yang belum melebihi <i>end date</i> Outstanding recommendations as of 1 December 2023 which have not exceeded the end date	55
Persentase capaian Percentage of achievement		100%

- Internal Audit juga menindaklanjuti setiap temuan dan rekomendasi hasil temuan/rekomendasi audit eksternal yang dilakukan oleh BPK RI dan Kantor Akuntan Publik (KAP). Sampai dengan Desember 2023 terdapat *outstanding* tindak lanjut eksternal dari BPK-RI yang telah dilakukan *monitoring* selama tahun 2023 diantaranya:

- Internal Audit also followed up on every finding and recommendation from external audit findings conducted by BPK RI and Public Accountant Offices (KAP). As of December 2023, there were outstanding external follow-up findings from BPK-RI that were monitored during 2023, including:

Monitoring Tindak Lanjut Temuan BPK RI Tahun 2023**Monitoring of BPK RI Findings 2023**

No	Proses Bisnis Business process	Jumlah Amount	Tindak Lanjut Follow-up	Outstanding sesuai PTL BPK RI Outstanding according to PTL BPK RI	TL Auditee TL Auditee	Outstanding Tindak Lanjut Outstanding Follow-up
1.	LHP Kinerja atas Efektivitas Kegiatan Pengelolaan Piutang Usaha untuk meningkatkan laba Perusahaan tahun 2019 s.d. semester I tahun 2021 pada PT Pertamina (Persero), Subholding dan Anak Perusahaan di Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur LHP Performance on the Effectiveness of Accounts Receivable Management Activities to increase Company profits in 2019 to 2019, semester I of 2021 at PT Pertamina (Persero), Subholding and Subsidiaries in Jakarta, West Java and East Java	11	9	2	0	2
2.	LHP dengan tujuan tertentu atas pengelolaan Pendapatan belanja dan investasi tahun 2019 sampai dengan 2021 pada PT Pertamina International Shipping dan instansi terkait lainnya di DKI Jakarta Jawa timur kepulauan Riau dan Jepang LHP with the specific objective of managing expenditure and investment income from 2019 to 2021 at PT Pertamina International Shipping and other related agencies in DKI Jakarta, East Java, Riau Islands and Japan	25	18	7	5	2
Total		36	27	9	5	4

Terkait dengan tindak lanjut atas Audit Eksternal (BPK RI) status penentuan selesai/belum selesai atas penyelesaian rekomendasi temuan merupakan wewenang BPK RI, Fungsi Internal Audit menjadi *counterpart*/fasilitator penyelesaian rekomendasi dan melakukan *monitoring* secara berkala per triwulan.

- **Monitoring Tindak Lanjut Temuan Audit KAP Tahun 2023 (Internal Control Memorandum (ICM))**

ICM merupakan Rekomendasi yang diberikan atas Audit Laporan Keuangan Konsolidasian PT Pertamina International Shipping dan entitas anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC) diharapkan rekomendasi tersebut dapat meningkatkan kualitas dan ketepatan dari proses pelaporan keuangan. ICM untuk tahun buku 2022 telah diterbitkan melalui surat dari KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC) N20230512007/DC2/DKO/2023 tanggal 12 Mei 2023 dimana untuk PT Pertamina Trans Kontinental dan Entitas Anak terdapat 6 (enam) item observasi. Sampai dengan Desember 2023, terkait ICM sudah dilakukan penyelesaian sejumlah 3 (tiga) item observasi dan dalam *progress* penyelesaian oleh KAP PwC sejumlah 3 (tiga) item rekomendasi.

3. Rapat Internal Audit Bersama Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit

Di sepanjang tahun 2023, Internal Audit menghadiri 15 (lima belas) kali rapat, baik yang diselenggarakan oleh Direksi maupun oleh Dewan Komisaris dan/ atau Komite Audit.

4. Program Pengembangan Kompetensi Internal Audit

Pada tahun 2023, personil Internal Audit PTK telah mengikuti program pelatihan dan/atau sertifikasi profesi, yaitu sebagai berikut:

Regarding follow-up on External Audit (BPK RI), determining the status of completion/incompletion of finding recommendations is within the authority of BPK RI, with the Internal Audit Function serving as a counterpart/facilitator for recommendation resolution and conducting periodic monitoring quarterly.

- **Monitoring of KAP Audit Findings 2023 (Internal Control Memorandum (ICM))**

ICM is the Recommendation given for the Consolidated Financial Statements Audit of PT Pertamina International Shipping and its subsidiaries for the year ended December 31, 2022, by KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC) It is expected that these recommendations will improve the quality and accuracy of the financial reporting process. The ICM for the 2022 fiscal year was issued through a letter from KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC) N20230512007/DC2/DKO/2023 on May 12, 2023, where there were 6 (six) observation items for PT Pertamina Trans Kontinental and its Subsidiaries. As of December 2023, regarding ICM, resolution had been completed for 3 (three) observation items and were in progress for resolution by KAP PwC for 3 (three) recommendation items.

3. Internal Audit Meetings with the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or Audit Committee

Throughout 2023, Internal Audit attended 15 (fifteen) meetings, both organized by the Board of Directors and by the Board of Commissioners and/or the Audit Committee.

4. Internal Audit Competency Development Program

In 2023, PTK's Internal Audit personnel participated in training programs and/or professional certifications, as follows:

Nama Pelatihan Training Name	Waktu Pelaksanaan Execution time	Tempat Pelaksanaan Place of Implementation	Peserta Pelatihan Training Participants
Advance SUPREME Mandatory Training	3-5 Januari 2023 January 3-5, 2023	Palembang	1. Fajar Nugroho (Auditor) 2. Arlidyasari (Auditor)
Mobile Learning - Basic HSSE Mand. Training	31 Januari 2023 January 31, 2023	Jakarta	1. Triana Aria Rini (Chief Audit Executive)
Training Pembekalan Masa Purna Karya Post-Employment Provision Training	3 Maret 2023 March 3, 2023	Bali	1. Triana Aria Rini (Chief Audit Executive)
Mobile Learning - Respectful Workplace	31 Maret 2023 March 31, 2023	Jakarta	1. Triana Aria Rini (Chief Audit Executive) 2. Arini Putri Setoaty (Analyst Audit Planning & Monitoring)
Mobile Learning - SOVAC Pertamina Best	30 April 2023 April 30, 2023	Jakarta	1. Triana Aria Rini (Chief Audit Executive) 2. Almira Mahsa (Junior Auditor) 3. Fajar Nugroho (Auditor) 4. Dandy Damba Satria (Manager Operation & Fleet Management IA) 5. Arlidyasari (Auditor) 6. Arini Putri Setoaty (Analyst Audit Planning & Monitoring)
Sertifikasi Kompetensi - Pelatihan Enterprise Risk Management (ERM) Berbasis ISO 31000 dan Sertifikasi CRP Competency Certification - ISO 31000 Based Enterprise Risk Management (ERM) Training and CRP Certification	8-10 Mei 2023 May 8-10, 2023	Bandung	1. Fajar Nugroho (Auditor)
Sertifikasi Kompetensi - Sertifikasi ERM ISO 31000 CRP CRA Competency Certification - ISO 31000 CRP CRA ERM Certification	11 Mei 2023 May 11, 2023	Bandung	1. Fajar Nugroho (Auditor)
Mobile Learning - Fundamental Behavior Based Safety (BBS)	31 Mei 2023 May 31, 2023	Jakarta	1. Arip Maulana (Senior Auditor) 2. Dandy Damba Satria (Manager Operation & Fleet Management IA)
Workshop Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) & Security Risk Assessment (SRA)	27 Juni 2023 June 27, 2023	Jakarta	1. Arlidyasari (Auditor)
Mobile Learning - Fraud Awareness	31 Juli 2023 July 31, 2023	Jakarta	1. Dandy Damba Satria (Manager Operation & Fleet Management IA) 2. Arini Putri Setoaty (Analyst Audit Planning & Monitoring)
Mobile Learning - Respectful Workplace	30 November 2023 November 30, 2023	Jakarta	1. Fajar Nugroho (Auditor) 2. Arlidyasari (Auditor)
Mobile Learning - Fraud Awareness	30 November 2023 November 30, 2023	Jakarta	1. Arlidyasari (Auditor)



Evaluasi Kinerja Internal Audit

Evaluation of Internal Audit Performance

Evaluasi kinerja Fungsi Internal Audit dilakukan berdasarkan pada pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI) tahunan yang telah disepakati antara Chief Audit Executive dengan Direktur Utama. Kriteria penilaian didasarkan pada beberapa aspek yang menjadi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Internal Audit yang telah dilakukan sepanjang tahun 2023. Pada tahun 2023, hasil penilaian kinerja Fungsi Internal Audit berdasarkan KPI mencapai 107,70%, melebihi dari target yang telah ditetapkan sebesar 100%.

The performance evaluation of the Internal Audit Function is based on the achievement of annual Key Performance Indicators (KPIs) agreed upon between the Chief Audit Executive and the President Director. Assessment criteria are based on several aspects related to the execution of Internal Audit duties and responsibilities throughout 2023. In 2023, the performance assessment results of the Internal Audit Function based on KPIs reached 107.70%, exceeding the set target of 100%.

Sistem Pengendalian Internal

Internal Control System

Pembentukan tata kelola perusahaan yang efektif dan sistem pengendalian internal sangat penting untuk pertumbuhan yang berkelanjutan dan peningkatan jangka panjang dalam nilai perusahaan, dan oleh karena itu, PTK berupaya memperkuat struktur tersebut. Pengendalian internal adalah suatu proses yang melibatkan seluruh personil yang ada dalam organisasi mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, manajemen, sampai dengan karyawan tingkat bawah. Pengendalian internal dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) dalam rangka mencapai tujuan perusahaan.

PTK telah berusaha untuk membangun, mengoperasikan, dan terus meningkatkan sistem pengendalian internal untuk mencapai tujuan pengendalian internal guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi bisnis, memastikan keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan atas kegiatan bisnis, dan menjaga aset Perusahaan. Upaya pengendalian internal ini secara khusus diterapkan dalam aspek-aspek penting seperti aspek operasional, keuangan, SDM, dan juga kepatuhan terhadap perundang-undangan. Selain itu, sistem pengendalian internal juga dimaksudkan untuk menekan potensi risiko usaha maupun praktik penyimpangan etika bisnis yang berdampak negatif pada kinerja Perusahaan.

To establish an effective corporate governance, an internal control system is subsequently crucial for sustainable growth and long-term enhancement of corporate value. Therefore, PTK strives to strengthen these structures. Internal control is a process involving all personnel within the organization, from the Board of Commissioners, Directors, and management to lower-level employees. Internal control is designed to provide reasonable assurance in achieving corporate objectives.

PTK has endeavored to build, operate, and continuously improve its internal control system to achieve internal control objectives, enhance business effectiveness and efficiency, ensure the reliability of financial reporting, comply with laws and regulations in business activities, and safeguard Company assets. This internal control effort is specifically applied to critical aspects such as operations, finance, human resources, and regulatory compliance. Additionally, the internal control system aims to mitigate business risks and prevent unethical business practices that could negatively impact the Company's performance.

Sistem Pengendalian Keuangan, Operasional dan Kepatuhan Perusahaan

Financial, Operational, and Compliance Control Systems

Pengendalian Keuangan

Financial Control

Sejalan dengan penerapan sistem pengendalian internal yang efektif, PTK melakukan pengendalian atau pengelolaan terkait keuangan sebab hal tersebut menjadi faktor penting dalam kelancaran aktivitas operasional dan bisnis perusahaan. Pengendalian/ pengelolaan keuangan dilakukan dengan prinsip-prinsip yang sehat sehingga perusahaan dapat meminimalisir pemborosan, penyimpangan, serta mengoptimalkan arus keuangan perusahaan. Prosedur, kebijakan dan peraturan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan disusun dan dievaluasi secara periodik, serta sesuai Standar Akuntansi Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perusahaan senantiasa berupaya menciptakan sistem pengendalian internal yang memadai guna menjauhkan Perusahaan dari berbagai masalah yang berisiko tinggi terkait proses pencatatan, kesalahan penyajian, hingga pelaporan keuangan perusahaan.

Pengelolaan keuangan perusahaan dilakukan dalam bentuk rencana jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Dasar penyusunan anggaran adalah program kerja dan dikoordinasikan antar fungsi/kantor regional untuk mensinergikan usulan anggaran setiap fungsi/kantor regional dengan menganut prinsip *bottom-up* dan *top-down*. Direksi menetapkan target pendapatan dan biaya yang realistis setiap fungsi kantor regional dengan mempertimbangkan kebutuhan, sumber daya, dan analisis terhadap peluang pasar yang kemungkinan besar bisa dicapai. Setiap fungsi/kantor regional harus bertanggungjawabkan pengelolaan keuangan kepada Direksi dan wajib mengirimkan laporan keuangan ke Direktur Keuangan secara tepat waktu untuk dikonsolidasikan oleh induk Perusahaan.

Aligned with the implementation of an effective internal control system, PTK manages financial controls as they are essential for smooth operational and business activities. Financial control is conducted using sound principles to minimize waste and deviations and to optimize the Company's cash flow. Procedures, policies, and regulations related to financial management are periodically developed and evaluated in accordance with Financial Accounting Standards and applicable laws.

The Company consistently strives to create an adequate internal control system to prevent high-risk issues related to recording processes, misrepresentation, and financial reporting. Financial management is conducted through short-term, medium-term, and long-term plans.

Budgeting is based on work programs and coordinated across functions/regions to synchronize budget proposals, adhering to bottom-up and top-down principles. The Board of Directors set realistic revenue and cost targets for each regional office, considering needs, resources, and market opportunities. Each function/region must account for its financial management to the Board of Directors and submit financial reports to the Finance Director for consolidation by the parent Company.



Pengendalian Operasional

Operational Control

Dalam hal penerapan sistem pengendalian pada aspek operasional, Perseroan menerapkan kebijakan dan prosedur yang ditujukan untuk mengarahkan seluruh sumber daya pada pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan. Perusahaan melaksanakan kegiatan usaha dimulai dengan identifikasi kebutuhan dan diakhiri dengan pengiriman jasa. Proses bisnis kunci PTK terdiri dari kegiatan pemasaran dan operasi kapal (*Marketing and Operation*), keagenan kapal, *port operation and service* untuk pelabuhan khusus migas.

Direktur utama memastikan bahwa tujuan manajemen didefinisikan dalam semua proses kunci. Rencana dan pengembangan proses yang diperlukan untuk merealisasikan jasa perusahaan tertuang dalam Rencana Kerja Pendapatan dan Laba Tahunan (RKPL). Dalam pelaksanaannya, pengelolaan operasional dilakukan sesuai dengan RKAP dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas biaya. Masing-masing pemilik proses kunci dan proses *owner* memimpin pelaksanaan kegiatan operasional guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan disetujui oleh Direktur Utama.

Selanjutnya, dalam hal pelaporan realisasi kegiatan operasional Perusahaan dilakukan oleh unit/fungsi yang terkait secara berkala kepada Direksi. Semua jasa yang diberikan kepada pelanggan akan dikaji dan ditinjau, sehingga apabila terdapat perubahan persyaratan dalam perjanjian maka dapat segera ditindaklanjuti melalui pemberitahuan kepada pelanggan dan fungsi yang bersangkutan.

In implementing operational control, the Company enforces policies and procedures to direct all resources towards achieving established goals and targets. Business activities begin with identifying needs and end with delivering services. PTK's key business processes include marketing and ship operations, ship agency services, and port operations and services for specialized oil and gas ports.

The President Director ensures that management objectives are defined in all key processes. Plans and process developments necessary to realize Company services are outlined in the Annual Revenue and Profit Work Plan (RKPL). Operational management is conducted according to the RKAP, focusing on cost efficiency and effectiveness. Each key process owner leads operational activities to achieve the goals set and approved by the President Director.

Operational activity reporting is performed periodically by the relevant units/functions to the Board of Directors. All services provided to customers are reviewed, and any changes in agreement requirements are promptly communicated to the customers and relevant functions.

Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Regulatory Compliance

Selain aspek keuangan dan operasional, PTK juga memberikan jaminan yang memadai akan tercapainya efisiensi dan efektivitas kegiatan operasional, serta kepatuhan terhadap regulasi. Saat ini PTK telah membentuk Fungsi Legal yang bertugas untuk memantau dan mengelola kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan, sehingga dapat mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Sampai dengan akhir periode pelaporan, Perusahaan tidak pernah mendapatkan sanksi atas sangkaan ketidakpatuhan terhadap hukum yang berlaku.

In addition to financial and operational aspects, PTK guarantees efficiency and effectiveness in operations and regulatory compliance. PTK has established a Legal Function to monitor and manage the Company's compliance with laws and regulations, preventing legal violations. As of the end of the reporting period, the Company has not received any sanctions for alleged non-compliance with applicable laws.

Kesesuaian Sistem Pengendalian Internal dan Kerangka COSO

(Internal Control Framework)

Conformity of the Internal Control System and the COSO Framework

Sistem Pengendalian Internal yang dijalankan PTK merupakan suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berkesinambungan oleh seluruh pekerja, baik pada jajaran pimpinan sampai dengan staf. Hal tersebut dilakukan untuk membangun komitmen yang utuh dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Sistem Pengendalian Internal PTK telah mengacu pada prinsip-prinsip *Internal Control Integrated Framework* yang ditetapkan *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO) yang menempatkan 5 (lima) unsur pengendalian internal, yaitu:

1. Lingkungan pengendalian
2. Penilaian risiko
3. Aktivitas pengendalian
4. Informasi dan komunikasi, serta
5. Pengawasan.

PTK's internal control system is an integral process performed continuously by all employees, from leadership to staff, to build a complete commitment to achieving organizational goals.

PTK's internal control system adheres to the principles of the Internal Control Integrated Framework established by the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), which includes five internal control elements:

1. Control Environment
2. Risk Assessment
3. Control Activities
4. Information and Communication
5. Monitoring

Lingkungan Pengendalian Control Environment

PTK berkomitmen membangun lingkungan pengendalian yang baik melalui penerapan serangkaian standar, proses dan struktur yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pengendalian internal di seluruh organisasi.

PTK is committed to building a good control environment through implementing a series of standards, processes and structures that form the basis for implementing internal control throughout the organization.

Penilaian Risiko Risk Assessment

PTK menerapkan sistem manajemen risiko dan melakukan pemetaan serta mitigasi risiko atas risiko-risiko yang terintegrasi: *governance risk, strategy and planning risk, finance risk, operational/ infrastructure risk, compliance risk, reporting risk.*

PTK implements a risk management system and carries out risk mapping and mitigation of integrated risks: governance risk, strategy and planning risk, finance risk, operational/ infrastructure risk, compliance risk,

Aktivitas Pengendalian Control Activities

PTK memiliki pedoman dan kebijakan untuk pelaksanaan kegiatan operasional dan non-operasional. Mekanisme pengendalian terhadap risiko diterapkan dalam bentuk *Three Line of Defense.*

PTK has guidelines and policies for implementing operational and non-operational activities. The risk control mechanism is implemented in the form of Three Lines of Defense.

Informasi dan Komunikasi Information and Communication

PTK memiliki sistem manajemen informasi yang baik dan terus mendorong komunikasi yang terbuka dengan seluruh pihak untuk memperoleh informasi yang memadai untuk proses pengambilan keputusan.

PTK has a good information management system and continues to encourage open communication with all parties to obtain adequate information for the decision-making process.

Aktivitas Pengawasan Monitoring Activities

PTK memiliki mekanisme pengawasan dalam bentuk Rapat Kerja, Rapat Dewan Komisaris, Rapat Dewan Komisaris-Direksi, Rapat Direksi dan berbagai aktivitas pengendalian lainnya. PTK has a supervisory mechanism in the form of Work Meetings, Board of Commissioners Meetings, Board of Commissioners-Director Meetings, Board of Directors Meetings and various other control activities.

PTK telah mengadopsi konsep tiga lini pertahanan yang merupakan implementasi dari strategi pengendalian yang sejalan dengan kerangka COSO - *Internal Control Framework*. Untuk mendukung efektivitas Sistem Pengendalian Internal, PTK telah menetapkan spesifikasi peran dan pendelegasian tugas yang jelas kepada masing-masing organ di Perusahaan. Sistem pengendalian Perusahaan dilakukan secara kolektif untuk seluruh fungsi operasi dengan mekanisme pengawasan berjenjang (*three lines of defense*) sebagaimana berikut:

PTK has adopted the three lines of defense concept, implementing a control strategy aligned with the COSO Framework. To support the effectiveness of the Internal Control System, PTK has specified clear role assignments and task delegations to each Company organ. The Company's control system is collectively executed for all operational functions with a tiered oversight mechanism (*three lines of defense*) as follows:



THREE LINES OF DEFENSE

Sesuai COSO, PTK telah menerapkan mekanisme *Three Line of Defense* sebagai aktivitas penerapan pengendalian internal dan pelaksanaan tata kelola perusahaan secara terpadu.
In accordance with COSO, PTK has implemented third line of defense mechanism as part of the internal control implementation and integrated corporate governance

FIRST LINE OF DEFENSE

Dikelola oleh masing-masing unit atau satuan kerja sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing:

- Pengetahuan dan pemahaman atas proses bisnis, proses kerja utama.
- Identifikasi potensi risiko pada tugas yang menjadi wewenang dari setiap unit.
- Pengendalian dan pelaksanaan mitigasi potensi risiko.

Managed by each unit or task force in accordance with respective functions and duties:

- Knowledge and insight on business process, and main work process.
- Potential risks identification on the duties that have been authorized to each unit.
- Control and implementation of potential risks mitigation.

SECOND LINE OF DEFENSE

Dikelola oleh fungsi manajemen risiko yang berada pada unit *finance* dan fungsi *compliance* yang berada pada unit Corporate Secretary.

- Peningkatan fungsi *check & balance* mendukung operasi Perusahaan.
- Sosialisasi kesadaran terhadap penerapan tata kelola Perusahaan, kepatuhan dan manajemen risiko pada semua unit kerja dan tingkatan organisasi.
- Implementasi manajemen risiko yang terintegrasi.
- Penyempurnaan pedoman dan kebijakan operasional dan non-operasional.

Managed by risk management function under the finance unit and compliance function under the Corporate Security Unit.

- Increasing check & balance function in support of the Company's operation.
- Socializing awareness to the implementation of corporate governance, compliance and risk management in all work units and organizational levels.
- Implementing integrated risk management
- Improving operational and non-operational manuals and policies

THIRD LINE OF DEFENSE

Dikelola oleh Unit Audit Intern.

- Pelaksanaan internal audit sesuai program kerja audit tahunan.
- Pelaksanaan audit surprise untuk mengukur kesadaran penerapan tata kelola perusahaan.
- Kepatuhan dan manajemen risiko.
- Database temuan internal audit dan eksternal sebagai masukan untuk peningkatan kualitas setiap unit/fungsi

Managed by Internal Audit.

- Implementation of internal audits in accordance with the annual audit program.
- Implementation of a surprise audit to measure awareness of the corporate governance implementation.
- Compliance and risk management.
- Database of internal and external audit findings as input for improvement the quality of each unit/function.



Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian internal, Perusahaan melakukan pembaruan terkait pengendalian internal yang telah mulai diterapkan pada tahun 2019. Pembaruan tersebut meliputi:

1. Sinergi Internal Audit Pertamina Group di PT Pertamina (Persero) selaku *Holding* dan PT Pertamina International Shipping selaku *Subholding*.
2. Melakukan pembaruan proses bisnis Perusahaan yang dituangkan dalam *Audit Universe* dan diimplementasikan melalui *Audit Management System* (AMS).
3. Koordinasi *review Annual Audit Plan* (AAP) secara periodik yang melibatkan seluruh Fungsi Internal Audit di Pertamina Group sesuai perubahan proses bisnis, arahan *Top Management*, baik di *Holding* maupun *Subholding* serta melibatkan *stakeholder* terkait.

To enhance the internal control system's effectiveness, the Company has updated its internal controls, initiated in 2019. These updates include:

1. Synergy of Internal Audit within Pertamina Group at PT Pertamina (Persero) as Holding and PT Pertamina International Shipping as Subholding.
2. Updating the Company's business processes documented in the Audit Universe and implemented through the Audit Management System (AMS).
3. Coordinating the periodic review of the Annual Audit Plan (AAP) involving all Internal Audit Functions within the Pertamina Group, considering business process changes, Top Management directions at both Holding and Subholding levels, and involving relevant stakeholders.

Evaluasi dan Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

Evaluation and Effectiveness of the Internal Control System

Evaluasi terhadap efektivitas sistem pengendalian internal dilakukan oleh fungsi Internal Audit untuk memonitoring kecukupan dan efektivitas pengendalian internal. Perusahaan melakukan evaluasi melalui pemantauan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan operasional dan menyampaikan hasilnya kepada Direksi dan Kantor Region, untuk segera ditindaklanjuti.

Pengendalian internal dalam hal keuangan perusahaan dilakukan melalui mekanisme pengawasan internal atas pelaporan keuangan (*Internal Control Over Financial Reporting/ICOFR*). Pelaksanaan ICOFR sebagai tinjauan (*review*) dalam hal keuangan Perusahaan, telah dilaksanakan Internal Audit selama kurun waktu periode pelaporan. Kesimpulan hasil sertifikasi yang dilaksanakan oleh *Control Group*, memperlihatkan tingkat kecukupan dan efektivitas ICOFR berada pada tingkat efektif.

Pengendalian internal atas operasional Perusahaan dilaksanakan melalui mekanisme *Internal Control Review* (ICR) oleh Internal Audit melalui mekanisme audit operasional. Hasil tinjauan yang dilakukan selama tahun 2023 memperlihatkan PTK telah melaksanakan standar prosedur operasi sesuai praktik-praktik terbaik pengelolaan jasa *marine*.

Internal Audit evaluates the internal control system's effectiveness to monitor its adequacy and effectiveness. The Company conducts evaluations by monitoring follow-up actions from operational audits and reporting the results to the Board of Directors and Regional Offices for prompt action.

Financial control within the Company is conducted through internal oversight mechanisms over financial reporting (*Internal Control Over Financial Reporting/ICOFR*). ICOFR reviews the Company's financial aspects, performed by Internal Audit during the reporting period. Certification results by the Control Group indicate that ICOFR's adequacy and effectiveness are at an effective level.

Operational control is conducted through *Internal Control Review* (ICR) mechanisms by Internal Audit via operational audits. Reviews conducted throughout 2023 show that PTK has implemented standard operating procedures according to the best practices in marine service management.

Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris atas Kecukupan Sistem Pengendalian Internal

Statement of the Board of Directors and Board of Commissioners on the Adequacy of the Internal Control System

Direksi dan Dewan Komisaris menilai bahwa sistem pengendalian internal PTK telah dijalankan secara memadai. Berdasarkan hasil evaluasi atas efektivitas sistem pengendalian internal sepanjang tahun 2023, tidak ditemukan kelemahan yang material dalam sistem pengendalian internal pada masing-masing unit bisnis karena seluruh temuan dalam operasional Perusahaan telah ditindaklanjuti dan rekomendasi untuk peningkatan telah diterapkan dengan baik.

The Board of Directors and Board of Commissioners consider PTK's internal control system to be adequately implemented. Based on the evaluation of the internal control system's effectiveness throughout 2023, no material weaknesses were found in the internal control system of each business unit, as all operational findings have been addressed, and recommendations for improvement have been effectively implemented.



Manajemen Risiko

Risk Management

Sejalan dengan komitmen Perusahaan untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG melalui efektivitas pengendalian internal dan kegiatan audit, PTK juga telah memiliki strategi dan sistem pengelolaan risiko dengan mengacu pada ISO 31000:2018 Manajemen Risiko. Manajemen risiko diterapkan oleh Perusahaan sebagai upaya untuk mengidentifikasi, menganalisis/mengevaluasi, mengelola dan mengkaji ulang risiko Perusahaan secara efektif agar tujuan Perusahaan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan dampak risiko seminimal mungkin. Manajemen risiko yang diterapkan mencakup pada risiko yang dihadapi dalam menjalankan aktivitas usaha. Risiko utama yang timbul dari instrumen operasional terdiri dari pencapaian target pangsa pasar *upstream* yang kurang optimal, Pendapatan dari segmen bundling yang kurang optimal, timbulnya kecelakaan kerja pada saat melakukan aktivitas operasional, menurunnya *reliability* kapal, kegagalan dalam perencanaan proyek investasi. Selain itu, Perusahaan juga menghadapi risiko keuangan terdiri dari Piutang *overdue* yang belum terbayarkan serta risiko legal terdiri dari terkendalanya proses penyelesaian permasalahan hukum.



PTK senantiasa berupaya mengelola risiko secara cermat, terintegrasi, dan efektif. Dalam penerapannya, Perusahaan melakukan evaluasi dan penyempurnaan guna memastikan manajemen risiko yang ada telah memadai dan sesuai dengan perkembangan terkini. Proses manajemen risiko dilakukan dalam kerangka kerja komprehensif, mencakup identifikasi seluruh risiko kunci, pengukuran risiko dan pengelolaan posisi risiko sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.



Kerangka dan Kebijakan Manajemen Risiko

Risk Management and Framework Policy

Proses manajemen risiko dilakukan dalam suatu kerangka kerja manajemen risiko yang secara komprehensif mencakup semua risiko yang teridentifikasi sebagai risiko yang signifikan dihadapi oleh Perusahaan. Sistem manajemen risiko Perusahaan didasarkan pada kerangka kerja *Enterprise Risk Management* (ERM) serta prinsip-prinsip dan persyaratan yang ditetapkan dalam ISO 31000:2018 tentang Manajemen Risiko yang telah diselaraskan dalam kebijakan internal Perusahaan dan seluruh entitas anak perusahaan.

Sistem Manajemen Risiko yang diterapkan PTK semakin kuat dengan keberadaan Sistem Tata Kerja (STK) Organisasi yang telah diratifikasi sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Utama Perusahaan No. Kpts-1343/PTK0000/2021-S0 tentang Ratifikasi Pedoman Manajemen Risiko PT Pertamina International Shipping dan dan Surat Keputusan Direktur Utama Perusahaan No. Kpts - 001/PTK0000/2023-S9 tentang Ratifikasi Sistem Tata Kerja Terkait Manajemen Risiko PT Pertamina (Persero). Sistem Tata Kerja ini berisi sebagai informasi mengenai Pengelolaan Manajemen Risiko yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Kebijakan Manajemen Risiko.
2. Tugas dan Tanggung Jawab Fungsi terkait.
3. Prinsip Manajemen Risiko.
4. Kerangka Manajemen Risiko.
5. Proses Manajemen Risiko.
6. Penerapan Kebijakan Manajemen Risiko.

In line with the Company's commitment to implementing GCG principles through effective internal controls and audit activities, PTK has developed a risk management strategy and system based on ISO 31000:2018 Risk Management. The Company applies risk management to effectively identify, analyze/evaluate, manage, and review risks, ensuring that the Company's established objectives are achieved with minimal risk impact. The risk management implemented covers the risks faced in conducting business activities. Key risks arising from operational instruments include suboptimal achievement of upstream market share targets, suboptimal revenue from the bundling segment, accidents occurring during operational activities, decreased ship reliability, and investment project planning failures. Additionally, the Company faces financial risks, including overdue receivables, and legal risks, including impeded legal resolution processes.

PTK consistently strives to manage risks carefully, integratively, and effectively. In its implementation, the Company conducts evaluations and improvements to ensure that the existing risk management is adequate and in line with current developments. The risk management process is carried out within a comprehensive framework, covering the identification of all key risks, risk measurement, and the management of risk positions according to established policies.

The risk management process is carried out within a risk management framework that comprehensively covers all risks identified as significant to the Company. The Company's risk management system is based on the Enterprise Risk Management (ERM) framework and the principles and requirements set out in ISO 31000:2018 Risk Management, which are aligned with the Company's internal policies and all subsidiary entities.

PTK's risk management system is further strengthened by the Organizational Work System (STK), ratified according to the Company's President Director's Decree No. Kpts-1343/PTK0000/2021-S0 on Ratification of PT Pertamina International Shipping Risk Management Guidelines and the President Director's Decree No. Kpts-001/PTK0000/2023-S9 on Ratification of PT Pertamina (Persero) Risk Management System Work Procedures. This Work System contains information on Risk Management, including:

1. Risk Management Policy.
2. Responsibilities of Related Functions.
3. Risk Management Principles.
4. Risk Management Framework.
5. Risk Management Process.
6. Implementation of Risk Management Policy.

Sistem manajemen risiko di Perusahaan diperkuat dengan dengan komitmen Direksi yang tertuang dalam Traktat Manajemen Risiko yang ditandatangani Direksi tanggal 1 September 2023. Traktat Manajemen Risiko merupakan pengembangan prinsip-prinsip manajemen risiko yang tertera dalam Pedoman Manajemen Risiko. Hal tersebut merupakan bentuk komitmen Direksi PTK terhadap penerapan sistem manajemen risiko berbasis integrasi korporasi yang juga dikenal dengan *Enterprise Risk Management* (ERM) di PTK, serta sebagai landasan bagi seluruh jajaran Perusahaan.

Lebih lanjut, PTK menerapkan prinsip kehati-hatian dan senantiasa menjaga tingkat kewaspadaan yang tinggi dalam menjalankan usahanya. Hal ini didukung oleh seluruh Fungsi di PTK agar dapat meminimalisasi potensi risiko yang bisa terjadi.

Struktur Pengelola Risiko

Risk Management Structure

Struktur manajemen risiko PTK berawal dari pengawasan aktif Dewan Komisaris melalui Komite Investasi dan Risiko Usaha serta Direksi melalui Komite Manajemen Risiko. Selain itu, Perusahaan juga memiliki fungsi pendukung untuk menerapkan pengelolaan risiko antara lain fungsi Budgeting & Management Analysis, manajemen risiko fungsi, serta manajemen risiko Anak Perusahaan.

Fungsi manajemen risiko secara terintegrasi dikelola oleh Fungsi Budgeting & Management Analysis yang disupervisi Direktur Keuangan dan SDM. Secara spesifik pengelolaan risiko menjadi tanggung jawab dari masing-masing *risk owner* yaitu pimpinan fungsi, *region*, dan Anak Perusahaan, yang dalam hal ini dikoordinatori oleh Manager Budgeting & Management Analysis dibantu oleh Assistant Manager Risk Management. Fungsi Budgeting & Management Analysis dikelola oleh pimpinan tertinggi fungsi dengan jabatan Manager dan terbagi atas 2 sub-fungsi yang terdiri dari *Budgeting & Reporting* dan *Risk Management*. Secara aktif, Fungsi Budgeting & Management Analysis melakukan komunikasi dan pertemuan (rapat) dengan Komite Investasi dan Risiko Usaha.

Mekanisme Manajemen Risiko

Risk Management Mechanism

Dalam rangka mencapai penerapan Manajemen Risiko yang efektif, PTK berpedoman pada *Three Lines of Defense*, dengan menerapkan mekanisme pertahanan secara berlapis dalam mengelola risiko, sebagaimana bagan berikut ini.

The Company's risk management system is reinforced by the Board of Directors' commitment, as expressed in the Risk Management Treaty signed by the Directors on September 1, 2023. The Risk Management Treaty is an extension of the risk management principles outlined in the Risk Management Guidelines. This represents the Board of Directors' commitment to implementing a corporate-integrated risk management system, known as Enterprise Risk Management (ERM), at PTK, providing a foundation for all Company levels.

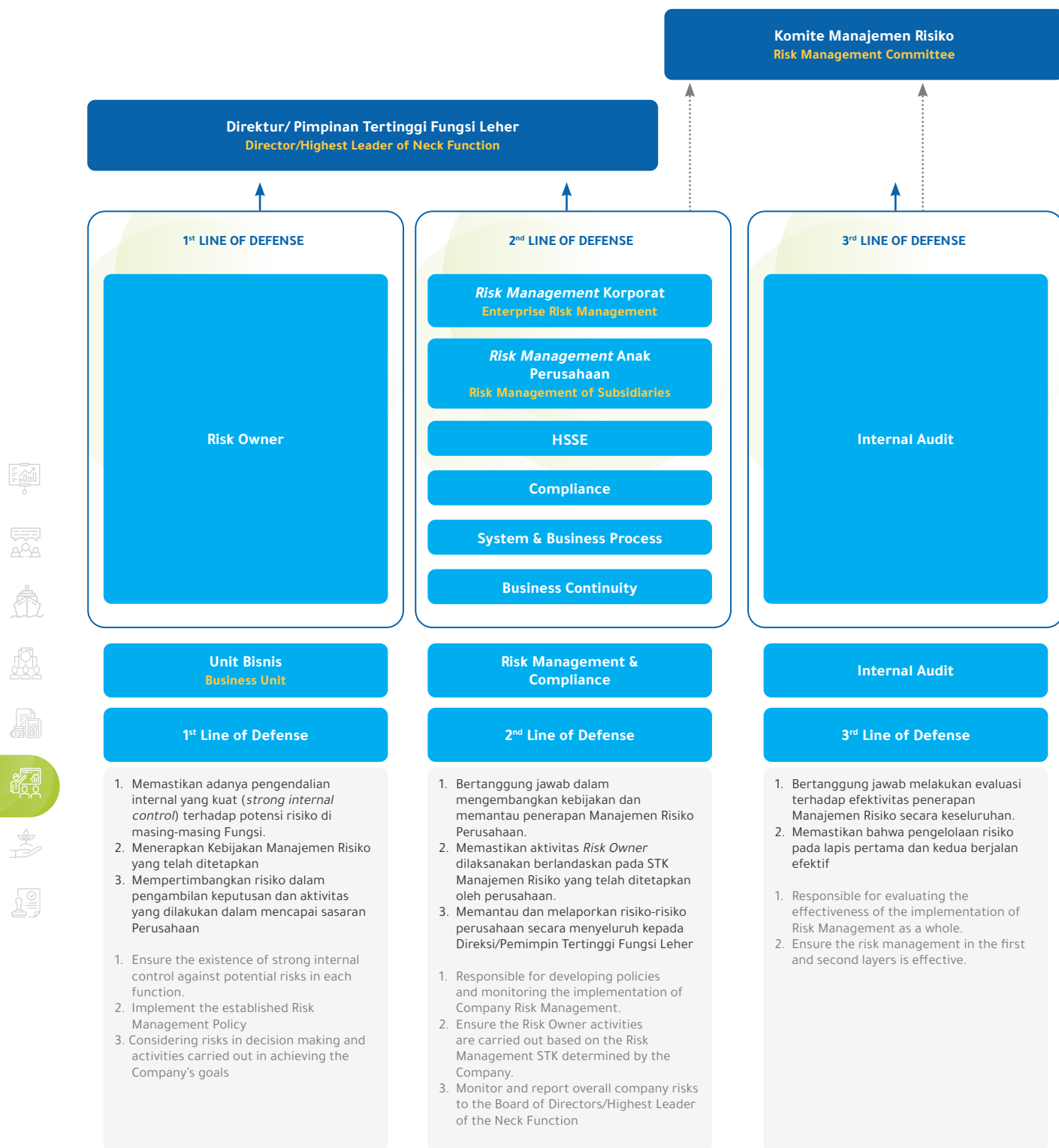
Furthermore, PTK applies the principle of prudence and maintains a high level of vigilance in conducting its business. This is supported by all functions within PTK to minimize potential risks.

PTK's risk management structure begins with active oversight by the Board of Commissioners through the Investment and Business Risk Committee and the Board of Directors through the Risk Management Committee. Additionally, the Company has supporting functions for risk management implementation, including the Budgeting & Management Analysis function, risk management functions, and Subsidiary risk management.

The integrated risk management function is managed by the Budgeting & Management Analysis Function, supervised by the Director of Finance and HR. Specifically, risk management is the responsibility of each risk owner, including function leaders, regions, and subsidiaries, coordinated by the Manager of Budgeting & Management Analysis, assisted by the Assistant Manager of Risk Management. The Budgeting & Management Analysis function is managed by the highest-ranking function leader, holding the position of Manager, and divided into two sub-functions: Budgeting & Reporting and Risk Management. Actively, the Budgeting & Management Analysis Function communicates and holds meetings with the Investment and Business Risk Committee.

To achieve effective Risk Management implementation, PTK adheres to the Three Lines of Defense principle, applying a layered defense mechanism in risk management, as illustrated in the following diagram.





Lini pertahanan yang pertama terletak pada setiap fungsi sebagai *Risk Owner*. Lini pertahanan kedua adalah pada unit manajemen risiko dan lini pertahanan ketiga berada pada fungsi Internal Audit. Proses manajemen risiko bertujuan untuk melindungi Perusahaan pada setiap kegiatan dan atau transaksi usaha, baik itu aktivitas *on-going business* ataupun aktivitas investasi. Aktivitas *ongoing business* merupakan serangkaian kegiatan PTK yang telah berjalan secara rutin sesuai dengan proses bisnis Perusahaan berdasarkan prinsip kelangsungan usaha. Sedangkan aktivitas investasi adalah serangkaian kegiatan penggunaan

The first line of defense lies with each function as the Risk Owner. The second line of defense is the risk management unit, and the third line of defense is the Internal Audit function. The risk management process aims to protect the Company in every business activity and transaction, whether ongoing business activities or investment activities. Ongoing business activities refer to PTK's routine operations in accordance with the Company's business processes based on the principle of business continuity. Investment activities, on the other hand, involve utilizing resources to enhance the Company's value. Both ongoing business and

sumber daya dalam rangka meningkatkan nilai Perusahaan. Proses manajemen risiko ongoing business maupun investasi sesuai dengan proses manajemen risiko dalam ISO 31000 - 2018 yang tertuang dalam pedoman manajemen risiko, yaitu:

1. *Scope, Context & Criteria* (Ruang Lingkup, Konteks dan Kriteria).
2. *Risk Assessment* (Penilaian Risiko).
3. *Risk Treatment* (Penanganan Risiko).
4. *Communication & Consultation* (Komunikasi dan Konsultasi).
5. *Monitoring & Review* (Pemantauan dan Tinjauan).
6. *Recording & Reporting* (Pencatatan dan Pelaporan).

investment risk management processes align with the ISO 31000 - 2018 risk management process outlined in the risk management guidelines, which include:

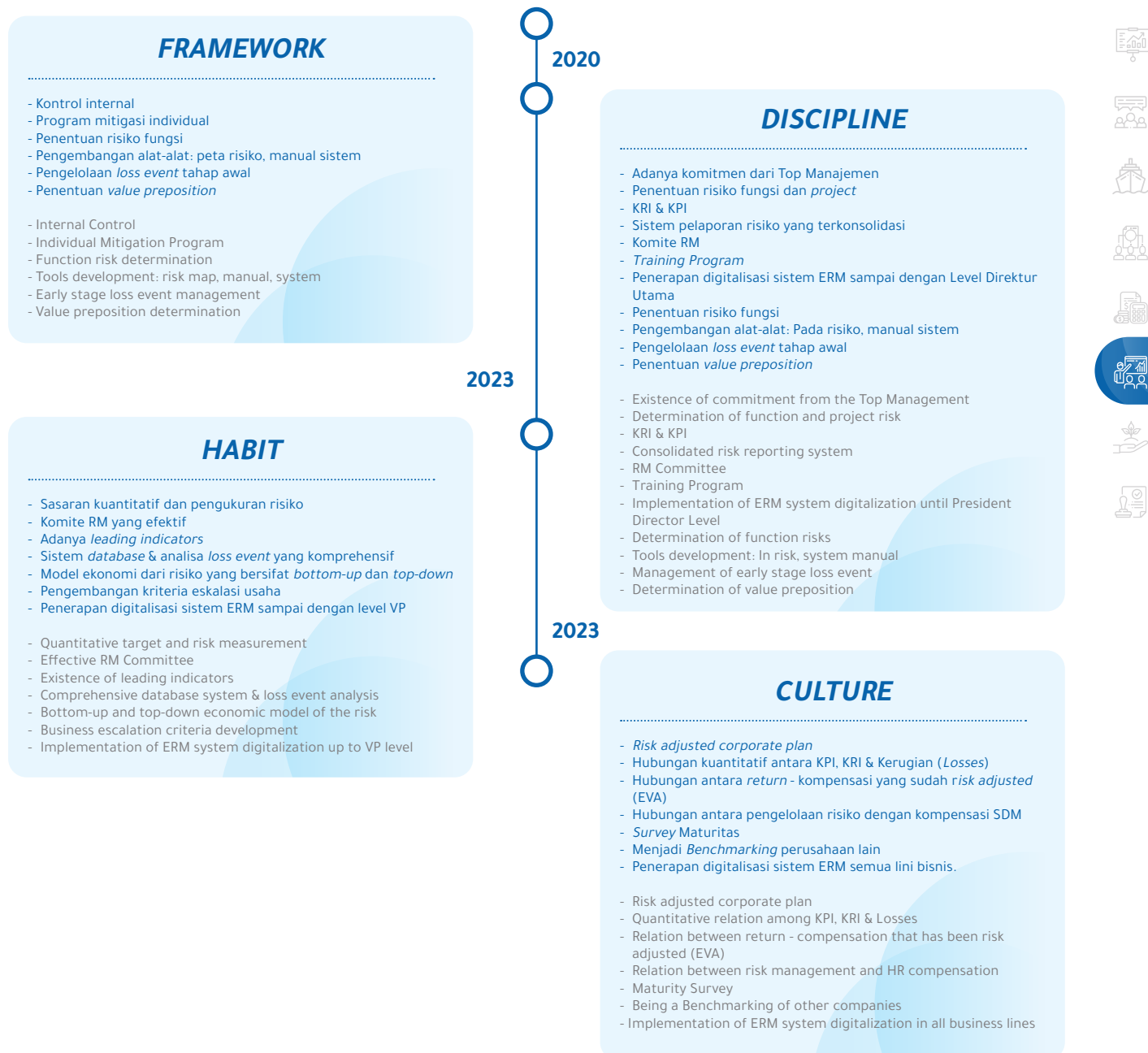
1. Scope, Context & Criteria
2. Risk Assessment
3. Risk Treatment
4. Communication & Consultation
5. Monitoring & Review
6. Recording & Reporting

Roadmap Manajemen Risiko

Risk Management Roadmap

Dalam rangka mewujudkan *Enterprise Risk Management* (ERM), Perusahaan telah menyusun *Roadmap* Manajemen Risiko periode 2020-2026 sebagai pedoman dalam implementasi dan penilaian atas pencapaian sasaran Manajemen Risiko Perusahaan.

To realize Enterprise Risk Management (ERM), the Company has developed a Risk Management Roadmap for the 2020-2026 period as a guideline for the implementation and assessment of the Company's Risk Management objectives.



Sesuai *roadmap* implementasi Manajemen Risiko di atas, pada tahun 2023 PTK berada pada posisi habit. Berikut langkah-langkah yang telah diterapkan Perusahaan dalam pencapaian *Roadmap* Manajemen Risiko sepanjang tahun 2023.

1. Implementasi ERMS
2. *Monitoring Top Risk* Perusahaan
3. *Update Traktat Enterprise Risk Management*
4. *Update SP PIC Management Risiko On-Going Business*
5. *Update STK Enterprise Risk Management*
6. Peningkatan *Awareness Risk Management*
7. Sertifikasi PIC dan Tim Mgt *Risk Management*
8. Penyusunan *Risk Register* 2024.

Based on this roadmap, in 2023 PTK is in the habit phase. The following steps have been implemented by the Company in achieving the Risk Management Roadmap in 2023.

1. ERMS Implementation
2. Monitoring of the Company's Top Risks
3. Update of the Enterprise Risk Management Treaty
4. Update of the SP PIC Ongoing Business Risk Management
5. Update of the Enterprise Risk Management Work System
6. Increase of Risk Management Awareness
7. Certification of PIC and Risk Management Team
8. Preparation of the 2024 Risk Register

Profil Risiko Perusahaan dan Mitigasi Risiko Company Risk Profile and Risk Mitigation

PTK melakukan pengelolaan terhadap risiko-risiko yang diklasifikasikan menjadi beberapa risiko, yaitu *Governance Risk, Strategy and Planning Risk, Finance Risk, Operational/Infrastructure Risk, Compliance Risk, dan Reporting Risk*. Pada tahun 2023 ini, terdapat tujuh kejadian risiko yang menjadi fokus utama PTK, terdiri dari lima risiko kuantitatif dan dua risiko kualitatif, sebagai berikut:

PTK manages various risks classified into Governance Risk, Strategy and Planning Risk, Finance Risk, Operational/Infrastructure Risk, Compliance Risk, and Reporting Risk. In 2023, PTK focused on seven risk events, comprising five quantitative risks and two qualitative risks, as follows:

No	Jenis Risiko Risk Type	Risiko Risk	Mitigasi Mitigation
1	Risiko Keuangan Finance Risk	Piutang <i>overdue</i> yang belum terbayarkan Unpaid overdue receivables	1. Melakukan monitoring kelengkapan dokumen penagihan dan finalisasi kontrak. 2. Melakukan sosialisasi aplikasi bonus. 3. Implementasi <i>Advance Payment</i> 100% untuk Kapal Pihak Ke-3 dan Umum. 4. Menerbitkan SOA (<i>Statement of Account</i>) kepada <i>customer</i> setiap bulannya sebagai upaya apabila nilai <i>final</i> tagihan kepada <i>customer</i> lebih besar dari nilai uang muka yang diberikan. 5. Memberikan kesempatan kepada <i>customer</i> yang dalam keadaan kesulitan <i>cash flow</i> untuk melakukan cicilan pembayaran pelunasan piutang. 6. Pengumpulan dan penelusuran kelengkapan dokumen pendukung terkait perkara. 7. Melayankan somasi kepada debitur yang bermasalah dan tidak memenuhi kewajiban pembayaran serta mengupayakan agar Debitur memberikan pernyataan pengakuan hutang 8. Melaksanakan percepatan penandatanganan BA Coklit. 9. Penerbitan Laporan bulanan piutang lengkap dengan aging piutang sebagai informasi kepada <i>user</i> terkait posisi piutang dan dasar tindak lanjut <i>user</i> dalam upaya penyelesaian piutang yang masih belum terbayarkan. 10. <i>Monitoring</i> progres penagihan dan pembayaran <i>customer</i> melalui aplikasi Qontak.
2	Risiko HSSE HSSE Risk	Timbulnya kecelakaan kerja pada saat melakukan aktivitas operasional Occurrence of work accidents when carrying out operational activities.	1. Penerapan DCU di setiap wilayah kerja oleh paramedis (<i>Alternative Risk Treatment</i>). 2. Memberikan pelatihan DCU kepada pekerja diseluruh wilayah khususnya yang belum tersedia petugas DCU/paramedis DCU. 3. Memberikan fasilitas peralatan DCU dan pelatihan P3K di seluruh wilayah kerja. 4. Memperbaiki <i>substandard condition</i> salah satunya dengan pengadaan APD yang memadai di kapal, diantaranya FRC (<i>Fire retardant cloth</i>). 5. Mendorong perubahan budaya safety di PTK yang salah satunya dengan pengelolaan OBIT, mulai dari kampanye, pemantauan, analisa, dan evaluasi program.

No	Jenis Risiko Risk Type	Risiko Risk	Mitigasi Mitigation
			6. Pelaksanaan Pelatihan HSSE kepada seluruh level pekerja sesuai jadwal dan usulan ke fungsi HC. 7. Pengisian jabatan <i>vacant</i> Manager dan usulan staff Officer dan TKJP. 8. <i>Fleet Owner</i> dalam memenuhi rekomendasi hasil <i>vetting</i> perlu melakukan pengadaan perlengkapan <i>safety</i> di kapal. 9. Tetap melanjutkan penyampaian laporan BMKG secara berkala (rutin) kepada <i>crew</i> kapal. 10. Melakukan pemantauan kepatuhan terhadap regulasi dan monitoring atas tindak lanjutnya. 11. Familiarisasi HSSE kepada pihak ketiga yang terlibat dalam kegiatan operasional di PTK. 12. Implementasi program CSMS dalam siklus pengadaan barang/jasa. 6. Conducting HSSE training for all levels of employees according to the schedule and proposals to the HC function. 7. Filling vacant Manager positions and proposing Officer and TKJP staff. 8. Fleet Owners should procure safety equipment on vessels to meet vetting recommendations. 9. Continuing regular BMKG reports to vessel crews. 10. Monitoring compliance with regulations and following up accordingly. 11. Familiarizing third parties involved in PTK operational activities with HSSE. 12. Implementing the CSMS program in the procurement cycle of goods/services.
3	Risiko Operasional/ Infrastruktur Operational/ Infrastructure Risk	Menurunnya <i>reliability</i> kapal Decreased ship reliability	1. Utilisasi aplikasi CMMS dan TCMS oleh seluruh <i>crew</i> kapal dan <i>Technical Supervisor</i>. 2. <i>Monitoring progress</i> pengajuan sertifikat via aplikasi Simlala di Departemen Perhubungan Laut. 3. <i>Update</i> Aplikasi CERTO. 4. Pelaksanaan <i>Sharing Knowledge</i> dan pelatihan terkait pengoperasian dan pemeliharaan kapal terhadap seluruh <i>crew</i> kapal dan <i>Technical Supervisor</i>. 5. Pengembangan lanjutan kontrak payung pengadaan barang & jasa kebutuhan kapal. 1. Utilizing CMMS and TCMS applications by all vessel crews and Technical Supervisors. 2. Monitoring certificate application progress via the Simlala application in the Ministry of Marine Affairs. 3. Updating the CERTO application. 4. Conducting Knowledge Sharing sessions and training on vessel operation and maintenance for all vessel crews and Technical Supervisors. 5. Advancing the umbrella contract development for vessel procurement needs.
		Pencapaian target pangsa pasar <i>Upstream</i> yg kurang optimal Achievement of Upstream market share targets that are less than optimal	1. <i>Monitoring</i> dari Fungsi terkait untuk melaksanakan market <i>research</i> kapal-kapal dengan spesifikasi yang sejenis (kapal AHTS, AHT, LCT, <i>Crewboat</i>). 2. Melakukan Koordinasi dengan <i>Customer</i> (Pertamina dan non Pertamina Group). 3. Keikutsertaan pada aplikasi pengumuman <i>tender</i>. 4. Melakukan kerjasama dengan mitra strategis. 1. Monitoring from relevant Functions to conduct market research on vessels with similar specifications (AHTS, AHT, LCT, Crewboat). 2. Coordinating with Customers (Pertamina and non-Pertamina Group). 3. Participation in tender announcement applications. 4. Collaborating with strategic partners.
		Pendapatan dari segmen <i>bundling</i> yang kurang optimal Revenue from the bundling segment is less than optimal	1. Optimalisasi <i>monitoring</i> pendapatan dari pekerjaan <i>Unbundling</i>. 2. Koordinasi dengan Fungsi teknis untuk alokasi / repositioning KKR. 3. Pelaksanaan Coklit tagihan volume thruput dengan <i>customer</i>. 4. Menagihkan selisih volume thruput di akhir periode kontrak. 5. <i>Monitoring</i> penagihan atas pekerjaan <i>unbundling</i>. 1. Optimizing revenue monitoring from Unbundling jobs. 2. Coordinating with technical Functions for KKR allocation/repositioning. 3. Conducting Coklit billing volume throughput with customers. 4. Billing the throughput volume difference at the end of the contract period. 5. Monitoring billing for Unbundling jobs.
4	Risiko Legal Legal Risk	Terkendalanya proses penyelesaian permasalahan hukum Obstacles in the process of resolving legal issues	1. Pengumpulan dan penelusuran kelengkapan dokumen pendukung terkait perkara. 2. PTK membuat kesepakatan tertulis atas setiap pekerjaan yang dilakukan Perseroan. 3. PTK melakukan <i>mapping</i>/ pemetaan atas suatu permasalahan hukum yang timbul, termasuk namun tidak terbatas pada pembuatan kronologis perkara, mengumpulkan keterangan saksi, mengumpulkan dokumen/ bukti dan hal-hal lain yang diperlukan. 1. Collecting and tracing completeness of supporting documents related to cases. 2. PTK establishes written agreements for each job performed. 3. PTK maps out legal issues, including creating case chronologies, gathering witness statements, collecting documents/evidence, and other necessary actions.
5	Risiko Strategi dan Perencanaan Strategy and Planning Risk	Kegagalan dalam perencanaan proyek investasi Failure in investment project planning	1. Penyampaian permintaan usulan investasi kepada seluruh Fungsi di PTK & AP dan sosialisasi tata cara pengusulan investasi. 2. Pendampingan oleh koordinator investasi kepada fungsi pengusul sejak tahap pengusulan investasi, <i>gate review</i> dan persetujuan FID. 3. Pembentukan fungsi <i>commercial & business optimization</i> di setiap AP yang salah satu tugasnya untuk merencanakan investasi dan penentuan PIC investasi di setiap fungsi yang ada di PTK. Selanjutnya dilakukan <i>upskilling</i> untuk PIC investasi. 4. Melakukan <i>update</i> pada SK Tim <i>Gate Reviewer</i> (sesuai nomenklatur PTK 2.0) Serta dilakukan <i>upskilling</i> untuk tim <i>gate reviewer</i> sesuai dengan tupoksi di dalam surat perintah. 1. Proposing investment requests to all Functions in PTK & AP and disseminating investment proposal procedures. 2. Coordination by investment coordinators with proposing Functions from the investment proposal stage, gate review, and FID approval. 3. Establishing commercial & business optimization Functions in each AP, responsible for planning investments and determining investment PIC in each function at PTK. Furthermore, upskilling for investment PIC. 4. Updating the Gate Review Team's SK (according to PTK 2.0 nomenclature) and upskilling for the gate review team according to their roles in the mandate.



No	Jenis Risiko Risk Type	Risiko Risk	Mitigasi Mitigation
		5. Mengadakan forum <i>challenge session</i> (BOD retreat/Forum pertemuan <i>offline</i>) dalam rangka penyesuaian rencana investasi dengan <i>plan capex</i> RJPP. 6. Perbaikan TKO penilaian pemilihan galangan (misal: dengan perbaikan peningkatan bobot untuk aspek finansial). 7. Mengevaluasi besaran jaminan proyek (<i>refund guarantee</i>) berdasarkan nilai proyek yang akan dilaksanakan dan penggunaan skema pembayaran dengan <i>escrow account</i> antara galangan dan PTK, dimana pengeluaran dana ditujukan untuk pengeluaran proses pengadaan/pembelian material oleh galangan sesuai termin yang disepakati. 8. Tetap adanya pemberian uang muka kepada galangan dan dilakukan penyesuaian termin pembayaran disesuaikan dengan progres fisik pembangunan. 9. Penambahan klausul batas maksimum waktu penyelesaian proyek dan denda maksimum sesuai ketentuan yang berlaku di <i>Holding/SH IML</i> di dalam kontrak pembangunan kapal dengan galangan. 10. FPI (Fungsi Pengusul Investasi) melakukan komunikasi dan koordinasi dengan <i>End-user</i> (misal: <i>charterer</i> untuk investasi kapal milik) agar dapat meminta adanya kesepakatan tertulis dalam hal utilisasi aset (misal: kapal milik utk kegiatan <i>charter</i> kapal). 11. Mekanisme persetujuan FID dilakukan sebelum tahun investasi berjalan. 12. Implementasi sistem <i>procurement</i> secara digital yang berlaku di Pertamina <i>group</i> menggunakan SMART GEP dalam rangka perluasan <i>vendor list</i>. 13. Proses pengadaan dapat dilakukan sebelum tahun investasi berjalan (tetap setelah persetujuan FID) dengan <i>disclaimer</i> persetujuan harga nego final dan penetapan pemenang <i>subject to ABI Approval</i>. 14. Implementasi sistem <i>procurement</i> secara digital yang berlaku di Pertamina <i>group</i> menggunakan SMART GEP dalam rangka perluasan <i>vendor list</i>. 15. Persiapan penyusunan FID & pengadaan dengan menggunakan konsultan <i>engineering</i> (<i>eksternal/internal</i>) untuk perhitungan OE dan dilakukan <i>sourcing</i> harga dengan data <i>terupdate</i> dan <i>valid</i> (misal: melalui <i>broker</i>, Asosiasi, dll) dan <i>market intelligence</i> (misal: data BKI, data K3SS, dll). 16. Program <i>training</i> dan <i>upskilling</i> untuk PIC investasi & tim <i>gate reviewer</i> sesuai dengan tupoksi di dalam surat perintah.	5. Organizing challenge sessions (BOD retreat/ Offline meeting Forum) to align investment plans with the RJPP capex plan. 6. Improving the shipyard selection assessment (e.g., by enhancing financial aspects' weighting). 7. Evaluating project guarantee amounts (refund guarantee) based on the project value and using payment scheme with an escrow account between the shipyard and PTK, where funds are allocated for procurement/expenses by the shipyard according to agreed terms. 8. Maintaining advance payments to shipyards and adjusting payment terms according to physical construction progress. 9. Adding clauses for maximum project completion time and maximum fines based on Holding/SH IML regulations in shipbuilding contracts with shipyards. 10. FPI (Investment Proposer Function) communicates and coordinates with End-users (e.g., charterer for owned vessel investments) to establish written agreements on asset utilization (e.g., using owned vessels for charter activities). 11. FID approval mechanism is implemented before the investment year begins. 12. Implementing a digital procurement system used in the Pertamina group using SMART GEP to expand the vendor list. 13. Procurement processes can be initiated before the investment year begins (still after FID approval) with final price negotiation approval disclaimer and winner determination subject to ABI Approval. 14. Implementing a digital procurement system used in the Pertamina group using SMART GEP to expand the vendor list. 15. Preparing FID & procurement using engineering consultants (external/internal) for OE calculations and sourcing prices with updated and valid data (e.g., through brokers, associations, etc.) and market intelligence (e.g., BKI data, K3SS data, etc.). 16. Training and upskilling programs for investment PIC & gate review team according to their roles in the mandate.



Monitoring Realisasi Mitigasi Risiko Perusahaan Tahun 2023

Monitoring of the Company's Risk Mitigation Realization in 2023

PTK telah melakukan monitoring risiko di tahun 2023 yang disusun dan dilakukan secara menyeluruh pada proses bisnis di setiap unit kerja melalui tahapan proses pemantauan (*monitoring*) risiko yang diikuti dengan proses komunikasi dan koordinasi secara berkesinambungan. Hal ini dilakukan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan atas mitigasi risiko (tindak lanjut) yang telah disusun oleh unit kerja dilakukan dengan baik, sesuai dengan rencana yang ditetapkan, sehingga diharapkan potensi risiko dapat diminimalisir dan dikendalikan.

Per 31 Desember 2023, pencapaian *monitoring Risk Management Performance* telah mencapai 100%. Pencapaian tersebut diperoleh dari keseluruhan rencana mitigasi yang telah dilakukan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. *Monitoring* realisasi mitigasi risiko dilakukan setiap bulan dan dilaporkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris PTK melalui laporan manajemen serta dilaporkan kepada PT Pertamina International Shipping selaku *Subholding Shipping* dan PT Pertamina (Persero) melalui Sistem *Enterprise Risk Management System* (ERMS).

PTK conducted comprehensive risk monitoring in 2023 across all business processes in each work unit through a continuous risk monitoring process, followed by ongoing communication and coordination. This ensures the effectiveness of the risk mitigation (follow-up) plans prepared by the work units, minimizing and controlling potential risks.

As of December 31, 2023, the achievement of Risk Management Performance monitoring reached 100%. This achievement resulted from implementing all mitigation plans as scheduled. Risk mitigation realization is monitored monthly and reported to PTK's Board of Directors and Board of Commissioners through management reports and to PT Pertamina International Shipping as the Subholding Shipping and PT Pertamina (Persero) through the Enterprise Risk Management System (ERMS).

Evaluasi atas Efektivitas Sistem Manajemen Risiko

Evaluation of Risk Management System Effectiveness

Evaluasi atas penerapan manajemen risiko dilakukan oleh Perusahaan sebagai suatu langkah penting dalam proses analisis risiko bisnis. Hal ini membantu untuk menentukan keberhasilan dari tindakan yang diambil untuk mengurangi atau menghindari risiko yang teridentifikasi serta rencana penyesuaian atas pengelolaan risiko yang telah diterapkan. Evaluasi penerapan manajemen risiko dilaksanakan di seluruh lini proses dan kegiatan Perusahaan oleh pemilik program atau pemilik proses sebagai pemilik risiko (*risk owner*).

Evaluasi atas sistem manajemen risiko dilakukan di tahun 2022 yang dikenal sebagai Pertamina *Risk Maturity Self Assessment* (PRISMA) yang mengacu pada 3 (tiga) Pilar yakni Pilar ISO 31000:2018: *Principles* (PP), *Framework* (FW) dan *Process* (PR), yaitu dengan melakukan pengukuran maturitas risiko. Berdasarkan pengukuran tersebut, Nilai *Risk Maturity Index* PTK berdasarkan kerangka kerja ISO 31000:2018 sebesar 3,78 (berada di Level 4 *Managed*). Pencapaian ini menandakan bahwa pengelolaan risiko di PTK telah dievaluasi secara berkala dan menjadi bagian dari pengambilan keputusan strategis Perusahaan, serta didukung oleh kepemimpinan dan komitmen telah menjadi suatu proses berkelanjutan dan terintegrasi dengan sistem manajemen lainnya.

Selanjutnya, hasil *Risk Maturity Assessment* PRISMA ini menjadi dasar dalam menyusun *Opportunity For Improvement* (OFI) dan Usulan *Action For Improvement* (AFI) untuk meningkatkan kematangan penerapan manajemen risiko di Perusahaan kedepannya.

The Company evaluates the implementation of risk management as a crucial step in the business risk analysis process. This helps determine the success of actions taken to reduce or avoid identified risks and adjust risk management plans. The risk management evaluation is carried out across all processes and activities by program or process owners as risk owners.

In 2022, the evaluation of the risk management system, known as the Pertamina Risk Maturity Self Assessment (PRISMA), was conducted, referring to the three pillars of ISO 31000:2018: Principles (PP), Framework (FW), and Process (PR), by measuring risk maturity. Based on this measurement, PTK's Risk Maturity Index according to the ISO 31000:2018 framework was 3.78 (Level 4 *Managed*). This achievement indicates that PTK's risk management is regularly evaluated, part of strategic decision-making, supported by leadership and commitment, and integrated with other management systems.

The PRISMA Risk Maturity Assessment results serve as the basis for developing Opportunities for Improvement (OFI) and Proposals for Action for Improvement (AFI) to enhance the Company's future risk management maturity.

Perbaikan dan Peningkatan Pengelolaan Risiko

Improvements and Enhancements in Risk Management

Dalam rangka perbaikan dan peningkatan pengelolaan risiko perusahaan, berbagai upaya telah dilaksanakan PTK di antaranya melakukan integrasi manajemen risiko serta pengembangan dan pengintegrasian aplikasi manajemen risiko. Integrasi manajemen risiko dilaksanakan melalui beberapa kegiatan sebagai berikut:

For improving and enhancing the Company's risk management, PTK has implemented various efforts, including risk management integration and the development and integration of risk management applications. Risk management integration is carried out through several activities, including:



Pelaksanaan *three lines of defense*, yaitu pendekatan yang sistematis dan efektif karena dapat meningkatkan komunikasi dan kontrol dengan memperjelas tugas dan tanggung jawab (*accountability and segregation of duties*) sehingga dapat mendukung terciptanya budaya risiko, pemahaman dan kesadaran risiko yang lebih baik.

Implementation of three lines of defense, namely a systematic and effective approach because it can improve communication and control by clarifying duties and responsibilities (*accountability and segregation of duties*) so that it can support the creation of a risk culture, better understanding and awareness of risks.

Risk Based Audit (RBA) yaitu metodologi yang digunakan pada kegiatan audit dengan tujuan menilai kecukupan pengendalian internal dengan pendekatan *integrated* atau *non integrated audit*.

The Risk Based Audit (RBA) methodology is used in audit activities with the aim of assessing the adequacy of internal control with an integrated or non-integrated audit approach.

Risk Based Budgeting (RBB) yaitu menyelaraskan perumusan RKAP dengan pengelolaan risiko untuk memastikan pencapaian target perusahaan.

Risk Based Budgeting (RBB), namely aligning the formulation of RKAP with risk management to ensure the achievement of company targets.

Selain itu, sepanjang tahun 2023, PTK juga melakukan pengembangan infrastruktur manajemen risiko melalui penerapan aplikasi *Enterprise Risk Management System (ERMS)* Pertamina yang mengintegrasikan top risk seluruh Anak Perusahaan PT Pertamina International Shipping.

Additionally, throughout 2023, PTK also developed risk management infrastructure by implementing the Pertamina Enterprise Risk Management System (ERMS), which integrates the top risks of all PT Pertamina International Shipping subsidiaries.

Perusahaan juga berupaya meningkatkan budaya sadar risiko kepada seluruh karyawan melalui berbagai kompetensi serta sertifikasi profesional di bidang Manajemen Risiko maupun melalui seminar/*sharing knowledge*. Pada tahun 2023, Fungsi Manajemen Risiko telah mengikuti pelatihan *Training* dan Sertifikasi *Certified Risk Professional* yang diselenggarakan oleh IRBA serta Sosialisasi Penyelarasan Kebijakan Pengelolaan Risiko, Penyusunan KRI dan Penginputan *Risk Register* ke dalam ERMS yang diselenggarakan oleh Fungsi *Budgeting & Management Analysis*.

The Company also aimed to enhance risk awareness culture among all employees through various competencies and professional certifications in Risk Management as well as through seminars/sharing knowledge. In 2023, the Risk Management Function has participated in the Certified Risk Professional Training and Certification organized by IRBA and also the Socialization of Risk Management Policy Alignment, KRI Preparation and Risk Register Input into ERMS organized by the Budgeting & Management Analysis Function.

Pernyataan Manajemen atas Kecukupan Sistem Manajemen Risiko Management's Statement on the Adequacy of the Risk Management System

Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi memiliki tanggung jawab atas efektivitas penerapan manajemen risiko di PTK. Peran pengawasan aktif Dewan Komisaris dilakukan secara periodik melalui Komite Nominasi, Remunerasi & Manajemen Risiko, Komite Audit, dan Komite Investasi serta melalui rapat koordinasi yang diselenggarakan secara rutin oleh Komisaris dengan jajaran Direksi.

Active supervision by the Board of Commissioners and the Board of Directors is responsible for the effectiveness of risk management implementation at PTK. The active supervisory role of the Board of Commissioners is carried out periodically through the Nomination, Remuneration & Risk Management Committee, the Audit Committee, and the Investment Committee, as well as through regular coordination meetings held by the Commissioners with the Board of Directors.

Direksi dan Dewan Komisaris memastikan bahwa PTK telah menerapkan proses manajemen risiko yang meliputi kegiatan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta tersedianya sistem informasi yang memadai. Pengelolaan seluruh jenis risiko yang terkait dengan operasional bisnis Perusahaan telah dikelola sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan Perusahaan. Pengendalian internal dalam hal keuangan perusahaan dilakukan melalui mekanisme pengawasan internal atas pelaporan keuangan (*Internal Control Over Financial Reporting/ICOFR*). Pelaksanaan ICOFR sebagai tinjauan dalam hal keuangan Perusahaan, telah dilaksanakan Internal Audit selama kurun waktu periode pelaporan. Kesimpulan hasil sertifikasi yang dilaksanakan oleh *Control Group*, memperlihatkan tingkat kecukupan dan efektivitas ICOFR berada pada tingkat efektif. Di sisi lain, pengendalian internal atas operasional Perusahaan dilaksanakan melalui mekanisme *Internal Control Review (ICR)* oleh Internal Audit melalui mekanisme audit operasional. Hasil tinjauan yang dilakukan selama tahun 2023 memperlihatkan perusahaan telah melaksanakan standar prosedur operasi sesuai praktik-praktik terbaik pengelolaan jasa *marine*.

The Board of Directors and the Board of Commissioners ensure that PTK has implemented a risk management process that includes activities for identifying, measuring, monitoring, and controlling risks, and that an adequate information system is available. The management of all types of risks associated with the Company's business operations has been conducted in accordance with the policies established by the Company. Internal control over the Company's financial matters is carried out through the Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR) mechanism. The implementation of ICOFR as a financial review mechanism for the Company has been conducted by Internal Audit during the reporting period. The conclusion of the certification results conducted by the Control Group indicates that the adequacy and effectiveness of ICOFR are at an effective level. On the other hand, internal control over the Company's operations is carried out through the Internal Control Review (ICR) mechanism by Internal Audit through operational audit mechanisms. The review results conducted throughout 2023 show that the Company has implemented standard operating procedures in accordance with best practices in marine service management.

Perkara Hukum dan Sanksi Administratif

Legal Issues and Administrative Sanctions

PTK senantiasa memperhatikan aspek kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dewan Komisaris dan Direksi berupaya untuk selalu mematuhi aspek hukum yang berlaku agar terhindar dari permasalahan hukum sehingga sepanjang tahun 2023 tidak terdapat perkara hukum yang dihadapi oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Selain itu, pada tahun 2023 Perusahaan juga tidak terlibat dalam pelanggaran hukum apa pun yang berkaitan dengan masalah perburuan atau ketenagakerjaan, pelanggan, kepailitan, komersial atau persaingan usaha dan lingkungan.

PTK consistently prioritizes compliance with applicable laws and regulations. The Board of Commissioners and Directors strive to adhere to legal standards to avoid legal issues, and as a result, no legal cases were faced by members of the Board of Commissioners or Directors throughout 2023.

Additionally, in 2023, the Company was not involved in any legal violations related to labor or employment issues, customer disputes, bankruptcy, commercial or competition issues, or environmental matters.

Permasalahan Hukum yang Dihadapi Perusahaan Tahun 2023

Legal Issues Faced by the Company in 2023

Pada tahun 2023, Perusahaan menghadapi 6 (enam) perkara hukum perdata yang saat ini masih dalam proses penyelesaian, sebagaimana tabel berikut:

In 2023, the Company faced 6 (six) civil legal issues which are currently still in the process of being resolved, as in the following table:

No	Objek Perkara Case Object	Status Perkara Case Status	Risiko dan Nilai Tuntutan Risk and Value of Claims
1.	Gugatan Sewa Aset Lahan di Bagus Kuning, Palembang. Land Asset Lease Lawsuit in Bagus Kuning, Palembang.	Telah terdapat putusan kasasi dari Mahkamah Agung namun sampai dengan Laporan Tahunan ini diterbitkan, PTK belum menerima salinan putusan dimaksud. The Supreme Court made a cassation decision. However, as of the publication of this Annual Report, PTK has not received a copy of the decision.	Perkara ini tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap operasional dan keuangan PTK. This case caused no significant impact on PTK's operations and finances.
2.	Perkara terkait Kegagalan Pembangunan 3 (tiga) Unit Kapal <i>Harbour Tug</i> 3200 HP oleh galangan. Case related to failure of construction of 3 (three) 3200 HP Harbor Tug Vessels by the shipyard.	Telah terdapat putusan dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan putusan BANI tersebut telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Cirebon. The Indonesian National Arbitration Board (BANI) made the decision and registered it with the Cirebon District Court.	Perkara ini tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap operasional dan keuangan PTK. This case caused no significant impact on PTK's operations and finances.
3.	Perkara terkait kegagalan Pembangunan 2 (dua) Unit Kapal <i>Harbour Tug</i> 3200 HP. Case related to the failure of the construction of 2 (two) 3200 HP Harbor Tug Vessels.	Telah terdapat putusan dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan putusan BANI tersebut telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Batam. Saat ini pihak Tergugat sedang menempuh upaya hukum dengan mengajukan Permohonan Pembatalan atas Putusan BANI ke Pengadilan Negeri Batam. The Indonesian National Arbitration Board (BANI) made the decision and registered it with the Batam District Court. Currently the Defendant is taking legal action by submitting a Request for Cancellation of the BANI Decision to the Batam District Court.	Perkara ini tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap operasional dan keuangan PTK. This case caused no significant impact on PTK's operations and finances.
4.	Gugatan terkait Kewajiban Pembayaran atas Pekerjaan Keagenan Kapal. Lawsuit related to payment obligations for ship agency work.	Proses Persidangan di Pengadilan Negeri Tangerang. Trial Process at Tangerang District Court.	Perkara ini tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap operasional dan keuangan PTK. This case caused no significant impact on PTK's operations and finances.



No	Objek Perkara Case Object	Status Perkara Case Status	Risiko dan Nilai Tuntutan Risk and Value of Claims
5.	Gugatan terkait Kewajiban Pembayaran atas Pekerjaan Keagenan Kapal. Lawsuit related to payment obligations for ship agency work.	Proses Persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya. Trial Process at Surabaya District Court.	Perkara ini tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap operasional dan keuangan PTK. This case caused no significant impact on PTK's operations and finances.
6.	Gugatan terkait Kewajiban Pembayaran atas Pekerjaan Keagenan Kapal. Lawsuit related to payment obligations for ship agency work.	Proses Persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Trial Process at South Jakarta District Court.	Perkara ini tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap operasional dan keuangan PTK. This case caused no significant impact on PTK's operations and finances.

Pada tahun 2023, tidak terdapat permasalahan hukum, baik pidana maupun perdata yang dihadapi oleh Entitas Anak Perusahaan.

In 2023, no legal issues, whether criminal or civil, were faced by the Company's subsidiaries.

Sanksi Administratif

Administrative Sanctions



Sebagai bentuk komitmen Perusahaan terhadap pemenuhan kepatuhan peraturan perundang-undangan, pada tahun 2023 tidak terdapat teguran ataupun sanksi administratif yang diberikan kepada PTK dari instansi/lembaga yang berwenang di bidang usaha Perusahaan.

As part of the Company's commitment to legal compliance, there were no warnings or administrative sanctions issued to PTK by any authorities in the Company's business sector in 2023.



Kode Etik Perusahaan

Code of Conduct

PTK mewajibkan seluruh insan Perusahaan, termasuk Dewan Komisaris dan Direksi untuk membangun hubungan dengan para pemangku kepentingan dengan berlandaskan hubungan yang profesional, jujur, beretika dan berintegritas. Untuk mendukung komitmen tersebut, PTK telah memiliki Kode etik Perusahaan (*Code of Conduct*) yang sejalan dengan nilai dan budaya Perusahaan, yaitu AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif).

PTK requires all Company personnel, including the Board of Commissioners and Directors, to build relationships with stakeholders based on professionalism, honesty, ethics, and integrity. To support this commitment, PTK has established Code of Conduct aligned with the Company's values and culture, known as AKHLAK (Amanah, Competent, Harmonious, Loyal, Adaptive, and Collaborative).

PTK telah melakukan pembaharuan terhadap kode etik Perusahaan dan telah ditetapkan oleh Direksi pada tanggal 30 November 2022.

PTK updated its Code of Conduct, which was ratified by the Board of Directors on November 30, 2022.

Nilai dan Budaya Perusahaan

Company Values and Culture



Pokok-Pokok Pedoman *Code of Conduct*:

Principles of *Code of Conduct*:

Mengatur prinsip-prinsip dan perilaku yang harus diterapkan dalam berinteraksi dengan pemangku kepentingan.

Set the principles and behavior that must be applied in interacting with stakeholders.

1. Bab Umum

- Pendahuluan
- Tujuan
- Ruang Lingkup
- Pengertian
- Referensi

2. Bab Visi, Misi dan Tata Nilai Unggulan Perusahaan

- Visi dan Misi
- Tata Nilai Unggulan Perusahaan

3. Prinsip-prinsip GCG, Perilaku Integritas Insan PTK

- Integritas
- Persaingan Usaha yang Sehat
- Sikap Kerja Profesional

4. Persaingan Sehat

- Persaingan Usaha yang Sehat
- Proses Pengadaan Penyedia Barang/Jasa
- Informasi Penting

5. Kerahasiaan Data dan Transparansi

- Kerahasiaan Data dan Informasi
- Pelaporan Akuntansi dan Keuangan
- Pengelolaan Arsip

6. Sikap Profesional

- Sikap Kerja Profesional
- Berani Mengungkapkan Masalah
- Pengambilan Keputusan
- Hak Kekayaan Intelektual
- Menghindari Diskriminasi
- Kesempatan Karir yang Sama
- Standar Ketenagakerjaan
- Bebas Narkoba dan Minuman Keras
- Aktivitas Politik
- Media Massa
- Organisasi Profesi

7. Komitmen Terhadap Pemangku Kepentingan Lainnya

- Komitmen Terhadap Pemegang Saham
- Komitmen Terhadap Pekerja
- Komitmen Terhadap Serikat Pekerja
- Komitmen Terhadap Anak Perusahaan
- Komitmen Terhadap Penyedia Barang/Jasa
- Komitmen Terhadap Pemerintah Sebagai Regulator
- Komitmen Terhadap Legislatif
- Komitmen Terhadap Investor, Kreditur dan Bank
- Komitmen Terhadap Mitra Usaha, Lembaga Penelitian dan Perguruan Tinggi

1. General Chapter

- Introduction
- Objective
- Scope
- Understanding
- Reference

2. Chapter Vision, Mission and Values of the Company

- Vision and mission
- The Company's Values of Excellence

3. GCG Principles, Integrity Behavior of PTK People

- Integrity
- Healthy Business Competition
- Professional Work Attitude

4. Healthy Competition

- Healthy Business Competition
- Procurement Process for Goods/Service Providers
- Important Information

5. Data Confidentiality and Transparency

- Data and Information Confidentiality
- Accounting and Financial Reporting
- Archives Management

6. Professional Attitude

- Professional Work Attitude
- Dare to Express Problems
- Decision-making
- Intellectual property rights
- Avoiding Discrimination
- Equal Career Opportunities
- Employment Standards
- Drug and Alcohol Free
- Political Activities
- Mass media
- Professional Organizations

7. Commitment to Other Stakeholders

- Commitment to Shareholders
- Commitment to Employees
- Commitment to Trade Unions
- Commitment to Subsidiaries
- Commitment to Goods/Service Providers
- Commitment to the Government as Regulator
- Commitment to the Legislature
- Commitment to Investors, Creditors and Banks
- Commitment to Business Partners, Research Institutions and Universities



- Komitmen Terhadap Kesehatan, Keselamatan, Keamanan (K3) dan Lindungan Lingkungan
- Komitmen Terhadap Masyarakat Sekitar dan Tanggung Jawab Sosial

- Commitment to Health, Safety, Security (K3) and Environmental Protection
- Commitment to the Surrounding Community and Social Responsibility

8. Whistleblowing System

- Ruang Lingkup
- Struktur
- Fungsi Pengelola
- Saluran Penyampaian Pelaporan

8. Whistleblowing System

- Scope
- Structure
- Management Function
- Reporting Submission Channel.

Pemberlakuan Pedoman Perilaku kepada Seluruh Insan PTK

Implementation of the Code of Conduct for All PTK Personnel

PTK telah menetapkan kode etik sesuai dengan visi dan misi Perusahaan yang berfungsi sebagai pedoman perilaku bagi seluruh pegawai dalam berinteraksi, baik dengan pihak di dalam lingkungan Perusahaan maupun pihak luar. Kode etik Perusahaan diperkenalkan ke seluruh tingkatan di lingkungan Perusahaan dan tertulis dalam kontrak kerja perekrutan pegawai yang harus dipahami dan ditandatangani oleh seluruh pegawai. Seluruh pegawai diharapkan untuk berperilaku sesuai nilai-nilai Perusahaan dan menerapkan kode etik dalam kegiatan sehari-hari.

PTK has set forth a Code of Conduct that aligns with the Company's vision and mission, serving as a behavioral guide for all employees in their interactions, both internally and externally. The Company introduces the Code of Conduct at all levels and includes it in employment contracts, which must be understood and signed by all employees. All employees are expected to act according to the Company's values and apply the Code of Conduct in their daily activities.

Seluruh insan PTK wajib menempatkan diri untuk menyamakan dan menyatukan keyakinan dan tekad agar dapat menerapkan sikap dan perilaku kerja yang sesuai dengan sistem nilai dan budaya kerja yang dianut Perusahaan, yang dikodifikasikan dalam *Code of Conduct*. Keberhasilan penerapan *Code of Conduct* merupakan tanggung jawab dari setiap insan PTK di lingkungan unit kerja masing-masing. *Code of Conduct* PTK wajib dilaksanakan mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, Pimpinan Unit sampai dengan pekerja. *Code of Conduct* PTK dilaksanakan secara konsisten sebagai budaya kerja dalam aktivitas operasional sehari-hari.

All PTK personnel are required to align their beliefs and determination to adopt attitudes and behaviors consistent with the Company's value system and work culture, codified in the Code of Conduct. The successful implementation of the Code of Conduct is the responsibility of each PTK member within their respective units. The PTK Code of Conduct must be followed consistently from the Board of Commissioners, Directors, and Unit Leaders to all employees, integrating it as a work culture in daily operations.

Sosialisasi dan Penegakan Pedoman Perilaku

Socialization and Enforcement of the Code of Conduct

Perusahaan memastikan bahwa setiap insan PTK mengetahui, memahami, dan menerapkan kode etik baik di lingkungan dalam maupun di lingkungan luar perusahaan. Salah satu upaya untuk mencapai hal tersebut adalah dengan melakukan sosialisasi pedoman CoC bagi seluruh insan Perusahaan. Sosialisasi tersebut dilakukan dengan memanfaatkan berbagai media dan kesempatan internal event kepada seluruh pekerja pada segala tingkatan termasuk tenaga *outsourcing*.

The Company ensures that every PTK personnel knows, understands, and applies the Code of Conduct both internally and externally. One effort to achieve this is through the socialization of the CoC guidelines to all Company personnel. This socialization is conducted using various media and internal events for all employees, including outsourced staff.

Secara berkala PTK melakukan sosialisasi atas Pedoman Etika Perusahaan dilakukan melalui pengisian kepatuhan dan pemahaman terkait kode etik, dengan contoh sebagai berikut:

PTK periodically socializes the Company's Code of Conduct through compliance and understanding activities related to the code, with the following example:



Ayo lakukan pengisian

COC dan COI Tahun 2023 & Gratifikasi Bulan Maret 2023

- Pengisian COC dan COI dilakukan **satu kali dalam setahun**
- Form Gratifikasi online untuk **periode maret 2023** diisi dan dilaporkan dari **tanggal 25 Maret sampai 5 April 2023**
- Untuk informasi mengenai pengisian pada COMPOLS silahkan menghubungi **PIC Compliance Sdri. Sherly.**
 **sherly.margareth@pertamina.com**
 **08111099550**

Klik broadcast ini untuk melakukan pengisian

Pengisian GCG merupakan salah satu bentuk implementasi nilai utama AKHLAK – LOYAL dari Pekerja PT Pertamina Trans Kontinental



Dalam hal penegakan Kode Etik Perusahaan, PTK memiliki Chief Compliance Officer yang melakukan pembinaan, pengembangan dan penerapan praktik-praktik GCG, termasuk kepatuhan terhadap kode etik, etika bisnis, dan peraturan yang berlaku. PTK memberlakukan sistem pemberian sanksi yang diberlakukan kepada seluruh pegawai. Setiap pelanggaran terhadap Kode Etik Perusahaan akan dikenakan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) serta ketentuan pelanggaran disiplin lainnya yang berlaku di Perusahaan. Adapun sanksi-sanksi yang diberikan kepada pelanggaran Pedoman Perilaku sebagai Kode Etik, mulai dari teguran tertulis, pemberian surat peringatan, penurunan golongan upah sampai dengan pemutusan hubungan kerja.

In enforcing the Company Code of Conduct, PTK has a Chief Compliance Officer responsible for coaching, developing, and implementing GCG practices, including compliance with the code of conduct, business ethics, and applicable regulations. PTK enforces a sanction system applicable to all employees. Any violations of the Company Code of Conduct will be subject to the provisions in the Collective Labor Agreement (PKB) and other disciplinary regulations in the Company. Sanctions for violations of the Code of Conduct range from written warnings, warning letters, demotion, to termination of employment.

Jumlah Pelanggaran Kode Etik dan Tindak Lanjutnya

Number of Code of Conduct Violations and Follow-Up Actions

Indikasi atas pelanggaran kode etik Perusahaan yang dilakukan oleh setiap insan PTK dapat disampaikan secara langsung kepada pimpinan atau atasan serta fungsi/unit kerja yang telah ditunjuk Perusahaan. Setiap laporan pelanggaran yang masuk akan diproses dan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Selama tahun 2023 terdapat 2 (dua) pelanggaran terkait kode etik ditindaklanjuti melalui penyelesaian hubungan industrial kepada 2 (dua) pekerja.

Indications of violations of the Company's Code of Conduct by PTK personnel can be reported directly to the supervisor or designated Company function/unit. Every reported violation will be processed and followed up according to the applicable mechanism. In 2023, there were two violations related to the Code of Conduct, which were resolved through industrial relations processes involving two employees.

Kebijakan Anti Korupsi, Anti Suap dan Pengendalian Gratifikasi

Anti-Corruption, Anti-Bribery, and Gratification Control Policies

Kebijakan Anti Korupsi dan Anti Suap

Anti-Corruption and Anti-Bribery Policy

PTK menegaskan komitmennya untuk mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan budaya anti korupsi demi menjaga integritas dan kredibilitas Perusahaan. PTK secara tegas menyatakan tidak ada toleransi terhadap korupsi dalam bentuk apa pun, termasuk praktik suap dan kontribusi politik untuk mendapatkan atau mempertahankan keuntungan bisnis. PTK berkomitmen untuk menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan secara konsisten mengacu pada standar ISO 37001:2016.

Komitmen PTK terhadap kepatuhan anti korupsi diwujudkan dalam sejumlah kebijakan dan program kerja yang dirancang untuk memenuhi persyaratan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kebijakan anti korupsi di PTK tertuang dalam sejumlah kebijakan yang menjadi panduan seluruh Insan Perusahaan dalam mencegah dan menangani tindakan korupsi, antara lain sebagai berikut:

PTK reaffirms its commitment to supporting government efforts to enhance an anti-corruption culture, maintaining the integrity and credibility of the Company. PTK unequivocally declares zero tolerance for any form of corruption, including bribery and political contributions to secure or retain business advantages. PTK is dedicated to consistently implementing an Anti-Bribery Management System in line with ISO 37001:2016 standards.

PTK's commitment to anti-corruption compliance is reflected in various policies and work programs designed to meet the requirements of Law No. 20 of 2001, which amends Law No. 31 of 1999 on the Eradication of Corruption Crimes. The anti-corruption policy at PTK is outlined in several guidelines that serve as a reference for all Company personnel in preventing and addressing corruption, including but not limited to the following:



1. Pedoman pengelolaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang telah disahkan melalui Direktur Utama melalui ketetapan No. A-001/PTK0320/2021-S0 pada Desember 2021;
2. Surat Keputusan Direksi No. Kpts-06/PTK0000/2023-S9 tentang Ratifikasi Sistem Tata Kerja Pengelolaan Pengaduan;
3. Pedoman Pengendalian Gratifikasi No. A-004/PTK0300/2022-S9 tanggal 30 November 2022
4. Pedoman Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ditetapkan melalui Surat Keputusan No. Kpts-547/C0000/2021-S0 tanggal 27 Mei 2021 tentang Gratifikasi Pedoman PT Pertamina (Persero) No. A13-001/N00200/2021-S9 Tentang Pengelolaan Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

1. Guidelines for the management of the Anti-Bribery Management System (SMAP), authorized by the President Director through Decree No. A-001/PTK0320/2021-S0 in December 2021;
2. Board of Directors' Decree No. Kpts-06/PTK0000/2023-S9 on the Ratification of the Complaint Management System;
3. Gratification Control Guidelines No. A-004/PTK0300/2022-S9 on November 30, 2022;
4. Guidelines for Reporting State Officials' Wealth (LHKPN) established through Decree No. Kpts-547/C0000/2021-S0 on May 27, 2021, concerning PT Pertamina (Persero) Gratification Guidelines No. A13-001/N00200/2021-S9 on Managing Obligations for Reporting State Officials' Wealth.

Secara khusus, sejak 2021 Direksi Perusahaan telah menandatangani deklarasi anti korupsi dan penyuapan yang dituangkan dalam kebijakan anti penyuapan yang berlaku bagi seluruh insan PTK.

Specifically, the Company's Board of Directors has signed an anti-corruption and anti-bribery declaration since 2021 which is embodied in an anti-bribery policy applicable to all PTK personnel.



PTK secara aktif mengimplementasikan langkah-langkah anti korupsi dan anti suap melalui berbagai program yang telah konsisten dilakukan, antara lain pelaksanaan sosialisasi *sharing session fraud awareness* dan WBS, pengisian *survey PERFECT 2023 (Fraud Perception Index)* untuk mengetahui tingkat pemahaman seluruh pegawai dan *vendor* terhadap pencegahan dan penanganan anti korupsi serta sosialisasi gratifikasi pada tahun 2023.

Pelatihan Anti Korupsi Tahun 2023 Anti-Corruption Training in 2023

Pada tahun 2023, PTK telah menyelenggarakan sejumlah program pelatihan terkait anti korupsi yang diberikan kepada para pegawai. Salah satu pelatihan yang telah dilakukan yaitu pelatihan Internal Auditor dan Awareness Sistem & Standar Manajemen Terintegrasi (ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001:2015, ISO 27001:2013, dan ISO 37001:2016) yang diselenggarakan pada tanggal 9-11 Oktober 2023 di Yogyakarta kepada 39 orang peserta.

Atas berbagai upaya pencegahan tindakan anti korupsi yang dilakukan, hingga akhir 31 Desember 2023, tidak terdapat insiden korupsi yang terbukti yang mengakibatkan pegawai diberhentikan atau dihukum karena korupsi serta insiden korupsi yang terbukti dan mengakibatkan kontrak dengan mitra bisnis diakhiri atau tidak diperbarui karena pelanggaran terkait korupsi.

PTK actively implements anti-corruption and anti-bribery measures through various consistent programs, including the conduct of fraud awareness and WBS sharing sessions, the completion of the PERFECT 2023 survey (Fraud Perception Index) to assess the understanding of all employees and vendors regarding anti-corruption prevention and handling, and the socialization of gratification in 2023.

In 2023, PTK conducted several anti-corruption training programs for employees. One of these trainings was the Internal Auditor and Integrated Management System & Standards Awareness training (ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001:2015, ISO 27001:2013, and ISO 37001:2016), held from October 9-11, 2023, in Yogyakarta for 39 participants.

Due to the various anti-corruption prevention efforts undertaken, by December 31, 2023, there were no proven corruption incidents that resulted in employee dismissal or punishment, nor any proven corruption incidents that led to the termination or non-renewal of business contracts due to related violations.

Kebijakan Pengendalian Gratifikasi

Gratification Control Policy

Untuk memperkuat komitmen anti korupsi di Perusahaan, PTK juga menerapkan kebijakan pengendalian gratifikasi yang secara konsisten telah dilakukan secara berkesinambungan. Pengendalian gratifikasi ini adalah bagian dari upaya PTK untuk membangun budaya dan sistem pencegahan korupsi.

Pedoman Pengendalian Gratifikasi No.A-004/PTK0300/2022-S9 tanggal 30 November 2022 merupakan penjabaran lebih lanjut dari *Code of Conduct* (CoC) dan ketentuan dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2015, serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pedoman Pengendalian Gratifikasi dibuat untuk membantu pekerja PT Pertamina Trans Kontinental dalam memahami definisi dan konsep Gratifikasi serta mengetahui tindakan yang harus dilakukan apabila berhadapan dengan Gratifikasi. Melalui kebijakan ini, Perusahaan melarang setiap pegawai, termasuk Dewan Komisaris dan Direksi beserta jajarannya untuk menerima hadiah atau cinderamata yang dianggap tindakan penyuapan.



Pengelola laporan gratifikasi di PTK dilakukan oleh Fungsi Compliance dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Berwenang untuk menerima dan menelaah atas Laporan penerimaan/penolakan Gratifikasi Insan PT Pertamina Trans Kontinental yang dilaporkan melalui *Compliance Online System* atau service. compliance@pertamina.com;
2. Berwenang untuk mengajukan usulan terkait tindak lanjut atas laporan penerimaan/penolakan Gratifikasi;
3. Berwenang mengusulkan pengelolaan/peruntukan/penyaluran barang Gratifikasi yang menjadi kewenangan Pertamina Trans Kontinental;
4. Berwenang untuk melakukan koordinasi dengan KPK terkait laporan Gratifikasi;
5. Berwenang meneruskan laporan penerimaan/penolakan Gratifikasi dari Insan PTK kepada KPK melalui PT Pertamina (Persero);
6. Memberikan laporan penerimaan/penolakan Gratifikasi dari Insan PTK yang telah dilaporkan kepada Pertamina yang kemudian dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) minimal 1 (satu) tahun sekali kepada *Chief Officer Compliance*;
7. Berwenang untuk melaksanakan sosialisasi terkait Gratifikasi dan melaksanakan kegiatan lainnya yang terkait.

Sampai dengan akhir tahun 2023, terdapat 1 (satu) laporan gratifikasi yang diterima oleh Insan PTK dan telah diserahkan kepada Fungsi *Compliance*.

To strengthen the Company's anti-corruption commitment, PTK also implements a consistent and continuous gratification control policy. This control is part of PTK's efforts to build a culture and system of corruption prevention.

The Gratification Control Guidelines No. A-004/PTK0300/2022-S9 on November 30, 2022, further elaborate on the Code of Conduct (CoC) and the 2015 Gratification Control Guidelines of the Corruption Eradication Commission, as well as Law No. 20 of 2001 regarding Amendments to Law No. 31 of 1999 on the Eradication of Corruption Crimes. The Gratification Control Guidelines help PT Pertamina Trans Kontinental employees understand the definition and concept of gratification and know what actions to take when confronted with gratification. Through this policy, the Company prohibits all employees, including the Board of Commissioners and the Board of Directors, from accepting gifts or souvenirs that could be perceived as bribery.

Gratification reports at PTK are managed by the Compliance Function with the following duties and responsibilities:

1. Authorized to receive and review reports on the acceptance/rejection of Gratification by PT Pertamina Trans Kontinental personnel, submitted via the Compliance Online System or service. compliance@pertamina.com;
2. Authorized to propose follow-up actions related to reports on the acceptance/rejection of Gratification;
3. Authorized to propose the management/distribution of gratification items under the authority of Pertamina Trans Kontinental;
4. Authorized to coordinate with the Corruption Eradication Commission (KPK) regarding gratification reports;
5. Authorized to forward reports on the acceptance/rejection of Gratification from PTK personnel to the KPK through PT Pertamina (Persero);
6. Providing reports on the acceptance/rejection of Gratification from PTK personnel, which have been reported to Pertamina and then to the KPK at least once a year to the Chief Compliance Officer;
7. Authorized to conduct socialization related to Gratification and other related activities.

As of the end of 2023, there was one gratification report received by PTK personnel and had been submitted to the Compliance Function.

Kebijakan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Policy on State Officials' Wealth Report (LHKPN)

100%

Menyadari pentingnya LHKPN sebagai salah satu kunci penting upaya pemberantasan korupsi, pada tahun 2023 seluruh pejabat yang menjadi wajib lapor LHKPN di PTK telah menyampaikan laporan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi secara tepat waktu.

Recognizing the importance of the LHKPN as a key element in the fight against corruption, in 2023, all officials at PTK are required to report their assets submitted their wealth reports to the Corruption Eradication Commission (KPK) on time.

Sejalan dengan upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mendorong seluruh instansi dan lembaga pemerintahan dalam upaya pemberantasan korupsi, PTK secara konsisten mengarahkan Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh jajarannya untuk mengedepankan integritas dan transparansi dalam setiap aktivitas bisnisnya. Setiap tahun Perusahaan mengarahkan dan mengkoordinasikan para pejabat yang menjadi wajib lapor untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dengan tepat waktu.

Aligned with the KPK's efforts to encourage all government institutions and agencies in the fight against corruption, PTK consistently directs the Board of Commissioners, Directors, and all its ranks to prioritize integrity and transparency in every business activity. Each year, the Company directs and coordinates officials required to report to submit their State Officials' Wealth Report (LHKPN) on time.

Pedoman Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ditetapkan melalui Surat Keputusan No. Kpts-547/C0000/2021-S0 tanggal 27 Mei 2021 tentang Gratifikasi Pedoman PT Pertamina (Persero) No A13-001/N00200/2021-S9 Tentang Pengelolaan Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Dalam pedoman tersebut, diatur pejabat Perusahaan yang wajib melaporkan LHKPN, yaitu:

1. Direksi
2. Dewan Komisaris
3. Direksi Anak Perusahaan
4. Dewan Komisaris Anak Perusahaan
5. Vice President/Setara
6. Manager/Setara
7. Manager/Setara di Anak Perusahaan
8. Assistant Manager/Setara
9. Pejabat level struktural yang diberi kewenangan untuk memutuskan.

The Guidelines for Reporting State Officials' Wealth (LHKPN) are established through Decree No. Kpts-547/C0000/2021-S0 on May 27, 2021, on Gratification Guidelines PT Pertamina (Persero) No A13-001/N00200/2021-S9 on Managing the Obligation to Submit State Officials' Wealth Reports. The guidelines specify the Company officials required to report LHKPN, including:

1. Board of Directors
2. Board of Commissioners
3. Subsidiaries' Board of Directors
4. Subsidiaries' Board of Commissioners
5. Vice President/Equivalent
6. Manager/Equivalent
7. Subsidiaries' Manager/Equivalent
8. Assistant Manager/Equivalent
9. Structural level officials authorized to make decisions.

LHKPN disampaikan satu (1) kali dalam setahun kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara elektronik melalui aplikasi berbasis e-LHKPN. Prosedur penyampaian LHKPN di Perusahaan mengacu pada Peraturan KPK Nomor 02 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

The LHKPN is submitted once a year to the KPK electronically through the web-based e-LHKPN application. The procedure for submitting LHKPN in the Company refers to KPK Regulation No. 02 of 2020 concerning Amendments to KPK Regulation No. 07 of 2016 on Procedures for Registration, Announcement, and Examination of State Officials' Wealth.



LHKPN disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/berakhirnya jabatan/pensiun/pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.



LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan per tanggal 31 Desember tahun laporan dan wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

The LHKPN is submitted once a year to the KPK electronically through the web-based e-LHKPN application. The procedure for submitting LHKPN in the Company refers to KPK Regulation No. 02 of 2020 concerning Amendments to KPK Regulation No. 07 of 2016 on Procedures for Registration, Announcement, and Examination of State Officials' Wealth.

LHKPN must be submitted no later than three (3) months from the date of initial appointment, end of term, retirement, or reappointment after the end of term or retirement as a State Official. During the tenure of the State Official, LHKPN is submitted periodically once a year, reporting assets as of December 31 of the reporting year and must be submitted no later than March 31 of the following year.



PTK juga secara aktif melakukan sosialisasi kepada seluruh pejabat wajib lapor agar pelaporan LHKPN dapat disampaikan secara akurat dan tepat waktu. Berdasarkan data yang tercantum dalam aplikasi e-LHKPN diketahui bahwa tingkat kepatuhan pejabat Perusahaan terkait kewajiban penyampaian LHKPN telah sangat memadai yaitu mencapai 100% dari 228 pejabat Perusahaan yang wajib melakukan LHKPN.

PTK also actively socializes the reporting requirements to all officials required to report, ensuring accurate and timely submission of the LHKPN. According to data recorded in the e-LHKPN application, the compliance rate of Company officials regarding the LHKPN submission obligation is very satisfactory, reaching 100% from 228 Company officials required to submit LHKPN.

Manajemen Rantai Pasok dan Pengadaan Barang/Jasa

Supply Chain and Procurement Management

Komitmen PTK terhadap penerapan GCG secara komprehensif juga diwujudkan melalui kebijakan terkait pengadaan barang/jasa, dimana dalam prosesnya, Perusahaan selalu berupaya memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi dan efektivitas, serta mengedepankan sifat kompetitif, transparan, adil dan wajar, akuntabel, nilai budaya, serta tata kelola perusahaan yang baik.

PTK menjalankan optimalisasi proses pengadaan barang/jasa untuk meningkatkan keuntungan bagi Perusahaan dengan tetap mengutamakan penggunaan tenaga kerja nasional, pemanfaatan barang, jasa, teknologi, kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri dengan sepenuhnya mempertimbangkan aspek kualitas, jumlah, harga, ketersediaan, pengiriman dan aspek Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Lingkungan (K3LL).

Perusahaan bertindak adil dalam memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh vendor yang memiliki kualifikasi yang sama tanpa adanya diskriminasi, termasuk penggunaan pemasok lokal. Sebagai bentuk praktik pengadaan berkelanjutan, PTK berkomitmen untuk memberikan peluang kerja sama dengan pemasok lokal yaitu pemasok yang berdomisili di sekitar wilayah operasi PTK. Hal ini sebagai bentuk peran PTK dalam menggerakkan ekonomi lokal. Pada tahun 2023, PTK menjalin kerja sama dengan 145 pemasok lokal atau 100% dari total pemasok, dengan nilai pengadaan pemasok lokal sebesar Rp1,88 triliun atau 100% dari total nilai pengadaan.

PTK's commitment to the comprehensive implementation of GCG (Good Corporate Governance) principles is also demonstrated through its procurement policies. In the procurement process, the Company consistently strives to adhere to principles of efficiency and effectiveness, while prioritizing competitiveness, transparency, fairness, accountability, cultural values, and good corporate governance.

PTK optimizes the procurement process to enhance Company profits while prioritizing the use of domestic labor, products, services, technology, engineering, and design capabilities, fully considering quality, quantity, price, availability, delivery, and aspects of Occupational Health, Safety, and Environmental Protection.

The Company acts fairly in providing equal opportunities to all qualified vendors without discrimination, including the use of local suppliers. As part of sustainable procurement practices, PTK is committed to fostering partnerships with local suppliers residing near PTK's operational areas, thereby playing a role in stimulating the local economy. In 2023, PTK collaborated with 145 local suppliers, or 100% of the total suppliers, with a procurement value of Rp1.88 trillion, or 100% of the total procurement value.

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Procurement Policies

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa tercantum didalam Pedoman pengadaan barang/jasa No. A-001/PTK3300/2023-S9, Pedoman pengadaan Jasa Sewa Kapal No. A-002/PTK3300/2023-S9 dan Pedoman Pengelolaan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) No. A5-001/R0000/2020-S9. Pedoman tersebut digunakan sebagai panduan dalam proses pengadaan barang/jasa agar dapat menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas dan hasil yang optimal. Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa PTK juga telah mengadopsi implementasi QHSSE-MS (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018) dan ISO 37001:2016.

Procurement policies are outlined in the Procurement Guidelines No. A-001/PTK3300/2023-S9, the Ship Charter Service Procurement Guidelines No. A-002/PTK3300/2023-S9, and the Domestic Product Utilization Management Guidelines (P3DN) No. A5-001/R0000/2020-S9. These guidelines serve as a reference in the procurement process to ensure the procurement of quality goods and services with optimal results. PTK's procurement policies also incorporate the implementation of QHSSE-MS (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018) and ISO 37001:2016.

Selain itu, untuk mendukung proses pengadaan barang/jasa di Perusahaan, PTK juga menerbitkan beberapa prosedur/Tata Kerja Organisasi, sebagai berikut:

1. Tata Kerja Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Dalam Keadaan Darurat No. B-001/PTK3320/2021-S9;
2. Tata Kerja Organisasi Pelaksanaan Registrasi dan *Update* Data Penyedia Barang/Jasa No. B-002/PTK3320/2021-S9;
3. Tata Kerja Organisasi Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa No. B-003/PTK3320/2021-S9;
4. Tata Kerja Organisasi Pelaksanaan Pemilihan Penyediaan Barang/Jasa No. B-004/PTK3320/2021-S9;
5. Tata Kerja Organisasi Pelaksanaan Penilaian Kinerja dan Koreksi Sanksi Kepada Penyedia Barang/Jasa No. B5-005/I00100/2019-S9;
6. Tata Kerja Organisasi Pemeriksaan dan Penerimaan Barang/Material No. B-006/PTK3320/2021-S9;
7. Tata Kerja Organisasi Pelaksanaan Penerbitan Kontrak dan Amandemen Kontrak No. B-002/PTK3320/2023-S9;
8. Tata Kerja Organisasi Pengadaan Jasa Sewa kapal melalui Tender Terbatas dan Atau Penunjukkan langsung No. B-001/PTK3320/2022-S9;
9. Tata Kerja Organisasi Pengadaan Jasa Sewa Kapal Melalui Tender Terbuka No. B-002/PTK3320/2022-S9;
10. Tata Kerja Organisasi Pengambilan Opsi, Substitusi & Perpanjangan Masa Sewa No. B-003/PTK3320/2022-S9;
11. Tata Kerja Organisasi Pelaksanaan Negosiasi Secara Manual No. C-001/PTK3320/2021-S9;
12. Tata Kerja Organisasi Pembuatan *Owner Estimate*/Harga Perhitungan Sendiri No. C-002/PTK3320/2021-S9;
13. Tata Kerja Organisasi Pelaksanaan *Risk Assessment* dalam Rangka Penentuan Besaran Jaminan Pelaksanaan dan Denda Maksimal No. C5-001/I30000/2021-S9.

Additionally, PTK has issued several procedures/Organizational Work Instructions to support the procurement process, including:

1. Organizational Work Instruction for Emergency Procurement No. B-001/PTK3320/2021-S9;
2. Organizational Work Instruction for Registration and Update of Goods/Services Provider Data No. B-002/PTK3320/2021-S9;
3. Organizational Work Instruction for Procurement Planning No. B-003/PTK3320/2021-S9;
4. Organizational Work Instruction for the Selection of Goods/Services Providers No. B-004/PTK3320/2021-S9;
5. Organizational Work Instruction for Performance Assessment and Sanction Correction for Goods/Services Providers No. B5-005/I00100/2019-S9;
6. Organizational Work Instruction for the Inspection and Receipt of Goods/Materials No. B-006/PTK3320/2021-S9;
7. Organizational Work Instruction for Contract Issuance and Amendment No. B-002/PTK3320/2023-S9;
8. Organizational Work Instruction for Ship Charter Service Procurement through Limited Tender and/or Direct Appointment No. B-001/PTK3320/2022-S9;
9. Organizational Work Instruction for Ship Charter Service Procurement through Open Tender No. B-002/PTK3320/2022-S9;
10. Organizational Work Instruction for Option Taking, Substitution & Lease Extension No. B-003/PTK3320/2022-S9;
11. Organizational Work Instruction for Manual Negotiation No. C-001/PTK3320/2021-S9;
12. Organizational Work Instruction for Creating Owner Estimates/Self-Calculations No. C-002/PTK3320/2021-S9;
13. Organizational Work Instruction for Risk Assessment in Determining the Amount of Performance Bonds and Maximum Penalties No. C5-001/I30000/2021-S9.

Metode dan Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa Procurement Methods and Mechanisms

Sesuai dengan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan No. A-001/PTK3300/2023-S9 tanggal 27 April 2023, metode pemenuhan kebutuhan Barang/Jasa dapat dipenuhi dengan metode antara lain:

1. Sinergi Pertamina Incorporated

Pada prinsipnya, metode sinergi pertamina *incorporated* diutamakan dalam rangka memenuhi kebutuhan Barang/Jasa di lingkungan PT Pertamina Trans Kontinental. Namun apabila kebutuhan barang/jasa tidak dapat dipenuhi dengan metode sinergi pertamina *incorporated*, maka penentuan strategi dan metode pemenuhan kebutuhan Barang/Jasa ditentukan oleh Fungsi Procurement/Tim Tender/Pokja Pengadaan bersama dengan Fungsi Pengguna serta memasukkan Fungsi terkait lainnya (apabila diperlukan).

2. Tender

Tender dilaksanakan oleh Fungsi Pengadaan terhadap penyedia Barang/ Jasa yang dilakukan secara terbuka melalui papan pengumuman Perusahaan, website Perusahaan atau media cetak, dan dapat dilakukan secara terbatas dengan mengundang penyedia Barang/Jasa yang telah terdaftar sebagai rekanan Perusahaan dan/ atau penyedia jasa potensial yang dipilih oleh Fungsi Pengadaan. Berikut ini 5 (lima) jenis *tender* yang dilakukan oleh Fungsi Pengadaan di Lingkungan Perusahaan.

According to the Company's Procurement Guidelines No. A-001/PTK3300/2023-S9 dated April 27, 2023, procurement needs can be met through various methods:

1. Pertamina Incorporated Synergy

This method is prioritized for fulfilling procurement needs within PT Pertamina Trans Kontinental. If needs cannot be met through this method, procurement strategies are determined by the Procurement Function/Tender Team/Procurement Working Group in coordination with the User Function and other related functions as needed.

2. Tender

Tenders are conducted by the Procurement Function for goods/ services providers through public announcements, the Company's website, or print media. Tenders can also be limited by inviting registered or potential providers selected by the Procurement Function. The 5 (Five) types of tenders include:



a. *Tender Terbatas*

Tender terbatas dilaksanakan oleh Fungsi Pengadaan dengan nilai minimum pengadaan sebesar Rp25.000.000 sampai dengan Rp5.000.000.000 dan hanya dapat diikuti oleh seluruh Penyedia Barang/Jasa dalam Daftar Penyedia Terintegrasi (DPT) yang memenuhi persyaratan kualifikasi umum sesuai dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan. Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa yang spesifik namun terdapat lebih dari 1 (satu) Penyedia yang ditunjuk oleh Prinsipal, maka proses Pemilihan Penyedia dilakukan dengan metode Tender Terbatas antar Penyedia dimaksud.

b. *Tender Terbuka*

Tender terbuka dilaksanakan oleh Fungsi Pengadaan dan Fungsi terkait (apabila dibutuhkan) dengan nilai pengadaan diatas Rp5.000.000.000 dan/ atau pelaksanaan pemilihan Penyedia melalui metode tender terbatas yang telah mengalami 1 (satu) kali proses pemilihan gagal. Pada metode *tender* terbuka, Penyedia Barang/Jasa yang telah masuk ke dalam DPT ataupun belum dapat mengikuti proses tender terbuka namun bagi calon peserta yang belum masuk ke dalam DPT dibutuhkan penilaian kualifikasi umum terlebih dahulu.

c. *Penunjukan Langsung*

Penunjukan langsung dilaksanakan oleh Fungsi Pengadaan untuk kondisi tertentu yang telah tercantum di dalam Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa yang telah berlaku di Lingkungan PT Pertamina Trans Kontinental saat ini dan dilengkapi justifikasi Fungsi Pengguna sesuai otorisasi perusahaan.

d. *E-Purchasing*

Merupakan mekanisme pemenuhan kebutuhan Barang/Jasa melalui sistem katalog antara lain:

- *Outline Agreement (OA) catalog* yang merupakan daftar Barang/Jasa dalam kontrak payung
- *E-Catalog* yang merupakan *e-market place* yang berisi daftar Barang/ Jasa dengan spesifikasi tertentu dan merek yang bervariasi dari Pelaksana Kontrak *e-catalog*

e. *Pengadaan Langsung (Direct Purchase)*

- *Buyer Purchase*

Merupakan metode pemenuhan kebutuhan Barang/Jasa berdasarkan pertimbangan lingkup pekerjaan, tata waktu, sifat dan lokasi yang dirasa lebih efektif dan efisien dibandingkan apabila dilaksanakan melalui metode lain. Pembelian dapat dilakukan secara langsung (melalui *took, supermarket, bengkel, online buying, website* belanja , perseorangan , *home industry*, dll) dengan nilai pembelian berdasarkan harga pasar yang pembayarannya dapat dilakukan melalui *cash card* dan/atau *Procurement Card* dan/ atau pembayaran atas tagihan Penyedia Barang/Jasa.

- *User Purchase*

Merupakan metode pembelian langsung Barang/Jasa oleh Fungsi Pengguna melalui *Purchase Requisition (PR) Non Ada/ Cash card* sesuai dengan ketentuan berlaku sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan di dalam Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang berlaku di Lingkungan PTK.

3. Swakelola

Swakelola dilaksanakan dengan tujuan untuk

- a. memenuhi kebutuhan Barang/Jasa dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki PTK;
- b. Meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia di Lingkungan PTK;

a. *Limited Tender*

Limited tenders are conducted by the Procurement Function for procurements valued between Rp 25,000,000 and Rp 5,000,000,000. These tenders are open only to all Goods/ Services Providers listed in the Integrated Provider List (DPT) who meet the general qualification requirements for the specific tasks. In cases where there are multiple Providers appointed by the Principal for specific Goods/Services, the selection process is conducted through a Limited Tender among the designated Providers.

b. *Open Tender*

Open tenders are conducted by the Procurement Function and, if necessary, related Functions for procurements valued above Rp 5,000,000,000 or when a limited tender has failed after one selection process. In open tenders, both registered and unregistered Goods/Services Providers can participate, although unregistered candidates must undergo a general qualification assessment first.

c. *Direct Appointment*

Direct appointment is executed by the Procurement Function under specific conditions outlined in the Goods/Services Procurement Guidelines currently in effect within PT Pertamina Trans Kontinental, accompanied by justification from the User Function according to the Company's authorization.

d. *E-Purchasing*

E-purchasing is a mechanism for fulfilling Goods/Services needs through catalog systems, including:

- *Outline Agreement (OA) catalog*: A list of Goods/Services within a framework contract.
- *E-Catalog*: An e-marketplace listing Goods/Services with various specifications and brands from e-catalog contract executors.

e. *Direct Purchase*

- *Buyer Purchase*

This method fulfills Goods/Services needs based on considerations of work scope, timing, nature, and location, deemed more effective and efficient compared to other methods. Purchases can be made directly (e.g., through stores, supermarkets, workshops, online buying, shopping websites, individuals, home industries, etc.) with the purchase value based on market prices. Payments can be made via cash card and/or Procurement Card and/or billing to the Goods/Services Provider.

- *User Purchase*

This method involves direct purchase of Goods/Services by the User Function through Purchase Requisition (PR) Non-Ada/Cash card, according to the criteria set forth in the applicable Goods/Services Procurement Guidelines within PTK.

3. Self-Management (Swakelola)

Self-management is implemented to:

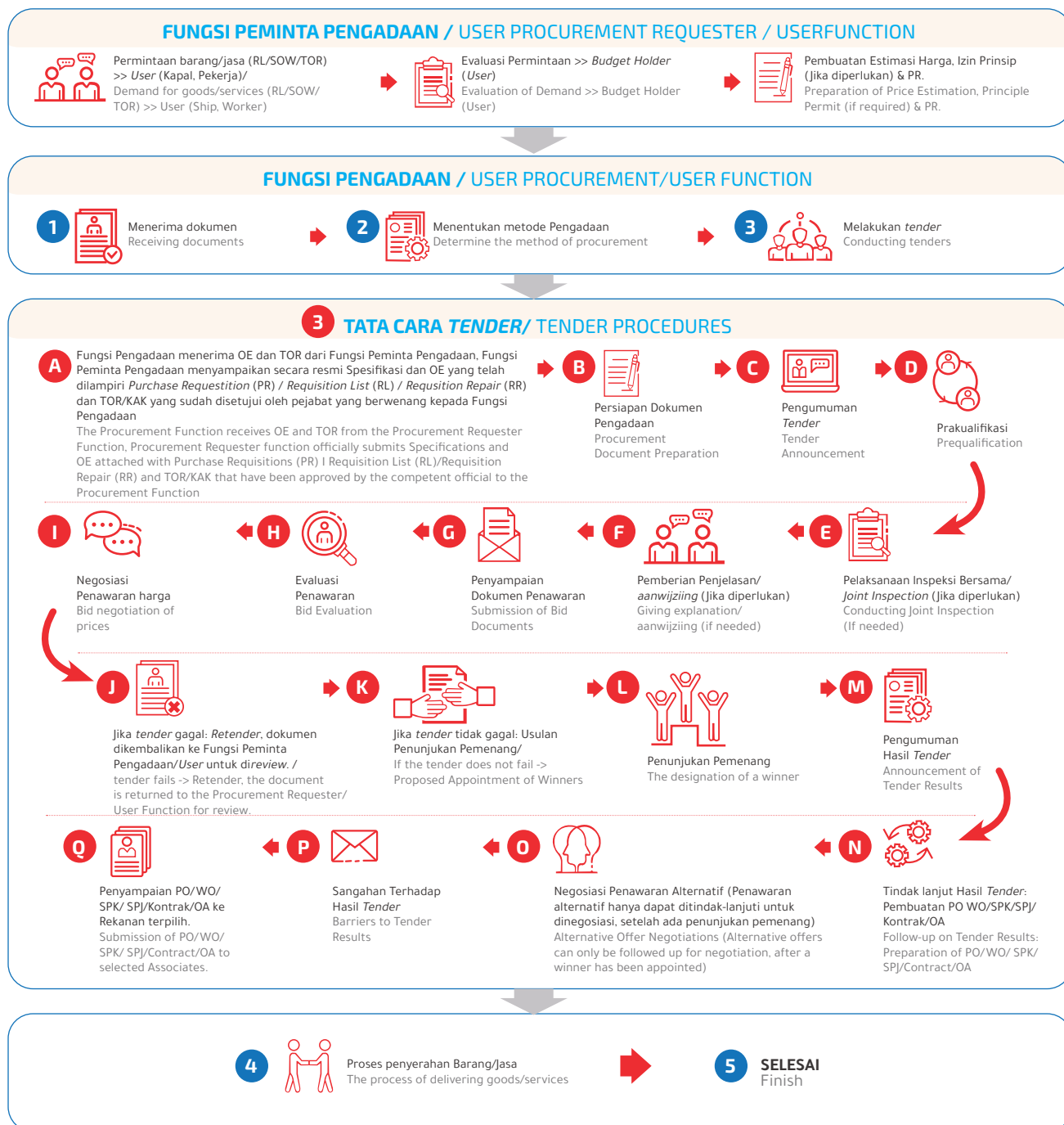
- a. Meet Goods/Services needs by optimizing the use of PTK's resources;
- b. Enhance the technical capabilities of human resources within PTK;



- c. kebutuhan Barang/Jasa dengan nilai pekerjaan kecil dan/atau lokasi yang sulit dijangkau;
- d. Memenuhi kebutuhan Barang/Jasa yang dapat dilaksanakan oleh Non Pelaku Usaha, antara lain Lembaga Pemerintah, Perguruan Tinggi dan Lembaga Ilmiah.

- c. Address the need for Goods/Services with small job values and/or locations that are difficult to reach;
- d. Fulfill Goods/Services needs that can be performed by Non-Business Entities, including Government Institutions, Universities, and Scientific Institutions.

Alur Proses Pengadaan Barang dan Jasa Process Flow of Procurement of Goods and Services



Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Procurement Activities

Sepanjang tahun 2023, kegiatan pengadaan barang/jasa Perusahaan terdiri dari pengadaan material dan pengadaan jasa, sebagai berikut:

1. Pengadaan Material

- Pengadaan Material Kapal
- Pengadaan Buku Publikasi
- Pengadaan Perlengkapan Inspeksi Bawah Air
- Pengadaan Alat Navigasi
- Pengadaan Alat Keselamatan
- Pengadaan Cat Kapal
- Pengadaan Pelumas
- Pengadaan *Oil Spill Dispersant* (OSD)
- Pengadaan BBM *Bunker*
- Pengadaan KRP
- Pengadaan Perangkat IT
- Pengadaan ATK
- Pengadaan Operasional Kantor, dan lain-lain.

2. Pengadaan Jasa

- Jasa Penyediaan Tenaga Kerja (TAD/TJKP)
- Jasa Perbaikan Kapal (*docking*, UWILD, *Overhaul*, dll)
- Jasa Perbaikan Kantor
- Jasa Ekspedisi BBM *Ownuse*
- Jasa Konsultasi
- Pembangunan Master Data
- Jasa Sarana Bantu Kegiatan *Mooring Unmooring*
- Jasa Sewa Kapal
- Jasa Transportir *Bunker*
- Jasa Sewa Kendaraan Ringan Penumpang ("KRP")
- Jasa Kebutuhan Operasional *Marine*
- Jasa Pekerjaan Pendampingan Kegiatan Operasional Keagenan
- Jasa Pendamping Kegiatan *Ship Crew Matter & Other Expense Operation*, dan lain-lain.

Throughout 2023, the Company's procurement activities included the acquisition of materials and services, as follows:

1. Material Procurement

- Ship Material Procurement
- Publication Book Procurement
- Underwater Inspection Equipment Procurement
- Navigation Equipment Procurement
- Safety Equipment Procurement
- Ship Paint Procurement
- Lubricant Procurement
- Oil Spill Dispersant (OSD) Procurement
- Bunker Fuel Procurement
- KRP Procurement
- IT Equipment Procurement
- Office Supplies Procurement
- Operational Office Supplies, and more.

2. Service Procurement

- Labor Supply Services (TAD/TJKP)
- Ship Repair Services (*docking*, UWILD, *Overhaul*, etc.)
- Office Repair Services
- Fuel Expedition Services for Ownuse
- Consultancy Services
- Master Data Development
- Mooring Unmooring Support Services
- Ship Rental Services
- Bunker Transport Services
- Light Passenger Vehicle Rental Services ("KRP")
- Marine Operational Services
- Operational Agency Support Services
- Ship Crew Matter & Other Expense Operation Support Services, and more.



Kebijakan Pemenuhan Hak-Hak Kreditur Policy on Creditors' Rights

PTK telah memiliki kebijakan mengenai hak-hak dan kewajiban Perusahaan kepada kreditur yang diatur dalam Tata Kerja Organisasi Pendanaan No. B-021/E1300/2021-SO. Kebijakan tersebut antara lain mengatur tentang pengelolaan kredit jangka panjang dan jangka pendek, hak dan kewajiban Perusahaan kepada kreditur dituangkan dalam bentuk perjanjian yang mengatur hak-hak dan kewajiban *financial* dan *non-financial*, kebijakan sebagai *avalist* (penjamin) dan kebijakan penggunaan dana.

PTK has established a policy regarding the Company's rights and obligations to creditors, outlined in the Organizational Funding Work Procedures No. B-021/E1300/2021-SO. This policy includes the management of long-term and short-term credit, specifying the Company's financial and non-financial rights and obligations to creditors in agreements, policies as an *avalist* (guarantor), and the policy on the use of funds.

Program Kepemilikan Saham Oleh Karyawan dan/atau Manajemen (ESOP/MSOP)

Employee and/or Management Stock Ownership Program (ESOP/MSOP)

Pada tahun 2023, PTK tidak memiliki program Kepemilikan Saham oleh Karyawan (*Employee Stock Ownership Program/ESOP*) dan/atau Manajemen (*Management Stock Ownership Program/MSOP*).

In 2023, PTK did not have an Employee Stock Ownership Program (ESOP) or a Management Stock Ownership Program (MSOP).

Kebijakan Untuk Mencegah *Insider Trading*

Policy on Insider Trading Prevention

Kebijakan *insider trading* merupakan upaya dan/atau aturan yang jelas mengenai perdagangan apapun dalam saham korporasi yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris dan orang dalam untuk memastikan bahwa siapapun tidak boleh mendapatkan keuntungan secara langsung atau tidak langsung dari informasi yang tidak/belum tersedia di pasar.

Hingga akhir tahun 2023, Perusahaan belum berstatus sebagai perusahaan terbuka (emiten) yang sahamnya diperjualbelikan ke publik, sehingga informasi terkait *insider trading* belum diatur secara spesifik dalam suatu kebijakan. Namun Perusahaan telah memiliki pengaturan terkait penyebaran informasi Perusahaan yang tercantum dalam Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*). Setiap karyawan diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan informasi non-publik mengenai Perusahaan, serta yang berkaitan dengan mitra kerja maupun pihak lainnya. Pengungkapan informasi rahasia tersebut kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan dilarang dilakukan.

Sepanjang tahun 2023, PTK tidak menerima pengaduan terkait dugaan penyebaran informasi non-publik oleh internal Perusahaan untuk kepentingan pihak tertentu (*insider trading*).

The insider trading policy is a clear effort and/or regulation regarding any trading in corporate shares by the Directors, Board of Commissioners, and insiders. This policy ensures that no one may directly or indirectly benefit from information that is not yet available in the market.

As of the end of 2023, the Company is not yet a publicly listed company with shares traded publicly. Therefore, information related to insider trading has not been specifically regulated in a separate policy. However, the Company has regulations regarding the dissemination of Company information as outlined in the Code of Conduct. Every employee is required to maintain the confidentiality of non-public information about the Company, as well as information related to business partners and other parties. Disclosing such confidential information to unauthorized parties is prohibited.

In 2023, PTK did not receive any complaints regarding the alleged dissemination of non-public information by Company insiders (employees) for the benefit of certain parties (insider trading).

Sistem Pelaporan Pelanggaran

Whistleblowing System

Sistem pelaporan pelanggaran/*Whistleblowing System* (WBS) merupakan hal yang penting bagi PTK untuk memitigasi potensi risiko dan menciptakan lingkungan perusahaan yang bersih dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), dan berperilaku etis dalam menjalankan/mengelola Perusahaan. Saat ini sistem WBS PTK terintegrasi pada saluran WBS Pertamina *Clean* yang diterapkan oleh PT Pertamina (Persero) di seluruh grup. Saluran WBS Pertamina *Clean* ini dikelola secara independen dan dapat dipercaya yang dilengkapi dengan kebijakan yang didasarkan pada nilai-nilai dasar Perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip dan praktik-praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

The Whistleblowing System (WBS) is fundamental for PTK to mitigate potential risks and create a clean corporate environment free from Corruption, Collusion, and Nepotism (KKN), while promoting ethical behavior in managing the Company. Currently, PTK's WBS is integrated into Pertamina Clean's WBS channel, implemented by PT Pertamina (Persero) across the group. This WBS channel is managed independently and reliably, equipped with policies based on the Company's core values in line with the principles and practices of Good Corporate Governance.



Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran Whistleblowing System Policy

Pada tahun 2023, PTK telah melakukan ratifikasi atas sistem dan kebijakan WBS PT Pertamina (Persero) selaku holding ke dalam Surat Keputusan Direksi No. Kpts-06/PTK0000/2023-S9 tentang Ratifikasi Sistem Tata Kerja Pengelolaan Pengaduan. Kebijakan dan sistem WBS ini dibuat untuk memungkinkan karyawan dan pemangku kepentingan lainnya dapat menyampaikan pelanggaran etika dan hukum atau indikasi pelanggaran sehingga tindakan dapat segera diambil untuk menyelesaikan masalah. Kebijakan Pelaporan Pelanggaran berlaku untuk semua karyawan di PTK, termasuk Komisaris dan Direksi.

In 2023, PTK ratified the WBS system and policies of PT Pertamina (Persero) as the holding company through the Directors' Decree No. Kpts-06/PTK0000/2023-S9 on the Ratification of the Complaint Management Work System. This policy and system enable employees and other stakeholders to report ethical and legal violations or indications of such violations, allowing prompt action to resolve issues. The Whistleblowing Policy applies to all employees at PTK, including Commissioners and Directors.

Perlindungan Bagi Pelapor Protection for Whistleblowers

Setiap Pelapor pelanggaran akan mendapatkan perlindungan dari Perusahaan terhadap perlakuan yang merugikan seperti pemecatan yang tidak wajar, penurunan jabatan atau pangkat, pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuknya, catatan yang merugikan *Personal File Record* dan perlakuan merugikan lainnya.

Whistleblowers will receive protection from the Company against adverse treatment such as unfair dismissal, demotion, harassment or discrimination in any form, negative records in their Personal File Record, and other detrimental actions.

Perusahaan juga akan menyediakan perlindungan hukum jika diperlukan, sejalan dengan yang diatur pada pasal 43 Undang-undang No. 15 tahun 2002 jo. Undang-undang No. 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Pasal 13 Undang-undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus bagi Pelapor dan Saksi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.

The Company will also provide legal protection if necessary, in accordance with Article 43 of Law No. 15 of 2002 in conjunction with Law No. 25 of 2003 on Money Laundering Crimes, Article 13 of Law No. 13 of 2006 on Witness and Victim Protection, and Article 5 of Government Regulation No. 57 of 2003 on Special Protection Procedures for Whistleblowers and Witnesses in Money Laundering Crimes.

Pengelola WBS dilarang mengungkapkan identitas Pelapor. Apabila dalam faktanya bahwa identitas pelapor perlu diungkapkan atau tidak disembunyikan sebagaimana diperlukan oleh undang-undang dan proses peradilan atau dalam rangka diperlukannya pengambilan tindakan yang sesuai, maka Pengelola WBS wajib meminta persetujuan terlebih dahulu kepada pihak Pelapor secara tertulis. Perlindungan terhadap Pelapor dilaksanakan apabila pelaporan pelanggaran yang disampaikan memenuhi kriteria, yaitu informasi dan atau pelanggaran yang disampaikan telah terjadi dan dapat dipercaya/*valid* (setelah dilakukan verifikasi oleh Pengelola WBS). Kriteria perlindungan terhadap Pelapor wajib dipenuhi, dalam rangka menghindarkan adanya laporan palsu, fitnah, bersifat mengada-ada atau tidak beritikad baik.

The WBS manager is prohibited from disclosing the identity of the Whistleblower. If it becomes necessary to reveal the Whistleblower's identity as required by law, judicial process, or to take appropriate action, the WBS Manager must first obtain written consent from the Whistleblower. Protection for Whistleblowers is granted if the reported violation meets the criteria of credible and valid information (after verification by the WBS Manager). These criteria must be met to avoid false reports, slander, fabricated accusations, or bad faith.

Selain itu, PTK juga memberikan perlindungan kepada terlapor, sebab Perusahaan juga mengedepankan kerahasiaan, asas praduga tidak bersalah dan profesionalisme dalam rangka melakukan proses tindak lanjut atas setiap pengaduan.

Additionally, PTK provides protection to the reported party, emphasizing confidentiality, the presumption of innocence, and professionalism in following up on each complaint.

Sarana dan Media Pelaporan Pelanggaran

Reporting Channels and Media



Laporkan tata laku yang tidak semestinya



Telepon Telephone
135 ext. 8



Email
pertaminaclean@tipoffs.com.sg



SMS & WhatsApp
0811 861 5000



Fax
(021) 381 5912



Website
pertaminaclean.tipoffs.info



Surat Mail
Attn: Tip-offs Anonymous™
Pertamina Clean
P.O. Box 2600 JKP 10026

Jenis Pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui WBS mencakup hal-hal sebagai berikut:

The types of violations that can be reported through the WBS include:

Jenis Pelanggaran Types of Violations	Keterangan Description
Korupsi Corruption	Perbuatan yang dilakukan secara curang atau melawan hukum oleh Dewan Komisaris, Direksi, Manajemen dan Pekerja yang bekerja untuk dan atas nama PTK, yang bertentangan dengan kepentingan perusahaan atau penyalahgunaan wewenang jabatan/kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan tujuan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan Perusahaan. Actions committed fraudulently or against the law by the Board of Commissioners, Directors, Management and Employees who work for and on behalf of PTK, which conflict with the interests of the company or abuse the authority of the position/trust given to them with the aim of enriching themselves, or other people or the corporation which could be detrimental to the Company.
Suap Bribery	Perbuatan seseorang berupa memberi uang sogok/menyogok/ memberi hadiah atau janji yang diberikan atau diterima dalam bentuk apapun kepada seseorang yang berpengaruh atau berhubungan dengan jabatannya dengan tujuan ingin mendapatkan sesuatu untuk kepentingan pribadi ataupun korporasi. The act of a person in the form of giving bribes/bribing/giving gifts or promises given or received in any form to someone who is influential or related to their position with the aim of getting something for personal or corporate interests.
Pencurian Theft	Mengambil barang atau sesuatu, baik seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau perusahaan, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Taking goods or something, whether wholly or partly belonging to another person or company, with the intention of possessing it unlawfully.
Benturan Kepentingan Conflict of Interest	Sebuah situasi di mana seseorang dihadapkan pada perbedaan kepentingan yaitu antara kepentingan pribadi atau kepentingan perusahaan sehingga harus memilih dan mendahulukan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadinya. A situation where a person is faced with differences in interests, namely between personal interests or company interests, so they must choose and prioritize the company's interests above their personal interests.
Kecurangan Fraud	Perbuatan tidak jujur atau tipu muslihat meliputi antara lain penipuan, pemerasan, pemalsuan, menyembunyikan atau penghancuran dokumen/laporan atau menggunakan dokumen palsu, yang dilakukan oleh seseorang/sekelompok orang yang menimbulkan potensi kerugian ataupun kerugian nyata terhadap perusahaan atau orang lain. Acts of dishonesty or deception include, among other things, fraud, extortion, forgery, concealment or destruction of documents/ reports or using fake documents, carried out by a person/group of people which causes potential or actual loss to the company or other people.

Pihak yang Mengelola Pengaduan Complaint Management

Pengelolaan WBS dilakukan oleh Fungsi WBS PT Pertamina (Persero) dan ditindaklanjuti oleh Fungsi Investigation Audit, WBS & Fraud Prevention PT Pertamina (Persero) untuk kemudian dapat dilimpahkan atau dilakukan koordinasi dengan Fungsi Internal Audit Holding/ Subholding/Anak Perusahaan Services jika dibutuhkan berdasarkan persetujuan CAE Holding.

The WBS is managed by the WBS Function of PT Pertamina (Persero) and followed up by the Investigation Audit, WBS & Fraud Prevention Function of PT Pertamina (Persero). Coordination with the Internal Audit Function of Holding/Subholding/Subsidiary Services may be done if necessary, based on CAE Holding's approval.

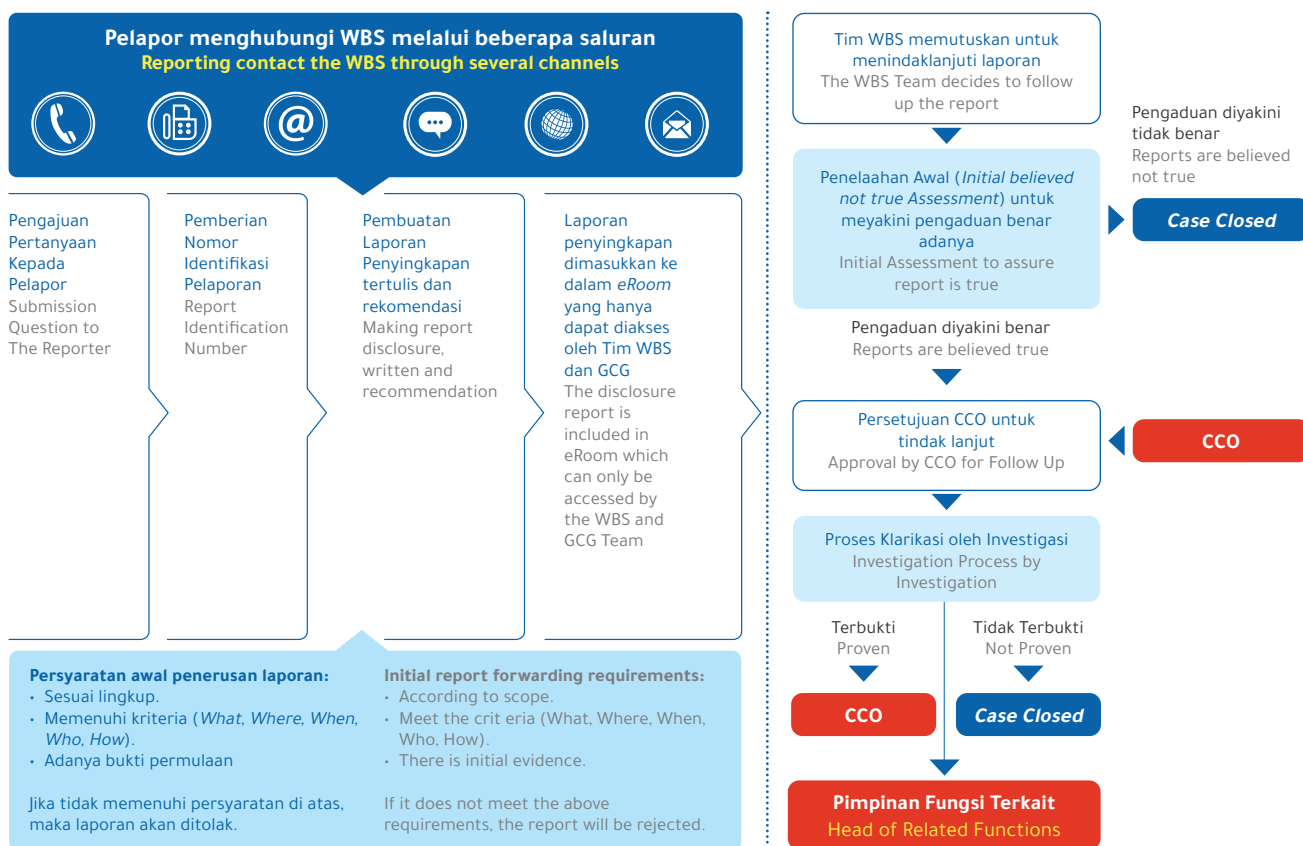
Mekanisme Penyampaian dan Penanganan Pelaporan Pelanggaran Reporting and Handling Mechanism

Mekanisme penyaluran pengaduan oleh pelapor pada dasarnya dilakukan melalui jalur formal yaitu melalui atasan langsung, direktorat dan fungsi terkait. Bila Pelapor memandang sarana pengaduan tidak efektif atau ada keraguan, Pelapor dapat menyalurkan pengaduan melalui WBS.

The primary reporting mechanism involves formal channels through direct supervisors, directorates, and related functions. If the Whistleblower deems these channels ineffective or has doubts, they may report through the WBS.

Mekanisme pelaporan dan penanganan pengaduan secara lengkap dapat dilihat pada skema proses pengaduan pelanggaran sebagai berikut:

The complete reporting and complaint handling mechanism is illustrated in the complaint process scheme:



Apabila ada laporan yang masuk ke dalam WBS akan ditindaklanjuti dengan peneraan sanksi yang tegas dan konsisten jika terbukti bersalah, sehingga dapat memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran maupun pihak lain yang memiliki niat melakukan pelanggaran.

Any reports submitted to the WBS will be followed up with strict and consistent sanctions if proven guilty, creating a deterrent effect for violators and others who may intend to commit violations.

Jumlah Pelaporan Pelanggaran dan Tindak Lanjut

Number of Violations Reported and Follow-Up Actions

Selama tahun 2023, terdapat 7 (tujuh) laporan pengaduan yang masuk melalui sarana pelaporan WBS. Setiap pengaduan ditindaklanjuti melalui analisis awal sampai dengan selesai dilakukan penanganan/ investigasi.

In 2023, there were seven (7) complaint reports submitted through the WBS reporting channels. Each complaint was followed up from initial analysis to the completion of handling/investigation.

Keterangan Information	2023	2022	2021
Jumlah Laporan yang masuk Number of incoming reports	7	5	2

Pemenuhan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Fulfillment of Good Corporate Governance Principles

Sepanjang tahun 2023, Direksi dan Dewan Komisaris beserta segenap jajaran Perusahaan telah menerapkan prinsip-prinsip GCG secara konsisten dan berkelanjutan pada setiap aktivitas bisnis Perusahaan. Perusahaan secara tegas mewajibkan setiap insan PTK untuk menjalankan praktik-praktik usaha yang sehat dengan menjunjung tinggi standar etika dan perilaku. PTK bertanggung jawab menjalankan seluruh kegiatan Perusahaan dengan memenuhi seluruh regulasi serta senantiasa menjalankan praktik GCG sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

Pemenuhan kepatuhan Perusahaan terhadap standar penerapan GCG, antara lain:

1. Pada tahun 2023, Perusahaan tidak pernah mendapatkan laporan adanya aktivitas Perusahaan yang mencemari lingkungan;
2. Tidak terdapat kasus atas ketidakpatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Setiap tahunnya, Perusahaan taat dalam melakukan pembayaran maupun pelaporan pajak;
3. Tidak terdapat ketidaksesuaian penyajian laporan tahunan dan laporan keuangan dengan peraturan yang berlaku dan standar akuntansi keuangan (SAK). Segala informasi, analisa, dan pembahasan kinerja pada laporan tahunan ini mengacu pada Laporan Keuangan Perusahaan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan;
4. Di tahun 2023, tidak terdapat kasus hubungan industrial yang terjadi berkaitan dengan karyawan di Perusahaan;
5. Perusahaan telah menyajikan segmen operasi pada Laporan Keuangan Audited tahun 2023;
6. Laporan Tahunan Perusahaan, baik yang disampaikan kepada pemegang saham dan para pemangku kepentingan, maupun yang telah diunggah pada situs web Perusahaan telah sesuai dengan buku Laporan Tahunan yang dicetak dan diterbitkan oleh Perusahaan.

In 2023, the Board of Directors and the Board of Commissioners, along with all levels of the Company, have consistently and sustainably applied GCG (Good Corporate Governance) principles in every business activity. The Company strictly mandates that every PTK employee practices sound business methods while upholding high ethical and behavioral standards. PTK is responsible for conducting all Company activities in compliance with all regulations and continually implementing GCG practices in accordance with the laws and regulations.

Fulfillment of the Company's compliance with GCG implementation standards, among others:

1. In 2023, the Company did not receive any reports of activities polluting the environment.
2. There were no cases of non-compliance in fulfilling tax obligations. Each year, the Company adheres to the timely payment and reporting of taxes.
3. There were no discrepancies in the presentation of the annual report and financial statements with applicable regulations and financial accounting standards (SAK). All information, analysis, and performance discussions in this annual report refer to the Company's Financial Statements audited by the Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis, and Partners.
4. In 2023, there were no industrial relation cases involving Company employees.
5. The Company has presented operating segments in the 2023 Audited Financial Statements.
6. The Company's Annual Report, whether submitted to shareholders and stakeholders or uploaded on the Company's website, aligns with the printed and published Annual Report.







Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Social and Environmental Responsibility

Tata Kelola (Governansi) Berkelanjutan

Sustainable Governance

Dalam penerapan tata kelola berkelanjutan, PTK telah memiliki struktur dan infrastruktur tata kelola (governansi) Perusahaan yang berperan untuk mendukung penerapan governansi keberlanjutan, yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. Dewan Komisaris dan Direksi memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai fungsinya masing-masing sebagaimana diamanahkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, termasuk bertanggungjawab untuk memelihara keberlanjutan usaha Perusahaan dalam jangka panjang.

Pelaksanaan TJSL PTK menjadi tanggung jawab Unit *Legal & Relation*.

In implementing sustainable governance, PTK has a corporate governance structure and infrastructure that plays a role in supporting sustainable governance implementation, which consists of the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners, and the Board of Directors. The Board of Commissioners and Board of Directors have clear authorities and responsibilities in accordance with their respective functions as mandated in the Articles of Association and laws and regulations, including being responsible for maintaining the sustainability of the Company's business in the long term.

The implementation of PTK's TJSL program is the responsibility of the Legal & Relation Unit.

Dasar Hukum dan Pendekatan

Legal Basis and Approach

Dasar pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan berlandaskan pada beberapa aspek hukum dan pendekatan, di antaranya:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Perubahannya Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
4. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
5. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
6. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

The basis for the implementation of the Corporate Social and Environmental Responsibility program is based on several legal aspects and approaches, including:

1. Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies;
2. Law of the Republic of Indonesia Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management and its Amendments Law (UU) Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into a Law;
3. Law No. 1 of 1970 on Occupational Safety;
4. Law No. 13 of 2003 on Manpower;
5. Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection;
6. Government Regulation No. 47 of 2012 on Social and Environmental Responsibility of Limited Liability Companies.

Pengembangan Kompetensi Manajemen di Bidang Keberlanjutan

Management Competency Development in the Sustainability Sector

PTK memfasilitasi Manajemen Perusahaan untuk meningkatkan kompetensi di bidang keberlanjutan. Sepanjang tahun 2023 program Pengembangan Kompetensi terkait Aspek Keberlanjutan yang diikuti oleh Manajemen Perusahaan adalah sebagai berikut:

PTK facilitates the Company's Management to improve their competencies in sustainability. Throughout 2023, the Competency Development programs related to Sustainability Aspects participated by the Company Management are as follows:

Nama Pelatihan Training Name	Penyelenggara Organizer	Waktu Pelaksanaan Date of Implementation
<i>Training & Sertifikasi Certified Risk Professional (CRP)</i> Certified Risk Professional (CRP) Training & Certification	IRBA	13 Desember 2023 December 13, 2023
<i>Training Safety Culture and Leadership</i>	PCU	10 Januari 2023 January 10, 2023
AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif) AKHLAK (Trustworthy, Competent, Harmonious, Loyal, Adaptive, Collaborative)	PCI	31 Mei 2023 May 31, 2023

Penilaian Risiko atas Penerapan Program Keberlanjutan

Risk Assessment of Sustainability Program Implementation

Penerapan sistem manajemen risiko di Perusahaan dilakukan dengan mengelola risiko secara menyeluruh, termasuk risiko terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan sebagai langkah memitigasi berbagai dampak negatif yang berpotensi ditimbulkan dari aktivitas operasional Perusahaan.

The implementation of a risk management system in the Company is carried out by managing risks as a whole, including risks to economic, social, and environmental aspects, as a step to mitigate various negative impacts that could potentially arise from the Company's operational activities.

Pelibatan Pemangku Kepentingan Stakeholders Involvement

Keberlanjutan usaha PTK sangat berkaitan erat dengan kemampuan manajemen dalam berinteraksi dengan para pemangku kepentingan. Menurut Perusahaan, pemangku kepentingan adalah mereka yang memiliki dampak dan/atau terdampak oleh operasional Perusahaan. Dengan adanya interaksi yang positif, maka keberlanjutan usaha, juga pelaksanaan tanggung jawab sosial dan kelestarian lingkungan dapat dilaksanakan dengan optimal demi sebesar-besarnya manfaat bagi pemangku kepentingan. PTK telah mengidentifikasi dengan seksama kelompok-kelompok pemangku kepentingan utama, berdasarkan pengaruh dominan kelompok-kelompok tersebut terhadap keberlangsungan usaha Perusahaan. Pemangku kepentingan (*stakeholder*) PTK terdiri antara lain:

The sustainability of PTK's business is closely related to management's ability to interact with stakeholders. According to the Company, stakeholders are those who have an impact and/or are affected by the Company's operations. With positive interactions, business sustainability, as well as the implementation of social responsibility and environmental conservation can be implemented optimally for the maximum benefit of stakeholders. PTK has carefully identified the main stakeholder groups based on the dominant influence of these groups on the Company's business continuity. PTK's stakeholders consist of, among others:

Pemangku Kepentingan Stakeholders	Mekanisme Keterlibatan Involvement Mechanism	Isu/Topik Issues/Topics
Pihak Internal Internal Parties		
Pemegang Saham Shareholders	– Rapat; – Laporan Kinerja. – Meeting; – Performance Report.	– Peningkatan Kinerja; – Dukungan oleh Pemegang Saham. – Performance Improvement; – Support by Shareholders.
Pegawai Employees	– Perjanjian Kerja Pegawai; – Pendidikan dan Pelatihan. – Employee Work Agreement – Education and Training	– Terjaminnya kesejahteraan Pegawai dan keluarganya; – Suasana kerja kondusif, sehat, dan aman; – Jenjang karir dan penilaian kinerja yang jelas, setara, dan tidak terdapat praktik diskriminasi. – Employee and their families' welfare are guaranteed; – Conducive, healthy, and safe work atmosphere; – Career paths and performance assessments are clear, equal, and there are no discriminatory practices.
Pihak Eksternal External Parties		
Masyarakat Community	– Komunikasi melalui media telepon dan tertulis; – Pelatihan Masyarakat; – Forum tatap muka. – Communication through telephone and written media; – Community training; – Face-to-face forums	– Dapat tumbuh dan berkembang selaras dengan berkembangnya PTK; – Hubungan yang harmonis; – Dampak negatif terhadap lingkungan terminimalisir. – Can grow and develop in line with the development of PTK; – Harmonious relationship; – Negative impact on the environment is minimized.
Pemasok Suppliers	– Kontrak dan Perjanjian; – Contract and Agreement;	– Proses pengadaan yang adil dan transparan; – Pembayaran tepat waktu; – Hubungan yang harmonis – Fair and transparent procurement process; – On-time payment; – Harmonious relationship
Pemerintah Government	– Kepatuhan terhadap Peraturan; – Kontribusi ekonomi pada Pemerintah (pajak dan subsidi) – Compliance with regulations; – Economic contribution to the Government (taxes and subsidies)	– Kepatuhan terhadap peraturan; – Kontribusi ekonomi pada Pemerintah (pajak dan subsidi) – Compliance with regulations; – Economic contribution to the Government (taxes and subsidies)
Media Massa Mass Media	– Konferensi pers. – Press Conference	– Mendapatkan akses informasi yang mudah dan luas. – Obtaining easy and wide access to information

Tantangan Dalam Penerapan Program Keberlanjutan Challenges in Implementing Sustainability Program

Isu terkait lingkungan dan perubahan iklim merupakan tantangan nyata yang harus dihadapi oleh masyarakat global saat ini. Sebagai Perusahaan yang beroperasi dalam bidang kesehatan, PTK menyadari bahwa Perusahaan berpotensi memberikan dampak yang signifikan terhadap lingkungan. Perusahaan berupaya memenuhi tanggung jawab untuk berperan aktif mendorong terwujudnya berbagai upaya pelestarian lingkungan serta menghindari dampak ekologis yang mungkin ditimbulkan dari kegiatan operasional Perusahaan.

Issues related to the environment and climate change are real challenges that must be faced by the current global community. As a company that operates in the health sector, PTK realizes that the Company has the potential to have a significant impact on the environment. The Company strives to fulfill its responsibility to play an active role in encouraging the realization of various environmental conservation efforts and avoiding ecological impacts that may result from the Company's operational activities.

Biaya dan Anggaran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Environmental and Social Responsibility Costs and Budget

PTK menyediakan anggaran khusus untuk pelaksanaan program TJSL. Penetapan besaran anggaran TJSL ditentukan dalam penyusunan RKAP Perusahaan. Dalam pencatatan Laporan Keuangan Perusahaan, anggaran TJSL dicatat sebagai bagian dari beban usaha Perusahaan. Tahun 2023, jumlah anggaran TJSL adalah sebesar Rp2.370 Juta.

PTK provides a specific budget for the implementation of the TJSL program. The amount of the TJSL budget is determined in the preparation of the Company's ABOP. In recording the Company's Financial Statements, the TJSL budget is recorded as part of the Company's operating expenses. In 2023, the total TJSL budget was Rp2,370 million.

Laporan Keberlanjutan Sustainability Report

PTK secara konsisten telah menyusun Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Reporting*) sebagai bentuk tanggung jawab Perusahaan kepada *stakeholders*. Laporan Keberlanjutan memuat Informasi terkait dengan pengelolaan dan kinerja aspek keberlanjutan termasuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan PTK dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Untuk informasi lebih lengkap terkait Laporan Keberlanjutan, dapat dilihat dalam buku terpisah dari Buku Laporan Tahunan ini.

PTK has consistently prepared Sustainability Reporting as a form of the Company's responsibility to stakeholders. The Sustainability Report contains information related to the management and performance of sustainability aspects, including the implementation of PTK's social and environmental responsibilities in supporting the achievement of sustainable development goals. For more complete information regarding the Sustainability Report, please refer to a separate book from this Annual Report.



Membangun Budaya Keberlanjutan Building Sustainability Culture

PTK senantiasa menerapkan budaya keberlanjutan melalui berbagai komitmen dan upaya Perusahaan yang telah dilakukan selama tahun 2023 serta menanamkannya kepada seluruh para pemangku kepentingan. Adapun ruang lingkup program program keberlanjutan di Perusahaan, yaitu mencakup aspek pengelolaan lingkungan hidup, aspek Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), aspek pengembangan sosial kemasyarakatan, serta aspek tanggung jawab kepada pelanggan. Keseluruhan aspek tersebut dilaksanakan secara konsisten dan menjadi program prioritas dengan mensinergikan dengan program lainnya dalam upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran Perusahaan.

PTK continues to implement a sustainable culture through various Company commitments and efforts that have been carried out during 2023 and instill it in all stakeholders. The scope of sustainability programs in the Company includes aspects of environmental management, aspects of Employment, Occupational Health and Safety (OHS), aspects of social community development, and aspects of responsibility to customers. The overall aspects are carried out consistently and become priority programs by synergizing with other programs in an effort to achieve the Company's objectives and targets.

Inisiatif Program Keberlanjutan Sustainability Program Initiatives

Pada tahun 2023, PTK terus melakukan berbagai inisiatif dalam rangka mendukung upaya pemenuhan komitmen keberlanjutan Perusahaan. Berbagai program keberlanjutan ini dilakukan dengan mengacu pada berbagai peraturan dan standar yang berlaku dalam menjalankan kegiatan operasional Perusahaan. Inisiatif program keberlanjutan Perusahaan mencakup Aspek Ekonomi, Lingkungan dan Sosial yang telah dilakukan Perusahaan sepanjang tahun 2023.

In 2023, PTK continuously conducted various initiatives to support efforts to fulfill the Company's sustainability commitments. These various sustainability programs are carried out with reference to various applicable regulations and standards in carrying out the Company's operational activities. The Company's sustainability program initiatives cover Economic, Environmental, and Social Aspects that have been carried out by the Company throughout 2023.

Kinerja Ekonomi

Economic Performance

Kontribusi Ekonomi

Economic Contribution

Berbagai strategi dan upaya yang telah dilakukan PTK sepanjang tahun 2023 telah membuat PTK mampu mempertahankan kinerja optimal. PTK juga dapat mendistribusikan sebagian dari pendapatan usaha yang diperoleh kepada para pemangku kepentingan. Kinerja ekonomi dari sisi target dan kinerja produksi, portofolio, target pembiayaan, atau Investasi, pendapatan dan laba rugi telah diuraikan pada bab Analisis dan Pembahasan Manajemen dalam laporan ini. Selain itu, dari sisi kinerja portofolio, target pembiayaan, atau investasi pada instrumen keuangan atau proyek yang sejalan dengan keuangan berkelanjutan diantaranya dampak ekonomi tidak langsung yang mencakup pembangunan dan dampak dari investasi infrastruktur dan jasa yang diberikan; penciptaan peluang usaha masyarakat sekitar serta pelibatan penyedia lokal untuk dapat bekerjasama dalam rantai nilai Perusahaan.

Various strategies and efforts that have been made by PTK throughout 2023 have allowed PTK to maintain optimal performance. PTK can also distribute a portion of the revenue earned to stakeholders. Economic performance in terms of production targets and performance, portfolio, financing targets, or Investment, revenues, and profit or loss have been described in the Management Discussion and Analysis chapter of this report. In addition, in terms of portfolio performance, financing targets, or investments in financial instruments or projects that are in line with sustainable finance, including indirect economic impacts that include the development and impact of infrastructure investments and services provided; the creation of business opportunities for surrounding communities, and the involvement of local providers to cooperate in the Company's value chain.

Kontribusi Ekonomi terkait Keuangan Berkelanjutan

Economic Contribution Related to Sustainable Finance

Kegiatan Activities	Uraian Description	Dampak Ekonomi Economic Impact
Investasi infrastruktur dan teknologi berkelanjutan Sustainable infrastructure and technology investment	Pembangunan instalasi panel surya, pembangunan dan perbaikan fasilitas sosial dll Construction of solar panel installations, construction and repair of social facilities, etc.	Penghematan biaya listrik, nilai investasi, penggunaan tenaga kerja lokal dll Electricity cost savings, investment value, use of local labor, etc.
Penciptaan peluang usaha masyarakat sekitar Creation of business opportunities for local communities	Pemberdayaan (pelatihan/pendampingan) UMKM, kantin dll Empowerment (training/mentoring) of MSMEs, canteens, etc.	Jumlah UKM yang ikut pelatihan/pendampingan, jumlah pedagang di kantin unit bisnis dll Number of SMEs participating in training/mentoring, number of traders in the business unit canteen, etc.
Pelibatan penyedia lokal Involvement of local providers	Jumlah penyedia lokal Number of local providers	Nilai pengadaan dari penyedia lokal Value of procurement from local providers

PTK ikut berperan memberikan kontribusi dalam pembangunan negeri melalui kepatuhan pemenuhan kewajiban Perusahaan sebagai Wajib Pajak. Jumlah pemenuhan kewajiban keuangan kepada Negara PTK pada tahun 2023 sebesar Rp294.834 juta, tumbuh 203,50% dari tahun 2022 yaitu sebesar Rp221.826 juta.

PTK participates in contributing to the development of the country through compliance with the fulfillment of the Company's obligations as a Taxpayer. PTK's total fulfillment of financial obligations to the State in 2023 was Rp294,834 million, an increase of 203.50% from Rp221,826 million in 2022.

Kinerja Lingkungan

Environmental Performance

Komitmen dan Kebijakan Dalam Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan

Commitment and Policy in Environmental Management and Conservation

PTK dalam menjalankan kegiatan usaha senantiasa melakukan pengelolaan lingkungan hidup serta penggunaan sumber daya alam dengan baik dan mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan maupun persyaratan lainnya terkait lingkungan. Pengelolaan limbah, pencegahan pencemaran, pengelolaan emisi gas rumah kaca dan emisi bahan perusak ozon, hingga usaha pelestarian lingkungan yang telah dilakukan merupakan beberapa upaya Perusahaan untuk

PTK, in carrying out business activities, always manages the environment and the use of natural resources properly and complies with all provisions of laws and regulations and other requirements related to the environment. Waste management, pollution prevention, management of greenhouse gas emissions and emissions of ozone-depleting substances, and environmental conservation efforts that have been carried out are some of the Company's efforts to be responsible

bertanggung jawab terhadap kelestarian alam. Komitmen PTK terhadap kelestarian lingkungan sebagai pilar *Health Safety Security and Environment* tertuang dalam Peraturan Direksi PTK.

Selain itu, PTK juga melakukan serangkaian audit seperti internal audit ISO 14001: 2015 *Environmental Management System* di Minggu III-IV Oktober 2023 dengan area *audit Top Management*, seluruh fungsi kantor pusat, *Marine Business & Operation Region I-II-III*, Peteka Shorebase Tanjung Batu, Port (Plaju, Surabaya, Wayame), Kapal Milik (ASD Transko Dara 3206 dan TB Wonokromo). Proses audit tersebut dilakukan guna melakukan *monitoring* implementasi SML pada masing-masing lokasi.

for the preservation of nature. PTK's commitment to environmental sustainability as a pillar of *Health Safety Security and Environment* is contained in the Regulation of the Board of Directors of PTK.

In addition, PTK also conducted a series of audits, such as the internal audit of ISO 14001: 2015 *Environmental Management System* in Week III-IV October 2023, with audit areas of *Top Management*, all head office functions, *Marine Business & Operation Region I-II-III*, Peteka Shorebase Tanjung Batu, Ports (Plaju, Surabaya, Wayame), Owned Vessels (ASD Transko Dara 3206 and TB Wonokromo). The audit process is carried out to monitor the implementation of SML at each location.

Inisiatif Program Pengelolaan Lingkungan Tahun 2023

Environmental Management Program Initiatives in 2023

Sepanjang tahun 2023 PTK telah melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dalam rangka tata kelola keberlanjutan aspek lingkungan. Berbagai program dan inisiatif lingkungan yang dilakukan mencakup pengelolaan limbah dan pencemaran air laut, pengendalian pencemaran udara dan kebisingan, pengelolaan emisi gas rumah kaca dan emisi bahan perusak ozon, pengelolaan sumber daya alam (energi, air dan kertas), pembersihan lingkungan pelabuhan dan aktivitas operasi ramah lingkungan lainnya.

Untuk mendukung program-program lingkungan yang dilakukan, pada tahun 2023 PTK telah merealisasikan biaya pengelolaan, pemantauan dan pelestarian lingkungan sebesar Rp857 Juta untuk mengurus sertifikasi pelabuhan berwawasan (*green port*).

Throughout 2023, PTK has made various efforts to optimize environmental management and monitoring in the context of sustainability governance of environmental aspects. Various environmental programs and initiatives carried out include waste and seawater pollution management, air and noise pollution control, management of greenhouse gas emissions and ozone-depleting substance emissions, natural resource management (energy, water, and paper), port environmental cleaning, and other environmentally friendly operation activities.

To support the environmental programs carried out, PTK has realized the cost of managing, monitoring, and preserving the environment in 2023 of Rp857 Million to administer the green port certification.

Pengelolaan Energi

Energy Management

PTK membutuhkan energi listrik sebagai sumber energi dalam menjalankan kegiatan operasional. Perusahaan menyadari bahwa listrik sebagian besar masih memanfaatkan batu bara sebagai sumber energi tak terbarukan yang ketersediaannya terbatas. Sejalan dengan itu, PTK melakukan berbagai inisiatif efisiensi penggunaan energi antara lain:

- Menggunakan lampu LED dan *Solar Cell* pada lampu penerangan jalan dan parkir kendaraan (Non terminal);
- Mematikan mesin RTG ketika jam istirahat;
- Menggunakan lampu dengan daya yang lebih kecil dibandingkan dengan sebelumnya;
- Menyediakan pencahayaan yang memadai di setiap ruangan sehingga dapat mengurangi penggunaan listrik (termasuk saat mendesain gedung);
- Mematikan lampu di area yang tidak digunakan dan pada waktu malam/selesai bekerja dan pada ruangan tidak dipakai;
- Mengatur letak perabot/barang agar tidak menghalangi cahaya lampu dalam ruangan;
- Memilih AC hemat energi dan daya yang sesuai dengan besarnya ruangan;
- Memanfaatkan energi sinar matahari sebagai energi pemanas air (*water heater*);
- Memasang Stiker Hemat Listrik;
- Melakukan pengawasan penggunaan BBM untuk mobil protokoler dan operasional milik Perusahaan; serta
- Melakukan perawatan dan perbaikan kendaraan operasional bekerjasama dengan pihak ketiga/*vendor*.

PTK requires electricity as an energy source in carrying out its operational activities. The Company realizes that most of the electricity still utilizes coal as a non-renewable energy source whose availability is limited. Accordingly, PTK conducts various energy use efficiency initiatives, among others:

- Using LED lights and Solar Cells on street lighting and vehicle parking (Non-terminal);
- Turning off the RTG engine during rest hours;
- Using lamps with less power than before;
- Providing adequate lighting in each room so as to reduce electricity usage (including when designing buildings);
- Turning off lights in unused areas and at night/after work and in unused rooms;
- Arranging the location of furniture/items so that they do not block the light of the lamps in the room;
- Choosing energy-efficient air conditioners and power appropriate to the size of the room;
- Utilizing sunlight energy as water heater energy;
- Installing the Electricity Saving Sticker;
- Supervising the use of fuel for the Company's protocol and operational cars; and
- Performing treatment and repair of operational vehicles in cooperation with third parties/vendors.

Pengelolaan Penggunaan dan Konservasi Air

Water Use Management and Conservation

PTK berkomitmen untuk menggunakan air secara bijak dan menjaga keberlangsungan sumbernya melalui upaya konservasi air. PTK melakukan efisiensi penggunaan energi air melalui pengurangan penggunaan air (*reduce, reuse, recycle*) dengan memanfaatkan dengan memanfaatkan limbah cair hasil pengolahan STP dan memanfaatkan air kondensat AC.

PTK is committed to using water wisely and maintaining the sustainability of its sources through water conservation efforts. PTK makes efficient use of water energy by reducing water use (*Reduce*), reusing, and recycling water by utilizing liquid waste from STP processing and utilizing AC condensate water.

Volume Penggunaan Air Berdasarkan Sumber (megaliter)

Volume of Water Use by Source (megaliter)

Sumber Air Water Source	Volume Penggunaan Air (megaliter) Volume of Water Use (megaliter)		
	2023	2022	2022
Air PDAM PDAM Water	13.111	12.515	7.170
Air Tanah Ground Water	-	-	-
Total	13.111	12.515	7.170

Catatan:

- Metode pengukuran menggunakan *flowmeter* debit yang di pasang di titik-titik tertentu
- PTK tidak menggunakan air yang bersumber dari badan air yang berada di wilayah yang mengalami kelangkaan air.

Notes:

- The measurement method uses a discharge flowmeter installed at certain points
- PTK does not use water sourced from water bodies located in areas experiencing water scarcity.

Peningkatan penggunaan air PTK disebabkan oleh meningkatnya aktivitas operasional baik kapal maupun perkantoran. Hal ini didasari bahwa secara historis pada tahun 2021 merupakan periode pandemi Covid-19 sehingga sebagian besar pekerja belum beraktivitas langsung di kantor. Pemulihan pandemi selanjutnya berdampak pada peningkatan penggunaan air pada tahun 2022 maupun 2023.

The increase in PTK water usage is due to the improvement in both ship and office operational activities. This is because historically, the year 2021 was the period of the Covid-19 pandemic; therefore, most workers have not been directly active in the office. The subsequent pandemic recovery has an impact on increasing water usage in 2022 and 2023.

Pengelolaan Emisi Gas Rumah Kaca dan Emisi Bahan Perusak Ozon

Management of Greenhouse Gas Emissions and Ozone-Depleting Substances Emissions

Perusahaan mendukung upaya pemerintah dalam program mitigasi emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Hal ini tercermin melalui upaya dan inisiatif PTK terkait pengurangan emisi kegiatan operasi dengan melakukan penghematan energi dan merealisasikan program penanaman pohon yang mampu menyerap CO₂ di dalam maupun di luar daerah operasi PTK. Untuk menunjang operasional, Perusahaan mengoperasikan beberapa unit kendaraan operasional Perusahaan. Sama seperti listrik, ketersediaan BBM sebagai sumber energi tidak terbarukan semakin terbatas. Sebab itu, Perusahaan berupaya menggunakan sumber energi tersebut secara bijaksana, antara lain, dengan berupaya melakukan upaya efisiensi atau penghematan. Berkaitan dengan konsumsi BBM, sekaligus mengurangi emisi udara, Perusahaan senantiasa menggunakan bahan bakar minyak beroktan tinggi yang lebih ramah lingkungan. Tak hanya itu, kendaraan operasional juga secara rutin menjalani perawatan agar emisi gas buangnya tidak melebihi ambang batas.

The Company supports the government's efforts in the Greenhouse Gas (GHG) emission mitigation program. This is reflected through PTK's efforts and initiatives related to reducing emissions from operating activities by saving energy and realizing tree planting programs that can absorb CO₂ inside and outside PTK's operating areas. To support operations, the Company operates several units of its operational vehicles. Just like electricity, the availability of fuel as a non-renewable energy source is increasingly limited. Therefore, the Company strives to use this energy source wisely, among others, by making efficiency or savings efforts. In relation to fuel consumption, while reducing air emissions, the Company continuously uses high-octane fuel oil that is more eco-friendly. Moreover, operational vehicles also routinely undergo maintenance so that their exhaust emissions do not exceed the threshold.

Selanjutnya, PTK juga melakukan pencegahan pencemaran lingkungan melalui program perlindungan lapisan ozon sebagai upaya Perusahaan untuk mencegah meningkatnya suhu bumi (pemanasan global) dan mencegah berbagai dampak negatif bagi kesehatan manusia. Dalam kegiatan operasional maupun perkantoran, PTK tidak menggunakan barang atau bahan yang merusak ozon dan berdampak negatif bagi lingkungan, yaitu pada penggunaan bahan pendingin (*refrigerant*) tidak menggunakan kelompok *Chloro Fluoro Carbon* (CFC) seperti R12 dan lain sebagainya, namun menggunakan bahan freon (*refrigerant*) ramah

Furthermore, PTK also prevents environmental pollution through the ozone layer protection program as the Company's effort to prevent the increase in earth temperature (global warming) and prevent various negative impacts on human health. In operational and office activities, PTK does not use goods or materials that damage ozone and have a negative impact on the environment, namely in the use of refrigerants (*refrigerant*) does not use Chloro Fluoro Carbon (CFC) groups such as R12 and others, but uses environmentally friendly freon (*refrigerant*) materials, including the use of Fire Extinguishing Systems that do not



lingkungan, termasuk pada penggunaan Sistem Pemadam Kebakaran tidak mengandung Halon. Selain itu pengujian emisi udara ambient dan uji emisi cerobong asap di lingkungan rumah sakit rutin dilakukan dan dipastikan hasilnya tidak melebihi Nilai Ambang Batas (NAB) sehingga tidak ada pencemaran udara ke lingkungan sekitar.

Pengelolaan Limbah dan Pencemaran Air Laut Waste and Seawater Pollution Management

Dalam rangka mewujudkan lingkungan kerja yang bersih dan sehat, diperlukan suatu pengelolaan limbah padat/sampah serta limbah B3 secara terpadu dan terintegrasi sehingga tidak menimbulkan dampak negatif seperti bau, penyakit, kotor, dan dampak buruk lainnya. Komitmen Perusahaan terhadap pelestarian lingkungan tersebut diperkuat melalui Keputusan Direksi Perseroan tentang Pengelolaan Limbah Padat/Sampah serta Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Dalam praktiknya, Perusahaan secara terus menerus melakukan *monitoring* evaluasi atas pengelolaan limbah khususnya limbah B3 medis yang ada di rumah sakit dan klinik mulai dari identifikasi jenis limbah, pemilahan, penanganan, pengangkutan, Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan pengolahan limbah. Pengolahan akhir limbah B3 medis dan limbah B3 umum dilakukan dengan kerjasama pihak ketiga. Salah satu wujud komitmen manajemen dalam pelaksanaan *monitoring* evaluasi yaitu dilakukan pembahasan rutin antara unit dan penanggung jawab HSSE juga PBM IHC selaku regulator. Selain itu *Management Walkthrough* (MWT) dilakukan rutin baik oleh manajemen unit kerja maupun manajemen kantor pusat untuk *monitoring* kedisiplinan pengelolaan limbah.

Selain *monitoring* pengelolaan limbah B3 medis dan limbah B3 umum, perusahaan juga menerapkan upaya pengurangan (*reduce*), penggunaan kembali (*reuse*), daur ulang (*recycle*) serta komposting dari limbah non medis/ limbah domestik yang dihasilkan. PTK terus berusaha berupaya mengurangi kerusakan lingkungan dengan membuang limbah domestik ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup setempat agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan.

Selain pengelolaan limbah padat, PTK juga telah melakukan upaya pengelolaan limbah cair yang dihasilkan sesuai dengan regulasi yang berlaku yaitu dengan menggunakan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang berizin dan selalu melakukan *monitoring* pemeriksaan kualitas air limbah agar tidak melebihi Baku Mutu Lingkungan sebelum dibuang ke badan air setempat.

contain Halon. In addition, ambient air and chimney emissions within the hospital are routinely tested, and it is ensured that the results do not exceed the Threshold Value (NAB) so that there is no air pollution in the surrounding environment.

In order to realize a clean and healthy working environment, an integrated management of solid waste/garbage as well as hazardous and toxic waste (B3) is required, thereby not causing negative impacts such as odor, disease, dirt, and other adverse impacts. The Company's commitment to environmental preservation is strengthened through the Decree of the Board of Directors of the Company regarding Solid Waste/Waste as well as Hazardous and Toxic Waste (B3) Management.

In its practice, the Company continuously monitors and evaluates waste management, particularly medical B3 waste in hospitals and clinics, starting from the identification of types of waste, sorting, handling, transportation, Temporary Waste Disposal Sites (TPS), and waste treatment. The final processing of medical B3 waste and general B3 waste is carried out with the cooperation of third parties. One of the manifestations of management commitment in the monitoring and evaluation is a routine discussion between the unit and the person in charge of HSSE, as well as PBM IHC as the regulator. In addition, a Management Walkthrough (MWT) is carried out regularly by both work unit management and head office management to monitor the discipline of waste management.

In addition to monitoring the management of medical B3 waste and general B3 waste, the Company also implements efforts to reduce, reuse, recycle, and compost non-medical waste/domestic waste generated. PTK continuously strives to reduce environmental damage by disposing of domestic waste to the Landfill (TPA) in collaboration with the local Environmental Agency so as not to cause negative impacts on the environment.

In addition to solid waste management, PTK has also made efforts to manage liquid waste generated in accordance with applicable regulations, namely by using a licensed Wastewater Treatment Plant (IPAL) and always monitoring the quality of wastewater so that it does not exceed the Environmental Quality Standards before being discharged into local water bodies.

Pengendalian Pencemaran Udara dan Kebisingan Air and Noise Pollution Control

Untuk mengendalikan pencemaran udara dan kebisingan, pada tahun 2023 PTK melakukan berbagai upaya dan tindakan pencegahan pencemaran terhadap lingkungan dan upaya peningkatan kinerja lingkungan secara berkelanjutan diantaranya yaitu meremajakan/modifikasi peralatan *Rubber Tyred Gantry* (RTG) dari RTG konvensional menjadi RTG yang ramah lingkungan (*Hybrid*) secara bertahap sehingga memenuhi baku mutu emisi udara, meremajakan/modifikasi *genset* yang ada menjadi *genset* yang ramah lingkungan sehingga memenuhi baku mutu kebisingan serta melakukan program *housekeeping* (5S: *Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke*).

To control air and noise pollution, in 2023, PTK made various efforts and actions to prevent pollution to the environment and efforts to improve environmental performance sustainably, including gradually rejuvenating/modifying Rubber Tyred Gantry (RTG) equipment from conventional RTG to environmentally friendly RTG (Hybrid) so that it meets air emission quality standards, rejuvenating/modifying existing generators into environmentally friendly generators so that they meet noise quality standards, and conducting housekeeping programs (5S: *Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke*).

Mekanisme Penanganan Pengaduan Masalah Lingkungan

Mechanism for Handling Environmental Issues Complaints

PTK menyediakan mekanisme bagi para pemangku kepentingan untuk menyampaikan pengaduan terkait masalah lingkungan yang dapat disampaikan melalui website Perusahaan yaitu <https://www.pertamina-ptk.com/About/Contact>. Pengaduan juga dapat disampaikan secara langsung kepada Perusahaan untuk selanjutnya ditindaklanjuti secara responsif dan terbuka oleh PTK.

PTK provides a mechanism for stakeholders to submit complaints related to environmental issues that can be submitted through the Company's website, <https://www.pertamina-ptk.com/About/Contact>. Complaints can also be submitted directly to the Company to be followed up responsively and openly by PTK.

Kinerja Sosial

Social Performance

PTK berkomitmen untuk memenuhi tanggung jawab lingkup sosial yang meliputi pelanggan, karyawan dan masyarakat. Komitmen ini dilakukan oleh PTK dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan sebagai langkah konkrit Perusahaan untuk memberikan timbal balik yang positif kepada pelanggan, karyawan dan masyarakat. Dalam program tanggung jawab sosial perusahaan, PTK telah melakukan berbagai program kerja yaitu: peningkatan kualitas layanan kepada pelanggan, survey kepuasan pelanggan; Pendidikan, pelatihan dan pengembangan karyawan, pemberian kesejahteraan kepada karyawan, meningkatkan kualitas lingkungan kerja yang sehat; memberikan bantuan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, program kerja sama bidang pendidikan, bantuan biaya pendidikan, membina dan mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui Program Kelompok Binaan, melakukan penguatan kapasitas dan penciptaan peluang usaha masyarakat.

PTK is committed to fulfilling its social responsibility, which includes customers, employees, and the community. This commitment is carried out by PTK in the form of corporate social responsibility as a concrete step by the Company to provide positive reciprocity to customers, employees, and the community. In the corporate social responsibility program, PTK has carried out various work programs, namely: improving the quality of service to customers, customer satisfaction surveys; Education, training, and development of employees; providing welfare to employees, improving the quality of a healthy work environment; providing assistance and repair of educational facilities and infrastructure, cooperation programs in the education sector, tuition assistance, fostering, and developing Micro, Small and Medium Enterprises through the Assisted Group Program, strengthening the capacity, and creation of community business opportunities.

Kinerja Sosial – Ketenagakerjaan

Social Performance – Employment

Komitmen dan Kebijakan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Commitment and Policy in Human Resource Management

Pengelolaan ketenagakerjaan di Perusahaan dilakukan secara bertanggung jawab dan adil sesuai dengan PKB periode tahun 2023-2025 dan Sistem Tata Kerja SDM, selain itu PTK juga melakukan pengelolaan SDM sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, terutama Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang diperbaharui menjadi Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta peraturan dan kebijakan lainnya yang relevan. Selain aspek ketenagakerjaan, Perusahaan juga memprioritaskan aspek Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) bagi pekerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 26 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penilaian Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

The employment management in the Company is carried out responsibly and fairly in accordance with the PKB for the period 2023-2025 and the HR Work System. In addition, PTK also manages HR in accordance with applicable laws and regulations, particularly Law No. 13 of 2003 concerning Manpower, which was updated to Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation, as well as other relevant regulations and policies. In addition to the employment aspect, the Company also prioritizes the Occupational Health and Safety (OHS) aspect for workers as stipulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 1970 concerning Occupational Health and Safety and Regulation of the Minister of Manpower Number 26 of 2014 concerning the Implementation of Assessment of the Application of Occupational Health and Safety Management System.



Inisiatif Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Tahun 2023

Human Resources Management Program Initiatives in 2023

Bentuk kegiatan tanggung jawab Perusahaan terhadap ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja terdiri dari 2 (dua) bidang kegiatan yaitu Kegiatan Tanggung Jawab Perusahaan terkait Ketenagakerjaan dan Kegiatan Tanggung Jawab Perusahaan terhadap Kesehatan Dan Keselamatan Kerja.

Untuk peningkatan produktivitas tenaga kerja, strategi yang disusun diantaranya melalui peningkatan kompetensi, peningkatan kesejahteraan, benefit, kompensasi yang kompetitif dan berbasis kinerja. Adapun beberapa kegiatan/program yang direncanakan oleh Perusahaan yaitu:

1. Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Kompetensi Karyawan
2. Penghargaan Produktivitas Karyawan
3. Pemberian Kesejahteraan
4. Pengelolaan HSE

The form of the Company's responsibility activities towards employment, occupational health and safety consists of 2 (two) areas of activity, namely Corporate Responsibility Activities related to Employment and Corporate Responsibility Activities for Occupational Health and Safety.

Strategies are prepared through competency improvement, welfare improvement, competitive and performance-based benefits, and compensation to increase labor productivity. There are several activities/programs planned by the Company, namely:

1. Employee Education, Training, and Competency Development
2. Employee Productivity Awards
3. Welfare Provision
4. HSE Management

Kesetaraan Dalam Kesempatan Kerja

Equality in Employment Opportunities

PTK menerapkan proses rekrutmen yang selalu menjunjung tinggi prinsip transparansi dan keadilan, tanpa membedakan suku, agama, dan ras sehingga setiap rekrutmen yang diadakan oleh Perusahaan dapat dipastikan selalu terbebas dari unsur diskriminasi. Dalam melakukan perekrutan pegawai, PTK senantiasa berpedoman pada aturan ketenagakerjaan yang berlaku, yaitu Pasal 68 UU No. 13 tahun 2003 mengenai usia minimum calon pegawai.

Pada tahun 2023, jumlah pegawai PTK sebanyak 3.703 orang, dengan komposisi jumlah pegawai wanita sebanyak 323 orang dan pegawai pria sebanyak 3.378 orang. PTK juga memberikan kesempatan pada masyarakat lokal untuk menjadi bagian dari Perusahaan sesuai dengan kompetensi dan kapabilitas. Selama tahun pelaporan, Perusahaan tidak pernah mempekerjakan pekerja di bawah 18 tahun.

Selama tahun 2023, tidak terdapat laporan mengenai insiden diskriminasi terkait ras, warna kulit, *gender*, agama, opini politik, asal usul sosial dan segala bentuk diskriminasi lainnya yang melibatkan pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal yang terkait Perusahaan.

PTK implements a recruitment process that always upholds the principles of transparency and fairness, without distinguishing ethnicity, religion, and race, so that every recruitment held by the Company can be guaranteed to always be free from discrimination elements. In recruiting employees, PTK is continuously guided by applicable employment regulations, namely Article 68 of Law No. 13 of 2003 regarding the minimum age of prospective employees.

In 2023, the number of PTK employees was 3,703 people, with a composition of 323 female and 3,378 male employees. PTK also provides opportunities for local communities to become part of the Company in accordance with competencies and capabilities. During the reporting year, the Company never employed workers under 18 years old.

During 2023, there were no reports of discrimination incidents related to race, color, gender, religion, political opinion, social origin, or any other forms of discrimination involving internal and external stakeholders related to the Company.

Kesetaraan Dalam Pengembangan Kompetensi

Equality in Competency Development

PTK memberikan pengembangan kompetensi bagi setiap pegawai untuk mendukung produktivitas SDM. Program pengembangan kompetensi SDM dilakukan melalui program pelatihan, *workshop*, dan pengembangan keterampilan bagi pegawai, yang mencakup peningkatan dalam bidang teknis, manajerial, dan interpersonal.

PTK provides competency development for each employee to support HR productivity. The HR competency development program is carried out through training programs, workshops, and skills development for employees, which includes improvements in technical, managerial, and interpersonal fields.

Remunerasi dan Kesejahteraan Pegawai

Remuneration and Employee Welfare

PTK senantiasa berkomitmen memberikan hak pegawai yang disesuaikan pada aspek klasifikasi jabatan, pengalaman kerja, tanggung jawab pekerjaan, dan pencapaian individu tanpa membedakan jenis kelamin sehingga rasio pemberian remunerasi pada setiap level jabatan yang sama adalah 1:1 antara pegawai wanita dan pria. Remunerasi yang diberikan berbentuk gaji pokok, tunjangan operasional, tunjangan kesehatan, cuti, tunjangan lainnya, program pensiun dan berbagai tunjangan lainnya sesuai dengan kebijakan Perusahaan.

Remunerasi dan tunjangan pegawai yang diberikan telah ditinjau berdasarkan kinerja pegawai dan kinerja Perusahaan serta selalu mengacu pada standar upah minimum yang berlaku sesuai dengan peraturan pemerintah.

Selain itu, PTK juga memberikan program pensiun sebagai bentuk penghargaan dan jaminan masa depan bagi para pegawai saat telah memasuki masa purnabakti. Perusahaan mengikutsertakan seluruh pegawainya pada program wajib BPJS Ketenagakerjaan berupa Jaminan Kematian, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun. Selain itu, Perusahaan juga turut serta menyelenggarakan program pensiun bagi para pegawai tetap dengan menunjuk DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan) sebagai pengelola.

Bentuk remunerasi lainnya yang diberikan Perusahaan, yaitu berupa izin cuti melahirkan yang diberikan selama 1,5 bulan sebelum persalinan dan 1,5 bulan setelah persalinan kepada pegawai wanita, serta memberikan kelonggaran kepada pegawai pria untuk mendampingi pasangannya yang akan melakukan proses melahirkan dengan lamanya izin cuti selama dua hari.

Penanganan Pengaduan Pegawai

Employee Complaint Handling

Dalam rangka menciptakan suasana kerja yang kondusif, PTK secara terbuka menerima pengaduan karyawan atas keluhan-keluhan yang mereka hadapi baik dalam lingkup pekerjaan maupun personal. PTK telah menyediakan saluran pengaduan terkait masalah ketenagakerjaan melalui *Whistleblowing System* Perusahaan.

Pengaduan karyawan diterima dan dievaluasi oleh Divisi SDM. Divisi SDM meneruskan pengaduan karyawan kepada unit-unit yang bertanggung jawab atas pokok permasalahan sehingga karyawan dapat berkomunikasi langsung tanpa perantara.

Pada tahun 2023, tercatat terdapat 2 pengaduan yang diterima oleh PTK terkait kode etik karyawan. PTK telah menindaklanjuti seluruhnya terkait laporan tersebut.

Program Membangun Budaya HSE

HSE Culture-Building Program

Program membangun budaya *health, safety & environment* dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan dan kepedulian karyawan agar dapat tercipta budaya HSE di PTK. Terdapat delapan aspek utama dalam gambaran umum program kerja HSSE tahun 2023. Delapan aspek program dimaksud adalah sebagai berikut:

PTK is continuously committed to providing employee rights adjusted to the aspects of position classification, work experience, job responsibilities, and individual achievements without discriminating against gender; hence, the ratio of remuneration provision at each level of the same position is 1:1 between female and male employees. Remuneration is provided in the form of basic salary, operational allowances, health allowances, leave, other allowances, pension programs, and various other allowances in accordance with Company policy.

Remuneration and employee allowance provided have been reviewed based on employee performance and Company performance, as well as always referring to the applicable minimum wage standards in accordance with government regulations.

In addition, PTK also provides a pension program as a form of appreciation and future security for employees upon entering retirement. The Company includes all employees in the mandatory Social Security for Employment program in the form of Death Insurance, Work Accident Insurance, Old Age Insurance, and Pension Insurance. In addition, the Company also participates in organizing pension programs for permanent employees by appointing DPLK (Financial Institution Pension Fund) as the manager.

Another form of remuneration provided by the Company is in the form of maternity leave granted for 1.5 months before childbirth and 1.5 months after childbirth to female employees, as well as providing leeway to male employees to accompany their spouses who will carry out the process of giving birth with a two-day leave permit.

In order to create a conducive working atmosphere, PTK openly accepts employee grievances for complaints they face both in the scope of work and personal. PTK has provided a complaint channel related to employment issues through the Company's Whistleblowing System.

Employee complaints are received and evaluated by the HR Division. The HR Division forwards employee complaints to the units responsible for the subject matter so that employees can communicate directly without intermediaries.

In 2023, there were two complaints received by PTK related to employee code of conduct. PTK has followed up on all of these reports.

The health, safety & environment culture-building program is implemented to increase employee knowledge and awareness to create an HSE culture at PTK. There are eight main aspects in the overview of the HSSE work program in 2023. The eight aspects of the program are as follows:



No	Aspek Aspect	Isi Program Content of Program	Tujuan/Sasaran Objectives/Targets	Indikator Keberhasilan Achievement Indicator
1	Program inisiatif utama Key initiative program	Terdapat 6 program yang rencananya dilakukan, antara lain: 1. <i>Wellness Program (Fit Challenge)</i> 2. <i>Human Performance Initiatives</i> 3. <i>Enhance Energy Efficiency</i> 4. Program Pencegahan Kecelakaan Serius & <i>Fatality</i> 5. Digitalisasi <i>HSSE Passport</i> 6. Program Inspeksi Umum There are six programs that are planned to be conducted, including: 1. Wellness Program (Fit Challenge) 2. Human Performance Initiatives 3. Enhance Energy Efficiency 4. Serious Accident & Fatality Prevention Program 5. HSSE Passport Digitization 6. General Inspection Program	Peningkatan kinerja HSSE yang secara spesifik mendorong dalam hal mendorong transformasi gaya hidup sehat, budaya keselamatan (<i>safety culture</i>), dan implementasi program perlindungan/pelestarian lingkungan. Improved HSSE performance that specifically encourages the transformation of healthy lifestyles, safety culture, and implementation of environmental protection/conservation programs.	Beberapa indikator yang dipergunakan antara lain jumlah peserta wellness, jumlah pelaksanaan <i>training</i> dan <i>safety culture level</i> , jumlah laporan, STK yang disetujui, IT Tools, dan konsistensi implementasi <i>checklist</i> di lapangan. Several indicators used include the number of wellness participants, the number of training and safety culture levels, the number of reports, approved STK, IT Tools, and consistency of checklist implementation in the field
2	Umum General	Program yang mencakup aspek HSSE secara umum. Program terdiri atas audit ISO SMT, audit SUPREME, Rapat Tinjauan Manajemen, pelatihan, kampanye, pemberian penghargaan, dan pemutakhiran STK. Programs that cover HSSE aspects in general. The program consists of ISO SMT audits, SUPREME audits, Management Review Meetings, training, campaigns, awards, and STK updates.	Mendorong implementasi sistem secara siklus penuh. Encouraging full-cycle implementation of the system.	Beberapa indikator yang dipergunakan antara lain hasil peringkat SUPREME, jumlah peserta pelatihan, jumlah materi kampanye, dan jumlah penerima penghargaan Several indicators were used, including SUPREME ranking results, number of trainees, number of campaign materials, and number of award recipients
3	IT Tools	Terdapat 6 <i>IT Tools</i> yang diprogramkan: 1. <i>Verification & Validation</i> 2. Pelaporan & investigasi kecelakaan 3. OBIT 2.0 4. <i>HSSE Passport</i> 5. Inspeksi Umum 6. <i>Operational Risk Management</i> There are six IT Tools programmed: 1. Verification & Validation 2. Accident reporting & investigation 3. OBIT 2.0 4. HSSE Passport 5. General inspection 6. Operational Risk Management	Membantu dalam dokumentasi, pengingat, penyimpanan data, dan alat menjalankan program. Assisting in documentation, reminders, data storage, and program execution tools.	Jumlah <i>IT Tools</i> yang sudah <i>Go Live</i> Number of IT Tools that have been Go Live
4	Health	Program terdiri dari pelaksanaan MCU, DCU, IH <i>Monitoring</i> , dan <i>food hygiene</i> . The program consists of the implementation of MCU, DCU, IH Monitoring, and food hygiene.	Memastikan kesehatan bagi Pekerja. Ensuring health for Workers.	Jumlah pelaksanaan MCU, DCU, IH <i>Monitoring</i> , dan inspeksi <i>food hygiene</i> Number of MCU, DCU, IH Monitoring, and food hygiene inspections implemented
5	Safety	Program mencakup beberapa aspek utama, antara lain <i>Community of Practice (COP)</i> , Manajemen Risiko HSSE (ERM & Operasional), pengelolaan praktik kerja aman, table top drill tahunan, <i>compliance assurance</i> , <i>learning from event</i> , implementasi CSMS full cycle, Transko HSSE Forum, dan pemenuhan Regulasi K3 Disnaker Jakarta The program covers several main aspects, including Community of Practice (COP), HSSE Risk Management (ERM & Operational), safe work practice management, annual tabletop drill, compliance assurance, learning from events, full cycle CSMS implementation, Transko HSSE Forum, and compliance with the OHS Regulation of the Jakarta Manpower Agency.	Peningkatan pengelolaan aspek keselamatan berdasarkan pendekatan risiko. Improved management of safety aspects based on a risk approach.	Pertemuan rutin per kuartal, <i>Risk register</i> yang termutakhir, Audit SIK, pelaksanaan <i>event</i> , persentase <i>compliance</i> , Pelaksanaan LFE, dan jumlah <i>event</i> . Regular quarterly meetings, updated Risk register, SIK Audit, event implementation, compliance percentage, LFE Implementation, and number of events.
6	Security	Program fokus pada Pemenuhan ISPS <i>Code Kapal</i> , <i>Joint Safety and Security Inspection (JSSI)</i> , Sistem Manajemen Pengamanan (SMP), <i>Security Risk Assessment</i> , dan <i>security drill</i> . The program focuses on Ship ISPS Code Compliance, Joint Safety and Security Inspection (JSSI), Security Management System (SMP), Security Risk Assessment, and security drill.	Peningkatan pengelolaan aspek pengamanan serta pencegahan <i>fraud</i> . Improved management of security aspects and fraud prevention.	Validitas sertifikasi ISPS, sertifikasi SMP, pelaksanaan drill, dan risk register termutakhir. Validity of ISPS certification, SMP certification, drill implementation, and up-to-date risk register.

No	Aspek Aspect	Isi Program Content of Program	Tujuan/Sasaran Objectives/Targets	Indikator Keberhasilan Achievement Indicator
7	Environment	Program fokus pada penyusunan STK, Implementasi pengelolaan dan pelaporan dokumen lingkungan, upaya penurunan emisi karbon, verifikasi lapangan terkait aspek lingkungan dan studi <i>Green Port</i> . The program focuses on the preparation of STK, Implementation of environmental document management and reporting, efforts to reduce carbon emissions, field verification related to environmental aspects, and Green Port studies.	Pengelolaan aspek lingkungan lingkungan sesuai dengan peraturan yang berlaku Management of environmental protection aspects in accordance with applicable regulations	STK yang disetujui, laporan <i>monitoring & evaluasi</i> lingkungan, laporan perhitungan emisi karbon, jumlah event, dan hasil studi <i>baseline</i> pemenuhan kriteria <i>Green Port</i> Approved STK, environmental monitoring & evaluation report, carbon emission calculation report, number of events, and results of baseline study on the fulfillment of Green Port criteria.
8	Vetting	Program <i>Vetting</i> PSA, inspeksi umum, ISM Code, FERRAT, <i>Ship safety performance award</i> , seminar, <i>crew upskilling</i> , BJST, <i>Emergency exercise</i> , dan pelatihan <i>good housekeeping</i> . PSA Vetting program, general inspection, ISM Code, FERRAT, Ship safety performance award, seminar, crew upskilling, BJST, Emergency exercise, and good housekeeping training.	Memastikan aspek keselamatan operasi kapal sesuai standar dan peraturan yang berlaku. Ensuring the safety aspects of ship operations in accordance with applicable standards and regulations.	Beberapa indikator yang dipergunakan antara lain Validitas PSA, SMC, TMSA, ISM Code, tingkat partisipasi peserta, peningkatan pemahaman aspek <i>safety</i> bagi seluruh kapal, dan implementasi pelaksanaan <i>good housekeeping</i> di lingkungan kerja. Several indicators used include the validity of PSA, SMC, TMSA, ISM Code, the participation rate of participants, increased understanding of safety aspects for all ships, and implementation of good housekeeping in the work environment.

Secara umum, realisasi dari kinerja HSSE sebagaimana yang telah dievaluasi pada akhir tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- Gambaran umum program kerja : 107% dari 100%
- *Calendar of event* : 88% dari 100%
- *Leading & lagging indicators* : 109% dari 94%

Secara keseluruhan pencapaian rerata realisasi annual plan HSSE pada tahun 2023 adalah 99,5%. Terdapat beberapa program yang masih mengalami kendala, diantaranya terkait finalisasi program *Verification & Validation*, Digitalisasi HSSE *Passport*, pengembangan IT *Tools* pelaporan dan investigasi kecelakaan, pemutakhiran HIRADC PTK Group, dan inspeksi FERRAT di fasilitas darat. Terdapat beberapa fokus pekerjaan yang harus dilakukan sehubungan dengan maraknya beberapa insiden yang terjadi di Pertamina. Hal ini menjadikan fokus pencapaian program HSSE lebih ditekankan pada program utama dan *leading indicators*.

HSE Meeting

HSE meeting merupakan pertemuan dalam lingkup manajemen yang membahas temuan dan/atau kinerja HSE. HSE *meeting* dilaksanakan 1 (satu) bulan sekali dengan unit usaha di lingkungan PTK.

Kecelakaan Kerja Occupational Accidents

Komitmen terhadap keselamatan kerja menjadi indikator utama dalam pelaksanaan kegiatan HSE di PTK. Pengelolaan K3 yang baik dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja serta penyakit kerja. Bukti komitmen PTK terhadap keselamatan kerja ditunjukkan dengan angka NOA 0 dari target 100%.

In general, the realization of HSSE performance as evaluated at the end of 2023 is as follows:

- Work program overview: 107% of 100%
- Calendar of event: 88% of 100%
- Leading & lagging indicators: 109% of 94%

Overall, the average achievement of HSSE annual plan realization in 2023 was 99.5%. Several programs are still experiencing obstacles, including those related to the finalization of the Verification & Validation program, HSSE Passport Digitalization, development of IT Tools for accident reporting and investigation, updating the HIRADC of PTK Group, and FERRAT inspections at land facilities. Several focuses of work must be performed in connection with the rise of several incidents that occurred at Pertamina. This makes the focus of HSSE program achievement more emphasized on the main program and leading indicators.

HSE meetings are meetings within the scope of management that discuss HSE findings and/or performance. The HSE meeting is held once a month with business units within PTK.

Commitment to occupational safety is a key indicator in the HSE activities implementation at PTK. Good HSE management can minimize the occurrence of occupational accidents and diseases. Evidence of PTK's commitment to occupational safety is indicated by a NOA rate of 0 from a target of 100%.



Kinerja Sosial – Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat

Social Performance - Community Development and Empowerment

Komitmen dan Kebijakan Dalam Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat

Commitment and Policy in Community Development and Empowerment

PTK senantiasa secara berkelanjutan mengembangkan dan memberdayakan masyarakat melalui kebijakan pelaksanaan CSR yang secara khusus diatur dalam Surat Keputusan Direksi. Dalam pelaksanaan kegiatannya, program TJSI dilakukan oleh pengelola CSR di bawah koordinasi Fungsi Legal & Relation dan dievaluasi oleh Direktur Utama.

Lebih lanjut, berbagai program yang dijalankan PTK selaras dengan komitmen pembangunan berkelanjutan, baik itu di bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, infrastruktur, lingkungan, sosial dan budaya.

PTK continuously develops and empowers the community through CSR implementation policies specifically regulated in the Board of Directors Decree. In the implementation of its activities, the TJSI program is carried out by the CSR manager under the coordination of the Legal & Relations Function and evaluated by the President Director.

Furthermore, various programs run by PTK are in line with the commitment to sustainable development, in the education, economy, health, infrastructure, environment, social, and cultural sectors.

Inisiatif Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2023

Community Development and Empowerment Program Initiatives in 2023



Sepanjang tahun 2023, realisasi penyaluran dana yang dikeluarkan PTK untuk membiayai program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat mencapai Rp2.370 Juta. Realisasi kegiatan yang dilaksanakan meliputi bidang pendidikan, sosial, kerohanian, kesehatan, olah raga, bencana alam dan lingkungan hidup.



Berikut ini ringkasan program unggulan CSR yang telah dilaksanakan PTK sepanjang tahun 2023.



1. Program Bantuan Pengelolaan Lingkungan

Dalam komitmen keberlanjutan Perusahaan, PTK telah melaksanakan program pengelolaan lingkungan yaitu *Green map* (*Green Mangrove Action Program*). *Green map* merupakan program konservasi dan pengelolaan mangrove menjadi produk turunan sehingga memiliki nilai jual ekonomis bagi masyarakat sekitar. *Green map* merupakan program TJSI PT Pertamina Trans Kontinental sebagai bagian dari TRANSCO CARE sebagai komitmennya dalam prinsip keberlanjutan.

Green Map juga berarti sebagai salah satu upaya pencapaian komitmen keberlanjutan lingkungan, yakni melakukan konservasi mangrove sebagai tumbuhan yang mampu menyerap semua jenis logam berbahaya dan membuat kualitas air dan udara menjadi lebih bersih.

Optimalisasi konservasi dalam program *Green Map* menjadi bentuk nyata komitmen PT Pertamina Trans Kontinental dalam mengimplementasikan prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) sebagai upaya penurunan emisi karbon melalui konservasi mangrove.

Selain *Green Map*, PTK juga melaksanakan Program Desa Energi Berdikari. Desa Energi Berdikari hadir sebagai ruang edukasi dan penciptaan nilai ekonomis dari sumber daya sampah yang dapat diolah menjadi berbagai produk turunan dan aktivitas pemberdayaan masyarakat berbasis kepedulian lingkungan.

Optimalisasi pengolahan sampah dalam program Desa Energi Berdikari menjadi bentuk nyata komitmen PT Pertamina Trans Kontinental dalam mengimplementasikan prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) sebagai upaya penurunan emisi karbon melalui pengolahan sampah.

Throughout 2023, the realization of funds disbursed by PTK to finance community development and empowerment programs reached Rp2,370 million. The realization of activities carried out covers the education, social, spiritual, health, sports, natural disaster, and environmental sectors.

The following is a summary of the CSR flagship programs that have been implemented by PTK throughout 2023.

1. Environmental Management Assistance Program

In the Company's sustainability commitment, PTK has implemented an environmental management program, namely Green MAP (Green Mangrove Action Program). Green MAP is a mangrove conservation and management program into derivative products so that they have economic value for the surrounding community. Green MAP is PT Pertamina Trans Kontinental's TJSI program as part of TRANSCO CARE as its commitment to the principle of sustainability.

Green MAP is also one of the efforts to achieve environmental sustainability commitments, which is to conserve mangroves as plants that are able to absorb all types of harmful metals and make water and air quality cleaner.

Optimizing conservation in the Green MAP program is a concrete form of PT Pertamina Trans Kontinental's commitment to implementing the principles of the Environmental, Social, and Governance (ESG) as an effort to reduce carbon emissions through mangrove conservation.

In addition to the Green MAP, PTK also implements the Berdikari Energy Village Program. Berdikari Energy Village presents as a space for education and the creation of economic value from waste resources that can be processed into various derivative products and community empowerment activities based on environmental awareness.

The optimization of waste processing in the Berdikari Energy Village program is a concrete form of PT Pertamina Trans Kontinental's commitment to implementing the principles of Environmental, Social, and Governance (ESG) as an effort to reduce carbon emissions through waste processing.

2. Program Kesehatan

PTK juga berkomitmen dalam melakukan program kesehatan. pada tahun 2023, PTK telah melakukan kegiatan donor darah.

3. Program Bantuan Sosial

Memberikan bantuan dan santunan merupakan komitmen PTK terhadap masyarakat sekitar. PTK secara berkelanjutan telah memberikan bantuan dan santunan kepada masyarakat sekitar. bantuan yang diberikan PTK berupa santunan kepada yayasan panti asuhan, bantuan logistik koramil 03/SN-Kodim 0501/JP, bantuan Idul Adha 1444H untuk BDI dan bantuan sarana ibadah ke Masjid Nurul AKHLAQ

4. Program Pendidikan

- PTK Mengajar adalah bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) Pertamina Trans Kontinental (PTK) di bidang pendidikan. Pada tahun 2023, PT Karya Cita Konsultindo (KCK) ditetapkan menjadi konsultan pelaksana PTK dalam Program TJSL bidang pendidikan termasuk PTK Mengajar. Program dilaksanakan pada bulan Juli - September 2023. Program ini berfokus pada perguruan tinggi vokasi yang relevan dengan bidang jasa maritim, yaitu Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang dan Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Sorong.
- Program PTK Goes To Campus pada tanggal 11 Desember 2023 di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta dengan bentuk Kuliah Umum Direktur Utama.
- Program PTK Goes To School dengan target pendidikan dasar (Sekolah Dasar) yakni di SDN 060957 Kota Medan (5 Desember 2023) dan SDN 015 Balikpapan (14 Desember 2023) yang berada di wilayah operasional PTK.

Selain itu, PTK memberikan bantuan pendidikan (beasiswa) bagi mahasiswa dan mahasiswi berprestasi secara akademik dan non akademik serta berasal dari kalangan keluarga kurang mampu. Selanjutnya para mahasiswa yang mendaftar untuk mendapatkan beasiswa diseleksi secara administratif maupun melalui proses wawancara. Seleksi dilakukan hingga kemudian terpilih 10 nama kandidat terbaik di masing masing Perguruan Tinggi. Mahasiswa yang terpilih mendapat bantuan pendidikan Rp.5.000.000/orang yang diharapkan dapat membantu perjalanan studi dan meningkatkan motivasi mereka. Bantuan pendidikan ini diberikan secara simbolis saat Kuliah Umum oleh perwakilan Direksi PTK didampingi oleh manajemen Politeknik.

Penanganan Pengaduan Masyarakat Handling Public Complaints

PTK menyediakan sarana bagi para pemangku kepentingan untuk melaporkan atau menyampaikan pengaduan atas hal-hal yang bertentangan dengan etika, integritas, norma-norma dan dugaan pelanggaran peraturan atau tindakan yang mengganggu keamanan sosial, lingkungan hidup, dan lainnya di lingkungan wilayah operasional PTK. Mekanisme pengaduan masyarakat dapat dilakukan melalui mekanisme pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) maupun penyampaian pengaduan melalui email atau kontak center yang disediakan di *website* PTK.

Hingga akhir tahun 2023, PTK mencatat tidak terdapat pengaduan dari masyarakat terkait aktivitas operasional Perusahaan yang diterima dan perlu ditindaklanjuti.

2. Health Program

PTK is also committed to conducting health programs. In 2023, PTK has conducted blood donation activities.

3. Social Assistance Program

Providing assistance and donations is PTK's commitment to the surrounding community. PTK has continuously provided assistance and donations to the surrounding community. The assistance provided by PTK is in the form of donations to the orphanage foundation, logistical assistance to koramil 03/SN-Kodim 0501/JP, Eid al-Adha 1444H assistance for BDI, and assistance for worship facilities to the Nurul AKHLAQ Mosque.

4. Educational Program

- PTK Mengajar is part of Pertamina Trans Kontinental's (PTK) social and environmental responsibility (CSR) in the education sector. In 2023, PT Karya Cita Konsultindo (KCK) was appointed as PTK's implementing consultant in the TJSL Program in the education sector, including PTK Mengajar. The program was implemented in July - September 2023. The program focused on vocational colleges relevant to the maritime services sector, namely the Polytechnic of Shipping Science (PIP) Semarang and the Polytechnic of Shipping (Poltekpel) Sorong.
- PTK Goes to Campus program on December 11, 2023, at the Jakarta College of Shipping (STIP) in the form of a Public Lecture by the President Director.
- PTK Goes to School program targeting primary education (Elementary School) at SDN 060957 Medan City (December 5, 2023) and SDN 015 Balikpapan (December 14, 2023) located in PTK operational area.

In addition, PTK provides educational assistance (scholarships) for students who excel academically and non-academically and come from underprivileged families. Furthermore, students who apply for scholarships are selected administratively and through an interview. The selection is carried out until ten names of the best candidates are selected at each university. The selected students received educational assistance of Rp5,000,000/person, which is expected to assist their study journey and increase their motivation. This educational assistance was symbolically handed over during the Public Lecture by representatives of PTK's Board of Directors accompanied by the management of the Polytechnic.



PTK provides a means for stakeholders to report or submit complaints on matters that are contrary to ethics, integrity, norms, and alleged violations of regulations or actions that interfere with social security, the environment, and others in the operational area of PTK. The public complaint mechanism can be carried out through a whistleblowing system or the submission of complaints via email or the contact center provided on PTK's website.

Until the end of 2023, PTK recorded no complaints from the public related to the Company's operational activities that were received and needed to be followed up.

Kinerja Sosial – Pelanggan

Social Performance – Customers

Komitmen dan Kebijakan Dalam Pengembangan Produk dan Layanan

Commitment and Policy in Product and Service Development

Untuk memastikan terpenuhinya kualitas layanan kepada pelanggan, Perusahaan telah memiliki kebijakan yang tertuang dalam Perilaku Perusahaan (*Code of Conduct*). PTK juga menyediakan informasi yang lengkap terkait produk dan layanan yang dipasarkannya. Pelanggan dapat dengan mudah memperoleh informasi terkait produk yang dipasarkan Perusahaan melalui website Perusahaan yang beralamat di <https://www.pertamina-ptk.com/>.

To ensure the fulfillment of quality service to customers, the Company has a policy set out in the Code of Conduct. PTK also provides complete information regarding the products and services it markets. Customers can easily obtain information related to the products marketed by the Company through the Company's website at <https://www.pertamina-ptk.com/>.

Kesetaraan Pemenuhan Kualitas Layanan kepada Pelanggan

Equality of Fulfillment of Service Quality to Customers

PTK berfokus menyediakan produk dan layanan yang dapat diandalkan dengan kualitas dan spesifikasi yang tepat kepada para pelanggan. PTK senantiasa menjamin kualitas produk dan layanan sesuai standar mutu dan sertifikasi yang diterapkan secara setara dan adil kepada seluruh pelanggan.

PTK focuses on providing customers with reliable products and services with the right quality and specifications. PTK continuously guarantees the quality of products and services in accordance with quality standards and certifications applied equally and fairly to all customers.

Peningkatan Layanan Pelanggan

Customer Service Improvement

PTK komitmen untuk terus meningkatkan standar mutu dan layanan sebagai bentuk tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap Pelanggan. Adapun langkah-langkah yang dilakukan Perusahaan dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada Pelanggan yaitu:

1. Memberikan kemudahan layanan bagi Pelanggan untuk memperoleh informasi terkait produk, layanan, dan operasional bisnis Perusahaan di *call center*, *website*, dan media sosial Perusahaan;
2. Melakukan *survey* kepuasan Pelanggan;
3. Menangani keluhan serta pendapat Pelanggan untuk terus menyempurnakan proses dan kualitas pelayanan;
4. Mempercepat rangkaian proses bisnis dan pekerjaan lainnya sehingga dapat memberikan pelayanan yang lancar dan optimal;
5. Memberi kepastian dalam penyelesaian klaim sehingga dapat meningkatkan kepuasan Pelanggan.

Melalui pelaksanaan program-program tersebut diharapkan kepuasan pelanggan dapat terus meningkat sehingga mendorong pencapaian kinerja operasional dan keuangan Perusahaan.

PTK is committed to continuously improving quality and service standards as a form of corporate social responsibility towards Customers. The steps taken by the Company in an effort to enhance services to customers are:

1. Providing convenience services for Customers to obtain information related to the Company's products, services, and business operations in the Company's call center, website, and social media;
2. Conducting customer satisfaction surveys;
3. Handling customer complaints and opinions to continuously improve the process and quality of service;
4. Accelerating a series of business processes and other works so as to provide smooth and optimal services;
5. Providing certainty in claim settlement so as to increase customer satisfaction.

Through implementing these programs, it is expected that customer satisfaction can continue to increase, thus encouraging the achievement of the Company's operational and financial performance.

Inovasi Pengembangan Produk dan Layanan Perusahaan

Innovation in Company's Product and Service Development

PTK senantiasa memastikan bahwa produk dan layanan yang diberikan selalu relevan, efisien, dan mampu memberikan manfaat maksimal bagi seluruh pemangku kepentingan terutama pelanggan. PTK berupaya menciptakan inovasi dan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus sehingga selalu terdapat peningkatan kualitas secara berkelanjutan setiap tahunnya. Adapun inovasi dan upaya pengembangan produk dan layanan yang dilakukan PTK meliputi:

1. Pengadaan kapal jenis *Accommodation Work Barge* (AWB) untuk *support* kegiatan operasional di *market Upstream*
2. Penetrasi market internasional

PTK always ensures that the products and services provided are always relevant, efficient, and able to provide maximum benefits for all stakeholders, especially customers. PTK strives to create innovation and continuous development of products and services; hence, there is always a continuous quality improvement every year. The product and service innovation and development efforts undertaken by PTK include:

1. Procurement of Accommodation Work Barge (AWB) type vessels to support operational activities in the Upstream market
2. International market penetration

Survey Kepuasan Pelanggan Customer Satisfaction Survey

Pada tahun 2023 telah dilaksanakan *survey* kepuasan pelanggan oleh Pihak Independen. Hasil *survey* tersebut menunjukkan Indeks Kepuasan Pelanggan PTK dengan skor 4 dari 5, yang mengindikasikan bahwa pelanggan puas dengan pelayanan yang diberikan oleh Perusahaan

In 2023, a customer satisfaction survey was conducted by an Independent Party. The survey results show PTK's Customer Satisfaction Index with a score of 4 out of 5, which indicates that customers are satisfied with the services provided by the Company.

Layanan Pengaduan Pelanggan Customer Complaint Service

Perusahaan berkomitmen untuk terus memperbaiki nilai jual kepada customer melalui tanggung jawab sosial perusahaan kepada pelanggan. Dalam pelaksanaannya di PTK, Unit yang bertanggung jawab terhadap keluhan pelanggan berada di Unit *Customer Care*. Pengaduan dapat disampaikan pelanggan melalui berbagai media berupa surat, telepon, *email*, WhatsApp, SMS, dan/atau dengan mengunjungi *website* Perusahaan di alamat [://www.pertamina-ptk.com/](http://www.pertamina-ptk.com/).

The Company is committed to continuously improving its value to customers through corporate social responsibility to customers. In its implementation at PTK, the unit responsible for customer complaints is the Customer Care Unit. Complaints can be submitted by customers through various media such as mail, telephone, email, WhatsApp, SMS, and/or by visiting the Company's website at www.pertamina-ptk.com/.

Perusahaan berupaya memenuhi harapan pelanggan melalui program pengaduan pelanggan. Pengaduan atau keluhan pelanggan merupakan informasi penting yang dapat ditindaklanjuti untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan oleh Perusahaan. Upaya penyelesaian terhadap setiap keluhan pelanggan diatur secara khusus dalam kebijakan penanganan keluhan yang diterbitkan oleh PTK merujuk pada ISO 9001-2015.

The Company strives to meet customer expectations through the customer complaint program. Customer complaints are crucial information that can be followed up to improve the quality of services provided by the Company. Efforts to resolve customer complaints are particularly regulated in the complaint handling policy issued by PTK, referring to ISO 9001-2015.

Selama tahun 2023, PTK menerima pengaduan/klaime sebanyak 98. Dari 98 pengaduan/klaime yang masuk, sebanyak 52 pengaduan sudah diselesaikan dan 46 pengaduan/klaime masih dalam proses penyelesaian. PTK berkomitmen untuk menyelesaikan semua pengaduan/klaime yang masih dalam proses secara baik, efektif dan efisien sesuai harapan pelanggan.

During 2023, PTK received 98 complaints/claims. Of the 98 complaints/claims received, 52 complaints have been resolved, and 46 complaints/claims are still in the resolution process. PTK is committed to resolving all complaints/claims that are still in the process properly, effectively, and efficiently according to customer expectations.

Realisasi Anggaran Peningkatan Kualitas Layanan Pelanggan Realization of Budget for Customer Service Quality Improvement

Anggaran tanggung jawab terhadap pelanggan sebesar Rp1.974 Juta. Anggaran ini digunakan PTK untuk mengelola dan meningkatkan hubungan dengan pelanggan termasuk pengelolaan topik terkait kesehatan dan keselamatan pelanggan.

The customer responsibility budget is Rp1,974 Million. This budget is used by PTK to manage and improve customer relationships, including the management of topics related to customer health and safety.







Laporan Keuangan Audit

Audited Financial Statements

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES***

**LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
*CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS***

**31 DESEMBER 2023/
*31 DECEMBER 2023***





**SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG/
DIRECTORS' STATEMENT LETTER REGARDING**

PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARIES

**TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PADA
TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022 SERTA
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

**THE RESPONSIBILITY FOR
THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS AT 31 DECEMBER 2023 AND 2022
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022**

Atas nama Direksi, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

On behalf of the Board of Directors, we, the undersigned:

1. Nama : I Ketut Laba
Alamat : Jl. Yos Sudarso Kav 32-34
Tanjung Priok
Jakarta Utara 14320
Telepon : 021-80678500
Jabatan : Direktur Utama

1. Name : I Ketut Laba
Address: Jl. Yos Sudarso Kav 32-34
Tanjung Priok
Jakarta Utara 14320
Phone : 021-80678500
Position : President Director

2. Nama : Afan Aftory
Alamat : Jl. Yos Sudarso Kav 32-34
Tanjung Priok
Jakarta Utara 14320
Telepon : 021-80678500
Jabatan : Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia

2. Name : Afan Aftory
Address: Jl. Yos Sudarso Kav 32-34
Tanjung Priok
Jakarta Utara 14320
Phone : 021-80678500
Position : Director of Finance and Human Resources

menyatakan bahwa:

declare that:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Pertamina Trans Kontinental dan entitas anak ("Grup");
2. Laporan keuangan konsolidasian Grup telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Grup telah dimuat secara lengkap dan benar;
- b. Laporan keuangan konsolidasian Grup tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Grup.

1. We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements of PT Pertamina Trans Kontinental and subsidiaries (the "Group");
2. The Group's consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;
3. a. All information has been fully and correctly disclosed in the Group's consolidated financial statements;
- b. The Group's consolidated financial statements do not contain any false material information or facts, nor do they omit material information or facts; and
4. We are responsible for the Group's internal control systems.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Thus, this statement is made truthfully.

Atas nama dan mewakili Direksi.

For and on behalf of the Board of Directors.

Jakarta, 7 Maret/March 2024

Ketut Laba

I Ketut Laba

Direktur Utama/President Director



Afan Aftory

Afan Aftory

Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia/
Director of Finance and Human Resources



PT Pertamina Trans Kontinental
Jl. Yos Sudarso Kav. 32-34, Tj. Priok
Jakarta Utara 14320
T +62 21 806 78500
www.pusat.ptk@pertamina.com



**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

**INDEPENDENT AUDITORS' REPORT
TO THE SHAREHOLDERS OF**

PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Pertamina Trans Kontinental dan entitas anaknya ("Grup"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2023, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf "Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian" pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Opinion

We have audited the consolidated financial statements of PT Pertamina Trans Kontinental and its subsidiaries (the "Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as at 31 December 2023, and the consolidated statement of profit or loss, consolidated statement of changes in equity and consolidated statement of cash flows for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as at 31 December 2023, and its consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the "Auditors' responsibilities for the audit of the consolidated financial statements" paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Responsibilities of management and those charged with governance for the consolidated financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan

WTC 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920 – Indonesia

T: +62 (21) 5099 2901 / 3119 2901, F: +62 (21) 5290 5555 / 5290 5050, www.pwc.com/id

Nomor Izin Usaha: KEP-241/KM.1/2015.

00264/2.1025/AU.1/06/1130-6/1/III/2024





Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Grup.

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

Auditors' responsibilities for the audit of the consolidated financial statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgement and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.*





- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi dan pelaksanaan audit grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*
- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.*
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*
- *Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.*

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

JAKARTA,
7 Maret/March 2024

Daniel Kohar

Daniel Kohar, S.E., CPA
Izin Akuntan Publik/Public Accountant License No. AP.1130



00264/2.1025/AU.1/06/1130-6/1/III/2024

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 1/1 Schedule

**LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali nilai nominal dan data saham)

**CONSOLIDATED STATEMENT
OF FINANCIAL POSITION
AS AT 31 DECEMBER 2023**

(Expressed in millions of Rupiah
except for par value and share data)

	Catatan/ Notes	2023	2022
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	4, 25	1,843,431	1,125,624
Kas yang dibatasi penggunaannya		2,072	1,779
Piutang usaha			
- Pihak berelasi	5, 25	878,662	1,178,581
- Pihak ketiga	5	84,180	106,192
Aset kontrak			
- Pihak berelasi	6, 25	1,224,849	1,033,386
- Pihak ketiga	6	330,175	243,819
Piutang sewa pembiayaan	8	22,574	22,798
Piutang lain-lain		59	59
Pajak dibayar			
dimuka - pajak lain-lain	15a	124,444	24,076
Uang muka dan biaya dibayar dimuka	7	157,592	75,393
Jumlah aset lancar		4,668,038	3,811,707
ASET TIDAK LANCAR			
Aset tetap	10	3,652,243	3,861,943
Aset hak-guna	14a	485,284	309,975
Aset pajak tangguhan	15e	100,830	87,616
Piutang sewa pembiayaan	8	-	22,798
Penyertaan saham	25	6,652	6,661
Investasi pada ventura bersama	9	98,132	87,607
Pajak dibayar			
dimuka – pajak penghasilan	15a	4,933	-
Aset lain-lain		8,687	14,264
Jumlah aset tidak lancar		4,356,761	4,390,864
JUMLAH ASET		9,024,799	8,202,571

ASSETS

CURRENT ASSETS

Cash and cash equivalents
Restricted cash
Trade receivables
Related parties -
Third parties -
Contract assets
Related parties -
Third parties -
Finance lease receivables
Other receivables

Prepaid taxes - other tax

Advances and prepayments

Total current assets

NON-CURRENT ASSETS

Fixed assets
Right-of-use assets
Deferred tax assets
Finance lease receivables
Investment in shares
Investment in joint venture
Prepaid taxes –
corporate income tax
Other assets

Total non-current assets

TOTAL ASSETS

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 1/2 Schedule

**LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah
kecuali nilai nominal dan data saham)

**CONSOLIDATED STATEMENT
OF FINANCIAL POSITION
AS AT 31 DECEMBER 2023**

(Expressed in millions of Rupiah
except for par value and share data)

	Catatan/ Notes	2023	2022	
LIABILITAS				LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Utang usaha				Trade payables
- Pihak berelasi	11, 25	935,385	909,546	Related parties -
- Pihak ketiga	11	91,727	117,952	Third parties -
Biaya masih harus dibayar	12	1,483,717	1,742,194	Accrued expenses
Liabilitas kontrak				Contract liabilities
- Pihak berelasi	13, 25	41,153	20,136	Related parties -
- Pihak ketiga	13	192,382	87,084	Third parties -
Utang pajak				Taxes payable
- Pajak penghasilan	15b	127,363	97,288	Corporate income tax -
- Pajak lain-lain	15b	36,115	52,968	Other taxes -
Utang dividen	19	64	64	Dividend payables
Liabilitas sewa	14b	335,390	354,455	Lease liabilities
Bagian jangka pendek dari pinjaman jangka panjang	16	305,012	231,826	Current portion of long-term borrowings
Jumlah liabilitas jangka pendek		3,548,308	3,613,513	Total current liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NON-CURRENT LIABILITIES
Liabilitas sewa	14b	187,498	81,930	Lease liabilities
Pinjaman jangka panjang	16	426,950	722,993	Long-term borrowings
Liabilitas imbalan pasca kerja	17	221,658	176,556	Post-employment benefits obligation
Jumlah liabilitas jangka panjang		836,106	981,479	Total non-current liabilities
JUMLAH LIABILITAS		4,384,414	4,594,992	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS				EQUITY
Modal saham - modal ditempatkan dan disetor penuh 1.234.747 lembar saham A dengan nilai nominal Rp1.000.000 dan 819 saham B dengan nilai nominal Rp1.000	18	1,234,748	1,234,748	Share capital - issued and fully paid 1,234,747 shares A at par value of Rp1,000,000 per share and 819 shares B at par values of Rp1,000
Tambahan modal disetor		(76,051)	(76,051)	Additional paid-in capital
Rugi komprehensif lain		(99,560)	(80,872)	Other comprehensive loss
Saldo laba				Retained earnings
- Ditentukan penggunaannya	26	845,826	112,796	Appropriated -
- Belum ditentukan penggunaannya		2,734,901	2,416,562	Unappropriated -
		4,639,864	3,607,183	
Kepentingan non-pengendali		521	396	Non-controlling interest
JUMLAH EKUITAS		4,640,385	3,607,579	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		9,024,799	8,202,571	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 2 Schedule

**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah)

**CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2023**
(Expressed in millions of Rupiah)

	Catatan/ Notes	2023	2022	
Pendapatan usaha	20	6,746,509	4,784,913	Revenue
Beban pokok pendapatan	21	(4,153,993)	(3,136,987)	Cost of revenue
Laba bruto		2,592,516	1,647,926	Gross profit
Beban umum dan administrasi	22	(1,161,113)	(649,316)	General and administrative expenses
(Beban)/pendapatan lain-lain, neto	23	(53,526)	25,531	Other (expense)/revenue, net
Pendapatan keuangan		46,690	23,565	Finance income
Beban keuangan	24	(97,270)	(99,799)	Finance costs
Bagian atas laba bersih ventura bersama	9	30,925	25,446	Share in profit of joint venture
Beban pajak final		(11,894)	(18,499)	Final tax expenses
Laba sebelum pajak penghasilan		1,346,328	954,854	Profit before income tax
Beban pajak penghasilan	15c	(294,834)	(221,826)	Income tax expense
Laba tahun berjalan		1,051,494	733,028	Profit for the year
Penghasilan komprehensif lain				Other comprehensive income
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				Items that will not be reclassified to the profit or loss:
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti	17	(23,375)	24,964	Remeasurement of defined benefit obligation
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				Items that will be reclassified to the profit or loss:
Perubahan nilai wajar instrumen ekuitas melalui penghasilan komprehensif lain		(10)	662	Changes in the fair value of equity instruments at fair value through other comprehensive income
Pajak penghasilan terkait		4,697	(4,943)	Related income tax
Jumlah (rugi)/penghasilan komprehensif lain		(18,688)	20,683	Total other comprehensive (loss)/income
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan		1,032,806	753,711	Total comprehensive income for the year
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				Profit for the year attributable to:
- Pemilik entitas induk		1,051,369	732,568	Owners of the parent entity -
- Kepentingan non-pengendali		125	460	Non-controlling interests -
Laba tahun berjalan		1,051,494	733,028	Profit for the year
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				Total comprehensive income for the year attributable to:
- Pemilik entitas induk		1,032,681	753,251	Owners of the parent entity -
- Kepentingan non-pengendali		125	460	Non-controlling interests -
Jumlah penghasilan komprehensif lain		1,032,806	753,711	Total other comprehensive income

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2023**
(Expressed in millions of Rupiah)

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 3 Schedule

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah)

	Distribusikan kepada pemilik entitas induk/Attributable to owners of the parent entity					
	Modal ditempatkan dan disetor penuh/ Issued and fully paid share capital	Tambahan modal disetor/ Additional paid-in capital	Rugi komprehensif lain/Other comprehensive loss	Saldo laba/ Retained earnings	Kepentingan non-pengendali/ Non-controlling interest	Jumlah ekuitas/ Total equity
				Telah ditentukan penggunaannya/ Appropriated	Belum ditentukan penggunaannya/ Unappropriated	
Saldo per 1 Januari 2022	1,106,146	(76,051)	(101,555)	75,943	2,444,631	3,449,114
Modal ditempatkan dan disetor penuh	128,602	-	-	-	-	128,602
Penghasilan komprehensif lain	-	-	20,683	-	-	20,683
Dividen dideklarasikan	-	-	-	-	(723,784)	(723,848)
Laba tahun berjalan	-	-	-	36,853	732,568	733,028
Cadangan umum	-	-	-	-	(36,853)	-
Saldo per 31 Desember 2022	1,234,748	(76,051)	(80,872)	112,796	2,416,562	3,607,579
Modal ditempatkan dan disetor penuh	-	-	-	-	-	-
Rugi komprehensif lain	-	-	(18,688)	-	-	(18,688)
Laba tahun berjalan	-	-	-	733,030	1,051,369	1,051,494
Cadangan umum	-	-	-	-	(733,030)	-
Saldo per 31 Desember 2023	1,234,748	(76,051)	(99,560)	845,826	2,734,901	4,640,385

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 4 Schedule

**LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah)

**CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2023**
(Expressed in millions of Rupiah)

	Catatan/ Notes	2023	2022	
Arus kas dari aktivitas operasi				Cash flows from operating activities
Penerimaan dari pelanggan		6,912,440	4,161,889	Receipts from customers
Pembayaran kepada pemasok		(4,406,710)	(2,127,266)	Payments to suppliers
Pembayaran beban keuangan		(97,270)	(90,619)	Payments of finance costs
Pembayaran pajak final		(11,894)	(18,499)	Payments of final tax expense
Penerimaan penghasilan keuangan		46,690	23,565	Receipts of finance income
Pembayaran kepada karyawan		(627,004)	(389,435)	Payments to employees
Pembayaran pajak penghasilan badan		(276,658)	(192,055)	Payment of corporate income tax
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi		1,539,594	1,367,580	Net cash generated from operating activities
Arus kas dari aktivitas investasi				Cash flows from investing activities
Penerimaan dividen dari ventura bersama	9	20,400	22,482	Dividends received from joint venture
Penerimaan piutang pembiayaan		23,021	17,033	Receipts from lease receivables
Perolehan aset tetap		(145,280)	(414,682)	Acquisition of fixed assets
Kompensasi atas pembatalan aset dalam penyelesaian	10	-	155,400	Compensation of cancellation construction in progress
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi		(101,859)	(219,767)	Net cash used in investing activities
Arus kas dari aktivitas pendanaan				Cash flows from financing activities
Penerimaan pinjaman		51,761	452,399	Proceeds from borrowings
Pembayaran pinjaman		(273,641)	(744,038)	Repayments of borrowings
Pembayaran dividen tunai	19	-	(723,784)	Payment of cash dividends
Pembayaran atas liabilitas sewa	14b	(505,481)	(274,620)	Payments of lease liabilities
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan		(727,361)	(1,290,043)	Net cash used in financing activities
Efek perubahan nilai kurs pada kas dan setara kas		7,433	4,688	Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents
Kenaikan/(penurunan) bersih kas dan setara kas		717,807	(137,542)	Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents
Kas dan setara kas pada awal tahun	4	1,125,624	1,263,166	Cash and cash equivalents at the beginning of the year
Kas dan setara kas pada akhir tahun	4	1,843,431	1,125,624	Cash and cash equivalents at the end of the year

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/1 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM

a. Pendirian dan informasi umum

PT Pertamina Trans Kontinental ("Perusahaan") didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 3 tanggal 9 September 1969, yang diubah dengan notaris yang sama dengan Akta Notaris No. 1 tanggal 3 Januari 1975, oleh Tan Thong Kie dengan nama PT Pertamina Tongkang. Akta pendirian tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No.Ya.5/5/4 tanggal 21 Januari 1975 dan telah diumumkan dalam Lembaran Berita Negara No. 10 tanggal 4 Februari 1975. Nama Perusahaan diubah menjadi PT Pertamina Trans Kontinental berdasarkan Akta Notaris No. 12 tanggal 26 Oktober 2011 oleh Dewantari Handayani, S.H., M.P.A., notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusannya No. AHU-58581.AH.01.02 Tahun 2011 tanggal 29 November 2011.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir dilakukan berdasarkan Akta Notaris No. 30 tanggal 29 November 2022 dari Lenny Janis Ishak, S.H., notaris di Jakarta, mengenai perubahan peningkatan modal dasar Anggaran Dasar Perusahaan. Perubahan ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0319457 Tahun 2022 tanggal 30 November 2022.

Perusahaan berdomisili di Jakarta dan kantor pusat Perusahaan beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 34.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah sebagai berikut:

- Maksud Perusahaan adalah untuk menyelenggarakan usaha di bidang jasa pelayaran, maritim dan logistik baik di dalam negeri maupun diluar negeri serta kegiatan usaha lain yang terkait atau menunjang kegiatan usaha di bidang jasa pelayaran, maritim dan logistik tersebut.
- Tujuan Perusahaan adalah untuk:
 - a. Mengusahakan keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan Perusahaan secara efektif dan efisien; dan
 - b. Memberikan kontribusi dalam kegiatan ekonomi untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

1. GENERAL INFORMATION

a. Establishment and general information

PT Pertamina Trans Kontinental (the "Company") was established based on Notarial Deed No. 3 dated 9 September 1969, as amended by Notarial Deed No. 1 of the same notary dated 3 January 1975, by Tan Thong Kie under the name of PT Pertamina Tongkang. The deed of establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No.Ya.5/5/4 dated 21 January 1975 and was published in State Gazette No. 10 dated 4 February 1975. The Company's name was changed to PT Pertamina Trans Kontinental based on Notarial Deed No. 12 dated 26 October 2011, of Dewantari Handayani, S.H., M.P.A., notary in Jakarta. The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. AHU-58581.AH.01.02 Year 2011 dated 29 November 2011.

The Company's Articles of Association have been amended several times, with the latest amendment made by Notarial Deed No. 30 of Lenny Janis Ishak, S.H., notary in Jakarta, dated 29 November 2022, regarding the increase in the authorised share capital of the Company. The change was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0319457 Year 2022 dated 30 November 2022.

The Company is domiciled in Jakarta and its head office is located in Jl. Yos Sudarso No. 34.

In accordance with Article 3 of the Company's Articles of Association, the scope of its activities are as follows:

- The Company's objective is to conduct business in shipping, maritime and logistics services both domestically and abroad, as well as other related or supporting business activities in shipping, maritime and logistics services.
- The Company's objectives are to:
 - a. Make profits based on the principles of effective and efficient management; and
 - b. Contribute to economic activities for the welfare and prosperity of the people.



**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/2 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

1. GENERAL INFORMATION (continued)

b. Struktur Grup

b. The Group structure

i. Entitas anak

i. Subsidiaries

Pada laporan keuangan konsolidasian ini, Perusahaan dan entitas anak secara keseluruhan dirujuk sebagai "Grup".

In these consolidated financial statements, the Company and its subsidiaries are collectively referred to as the "Group".

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, struktur Grup adalah sebagai berikut:

As at 31 December 2023 and 2022, the structure of the Group was as follows:

Entitas anak/ Subsidiaries	Aktivitas bisnis/ Business activities	Domisili/ Domicile	Mula beroperasi komersial/ Commencement of commercial operations	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership		Jumlah aset sebelum eliminasi/ Total asset before elimination	
				2023	2022	2023	2022
1, PT Pertamina Port and Logistics (dahulu/ formerly PT Peteka Karya Samudera) ("PPL") Berdiri tanggal 10 Februari 1986/ Established on 10 February 1986	Jasa bongkar muat, jasa pengangkutan dan pergudangan/ Cargo handling, freight and warehousing	Jakarta	1996	100%	100%	776,891	712,454
2, PT Pertamina Marine Solutions (dahulu/ formerly PT Peteka Karya Gapura) ("PMSol") Berdiri tanggal 5 Juni 1987/ Established on 5 June 1987	Jasa angkutan, penyediaan tenaga kerja dan perdagangan umum/ Transportation service, labour supply and general trade	Jakarta	1998	100%	100%	497,897	315,739
3, PT Pertamina Marine Engineering (dahulu/ formerly PT Peteka Karya Jala) ("PME") Berdiri tanggal 6 November 1991/ Established on 6 November 1991	Perawatan dan pengadaan barang dan jasa/ Maintenance and procurement of goods	Jakarta	1991	100%	99,17%	322,808	298,064

Pada tanggal 31 Desember 2023, Perusahaan melakukan penambahan modal pada anak perusahaan PMSol sebesar Rp47.234 sehingga meningkatkan investasi total Perusahaan menjadi Rp51.928. Penambahan modal tersebut telah disetujui melalui keputusan pemegang saham secara sirkuler No. 363 di tanggal 10 Januari 2024 yang ditandatangani oleh notaris Fernandia Fabiola, S.H., M.Kn dan telah disahkan melalui lampiran keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0002651.AH.01.02. tahun 2024 tentang persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas PMSol di tanggal 15 Januari 2024.

On 31 December 2023, the Company added capital to its PMSol subsidiary amounting to Rp47,234 bringing the Company's total investment to Rp51,928. The additional capital was approved through circular shareholder decision No. 363 on 10 January 2024 which was signed by notary Fernandia Fabiola, SH, M.Kn and has been ratified through the attachment to the decision of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia number AHU-0002651.AH.01.02. year 2024 concerning approval of changes to the articles of association of limited liability companies PMSol on 15 January 2024.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/3 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

b. Struktur Grup (lanjutan)

ii. Ventura bersama

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 16 September 2014 yang risalah rapatnya didokumentasikan dalam Akta Notaris No. 41 oleh Notaris Dewantari Handayani, S.H., MPA, Perusahaan dan Tong Yeong Tug Co. Ltd. ("TYT"), mendirikan ventura bersama bernama PT Trans Yeong Maritime ("TYM"), sebuah perusahaan yang berkedudukan di Jakarta Pusat. Maksud dan tujuan ventura bersama adalah untuk menyelenggarakan usaha dibidang jasa pelayaran dan kepelabuhan laut. Kepemilikan saham Perusahaan di TYM adalah sebesar 51%.

Perusahaan induk utama Perusahaan adalah PT Pertamina (Persero) ("Pertamina"), badan usaha milik negara ("BUMN").

1. GENERAL INFORMATION (continued)

b. The Group structure (continued)

ii. Joint venture

Based on the Annual General Meeting of Shareholders dated 16 September 2014, which was documented in Notarial Deed No. 41 by Notary Dewantari Handayani S.H., MPA, the Company and Tong Yeong Tug Co. Ltd. ("TYT") established a joint venture named PT Trans Yeong Maritime ("TYM"), a company located in Central Jakarta. The joint venture's purpose and objective are related to shipping and harbour services. The Company's share of ownership in TYM is 51%.

The Company's ultimate parent company is PT Pertamina (Persero) ("Pertamina"), a state-owned enterprise ("SOE").

c. Dewan Komisaris dan Dewan Direksi dan Karyawan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

c. Boards of Commissioners and Board of Directors and Employees

The members of the Company's Boards of Commissioners and Directors as at 31 December 2023 and 2022 were as follows:

	2023	2022	
Dewan Komisaris			Board of Commissioners
Komisaris Utama	Amir Hamzah	Amir Hamzah	President Commissioner
Komisaris	Khalid Zabidi Andi Saiful Haq	Khalid Zabidi Agustinus Lomboan Andi Saiful Haq	Commissioners
Direksi			Board of Directors
Direktur Utama	I Ketut Laba	Nepos MT Pakpahan	President Director
Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia	Afan Aftory	Afan Aftory	Finance and Human Resources Director
Direktur Operasi	Slamet Harianto	Slamet Harianto	Operation Director
Direktur Pemasaran	Andy Arvianto	Afan Aftory*	Commercial Director

Keterangan:
(*) Sejak tanggal 6 Desember 2022, Afan Aftory adalah pelaksana tugas Direktur Pemasaran.

Remarks:
(*) Since 6 December 2022, Afan Aftory is Commercial Director acting official.

Jumlah seluruh karyawan Perusahaan dan entitas anaknya pada tanggal 31 Desember 2023 adalah 608 (31 Desember 2022: 414) (tidak diaudit).

The total number of employees of the Company and its subsidiary as at 31 December 2023 was 608 (31 December 2022: 414) (unaudited).

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/4 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

d. Penyelesaian atas laporan keuangan konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian ini diotorisasi untuk diterbitkan sesuai dengan resolusi Direksi Perusahaan pada tanggal 7 Maret 2024.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

d. Completion of the consolidated financial statements

These consolidated financial statements were authorised for issuance in accordance with a resolution of the Board of Directors of the Company on 7 March 2024.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi yang signifikan yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup, yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Kebijakan akuntansi telah diterapkan secara konsisten terhadap semua periode yang disajikan, kecuali dinyatakan lain.

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan konsep harga perolehan serta menggunakan dasar akrual kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk tujuan penyusunan laporan arus kas konsolidasian, kas dan setara kas mencakup kas, kas di bank, dan deposito dengan jangka waktu tiga bulan atau kurang.

Seluruh angka dalam laporan keuangan konsolidasian ini, dibulatkan dan disajikan dalam jutaan Rupiah ("Rp"), kecuali dinyatakan lain. Lihat catatan 2c untuk informasi mata uang fungsional.

Kecuali dinyatakan dibawah ini, kebijakan akuntansi telah diterapkan secara konsisten dengan laporan keuangan konsolidasian tahunan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 yang telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi dan juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup. Area yang memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau kompleks atau area dimana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian diungkapkan di Catatan 3.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES

Presented below are the significant accounting policies adopted in preparing the consolidated financial statements of the Group, which are in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards.

The accounting policies have been consistently applied to all the periods presented, unless otherwise stated.

a. Basis of preparation of the consolidated financial statements

The consolidated financial statements have been prepared under the historical cost convention and using the accrual basis except for the consolidated statement of cash flows.

The consolidated statement of cash flows is prepared based on the direct method by classifying cash flows on the basis of operating, investing and financing activities. For the purpose of the consolidated statements of cash flows, cash and cash equivalents include cash on hand, cash in banks and deposits with a maturity of three months or less.

Figures in the consolidated financial statements are rounded to and stated in millions of Rupiah ("Rp"), unless otherwise specified. Refer to notes 2c for the information on the group's functional currency.

Except as described below, the accounting policies applied are consistent with those of the annual consolidated financial statements for the year ended 31 December 2022, which conform to the Indonesian Financial Accounting Standards.

The preparation of consolidated financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of certain critical accounting estimates and assumptions. It also requires management to exercise its judgement in the process of applying the Group's accounting policies. The areas involving a higher degree of judgement or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the consolidated financial statements are disclosed in Note 3.



**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/5 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(lanjutan)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Perubahan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK")

Standar baru, amandemen dan interpretasi yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023 adalah sebagai berikut

- Amandemen PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan" tentang pengungkapan kebijakan akuntansi;
- Amandemen PSAK 16 "Aset Tetap" tentang hasil sebelum penggunaan yang diintensikan;
- Amandemen PSAK 25 "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan" tentang definisi estimasi akuntansi;
- Amandemen PSAK 46 "Pajak Penghasilan" tentang pajak tangguhan terkait aset dan liabilitas yang timbul dari transaksi tunggal;
- Amandemen PSAK 107 "Akuntansi Ijarah" tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan akad ijarah.

Standar baru, amandemen dan interpretasi yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024 adalah sebagai berikut:

- Amandemen PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan" tentang kewajiban diklasifikasikan sebagai lancar atau tidak lancar;
- Amandemen PSAK 73 "Sewa" tentang liabilitas sewa pada transaksi jual dan sewa-balik;
- Amandemen PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan" tentang liabilitas jangka panjang dengan kovenan.

Standar baru, amandemen dan interpretasi yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025 adalah sebagai berikut:

- PSAK 74 "Kontrak Asuransi";
- Amandemen PSAK 74 "Kontrak Asuransi" tentang penerapan awal PSAK 74 dan PSAK 71 - informasi komparatif.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

a. Basis of preparation of the consolidated financial statements (continued)

Changes to Statements of Financial Accounting Standards ("SFAS") and Interpretations of Statements of Financial Accounting Standards ("IFAS")

New standards, amendments and interpretations issued but only effective for financial years beginning on or after 1 January 2023 are as follows

- *The amendments to SFAS 1 "Presentation of Financial Statements" about disclosure of accounting policies;*
- *The amendments to SFAS 16 "Property, Plant and Equipment" about proceeds before intended use;*
- *The amendments to SFAS 25 "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors" about definition of accounting estimates;*
- *The amendments to SFAS 46 "Income Tax" about deferred tax related to assets and liabilities arising from a single transaction;*
- *The amendments to SFAS 107: "Ijarah Accounting" about recognition, measurement, and disclosure of ijarah contracts.*

New standards, amendments and interpretations issued but only effective for financial years beginning on or after 1 January 2024 are as follows:

- *The amendments to SFAS 1 "Presentation of Financial Statements" about the classification of liabilities class as current or non-current.*
- *The amendments to SFAS 73 "Leases" about lease liability in a sale and leaseback;*
- *The amendments to SFAS 1 "Presentation of Financial Statements" about non-current liabilities with covenants.*

New standards, amendments and interpretations issued but only effective for financial years beginning on or after 1 January 2025 are as follows:

- *SFAS 74 "Insurance Contracts";*
- *The amendments to SFAS 74 "Insurance Contracts" about initial application of SFAS 74 and SFAS 71 - comparative information.*



**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/6 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL 2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)
(lanjutan)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Perubahan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") (lanjutan)

Pada tanggal laporan keuangan konsolidasian ini, Grup sedang mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru, amandemen dan interpretasi pada laporan keuangan konsolidasian Grup.

Mulai 1 Januari 2024, referensi terhadap masing-masing PSAK dan ISAK akan diubah sebagaimana diterbitkan oleh DSAK-IAI.

b. Konsolidasian

(i) Entitas anak

Entitas anak adalah seluruh entitas (termasuk entitas yang terstruktur) dimana Grup memiliki kontrol. Grup memiliki kontrol atas entitas anak apabila Grup memiliki dampak dari, atau memiliki hak atas, penerimaan variabel dari hubungannya dengan entitas anak dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi penerimaan tersebut melalui kuasa atas entitas anak. Entitas anak secara utuh dikonsolidasikan dari tanggal dimana kontrol dialihkan ke Grup. Entitas anak tidak lagi dikonsolidasikan sejak tanggal Grup kehilangan pengendalian.

(ii) Entitas asosiasi

Entitas asosiasi adalah seluruh entitas dimana Grup memiliki pengaruh signifikan namun bukan pengendalian, biasanya melalui kepemilikan hak suara antara 20% dan 50%. Investasi entitas asosiasi dicatat dengan metode ekuitas, setelah pada awalnya diakui pada nilai perolehan.

(iii) Pengaturan bersama

Menurut PSAK 66, pengaturan bersama diklasifikasikan sebagai operasi bersama atau ventura bersama bergantung pada hak dan kewajiban kontraktual para investor bukan struktur hukum dari pengaturan bersama. Grup telah menilai sifat dari pengaturan bersama dan menentukan pengaturan tersebut sebagai ventura bersama. Ventura bersama dicatat menggunakan metode ekuitas, setelah pada awalnya diakui sebagai biaya pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

a. Basis of preparation of the consolidated financial statements (continued)

Changes to Statements of Financial Accounting Standards ("SFAS") and Interpretations of Statements of Financial Accounting Standards ("IFAS") (continued)

As at the date of these consolidated financial statements, the Group is evaluating the potential impact of these new standards, amendments and interpretations on the Group's consolidated financial statements.

Starting from 1 January 2024, references to the individual SFAS and IFAS will be changed as published by DSAK IAI.

b. Consolidation

(i) Subsidiaries

Subsidiaries are all those entities (including structured entities) over which the Group has control. The Group controls an entity when the Group is exposed to, or has rights to, variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through its power over the entity. Subsidiaries are fully consolidated from the date on which control is transferred to the Group. They are de-consolidated from the date that control ceases.

(ii) Associates

Associates are all entities over which the Group has significant influence but not control, generally accompanying a shareholding of between 20% and 50% of the voting rights. Investments in associates are accounted for using the equity method of accounting, after initially being recognised at cost.

(iii) Joint arrangements

Under SFAS 66, investments in joint arrangements are classified as either joint operations or joint ventures depending on the contractual rights and obligations of each investor rather than the legal structure of the joint arrangement. The Group has assessed the nature of its joint arrangement and determined them to be a joint venture. A joint venture is accounted for using the equity method, after initially being recognised at cost in the consolidated statement of financial position.



**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/7 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2023

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

31 DECEMBER 2023

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(lanjutan)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Konsolidasian (lanjutan)

b. Consolidation (continued)

(iv) Metode ekuitas

(iv) Equity method

Sesuai metode ekuitas, investasi pada awalnya dicatat pada biaya perolehan dan selanjutnya disesuaikan untuk mengakui bagian Grup atas laba rugi pasca akuisisi dari *investee* pada laba rugi, dan bagiannya dalam pergerakan pendapatan komprehensif lainnya dari *investee* di pendapatan komprehensif lainnya.

Under the equity method, the investment is initially recognised at cost and adjusted thereafter to recognise the Group's share of the post-acquisition profits or losses of the investee in profit or loss, and its share of movements in other comprehensive income of the investee in other comprehensive income.

Jika bagian Grup atas kerugian ventura bersama sama dengan atau melebihi kepentingannya pada ventura bersama, termasuk piutang tanpa agunan, Grup menghentikan pengakuan bagian kerugiannya, kecuali Grup memiliki kewajiban hukum atau konstruktif atau melakukan pembayaran atas nama ventura bersama.

When the Group's share of losses in a joint venture equal or exceeds its interest in the joint venture, including any other unsecured receivables, the Group does not recognise further losses, unless it has incurred legal or constructive obligations or made payments on behalf of the joint venture.

Keuntungan yang belum terealisasi atas transaksi antara Grup dengan ventura bersama dieliminasi sebesar kepentingan Grup dalam entitas tersebut. Kerugian yang belum terealisasi juga dieliminasi kecuali transaksi tersebut memberikan bukti adanya penurunan nilai aset yang dialihkan. Kebijakan akuntansi ventura bersama telah diubah jika diperlukan untuk memastikan konsistensi dari kebijakan yang diterapkan oleh Grup.

Unrealised profits on transactions between the Group and its joint venture are eliminated to the extent of the Group's interest in this entity. Unrealised losses are also eliminated unless the transaction provides evidence of an impairment of the asset transferred. Accounting policies of the joint venture have been changed where necessary to ensure consistency with the policies adopted by the Group.

Dividen yang diterima dan yang akan diterima dari ventura bersama diakui sebagai pengurang jumlah tercatat investasi.

Dividends received or receivable from the joint venture are recognised as a reduction in the carrying amount of the investment.

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup menentukan apakah terdapat bukti objektif bahwa telah terjadi penurunan nilai pada investasi pada entitas asosiasi. Jika demikian, maka nilai tercatat dari investasi yang dicatat dengan akuntansi ekuitas diuji untuk penurunan nilai.

The Group determines at each reporting date whether there is any objective evidence that the investment in the associate is impaired. If this is the case, the carrying amount of the equity accounting investments is tested for impairment.



**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/8 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2023

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

31 DECEMBER 2023

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(lanjutan)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Konsolidasian (lanjutan)

b. Consolidation (continued)

(v) Perubahan kepemilikan

(v) Changes in ownership interests

Ketika Grup tidak lagi mengkonsolidasikan atau mencatat menggunakan metode ekuitas untuk investasi karena hilangnya pengendalian, pengendalian bersama atau pengaruh signifikan, maka kepentingan yang masih tersisa atas entitas diukur kembali berdasarkan nilai wajarnya, dan perubahan nilai tercatat diakui dalam laporan laba rugi. Nilai tercatat awal adalah sebesar nilai wajar untuk kepentingan pengukuran kembali kepentingan yang tersisa sebagai entitas asosiasi, ventura bersama atau aset keuangan. Di samping itu, jumlah yang sebelumnya diakui pada pendapatan komprehensif lain sehubungan dengan entitas tersebut dicatat seolah-olah Grup telah melepas aset atau liabilitas terkait. Hal ini dapat berarti bahwa jumlah yang sebelumnya diakui pada pendapatan komprehensif lain direklasifikasi ke laporan laba rugi.

When the Group ceases to consolidate or equity account for an investment because of a loss of control, joint control or significant influence, any retained interest in the entity is remeasured to its fair value at the date when the control is lost, with the change in carrying amount recognised in profit or loss. The fair value is the initial carrying amount for the purposes of subsequently accounting for the retained interest as an associate, joint venture or financial asset. In addition, any amounts previously recognised in other comprehensive income in respect of that entity are accounted for as if the Group had directly disposed of the related assets or liabilities. This may mean that amounts previously recognised in other comprehensive income are reclassified to profit or loss.

c. Penjabaran mata uang asing

c. Foreign currency transactions

(i) Mata uang fungsional dan penyajian

(i) Functional and presentation currency

Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

The consolidated financial statements are presented in Rupiah, which is the Company's functional currency.

(ii) Transaksi dan saldo

(ii) Transactions and balances

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang fungsional dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada setiap tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang fungsional menggunakan kurs penutup. Kurs yang digunakan sebagai acuan adalah kurs yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari penyelesaian transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing diakui di dalam laporan laba rugi.

Foreign currency transactions are translated into functional currency using the exchange rates prevailing at the dates of the transactions. At each reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currency are translated into functional currency using the closing exchange rate. The exchange rate used as a benchmark is the rate that is issued by the Bank of Indonesia. Foreign exchange gains and losses resulting from the settlement of such transactions and from the translation at period-end exchange rates of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are recognised in the profit or loss.



**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/9 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL 2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)
(lanjutan)

c. Penjabaran mata uang asing (lanjutan)

(iii) Transaksi dan saldo

Nilai tukar yang digunakan adalah sebagai berikut (dalam satuan penuh):

	2023	2022
Rupiah per Dolar Amerika Serikat ("AS\$")	15,493	15,592

c. Foreign currency transactions (continued)

(iii) Transactions and balances

The rates of exchange used are as follows
(in full amounts):

	2023	2022
Rupiah equivalent to United States Dollar ("US\$")	15,493	15,592

d. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas yang telah ditentukan penggunaannya atau yang tidak dapat digunakan secara bebas tidak tergolong dalam kas dan setara kas.

e. Transaksi dengan pihak berelasi

Grup mempunyai transaksi dengan pihak berelasi. Definisi pihak berelasi sesuai dengan yang diatur dalam PSAK No. 7 (Revisi 2015), "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi".

Saldo dan transaksi yang material antara Grup dengan Pemerintah Negara Republik Indonesia dan entitas berelasi dengan Pemerintah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang relevan. Grup memilih untuk mengungkapkan transaksi dengan entitas berelasi dengan Pemerintah dengan menggunakan pengecualian dari persyaratan pengungkapan pihak berelasi.

Transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, yang mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

f. Piutang usaha

Piutang usaha adalah jumlah piutang pelanggan atas jasa yang diberikan sehubungan dengan kegiatan usaha. Bila pembayaran diharapkan akan diterima dalam jangka waktu satu tahun atau kurang, maka diklasifikasikan sebagai aset lancar. Bila tidak, disajikan sebagai aset tidak lancar.

d. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents which have been restricted for a certain purpose, or which cannot be used freely, are not defined as cash and cash equivalents.

e. Transactions with related parties

The Group has transactions with related parties. The definition of related parties is in accordance with SFAS No. 7 (Revised 2015), "Related Party Disclosures".

All significant transactions and balances of the Group with the Government of the Republic of Indonesia and Government-related entities are disclosed in the relevant notes to the consolidated financial statements. The Group elected to disclose the transactions with Government-related entities, using the exemption from general related party disclosure requirements.

Transactions with related parties are based on terms agreed by the parties, which may not be the same as those of the transaction between unrelated parties.

f. Trade receivables

Trade receivables are amounts due from customers for services performed in the ordinary course of business. If collection is expected in one year or less, they are classified as current assets. If not, they are presented as non-current assets.



**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/10 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL (lanjutan) 2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Piutang usaha (lanjutan)

Piutang usaha pada awalnya diakui pada nilai wajar dan kemudian diukur dengan menggunakan biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif ("SBE"), dikurangi dengan penyisihan penurunan nilai.

Lihat Catatan 2p untuk informasi lebih lanjut mengenai kebijakan penentuan jumlah cadangan kerugian piutang Grup.

g. Kontrak aset

Kontrak aset merupakan jumlah pendapatan yang belum ditagihkan pada akhir periode pelaporan keuangan sehubungan dengan jasa yang telah diberikan.

h. Biaya dibayar dimuka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

i. Aset tetap

Aset tetap diakui sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai. Harga perolehan termasuk pengeluaran yang dapat didistribusikan secara langsung atas perolehan aset tersebut.

Biaya-biaya setelah pengakuan awal diakui sebagai bagian nilai tercatat aset atau sebagai aset yang terpisah, sebagaimana mestinya, hanya jika kemungkinan besar Grup mendapat manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut dan biaya perolehan aset dapat diukur dengan andal. Nilai tercatat dari komponen yang diganti dihapuskan. Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke dalam laporan laba rugi dalam periode keuangan ketika biaya-biaya tersebut terjadi.

Kapal milik Grup mengalami pengedokan secara berkala secara umum setiap 2 - 2,5 tahun dan biaya pengedokan tersebut dikapitalisasi sepanjang pengeluarannya dapat menunjukkan peningkatan manfaat ekonomis mendatang kapal. Kapitalisasi biaya tersebut dicatat sebagai penambahan ke harga perolehan kapal untuk kapal yang dimiliki sendiri dan kapal yang diperoleh melalui sewa pembiayaan, atau dicatat sebagai biaya ditangguhkan untuk kapal yang disewa melalui sewa operasi, dan disusutkan selama periode hingga jadwal pengedokan berikutnya. Total biaya pengedokan terdahulu yang tersisa, jika ada, dihentikan pengakuannya dan dibebankan ke laporan laba rugi tahun berjalan.

f. Trade receivables (continued)

Trade receivables are recognised initially at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest rate ("EIR") method, less provision for impairment.

See Note 2p for further information regarding the policy on the determination of the amount for the loss allowance on the Group's receivables.

g. Contract assets

Contract assets represent the unbilled amounts at the end of the financial reporting period in respect of services performed.

h. Prepayments

Prepaid expenses are amortised over their beneficial periods using the straight-line method.

i. Fixed assets

Fixed assets are initially stated at the cost of acquisition less accumulated depreciation and accumulated impairment losses. Cost of acquisition includes expenditure that is directly attributable to the acquisition of the items.

Subsequent costs are included in the asset's carrying amount or recognised as separate assets, as appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Group and when the cost of the item can be measured reliably. The carrying amount of the replaced part is derecognised. All other repairs and maintenance are charged to profit or loss during the financial period in which they are incurred.

The Group's vessels generally dock every 2 – 2,5 years and the docking costs are capitalised to the extent that the expenditure results in an increase in the future economic benefit of the vessels. The capitalised costs are recorded as an additional cost of the owned vessels and leased vessels under finance lease arrangements, or are recorded as deferred docking costs of leased vessels under operating lease arrangements, and the costs are amortised over the period up to the next scheduled dry-docking. Any remaining carrying amount of the cost of the previous docking is derecognised and charged to current year profit or loss.



**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/11 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL 2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)
(lanjutan)

i. Aset tetap (lanjutan)

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus selama estimasi umur manfaat aset tetap sebagai berikut:

	<u>Tahun/Years</u>
Bangunan	20
Kendaraan dan alat berat	5 - 15
Peralatan kantor	5
Kapal	25
Peralatan kapal	5

Masa manfaat aset, nilai sisa, dan metode penyusutan ditelaah dan disesuaikan, jika diperlukan, setidaknya setiap akhir periode pelaporan. Dampak dari setiap revisi diakui dalam laporan laba rugi, ketika perubahan terjadi.

Apabila suatu aset tetap tidak digunakan lagi atau dilepas, nilai tercatatnya dikeluarkan dari laporan keuangan konsolidasian, dan keuntungan dan kerugian yang timbul dari pelepasan aset tetap diakui dalam laba rugi pada periode aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Nilai tercatat aset segera diturunkan sebesar jumlah yang dapat dipulihkan jika nilai tercatat aset lebih besar dari estimasi jumlah yang dapat dipulihkan.

Biaya konstruksi kapal dikapitalisasi sebagai aset dalam penyelesaian. Penyusutan aset dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan, yaitu pada saat aset tersebut berada pada lokasi dan kondisi yang diinginkan agar siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen.

j. Penurunan nilai aset non-keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, maka Grup membuat estimasi formal atas jumlah terpulihkan aset tersebut.

Jumlah terpulihkan adalah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai aset. Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dipertimbangkan mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan nilainya menjadi sebesar nilai terpulihkannya.

i. Fixed assets (continued)

Depreciation is calculated on a straight-line basis over the estimated useful lives of the fixed assets as follows:

	<u>Tahun/Years</u>
Buildings	20
Vehicles and heavy equipments	5 - 15
Office equipments	5
Vessels	25
Vessel equipments	5

The assets' useful lives, residual values and depreciation method are reviewed and adjusted if appropriate, at least at the financial period-end. The effects of any revisions are recognised in the profit or loss, when the changes arise.

When property, plant and equipment are retired or otherwise disposed of, their carrying values are eliminated from the consolidated financial statements, and the resulting gains and losses on the disposal of property, plant and equipment are recognised in the profit or loss and in the period in which the asset is derecognised.

An asset's carrying amount is written down immediately to its recoverable amount if the asset's carrying amount is greater than its estimated recoverable amount.

The costs of the construction of vessels are capitalised as construction in progress. Depreciation of an asset begins when it is available for use, i.e. when it is in the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management.

j. Impairment of non-financial assets

The Group assesses at each reporting period whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, the Group makes an estimate of the asset's recoverable amount.

The recoverable amount is the higher of an asset's Fair Value Less Cost to Sell ("FVLCTS") and Value in Use ("VIU"). Where the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount.



**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/12 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL 2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)
(lanjutan)

j. Penurunan nilai aset non-keuangan (lanjutan)

Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset.

Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, digunakan harga penawaran pasar terakhir, jika tersedia. Jika tidak terdapat transaksi tersebut, model penilaian yang sesuai digunakan dapat untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitungan-perhitungan ini dikuatkan oleh penilaian berganda atau indikator nilai wajar yang tersedia.

Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain *goodwill* dibalik hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Dalam hal ini, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya.

Pembalikan tersebut dibatasi sehingga jumlah tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun jumlah tercatat, neto setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui dalam laba rugi. Setelah pembalikan tersebut, penyusutan aset tersebut disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan jumlah tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya.

k. Sewa

Grup sebagai penyewa

Pada tanggal permulaan kontrak, Grup menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan, atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

j. Impairment of non-financial assets (continued)

In assessing the value in use, the estimated net future cash flows are discounted to their present value using a pretax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset.

In determining fair value less costs to sell, recent market transactions are taken into account, if available. If no such transactions can be identified, an appropriate valuation model is used to determine the fair value of the assets. These calculations are corroborated by multiple valuations or other available fair value indicators.

A previously recognised impairment loss for an asset other than goodwill is reversed only if there has been a change in the assumptions used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognised. If that is the case, the carrying amount of the asset is increased to its recoverable amount.

The reversal is limited so that the carrying amount of the asset does not exceed its recoverable amount, nor exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognised for the asset in prior years. Reversal of an impairment loss is recognised in the profit or loss. After such a reversal, the depreciation charge on the said asset is adjusted in future periods to allocate the asset's revised carrying amount, less any residual value, on a systematic basis over its remaining useful life.

k. Leases

The Group as lessee

At the inception of a contract, the Group assesses whether the contract is, or contains, a lease. A contract is, or contains a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration.



**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/13 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL 2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)
(lanjutan)

k. Sewa (lanjutan)

Grup sebagai penyewa (lanjutan)

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasi, Grup harus menilai apakah:

- Kontrak melibatkan penggunaan aset yang diidentifikasi - ini dapat ditentukan secara eksplisit atau implisit, dan harus berbeda secara fisik atau secara substansial mewakili seluruh kapasitas aset. Jika pemasok memiliki hak substitusi substantif, maka aset tidak teridentifikasi;
- Grup memiliki hak untuk memperoleh secara substansial semua manfaat ekonomik dari penggunaan aset identifikasi selama periode penggunaan; dan
- Grup memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset. Grup memiliki hak ini hanya jika Grup memiliki hak untuk pengambilan keputusan yang relevan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset tersebut digunakan telah ditentukan sebelumnya, dan:
 1. Grup memiliki hak untuk mengoperasikan aset; atau
 2. Grup telah mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

Pada tanggal inisiasi atau pada penilaian kembali atas kontrak yang mengandung sebuah komponen sewa, Grup mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa dan harga tersendiri agregat dari komponen non-sewa. Namun, untuk sewa penunjang dimana bertindak sebagai penyewa, Grup memutuskan untuk tidak memisahkan komponen non-sewa dan mencatat komponen sewa dan non-sewa tersebut sebagai satu komponen sewa.

k. Leases (continued)

The Group as lessee (continued)

To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Group shall assess whether:

- The contract involves the use of an identified asset - this can be explicitly specified or implicitly, and must be physically distinct or represents substantially all of the total capacity. If the supplier has substantive substitution rights, then there is no identified asset;
- The Group has the right to obtain substantially all economic benefits from use of the asset throughout the period of use; and
- The Group has the right to direct the use of the asset. The Group has this right only if it has the rights to make relevant decisions about how and for what purpose the asset is being used is predetermined, and:
 1. The Group has the right to operate the asset; or
 2. The Group has designed the asset in a way that predetermines how and for what purposes it will be used throughout the period of use.

At the inception date or on reassessment of a contract that contains a lease component, the Group allocates the consideration in the contract to each lease component on the basis of their relative stand-alone prices and the aggregate stand-alone prices of the non-lease component. However, for the leases of improvements whereby the Group is a lessee, the Group has elected not to separate non-lease components and to account for the lease and non-lease components as a single lease component.



**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/14 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(lanjutan)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

k. Sewa (lanjutan)

k. Leases (continued)

Grup sebagai penyewa (lanjutan)

The Group as lessee (continued)

Pada tanggal permulaan sewa, Grup mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan dan estimasi biaya yang akan dikeluarkan untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan oleh ketentuan sewa, dikurangi dengan insentif sewa yang diterima.

The Group recognises a right-of-use asset and a lease liability at the lease commencement date. The right-of-use asset is initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payment made at or before the commencement date, plus any initial direct cost incurred and an estimate of costs to dismantle and remove the underlying asset or to restore the underlying asset to the condition required by the terms and conditions of the lease, less any lease incentives received.

Aset hak-guna kemudian disusutkan menggunakan metode garis lurus dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

The right-of-use asset is subsequently depreciated using the straight-line method from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the lease term.

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Pada umumnya, Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat bunga diskonto.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that rate cannot be readily determined, using the incremental borrowing rate. Generally, the Group uses its incremental borrowing rate as the discount rate.

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada Grup pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Grup akan mengeksekusi opsi beli, maka Grup menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar. Jika tidak, maka Grup menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

If the lease transfers ownership of the underlying asset to the Group by the end of the lease term or if the cost of the right-of-use asset reflects that the Group will exercise a purchase option, the Group depreciates the right-of-use asset from the commencement date to the end of the useful life of the underlying asset. Otherwise, the Group depreciates the right-of-use asset from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the lease term.

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi pembayaran tetap, termasuk pembayaran tetap secara substansi dikurangi dengan piutang insentif sewa.

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise fixed payments, including in-substance fixed payments less any lease incentive receivable.



**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/15 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(lanjutan)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

k. Sewa (lanjutan)

k. Leases (continued)

Grup sebagai penyewa (lanjutan)

The Group as lessee (continued)

Setiap pembayaran sewa dialokasikan sebagai beban keuangan dan pengurangan liabilitas sewa sehingga menghasilkan tingkat suku bunga yang konstan atas saldo liabilitas yang tersisa. Utang sewa yang terkait, dikurangi dengan beban keuangan, dimasukkan ke dalam "liabilitas sewa pembiayaan". Elemen bunga dari beban keuangan dibebankan pada laba rugi selama periode sewa sehingga menghasilkan tingkat bunga periodik yang konstan untuk saldo liabilitas yang tersisa pada setiap periode.

Each lease payment is allocated between finance charges and reduction of the lease liability so as to achieve a constant rate of interest on the liability balance outstanding. The corresponding rental obligations, net of finance charges, are included in "finance lease liabilities". The interest element of the finance cost is charged to profit or loss over the lease period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period.

Grup menyajikan aset hak-guna dan liabilitas sewa sebagai akun terpisah di dalam laporan posisi keuangan.

The Group presents right-of-use assets and lease liabilities as separate line items in the statement of financial position.

Sewa jangka pendek dan yang aset dasarnya bernilai rendah

Short-term leases and leases of low-value assets

Grup memutuskan untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka pendek yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang dan sewa yang aset dasarnya bernilai rendah. Grup mengakui pembayaran sewa atas sewa tersebut sebagai beban dengan metode garis lurus selama masa sewa.

The Group has elected not to recognise right-of-use assets and lease liabilities for short-term leases that have a lease term of 12 months or less and leases of low-value assets. The Group recognises the lease payments associated with these leases as an expense on a straight-line basis over the lease term.

Modifikasi sewa

Lease modifications

Grup mencatat modifikasi sewa sebagai sewa terpisah jika:

The Group accounts for a lease modifications as a separate leases if both the:

- modifikasi meningkatkan ruang lingkup sewa dengan menambahkan hak untuk menggunakan satu aset dasar atau lebih; dan
- imbalan sewa meningkat sebesar jumlah yang setara dengan harga tersendiri untuk peningkatan dalam ruang lingkup dan penyesuaian yang tepat pada harga tersendiri tersebut untuk merefleksikan kondisi kontrak tertentu.

- modification increases the scope of the lease by adding the right to use one or more underlying assets; and
- the consideration for the lease increases by an amount commensurate with the stand-alone price for the increase in scope and any appropriate adjustments to that stand-alone price to reflect the circumstances of the particular contract.



**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/16 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL 2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)
(lanjutan)

k. Sewa (lanjutan)

Grup sebagai penyewa (lanjutan)

Modifikasi sewa (lanjutan)

Untuk modifikasi sewa yang tidak dicatat sebagai sewa terpisah, pada tanggal efektif modifikasi sewa, Grup:

- mengukur kembali dan mengalokasikan imbalan kontrak modifikasian;
- menentukan masa sewa dari sewa modifikasian;
- mengukur kembali liabilitas sewa dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian berdasarkan sisa umur sewa dan sisa pembayaran sewa dengan melakukan penyesuaian terhadap aset hak-guna. Tingkat diskonto revisian ditentukan sebagai suku bunga pinjaman inkremental penyewa pada tanggal efektif modifikasi;
- menurunkan jumlah tercatat aset hak-guna untuk merefleksikan penghentian parsial atau penuh sewa untuk modifikasi sewa yang menurunkan ruang lingkup sewa. Grup mengakui dalam laba rugi setiap laba rugi yang terkait dengan penghentian parsial atau penuh sewa tersebut; dan
- membuat penyesuaian terkait dengan aset hak-guna untuk seluruh modifikasi sewa lainnya.

Grup sebagai pesewa

Ketika Grup bertindak sebagai pesewa, Grup mengklasifikasi masing-masing sewanya baik sewa operasi atau sewa pembiayaan.

Untuk mengklasifikasi masing-masing sewa, Grup membuat penilaian secara keseluruhan atas apakah sewa mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset pendasar. Jika penilaian membuktikan hal tersebut, maka sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan; jika tidak maka, merupakan sewa operasi. Sebagai bagian dari penilaian ini, Grup mempertimbangkan beberapa indikator seperti apakah masa sewa adalah sebagian besar dari umur ekonomik aset pendasar.

k. Leases (continued)

The Group as lessee (continued)

Lease modifications (continued)

For a lease modifications that are not accounted for as separate leases, at the effective date of the lease modification, the Group:

- remeasures and allocates the consideration in the modified contract;
- determines the lease term of the modified lease;
- remeasures the lease liability by discounting the revised lease payments using a revised discount rate on the basis of the remaining lease term and the remaining lease payment with a corresponding adjustment to the right-of-use assets. The revised discount rate is determined as the Group's incremental borrowing rate at the effective date of the modification;
- decreases the carrying amount of the right-of-use asset to reflect the partial or full termination of the lease for lease modifications that decrease the scope of the lease. The Group recognises in profit or loss any gain or loss relating to the partial or full termination of the lease; and
- makes a corresponding adjustment to the right-of-use asset for all other lease modifications.

The Group as lessor

When the Group acts as a lessor, it shall classify each of its leases as either an operating lease or a finance lease.

To classify each lease, the Group makes an overall assessment of whether the lease transfers substantially all of the risks and rewards incidental to ownership of the underlying asset. If this is the case, then the lease is classified as a finance lease; if not, then it is an operating lease. As part of this assessment, the Group considers certain indicators such as whether the lease term is for the major part of the economic life of the asset.



**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/17 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(lanjutan)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

k. Sewa (lanjutan)

k. Leases (continued)

Grup sebagai pesewa (lanjutan)

The Group as lessor (continued)

Dalam sewa pembiayaan, dimana Grup mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Grup mengakui dan menyajikan aset berupa piutang sewa pembiayaan di laporan posisi keuangan sebesar jumlah yang sama dengan investasi sewa neto. Penerimaan piutang sewa diperlakukan sebagai pembayaran pokok dan pendapatan keuangan. Pengakuan pendapatan keuangan didasarkan pada suatu pola yang mencerminkan suatu tingkat pengembalian periodik yang konstan atas investasi neto Grup sebagai pesewa dalam sewa pembiayaan.

Under a finance lease, where the Group transfers substantially all of the risks and rewards related to the ownership of the leased item, the Group recognised and presents a finance lease receivables in the statement of financial position at an amount equal to the net investment in the lease. Lease payments received are treated as payments of principal and finance income. The recognition of finance income is based on a pattern reflecting a constant periodic rate of return on the Group's net investment as lessors in finance leases.

Grup mengakui pembayaran sewa yang diterima dari sewa operasi sebagai pendapatan dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

The Group recognises lease payments received under operating leases as income on a straight-line basis over the lease term.

Grup sebagai pesewa-antara

The Group as intermediate lessor

Ketika Grup adalah pesewa-antara, Grup memperhitungkan kepentingannya di sewa utama dan subsewa secara terpisah. Grup mengklasifikasikan suatu subsewa dengan mengacu pada aset hak-guna yang timbul dari sewa utama, bukan dengan mengacu pada aset pendasar. Jika sewa utama adalah sewa jangka pendek di mana Grup sebagai penyewa telah menerapkan pengecualian untuk sewa jangka pendek tersebut, maka sewa tersebut diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

When the Group acts as intermediate lessor, it accounts for its interests in the head lease and the sub-lease separately. The Group assesses the lease classification of a sub-lease with reference to the right-of-use asset arising from the head lease, not with reference to the underlying asset. If a head lease is a short-term lease to which the Group applies the exemption for short term lease, then it classifies the sub-lease as an operating lease.

I. Utang usaha dan utang lain-lain

I. Trade and other payables

Utang usaha adalah kewajiban untuk membayar barang atau jasa yang diperoleh dari pemasok dalam kegiatan usaha normal. Utang usaha lain-lain berkaitan dengan transaksi pihak ketiga atau pihak berelasi di luar kegiatan usaha normal. Utang usaha dan utang lain-lain diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek bila pembayaran dilakukan dalam jangka waktu satu tahun atau kurang. Bila tidak, akan disajikan sebagai liabilitas jangka panjang.

Trade payables are obligations to pay for goods or services that have been acquired in the ordinary course of business from suppliers. Other payables are amounts due to third or related parties for transactions outside the ordinary course of business. Trade and other payables are classified as current liabilities if payment is due within one year or less. If not, they are presented as non-current liabilities.

Utang usaha dan utang lain-lain pada awalnya diakui sebesar nilai wajar (dikurangi biaya transaksi) dan kemudian diukur pada biaya diamortisasi dengan menggunakan metode SBE.

Trade and other payables are recognised initially at fair value (net of transaction cost) and subsequently measured at amortised cost using the EIR method.



**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/18 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(lanjutan)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

m. Pinjaman

m. Borrowings

Pada saat pengakuan awal, pinjaman diakui sebesar nilai wajar, dikurangi dengan biaya-biaya transaksi yang terjadi. Selanjutnya, pinjaman diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi; selisih antara penerimaan (dikurangi biaya transaksi) dan nilai pelunasan dicatat pada laporan laba rugi selama periode pinjaman dengan menggunakan metode SBE.

Borrowings are recognised initially at fair value, net of transaction costs incurred. Borrowings are subsequently carried at amortised cost; any difference between the proceeds (net of transaction costs) and the redemption value is recognised in profit or loss over the period of the borrowings using the EIR method.

Biaya-biaya yang dibayarkan untuk mendapatkan fasilitas pinjaman diakui sebagai biaya transaksi dari pinjaman tersebut, apabila besar kemungkinan akan dilakukan penarikan atas sebagian atau seluruh fasilitas tersebut. Dalam hal ini, biaya tersebut ditangguhkan sampai dengan penarikan dilakukan. Apabila tidak ada bukti bahwa besar kemungkinan akan dilakukan penarikan atas sebagian atau seluruh fasilitas tersebut, biaya tersebut dikapitalisasi sebagai pembayaran di muka untuk jasa likuiditas dan diamortisasi selama periode dari fasilitas yang terkait.

Fees paid on the establishment of the loan facilities are recognised as transaction costs of the loan to the extent that it is probable that some or all of the facility will be drawn down. In this case, the fee is deferred until the drawdown occurs. To the extent that there is no evidence that it is probable that some or all of the facility will be drawn down, the fee is capitalised as a prepayment for liquidity services and amortised over the period of the facility to which it relates.

Biaya pinjaman baik yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat diatribusikan dengan akuisisi, konstruksi atau produksi aset kualifikasian, dikapitalisasi sebagai bagian biaya perolehan aset tersebut sampai aset tersebut siap untuk digunakan sesuai dengan maksudnya atau dijual. Untuk pinjaman yang dapat diatribusi secara langsung pada suatu aset kualifikasian, jumlah yang dikapitalisasi adalah sebesar biaya pinjaman yang terjadi selama tahun berjalan, dikurangi pendapatan investasi jangka pendek dari pinjaman tersebut. Untuk pinjaman yang tidak dapat diatribusi secara langsung pada suatu aset kualifikasian, jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi ditentukan dengan mengalikan tingkat kapitalisasi dengan pengeluaran untuk aset kualifikasian. Semua biaya pinjaman lainnya diakui dalam laba rugi pada periode dimana biaya-biaya tersebut terjadi.

Borrowing costs either directly or indirectly attributable to the acquisition, construction or production of a qualifying asset are capitalised as part of the cost of that asset until such time as the asset is substantially ready for its intended use or sale. For borrowings directly attributable to a qualifying asset, the amount to be capitalised is determined as the actual borrowing costs incurred during the year, less any income earned on the temporary investment of such borrowings. For borrowings that are not directly attributable to a qualifying asset, the amount to be capitalised is determined by applying a capitalisation rate to the amount expended on the qualifying asset. All other borrowing costs are recognised in the profit or loss in the period in which they are incurred.

Pinjaman diklasifikasikan sebagai liabilitas lancar kecuali Grup mempunyai hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas tersebut untuk setidaknya 12 bulan setelah tanggal laporan pelaporan.

Borrowings are classified as current liabilities unless the Group has an unconditional right to defer the settlement of the liability for at least 12 months after the reporting date.



**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/19 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2023

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

31 DECEMBER 2023

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(lanjutan)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

n. Perpajakan

n. Taxation

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui pada laporan laba rugi, kecuali untuk pajak atas transaksi yang diakui di pendapatan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam pendapatan komprehensif lain atau ekuitas.

The tax expense comprises current and deferred tax. Tax is recognised in the profit or loss, except to the extent that it relates to items recognised in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is also recognised in other comprehensive income or directly in equity, respectively.

Beban pajak kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku atau yang secara substansial telah berlaku pada tanggal pelaporan. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") sehubungan dengan situasi dimana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

The current income tax charge is calculated using tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted at the reporting date. Management periodically evaluates positions taken in tax returns with respect to situations in which applicable tax regulations are subject to interpretation. It establishes provisions, where appropriate, based on the amounts expected to be paid to the tax authorities.

Pendapatan usaha Grup ada yang terkena pajak penghasilan final. Penghasilan Grup atas pendapatan dari jasa perkapalan yang diberikan kepada perusahaan domestik dikenakan pajak final dengan tarif 1,20% sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan di Indonesia.

Certain revenues are subject to final income tax. The Group's vessel charter income provided to Indonesian companies is subject to a final tax at a rate of 1,20% and under the Taxation Laws of Indonesia.

Pajak penghasilan tangguhan diakui, dengan menggunakan metode *balance sheet liability*, untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak atas aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya dalam laporan keuangan konsolidasian. Pajak penghasilan tangguhan tidak diakui jika berasal dari pengakuan awal aset atau liabilitas yang timbul dari transaksi selain kombinasi bisnis dan saat transaksi tersebut tidak mempengaruhi laba rugi akuntansi dan laba rugi kena pajak.

Deferred income tax is recognised, using the balance sheet liability method, on temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the consolidated financial statements. The deferred income tax is not accounted for if it arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction other than a business combination and when the transaction affects neither accounting nor taxable profit or loss.

Aset pajak tangguhan berasal dari pajak yang dapat dikompensasi diakui jika besar kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di masa depan akan memadai untuk dikompensasi dengan rugi fiskal yang masih dapat dimanfaatkan. Pajak penghasilan tangguhan ditentukan dengan menggunakan tarif pajak yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan dan diharapkan diterapkan ketika aset pajak penghasilan tangguhan direalisasi atau liabilitas pajak penghasilan tangguhan diselesaikan. Aset pajak tangguhan diakui hanya jika besar kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di masa depan akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang masih dapat dimanfaatkan.

The deferred tax assets of the tax loss carried forward are recognised when it is probable that there will be future taxable profit available against which the unused tax losses can be utilised. Deferred income tax is determined using tax rates pursuant to laws or regulations that have been enacted or substantially enacted by the reporting date and are expected to apply when the related deferred income tax asset is realised or the deferred income tax liability is settled. Deferred income tax assets are recognised only to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilised.



**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/20 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2023

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

31 DECEMBER 2023

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL 2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)
(lanjutan)

n. Perpajakan (lanjutan)

Aset dan liabilitas pajak tangguhan akan saling hapus jika ada hak yang berkekuatan hukum untuk saling hapus aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan jika aset dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dipungut oleh otoritas pajak yang sama pada entitas kena pajak yang sama atau entitas kena pajak yang berbeda serta jika ada keinginan untuk melakukan penyelesaian saldo secara neto.

o. Liabilitas imbalan kerja

(i) Kewajiban pensiun

Program pensiun imbalan pasti adalah program pensiun yang menentukan jumlah imbalan pensiun yang akan diberikan, biasanya berdasarkan satu faktor atau lebih seperti usia, masa kerja, atau kompensasi.

Grup menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti untuk seluruh karyawan tetap yang memenuhi syarat. Program dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan ("DPLK") Dana Pensiun Pertamina.

Grup harus menyediakan imbalan pensiun dengan jumlah minimal sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja No. 11/2020 ("UU Cipta Kerja") (sebelumnya Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003) yang berlaku atau Kontrak Kerja Bersama ("KKB"), mana yang lebih tinggi. Karena UU Cipta Kerja atau KKB menentukan rumus tertentu untuk menghitung jumlah minimal imbalan pensiun, pada dasarnya program pensiun berdasarkan Undang-Undang atau KKB adalah program pensiun imbalan pasti.

Kewajiban program pensiun imbalan pasti yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah nilai kini kewajiban imbalan pasti pada tanggal akhir periode dikurangi nilai wajar aset program.

n. Taxation (continued)

Deferred income tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax assets against current tax liabilities and when the deferred income tax assets and liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on either the same taxable entity or different taxable entities where there is an intention to settle the balances on a net basis.

o. Employee benefits liabilities

(i) Pension obligations

A defined benefit plan is a pension plan that defines an amount of pension benefit to be provided, usually as a function of one or more factors such as age, years of service, or compensation.

The Group established a defined benefit pension plan covering all of its qualified permanent employees. The plan is managed by Dana Pensiun Lembaga Keuangan ("DPLK") Dana Pensiun Pertamina.

The Group is required to provide a minimum amount of pension benefits in accordance with prevailing Job Creation Law No. 11/2020 ("the Law") (previously Labour Law No. 13/2003) or the Group's Collective Agreement ("CLA"), whichever is higher. Since the Law and the CLA set the formula for determining the minimum amount of benefits, in substance pension plans under the Law or the CLA represent defined benefit plans.

The liability recognised in the consolidated statement of financial position in respect of the defined benefit pension plan is the present value of the defined benefit obligation at the period end date less the fair value of plan assets.



**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/21 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL 2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)
(lanjutan)

o. Liabilitas imbalan kerja (lanjutan)

(i) Kewajiban pensiun (lanjutan)

Kewajiban imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris independen menggunakan metode *projected unit credit*. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskonto estimasi arus kas keluar masa depan menggunakan tingkat bunga obligasi pemerintah (dengan pertimbangan saat ini tidak ada pasar aktif untuk obligasi korporat berkualitas tinggi) dalam mata uang yang sama dengan mata uang imbalan yang akan dibayarkan dan memiliki jangka waktu jatuh tempo mendekati jangka waktu kewajiban pensiun.

Biaya bunga bersih dihitung dengan menerapkan tingkat diskonto terhadap saldo bersih kewajiban imbalan pasti dan nilai wajar aset program. Biaya ini termasuk dalam beban imbalan kerja dalam laporan laba rugi.

Biaya jasa kini dari program pensiun imbalan pasti diakui dalam laporan laba rugi pada beban imbalan kerja dimana mencerminkan peningkatan kewajiban imbalan pasti yang dihasilkan dari jasa karyawan dalam tahun berjalan.

Biaya jasa lalu diakui secara langsung di laporan laba rugi.

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan asumsi aktuarial dibebankan atau dikreditkan ke laba komprehensif lainnya dan merupakan bagian dari cadangan lainnya pada tahun dimana terjadinya perubahan tersebut.

Keuntungan dan kerugian dari kurtailmen atau penyelesaian program manfaat pasti diakui di laba rugi ketika kurtailmen atau penyelesaian tersebut terjadi.

(ii) Imbalan kerja jangka panjang lainnya

Imbalan kerja jangka panjang lainnya, yang terdiri dari penghargaan masa kerja, diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian berdasarkan nilai kini dari kewajiban imbalan pasti. Keuntungan dan kerugian aktuarial serta biaya jasa lalu diakui secara langsung di laporan laba rugi.

o. Employee benefits liabilities (continued)

(i) Pension obligations (continued)

The defined benefit obligation is calculated annually by independent actuaries using the projected unit credit method. The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using interest rates of high-quality government bonds (considering that currently there is no deep market for high-quality corporate bonds) that are denominated in the currency in which the benefit will be paid, and that have terms to maturity approximating the terms of the related pension liability.

The net interest cost is calculated by applying the discount rate to the net balance of the defined benefit obligation and the fair value of plan assets. This cost is included in employee benefit expense in the statement of profit or loss.

The current service cost of the defined benefit plan is recognised in the profit or loss in employee benefits expenses reflecting the increase in the defined benefit obligation resulting from employee service in the current year.

Past service costs are recognised immediately in the profit or loss.

Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are charged or credited to other comprehensive income and presented as part of other reserves in the year in which they arise.

Gains or losses on the curtailment or settlement of a defined benefit plan are recognised in the profit or loss when the curtailment or settlement occurs.

(ii) Other long-term employee benefits

Other long-term employee benefits, which consist of long service rewards, are recognised in the consolidated statements of financial position at the present value of the defined benefit obligation. The actuarial gains and losses and past service costs are recognised immediately in profit or loss.



**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/22 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL 2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)
(lanjutan)

p. Instrumen keuangan

p. Financial instruments

1. Aset keuangan

1. Financial assets

Klasifikasi

Classification

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan ditentukan berdasarkan jenis aset. Untuk aset keuangan berupa instrumen utang, pengklasifikasiannya harus didasarkan pada bisnis model dan arus kas kontraktual - apakah semata dari pembayaran pokok dan bunga.

Classification and measurement of financial assets are determined based on the type of assets. For financial assets in the form of debt instruments, classification is determined based on business model and contractual cash flows - whether from solely payment of principal and interest.

Secara umum, aset keuangan diklasifikasikan dalam dua kategori sebagai berikut:

In general, financial assets are classified in the following two categories:

1. Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi; dan
2. Aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain.

1. Financial assets at amortised cost; and
2. Financial assets at fair value through profit or loss ("FVTPL") or other comprehensive income ("FVOCI").

Grup menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan tidak bisa melakukan perubahan klasifikasi setelah penerapan awal tersebut.

The Group determines the classification of its financial assets at initial recognition and can not change the classification already made at initial adoption.

Pada tanggal pelaporan keuangan, Grup hanya memiliki aset keuangan dengan kategori sebagai biaya diamortisasi dan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Aset keuangan dengan kategori biaya diamortisasi terdiri dari kas dan setara kas, kas yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha, piutang lain-lain, kontrak aset dan piutang sewa pembiayaan. Aset keuangan dengan kategori nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain terdiri dari penyertaan saham.

As at the reporting date, the Group only has financial assets which are categorised as amortised cost and fair value through other comprehensive income. The Group's amortised costs comprise cash and cash equivalents, restricted cash, trade receivables, other receivables, contract assets and finance lease receivables. The Group's fair value through other comprehensive income comprises investment in shares.

Grup melakukan reklasifikasi instrumen utang jika dan hanya jika terdapat perubahan model bisnis atas aset keuangan tersebut.

The Group reclassifies debt investments when and only when its business model for managing those assets changes.



**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/23 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL 2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)
(lanjutan)

p. Instrumen keuangan (lanjutan)

1. Aset keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan pengukuran

Pembelian dan penjualan aset keuangan diakui pada saat tanggal perdagangan dimana, Grup berkomitmen untuk membeli atau menjual aset keuangan. Aset keuangan dihentikan pengakuannya ketika hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut telah kedaluwarsa atau dialihkan dan Grup telah mengalihkan secara substansial risiko dan manfaat atas kepemilikan.

Saat pengakuan awal, Grup mengukur aset keuangan pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung pada akuisisi aset keuangan, dalam hal aset keuangan diukur dengan nilai wajar tidak melalui laporan laba rugi. Biaya transaksi atas aset keuangan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dibebankan pada laporan laba rugi.

Instrumen utang

Pengukuran selanjutnya atas instrumen utang bergantung kepada model bisnis Grup dalam mengelola aset dan karakteristik dari arus kas. Terdapat tiga kategori pengukuran dalam mengklasifikasi instrumen utang:

- Biaya perolehan diamortisasi: Aset yang dimiliki untuk pengumpulan arus kas kontraktual, dimana arus kas tersebut merupakan pembayaran pokok dan bunga, diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Penghasilan bunga dari aset keuangan ini termasuk dalam penghasilan keuangan menggunakan metode suku bunga efektif. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan diakui secara langsung dalam laporan laba rugi dan disajikan dalam keuntungan/(kerugian) lainnya bersama dengan keuntungan dan kerugian selisih kurs. Penurunan nilai aset keuangan disajikan terpisah dalam laporan laba rugi.

p. Financial instruments (continued)

1. Financial assets (continued)

Recognition and measurement

Regular purchases and sales of financial assets are recognised on the trade date, i.e., the date on which the group commits to purchase or sell the asset. Financial assets are derecognised when the rights to receive cash flows from the financial assets have expired or have been transferred and the Group has transferred substantially all of the risks and rewards of ownership.

At initial recognition, the Group measures a financial asset at its fair value plus transaction costs that are directly attributable to the acquisition of the financial assets, in the case of a financial asset not at FVTPL. Transaction costs of financial assets carried at FVTPL are expensed in profit or loss.

Debt instruments

Subsequent measurement of debt instruments depends on the business model for managing the asset and the cash flow characteristics of the asset. There are three measurement categories into which the group classifies its debt instruments:

- *Amortised cost: Assets that are held for collection of contractual cash flows, where those cash flows solely represent payments of principal and interest, are measured at amortised cost. Interest income from these financial assets is included in finance income using the effective interest rate method. Any gain or loss arising on derecognition is recognised directly in profit or loss and presented in other gains/(losses) together with foreign exchange gains and losses. Impairment losses are presented as a separate line item in the profit or loss.*



**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/24 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL 2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)
(lanjutan)

p. Instrumen keuangan (lanjutan)

1. Aset keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan pengukuran (lanjutan)

Instrumen utang (lanjutan)

Pengukuran selanjutnya atas instrumen utang bergantung kepada model bisnis Grup dalam mengelola aset dan karakteristik dari arus kas. Terdapat tiga kategori pengukuran dalam mengklasifikasikan instrumen utang: (lanjutan)

- Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain: Aset yang dimiliki untuk pengumpulan arus kas kontraktual dan untuk penjualan keuangan aset, dimana arus kas aset merupakan pembayaran pokok dan bunga diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Mutasi dalam jumlah tercatat dilakukan melalui penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk pengakuan keuntungan atau kerugian penurutan nilai, pendapatan bunga dan keuntungan dan kerugian selisih kurs, yang diakui dalam laporan laba rugi. Ketika aset keuangan dihentikan pengakuannya, akumulasi keuntungan atau kerugian yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laporan laba rugi pada pendapatan/(beban) lain-lain. Pendapatan bunga dari aset keuangan ini termasuk dalam penghasilan keuangan menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan dan kerugian selisih kurs disajikan pada pendapatan/(beban) lain-lain, dan penurunan nilai disajikan pada bagian terpisah dalam laporan laba rugi.
- Nilai wajar melalui laba rugi: Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi selanjutnya disajikan dalam laporan posisi keuangan sebesar nilai wajar, dengan perubahan nilai wajar yang diakui dalam laporan laba rugi.

p. Financial instruments (continued)

1. Financial assets (continued)

Recognition and measurement (continued)

Debt instruments (continued)

Subsequent measurement of debt instruments depends on the business model for managing the asset and the cash flow characteristics of the asset. There are three measurement categories into which the group classifies its debt instruments: (continued)

- FVOCI: Assets that are held for collection of contractual cash flows and for selling the financial assets, where payments of principal and interest are measured at FVOCI. Movements in the carrying amount are taken through OCI, except for the recognition of impairment gains or losses, interest income and foreign exchange gains and losses, which are recognised in profit or loss. When the financial asset is derecognised, the cumulative gain or loss previously recognised in OCI is reclassified from equity to profit or loss and recognised in other income/(expenses). Interest income from these financial assets is included in finance income using the effective interest rate method. Foreign exchange gains and losses are presented in other income/(expenses), and impairment expenses are presented as separate line item in the statement of profit or loss.
- FVTPL: Financial assets at fair value through profit or loss are subsequently carried in the statement of financial position at fair value, with changes in fair value recognised in the profit or loss.



**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/25 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(lanjutan)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

p. Instrumen keuangan (lanjutan)

p. Financial instruments (continued)

1. Aset keuangan (lanjutan)

1. Financial assets (continued)

Pengakuan dan pengukuran (lanjutan)

Recognition and measurement (continued)

Instrumen ekuitas

Equity instruments

Grup selanjutnya mengukur semua investasi ekuitas pada nilai wajar. Dimana manajemen Grup telah memilih untuk menyajikan keuntungan dan kerugian nilai wajar dari investasi ekuitas pada penghasilan komprehensif lain. Tidak ada reklasifikasi selanjutnya atas keuntungan dan kerugian dari nilai wajar ke laba rugi setelah penghentian pengakuan investasi. Dividen dari investasi tersebut terus diakui dalam laporan laba rugi sebagai penghasilan lainnya ketika hak Grup untuk menerima pembayaran ditetapkan. Investasi pada instrumen ekuitas tidak diuji penurunan nilai.

The Group subsequently measures all equity investments at fair value. Where the Group's management has elected to present fair value gains and losses on equity investments in OCI, there is no subsequent reclassification of fair value gains and losses to profit or loss following the derecognition of the investment. Dividends from such investments continue to be recognised in profit or loss as other income when the Group's right to receive payments is established. Equity investments are not tested for impairment.

Penurunan nilai aset keuangan

Impairment of financial assets

Grup mengakui provisi atas kerugian penurunan nilai untuk kerugian kredit ekspektasian (KKE) atas aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Provisi atas kerugian penurunan nilai piutang usaha, kontrak aset dan piutang sewa pembiayaan tanpa komponen pendanaan yang signifikan diukur dengan jumlah yang sama dengan KKE sepanjang umurnya. KKE sepanjang umurnya adalah KKE yang dihasilkan dari semua kemungkinan kejadian gagal bayar sepanjang umur yang diharapkan dari suatu instrumen keuangan.

The Group recognises impairment loss provision for expected credit losses (ECLs) on financial assets measured at amortised cost. Impairment loss provision for trade receivables, contract assets and finance lease receivables without a significant financing component are measured at an amount equal to lifetime ECLs. Lifetime ECLs are the ECLs that result from all possible default events over the expected life of a financial instrument.

Metode penurunan nilai dilakukan dengan mempertimbangkan apakah risiko kredit telah meningkat secara signifikan. Ketika menentukan apakah risiko kredit dari suatu aset keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal dan ketika memperkirakan KKE, Grup mempertimbangkan informasi relevan yang wajar dan dapat dibuktikan dan tersedia tanpa biaya atau usaha yang tidak semestinya. Ini mencakup informasi dan analisis kuantitatif dan kualitatif, berdasarkan pengalaman historis Perseroan dan penilaian kredit dan termasuk informasi masa depan.

The impairment methodology applied depends on whether there has been a significant increase in credit risk. When determining whether the credit risk of a financial asset has increased significantly since initial recognition and when estimating ECLs, the Group considers reasonable and supportable information that is relevant and available without undue cost or effort. This includes both quantitative and qualitative information and analysis, based on the Company's historical experience, credit rating and future information.



**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/26 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL 2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)
(lanjutan)

p. Instrumen keuangan (lanjutan)

1. Aset keuangan (lanjutan)

Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

KKE adalah perkiraan probabilitas-tertimbang dari kerugian kredit. Kerugian kredit diukur sebagai nilai sekarang dari semua kekurangan penerimaan kas (yaitu perbedaan antara arus kas terutang dari suatu entitas berdasarkan kontrak dan arus kas yang Grup harapkan untuk diterima). KKE didiskontokan pada tingkat bunga efektif dari aset keuangan tersebut.

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup menentukan apakah aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi mengalami penurunan nilai kredit. Aset keuangan mengalami penurunan nilai kredit ketika satu atau lebih peristiwa yang memiliki dampak merugikan pada perkiraan arus kas masa depan dari aset keuangan telah terjadi. Bukti bahwa suatu aset keuangan mengalami penurunan nilai kredit termasuk data yang dapat diobservasi sebagai berikut:

- kesulitan keuangan yang signifikan dari pelanggan;
- pelanggaran kontrak seperti gagal bayar; atau
- ada kemungkinan bahwa pelanggan akan mengalami kebangkrutan atau reorganisasi keuangan lainnya.

2. Liabilitas keuangan

Pengakuan awal dan pengukuran

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya amortisasi, atau derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam lindung nilai yang efektif, mana yang sesuai pada saat pengakuan awal. Grup menentukan klasifikasi liabilitas keuangan tersebut pada saat pengakuan awal.

Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya amortisasi pada awalnya dicatat pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

p. Financial instruments (continued)

1. Financial assets (continued)

Impairment of financial assets (continued)

ECLs are probability-weighted estimates of credit losses. Credit losses are measured as the present value of all cash shortfalls (i.e., the difference between the cash flows due to the entity in accordance with the contract and the cash flows that the Group expects to receive). ECLs are discounted at the effective interest rate of the financial asset.

At each reporting date, the Group assesses whether financial assets carried at amortised cost are credit impaired. A financial asset is credit-impaired when one or more events that have a detrimental impact on the estimated future cash flows of the financial asset have occurred. Evidence that a financial asset is credit-impaired includes the following observable data:

- significant financial difficulty of the customers;
- breach of contract such as default; or
- it is probable that the customer will enter bankruptcy or other financial reorganisation.

2. Financial liabilities

Initial recognition and measurement

Financial liabilities are classified as financial liabilities measured at fair value through the profit or loss, financial liabilities measured at amortised cost, or derivatives that are designated as hedging instruments in an effective hedge, as appropriate. The Group determines the classification of their financial liabilities at initial recognition.

Financial liabilities measured at amortised cost are initially recognised at their fair values plus directly attributable transaction costs.



**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/27 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL 2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)
(lanjutan)

p. Instrumen keuangan (lanjutan)

2. Liabilitas keuangan (lanjutan)

**Pengakuan awal dan pengukuran
(lanjutan)**

Seluruh liabilitas keuangan Grup diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya amortisasi.

Liabilitas keuangan Grup mencakup utang usaha, biaya yang masih harus dibayar, utang dividen, liabilitas kontrak, liabilitas sewa dan pinjaman jangka panjang.

Pengukuran setelah pengakuan awal

Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya amortisasi selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode SBE.

Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi pada saat liabilitas tersebut dihentikan pengakuannya serta melalui proses amortisasi.

Penghentian pengakuan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya, jika dan hanya jika, liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dihentikan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Ketika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan oleh liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, atau modifikasi secara substansial persyaratan dari suatu liabilitas yang saat ini ada, pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas diakui dalam laporan laba rugi.

p. Financial instruments (continued)

2. Financial liabilities (continued)

**Initial recognition and measurement
(continued)**

All of the Group's financial liabilities are classified as financial liabilities measured at amortised cost.

The Group's financial liabilities include trade payables, accrued expenses, dividend payables, contract liabilities, lease liabilities and long-term borrowings.

Subsequent measurement

After initial recognition, financial liabilities measured at amortised cost are subsequently measured at amortised cost using the EIR method.

Gains and losses are recognised in the statement of profit or loss when the liabilities are derecognised as well as through the amortisation process.

Derecognition

A financial liability is derecognised when, and only when, it is extinguished, i.e., when the obligation specified in the contract is discharged or cancelled or has expired.

When an existing financial liability is replaced by another financial liability from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as a derecognition of the original liability and the recognition of a new liability and the difference in the respective carrying amounts is recognised in the profit or loss.



**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/28 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2023

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

31 DECEMBER 2023

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL 2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)
(lanjutan)

p. Instrumen keuangan (lanjutan)

3. Saling hapus dari instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, entitas saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dan berniat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

q. Provisi

Provisi diakui jika Grup memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) yang akibat peristiwa masa lalu besar kemungkinannya penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai total kewajiban tersebut dibuat.

Provisi ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi kini terbaik. Jika tidak terdapat kemungkinan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan kewajiban tersebut, provisi dibatalkan.

r. Modal saham

Saham biasa diklasifikasikan sebagai ekuitas, Biaya tambahan yang secara langsung dapat diatribusikan kepada penerbitan saham baru atau opsi disajikan pada ekuitas sebagai pengurang penerimaan, setelah dikurangi pajak.

s. Dividen

Pembayaran dividen kepada pemegang saham Perusahaan diakui sebagai liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasian Grup dalam periode dimana pembagian dividen diumumkan.

t. Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan

Pengakuan pendapatan harus memenuhi lima langkah analisa sebagai berikut:

1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan;
2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan;

p. Financial instruments (continued)

3. Offsetting of financial instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount is reported in the statement of financial position if, and only if, the entity currently has a legally enforceable right to offset the recognised amount and there is an intention to settle on a net basis, or to realise the asset and settle the liabilities simultaneously.

q. Provision

Provisions are recognised when the Group has a present obligation (legal or constructive) where, as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

Provisions are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the current best estimates. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

r. Share capital

Ordinary shares are classified as equity, Incremental costs directly attributable to the issue of new shares or options are shown in equity as a deduction, net of tax, from the proceeds.

s. Dividends

Dividend distributions to the Company's shareholders are recognised as a liability in the Group's consolidated financial statements in the period in which the dividends are declared.

t. Revenue and expense recognition

Revenue

Revenue recognition has to fulfill five steps of assessment:

1. Identify contract(s) with customer;
2. Identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer to a customer goods or services that are distinct;



**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/29 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(lanjutan)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

t. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

t. Revenue and expense recognition (continued)

Pendapatan (lanjutan)

Revenue (continued)

3. Penetapan harga transaksi, Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas penyerahannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan. Jika imbalan yang dijanjikan di kontrak mengandung suatu jumlah yang bersifat variabel, maka Grup membuat estimasi jumlah imbalan tersebut sebesar jumlah yang diharapkan berhak diterima atas penyerahannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan dikurangi dengan estimasi jumlah jaminan kinerja jasa yang akan dibayarkan selama periode kontrak;
4. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di yang tertuang dalam nilai kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah margin; dan
5. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).

3. *Determine the transaction price, Transaction price is the amount of consideration to which an entity expects to be entitled in exchange for transferring promised goods or services to a customer. If the consideration promised in a contract includes a variable amount, the Group estimates the amount of consideration to which it expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer less the estimated amount of service level guarantee which will be paid during the contract period;*
4. *Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling prices of each of the distinct goods or services promised in the contract. Where these are not directly observable, the relative standalone selling price is estimated based on expected cost plus margin; and*
5. *Recognise revenue when performance obligation is satisfied by transferring a promised goods or services to a customer (which is when the customer obtains control of said goods or services).*

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dengan cara sebagai berikut:

A performance obligation may be satisfied at the following:

- a. Suatu titik waktu (umumnya janji untuk menyerahkan barang ke pelanggan); atau
- b. Suatu periode waktu (umumnya janji untuk menyerahkan jasa ke pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi dalam suatu periode waktu, Grup memilih ukuran penyelesaian yang sesuai untuk penentuan jumlah pendapatan yang harus diakui karena telah terpenuhinya kewajiban pelaksanaan.

- a. *A point in time (typically for promises to transfer goods to a customer); or*
- b. *Over time (typically for promises to transfer services to a customer). For a performance obligation satisfied over time, the Group selects an appropriate measure of progress to determine the amount of revenue that should be recognised as the performance obligation is satisfied.*

Pembayaran harga transaksi berbeda untuk setiap kontrak. Aset kontrak diakui ketika jumlah penerimaan dari pelanggan kurang dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi. Kewajiban kontrak diakui ketika jumlah penerimaan dari pelanggan lebih dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi.

Payment of the transaction price differs for each contract. A contract asset is recognised when the consideration paid by the customer is less than the balance of performance obligation which has been satisfied. A contract liability is recognised when the consideration paid by the customer is more than the balance of performance obligation which has been satisfied.



**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/30 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(lanjutan)**

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

t. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

t. Revenue and expense recognition (continued)

Pendapatan (lanjutan)

Revenue (continued)

Sewa kapal

Vessel charter

Pendapatan dari jasa penyewaan kapal diakui dalam laba rugi sepanjang waktu jasa sewa kepada pelanggan dengan ukuran berbasis waktu.

Revenue from vessel charter is recognised in the profit or loss over time over the rental service period to the customer using time based measure.

Jasa penunjang operasi marine

Marine operations support services

Pendapatan dari jasa penunjang operasi marine diakui sepanjang waktu berdasarkan aktivitas kontrak operasional atas segmen bisnis pada periode pelaporan. Tingkat penyelesaian aktivitas transaksi ditentukan dengan memperhatikan survei pekerjaan yang telah dilaksanakan pada periode kontrak.

Revenues from marine operation support services are recognised overtime based on operating contract activities for business segments in the reporting period. The level of completion of transaction activities is determined by reference to surveys of work performed during the contract period.

Keagenan kapal dan jasa kepelabuhan

Shipping agency and port services

Pendapatan dari keagenan kapal dan jasa kepelabuhanan diakui sepanjang waktu untuk segmen bisnis pihak berelasi dan titik waktu tertentu untuk pihak ketiga berdasarkan aktivitas kontrak operasional pada periode pelaporan. Tingkat penyelesaian aktivitas transaksi ditentukan dengan memperhatikan survei pekerjaan yang telah dilaksanakan pada periode kontrak.

Revenues from shipping agency and port services are recognised over time for the related party business segment and point in time for third parties based on operating contract activities in the reporting period. The level of completion of transaction activities is determined by reference to surveys of work that has been performed during the contract period.

Grup bertindak sebagai agen apabila aktivitas dalam jasa keagenan (pemenuhan kewajiban pelaksanaan) dilakukan oleh pihak ketiga dan tarif yang ditagihkan ke pelanggan berdasarkan biaya aktual.

The Group is an agent when activities in agency services (fulfillment of performance obligations) are carried out by a third party and the tariff billed to customers are based on actual costs from the third party.

Jasa penyimpanan

Storage services

Pendapatan dari jasa penyimpanan kapal diakui dalam laba rugi sepanjang waktu jasa sewa kepada pelanggan dengan ukuran berbasis waktu.

Revenue on storage service is recognised in the profit or loss over time over the storage service period to the customer using time based measure.

Pendapatan lainnya terdiri dari "pengerukan", "air bersih", "perdagangan umum", "bongkar muat", "pendapatan komisi" dan "pengoperasian kapal".

Other revenue comprises "dredging", "clean water", "general trading", "cargo handling", "commission income" and "vessel operation services".



**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/31 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MATERIAL
(lanjutan)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

t. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

t. Revenue and expense recognition (continued)

Beban dari kontrak dengan pelanggan

Expenses from contracts with customers

Biaya yang secara langsung berhubungan dengan kontrak dan menghasilkan meningkatkan atau meningkatkan sumber daya untuk memenuhi kontrak ("biaya untuk memenuhi") dan biaya inkremental untuk mendapatkan kontrak ("biaya untuk memperoleh") diakui sebagai aset bila biaya tersebut memenuhi syarat untuk dikapitalisasi berdasarkan PSAK 72 dan diharapkan akan dipulihkan. Aset ini diamortisasi dengan dasar sistematis yang konsisten dengan pengalihan atas barang atau jasa yang berkaitan dengan aset tersebut.

The costs that directly relate to the contract generate or enhance resources to satisfy the contract ("cost to fulfill") and incremental costs of obtaining a contract ("cost to obtain") are recognised as assets if they meet the criteria for capitalisation under SFAS 72 and expected to be recovered. These assets are amortised on a systematic basis that is consistent with the transfer to the customer of the goods or services to which the assets relate.

Beban lainnya

Other expenses

Beban diakui pada saat terjadinya dengan dasar akrual.

Expenses are recognised as incurred on an accrual basis.

Penerapan panduan praktis

Application of practical expedient

Grup memilih untuk menerapkan panduan praktis untuk mengakui biaya yang terjadi untuk mendapatkan kontrak sebagai beban saat terjadinya jika periode amortisasi aset tersebut adalah satu tahun atau kurang.

The Group applies the practical expedient to recognise the incremental cost of obtaining a contract as an expense when incurred if the amortisation period of the asset that the Group otherwise would have recognised is one year or less.

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING

3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGEMENTS AND ESTIMATES

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi, dan asumsi yang mempengaruhi jumlah pendapatan, beban, aset dan liabilitas, pengungkapan nilai aset dan liabilitas kontinjensi pada akhir periode pelaporan. Estimasi, asumsi, dan pertimbangan akan dievaluasi secara berkelanjutan dan didasarkan pada pengalaman masa lalu dan faktor-faktor lainnya, termasuk ekspektasi terhadap kejadian masa depan yang diyakini cukup beralasan dalam situasi tertentu.

The preparation of the Group's consolidated financial statements requires management to make judgements, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities and the disclosure of contingent assets and liabilities at the end of the reporting period. Estimates, assumptions and judgements are continually evaluated and are based on historical experience and other factors, including expectations of future events that are believed to be reasonable under the circumstances.

Grup telah mengidentifikasi kebijakan-kebijakan akuntansi penting berikut yang melibatkan pertimbangan, estimasi, dan asumsi yang signifikan dimana hasil yang sebenarnya dapat berbeda dari estimasi-estimasi yang dibuat berdasarkan asumsi dan kondisi yang berbeda pada saat itu dan kemungkinan dapat mempengaruhi hasil atau posisi keuangan secara material yang dilaporkan dalam periode mendatang.

The Group has identified the following critical accounting policies under which significant judgements, estimates and assumptions are made and where actual results may differ from these estimates under different assumptions and conditions and may materially affect the financial results or the financial position reported in future periods.



**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/32 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
YANG PENTING**

Estimasi dan asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada akhir periode pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun finansial berikutnya, diungkapkan di bawah ini. Grup mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Grup. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Rugi penurunan nilai piutang

Grup menghitung KKE piutang usaha dan aset kontrak. Tingkat provisi adalah berdasarkan hari jatuh tempo atas kelompok segmen pelanggan yang mempunyai karakteristik risiko kredit yang serupa.

Grup menyesuaikan pengalaman kerugian kredit historis dengan informasi *forward-looking*. Sebagai contoh, jika prakiraan atas kondisi ekonomi diperkirakan memburuk selama periode/tahun depan, yang dapat menyebabkan meningkatnya jumlah gagal bayar, tingkat gagal bayar historis disesuaikan. Pada setiap tanggal pelaporan, tingkat gagal bayar historis diperbaharui dan perubahan estimasi *forward-looking* dianalisis.

Penilaian atas korelasi antara tingkat gagal bayar historis yang diobservasi, prakiraan atas kondisi ekonomi dan KKE merupakan estimasi yang signifikan. Jumlah KKE paling dipengaruhi oleh perubahan keadaan dan prakiraan kondisi ekonomi. Pengalaman kerugian kredit historis Grup dan prakiraan kondisi ekonomi juga mungkin tidak menggambarkan gagal bayar aktual pelanggan di masa yang akan datang.

Estimasi masa manfaat aset tetap

Grup mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap berdasarkan utilisasi dari aset yang diharapkan dan didukung dengan rencana dan strategi usaha dan perilaku pasar. Estimasi dari masa manfaat aset tetap adalah berdasarkan penelaahan Grup terhadap praktek industri, evaluasi teknis internal dan pengalaman untuk aset yang setara. Estimasi masa manfaat ditelaah minimal setiap akhir tahun pelaporan dan diperbarui jika ekspektasi berbeda dari estimasi sebelumnya dikarenakan pemakaian dan kerusakan fisik, keusangan secara teknis atau komersial dan hukum atau pembatasan lain atas penggunaan dari aset.

**3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGEMENTS AND
ESTIMATES**

Estimation and assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that carry a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are disclosed below. The Group based its assumptions and estimates on parameters available when the consolidated financial statements were prepared. Existing assumptions and circumstances about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Group. Such changes are reflected in the assumptions as they occur.

Impairment loss on receivables

The Group calculates ECL for trade receivables and contract assets. The provision rates are based on days past due for groupings of various customer segments that have similar credit risk characteristics.

The Group adjusts the historical credit loss experience with forward-looking information. For instance, if forecast economic conditions are expected to deteriorate over the next period/year, which can lead to an increased number of defaults, the historical default rates are adjusted. At every reporting date, the historical observed default rates are updated and changes in the forward-looking estimates are analysed.

The assessment of the correlation between historical observed default rates, forecast economic conditions and ECLs is a significant estimate. The amount of ECLs is sensitive to changes in circumstances and of forecast economic conditions. The Group's historical credit loss experience and forecast of economic conditions may also not be representative of customers' actual default in the future.

Estimating the useful lives of fixed assets

The Group estimates the useful lives of its fixed assets based on expected asset utilisation, as anchored to business plans and strategies that also consider expected market behaviour. The estimation of the useful lives of fixed assets is based on the Group's assessment of industry practice, internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful lives are reviewed at least at each financial year end and are updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limitations on the use of the assets.



**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/33 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
YANG PENTING (lanjutan)**

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

Estimasi masa manfaat aset tetap (lanjutan)

Tetapi, adalah mungkin, hasil di masa depan dari operasi dapat dipengaruhi secara material oleh perubahan-perubahan dalam estimasi yang diakibatkan oleh perubahan faktor-faktor yang disebutkan di atas.

Grup mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 5 sampai dengan 25 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri dimana Grup menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi. Lihat Catatan 10 untuk pengungkapan lebih lanjut.

Imbalan pasca kerja

Nilai kini kewajiban pensiun tergantung pada sejumlah faktor yang ditentukan berdasarkan basis dari aktuarial dengan menggunakan sejumlah asumsi. Asumsi yang digunakan dalam menentukan beban/(pendapatan) bersih untuk pensiun termasuk tingkat diskonto, perubahan remunerasi masa depan, tingkat pengurangan karyawan, tingkat harapan hidup, dan tahun sisa yang diharapkan dari masa aktif karyawan. Setiap perubahan dalam asumsi-asumsi ini akan berdampak pada nilai tercatat atas kewajiban pensiun.

Grup menentukan tingkat diskonto yang sesuai pada setiap akhir tahun. Tingkat suku bunga inilah yang digunakan untuk menentukan nilai kini dari estimasi arus kas keluar masa depan yang akan dibutuhkan untuk memenuhi kewajiban pensiun.

Dalam menentukan tingkat diskonto yang sesuai, Grup menggunakan tingkat suku bunga obligasi korporat berkualitas tinggi (atau obligasi pemerintah, dengan pertimbangan saat ini tidak ada pasar aktif untuk obligasi korporat berkualitas tinggi) dalam mata uang yang sama dengan mata uang imbalan yang akan dibayarkan dan memiliki waktu jatuh tempo yang kurang lebih sama dengan waktu jatuh tempo kewajiban pensiun yang bersangkutan. Asumsi kunci lainnya untuk kewajiban pensiun didasarkan sebagian pada kondisi pasar saat ini.

**3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGEMENTS AND
ESTIMATES (continued)**

Estimation and assumptions (continued)

Estimating the useful lives of fixed assets (continued)

It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the estimates brought about by changes in the factors mentioned above.

The Group estimates the useful lives of these fixed assets to be within 5 and 25 years. These are common life expectancies applied in the industry where the Group conducts its business. Changes in the expected level of usage and technological development could have an impact on the economic useful lives and the residual values of these assets and therefore future depreciation charges could be revised. Further details are disclosed in Note 10.

Post-employment benefit

The present value of the pension obligation depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions. The assumptions used in determining the net cost/(income) for pensions include the discount rate, future remuneration changes, employee attrition rates, life expectancy and expected remaining years of service of employees. Any changes in these assumptions will have an impact on the carrying amount of the pension obligation.

The Group determines the appropriate discount rate at the end of each year. This is the interest rate that should be used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to be required to settle the related pension obligation.

In determining the appropriate discount rate, the Group considers the interest rates of high-quality corporate bonds (or government bonds, if there is no deep market for high quality corporate bonds) that are denominated in the currency in which the benefits will be paid and that have terms to maturity approximating the terms of the related pension obligation. Other key assumptions for pension obligation benefits are based in part on current market conditions.



**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/34 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
YANG PENTING (lanjutan)**

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

Pajak penghasilan dan pajak lainnya

Pertimbangan dan asumsi diperlukan dalam menentukan pengurangan biaya tertentu ketika mengestimasi penyisihan pajak penghasilan untuk setiap perusahaan dalam Grup. Terdapat transaksi dan perhitungan yang dapat menyebabkan ketidakpastian dalam penentuan kewajiban pajak selama kegiatan usaha normal. Apabila terdapat perbedaan perhitungan pajak dengan jumlah yang telah dicatat, perbedaan tersebut akan berdampak pada penetapan pajak penghasilan dan pajak penghasilan yang ditangguhkan dalam tahun penentuan pajak tersebut.

Penghasilan usaha Grup ada yang dikenakan pajak penghasilan final.

Grup mengestimasi bagian final atas biaya umum yang tidak dapat dipisahkan antara bagian pajak penghasilan final dan tidak final dengan alokasi secara proporsional berdasarkan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final terhadap penghasilan bruto.

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan maupun pajak lainnya atas transaksi tertentu. Ketidakpastian timbul terkait dengan interpretasi dari peraturan perpajakan yang kompleks dan jumlah dan waktu dari penghasilan kena pajak di masa depan. Dalam menentukan jumlah yang harus diakui terkait dengan liabilitas pajak yang tidak pasti, Grup menerapkan pertimbangan yang sama yang akan digunakan dalam menentukan jumlah cadangan yang harus diakui sesuai dengan PSAK No. 57, "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi". Grup membuat analisa terhadap semua posisi pajak yang terkait dengan pajak penghasilan untuk menentukan jika liabilitas pajak untuk manfaat pajak yang belum diakui harus diakui.

Aset pajak tangguhan, termasuk yang timbul dari perbedaan temporer diakui hanya ketika hal-hal tersebut diperhitungkan untuk dapat dipulihkan, yang tergantung pada pembentukan laba kena pajak yang mencukupi di masa depan. Asumsi pembentukan laba kena pajak di masa depan tergantung pada estimasi manajemen untuk arus kas di masa depan. Hal ini tergantung pada estimasi volume transaksi *time charter*, harga jual *time charter* (mempertimbangkan harga saat ini dan masa lalu, tren harga dan faktor-faktor terkait), biaya operasi, dan belanja modal di masa depan, yang mana terpapar risiko dan ketidakpastian, sehingga ada kemungkinan perubahan estimasi dan asumsi akan mengubah proyeksi laba kena pajak di masa mendatang.

Grup mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 2n dan 15.

**3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGEMENTS AND
ESTIMATES (continued)**

Estimation and assumptions (continued)

Income taxes and other taxes

Judgement and assumptions are required in determining the deductibility of certain expenses during the estimation of the provision for income taxes for each company within the Group. There are transactions and calculations for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts that were initially recorded, such differences will affect the income tax and deferred income tax provisions in the year in which that determination is made.

Certain revenues of the Group are subject to final income tax.

The Group estimates the final portion of general expenses that cannot be itemised between the final and non-final income tax portion, using an allocation based on proportion of revenue subject to final income tax to the gross revenue.

Significant judgement is involved in determining the provision for corporate income tax and other taxes on certain transactions. Uncertainties exist with respect to the interpretation of complex tax regulations and the amount and timing of future taxable income. In determining the amount to be recognised in respect of an uncertain tax liability, the Group applies similar considerations as it would use in determining the amount of a provision to be recognised in accordance with SFAS No. 57, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Asset". The Group conducts an analysis of all tax positions related to income taxes in order to determine if a tax liability for unrecognised tax expense should be recognised.

Deferred tax assets, including those arising from temporary differences, are recognised only where it is considered more likely than not that they will be recovered, which is dependent on the generation of sufficient future taxable profits. Assumptions about the generation of future taxable profits depend on management's estimates of future cash flows. These depend on estimates of expected time charter transaction volumes, time charter selling prices (considering current and historical prices, price trends and related factors), operating costs and future capital expenditure, which are subject to risk and uncertainty, and hence there is a possibility that changes in circumstances will alter the projected future taxable profits.

The Group recognises liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due. Further details are disclosed in Notes 2n and 15.



**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/35 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
YANG PENTING (lanjutan)**

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

Penurunan nilai aset non-keuangan

Jumlah terpulihkan dari aset atau kelompok aset penghasil kas diukur pada nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya untuk menjual atau nilai pakai aset. Penentuan nilai wajar dan nilai yang digunakan mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi tentang ekspektasi volume transaksi *time charter*, harga jual *time charter* (mempertimbangkan harga saat ini dan masa lalu, tren harga dan faktor-faktor terkait), biaya operasi, dan belanja modal di masa depan. Estimasi dan asumsi ini memiliki risiko dan ketidakpastian; sehingga ada kemungkinan bahwa perubahan situasi akan mengubah proyeksi ini, yang selanjutnya dapat mempengaruhi jumlah aset yang dapat dipulihkan. Dalam keadaan seperti itu, beberapa atau semua aset mungkin akan mengalami penurunan nilai atau biaya penurunan nilai dikurangi dengan dampak yang dicatat dalam laporan laba rugi.

Sewa

Penentuan apakah suatu perjanjian mengandung unsur sewa membutuhkan pertimbangan yang cermat untuk menilai apakah perjanjian tersebut memberikan hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasi dan hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasi, bahkan jika hak tersebut tidak dijabarkan secara eksplisit di perjanjian.

Grup mempunyai beberapa perjanjian sewa di mana Grup bertindak sebagai penyewa untuk beberapa aset tertentu. Grup mengevaluasi apakah terdapat risiko dan manfaat kepemilikan yang signifikan dari aset sewaan yang dialihkan kepada berdasarkan PSAK 73, yang mensyaratkan Grup untuk membuat pertimbangan dan estimasi dari pengalihan risiko dan manfaat terkait atas kepemilikan aset sewaan.

Karena Grup tidak dapat dengan mudah menentukan suku bunga implisit, manajemen menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Grup sebagai tingkat diskonto. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, yang banyak di antaranya memerlukan pertimbangan untuk dapat secara andal mengukur penyesuaian yang diperlukan untuk sampai pada tingkat diskonto akhir. Dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, Grup mempertimbangkan faktor-faktor utama berikut: risiko kredit korporat Grup, jangka waktu sewa, jangka waktu pembayaran sewa, lingkungan ekonomi, waktu di mana sewa dimasukkan, dan mata uang di mana pembayaran sewa ditentukan.

**3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGEMENTS AND
ESTIMATES (continued)**

Estimation and assumptions (continued)

Impairment of non-financial assets

The recoverable amount of a cash-generating asset or group of assets is measured at the higher of its fair value less costs of disposal or value in use. The determination of the fair value and value in use requires management to make estimates and assumptions regarding expected time charter transaction volumes, time charter selling prices (considering current and historical prices, price trends and related factors), operating costs and future capital expenditure. These estimates and assumptions are subject to risk and uncertainty; hence there is a possibility that changes in circumstances will alter these projections, which may have an impact on the recoverable amount of the assets. In such circumstances, some or all of the carrying value of the assets may be further impaired or the impairment charges may be reduced with the impact recorded in profit or loss.

Leases

Determining whether an arrangement is or contains a lease requires careful judgement to assess whether the arrangement conveys a right to obtain substantially all the economic benefits from use of the asset throughout the period of use and right to direct the use of the asset, even if the right is not explicitly specified in the arrangement.

The Group has various lease agreements where the Group acts as a lessee in respect of certain assets. The Group evaluates whether significant risks and rewards of ownership of the leased asset are transferred to the lessee based on SFAS 73, which requires the Group to make judgements and estimates of transfer of risks and rewards of ownership of a leased asset.

Since the Group could not readily determine the implicit rate, management used the Group's incremental borrowing rate as a discount rate. There are a number of factors to consider in determining an incremental borrowing rate, many of which need judgement in order to be able to reliably quantify any necessary adjustments to arrive at the final discount rates. In determining an incremental borrowing rate, the Group considers the following main factors: the Group's corporate credit risk, the lease term, the lease payment term, the economic environment, the time at which the lease is entered into and the currency in which the lease payments are denominated.



**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/36 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2023

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

31 DECEMBER 2023

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
YANG PENTING (lanjutan)**

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

Sewa (lanjutan)

Dalam menentukan jangka waktu sewa, Grup mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang menimbulkan insentif ekonomi untuk menggunakan opsi perpanjangan, atau tidak menggunakan opsi penghentian. Opsi perpanjangan (atau periode setelah opsi penghentian kontrak kerja) hanya termasuk dalam jangka waktu sewa jika cukup pasti akan diperpanjang (atau tidak dihentikan). Penilaian tersebut ditinjau kembali jika terjadi peristiwa signifikan atau perubahan signifikan dalam situasi yang mempengaruhi penilaian ini dan berada dalam kendali Grup.

**3. CRITICAL ACCOUNTING JUDGEMENTS AND
ESTIMATES (continued)**

Estimation and assumptions (continued)

Leases (continued)

In determining the lease term, the Group considers all facts and circumstances that create an economic incentive to exercise an extension option, or not exercise a termination option. Extension options (or periods after termination options) are only included in the lease term if the lease is reasonably certain to be extended (or not terminated). The lease term is reviewed if a significant event or a significant change in circumstances occurs which affects this assessment and that is within the control of the Group.

4. KAS DAN SETARA KAS

	2023	2022
Kas		
Rupiah	664	358
Jumlah kas	664	358
Kas di bank		
Rupiah		
Entitas berelasi dengan Pemerintah (Catatan 25)		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri")	410,927	164,519
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI")	138,224	122,868
PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("BSI")	80,415	11,483
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI")	73,661	558,818
	<u>703,227</u>	<u>857,688</u>
Pihak ketiga	<u>35,891</u>	<u>40,799</u>
Dolar AS		
Entitas berelasi dengan Pemerintah (Catatan 25)		
BNI	332,174	168,643
Mandiri	13,223	11,671
BRI	69	73
	<u>345,466</u>	<u>180,387</u>
Pihak ketiga	<u>42,744</u>	<u>30,800</u>
Jumlah kas di bank	1,127,328	1,109,674

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS

Cash on hand	
Rupiah	
Total cash on hand	
Cash in banks	
Rupiah	
Government-related entities (Note 25)	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri")	
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI")	
PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("BSI")	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI")	
Third parties	
US Dollar	
Government-related entities (Note 25)	
BNI	
Mandiri	
BRI	
Third parties	
Total cash in banks	

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/37 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

4. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Deposito berjangka Dolar AS			Time deposits US Dollar
Entitas berelasi dengan Pemerintah (Catatan 25)			Government-related entities (Note 25)
BNi	15,439	15,592	BNi
BSI	700,000	-	BSI
Jumlah deposito berjangka	715,439	15,592	Total time deposits
Jumlah kas dan setara kas	1,843,431	1,125,624	Total cash and cash
Tingkat suku bunga tahunan deposito berjangka selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:	The annual interest rates on time deposits during the year were as follows:		

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Dolar AS	1,0%	1,0%	US Dollar

5. PIUTANG USAHA

5. TRADE RECEIVABLES

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Pihak berelasi (Catatan 25)	881,215	1,181,134	Related parties (Note 25)
Dikurangi: Provisi penurunan nilai pihak berelasi	(2,553)	(2,553)	Less: Provision for doubtful accounts of related parties
	<u>878,662</u>	<u>1,178,581</u>	
Pihak ketiga	188,908	207,131	Third parties
Dikurangi: Provisi penurunan nilai pihak ketiga	(104,728)	(100,939)	Less: Provision for doubtful accounts of third parties
	<u>84,180</u>	<u>106,192</u>	
Jumlah	962,842	1,284,773	Total

Rincian piutang usaha berdasarkan umur piutang
adalah sebagai berikut: The details of trade receivables based on aging
schedule are as follows:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Pihak berelasi			Related parties
0 - 30 hari	807,667	1,053,361	0 - 30 days
30 - 90 hari	22,572	57,993	30 - 90 days
90 - 365 hari	48,078	66,698	90 - 365 days
Lebih dari 365 hari	2,898	3,082	More than 365 days
	881,215	1,181,134	
Dikurangi: Provisi penurunan nilai pihak berelasi	(2,553)	(2,553)	Less: Provision for doubtful accounts of related parties
Jumlah pihak berelasi	878,662	1,178,581	Total related parties



**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/38 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

5. PIUTANG USAHA (lanjutan)

5. TRADE RECEIVABLES (continued)

	2023	2022	
Pihak ketiga			<i>Third parties</i>
0 - 30 hari	55,782	76,052	<i>0 - 30 days</i>
30 - 90 hari	16,343	19,415	<i>30 - 90 days</i>
90 - 365 hari	18,279	17,153	<i>90 - 365 days</i>
Lebih dari 365 hari	98,504	94,511	<i>More than 365 days</i>
	188,908	207,131	
Dikurangi:			<i>Less:</i>
Provisi penurunan nilai pihak ketiga	(104,728)	(100,939)	<i>Provision for doubtful accounts of third parties</i>
Jumlah pihak ketiga	84,180	106,192	Total third parties
Mutasi saldo provisi penurunan nilai piutang usaha adalah sebagai berikut:			<i>The movements in the provision for impairment of trade receivables are as follows:</i>
	2023	2022	
Saldo awal	103,492	93,436	<i>Beginning balance</i>
Penambahan (Catatan 23)	5,506	15,855	<i>Additions (Note 23)</i>
Pemulihan (Catatan 23)	(1,717)	(5,799)	<i>Recovery (Note 23)</i>
Jumlah	107,281	103,492	Total
Manajemen berkeyakinan bahwa provisi penurunan nilai cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang usaha tersebut. Manajemen juga berkeyakinan bahwa tidak ada konsentrasi risiko kredit yang signifikan atas piutang usaha.			<i>Management believes that the provision for impairment is adequate to cover possible losses on uncollectible trade receivables. Management also believes that there are no significant concentrations of credit risk in trade receivables.</i>

6. ASET KONTRAK

6. CONTRACT ASSETS

	2023	2022	
Pihak berelasi (Catatan 25)	1,226,058	1,034,895	<i>Related parties (Note 25)</i>
Dikurangi:			<i>Less:</i>
Provisi penurunan nilai pihak berelasi	(1,209)	(1,509)	<i>Provision for doubtful accounts of related parties</i>
	1,224,849	1,033,386	
Pihak ketiga	333,217	245,854	<i>Third parties</i>
Dikurangi:			<i>Less:</i>
Provisi penurunan nilai pihak ketiga	(3,042)	(2,035)	<i>Provision for doubtful accounts third parties</i>
	330,175	243,819	
Jumlah	1,555,024	1,277,205	Total
Mutasi saldo provisi penurunan nilai kontrak aset adalah sebagai berikut:			<i>the movements in the provision for impairment of contract assets are as follows:</i>

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/39 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

6. ASET KONTRAK (lanjutan)

6. CONTRACT ASSETS (continued)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Saldo awal	3,544	2,159	Beginning balance
Penambahan (Catatan 23)	1,211	2,230	Additions (Note 23)
Pemulihan (Catatan 23)	(504)	(845)	Recovery (Note 23)
Jumlah	<u>4,251</u>	<u>3,544</u>	Total

7. UANG MUKA DAN BIAYA DIBAYAR DIMUKA

7. ADVANCES AND PREPAYMENTS

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Uang muka karyawan	89,207	57,178	Employee advances
Uang muka kerja	56,963	5,668	Operational advances
Biaya dibayar dimuka	9,929	11,194	Prepaid expenses
Lain-lain	1,493	1,353	Others
Jumlah	<u>157,592</u>	<u>75,393</u>	Total

Uang muka karyawan merupakan uang muka yang diberikan kepada karyawan untuk kegiatan operasional Grup.

Employee advances represent advances paid to employees for the operational activities of the Group.

Uang muka kerja merupakan uang muka yang digunakan untuk kegiatan jasa kepelabuhanan, jasa pandu tunda dan jasa persediaan kapal.

Operational advances represent advances paid for port services, pilotage and towage services and ship chandler.

8. PIUTANG SEWA PEMBIAYAAN

8. FINANCE LEASE RECEIVABLES

Analisa jatuh tempo piutang sewa pembiayaan bruto dan piutang sewa pembiayaan neto adalah sebagai berikut:

The maturity analysis of gross finance lease receivables and net finance lease receivables is as follows:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Piutang sewa pembiayaan bruto:			Gross finance lease receivables:
Jatuh tempo dalam waktu satu tahun	22,574	25,325	Due within one year
Jatuh tempo dalam waktu dua sampai lima tahun	-	23,772	Due between two and five years
	22,574	49,097	
Dikurangi: pendapatan keuangan sewa yang belum terealisasi	-	(3,501)	Less: unearned finance lease income
Piutang sewa pembiayaan neto	<u>22,574</u>	<u>45,596</u>	Net finance lease receivables

Analisa jatuh tempo piutang sewa pembiayaan bruto dan piutang sewa pembiayaan neto adalah sebagai berikut:

The maturity analysis of gross finance lease receivables and net finance lease receivables is as follows:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Piutang sewa pembiayaan neto:			Net finance lease receivables:
Jatuh tempo dalam waktu satu tahun	22,574	22,798	Due within one year
Jatuh tempo dalam waktu dua sampai lima tahun	-	22,798	Due between two and five years
Jumlah	<u>22,574</u>	<u>45,596</u>	Total



**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/40 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

9. INVESTASI PADA VENTURA BERSAMA

9. INVESTMENT IN JOINT VENTURE

	2023	2022	
Pada awal tahun	87,607	84,643	At the beginning of the year
Bagian atas laba bersih	30,925	25,446	Share of net profit
Dividen yang diterima	(20,400)	(22,482)	Dividends receipt
Saldo akhir	98,132	87,607	Ending balance

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Grup memiliki ventura bersama sebagai berikut:

As at 31 December 2023 and 2022, the Group had the following joint venture:

Nama entitas/ Name of entity	Lokasi usaha/Place of business	Persentase kepemilikan/ % of ownership interest	Kegiatan usaha/ Business activities	Metode pengukuran/ Measurement method
PT Trans Yeong Maritime ("TYM")	Indonesia	51%	Menyelenggarakan usaha di bidang jasa pelayaran dan kepelabuhan laut/Conduct activities related to shipping and harbour services	Ekuitas/ Equity

Berikut ini adalah ringkasan informasi keuangan TYM pada 31 Desember 2023 dan 2022 yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas:

Set out below is the summary of financial information for TYM as at 31 December 2023 and 2022, accounted for using the equity method:

	2023	2022	
Jumlah aset	278,418	296,074	Total assets
Jumlah liabilitas	(86,003)	(124,295)	Total liabilities
Aset neto	192,415	171,779	Net assets
Laba bersih tahun berjalan	60,637	49,894	Net profit for the year

Tidak ada liabilitas kontinjensi terkait dengan investasi pada TYM.

There is no contingent liability related to the investment in TYM.

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat kejadian-kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai investasi, sehingga tidak diperlukan cadangan penurunan nilai atas investasi pada ventura bersama.

Management is of the opinion that there are no events or changes in circumstances which may indicate impairment in the value of the investment, therefore, no provision for impairment in the value of investment in a joint venture is necessary.



**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/41 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

10. ASET TETAP

10. FIXED ASSETS

	2023				
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposal	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending balance
Harga perolehan					Acquisition cost
Aset tetap non-pelayaran					Non-shipping fixed assets
Tanah	29,779	-	-	-	Land
Bangunan	190,092	600	-	5,229	Buildings
Kendaraan dan alat berat	96,989	13,070	-	-	Vehicles and heavy equipments
Peralatan kantor	35,664	227	-	-	Office equipments
	352,524	13,897	-	5,229	371,650
Aset tetap pelayaran					Shipping fixed assets
Kapal	5,013,239	-	(2,672)	110,206	Vessels
Peralatan kapal	308,530	-	-	35,387	Vessel equipments
	5,321,769	-	(2,672)	145,593	5,464,690
Aset dalam penyelesaian	62,239	140,847	(2,014)	(150,822)	Construction in progress
Jumlah	5,736,532	154,744	(4,686)	-	Total
Akumulasi penyusutan					Accumulated depreciation
Aset tetap non-pelayaran					Non-shipping fixed assets
Bangunan	50,063	11,948	-	-	Buildings
Kendaraan dan alat berat	28,043	13,964	-	-	Vehicles and heavy equipments
Peralatan kantor	9,543	486	-	-	Office equipments
	87,649	26,398	-	-	114,047
Aset tetap pelayaran					Shipping fixed assets
Kapal	1,707,665	289,517	(1,117)	-	Vessels
Peralatan kapal	79,275	44,960	-	-	Vessel equipments
	1,786,940	334,477	(1,117)	-	2,120,300
Jumlah	1,874,589	360,875	(1,117)	-	Total
Nilai buku	3,861,943				Net book value
	2022				
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposal	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending balance
Harga perolehan					Acquisition cost
Aset tetap non-pelayaran					Non-shipping fixed assets
Tanah	29,779	-	-	-	Land
Bangunan	139,371	38,395	-	12,326	Buildings
Kendaraan dan alat berat	75,592	403	-	20,994	Vehicles and heavy equipments
Peralatan kantor	14,822	24,266	-	(3,424)	Office equipments
	259,564	63,064	-	29,896	352,524
Aset tetap pelayaran					Shipping fixed assets
Kapal	4,785,779	4,105	-	223,355	Vessels
Peralatan kapal	315,992	83,178	-	(90,640)	Vessel equipments
	5,101,771	87,283	-	132,715	5,321,769
Aset dalam penyelesaian	194,477	194,953	(164,580)	(162,611)	Construction in progress
Jumlah	5,555,812	345,300	(164,580)	-	Total
Akumulasi penyusutan					Accumulated depreciation
Aset tetap non-pelayaran					Non-shipping fixed assets
Bangunan	40,414	11,174	-	(1,525)	Buildings
Kendaraan dan alat berat	6,237	12,808	-	8,998	Vehicles and heavy equipments
Peralatan kantor	12,291	386	-	(3,134)	Office equipments
	58,942	24,368	-	4,339	87,649
Aset tetap pelayaran					Shipping fixed assets
Kapal	1,366,924	287,746	-	52,995	Vessels
Peralatan kapal	94,682	41,927	-	(57,334)	Vessel equipments
	1,461,606	329,673	-	(4,339)	1,786,940
Jumlah	1,520,548	354,041	-	-	Total
Nilai buku	4,035,264				Net book value

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/42 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

10. ASET TETAP (lanjutan)

Penyusutan dialokasi sebagai berikut:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Beban pokok pendapatan (Catatan 21)	350,099	350,584
Beban umum dan administrasi (Catatan 22)	<u>10,776</u>	<u>3,457</u>
Jumlah	<u>360,875</u>	<u>354,041</u>

Beberapa aset tetap digunakan sebagai jaminan atas pinjaman jangka panjang Grup.

Pada tahun 2023, aset tetap Grup diasuransikan terhadap risiko kerugian, kecelakaan, kebakaran dan risiko lainnya dengan nilai pertanggungan sebesar Rp4.760.269 (2022: Rp5.269.122). Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas risiko tersebut.

Berdasarkan penelaahan manajemen, tidak terdapat indikasi penurunan nilai terhadap aset tetap pada tanggal 31 Desember 2023.

Pada tahun 2022, pengurangan atas aset dalam penyelesaian sebesar Rp164.580 terkait dengan pembatalan pembangunan kapal. Grup menerima Rp155.400 dari vendor atas pembatalan tersebut. Kapitalisasi biaya pinjaman sehubungan dengan kapal tersebut sebesar Rp9.180 telah dikurangkan dari aset dalam penyelesaian dan dicatat sebagai beban keuangan.

Aset dalam penyelesaian terutama terdiri dari pembuatan kapal yang sampai dengan tanggal pelaporan masih dalam proses pembangunan.

10. FIXED ASSETS (continued)

Depreciation is allocated as follows:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
			Cost of revenue (Note 21)
			General and administrative expenses (Note 22)
			Total

Certain fixed assets are pledged as collateral for long-term loans by the Group.

In 2023, fixed assets of the Group are insured against losses, accidents, fire and other risks with the sum insured amounting to Rp4,760,269 (2022: Rp5,269,122). Management believes that the sum insured is adequate to cover possible losses arising from such risks.

Based on management's assessment, there is no impairment indicator identified to fixed assets as at 31 December 2023.

In 2022, disposal of construction in progress amounting to Rp164,580 was related to cancellation of vessel constructions. The Group received Rp155,400 from the vendors for the cancellation. Capitalisation of borrowing costs related to these vessels were Rp9,180 which have been deducted from assets under construction and were recorded as finance costs.

Construction in progress mainly consisted of construction of vessels that have not been completed as at the reporting date.

11. UTANG USAHA

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Pihak berelasi (Catatan 25)	935,385	909,546
Pihak ketiga	<u>91,727</u>	<u>117,952</u>
Jumlah	<u>1,027,112</u>	<u>1,027,498</u>

11. TRADE PAYABLES

Related parties (Note 25)
Third parties

Total

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/43 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

12. BIAYA MASIH HARUS DIBAYAR

12. ACCRUED EXPENSES

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Jasa penunjang operasi dan penyediaan tenaga kerja	530,952	787,219	Marine operations support and labour supply services
Keagenan umum	304,924	546,169	General agencies
Insentif, bonus dan tantiem	292,746	115,114	Incentive, bonus and tantiem
Pemanduan dan penundaan	281,635	169,275	Towage and pilotage
Sewa kapal jangka pendek	53,975	106,889	Short-term ship rentals
Lain-lain	19,485	17,528	Others
Jumlah	<u>1,483,717</u>	<u>1,742,194</u>	Total

13. LIABILITAS KONTRAK

13. CONTRACT LIABILITIES

Liabilitas kontrak adalah uang muka pelanggan dengan rincian sebagai berikut:

Contract liabilities are advances from customers with the following details:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Pihak ketiga	192,382	87,084	Third parties
Pihak berelasi (Catatan 25)	41,153	20,136	Related parties (Note 25)
Jumlah	<u>233,535</u>	<u>107,220</u>	Total

14. SEWA

14. LEASES

a. Aset hak-guna

a. Right-of-use assets

	<u>2023</u>				
	<u>Saldo awal/ Beginning balance</u>	<u>Penambahan/ Additions</u>	<u>Pengurangan/ Disposals</u>	<u>Saldo akhir/ Ending balance</u>	
Biaya perolehan					Costs
Tanah dan bangunan	76,067	124,593	(1,838)	198,822	Land and buildings
Kendaraan dan alat berat	19,219	156,339	-	175,558	Vehicles and heavy equipments
Kapal	648,576	311,052	-	959,628	Vessels
Jumlah	<u>743,862</u>	<u>591,984</u>	<u>(1,838)</u>	<u>1,334,008</u>	Total
Akumulasi penyusutan					Accumulated depreciation
Tanah dan bangunan	72,525	25,991	(931)	97,585	Land and buildings
Kendaraan dan alat berat	15,375	17,956	-	33,331	Vehicles and heavy equipments
Kapal	345,987	371,821	-	717,808	Vessels
Jumlah	<u>433,887</u>	<u>415,768</u>	<u>(931)</u>	<u>848,724</u>	Total
Nilai tercatat	<u>309,975</u>			<u>485,284</u>	Net carrying value

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/44 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

14. SEWA (lanjutan)

14. LEASES (continued)

a. Aset hak-guna (lanjutan)

a. Right-of-use assets (continued)

	2022				
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	Saldo akhir/ Ending balance	
Biaya perolehan					Costs
Tanah dan bangunan	76,067	-	-	76,067	Land and buildings
Kendaraan dan alat berat	9,437	9,782	-	19,219	Vehicles and heavy equipments
Kapal	221,334	427,242	-	648,576	Vessels
Jumlah	306,838	437,024	-	743,862	Total
Akumulasi penyusutan					Accumulated depreciation
Tanah dan bangunan	49,476	23,049	-	72,525	Land and buildings
Kendaraan dan alat berat	6,360	9,015	-	15,375	Vehicles and heavy equipments
Kapal	68,993	276,994	-	345,987	Vessels
Jumlah	124,829	309,058	-	433,887	Total
Nilai tercatat	182,009			309,975	Net carrying value

Alokasi beban penyusutan aset hak-guna adalah
sebagai berikut:

The depreciation expenses of right-of-use assets
were allocated as follows:

	2023	2022	
Beban pokok pendapatan (Catatan 21)	398,552	300,295	Cost of revenue (Note 21)
Beban umum dan administrasi (Catatan 22)	17,216	8,763	General and administrative expenses (Note 22)
Jumlah	415,768	309,058	Total

b. Liabilitas sewa

b. Lease liabilities

	2023	2022	
Saldo awal	436,385	273,981	Beginning balance
Penambahan	591,984	437,024	Additions
Beban bunga (Catatan 24)	27,520	15,935	Interest expense (Note 24)
Pembayaran	(533,001)	(290,555)	Payments
Saldo akhir	522,888	436,385	Ending balance
Bagian lancar	335,390	354,455	Current portion
Bagian tidak lancar	187,498	81,930	Non-current portion
Jumlah	522,888	436,385	Total

Jumlah yang diakui di laporan laba rugi
konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada
31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai
berikut:

The amounts recognised in the consolidated
profit or loss for the years ended 31 December
2023 and 2022 were as follows:

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/45 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

14. SEWA (lanjutan)

14. LEASES (continued)

b. Liabilitas sewa (lanjutan)

b. Lease liabilities (continued)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Beban bunga (Catatan 24)	27,520	15,935	Interest expense (Note 24)
Beban terkait sewa jangka pendek	20,226	23,301	Expense related to short-term leases
Beban terkait sewa atas aset bernilai rendah	73	71	Expense related to lease of low value assets
Jumlah yang terkait dengan sewa jangka pendek, sewa atas aset bernilai rendah, dan sewa variabel tidak dimasukkan sebagai liabilitas sewa berdasarkan sifatnya sebagaimana dibahas pada Catatan 2k.			
Amounts related to short-term leases, leases of low value assets and variable leases are not required to be included as lease liabilities based on their nature as discussed in Note 2k.			

Laporan arus kas konsolidasian menyajikan saldo berikut berkaitan dengan sewa:

The consolidated statement of cash flows shows the following amounts related to leases:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Arus kas dari aktivitas operasi			Cash flow from operating activities
Pembayaran beban keuangan	(27,520)	(15,935)	Payments of finance costs
Arus kas dari aktivitas pendanaan			Cash flow from financing activities
Pembayaran atas liabilitas sewa	(505,481)	(274,620)	Payments of lease liabilities

15. PERPAJAKAN

15. TAXATION

a. Pajak dibayar dimuka

a. Prepaid taxes

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Pajak penghasilan			Corporate income tax
Entitas anak			Subsidiaries
- 2023	4,933	-	2023 -
	<u>4,933</u>	<u>-</u>	
Pajak lain-lain			Other tax
Entitas anak			Subsidiaries
PPN	124,444	24,076	VAT
Jumlah	<u>129,377</u>	<u>24,076</u>	Total
Bagian lancar	124,444	24,076	Current portion
Bagian tidak lancar	4,933	-	Non-current portion

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/46 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

15. PERPAJAKAN (lanjutan)

b. Utang pajak

	2023	2022
Pajak penghasilan		
<u>Perusahaan</u>		
Kurang bayar pajak penghasilan		
- 2023	96,453	-
- 2022	-	70,923
	<u>96,453</u>	<u>70,923</u>
<u>Entitas anak</u>		
Kurang bayar pajak penghasilan		
- 2023	30,910	-
- 2022	-	26,365
	<u>30,910</u>	<u>26,365</u>
	<u>127,363</u>	<u>97,288</u>
Pajak lain-lain		
<u>Perusahaan</u>		
PPN	-	14,080
Pasal 21	19,291	14,412
Pasal 23	5,872	4,067
Pasal 25	3,028	1,891
Pasal 15	470	632
Pasal 26	59	-
Pasal 4(2)	1,838	132
	<u>30,558</u>	<u>35,214</u>
<u>Entitas anak</u>		
PPN	-	15,338
Pasal 21	3,169	686
Pasal 22	2	2
Pasal 23	947	399
Pasal 25	1,258	844
Pasal 26	12	40
Pasal 15	3	59
Pasal 4(2)	166	386
	<u>5,557</u>	<u>17,754</u>
	<u>36,115</u>	<u>52,968</u>
Jumlah	<u>163,478</u>	<u>150,256</u>

15. TAXATION (continued)

b. Taxes payable

Corporate income tax
The Company
Underpayment of corporate income tax
2023 -
2022 -

Subsidiaries
Underpayment of corporate income tax
2023 -
2022 -

Other taxes
The Company
VAT
Article 21
Article 23
Article 25
Article 15
Article 26
Article 4(2)

Subsidiaries
VAT
Article 21
Article 22
Article 23
Article 25
Article 26
Article 15
Article 4(2)

Total

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/47 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

15. PERPAJAKAN (lanjutan)

15. TAXATION (continued)

c. Beban pajak penghasilan

c. Income tax expense

	2023	2022	
<u>Perusahaan</u>			<u>The Company</u>
Kini	216,976	189,758	Current
Tangguhan	(8,627)	(36,702)	Deferred
Penyesuaian tahun lalu	(6,018)	12,585	Adjustment in respect of prior years
	<u>202,331</u>	<u>165,641</u>	
<u>Entitas anak</u>			<u>Subsidiaries</u>
Kini	91,886	51,973	Current
Tangguhan	110	(530)	Deferred
Penyesuaian tahun lalu	507	4,742	Adjustment in respect of prior years
	<u>92,503</u>	<u>56,185</u>	
Jumlah	<u>294,834</u>	<u>221,826</u>	Total
Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak konsolidasian dengan estimasi penghasilan kena pajak Perusahaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:		The reconciliations between consolidated profit before income tax and the estimated taxable income for the years ended 31 December 2023 and 2022, are as follows:	
	2023	2022	
Laba konsolidasian sebelum pajak penghasilan	1,346,328	954,854	Consolidated profit before income tax
Laba sebelum pajak entitas anak setelah dilakukan penyesuaian pada tingkat konsolidasian	(415,462)	(234,154)	Profit before tax of subsidiaries after consolidation adjustments
Laba sebelum pajak penghasilan - Perusahaan	<u>930,866</u>	<u>720,700</u>	Profit before income tax - the Company



**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/48 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

15. PERPAJAKAN (lanjutan)

15. TAXATION (continued)

c. Beban pajak penghasilan (lanjutan)

c. Income tax expense (continued)

	2023	2022	
Provisi atas liabilitas imbalan pasca kerja	20,490	26,744	Provision for post-employment benefits obligation
Provisi atas bonus karyawan	69,913	80,523	Provision for employee bonus
Provisi atas cadangan penurunan nilai piutang	2,614	7,832	Provision for impairment of receivables
Penyusutan aset tetap	19,004	31,533	Depreciation of fixed assets
Penyusutan atas aset sewa pembiayaan	(9,534)	(9,534)	Depreciation of finance lease asset
Perbedaan perlakuan liabilitas sewa antara komersial dan fiskal	(143,349)	(111,564)	Difference between commercial and tax treatment of lease liabilities
Penyusutan aset hak guna	80,073	141,294	Depreciation of right of use assets
Beban yang tidak dapat diperhitungkan untuk keperluan pajak	105,999	90,138	Non-deductible expenses
Penghasilan bunga yang dikenakan pajak final	27,081	(20,339)	Interest income subject to final tax
Pendapatan yang dikenakan pajak final	(449,581)	(563,894)	Revenue subject to final tax
Beban pokok pendapatan atas pendapatan yang dikenakan pajak final	363,600	494,549	Cost of revenue related to revenue subject to final tax
Bagian atas laba bersih ventura bersama	(30,925)	(25,446)	Share in net profit of joint venture
	<u>55,385</u>	<u>141,836</u>	
Penghasilan kena pajak - Perusahaan	<u>986,251</u>	<u>862,536</u>	Taxable income - the Company
Beban pajak kini: Perusahaan	216,976	189,758	Current tax expenses: The Company
Entitas Anak	91,886	51,973	Subsidiaries
Beban pajak penghasilan kini konsolidasian	<u>308,862</u>	<u>241,731</u>	Consolidated current income tax
Beban pajak kini Perusahaan	216,976	189,758	Current tax expense of the Company
Dikurangi:			Less:
Pajak dibayar di muka			Prepaid income taxes
- Pasal 22	(1,784)	(679)	Article 22 -
- Pasal 25	(53,865)	(22,343)	Article 25 -
- Pasal 23	(64,874)	(95,813)	Article 23 -
	<u>(120,523)</u>	<u>(118,835)</u>	
Kurang bayar pajak penghasilan - Perusahaan	<u>96,453</u>	<u>70,923</u>	Underpayment corporate income tax - the Company

Perhitungan pajak penghasilan kini dilakukan berdasarkan estimasi penghasilan kena pajak. Nilai tersebut mungkin disesuaikan ketika Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") disampaikan ke Direktur Jenderal Pajak ("DJP").

Current income tax computations are based on estimated taxable income. The amounts may be adjusted when the Annual Tax Return ("SPT") is submitted to the Directorate General of Taxation ("DGT").

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/49 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

15. PERPAJAKAN (lanjutan)

15. TAXATION (continued)

c. Beban pajak penghasilan (lanjutan)

c. Income tax expense (continued)

Pajak atas laba Grup sebelum pajak berbeda dari nilai teoritis yang muncul apabila menggunakan rata-rata tertimbang tarif pajak terhadap laba pada entitas anak yang dikonsolidasi sebagai berikut:

The tax on the Group's profit before tax differs from the theoretical amount that would arise using the weighted average tax rate applicable to profits of the consolidated entities as follows:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Laba konsolidasian sebelum pajak penghasilan	1,346,328	954,854	Consolidated profit before income tax
Pajak penghasilan dihitung dengan tarif yang berlaku	296,190	210,068	Income tax calculated at applicable tax rate
Dampak pajak penghasilan pada:			Tax effects of:
Beban yang tidak dapat dikurangkan untuk keperluan pajak	26,175	21,547	Non-deductible expenses
Pendapatan yang dikenakan pajak final	(123,373)	(165,807)	Revenue subject to final tax
Beban pokok pendapatan atas pendapatan yang dikenakan pajak final	108,157	144,289	Cost of revenue related to revenue subject to final tax
Bagian atas laba bersih ventura bersama	(6,803)	(5,598)	Share in profit of joint venture
Penyesuaian tahun lalu	(5,512)	17,327	Adjustment in respect of prior years
Beban pajak penghasilan konsolidasian	<u>294,834</u>	<u>221,826</u>	Consolidated income tax expense

d. Aset pajak tangguhan

d. Deferred tax assets

Rincian dari aset pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

The details of deferred tax assets are as follows:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Aset pajak tangguhan, neto Perusahaan			Deferred tax assets, net The Company
Aset atas sewa pembiayaan	(15,520)	(13,423)	Finance lease assets
Penyertaan saham	(1,463)	(1,465)	Investment in shares
Penyusutan aset tetap	22,098	17,917	Depreciation of fixed assets
Bonus karyawan	43,423	28,042	Employees bonus
Penyusutan aset hak guna	(113,140)	(81,604)	Depreciation of right of use assets
Liabilitas sewa	119,766	102,150	Lease liabilities
Liabilitas imbalan pasca kerja	28,025	18,790	Provision for post-employment benefits obligation
Provisi penurunan nilai piutang usaha	15,960	15,385	Provision for impairment of trade receivables
	<u>99,149</u>	<u>85,792</u>	



**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/50 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

15. PERPAJAKAN (lanjutan)

15. TAXATION (continued)

d. Aset pajak tangguhan (lanjutan)

d. Deferred tax assets (continued)

Rincian dari aset pajak tangguhan adalah
sebagai berikut: (lanjutan)

The details of deferred tax assets are as follows:
(continued)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Aset pajak tangguhan, neto			Deferred tax assets, net
<u>Entitas anak</u>			<u>Subsidiaries</u>
Sewa	(74)	(229)	Leases
Penyusutan aset tetap	(546)	(156)	Depreciation of fixed assets
Bonus karyawan	(10)	95	Employees bonus
Liabilitas imbalan			Post-employment
pasca kerja	234	214	benefit obligations
Investasi saham	(166)	(99)	Investment in share
Provisi penurunan			Provision for impairment
nilai piutang usaha	1,709	1,996	of trade receivables
Provisi penurunan			Provision for impairment
nilai persediaan	534	3	of inventories
	<u>1,681</u>	<u>1,824</u>	
Jumlah	<u>100,830</u>	<u>87,616</u>	Total

e. Analisis perubahan aset pajak tangguhan

e. Analysis of changes in deferred tax assets

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Aset pajak tangguhan, neto - awal tahun	87,616	55,327	Deferred tax assets, net - beginning balance
Beban pajak tanguhan	8,517	37,232	Deferred tax expense
Diakui pada penghasilan/(rugi) komprehensif lain	4,697	(4,943)	Recognised in other comprehensive income/(loss)
Aset pajak tangguhan, neto - akhir tahun	<u>100,830</u>	<u>87,616</u>	Deferred tax assets, net - ending balance

f. Status audit pajak

f. Tax audit status

Perusahaan

The Company

Pada bulan September 2022, Perusahaan menerima SKPKB atas Pajak Penghasilan Badan tahun fiskal 2017 sebesar Rp3.608. Perusahaan telah membayar kurang bayar pajak penghasilan badan tersebut pada tanggal Oktober 2022 dan dibebankan pada laba rugi tahun 2022.

In September 2022, the Company received SKPKB for Corporate Income Tax fiscal year 2017 amounting to Rp3,608. The Company paid the underpayment in October 2022 and charged to profit or loss in 2022.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/51 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

15. PERPAJAKAN (lanjutan)

f. Status audit pajak (lanjutan)

PMSol

Pada bulan Desember 2021, PMSol menerima SKPKB atas Pajak Penghasilan Badan tahun fiskal 2016 sebesar Rp621. PMSol telah membayar kurang bayar pajak penghasilan badan tersebut pada Januari 2022 dan dibebankan pada laba rugi 2022.

PPL

Pada bulan Oktober 2022, PPL menerima SKPKB atas Pajak Penghasilan Badan tahun fiskal 2019 sebesar Rp792 PPL telah membayar kurang bayar pajak penghasilan badan tersebut pada November 2022 dan dibebankan pada laba rugi tahun 2022.

PME

Pada bulan Mei 2022, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar untuk PPN tahun 2020 sebesar Rp15 dari jumlah sebesar Rp15 yang diklaim oleh Perusahaan. Perusahaan telah menerima pengembalian pajak tersebut sebesar Rp15 pada Juli 2022 dan sisanya dibebankan pada laba rugi tahun berjalan.

Sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian ini, tidak ada audit pajak yang sedang berlangsung.

h. Administrasi

Berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia, entitas yang berdomisili di Indonesia menghitung dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. DJP dapat menetapkan atau mengubah pajak dalam batas waktu lima tahun saat terutangnya pajak.

15. TAXATION (continued)

f. Tax audit status (continued)

PMSol

In December 2021, PMSol received SKPKB for Corporate Income Tax fiscal year 2016 amounting to Rp621. PMSol paid the underpayment in January 2022 and charged to profit or loss in 2022.

PPL

In October 2022, PPL received SKPKB for Corporate Income Tax fiscal year 2019 amounting to Rp792 PPL paid the underpayment in November 2022 and charged to profit or loss in 2022.

PME

In May 2022, the Company received an Overpayment Tax Assessment Letter for VAT year 2020 amounted to Rp15 out of the amount of Rp15 as claimed by the Company. The Company received the tax refund amounted to Rp15 in July 2022 and the remaining was charged to profit or loss in the current year.

As at the date of these consolidated financial statements, there is no ongoing tax audit.

h. Administration

Under the taxation laws of Indonesia, entities which are domiciled in Indonesia calculate and pay taxes on the basis of self assessment. The DGT may assess or amend taxes within five years of the time the tax becomes due.



**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/52 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

16. PINJAMAN

16. BORROWINGS

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Entitas berelasi dengan Pemerintah (Catatan 25)			Government-related entities (Note 25)
Mandiri	344,662	375,096	Mandiri
BSI	<u>137,375</u>	<u>180,467</u>	BSI
	<u>482,037</u>	<u>555,563</u>	
Pihak ketiga			Third parties
PT Bank BTPN Tbk ("BTPN")	249,925	399,256	PT Bank BTPN Tbk ("BTPN")
Jumlah	<u>731,962</u>	<u>954,819</u>	Total
Jatuh tempo dalam satu tahun	305,012	231,826	Due next year
Bagian jangka panjang	426,950	722,993	Non-current portion

PMSol

PMSol

Notional Pooling Mandiri

Notional Pooling Mandiri

Berdasarkan perjanjian *Notional Pooling* No. 006/H00000/2016-S0 tanggal 15 Agustus 2016 yang kemudian diubah berdasarkan perjanjian No. SPJ-011/H00000/2022-S4 tanggal 12 September 2022 yang kemudian diubah berdasarkan perjanjian No. SPJ-008/H00000/2023-S4 tanggal 8 Agustus 2023. Mandiri setuju untuk memberikan fasilitas *Notional Pooling* kepada Pertamina dan beberapa anak perusahaannya. Jangka waktu perjanjian tersebut adalah satu tahun. Saldo pinjaman pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp9.476 dan Rp21.289. Beban bunga dari pinjaman bank untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp195 (2022: Rp1.884).

Based on *Notional Pooling* agreement No. 006/H00000/2016-S0 dated 15 August 2016, later amended based on agreement No. SPJ-011/H00000/2022-S4 dated 12 September 2022, later amended based on agreement No. SPJ-008/H00000/2023-S4 dated 8 August 2023. Mandiri agreed to provide *Notional Pooling* facilities to Pertamina and its several subsidiaries. The term of the agreement is one year. The balance of the loan as at 31 December 2023 and 2022 was Rp9,476 and Rp21,289, respectively. Interest expense from loan for the year ended 31 December 2023 was amounting to Rp195 (2022: 1,884).

Perusahaan

The Company

BSI

BSI

Rincian pinjaman bank jangka panjang dari BSI adalah sebagai berikut:

The details of the long-term bank loans from BSI are as follows:

Jenis pinjaman dan jumlah batas pinjaman/ Type of loan and maximum credit limit	Bunga/ Interest	Bulan jatuh tempo fasilitas/ Facility maturity	Peruntukan/ Purpose	Saldo 31 Desember 2023/ Balance as at 31 December 2023
Fasilitas kredit investasi kapal/ Vessel investing credit facility Rp82.934/Rp82,934	7,50% per tahun/ 7,50% per annum	Juli 2026/ July 2026	Pembiayaan pembelian kapal Transko Taurus/Financing for purchase of Transko Taurus	Rp40.344/ Rp40,344
Fasilitas kredit investasi kapal/ Vessel investing credit facility Rp44.720/Rp44,720	7,50% per tahun/ 7,50% per annum	November 2027/ November 2027	Pembiayaan pembelian kapal Harbour Tug/Financing for purchase of Harbour Tug	Rp31.405/ Rp31,405
Fasilitas kredit investasi kapal/ Vessel investing credit facility Rp26.832/Rp26,832	7,50% per tahun/ 7,50% per annum	Desember 2027/ December 2027	Pembiayaan pembelian kapal Harbour Tug/Financing for purchase of Harbour Tug	Rp18.979/ Rp18,979

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/53 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

16. PINJAMAN (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

BSI (lanjutan)

Rincian pinjaman bank jangka panjang dari BSI
adalah sebagai berikut: (lanjutan)

16. BORROWINGS (continued)

The Company (continued)

BSI (continued)

The details of the long-term bank loans from BSI are
as follows: (continued)

Jenis pinjaman dan jumlah batas pinjaman/ Type of loan and maximum credit limit	Bunga/ Interest	Bulan jatuh tempo fasilitas/ Facility maturity	Peruntukan/ Purpose	Saldo 31 Desember 2023/ Balance as at 31 December 2023
Fasilitas kredit investasi kapal/ Vessel investing credit facility Rp17.888/Rp17,888	7,50% per tahun/ 7,50% per annum	Desember 2027/ December 2027	Pembiayaan pembelian kapal/Harbour Tug/ Financing for purchase of Harbour Tug	Rp13.367/ Rp13,367
Fasilitas kredit investasi kapal/ Vessel investing credit facility Rp206.910/Rp206,910	Tingkat bunga JIBOR 1 bulan +2,35%/Interest at rates of 1 month JIBOR +2,35%	Februari 2026/ February 2026	Pembiayaan pembelian kapal/Harbour Tug/ Financing for purchase of Harbour Tug	Rp20.800/ Rp21,800
Fasilitas kredit investasi kapal/ Vessel investing credit facility Rp90.180/Rp90,180	Tingkat bunga JIBOR 1 bulan +2,35%/Interest at rates of 1 month JIBOR +2,35%	Februari 2026/ February 2026	Pembiayaan pembelian kapal/Harbour Tug/ Financing for purchase of Harbour Tug	Rp12.480/ Rp12,480

Beban bunga dari pinjaman bank untuk tahun yang
berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar
Rp12.020 (2022: Rp18.586).

Interest expense from loan for the year ended 31
December 2023 was amounting to Rp12,020
(2022: Rp18,586).

Mandiri

Berdasarkan Surat Penawaran Pemberian Kredit
No. CBG.CB3/SPPK.035/2021 tanggal 2 Juni 2021.
Mandiri setuju untuk memberikan fasilitas *Term Loan*
kepada Perusahaan dengan nilai fasilitas maksimum
sebesar Rp442.259.

Mandiri

Based on the Offering Letter
No. CBG.CB3/SPPK.035/2021 dated 2 June 2021.
Mandiri agreed to provide a *Term Loan* facility to the
Company with a maximum facility value of
Rp442,259.

Jangka waktu pinjaman adalah tujuh tahun dengan
grace period selama 24 bulan sejak *delivery* kapal
terakhir atau 30 bulan sejak penandatanganan
Perjanjian Kredit. Bunga atas pinjaman tersebut
adalah *JIBOR* 1 bulan + 2,05% per tahun. Saldo
pinjaman pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah
sebesar Rp335.186 dan Rp353.807. Beban bunga
dari pinjaman bank untuk tahun yang berakhir pada
31 Desember 2023 adalah sebesar Rp30.392 (2022:
Rp21.785).

The term of the loan is seven years with a *grace*
period of 24 months from the last ship delivery or 30
months from the signing of the Credit Agreement. The
interest on the loan is *JIBOR* 1 month + 2,05% per
annum. The loan balance as of 31 December 2023
and 2022 is Rp335,186 and Rp353,807. Interest
expense from loan for the year ended 31 December
2023 was amounting to Rp30,392 (2022: Rp21,785).

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/54 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

16. PINJAMAN (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

BTPN

Rincian pinjaman bank jangka panjang dari BTPN
adalah sebagai berikut:

16. BORROWINGS (continued)

The Company (continued)

BTPN

The details of the long-term bank loans from BTPN
are as follows:

Jenis pinjaman dan jumlah batas pinjaman/ Type of loan and maximum credit limit	Bunga/ Interest	Bulan jatuh tempo fasilitas/ Facility maturity	Peruntukan/ Purpose	Saldo 31 Desember 2023/ Balance as at 31 December 2023
Fasilitas kredit investasi kapal/ Vessel investing credit facility AS\$11.326.400 (nilai penuh)/ US\$11,326,400 (full amount)	Tingkat bunga 2017 LIBOR +1,35% per tahun/Interest at a rates of LIBOR +1,35% per annum 2023 SOFR 3M + CAS 0.15%+1.35%	September 2024/ September 2024	Pembiayaan pembelian kapal Transko Cempala, Sikatan & Gelatik/Financing for purchase of Transko Cempala, Sikatan & Gelatik	US\$3.310.794 (nilai penuh), setara dengan Rp51.115/ US\$3,310,794 (full amount), equivalent to Rp51,115
Fasilitas kredit investasi kapal/ Vessel investing credit facility Rp330.239/Rp330,239	Tingkat bunga JIBOR +1,75% per tahun/Interest at a rates of JIBOR +1,75% per annum	Agustus 2024/ August 2024	Pembiayaan pembelian kapal HT3200 HP dan Gagak/Financing for purchase of HT3200 HP and Gagak	Rp90.684/ Rp90,684
Fasilitas kredit investasi kapal/ Vessel investing credit facility Rp148.548/Rp148,548	Tingkat bunga JIBOR +1,75% per tahun/Interest at Rates of JIBOR +1,75% per annum	September 2025/ September 2025	Pembiayaan pembelian Transko Yudhistira/ Financing for purchase of Transko Yudhistira	Rp64.370/ Rp64,370
Fasilitas kredit investasi kapal/ Vessel investing credit facility Rp93.759/Rp93,759	Tingkat bunga JIBOR +1,75% per tahun/Interest at a rates of JIBOR +1,75% per annum	September 2025/ September 2025	Pembiayaan pembelian Transko Rajawali/ Financing for purchase of Transko Rajawali	Rp43.756/ Rp43,756

Beban bunga dari pinjaman bank untuk tahun yang
berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar
Rp26.891 (2022: Rp24.806).

Dampak reformasi acuan suku bunga

Kebijakan praktis berlaku untuk pinjaman. Panduan
praktis ini hanya berlaku untuk perubahan yang
diperlukan oleh reformasi acuan tingkat suku bunga,
yang terjadi jika, dan hanya jika, modifikasi
diperlukan sebagai akibat langsung dari reformasi
acuan suku bunga dan dasar baru untuk menentukan
arus kas kontraktual yang secara ekonomis setara
dengan dasar sebelumnya (yaitu, dasar yang
mendahului perubahan).

Jika sebagian atau seluruh perubahan dalam dasar
penentuan arus kas kontraktual liabilitas keuangan
tidak memenuhi kriteria di atas, panduan praktis di
atas pertama-tama diterapkan pada perubahan yang
disyaratkan oleh reformasi acuan tingkat suku bunga,
termasuk memperbarui instrumen suku bunga efektif.
Setiap perubahan tambahan dicatat dengan cara
normal (yaitu, dinilai untuk modifikasi atau
penghentian pengakuan, dengan
keuntungan/kerugian modifikasian langsung diakui
dalam laba rugi jika instrumen tidak dihentikan
pengakuannya).

Interest expense from loan for the year ended 31
December 2023 was amounting to Rp26,891
(2022: Rp24,806).

IBOR reform impact

A practical guidance applies to borrowings. This
practical guidance only applies to changes required
by interest rate benchmark reform, which occur if, and
only if, the modification is required as a direct result
of the interest rate benchmark reform and a new
basis for determining contractual cash flows that is
economically equivalent to the previous basis (that is,
the basis that precedes change).

If some or all of the changes in the basis for
determining the contractual cash flows of financial
liabilities do not meet the above criteria, the above
practical guidance is first applied to the changes
required by the interest rate benchmark reform,
including updating the effective interest rate
instrument. Any additional changes are recorded in
the normal manner (i.e., assessed for modification or
derecognition, with modification gains/losses
recognised immediately in profit or loss if the
instrument is not derecognised).

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/55 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

16. PINJAMAN (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

Dampak reformasi acuan suku bunga (lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, Grup telah menerapkan panduan praktis yang diberikan dalam reformasi acuan suku bunga - tahap 2 terhadap utang bank.

16. BORROWINGS (continued)

The Company (continued)

IBOR reform impact (continued)

For the year ended 31 December 2023, the Group applied the practical guidance provided in the interest rate benchmark reform - stage 2 to its bank loans.

17. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA

Grup memberikan imbalan pasca kerja kepada semua karyawan tetapnya. Imbalan yang diberikan adalah imbalan pasti yang berkaitan dengan penghargaan masa kerja yang tergantung pada lamanya masa kerja. Grup mengakui timbulnya biaya pada saat Grup menerima manfaat ekonomis dari jasa yang diberikan karyawan.

Grup melakukan penyisihan untuk liabilitas imbalan pasca kerja jangka panjang. Liabilitas imbalan pasca kerja jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 telah disajikan berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh aktuaris independen. Kantor Konsultan Aktuaria Steven dan Mourits, menggunakan metode *projected unit credit*.

Nilai yang termasuk dalam laporan posisi keuangan yang berasal dari kewajiban Grup sehubungan dengan liabilitas imbalan pasca kerja adalah sebagai berikut:

17. POST-EMPLOYMENT BENEFITS OBLIGATION

The Group provides post-employment benefits to all permanent employees. Benefits provided are defined benefits related to long service appreciation. The Group recognises expenses when the economic benefits of the services provided by the employees have been received.

The Group provides provision for long-term employee benefits liabilities. Long-term employee benefits liabilities as at 31 December 2023 and 2022 were presented based on calculations performed by the independent actuary. Kantor Konsultan Aktuaria Steven and Mourits, using the projected unit credit method.

The amounts included in the statement of financial position arising from the Group's obligation in respect of these post-employment benefits are as follows:

	2023	2022	
Nilai kini liabilitas	344,444	300,525	Present value of obligation
Nilai wajar aset program	(122,786)	(123,969)	Fair value of plan assets
Liabilitas imbalan pasca kerja	<u>221,658</u>	<u>176,556</u>	Post-employment benefit obligation
Beban imbalan pasca kerja yang dibebankan di laporan laba rugi adalah sebagai berikut:			
	2023	2022	
Biaya jasa kini	33,688	28,137	Current service cost
Biaya jasa lalu	479	176	Past service cost
Biaya bunga	10,173	11,965	Interest cost
Pengukuran kembali atas liabilitas yang diakui sebagai imbalan kerja jangka panjang lainnya	(1,087)	(38)	Remeasurement on obligation recognised as other long-term employee benefit
Biaya imbalan pasca kerja	<u>43,253</u>	<u>40,240</u>	Post-employment benefit expenses



**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/56 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

17. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA (lanjutan)

Pengukuran kembali kewajiban imbalan kerja yang diakui sebagai rugi atau penghasilan komprehensif lainnya (sebelum pajak) adalah sebagai berikut:

	2023	2022
Pengukuran kembali nilai kini liabilitas:		
(Kerugian)/keuntungan atas perubahan asumsi ekonomis	(5,983)	20,856
(Kerugian)/keuntungan atas penyesuaian pengalaman	(10,150)	7,260
Imbal hasil atas aset program program tidak termasuk pendapatan bunga	(7,242)	(3,152)
(Rugi)/penghasilan komprehensif lain	(23,375)	24,964

Mutasi nilai kini kewajiban yang tidak didanai selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

	2023	2022
Pada awal tahun	176,556	170,312
Dibebankan pada laporan laba rugi (Kerugian)/keuntungan aktuarial yang diakui pada penghasilan komprehensif lain	23,375	(24,964)
Iuran oleh Grup	(17,039)	(5,008)
Pembayaran imbalan	(4,487)	(4,024)
Nilai kini liabilitas pada akhir tahun	221,658	176,556

Asumsi-asumsi utama yang digunakan adalah sebagai berikut:

	2023	2022
Tingkat diskonto	6,6% - 7%	7% - 7,4%
Tingkat kenaikan gaji per tahun	8,16%	8,22%
Tabel mortalita	TMI IV - 2019	TMI IV - 2019
Usia pensiun normal	56 tahun/years	56 tahun/years

Dampak akibat dari setiap satu persen (1%) perubahan dari asumsi tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji pada 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

	Dampak atas kewajiban imbalan pasti/ Impact on defined benefit obligation			
	Perubahan asumsi/ Change in assumptions	Kenaikan Asumsi/ Increase in assumptions	Penurunan Asumsi/ Decrease in assumptions	
Tingkat diskonto	1.00%	(280,178)	327,810	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji di masa depan	1.00%	316,422	(286,723)	Salary growth rate

Pada 31 Desember 2023, rata-rata durasi atas provisi imbalan pasca kerja karyawan adalah 16,60 tahun.

17. POST-EMPLOYMENT BENEFITS OBLIGATION (continued)

Remeasurement of employee benefit obligation recognised as other comprehensive loss or income (before tax) is as follows:

	2023	2022
Remeasurement of present value of obligation:		
(Loss)/gain from changes in financial assumptions	(5,983)	20,856
(Loss)/gain from changes in experience adjustments	(10,150)	7,260
Return on plan assets excluding interest income	(7,242)	(3,152)
Other comprehensive (loss)/income	(23,375)	24,964

The movements in the present value of unfunded obligations in the current year were as follows:

	2023	2022
Beginning of the year	176,556	170,312
Charged to profit or loss	23,375	(24,964)
Actuarial (loss)/gain recognised in other comprehensive income	(17,039)	(5,008)
The Group's contribution	(4,487)	(4,024)
Benefit payments		
Present value of obligation at the end of the year	221,658	176,556

The main assumptions used are as follows:

	2023	2022
Tingkat diskonto	6,6% - 7%	7% - 7,4%
Tingkat kenaikan gaji per tahun	8,16%	8,22%
Tabel mortalita	TMI IV - 2019	TMI IV - 2019
Usia pensiun normal	56 tahun/years	56 tahun/years

A one percentage (1%) point change in the assumed discount rate and salary increase rate at 31 December 2023, would have the following effects:

	Perubahan asumsi/ Change in assumptions	Kenaikan Asumsi/ Increase in assumptions	Penurunan Asumsi/ Decrease in assumptions	
Tingkat diskonto	1.00%	(280,178)	327,810	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji di masa depan	1.00%	316,422	(286,723)	Salary growth rate

As at 31 December 2023, the weighted average duration of the provision for employee service entitlements is 16.60 years.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/57 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

17. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA (lanjutan)

Analisis jatuh tempo yang diharapkan dari manfaat pensiun yang tidak terdiskonto pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

**17. POST-EMPLOYMENT BENEFITS OBLIGATION
(continued)**

The expected maturity analysis of undiscounted pension benefits as at 31 December 2023 is presented below:

	Kurang dari satu tahun/ Less than one year	1 sampai 5 tahun/ Between 1 and 5 years	5 sampai 10 tahun/ Between 5 and 10 years	Lebih dari 10 tahun/ Over 10 years	Jumlah/Total	
Liabilitas imbalan pasca kerja	27,029	116,286	162,516	745,576	1,051,407	Post-employment benefit obligation

18. MODAL SAHAM

Susunan pemegang saham dan persentase kepemilikannya pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

18. SHARE CAPITAL

The structure of shareholders and the percentage of ownerships as at 31 December 2023 and 2022 are as follows:

2023				
Pemegang saham	Jumlah saham (nilai penuh)/ Number of shares (full amount)	Nilai/ Value	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Shareholders
Saham Seri A				Series A shares
PIS	1,234,737	1,234,737	99,93%	PIS
PT Pertamina Pedeve Indonesia	10	10	0,01%	PT Pertamina Pedeve Indonesia
Saham Seri B				Series B shares
PIS	819	1	0,06%	PIS
Jumlah	1,235,566	1,234,748	100%	Total
2022				
Pemegang saham	Jumlah saham (nilai penuh)/ Number of shares (full amount)	Nilai/ Value	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Shareholders
Saham Seri A				Series A shares
PIS	1,234,737	1,234,737	99,93%	PIS
PT Pertamina Pedeve Indonesia	10	10	0,01%	PT Pertamina Pedeve Indonesia
Saham Seri B				Series B shares
PIS	819	1	0,06%	PIS
Jumlah	1,235,566	1,234,748	100%	Total

Berdasarkan Akta No. 69 tanggal 28 April 2021 oleh Aulia Taufani S.H., pemegang saham sepakat untuk mengalihkan saham Pertamina ke PIS sebesar Rp693.698 saham seri A dan Rp1 saham seri B.

In accordance with Notarial Deed No. 69 dated 28 April 2021 by Aulia Taufani S.H., the shareholders agreed to transfer Pertamina's shares to PIS in the amount of Rp693,698 series A shares and Rp1 series B shares.

Berdasarkan Akta No. 104 tanggal 29 April 2021 oleh Aulia Taufani S.H., Perusahaan telah meningkatkan modal dengan menerbitkan saham baru yang diambil oleh PIS dengan inbreng aset *marine* non-sarana tambat sebesar Rp412.437. Selain itu Perusahaan memutuskan untuk meningkatkan modal dasar dari semula Rp2.000.001 menjadi Rp4.424.581 dan modal ditempatkan dan disetor untuk saham seri A dari semula Rp693.709 menjadi Rp1.106.145. Modal dasar yang semula dibagi menjadi 2.000.000 lembar saham seri A dan 819 lembar saham seri B menjadi 4.424.580 lembar saham seri A dan 819 lembar saham seri B.

In accordance with Notarial Deed No. 104 dated 29 April 2021 by Aulia Taufani S.H., The Company increased its capital by issuing new shares which were subscribed by PIS through in-kind capital contribution in the form of non-mooring marine assets of Rp412,437. In addition, the Company decided to increase the authorised capital from Rp2,000,001 to Rp4,424,581 and the issued and paid-up capital for series A shares from Rp693,709 to Rp1,106,145. The authorised capital was originally divided into 2,000,000 series A shares and 819 series B shares to 4,424,580 series A shares and 819 series B shares.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/58 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

18. MODAL SAHAM

Berdasarkan Akta No. 30 tanggal 29 November 2022 oleh Lenny Janis Ishak S.H., Perusahaan telah meningkatkan modal dengan menerbitkan saham baru yang diambil oleh PIS dengan inbreng aset *marine* non-sarana tambat sebesar Rp128.602. Selain itu Perusahaan memutuskan untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor untuk saham seri A dari semula Rp1.106.145 menjadi Rp1.234.747.

18. SHARE CAPITAL

In accordance with Notarial Deed No. 30 dated 29 November 2022 by Lenny Janis Ishak S.H., The Company increased its capital by issuing new shares which were subscribed by PIS through in-kind capital contribution in the form of non-mooring marine assets of Rp128,602. In addition, the Company decided to increase the issued and paid-up capital for series A share from Rp1,106,145 to Rp1,234,747.

19. DIVIDEN

Perusahaan

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 16 Juni 2022, Perusahaan mengumumkan dividen final untuk tahun 2021 sebesar AS\$49.100.000 (nilai penuh) setara dengan Rp723.784, yang mana telah dibayarkan pada Juli 2022.

PME

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 30 Juli 2021, PME mengumumkan total dividen final untuk tahun 2020 sebesar Rp7.831, yang sudah dibayarkan kepada Perusahaan sebesar Rp7.767 pada tanggal 18 Oktober 2022. Pada tanggal 31 Desember 2023, utang dividen merupakan utang dividen PME kepada PET sebesar Rp64.

19. DIVIDENDS

The Company

Based on the Annual General Meeting of Shareholders on 16 June 2022, the Company declared final dividends for the 2021 financial year of US\$49,100,000 (full amount) equivalent to Rp723,784, which was paid in July 2022.

PME

Based on the Annual General Meeting of Shareholders on 30 Juli 2021, PME declared total final dividends for the 2020 financial year of Rp7,831, which has been paid to the Company amounting to Rp 7,767 on 18 October 2022. As at 31 December 2023, dividend payables represent PME's dividends payable to PET amounting to Rp64.

20. PENDAPATAN USAHA

	2023	2022
Jasa penunjang operasi <i>marine</i>	2,526,724	2,170,092
Sewa kapal	1,867,692	1,597,644
Keagenan kapal dan jasa kepelabuhanan	1,636,746	479,945
Jasa penyediaan tenaga kerja	275,079	219,010
Perdagangan umum	240,966	191,631
Jasa broker kapal, neto	97,202	18,589
Bongkar muat	75,604	61,245
Pengerukan	25,000	38,387
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp2,000)	1,496	8,370
Jumlah	6,746,509	4,784,913

20. REVENUE

Marine operations support services
Vessel charter
Shipping agency and port services
Labour supply services
General trading
Charter broker services, net
Cargo handling
Dredging
Others (each below Rp2,000)

Total

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/59 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

20. PENDAPATAN USAHA (lanjutan)

20. REVENUE (continued)

Grup mengakui kontrak aset terkait pendapatan berikut ini:

The Group has recognised contract assets related to the following revenues:

	2023	2022	
Aset kontrak			Contract assets
Jasa penunjang operasi <i>marine</i>	427,335	191,477	Marine operations support services
Keagenan kapal dan jasa kepelabuhanan	391,817	555,118	Shipping agency and port services
Sewa kapal	369,230	300,589	Vessel charter
Jasa <i>broker</i> kapal	183,695	37,576	Charter broker services
Perdagangan umum	129,805	121,718	General trading
Jasa penyediaan tenaga kerja	52,017	51,167	Labour supply services
Pengerukan	1,125	19,560	Dredging
Jumlah, setelah dikurangi provisi penurunan nilai	1,555,024	1,277,205	Total, net of expected credit loss

	2023	2022	
Liabilitas kontrak			Contract liabilities
Keagenan kapal dan jasa kepelabuhanan	233,535	107,220	Shipping agency and port services
Jumlah	233,535	107,220	Total

Lihat catatan 25 untuk rincian transaksi dan saldo pihak berelasi.

Refer to Note 25 for related party transactions and balances.

Tabel berikut menunjukkan berapa banyak pendapatan yang diakui pada periode pelaporan saat ini terkait dengan liabilitas kontrak yang dialihkan dan berapa banyak yang terkait dengan kewajiban kinerja yang diselesaikan pada tahun sebelumnya:

The following table shows how much of the revenue recognised in the current reporting period relates to carried-forward contract liabilities and how much relates to performance obligations that were satisfied in a prior year:

	2023	2022	
Pendapatan diakui yang termasuk dalam saldo liabilitas kontrak pada awal periode:			Revenue recognised that was included in the contract liability balance at the beginning of the period:
Keagenan kapal dan jasa kepelabuhanan	106,424	125,347	Shipping agency and port services

21. BEBAN POKOK PENDAPATAN

21. COST OF REVENUE

	2023	2022	
Keagenan kapal dan jasa kepelabuhanan	1,127,646	243,787	Shipping agency and port services
Jasa penunjang operasi <i>marine</i>	991,788	972,198	Marine operations support services
Penyusutan (Catatan 10 dan 14)	748,651	650,879	Depreciation (Notes 10 and 14)
Sewa kapal	597,290	510,928	Vessel charter
Penyediaan tenaga kerja	583,785	516,354	Labour supply services
Perdagangan umum	47,308	164,163	General trading
Pengerukan	35,452	31,691	Dredging
Bongkar muat	19,275	41,987	Cargo handling
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp2.000)	2,798	5,000	Others (each below Rp2,000)
Jumlah	4,153,993	3,136,987	Total

Lihat catatan 25 untuk rincian transaksi dan saldo pihak berelasi.

Refer to Note 25 for related party transactions and balances.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/60 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

22. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

22. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

	2023	2022	
Umum			General
Biaya karyawan dan kesejahteraan	843,400	435,957	Employee costs and welfare
Pemeliharaan bangunan	106,109	63,616	Maintenance of buildings
Perlengkapan kantor	78,087	33,153	Office supplies
Hubungan masyarakat	16,895	29,171	Public relations
Sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah	14,447	23,372	Short-term leases and leases of low value assets
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp4.000)	5,032	6,792	Others (each below Rp4,000)
	<u>1,063,970</u>	<u>592,061</u>	
Administrasi	2023	2022	Administrative
Jasa profesional	66,313	43,465	Professional fees
Penyusutan (Catatan 10 dan 14)	27,992	12,220	Depreciation (Notes 10 and 14)
Biaya bank	2,838	1,570	Bank charges
	<u>97,143</u>	<u>57,255</u>	
Jumlah	<u>1,161,113</u>	<u>649,316</u>	Total
Lihat catatan 25 untuk rincian transaksi dan saldo pihak berelasi.		Refer to Note 25 for related party transactions and balances.	

23. (BEBAN)/PENDAPATAN LAIN-LAIN, NETO

23. OTHER (EXPENSE)/REVENUE, NET

	2023	2022	
Provisi atas kasus hukum (Catatan 27g)	(48,964)	-	Provision for legal case (Notes 27g)
Rugi selisih kurs, neto	(8,459)	9,365	Foreign exchange loss, net
Penyisihan piutang tak tertagih (Catatan 5 dan 6)	(6,717)	(18,085)	Bad debt expense (Notes 5 and 6)
Pemulihan penurunan nilai piutang usaha dan kontrak aset (Catatan 5 dan 6)	2,221	6,644	Reversal of impairment on trade receivables and contract assets (Notes 5 and 6)
Klaim atas denda penyerahan kapal	2,473	24,808	Claim from late delivery of vessels
Lain-lain, neto	5,920	2,799	Others, net
Jumlah	<u>(53,526)</u>	<u>25,531</u>	Total

24. BEBAN KEUANGAN

24. FINANCE COSTS

	2023	2022	
Beban keuangan atas pinjaman jangka panjang	(69,750)	(83,864)	Finance cost of long-term borrowings
Beban keuangan atas liabilitas sewa (Catatan 14b)	(27,520)	(15,935)	Finance costs of lease liabilities (Note 14b)
Jumlah	<u>(97,270)</u>	<u>(99,799)</u>	Total

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/61 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**25. SALDO DAN TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN
PIHAK BERELASI**

Dalam kegiatan usaha normal, Grup melakukan transaksi usaha dan bukan usaha dengan pihak-pihak berelasi, yang terafiliasi dengan Grup melalui kepemilikan langsung dan tak langsung, dan/atau di bawah kendali pihak yang sama ataupun entitas berelasi dengan Pemerintah. Harga jual atau beli antara pihak-pihak berelasi ditentukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, yang mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak ketiga.

Sifat hubungan dan transaksi dengan pihak yang berelasi adalah sebagai berikut:

**25. SIGNIFICANT BALANCES AND TRANSACTIONS
WITH RELATED PARTIES**

In the normal course of business, the Group enters into trade and non-trade with related parties, which are affiliated with the Group through equity ownership, either direct or indirect, and/or under common control or Government-related entities. Sales or purchase price among related parties are made based on terms agreed by the parties, which may not be the same as those of the transactions between third parties.

The nature of transactions and relationships with related parties are as follows:

Pihak berelasi dan entitas berelasi dengan pemerintah/Related Parties and Government-related entities	Sifat hubungan/ Nature of relationships	Saldo dan sifat transaksi/ Balances and nature of transactions
PT Pertamina (Persero) ("Pertamina")	Perusahaan induk utama/Ultimate parent company	Pendapatan, beban pokok pendapatan, piutang usaha, kontrak aset, utang usaha, liabilitas kontrak, dan modal saham/Revenue, cost of revenue, trade receivables, contract assets, trade payables, contract liabilities and share capital
PT Pertamina International Shipping ("PIS")	Pemegang saham mayoritas/Majority shareholder	Pendapatan, beban pokok pendapatan, piutang usaha, kontrak aset, utang usaha, dan liabilitas kontrak/Revenue, cost of revenue, trade receivables, contract assets, trade payables and contract liability
PT Pertamina Energy Terminal ("PET")	Entitas sepengendali/Entity under common control	Pendapatan, beban pokok pendapatan, beban umum dan administrasi, piutang usaha, kontrak aset, dan utang usaha/Revenue, cost of revenue, general & administrative expense, trade receivables, contract assets and trade payables
PT Kilang Pertamina International ("KPI")	Entitas sepengendali/Entity under common control	Pendapatan, beban pokok pendapatan, piutang usaha, kontrak aset, dan utang usaha/Revenue, cost of revenue, trade receivables, contract asset and trade payables
PT Perta Arun Gas ("PAG")	Entitas sepengendali/Entity under common control	Pendapatan, beban pokok pendapatan, piutang usaha, kontrak aset, dan utang usaha/Revenue, cost of revenue, trade receivables, contract assets and trade payables
PT Pertamina Patra Niaga ("Patra Niaga")	Entitas sepengendali/Entity under common control	Pendapatan, piutang usaha, kontrak aset, dan utang usaha/Revenue, trade receivables, contract liabilities and trade payables
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI")	Entitas yang berelasi dengan Pemerintah/Government-related entity	Penempatan kas dan setara kas/Placement of cash and cash equivalents
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI")	Entitas yang berelasi dengan Pemerintah/Government-related entity	Penempatan kas dan setara kas/Placement of cash and cash equivalents
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri")	Entitas yang berelasi dengan Pemerintah/Government-related entity	Penempatan kas dan setara kas/Placement of cash and cash equivalents



**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/62 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. SALDO DAN TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan) 25. SIGNIFICANT BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

Pihak berelasi dan entitas berelasi dengan pemerintah/Related Parties and Government-related entities	Sifat hubungan/ Nature of relationships	Saldo dan sifat transaksi/ Balances and nature of transactions
PT Pertamina Retail ("PTRP")	Entitas sepengendali/Entity under common control	Pendapatan, beban pokok pendapatan, piutang usaha, dan kontrak aset/Revenue, cost of revenue, trade receivables and contract assets
PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur ("PHKT")	Entitas sepengendali/Entity under common control	Pendapatan, piutang usaha, dan kontrak aset/Revenue, trade receivables and contract liabilities
PT Pertamina Hulu Mahakam ("PHM")	Entitas sepengendali/Entity under common control	Pendapatan, piutang usaha, dan kontrak aset/Revenue, trade receivables and contract liabilities
PT Pertamina Hulu Energi Offshore North-West Java ("PHE ONWJ")	Entitas sepengendali/Entity under common control	Pendapatan, piutang usaha, dan kontrak aset/Revenue, trade receivables and contract liabilities
PT Pertamina Hulu Sanga Sanga ("PHSS")	Entitas sepengendali/Entity under common control	Pendapatan, piutang usaha, dan kontrak aset/Revenue, trade receivables and contract liabilities
PT Pertamina Lubricants ("PTPL")	Entitas sepengendali/Entity under common control	Pendapatan dan piutang usaha/Revenue and trade receivables
PT PGN LNG Indonesia ("PGN LNG")	Entitas sepengendali/Entity under common control	Pendapatan, piutang usaha, dan kontrak aset/Revenue, trade receivables and contract assets
PT Pertamina EP ("PEP")	Entitas sepengendali/Entity under common control	Pendapatan dan piutang usaha/Revenue and trade receivables
PT Pertamina Drilling Service ("PDSI")	Entitas sepengendali/Entity under common control	Pendapatan dan piutang usaha/Revenue and trade receivables
PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore ("PHE WMO")	Entitas sepengendali/Entity under common control	Pendapatan, piutang usaha, dan kontrak aset/Revenue, trade receivables and contract assets
PT Pertamina Bina Medika ("Pertamedika")	Entitas sepengendali/Entity under common control	Beban pokok pendapatan, beban umum dan administrasi, dan utang usaha/Cost of revenue, general and administrative expenses and trade payables
PT Patra Logistik ("Patra Logistik")	Entitas sepengendali/Entity under common control	Pendapatan, beban pokok pendapatan dan liabilitas kontrak/Revenue, cost of revenue and contract liabilities
PT Nusantara Regas ("Nusantara Regas")	Entitas sepengendali/Entity under common control	Pendapatan dan piutang usaha/Revenue and trade receivables
PT Pertamina Hulu Energi Offshore Southeast Sumatra ("PHE OSES")	Entitas sepengendali/Entity under common control	Pendapatan, piutang usaha, dan kontrak aset/Revenue, trade receivables and contract assets
PT Kilang Pertamina Balikpapan ("KP Balikpapan")	Entitas sepengendali/Entity under common control	Pendapatan dan kontrak aset/Revenue and contract assets
PT Pertamina Hulu Energi North Sumatera Offshore ("PHE NSO")	Entitas sepengendali/Entity under common control	Pendapatan dan kontrak aset/Revenue and contract assets
PT Prima Armada Raya ("PAR")	Entitas sepengendali/Entity under common control	Beban umum dan administrasi dan utang usaha/General and administrative expenses and trade payables
PT Pertamina Training & Consulting ("PTC")	Entitas sepengendali/Entity under common control	Beban umum dan administrasi dan utang usaha/General and administrative expenses and trade payables
Bank Syariah Indonesia Tbk ("BSI")	Entitas yang berelasi dengan Pemerintah/Government-related entity	Penempatan kas dan setara kas dan pinjaman jangka panjang/Placement of cash and cash equivalents and long-term borrowings



**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/63 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**25. SALDO DAN TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN
PIHAK BERELASI (lanjutan)**

**25. SIGNIFICANT BALANCES AND TRANSACTIONS
WITH RELATED PARTIES (continued)**

Pihak berelasi dan entitas berelasi dengan pemerintah/Related Parties and Government-related entities	Sifat hubungan/ Nature of relationships	Saldo dan sifat transaksi/ Balances and nature of transactions
PT Mitra Tours & Travel ("MTT")	Entitas sepengendali/Entity under common control	Beban umum dan administrasi dan utang usaha/General and administrative expenses and trade payables
PT Pertamina International Marketing & Distribution Pte, Ltd, ("PIMD")	Entitas sepengendali/Entity under common control	Liabilitas kontrak/Contract liabilities
PT Pertamina Hulu Rokan ("PHR")	Entitas sepengendali/Entity under common control	Pendapatan/Revenue
PT Pertamina Hulu Energi Jambi Merang ("PHE JM")	Entitas sepengendali/Entity under common control	Pendapatan/Revenue
PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia ("ATPI")	Entitas sepengendali/Entity under common control	Beban pokok pendapatan/Cost of sales
PT Benggala Laju Abadi ("Benggala")	Entitas sepengendali/Entity under common control	Penyertaan saham/Investment in shares
PT Banggai Bahtera Laju Abadi ("Banggai")	Entitas sepengendali/Entity under common control	Penyertaan saham/Investment in shares
PT Aru Bahtera Laju Abadi ("Aru")	Entitas sepengendali/Entity under common control	Penyertaan saham/Investment in shares
PT Alor Bahtera Laju Abadi ("Alor")	Entitas sepengendali/Entity under common control	Penyertaan saham/Investment in shares
PT Ararkula Bahtera Laju Abadi ("Ararkula")	Entitas sepengendali/Entity under common control	Penyertaan saham/Investment in shares
PT Bangkit Bahtera Laju Abadi ("Bangkit")	Entitas sepengendali/Entity under common control	Penyertaan saham/Investment in shares
PT Liran Bahtera Laju Abadi ("Liran")	Entitas sepengendali/Entity under common control	Penyertaan saham/Investment in shares
PT Barung Bahtera Laju Abadi ("Barung")	Entitas sepengendali/Entity under common control	Penyertaan saham/Investment in shares
PT Miangas Bahtera Laju Abadi ("Miangas")	Entitas sepengendali/Entity under common control	Penyertaan saham/Investment in shares
PT Brass Bahtera Laju Abadi ("Brass")	Entitas sepengendali/Entity under common control	Penyertaan saham/Investment in shares
PT Damar Bahtera Laju Abadi ("Damar")	Entitas sepengendali/Entity under common control	Penyertaan saham/Investment in shares
PT Damanusa Bahtera Laju Abadi ("Damanusa")	Entitas sepengendali/Entity under common control	Penyertaan saham/Investment in shares
PT Bepondi Bahtera Laju Abadi ("Bepondi")	Entitas sepengendali/Entity under common control	Penyertaan saham/Investment in shares
PT Trans Yeong Maritime ("TYM")	Entitas ventura bersama/Joint venture entity	Piutang usaha/Trade receivables
PT Pelabuhan Indonesia (Persero) ("Pelindo")	Entitas yang berelasi dengan Pemerintah/Government-related entity	Piutang usaha, kontrak aset, dan liabilitas kontrak/Revenue, contract assets and contract liabilities



**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/64 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**25. SALDO DAN TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN
PIHAH BERELASI (lanjutan)**

**25. SIGNIFICANT BALANCES AND TRANSACTIONS
WITH RELATED PARTIES (continued)**

Pihak berelasi dan entitas berelasi dengan pemerintah/Related Parties and Government-related entities	Sifat hubungan/ Nature of relationships	Saldo dan sifat transaksi/ Balances and nature of transactions
PT Pelindo Marine Service ("Pelindo MS")	Entitas yang berelasi dengan Pemerintah/Government-related entity	Piutang usaha/Trade receivables
PT Administrasi Medika ("Admedika")	Entitas yang berelasi dengan Pemerintah/Government-related entity	Utang usaha/Trade payables
PT Pratama Mitra Sejati ("PMS")	Entitas yang berelasi dengan Pemerintah/Government-related entity	Utang usaha/Trade payables
PT Sigma Cipta Utama ("SCU")	Entitas yang berelasi dengan Pemerintah/Government-related entity	Beban pokok pendapatan dan utang usaha/Cost of sales and trade payables
PT Jawa Satu Power ("JSP")	Entitas yang berelasi dengan Pemerintah/Government-related entity	Piutang usaha/Trade receivables
PT Trans Pacific Petrochemical Indotama ("TPPI")	Entitas yang berelasi dengan Pemerintah/Government-related entity	Piutang usaha/Trade receivables
PT Peralife Insurance ("Peralife")	Entitas yang berelasi dengan Pemerintah/Government-related entity	Utang usaha/Trade payables
PT Surveyor Indonesia (Persero) ("Surveyor Indonesia")	Entitas yang berelasi dengan Pemerintah/Government-related entity	Utang usaha/Trade payables
PT Telkom Satelit Indonesia ("Telkomsat")	Entitas yang berelasi dengan Pemerintah/Government-related entity	Utang usaha/Trade payables
PT Biro Klasifikasi Indonesia ("BKI")	Entitas yang berelasi dengan Pemerintah/Government-related entity	Utang usaha/Trade payables
PT PAL Indonesia ("PAL")	Entitas yang berelasi dengan Pemerintah/Government-related entity	Utang usaha/Trade payables
PT Jasa Armada Indonesia ("IPCM")	Entitas anak dari BUMN yang dikendalikan pemerintah/ Subsidiaries of SOEs controlled by the Government	Utang usaha/Trade payables
PT Superintending Company of Indonesia ("SUCOFINDO")	Entitas anak dari BUMN yang dikendalikan pemerintah/ Subsidiaries of SOEs controlled by the Government	Utang usaha/Trade payables
PT Jasamarga Related Business ("JRB")	Entitas anak dari BUMN yang dikendalikan pemerintah/ Subsidiaries of SOEs controlled by the Government	Piutang usaha/Trade receivables



**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/65 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**25. SALDO DAN TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN
PIHAK BERELASI (lanjutan)**

Saldo-saldo signifikan dengan pihak-pihak berelasi dan entitas berelasi dengan Pemerintah adalah sebagai berikut:

Kas dan setara kas (Catatan 4)

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, saldo kas dan setara kas yang ditempatkan pada entitas berelasi dengan Pemerintah masing-masing sebesar 19,32% dan 12,85% dari jumlah aset.

Piutang usaha (Catatan 5)

**25. SIGNIFICANT BALANCES AND TRANSACTIONS
WITH RELATED PARTIES (continued)**

Significant balances with related parties and Government-related entities are as follows:

Cash and cash equivalents (Note 4)

As at 31 December 2023 and 2022, the balances of cash and cash equivalents placed in Government-related entities represent 19.32% and 12.85%, respectively, of the total assets.

Trade receivables (Note 5)

	2023	2022	
PIS	648,915	741,318	PIS
Patra Niaga	33,299	252,972	Patra Niaga
PET	32,292	43,282	PET
PHE OSES	30,376	1,862	PHE OSES
PHM	21,814	10,597	PHM
KPI	15,102	28,107	KPI
Pelindo	14,354	3,488	Pelindo
PAG	12,116	22,772	PAG
PHKT	11,180	11,358	PHKT
PHE ONWJ	10,606	8,192	PHE ONWJ
Pertamina	9,415	24,229	Pertamina
PTPR	6,533	7,007	PTPR
PHR	6,512	-	PHR
TYM	5,273	1,780	TYM
PGN LNG	4,272	1,881	PGN LNG
KP Balikpapan	4,037	-	KP Balikpapan
PEP CEPU	3,811	-	PEP CEPU
Nusantara Regas	2,489	3,403	Nusantara Regas
JRB	1,920	-	JRB
PTPL	1,296	5,207	PTPL
PHSS	824	7,328	PHSS
PEP	820	1,242	PEP
Pelindo MS	-	2,969	Pelindo MS
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1.000)	3,959	2,140	Others (each below Rp1,000)
Jumlah	881,215	1,181,134	Total

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/66 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**25. SALDO DAN TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN
PIHAK BERELASI (lanjutan)**

Saldo-saldo signifikan dengan pihak-pihak berelasi dan entitas berelasi dengan Pemerintah adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Kontrak aset (Catatan 6)

	2023	2022
Patra Niaga	427,938	260,625
PIS	285,873	310,899
KPI	284,257	264,596
PHE OSES	64,586	23,552
PTPR	30,679	19,551
PHKT	27,697	13,531
PHE ONWJ	26,472	23,539
PHM	15,342	20,093
PAG	12,753	5,398
KP Balikpapan	10,288	6,714
Nusantara Regas	9,422	-
PHS	7,766	6,069
PET	5,935	6,724
PHR	4,798	-
PGN LNG	3,531	2,832
PHE WMO	3,038	2,028
Pertamina	2,144	8,287
Pelindo	99	55,049
PHE NSO	-	3,588
PEP	-	36
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1.000)	3,440	1,784
Jumlah	1,226,058	1,034,895

Penyertaan saham

	Kepemilikan/ Ownership (%)	2023	2022
PET	0,01%	1,200	1,210
Benggala	0,10%	791	789
Banggai	0,10%	766	771
Alor	0,10%	422	432
Aru	0,10%	427	426
Barung	0,10%	394	410
Miangas	0,10%	398	401
Ararkula	0,10%	385	389
Liran	0,10%	358	385
Bangkit	0,10%	383	335
Brass	0,10%	302	313
Damanusa	0,10%	280	285
Damar	0,10%	275	284
Patra Niaga	0,01%	167	130
Bepondi	0,10%	104	101
Jumlah		6,652	6,661

Penyertaan saham diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas yang dicatat menggunakan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

**25. SIGNIFICANT BALANCES AND TRANSACTIONS
WITH RELATED PARTIES (continued)**

Significant balances with related parties and Government-related entities are as follows: (continued)

Contract assets (Note 6)

	2023	2022
Patra Niaga	427,938	260,625
PIS	285,873	310,899
KPI	284,257	264,596
PHE OSES	64,586	23,552
PTPR	30,679	19,551
PHKT	27,697	13,531
PHE ONWJ	26,472	23,539
PHM	15,342	20,093
PAG	12,753	5,398
KP Balikpapan	10,288	6,714
Nusantara Regas	9,422	-
PHS	7,766	6,069
PET	5,935	6,724
PHR	4,798	-
PGN LNG	3,531	2,832
PHE WMO	3,038	2,028
Pertamina	2,144	8,287
Pelindo	99	55,049
PHE NSO	-	3,588
PEP	-	36
Others (each below Rp1,000)	3,440	1,784
Total	1,226,058	1,034,895

Investment in shares

	2023	2022
PET	1,200	1,210
Benggala	791	789
Banggai	766	771
Alor	422	432
Aru	427	426
Barung	394	410
Miangas	398	401
Ararkula	385	389
Liran	358	385
Bangkit	383	335
Brass	302	313
Damanusa	280	285
Damar	275	284
Patra Niaga	167	130
Bepondi	104	101
Total	6,652	6,661

Investment in shares are classified as equity instruments measured at fair value through other comprehensive income.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/67 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**25. SALDO DAN TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN
PIHAK BERELASI (lanjutan)**

Saldo-saldo signifikan dengan pihak-pihak berelasi dan entitas berelasi dengan Pemerintah adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Utang usaha (Catatan 11)

**25. SIGNIFICANT BALANCES AND TRANSACTIONS
WITH RELATED PARTIES (continued)**

Significant balances with related parties and Government-related entities are as follows: (continued)

Trade payables (Note 11)

	2023	2022	
KPI	296,890	1,110	KPI
Pertamina	219,415	379,652	Pertamina
Pelindo	171,277	167,541	Pelindo
PIS	64,914	74,068	PIS
PPN	40,795	159,803	PPN
IPCM	29,709	-	IPCM
Pertalife	22,339	15,391	Pertalife
Admedika	20,953	14,558	Admedika
PAG	16,309	23,895	PAG
PAR	15,305	20,111	PAR
PTC	6,450	2,042	PTC
PET	5,426	7,342	PET
PMS	4,191	7,181	PMS
PBM	3,233	6,277	PBM
PTPL	3,161	-	PTPL
BKI	1,862	4,179	BKI
PAL	1,551	2,608	PAL
Elnusa Petrofin	1,461	-	Elnusa Petrofin
YKP	1,396	-	YKP
KBS	1,074	-	KBS
ATPI	1,015	696	ATPI
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1.000)	6,659	23,092	Others (each below Rp1,000)
Jumlah	935,385	909,546	Total

Liabilitas kontrak (Catatan 13)

Contract liabilities (Note 13)

	2023	2022	
PIS	40,526	19,605	PMS
PIMD	337	144	PIMD
PIL	212	-	PIL
Dahana	44	44	Dahana
Adhi Karya	20	270	Adhi Karya
PET	14	-	PET
Pelindo	-	50	Pelindo
Pertamina	-	8	Pertamina
TSA	-	8	TSA
Djakarta Lloyd	-	7	Djakarta Lloyd
Jumlah	41,153	20,136	Total



**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/68 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**25. SALDO DAN TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN
PIHAK BERELASI (lanjutan)**

Saldo-saldo signifikan dengan pihak-pihak berelasi dan entitas berelasi dengan Pemerintah adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Pinjaman jangka panjang (Catatan 16)

	2023	2022
Mandiri	344,662	375,096
BSI	137,375	180,467
Jumlah	482,037	555,563

Pendapatan usaha

	2023	2022
Patra Niaga	2,178,552	1,329,911
PIS	1,356,306	987,960
KPI	982,642	784,205
PHI	256,768	-
PTPR	245,053	197,581
PHE OSES	204,278	88,435
PAG	153,012	151,294
PET	88,150	87,050
PHE ONWJ	39,048	54,287
PGN LNG	35,175	19,814
PHR	31,652	1,837
Nusantara Regas	30,855	7,944
PHM	19,538	82,521
KPB	11,866	3,115
PHKT	10,597	70,801
TYM	10,336	-
Pelindo	7,373	70,838
Pertamina	5,707	7,230
PHE WMO	4,674	5,730
PEP	4,417	1,367
PHE NSO	3,860	1,388
PHE JM	3,715	3,762
PDSI	3,433	-
ATPI	2,333	-
Patra Logistik	-	147,539
PHSS	-	7,500
PTPL	-	4,459
PMS	-	4,046
PEL	-	2,974
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1.000)	1,663	1,287
Jumlah	5,691,003	4,124,875

**25. SIGNIFICANT BALANCES AND TRANSACTIONS
WITH RELATED PARTIES (continued)**

Significant balances with related parties and Government-related entities are as follows: (continued)

Long-term borrowings (Note 16)

Mandiri	
BSI	
Total	
Revenue	
Patra Niaga	
PIS	
KPI	
PHI	
PTPR	
PHE OSES	
PAG	
PET	
PHE ONWJ	
PGN LNG	
PHR	
Nusantara Regas	
PHM	
KPB	
PHKT	
TYM	
Pelindo	
Pertamina	
PHE WMO	
PEP	
PHE NSO	
PHE JM	
PDSI	
ATPI	
Patra Logistik	
PHSS	
PTPL	
PMS	
PEL	
Others	
(each below Rp1,000)	
Total	



**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/69 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**25. SALDO DAN TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN
PIHAK BERELASI (lanjutan)**

Saldo-saldo signifikan dengan pihak-pihak berelasi dan entitas berelasi dengan Pemerintah adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Beban pokok pendapatan

	2023	2022
PPN	477,087	645,286
Pelindo	375,025	548,210
KPI	296,443	729
PIS	68,820	127,556
PAG	64,563	73,801
Pertamina	42,073	27,891
IPCM	30,831	-
PAR	18,223	-
PTPR	13,900	838
BKI	7,089	5,586
PET	7,073	6,081
Elnusa Petrofin	6,578	322
Telkomsat	5,811	7,668
SCU	4,126	3,577
TPI	367	18,994
Pertamedika	37	1,356
JAI	-	18,395
Admedika	-	14,558
Sucofindo	-	3,730
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1.000)	1,210	1,288
Jumlah	1,419,256	1,505,866

Beban umum dan administrasi

	2023	2022
Admedika	31,713	14,558
ATPI	18,369	-
PTC	10,680	4,445
Pertamedika	9,187	5,547
PMS	5,344	8,861
MTT	2,881	2,246
Patra Jasa	1,361	-
BKI	-	1,277
PAR	-	20,111
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1.000)	1	623
Jumlah	79,536	57,668

**25. SIGNIFICANT BALANCES AND TRANSACTIONS
WITH RELATED PARTIES (continued)**

Significant balances with related parties and Government-related entities are as follows: (continued)

Cost of revenue

	2023	2022
PPN	477,087	645,286
Pelindo	375,025	548,210
KPI	296,443	729
PIS	68,820	127,556
PAG	64,563	73,801
Pertamina	42,073	27,891
IPCM	30,831	-
PAR	18,223	-
PTPR	13,900	838
BKI	7,089	5,586
PET	7,073	6,081
Elnusa Petrofin	6,578	322
Telkomsat	5,811	7,668
SCU	4,126	3,577
TPI	367	18,994
Pertamedika	37	1,356
JAI	-	18,395
Admedika	-	14,558
Sucofindo	-	3,730
Others (each below Rp1,000)	1,210	1,288
Total	1,419,256	1,505,866

General and administrative expenses

	2023	2022
Admedika	31,713	14,558
ATPI	18,369	-
PTC	10,680	4,445
Pertamedika	9,187	5,547
PMS	5,344	8,861
MTT	2,881	2,246
Patra Jasa	1,361	-
BKI	-	1,277
PAR	-	20,111
Others (each below Rp1,000)	1	623
Total	79,536	57,668



**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/70 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2023

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

31 DECEMBER 2023

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**25. SALDO DAN TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN
PIHAK BERELASI (lanjutan)**

Kompensasi dan imbalan lain

Kompensasi dan imbalan lain yang diberikan oleh Perusahaan kepada manajemen kunci adalah sebagai berikut:

**25. SIGNIFICANT BALANCES AND TRANSACTIONS
WITH RELATED PARTIES (continued)**

Compensation and other benefits

Compensation and other benefits provided by the Company to its key management is as follows:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Gaji dan imbalan lainnya	<u>39,889</u>	<u>20,060</u>

Salaries and other benefits

26. SALDO LABA DICADANGKAN

Undang-Undang Perseroan Terbatas Republik Indonesia No. 40/2007 yang diterbitkan pada bulan Agustus 2007, mengharuskan setiap Perusahaan untuk membentuk cadangan wajib dari laba bersih sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh. Tidak ada batasan waktu untuk membentuk cadangan tersebut.

Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada tanggal 12 Juni 2023 yang diaktakan dalam Akta Notaris No. 8 oleh Ivan Lazuardi Suwana, S.H., M.Kn., tanggal 12 Juni 2023, para pemegang saham menyetujui Cadangan Wajib sebesar AS\$47.479.154 (nilai penuh) atau setara dengan Rp733.030 yang dialokasikan dari Saldo Laba yang belum ditentukan penggunaannya.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Perusahaan telah membentuk dana cadangan sebesar Rp845.826 dan Rp 112.796.

26. APPROPRIATED RETAINED EARNINGS

The Limited Liability Company Law of the Republic of Indonesia No. 40/2007 issued in August 2007, requires each company to establish a statutory reserve from net profits amounting to at least 20% of a Company's issued and paid-up capital. There is no time limit on the establishment of such reserve.

Based on the Minutes of the Company's Annual General Meeting of Shareholders held on 12 June 2023 which was notarised in the Notarial Deed No. 8 of Miryany Usman, S.H, dated 12 June 2023, the shareholders approved the General Reserves of US\$47,479,154 (full amount) or equivalent to Rp733,030 which were allocated from the Unappropriated Retained Earnings.

As at 31 December 2023 and 2022, the Company has provided for Rp845,826 and Rp 112,796 as general reserves.

27. PERIKATAN PENTING DAN KONTINJENSI

a. Perjanjian kerjasama dengan PAG

Pada tanggal 30 Januari 2015 telah ditandatangani perjanjian kerjasama pengelolaan terminal antara Perusahaan dengan PAG. Perjanjian ini berlaku selama tiga tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan. Nilai kontrak atas perjanjian tersebut adalah untuk jasa rutin sebesar Rp40.990 per tahun, dan untuk jasa non-rutin adalah sebesar pengeluaran nyata ditambah dengan margin yang sudah di atur dalam perjanjian.

Pada tanggal 30 Mei 2017, perjanjian ini diperpanjang selama lima belas tahun dan dapat diperpanjang lagi sesuai kesepakatan.

27. SIGNIFICANT COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

a. Cooperation agreement with PAG

On 30 January 2015, a cooperation agreement for port terminal management was signed between the Company and PAG. The agreement is valid for three years and may be extended according to the agreement. The contract value of the agreement is for a routine service at Rp40,990 per year, and for non-routine services amounting to actual expenditures plus a margin as set out in the agreement.

On 30 May 2017, this agreement was extended for fifteen years and may be further extended according to the agreement.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/71 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**27. PERIKATAN PENTING DAN KONTINJENSI
(lanjutan)**

**27. SIGNIFICANT COMMITMENTS AND
CONTINGENCIES (continued)**

**b. Perjanjian kerjasama dengan Asosiasi
Produsen Biofuel Indonesia ("APROBI")**

Pada tanggal 15 Juni 2023 telah ditandatangani perjanjian kerjasama pengelolaan *ship-to-ship* antara Perusahaan dengan APROBI. Perjanjian ini berlaku selama satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan. Nilai kontrak atas perjanjian tersebut untuk jasa rutin terbagi menjadi skema A (penyewaan 2 kapal *floating storage* dan 2 kapal *harbour tug*) sebesar Rp16.504 per bulan dan skema B (penyewaan 1 kapal *floating storage* dan 1 kapal *harbour tug*) sebesar Rp15.698 per bulan. Nilai kontrak untuk jasa non-rutin adalah sebesar pengeluaran ditambah dengan *fee* yang sudah diatur dalam perjanjian.

**b. Cooperation agreement with Indonesia
Biofuel Producer Association ("APROBI")**

On 15 June 2023, a cooperation agreement for *ship-to-ship* management was signed between the Company and APROBI. The agreement is valid for one year and may be extended according to the agreement. The contract value of the agreement for the routine services are divided into scheme A (the lease of 2 floating storage vessels and 2 harbour tugboats) is Rp16,504 per month and scheme B (the lease of 1 floating storage vessel and 1 harbour tugboat) amounting to Rp15,698 per month. The contract value for non-routine services amounted to actual expense plus fee according to the agreement.

c. Perjanjian sewa berdasarkan waktu

Perusahaan memiliki beberapa perjanjian untuk menyewakan kapal-kapal ke beberapa pelanggan. Perjanjian yang signifikan adalah dengan Pertamina. Periode perjanjian-perjanjian tersebut umumnya 1 - 2 tahun dengan opsi perpanjangan jangka waktu.

c. Time charter agreement

The Company has several agreements to lease vessels to various customers. The significant agreements are with Pertamina. The period of these agreements is typically made for 1 - 2 years with options to extend the term.

**d. Perjanjian pengelolaan pelabuhan *bundling*
dan *unbundling***

Pada tanggal 9 Juni 2021, konsorsium grup Perusahaan, yang terdiri dari Perusahaan, PPL, PMSol, PME, dan PET, mengadakan perjanjian pengelolaan pelabuhan *bundling* dan *unbundling* terkait jasa kepelabuhanan, jasa *marine*, dan jasa konstruksi untuk *Subholding Refinery and Petrochemical* dengan Pertamina. Perjanjian ini berlaku selama 10 (sepuluh) tahun yang efektif sejak tanggal 1 Mei 2021. Nilai kontrak atas perjanjian tersebut adalah Rp908.884 per tahun.

**d. Bundling and unbundling port management
agreement**

On 9 June 2021, the Company's group consortium, which consists of the Company, PPL, PMSol, PME and PET, entered into a *bundling* and *unbundling* port management agreement related to port, marine and construction for *Subholding Refinery and Petrochemical* with Pertamina. The agreement is valid for 10 (ten) years effective from 1 May 2021. Contract value of this agreement is Rp908,884 per year.

Pada tanggal 11 Juni 2021, konsorsium grup Perusahaan juga mengadakan perjanjian pengelolaan pelabuhan *bundling* dan *unbundling* terkait jasa kepelabuhanan, jasa *marine*, dan jasa konstruksi untuk *Subholding Commercial and Trading* dengan Pertamina. Perjanjian ini berlaku selama 10 (sepuluh) tahun yang efektif sejak tanggal 1 Mei 2021. Nilai kontrak atas perjanjian tersebut adalah Rp27.97 per liter dengan jumlah Rp1.736.238 per tahun.

On 11 June 2021, the Company's group consortium also entered into a *bundling* and *unbundling* port management agreement related to port, marine and construction services for *Subholding Commercial and Trading* with Pertamina. The agreement is valid for 10 (ten) years effective from 1 May 2021. Contract value of this agreement is Rp27,97 per liter with total amount of Rp1,736,238 per year.



**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/72 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**27. PERIKATAN PENTING DAN KONTINJENSI
(lanjutan)**

e. Perjanjian layanan sewa shorebase

Pada tanggal 16 Februari 2022, telah ditandatangani perjanjian layanan sewa shorebase antara Perusahaan dengan PHKT. Perjanjian ini berlaku selama 24 bulan yang efektif sejak tanggal 1 Mei 2022. Nilai total kontrak atas perjanjian tersebut adalah Rp68.011.

f. Undang-Undang Cipta Kerja

Pada bulan Februari 2021, Pemerintah resmi mengundangkan berbagai peraturan pelaksana Undang-Undang Omnibus. Salah satu dari peraturan pelaksana ini adalah Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Peraturan pelaksana ini mengatur, antara lain, jangka waktu kontrak untuk karyawan dengan perjanjian kerja waktu tertentu adalah lima tahun maksimum dan karyawan ini berhak atas uang kompensasi yang dihitung secara proporsional berdasarkan masa kerja, termasuk pesangon dan uang penghargaan masa kerja.

Pada tanggal 31 Maret 2023, Pemerintah mengundangkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ("Perpu") No. 2/2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. UU Cipta Kerja berlaku sejak tanggal 31 Maret 2023.

g. Kasus hukum atas lahan disewakan kepada PT Batubara Mandiri

Pada tanggal 27 April 2021, Perusahaan digugat oleh PT Batubara Mandiri ("PTBBM") terkait pembatasan penggunaan lahan sewa di Lahan Bagus Kuning, Plaju, Palembang, Menurut PT Batubara Mandiri, mereka hanya dapat menggunakan lahan seluas 15.000m² dari 42.650m² luas lahan yang dinyatakan dalam kontrak.

Pada tanggal 8 April 2014, PTBBM menerima surat peringatan dan denda dari Dinas Pertambangan dan Energi Sumatera Selatan dikarenakan lokasi lahan sewa tidak termasuk di dalam lokasi persediaan batu bara yang telah ditentukan. Dikarenakan pembatasan ini mempengaruhi aktivitas operasional. PTBBM berpendapat bahwa Perusahaan bertanggung jawab atas kerugian mereka sebesar Rp298.964.

**27. SIGNIFICANT COMMITMENTS AND
CONTINGENCIES (continued)**

e. Shorebase rental service

On 16 February 2022, an agreement for shorebase rental services was signed between the Company and PHKT. The agreement is valid for 24 months effective from 1 May 2022. The total contract value of the agreement is Rp68,011.

f. Job Creation Bill

In February 2021, the Government officially enacted various implementing regulations of the Omnibus Law. One of these implementing regulations is Government Regulation No. 35 of 2021 concerning the Limited Time Employment Agreement, Outsourcing, Working Time and Break Time, and Termination of Employment. This implementing regulation regulates, among other things, that the contract period for employees with a limited time employment agreement is five years maximum and these employees are entitled to compensation benefit which is calculated proportionally based on the length of service, including severance pay and service pay.

On 31 March 2023, the Government issued Law No. 6 of 2023 regarding The Determination of Government Regulation No. 2/2022, concerning Job Creation to become Law. The Job Creation Law comes into effect on 31 March 2023

g. Legal case of leased land to PT Batubara Mandiri

On 27 April 2021, the Company was sued by PT Batubara Mandiri ("PTBBM") due to leased land use limitation in Lahan Bagus Kuning, Plaju, Palembang, According to PT Batubara Mandiri, they can only use 15,000m² from 42,650m² of total area stated in contract.

On 8 April 2014, PTBBM received a warning letter and penalty from the Ministry of Energy and Mineral Resources of South Sumatera due to leased land location is not included in the location determined as coal stockpile area. Since these limitations are impacting their operational activity. PTBBM believed that the Company is responsible for their losses amounting to Rp298,964.



**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/73 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

27. PERIKATAN PENTING DAN KONTINJENSI (lanjutan) 27. SIGNIFICANT COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

g. Kasus hukum atas lahan disewakan kepada PT Batubara Mandiri (lanjutan)

Pada tanggal 22 September 2021, perkara ini ditangani oleh Pengadilan Negeri Batam dimana keputusan pengadilan memenangkan Perusahaan. Berdasarkan Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura, Pengadilan Negeri Batam berpendapat bahwa perkara ini dapat diputuskan oleh Pengadilan Negeri Palembang. Atas putusan ini, PTBBM mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau.

Pada tanggal 29 Desember 2021, Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau mengabulkan banding dan memutuskan bahwa Pengadilan Negeri Batam berhak dan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara. Atas putusan ini, Perusahaan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Pada tanggal 13 Desember 2022, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dan memutuskan bahwa Pengadilan Negeri Batam berhak dan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara.

PTBBM mengajukan gugatan kepada Perusahaan dengan tuntutan:

- Kerugian materiil yang berupa biaya sewa, biaya konsultan, biaya perizinan, dan sebagainya sebesar Rp48.964;
- Kerugian imateriil yang berupa kehilangan relasi dan kepercayaan atas rekan bisnis yang diestimasikan mencapai Rp250.000.

Sidang pertama dengan agenda pemanggilan para pihak telah dilaksanakan pada tanggal 4 Januari 2023, dimana dalam proses persidangan tersebut pada tanggal 12 April 2023, Pengadilan Negeri Batam memenangkan Perusahaan sebagaimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam memutuskan bahwa PTBBM diwajibkan membayar sebesar Rp10.567 kepada Perusahaan.

Selanjutnya, PTBBM selaku Pihak Penggugat mengajukan banding. Pada tanggal 8 September 2023, Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau memutuskan mengabulkan banding dan mewajibkan Perusahaan membayar sejumlah Rp48.964. Perusahaan mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dan telah menyampaikan Memori Kasasi pada tanggal 26 September 2023.

Perusahaan telah mencadangkan kemungkinan kerugian atas tuntutan ini sebesar Rp48.964

g. Legal case of leased land to PT Batubara Mandiri (continued)

On 22 September 2021, this legal case was handled by Batam District Court which decided in favour of the Company. However, based on the Regulation of Legal Events for Regions Outside Java and Madura, Batam District court is of the opinion that this legal case should be decided by Palembang District Court. Against this decision, PTBBM filed an appeal to the Kepulauan Riau High Court.

On 29 December 2021, the Kepulauan Riau High Court granted the appeal request and decided that the Batam District Court has the right and authority to examine and decide the case. Against this decision, the Company filed an appeal to the Supreme Court.

On 13 December 2022, the Supreme Court rejected the appeal and decided that the Batam District Court had the right and authority to examine and decide the case.

PTBBM filed the lawsuit against the Company with claims:

- Material losses in rental fees, consultant fees, licensing fees and other cost amounting to Rp48,964.
- Immaterial losses in relationship and trust from business partners with estimated amounting to Rp250,000.

The first trial with an agenda for summoning the parties was held on 4 January 2023, whereas in the trial process on 12 April 2023, the Batam District Court ruled in favor of the Company as the Panel of Judges at the Batam District Court decided that PTBBM was obliged to pay Rp10,567 to the Company.

Subsequently, PTBBM, as the plaintiff filed an appeal. On 8 September 2023, the Kepulauan Riau's High Court decided to grant the appeal and requires the Company to pay the amount of Rp48,964. Regarding the High Court's decision, the Company has submitted the Memorandum of Cassation on 26 September 2023 to the Supreme Court.

The Company has made a provision for potential the losses from this claim amounting to Rp48,964.



**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/74 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

27. PERIKATAN PENTING DAN KONTINJENSI (lanjutan) 27. SIGNIFICANT COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

h. Perkara Perdata di Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI") dengan PT Dok Bahari Nusantara ("DBN")

Pada 18 September 2019, Perusahaan dan DBN telah menandatangani perjanjian pembelian dan pembangunan 3 unit kapal *harbour tug* 3200 HP. Berdasarkan perjanjian tersebut, DBN memiliki kewajiban untuk membangun dan menyerahkan kepada Perusahaan sejumlah kapal tersebut dalam kurun waktu 13 bulan dengan nilai sebesar Rp156.000.

Dikarenakan DBN tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan pembangunan kapal sesuai jangka waktu dalam perjanjian, Perusahaan telah melakukan pembatalan lebih awal terhadap perjanjian tersebut pada tahun 2021.

Pada tanggal 10 November 2022, Perusahaan telah mendaftarkan permohonan perkara perdata melalui Arbitrase di BANI atas tuntutan ganti rugi keterlambatan penyelesaian pembangunan Kapal sesuai jangka waktu di dalam Perjanjian. Tuntutan ganti rugi yang diajukan adalah sebesar Rp97.869.

Pada tanggal 8 September 2023 Majelis Arbiter telah membacakan Putusan Perkara yang memutuskan sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan Perusahaan untuk sebagian;
- Mewajibkan Perusahaan dan DBN untuk melaksanakan Kesepakatan Perdamaian tertanggal 24 Juli 2023 yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak, kecuali kewajiban untuk membayar denda oleh DBN kepada Perusahaan karena telah ditolak oleh Majelis Arbitrase;
- Menghukum DBN untuk membayar ganti kerugian atas 1 (satu) unit Kapal HT 3200 HP (DBN-042) yang telah dijual oleh DBN tanpa persetujuan Perusahaan sebesar Rp11.500 kepada Perusahaan;
- Mewajibkan Perusahaan dan DBN untuk membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan, dan biaya arbiter masing-masing ½ (seperdua) bagian;
- Mewajibkan dan memerintahkan DBN untuk membayar/mengembalikan ½ (seperdua) bagian biaya administrasi, biaya pemeriksaan, dan biaya arbiter, yaitu sebesar Rp774.333 kepada Perusahaan;
- Menolak permohonan Perusahaan untuk selebihnya;

h. Civil Case at the Indonesian National Arbitration Board with PT Dok Bahari Nusantara ("DBN")

On 18 September 2019, the Company and DBN signed an agreement to purchase and build 3 units of harbor tug 3200 HP. Based on the agreement, DBN has an obligation to build and deliver to the Company these ships within 13 months with a value of Rp156,000.

Due to DBN not being able to fulfill its obligations to complete the shipbuilding within the timeframe based on the agreement, the Company terminated the agreement earlier in 2021.

On 10 November 2022, the Company registered a request for a civil case through Arbitration at the Indonesian National Arbitration Board regarding claim for compensation of delays in the completion of the shipbuilding according to the timeframe in the Agreement. The claim for compensation that was filed amounted to Rp97,869.

On 8 September 2023, the Arbitration Panel issued its decisions as follows:

- Grant the Company's Application in part;
- Mandate the Company and DBN to implement the Settlement Agreement dated 24 July 2023 which has been made and signed by the Parties, except for the obligation to pay fines by DBN to the Company because it has been rejected by the Arbitration Panel;
- Sentence DBN to compensate for 1 (one) unit of HT 3200 HP Ship (DBN-042) which had been sold by DBN without the Company's approval in the amount of Rp11,500 to the Company;
- Mandate each of the Company and DBN pay ½ (half) portion of administration fees, inspection fees and arbitrator fees respectively;
- Mandate and order DBN to pay/to return ½ (half) of the administrative costs, examination costs and arbitrator cost, in the amount of Rp774,333 to the Company;
- Reject the Company's remaining application;



**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/75 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

27. PERIKATAN PENTING DAN KONTINJENSI (lanjutan) 27. SIGNIFICANT COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

h. Perkara Perdata di Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI") dengan PT Dok Bahari Nusantara ("DBN") (lanjutan)

- g. Mewajibkan Para Pihak untuk melaksanakan putusan ini selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung sejak putusan arbitrase a quo dibacakan;
- h. Menyatakan putusan arbitrase ini adalah putusan yang final dan mengikat kedua belah pihak serta mempunyai kekuatan hukum tetap bagi Para Pihak; dan
- i. Menetapkan agar Salinan Otentik Putusan Arbitrase ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Cirebon dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa atas biaya Perusahaan dan DBN.

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, Para Pihak sedang dalam proses melaksanakan Putusan BANI dan Kesepakatan Perdamaian.

i. Time Charter Party kapal Anchor Handling Tug Supply ("AHTS") untuk mendukung PHE ONWJ

Pada tahun 2022, Perusahaan telah menandatangani 3 (tiga) perjanjian sewa kapal dengan PHE ONWJ, masing-masing menggunakan kapal milik Perusahaan untuk periode 36 (tiga puluh enam) bulan. Adapun ketiga perjanjian sewa tersebut adalah:

- i. No. 4710005697 tertanggal 1 April 2022 untuk kapal AHTS Transko Moloko dengan nilai total Rp48.365;
- ii. No. 4710005995 tertanggal 15 Juni 2022 untuk kapal AHTS Transko Andalas dengan nilai total Rp46.177; dan
- iii. No. 4710005698 tertanggal 1 Juli 2022 untuk kapal AHTS Peteka 5401 dengan nilai total Rp37.356.

h. Civil Case at the Indonesian National Arbitration Board with PT Dok Bahari Nusantara ("DBN") (continued)

- g. Mandate the Parties to implement these decisions no later than 45 (forty five) calendar days from the date the arbitration decision was issued;
- h. Declare that this arbitration decision is final and binding to both parties and has permanent legal force for the Parties; and
- i. Order that the Authentic Copy of the Arbitration Decision be registered at the Cirebon District Court within the time limit as regulated in the provisions of Law Number 30 of 1999 regarding Arbitration and Alternative Dispute Resolution by the Company and DBN.

As at the completion date of these consolidated financial statements, the Parties in the process of implementing such BANI Decision and the Settlement Agreement.

i. Time Charter Party for Anchor Handling Tug Supply ("AHTS") vessels to Support PHE ONWJ

In 2022, the Company signed 3 (three) boat charter agreements with PHE ONWJ, each agreement using a ship owned by the Company for a period of 36 (thirty-six) months. The three rental agreements are:

- i. No. 4710005697 dated 1 April 2022 for AHTS Transko Moloko with a total value of Rp48,365;
- ii. No. 4710005995 dated 15 June 2022 for AHTS Transko Andalas with a total value of Rp46,177; and
- iii. No. 4710005698 dated 1 July 2022 for AHTS Peteka 5401 with a total value of Rp37,356.

28. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Risiko pasar

Risiko pasar adalah risiko nilai wajar arus kas masa depan suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar yang menggambarkan risiko tingkat suku bunga dan risiko mata uang asing, harga pasar mengandung dua tipe risiko: risiko tingkat suku bunga dan risiko nilai tukar mata uang asing.

28. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

Market risk

Market risk is the risk that the fair value of future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market prices which represent interest rate risk and foreign currency risk, market prices contain two types of risk: interest rate risk and foreign exchange rate risk.



**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/76 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

28. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

• **Risiko tingkat suku bunga**

Risiko tingkat suku bunga adalah risiko dimana arus kas di masa depan akan berfluktuasi karena perubahan tingkat suku bunga pasar. Grup terpengaruh risiko perubahan suku bunga pasar terutama terkait dengan kas dan setara kas, utang pembiayaan konsumen, liabilitas sewa pembiayaan dan pinjaman bank jangka panjang yang dimiliki Grup.

Tidak ada kebijakan formal untuk lindung nilai sehubungan dengan eksposur tingkat suku bunga, eksposur terhadap risiko tingkat suku bunga dipantau secara berkelanjutan.

Pada tanggal 31 Desember 2023, jika tingkat suku bunga pinjaman lebih tinggi/lebih rendah sebesar 100 basis poin dengan semua variabel konstan, laba sebelum pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 akan lebih rendah/tinggi sebesar Rp138 terutama sebagai akibat lebih tinggi/lebih rendah biaya bunga atas pinjaman dengan tingkat bunga mengambang.

• **Risiko nilai tukar mata uang asing**

Risiko nilai tukar mata uang asing adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan nilai tukar mata uang asing. Risiko yang dihadapi oleh Grup sebagai akibat fluktuasi nilai tukar terutama terkait dengan kas dan setara kas, piutang usaha, piutang sewa pembiayaan, utang usaha, liabilitas kontrak dan pinjaman jangka panjang dalam mata uang Dolar AS.

Pada tanggal 31 Desember 2023, jika nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS melemah/menguat sebanyak 1% dengan semua variabel konstan, laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 akan lebih tinggi/rendah sebesar Rp2.587.

Risiko kredit

Pada tanggal pelaporan, eksposur maksimum Grup terhadap risiko kredit adalah sebesar nilai tercatat masing-masing kategori dari aset keuangan yang disajikan pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Untuk mengukur KKE, piutang usaha dan kontrak aset telah dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit gabungan dan waktu jatuh tempo.

28. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

• **Interest rate risk**

Interest rate risk is the risk that the future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates. The Group's exposure to the risk of changes in market interest rates relates primarily to the Group's cash and cash equivalents, consumer finance liability, finance lease liabilities and long-term bank loans.

There is no formal hedging policy with respect to the interest rate exposure, exposure to interest rate is monitored on an ongoing basis.

As at 31 December 2023, had the interest rates of the loans and borrowings been 100 basis points higher/lower with all other variables held constant, income before corporate income tax for the year ended 31 December 2023 would have been Rp138 lower/higher, accordingly, mainly as a result of higher/lower interest charges on the loans and borrowings with floating interest rates.

• **Foreign exchange rate risk**

Foreign exchange rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in foreign exchange rates. The Group's exposure to exchange rate fluctuations results primarily from US Dollar denominated cash and cash equivalent, trade receivables, finance lease receivables, trade payables, contract liabilities and long-term borrowings.

As at 31 December 2023, had the exchange rate of the Rupiah against US Dollar depreciated/appreciated by 1%, with all other variables held constant, profit before final and income tax for the year ended 31 December 2023 would have been Rp2,587 higher/lower.

Credit risk

At the reporting date, the Group's maximum exposure to credit risk is represented by the carrying amount of each class of financial assets presented in the consolidated statement of financial position.

To measure the ECL, trade receivables and contract assets have been grouped based on shared credit risk characteristics and the days past due.



**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/77 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

28. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko kredit (lanjutan)

Tarif kerugian ekspektasian adalah berdasarkan profil pembayaran penjualan masing-masing selama periode 24 bulan sebelum 31 Desember 2023 atau 2022 dan kerugian kredit historis terkait yang dialami dalam periode ini. Tarif historis kerugian disesuaikan dengan informasi pada saat ini dan dimasa depan atas faktor makroekonomi yang mempengaruhi kemampuan pelanggan untuk melunasi piutangnya. Grup telah mengidentifikasi harga minyak mentah sebagai faktor yang paling relevan dan menyesuaikan tarif kerugian historis berdasarkan perubahan yang diekspektasi pada faktor tersebut.

Pada tanggal 31 Desember 2023, piutang usaha sebesar Rp1.070.123 (2022: Rp1.388.265) mengalami penurunan nilai dan telah diprovokasi sebesar Rp107.280 (2022: Rp103.492).

Pada tanggal 31 Desember 2023, aset kontrak sebesar Rp1.559.275 (2022: Rp1.280.749) mengalami penurunan nilai dan telah diprovokasi sebesar Rp4.251 (2022: Rp3.544).

Risiko likuiditas

Risiko likuiditas didefinisikan sebagai risiko saat posisi arus kas Grup menunjukkan bahwa pendapatan jangka pendek tidak cukup untuk menutupi pengeluaran jangka pendek.

Kebutuhan likuiditas kas Grup terutama berasal dari kebutuhan untuk melakukan pembayaran biaya operasional kapal dan pelunasan atas pinjaman bank jangka panjang. Sumber dana pembayaran berasal dari kontrak sewa kapal jangka pendek, menengah dan panjang dan pendanaan yang diperoleh melalui pinjaman bank jangka panjang.

Grup secara rutin mengevaluasi proyeksi arus kas dan arus kas aktual dan terus menerus menjaga kestabilan hari pembayaran utang dan penerimaan piutangnya.

Tabel berikut ini menunjukkan profil jangka waktu pembayaran liabilitas keuangan Grup berdasarkan pembayaran kontraktual dalam kontrak:

28. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Credit risk (continued)

The expected loss rates are based on the payment profiles of sales over a period of 24 months before 31 December 2023 or 2022, respectively and the corresponding historical credit losses experienced within this period. The historical loss rates are adjusted to reflect current and forward-looking information on macroeconomic factors affecting the ability of the customers to settle the receivables. The Group has identified the crude oil prices to be the most relevant factor and accordingly adjusts the historical loss rates based on expected changes in this factor.

As at 31 December 2023, trade receivables of Rp1,070,123 (2022: Rp1,388,265) were impaired and had been provided for with an amount of Rp107,280 (2022: Rp103,492).

As at 31 December 2023, contract assets of Rp1,559,275 (2022: Rp1,280,749) were impaired and had been provided for with an amount of Rp4,251 (2022: Rp3,544).

Liquidity risk

The liquidity risk is defined as a risk when the cash flow position of the Group indicates that the short-term revenue is not enough to cover the short-term expenditure.

The Group's liquidity requirements mainly come from payments and repayments of long-term borrowings vessel operation costs. The source of funds to fulfil the repayment of long-term bank loans is from contractual rental with third parties in the short, medium and long-term and funds obtained from long-term bank loans.

The Group evaluates its projected and actual cash flow information and continuously maintain its payables and receivables days' stability.

The table below summarises the maturity profile of the Group's financial liabilities based on contractual payments:



**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/78 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

28. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

28. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko likuiditas (lanjutan)

Liquidity risk (continued)

	<u>< 1 tahun/ < 1 year</u>	<u>1 - 2 tahun/ 1 - 2 years</u>	<u>2 - 3 tahun/ 2 - 3 years</u>	<u>> 3 tahun/ > 3 years</u>	<u>Jumlah/ Total</u>
31 Desember 2023					
Liabilitas keuangan					
Utang usaha					
- Pihak berelasi	935,385	-	-	-	935,385
- Pihak ketiga	91,727	-	-	-	91,727
Biaya yang masih harus dibayar	1,190,973	-	-	-	1,190,973
Utang dividen	-	64	-	-	64
Liabilitas kontrak					
- Pihak berelasi	41,153	-	-	-	41,153
- Pihak ketiga	192,382	-	-	-	192,382
Liabilitas sewa	352,878	95,956	54,035	52,400	555,269
Pinjaman jangka panjang	353,288	241,733	140,761	182,196	917,978
Jumlah	3,157,786	337,753	194,796	234,596	3,924,931

31 December 2023
Financial liabilities
Trade payables
Related parties -
Third parties -
Accrued expenses
Dividend payables
Contract liabilities
Related parties -
Third parties -
Lease liabilities
Long-term borrowings

Total

	<u>< 1 tahun/ < 1 year</u>	<u>1 - 2 tahun/ 1 - 2 years</u>	<u>2 - 3 tahun/ 2 - 3 years</u>	<u>> 3 tahun/ > 3 years</u>	<u>Jumlah/ Total</u>
31 Desember 2022					
Liabilitas keuangan					
Utang usaha					
- Pihak berelasi	909,546	-	-	-	909,546
- Pihak ketiga	117,952	-	-	-	117,952
Biaya yang masih harus dibayar	1,627,080	-	-	-	1,627,080
Utang dividen	64	-	-	-	64
Liabilitas kontrak					
- Pihak berelasi	20,136	-	-	-	20,136
- Pihak ketiga	87,084	-	-	-	87,084
Liabilitas sewa	362,828	83,529	-	-	446,357
Pinjaman jangka panjang	264,816	333,894	215,434	249,846	1,063,990
Jumlah	3,389,506	417,423	215,434	249,846	4,272,209

31 December 2022
Financial liabilities
Trade payables
Related parties -
Third parties -
Accrued expenses
Dividend payables
Contract liabilities
Related parties -
Third parties -
Lease liabilities
Long-term borrowings

Total

Estimasi nilai wajar

Nilai wajar adalah suatu jumlah dimana suatu aset dapat dipertukarkan atau suatu liabilitas diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Aset dan liabilitas keuangan lancar Perusahaan diharapkan akan dapat direalisasi atau diselesaikan dalam jangka waktu dekat, kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar. Oleh karena itu, nilai tercatatnya mendekati nilai wajarnya.

Fair value estimation

Fair value is the amount for which an asset could be exchanged or liability settled between knowledgeable and willing parties in an arm's length transaction.

The Company's current financial assets and liabilities are expected to be realised or settled in the near term, except for financial assets which are measured at fair value. Therefore, their carrying amounts approximate their fair value.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/79 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

28. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Estimasi nilai wajar (lanjutan)

Perusahaan menganalisis aset keuangan yang diukur pada nilai wajar, Perbedaan pada setiap tingkatan metode penilaian dijelaskan sebagai berikut:

- Harga dikutip (tidak disesuaikan) dari pasar yang aktif untuk aset dan liabilitas yang identik (Tingkat 1);
- Input selain harga yang dikutip dari pasar yang disertakan pada Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung (yaitu sebagai sebuah harga) atau secara tidak langsung (yaitu sebagai turunan dari harga) (Tingkat 2); dan
- Input untuk aset atau liabilitas yang tidak didasarkan pada data pasar yang dapat diobservasi (informasi yang tidak dapat diobservasi) (Tingkat 3).

Hirarki nilai wajar Grup pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

28. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Fair value estimation (continued)

The Company analyses its financial assets which are measured at fair value. The different levels of valuation methods have been defined as follows:

- Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities (Level 1);
- Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (that is, as prices) or indirectly (that is, derived from prices) (Level 2); and
- Inputs for the assets or liability that are not based on observable market data (that is, unobservable input) (Level 3).

The Group's fair value hierarchy as of 31 December 2023 is as follows:

	2023		
	Harga pasar yang dikuotasi untuk aset dan liabilitas yang sama (Tingkat 1)/Quoted prices in active markets for identical assets or liabilities (Level 1)	Input yang signifikan dan dapat diobservasi secara langsung (Tingkat 2)/ Significant and observable inputs, direct or indirectly (Level 2)	Input yang signifikan tetapi tidak dapat diobservasi (Tingkat 3)/ Significant unobservable inputs (Level 3)
Jumlah/Total			
Penyertaan saham/Investments in shares	6,652	-	6,652
Jumlah/Total	6,652	-	6,652

29. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN

Pada tanggal 31 Desember 2023, Grup mengklasifikasikan kas dan setara kas, kas yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha, kontrak aset dan piutang sewa pembiayaan sebesar Rp4.386.003 (2022: Rp3.734.678) sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang, serta mengklasifikasikan penyertaan saham sebesar Rp6.652 (2022: Rp6.661) sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Pada tanggal 31 Desember 2023, Grup mengklasifikasikan utang usaha, biaya yang masih harus dibayar, kontrak liabilitas, utang dividen, liabilitas sewa, pinjaman jangka panjang sebesar Rp3.996.624 (2022: Rp4.153.066) sebagai liabilitas keuangan yang dicatat pada biaya amortisasi.

29. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES

As at 31 December 2023, the Group classified its cash and cash equivalents, restricted cash, trade receivables, contract assets and finance lease receivables amounting to Rp4,386,003 (2022: Rp3,734,678) as loans and receivables, and classified its investment in shares amounting to Rp6,652 (2022: Rp6,661) as financial assets measured at fair value through other comprehensive income.

As at 31 December 2023, the Group classified its trade payables, accrued expenses, contract liabilities, dividend payables, lease liabilities, long-term borrowings amounting to Rp3,996,624 (2022: Rp4,153,066) as financial liabilities measured at amortised cost.

**PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES**

Lampiran 5/80 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2023**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

30. INFORMASI TAMBAHAN KAS

30. SUPPLEMENTAL CASH FLOW INFORMATION

Transaksi non-kas

Non-cash transactions

	2023	2022	
Perolehan aset hak guna melalui sewa	(591,984)	(437,024)	Acquisition of right of use assets through lease liabilities
Perolehan aset tetap melalui peningkatan utang usaha	(27,520)	(25,483)	Acquisition of fixed assets through increase in trade payables
Perolehan aset tetap melalui penerbitan saham	-	(121,709)	Acquisition of fixed assets through issuance of shares
Perolehan aset lain-lain melalui penerbitan saham	-	(6,893)	Acquisition of other assets through issuance of shares
Perolehan aset tetap melalui peningkatan biaya masih harus dibayar	-	(81)	Acquisition of fixed assets through increase in accrued expenses
Dividen dideklarasikan yang belum dibayarkan	-	64	Dividend declared which have not been paid

Rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan

Reconciliation of liabilities from financing activities

Tabel di bawah ini menunjukkan rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari pendanaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut:

The below table sets out a reconciliation of liabilities arising from financing activities for the years ended 31 December 2023 dan 2022 as follows:

	Liabilitas sewa/ Lease liabilities	Pinjaman bank jangka panjang/ Long-term bank loan	Jumlah/ Total	
1 Januari 2022	273,981	1,237,384	1,511,365	1 January 2022
Arus kas masuk	-	452,399	452,399	Cash inflows
Arus kas keluar	(274,620)	(744,038)	(1,018,658)	Cash outflows
Penambahan liabilitas sewa	437,024	-	437,024	Addition of lease liabilities
Efek perubahan lainnya	-	9,074	9,074	Other adjustment effect
31 Desember 2022	436,385	954,819	1,391,204	31 December 2022
Arus kas masuk	-	51,761	51,761	Cash inflows
Arus kas keluar	(505,481)	(273,641)	(779,122)	Cash outflows
Penambahan liabilitas sewa	591,984	-	591,984	Addition of lease liabilities
Efek perubahan lainnya	-	(977)	(977)	Other adjustment effect
31 Desember 2023	522,888	731,962	1,254,850	31 December 2023

Charting New Horizons: **Energizing the Marine Industry**

Memetakan Cakrawala Baru:
Memberi Energi pada Industri Kelautan



PT Pertamina Trans Kontinental

Jl. Yos Sudarso No. 32-34
Jakarta Utara 14320, Indonesia

☎ (+6221) 80678500
✉ pusat.ptk@pertamina.com



pertamina-ptk.com